

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025 – 2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026

Pasal 3

- (1) RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:
 - a. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2026;
 - b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
 - c. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 4

RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 5

Ketentuan mengenai RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2025
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan pembangunan daerah lima tahunan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan, maka dalam proses penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selain itu, juga berorientasi terhadap substansi yang menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029. RPJMD 2025-2029 ini sendiri merupakan tahapan lima tahun pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Sebagaimana telah diketahui bersama, pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia telah melantik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih atas nama Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Periode Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tema pembangunan Kota Semarang tahun 2026 difokuskan pada “Penguatan Ketahanan Pangan Kota Yang Berkelanjutan dan Peningkatan

Kualitas Lingkungan Hidup”. RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Semarang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di mana akan menjadi landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Tahapan proses penyusunan RKPD tahun 2026 digambarkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2026

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044;
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang;
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031;
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031;
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

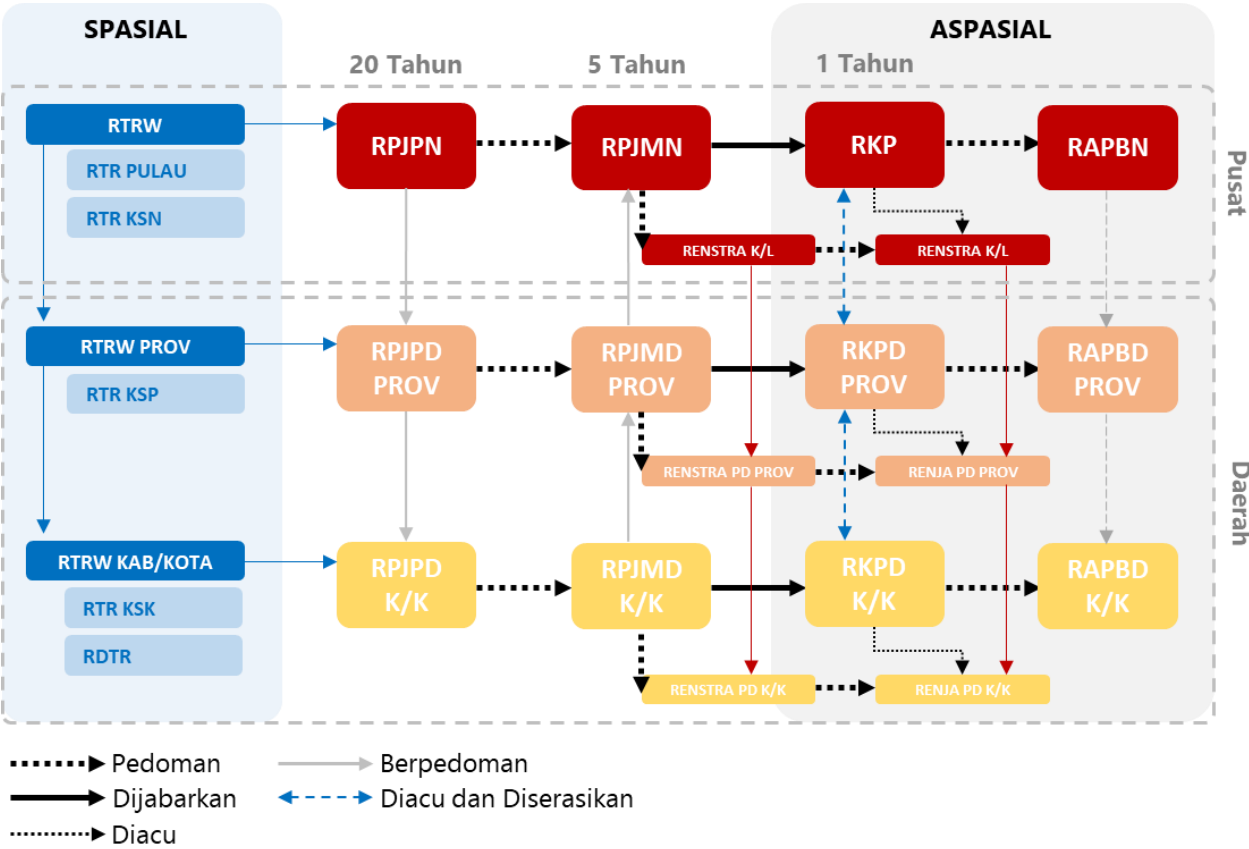
Dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan yang tepat, Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan jangka panjang yang termaktub dalam RPJPD dimana di dalamnya menjelaskan visi, misi, arah, dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun. Selanjutnya, RPJPD ditorehkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau 5 tahunan pada RPJMD yang kemudian dijabarkan kedalam tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahapan dalam bentuk RKPD. Sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga. RKPD juga diselaraskan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. RKPD selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Renja PD yang menjadi pedoman penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Berikutnya, dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota dan DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2024. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk menjamin akuntabilitas dan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Semarang menggunakan sistem berbasis website yang saling terintegrasi mulai dari perencanaan dan penganggaran, dan sistem informasi lain yang terkait di Kota Semarang.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mempedomani Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Akhir

Peraturan Wali Kota Semarang tentang RKPD Tahun 2026 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Penyusunan RKPD ini mengacu juga kepada nomenklatur pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 juga memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Aspek keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu dengan melakukan penyelarasan terhadap prioritas pembangunan terutama untuk wilayah Kota Semarang. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, terutama pada Agenda Pembangunan dan Arah Pembangunan Wilayah, sehingga dapat diselaraskan dengan target-target pembangunan RKPD Kota Semarang. Selain itu, dalam penyusunannya, RKPD ini juga memperhatikan dokumen-dokumen sektoral lainnya yang berkaitan dengan target-target pembangunan daerah. Keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Berkaitan dengan dokumen kewilayahan, penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang di dalamnya berisi tentang pola pengembangan zonasi kewilayahan. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kota Semarang berdasarkan potensi wilayahnya serta menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Semarang. Selanjutnya dokumen perencanaan multisektor di tingkat Kota Semarang yang terkait dengan RKPD tahun 2026. Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka penentuan tema pembangunan di tahun 2026.



Gambar 1.2 Hubungan antara RPKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan daerah, serta sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem pangan kota yang berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Semarang Tahun 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026; dan
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. Kaidah Pelaksanaan

Tujuan dari kaidah pelaksanaan pada bab ini adalah sebagai pedoman kepada seluruh stakeholder khususnya dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, perubahan rencana pembangunan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu, serta pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan. Kaidah pelaksanaan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2026 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun yang disusun dengan mendasarkan kepada tema pembangunan, permasalahan, isu strategis, potensi, prioritas dan target yang telah ditetapkan. RKPD Kota Semarang juga disinkronkan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Nasional. Prioritas pada RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2025-2029.
2. RKPD Tahun 2026 menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2026, serta menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
3. Perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan peraturan terbaru tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dokumen RKPD Kota Semarang 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 dan realisasi capaian terhadap target RPJMD 2021-2026, serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dihadapi.
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai dengan tahun 2024 serta perkiraan tahun 2026-2027, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, keterkaitannya dengan RPJMD dan RPJPD, serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
BAB VII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

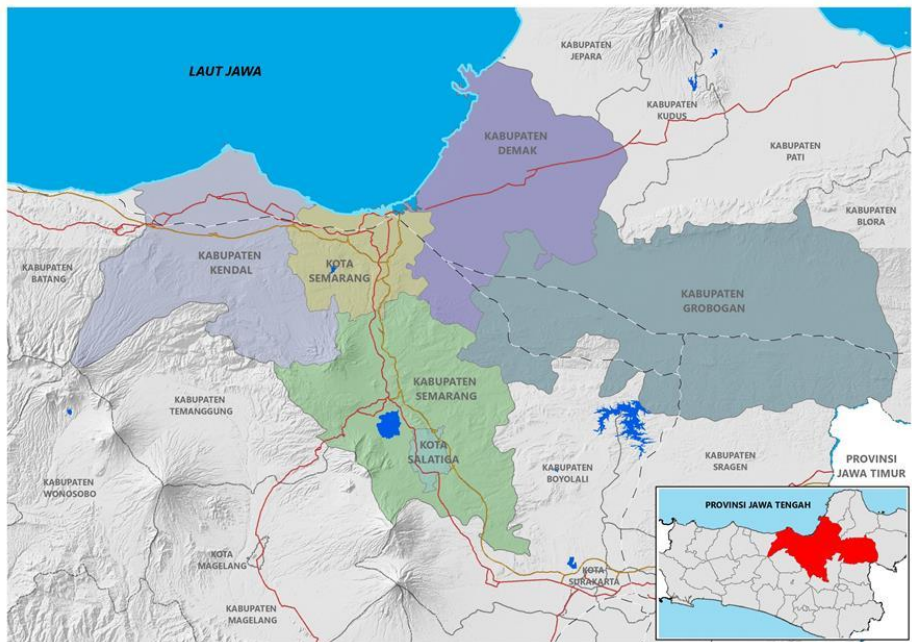
Analisis aspek geografis di Kota Semarang bertujuan untuk memahami karakter lokasi dan wilayah, potensi pengembangan kawasan, serta tingkat kerentanan terhadap bencana. Sementara itu, kondisi demografis digambarkan melalui dinamika jumlah penduduk, struktur populasi, dan distribusi masyarakat, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan kelompok, dalam kurun waktu tertentu di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Semarang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi mencakup antara lain perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Semarang.

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

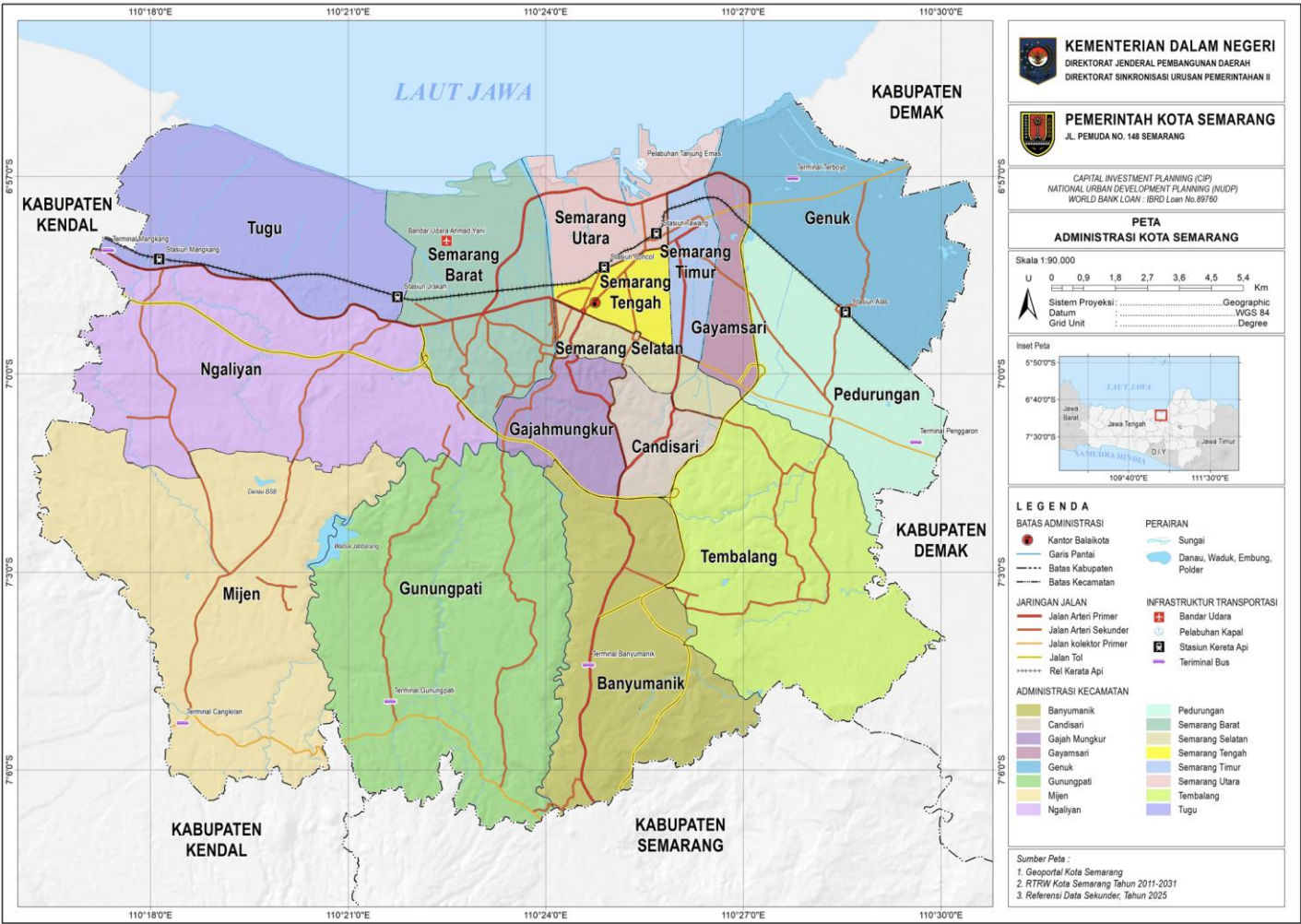


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang dan Sekitarnya

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,78 km² dan merupakan 1,14% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:

- sebelah barat : Kabupaten Kendal
- sebelah timur : Kabupaten Demak
- sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- sebelah utara : Laut Jawa



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kota Semarang

Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

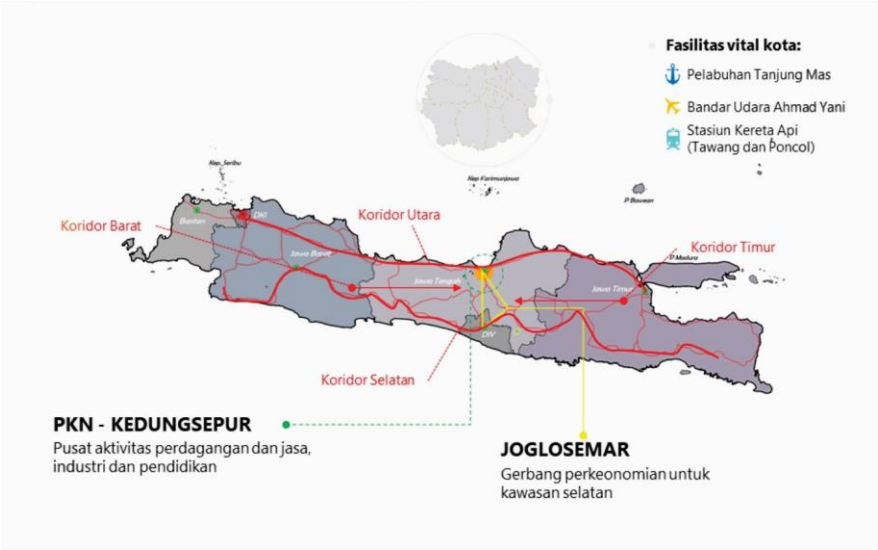
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km2)
1	Mijen	14	56,52
2	Gunungpati	16	58,27
3	Banyumanik	11	29,74
4	Gajahmungkur	8	9,34
5	Semarang Selatan	10	5,95
6	Candisari	7	6,40
7	Tembalang	12	39,47
8	Pedurungan	12	21,11
9	Genuk	13	25,98
10	Gayamsari	7	6,22
11	Semarang Timur	10	5,42
12	Semarang Utara	9	11,39
13	Semarang Tengah	15	5,17
14	Semarang Barat	16	21,68
15	Tugu	7	28,13
16	Ngaliyan	10	42,99
	TOTAL	177	373,78

Sumber:BPS Kota Semarang, 2024

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak pada garis $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Kota Semarang juga memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor Pantai Utara; koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu; koridor timur ke arah Kabupaten Demak/Kabupaten Grobogan; dan koridor barat menuju Kabupaten Kendal.



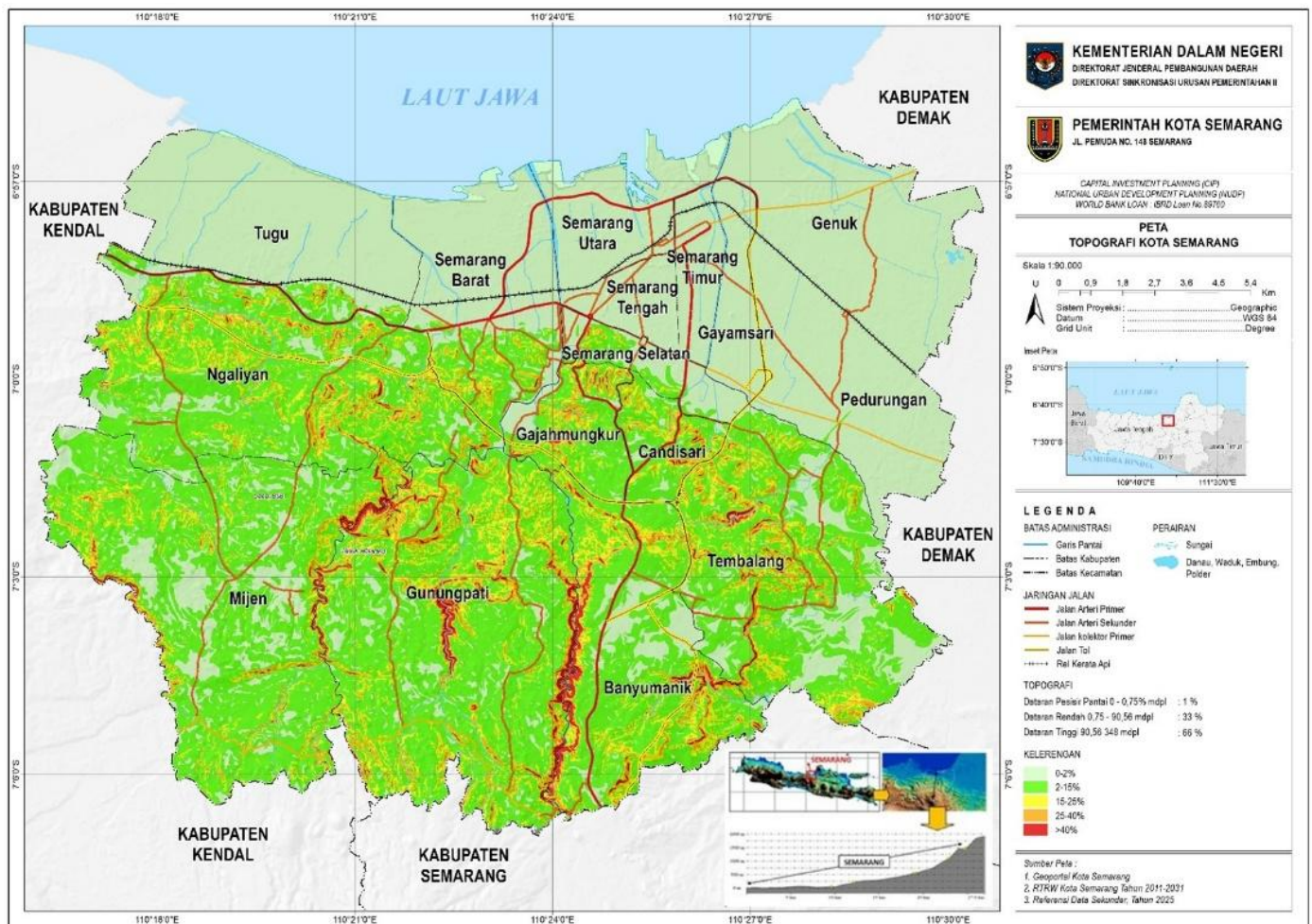
Sumber:BPS Kota Semarang, 2024

Gambar 2.3 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk ke dalam wilayah Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

c. Topografi

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%.



Gambar 2.4 Topografi Kota Semarang

Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis keterlereng antara lain:

1. Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
2. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
3. Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah Kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari.
4. Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.

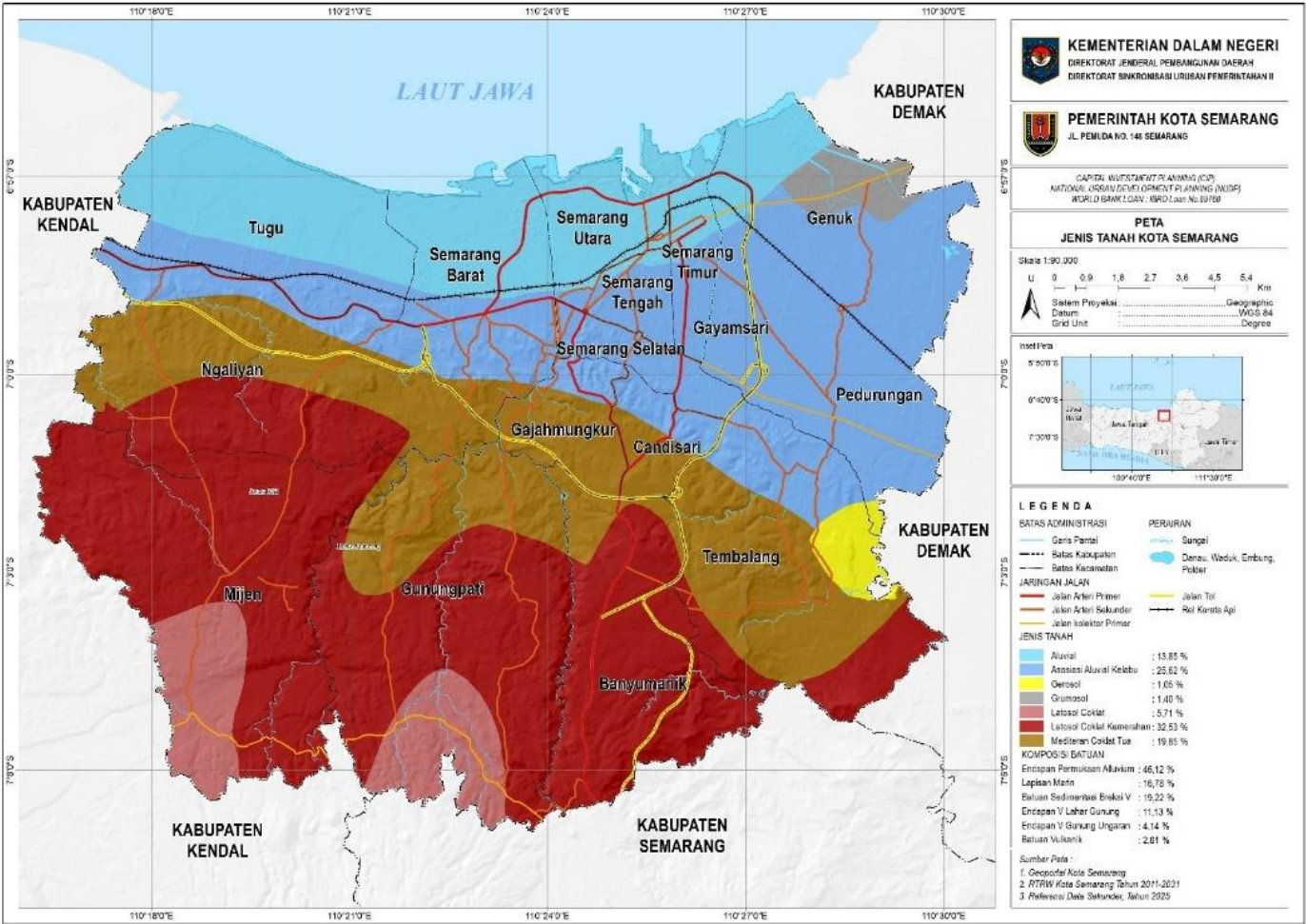
Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas

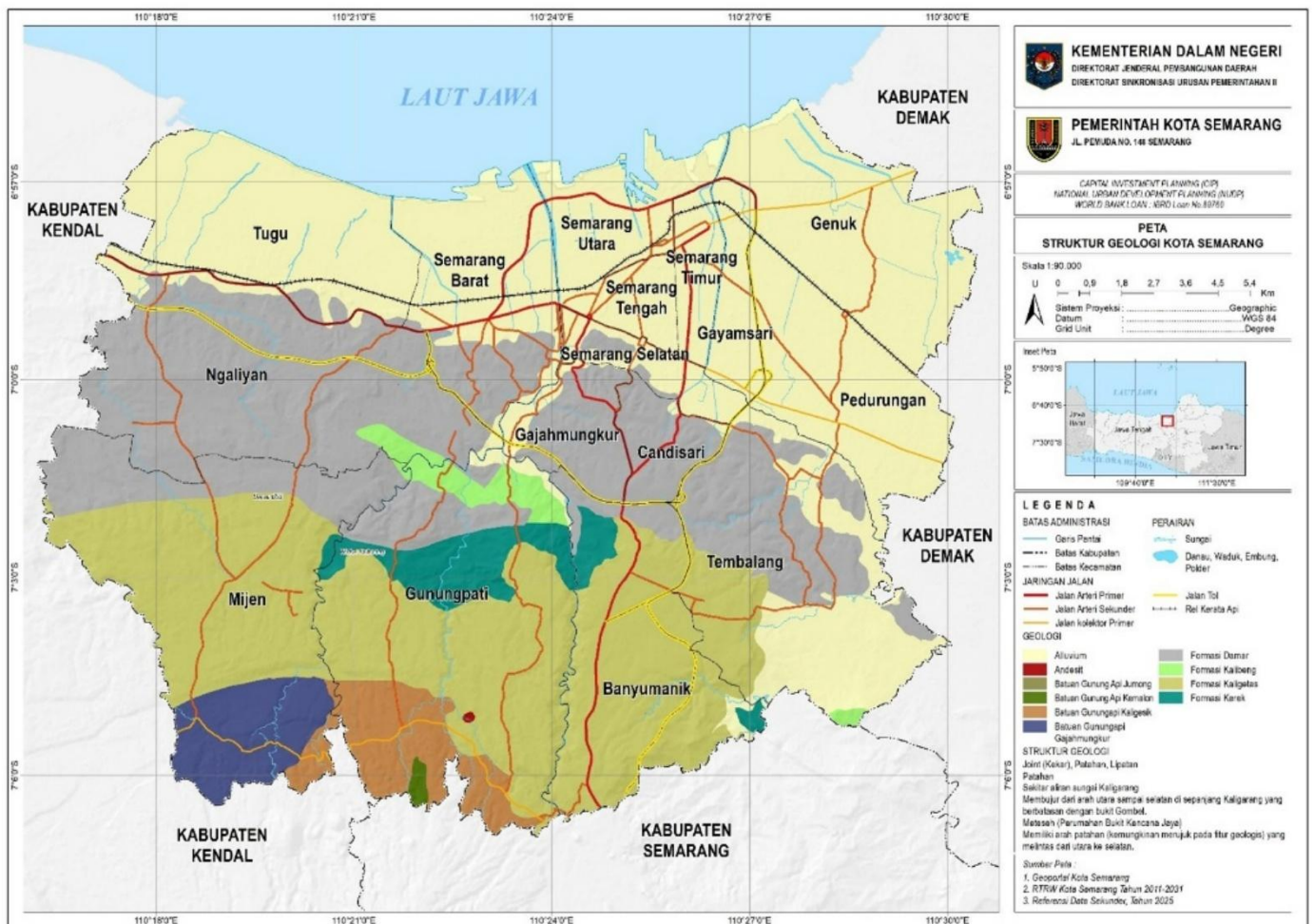
daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota Bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan di bagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%.

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl.

d. Geologi



Gambar 2.5 Jenis Tanah dan Struktur Geologi Kota Semarang



Gambar 2.6 Struktur Geologi Kota Semarang

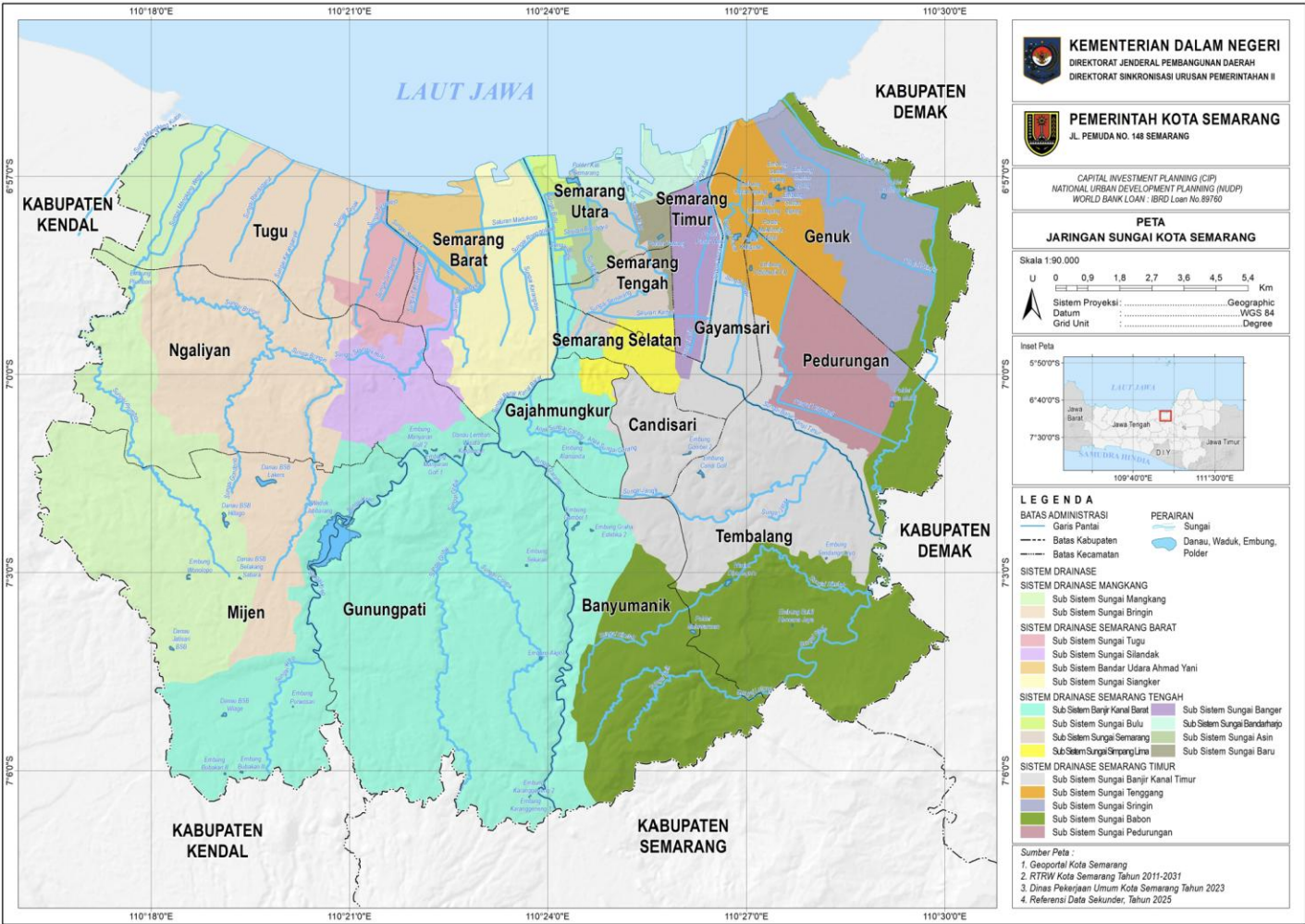
Kondisi geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur *joint* (kekar), patahan (*fault*), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erodif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Daerah patahan tersebut antara lain daerah sekitar aliran Kaligarak yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarak yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari arah utara ke selatan.

Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua, sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.

e. Hidrologi

Posisi dan peran strategis terkait potensi air di Kota Semarang bersumber dari sungai-sungai yang mengalir di Kota Semarang, antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjir Kanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata air di Gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Sungai-sungai tersebut dikelola dalam 11 DAS, yaitu DAS Tugu, DAS Babon, DAS Banjir Kanal Barat, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Barat, DAS Bringin, DAS Blorong, DAS Plumbon, DAS Silandak, DAS Tengah dan DAS Timur yang terbagi ke dalam 4 sistem besar drainase, yaitu:

1. Sistem Drainase Mangkang, terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon); dan Sub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak).
2. Sistem Drainase Semarang Barat, terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambakharjo dan Sungai Tugurejo); Sub Sistem Sungai Silandak; Sub Sistem Sungai Siangker (meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker); dan Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani (Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng).
3. Sistem Drainase Semarang Tengah, terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem Sungai Banger, Sub Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai Baru.
4. Sistem Drainase Semarang Timur, terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, dan Sungai Kedungmundu), Sub Sistem Sungai Tenggang, Sub Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedor), Sub Sistem Sungai Pedurungan.



Gambar 2.7 Hidrologi Kota Semarang

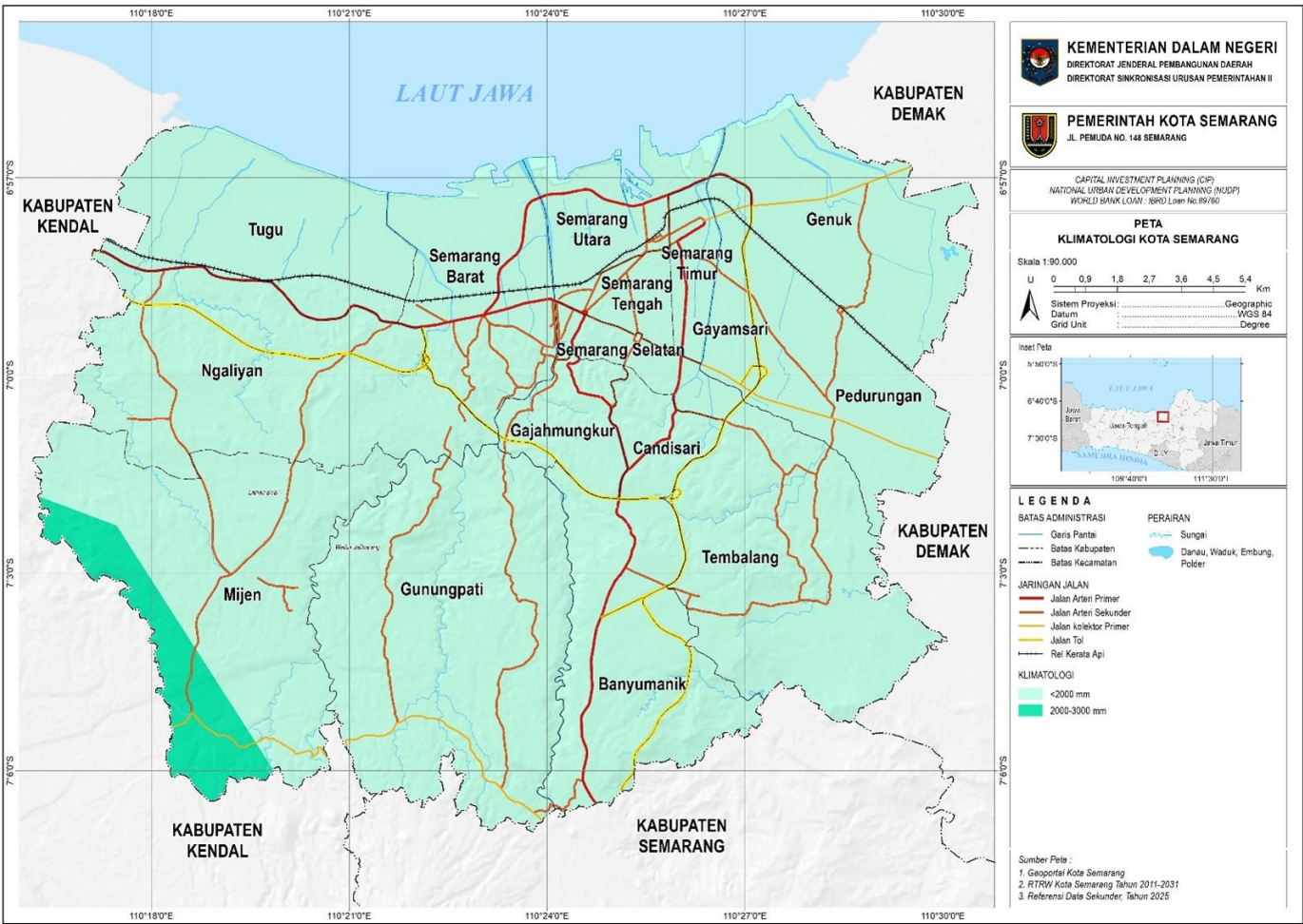
Kota Semarang juga memiliki polder, waduk, dan embung yang terdistribusi di beberapa daerah di Kota Semarang. Waduk Jatibarang memiliki volume paling besar dalam menyediakan air baku dan sekaligus berperan sebagai pengendali banjir di Kota Semarang. Saat ini, peran Waduk Jatibarang semakin meluas, selain sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir, waduk ini juga dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata di Kota Semarang. Lokasinya yang dekat dengan objek wisata Goa Kreo, menjadi salah satu pendukung pengembangan pariwisata. Selain Waduk Jatibarang, waduk dan embung lainnya juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata, seperti Waduk Diponegoro dan Embung Bukit Semarang Baru. Selain itu, potensi sumber daya air di Kota Semarang juga ditunjang dengan ketersediaan cadangan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) di Kota Semarang terdapat pada akuifer dangkal dan dalam, terdapat di wilayah bagian selatan dan cenderung daerah yang tinggi seperti Tembalang, Ngaliyan dan Mijen merupakan kecamatan dengan cekungan air tanah paling luas dan potensial.

f. Klimatologi

Secara klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembapan relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di

periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembapan lebih rendah, dan jarang mendung.

Total dan rata-rata curah hujan di Kota Semarang di tahun 2020 sebesar 2.507,70 Mm dan 208,98 per bulan menurun di tahun 2021 dengan total curah hujan 2.479 Mm dan rata-rata 206,58 Mm per bulan lalu meningkat di tahun 2022 dan 2023. Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan 2.664 Mm dan rata-rata 222 Mm per bulan di tahun 2023. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1°C pada September ke 24,6°C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9°C ke 32,9°C. Kelembapan relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.



Gambar 2.8 Klimatologi Kota Semarang

Tabel 2.2 Curah Hujan Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Bulan	Curah Hujan (Mm)				
		2020	2021	2022	2023*	2024*
1	Januari	301,30	273,00	329,00	329,00	329,00
2	Februari	393,20	694,00	337,00	337,00	337,00
3	Maret	231,80	122,00	165,00	165,00	165,00
4	April	291,60	131,00	134,00	134,00	134,00
5	Mei	267,40	205,00	191,00	191,00	191,00
6	Juni	22,10	134,00	231,00	231,00	231,00
7	Juli	71,80	15,00	126,00	126,00	126,00
8	Agustus	56,40	65,00	82,00	82,00	82,00
9	September	90,80	199,00	121,00	121,00	121,00
10	Oktober	160,80	119,00	307,00	307,00	307,00
11	November	240,40	349,00	284,00	284,00	284,00
12	Desember	380,10	173,00	357,00	357,00	357,00
TOTAL		2.507,70	2.479,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
RATA-RATA		208,98	206,58	222,00	222,00	222,00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2024

Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global berdampak pada kehidupan makhluk hidup, terjadinya bencana alam, wabah penyakit, serta fenomena lainnya. Kota Semarang pada tahun 2018 telah menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim, serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2019.

Pada tahun 2024, penurunan emisi GRK sudah mencapai 601.575,66 Ton CO2e dengan penurunan emisi terbesar pada sektor pertanian sebesar 38,74 % setara dengan 233.058,92 Ton CO2e. Proporsi sumber emisi lainnya yakni dari sektor transportasi 29,14% atau 175.302,32 Ton CO2e , persampahan 18,95% atau 114.017,03 Ton CO2e, energi 5,81% atau 34.953,10 Ton CO2e, kehutanan dan lahan gambut sebesar 4,16% atau setara 25.053,72 Ton CO2e dan sektor blue carbon 3,19% atau 19.190,57 Ton CO2e.

2.1.1.2. Zonasi Pola Ruang Kota Semarang

Mendasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana perubahan atas Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, zona wilayah Kota Semarang meliputi kawasan antara lain:

a. Kawasan Peruntukan Lindung

Merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan tersebut mencakup:

1. Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
2. Kawasan Perlindungan Setempat
3. Ruang Terbuka Hijau
4. Kawasan Cagar Budaya

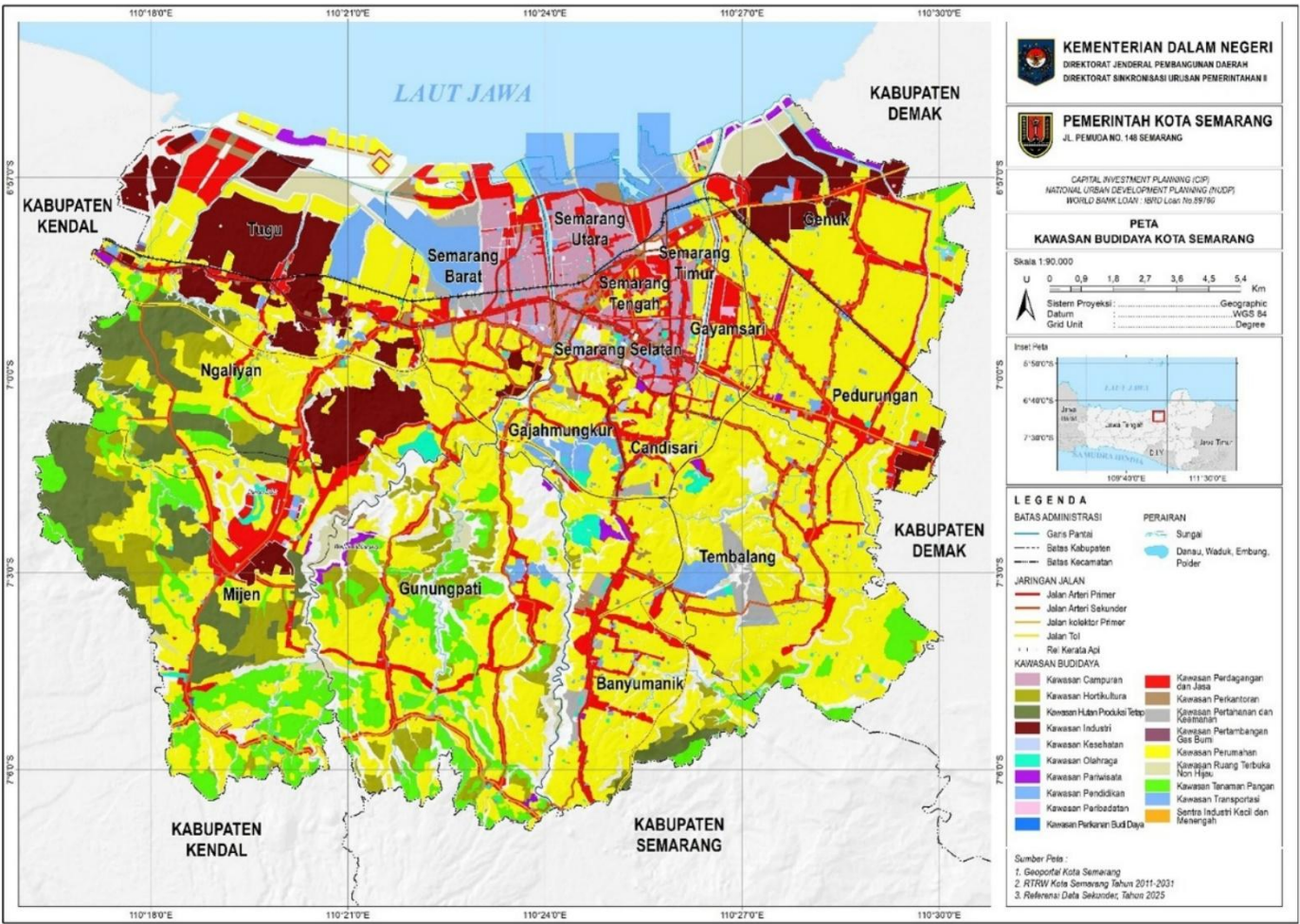
5. Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi:
 - a. Kawasan Rawan Bencana Rob disebabkan karena kondisi DAS yang tidak tertata, penurunan tanah (*land subsidience*) 6-10 cm dan penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan dikelola dengan baik.
 - b. Kawasan Rawan Bencana Abrasi, adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
 - c. Kawasan Rawan Bencana Banjir, adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.
 - d. Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor, adalah Wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.
 - e. Kawasan Bencana Angin Topan, adalah Wilayah Kota Semarang yang terkena bencana angin topan yang dulunya merupakan garis pantai Kota Semarang.

b. Kawasan Budidaya

Adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Rencana Kawasan budidaya bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kota Semarang. Rencana pola ruang ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan. Kawasan budidaya ini mencakup:

1. Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 2.171 ha berupa kawasan hutan produksi tetap;
2. Kawasan perumahan meliputi:
 - a. Perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota yaitu di BWK I, BWK II, BWK III, BWK V.
 - b. Perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di BWK IV, BWK VI, BWK VII, BWK X khusus Kecamatan Tugu.
 - c. Perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di BWK VIII, BWK IX dan BWK X khusus Kecamatan Ngaliyan.;
3. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi, perdagangan dan jasa skala regional/nasional/internasional, perdagangan dan jasa skala kota, perdagangan dan jasa skala BWK, perdagangan dan jasa skala lingkungan. Pengembangan kawasan perkantoran meliputi kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
4. Pengembangan kawasan pendidikan berupa rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan pendidikan unggulan di wilayah Kota;
5. Rencana kawasan industri: Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Genuk;
6. Pengembangan kawasan olah raga;

7. Rencana kawasan wisata: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
8. Rencana kawasan transportasi;
9. Kawasan pertahanan keamanan;
10. Rencana kawasan peruntukan pertanian;
11. Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 2.893 ha meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, dan Tugu.
12. Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 2.102 ha meliputi Kecamatan Tembalang, Gunungpati, Mijen, dan Ngaliyan;
13. Pengembangan fasilitas peternakan;
14. Kawasan peruntukan perikanan: perikanan tangkap, perikanan budaya, dan pengolahan Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tugu;
15. Kawasan pelayanan umum meliputi kawasan fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, serta fasilitas keamanan dan keselamatan;
16. Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) meliputi RTNH lingkungan bangunan, RTNH skala sub-kawasan dan kawasan, RTNH wilayah kota, dan RTNH fungsi tertentu.



Gambar 2.9 Kawasan Budidaya Kota Semarang

c. Kawasan Strategis

Agar tetap terjaga keterpaduan pembangunan lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemerintah, swasta dan masyarakat, serta hasil pembangunan tidak semakin mempertajam kesenjangan antar wilayah dan menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, maka perlu kiranya keselarasan rencana

program pembangunan dengan rencana penataan ruang, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengembangan kawasan strategis di Kota Semarang meliputi:

1. Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi;
2. Pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas;
3. Pengembangan kawasan Waduk Jatibarang;
4. Pengembangan kawasan Reklamasi Pantai;
5. Peningkatan kawasan Masjid Agung Semarang;
6. Peningkatan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah;
7. Peningkatan kawasan Pendidikan;
8. Peningkatan kawasan Gedong Batu;
9. Pengembangan kawasan Kota Lama;
10. Pengembangan Kawasan Semarang Lama;
11. Pengembangan Kawasan Kampung Bahari;
12. Pengembangan Kawasan Perbatasan Kota;
13. Pengembangan Kawasan pariwisata.

2.1.1.3. Demografi

Perkembangan demografi Kota Semarang selama 20 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan meningkat. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 yang tercatat pada BPS mencapai 1.702.379 jiwa, sementara di tahun 2000 jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1,3 juta jiwa. Artinya, dalam kurun 20 tahun terakhir terjadi pertambahan penduduk sekitar 400 ribu jiwa akibat migrasi maupun kelahiran. Mengikuti pola peningkatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, prediksi demografi di masa depan menunjukkan bahwa Kota Semarang kemungkinan akan mengalami perubahan signifikan dalam struktur penduduknya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tren ini antara lain adalah urbanisasi, kebijakan ekonomi, dan perubahan sosial. Di masa depan, pertumbuhan penduduk yang lebih stabil atau bahkan meningkat dapat membawa tantangan dan peluang baru bagi Kota Semarang.

Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,78 km², kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024 berada di wilayah Kecamatan Semarang Timur dengan kepadatan penduduk sebesar 12.712,36 jiwa/km², sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.204,83 jiwa/km². Secara rinci, jumlah penduduk dengan data pilah laki-laki dan perempuan terkait dengan *sex ratio* per wilayah serta kepadatan penduduk terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Kepadatan dan Jumlah Penduduk Kota Semarang Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			%	SEX RATIO (%)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)
		LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)			
1	Banyumanik	71.721	73.649	145.370	8,54	97,38	4.888,03
2	Candisari	37.933	38.996	76.929	4,52	97,27	12.020,16
3	Gajahmungkur	28.490	29.518	58.008	3,41	96,52	6.210,71
4	Gayamsari	35.616	36.191	71.807	4,22	98,41	11.544,53
5	Genuk	64.650	64.269	128.919	7,57	100,59	4.962,24
6	Gunungpati	51.360	51.523	102.883	6,04	99,68	1.765,63
7	Mijen	41.664	41.748	83.412	4,90	99,8	1.475,80
8	Ngaliyan	71.796	72.546	144.342	8,48	98,97	3.357,57
9	Pedurungan	98.724	100.700	199.424	11,71	98,04	9.446,90
10	Semarang Barat	74.940	77.394	152.334	8,95	99,68	7.026,48
11	Semarang Selatan	32.476	33.833	66.309	3,90	95,99	11.144,37
12	Semarang Tengah	27.467	29.651	57.118	3,36	92,63	11.047,97
13	Semarang Timur	33.558	35.343	68.901	4,05	94,95	12.712,36
14	Semarang Utara	58.435	59.865	118.300	6,95	97,61	10.386,30
15	Tembalang	96.945	97.486	194.431	11,42	99,45	4.926,05
16	Tugu	16.962	16.930	33.892	1,99	100,19	1.204,83
TAHUN 2024		842.737	859.642	1.702.379	100	98,03	4.555
TAHUN 2023		839.836	856.530	1.696.366	100	98,05	4.539
TAHUN 2022		835.754	853.227	1.688.981	100	97,69	4.520
TAHUN 2021		835.404	851.818	1.687.222	100	98,07	4.515
TAHUN 2020		835.138	850.771	1.685.909	100	98,16	4.511

Sumber: Dispendukcapil (data diolah), 2025

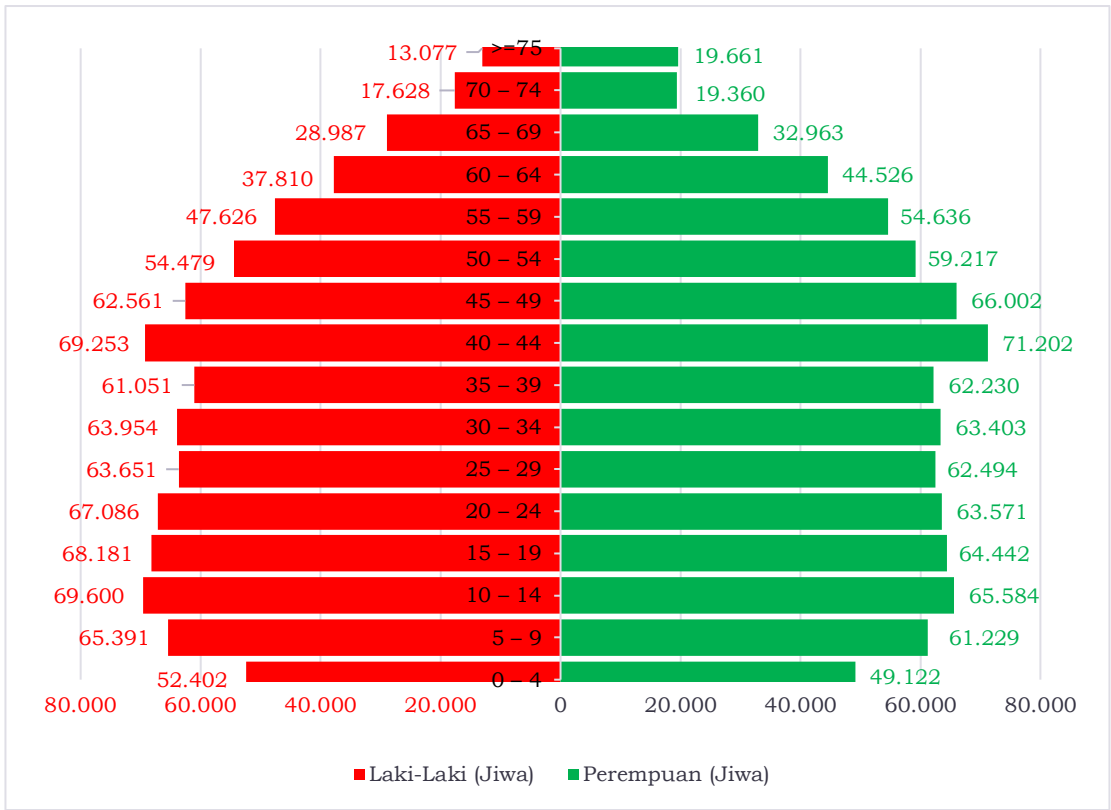
Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2024 sejumlah 1.207.375 jiwa (70,92%), dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 495.004 jiwa (29,08%). Perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100 menghasilkan Rasio Beban Ketergantungan (*dependency ratio*), yang mana Rasio Beban Ketergantungan diartikan sebagai beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif. Rasio Beban Ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 40,99%. Artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak 4.099 penduduk yang tidak produktif. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)	PERSEN
0 – 4	52.402	49.122	101.524	5,96
5 – 9	65.391	61.229	126.620	7,44
10 – 14	69.600	65.584	135.184	7,94
15 – 19	68.181	64.442	132.623	7,79

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)	PERSEN
20 – 24	67.086	63.571	130.657	7,68
25 – 29	63.651	62.494	126.145	7,41
30 – 34	63.954	63.403	127.357	7,48
35 – 39	61.051	62.230	123.281	7,24
40 – 44	69.253	71.202	140.455	8,25
45 – 49	62.561	66.002	128.563	7,55
50 – 54	54.479	59.217	113.696	6,68
55 – 59	47.626	54.636	102.262	6,01
60 – 64	37.810	44.526	82.336	4,84
65 – 69	28.987	32.963	61.950	3,64
70 – 74	17.628	19.360	36.988	2,17
>=75	13.077	19.661	32.738	1,92
TOTAL	842.737	859.642	1.702.379	100

Sumber: Dispendukcapil, 2024



Sumber: Dispendukcapil, 2024

Gambar 2.10 Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang pada tahun 2020-2024 jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak yaitu penduduk dengan lulusan SLTA/MA/ sederajat dengan jumlah 452.961 jiwa (26,87%) di tahun 2020 yang meningkat sebesar 462.444 jiwa (27,17%) di tahun 2024. Sedangkan, jumlah tingkat pendidikan penduduk paling sedikit yaitu penduduk lulusan Strata III dengan jumlah 912 jiwa (0,05%) tahun 2020 yang meningkat menjadi 1.225 jiwa (0,08%) tahun 2024. Di Kota Semarang, masih terdapat penduduk kategori tidak/belum sekolah dalam kurun waktu 5 tahun jumlahnya sebesar 445.627 jiwa (26,43%) pada tahun 2020 yang meningkat menjadi 461.916 jiwa (27,13%) pada tahun

2024. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tidak/belum sekolah	445.627 (26,43%)	458.448 (27,17%)	461.370 (27,32%)	458.778 (27,04%)	461.916 (27,13%)
2	Belum tamat SD/ sederajat	254.311 (15,08%)	243.100 (14,41%)	234.417 (13,88%)	225.237 (13,28%)	220.424 (12,95)
3	Tamat SD/MI sederajat	100.523 (5,96%)	98.802 (5,86%)	98.857 (5,85%)	97.636 (5,76%)	98.760 (5,80%)
4	SLTP/MTs/ sederajat	209.035 (12,4%)	205.202 (12,16%)	202.314 (11,98%)	207.454 (12,23%)	209.780 (12,32%)
5	SLTA/MA/ sederajat	452.961 (26,87%)	452.938 (26,85%)	455.405 (26,96%)	462.345 (27,26%)	462.444 (27,17%)
6	Diploma I II	5.408 (0,32%)	5.432 (0,32%)	5.503 (0,33%)	5.529 (0,33%)	5.511 (0,32)
7	Akademi/Diplom III/Sarjana Muda	52.070 (3,09%)	52.497 (3,11%)	53.525 (3,17%)	54.625 (3,22%)	54.883 (3,22%)
8	Diploma IV/Strata I	149.892 (8,89%)	154.382 (9,15%)	160.418 (9,50%)	166.888 (9,84%)	170.331 (10,01%)
9	Strata II	15.170 (0,90%)	15.457 (0,92%)	16.113 (0,95%)	16.717 (0,99%)	17.105 (1,00%)
10	Strata III	912 (0,05%)	962 (0,06%)	1.059 (0,06%)	1.157 (0,07%)	1.225 (0,08%)
Jumlah (Jiwa)		1.685.909	1.687.222	1.688.981	1.696.366	1.702.379

Sumber: Dispendukcapil (data diolah) 2024

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kota Semarang tahun 2024 sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (30,54%), mengurus rumah tangga (11,96%), wiraswasta (4,89%), PNS/TNI/POLRI (2,60%), dan sebagainya. Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 28,75% serta pelajar/mahasiswa sebesar 14,06%. Jumlah penduduk lain yang memiliki mata pencaharian yang sifatnya profesi walaupun memiliki persentase kecil dapat terlihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2024

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (Jiwa)	%	NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (Jiwa)	%
1	Karyawan Swasta	519.913	30,54	21	Bidan	693	0,04
2	Mengurus Rumah Tangga	203.571	11,96	22	Pelaut	527	0,03
3	Wiraswasta	83.255	4,89	23	Pembantu Rumah Tangga	498	0,03
4	PNS/TNI/POLRI	44.326	2,60	24	Apoteker	415	0,02
5	Buruh Tani/Perkebunan	27.069	1,59	25	Pendeta	364	0,02
6	Pensiunan	15.788	0,93	26	Tukang Batu	337	0,02
7	Buruh Harian Lepas	15.210	0,89	27	Mekanik	279	0,02
8	Guru	14.442	0,85	28	Pengacara	224	0,01
9	Pedagang	9.158	0,54	29	Tukang Jahit	205	0,01
10	Petani/Pekebun	7.179	0,42	30	Industri	183	0,01
11	Karyawan BUMN	6.835	0,40	31	Wartawan	177	0,01
12	Dosen	4.365	0,26	32	Biarawan/ Biarawati	168	0,01
13	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	3.837	0,23	33	Seniman	155	0,01
14	Dokter	3.416	0,20	34	Notaris	151	0,01
15	Perawat	3.116	0,18	35	Konsultan	147	0,01
16	Nelayan/Perikanan	1.713	0,10	36	Konstruksi	137	0,01
17	Karyawan Honorer	1.558	0,09	37	Transportasi	133	0,01
18	Perdagangan	1.089	0,06	38	Lainnya	999	0,07
19	Karyawan BUMD	950	0,06	39	Belum/Tidak Bekerja	489.447	28,75
20	Sopir	921	0,05	40	Pelajar/Mahasiswa	239.429	14,06
					JUMLAH	1.702.379	100%

Sumber: Dispendukcapil, diolah 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, Rasio gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2024 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah, termasuk sektor industri, pertanian, jasa dan sektor lainnya. PDRB dihitung dengan menggunakan komponen seperti konsumsi rumah tangga, pengeluaran pembelian barang modal atau investasi, belanja pemerintah dan nilai ekspor barang dan jasa dikurangi dengan nilai impor yang ada. Secara keseluruhan, PDRB merupakan alat yang sangat berharga untuk memahami dinamika ekonomi lokal, membandingkan kinerja antar daerah dan merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis utama yang di antaranya adalah PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB atas harga konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan dari Rp191.352,04 Milyar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp267.551,35 Milyar pada tahun 2024. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp137.601,90 Milyar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp170.947,72 Milyar pada tahun 2024. Kontribusi tiga sektor terbesar pada PDRB ADHB disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 28,67%), Konstruksi (rata-rata persentase lima tahun terakhir 26,54%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 13,25%). Selain itu, kontribusi terbesar pada PDRB ADHK disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 25,90%), Konstruksi (rata-rata

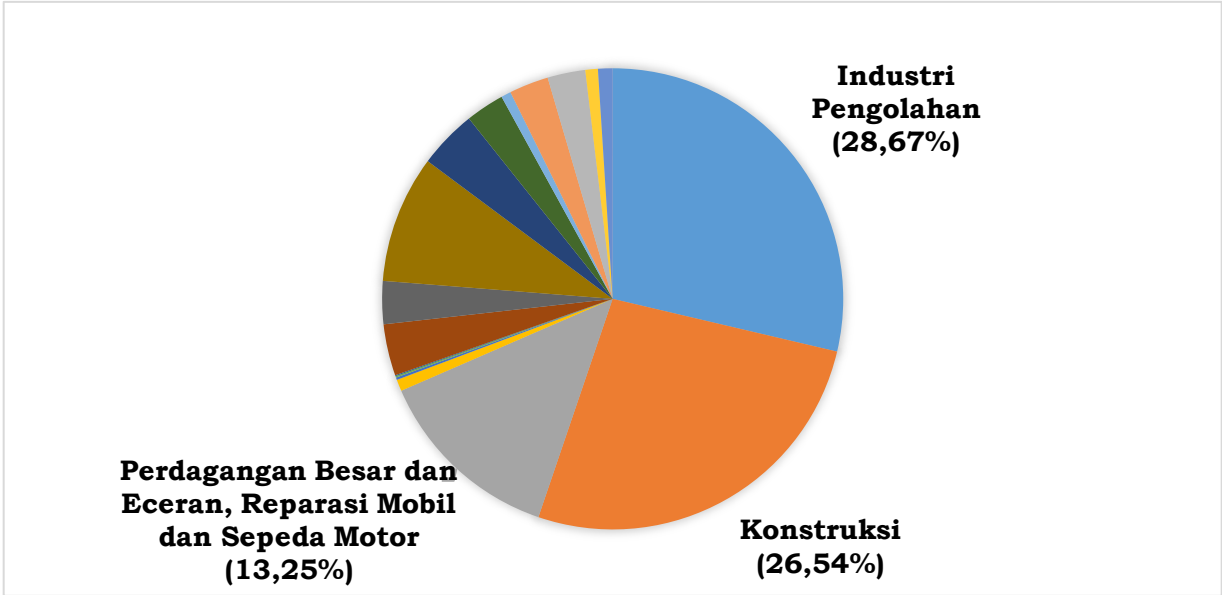
persentase lima tahun terakhir 24,42%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 14,27%). Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	KATEGORI/ SUB KATEGORI	NILAI/ KONTRIBUSI	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2020-2024 (DALAM MILYAR RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.610,97	1.721,15	1.833,00	1.940,69	2.012,80
		Kontribusi kategori (%)	0,85	0,84	0,81	0,78	0,75
B	Pertambanga n dan Penggalian	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	359,64	373,92	370,33	390,36	406,27
		Kontribusi kategori (%)	0,19	0,18	0,16	0,16	0,15
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	54.010,54	58.895,09	65.643,04	71.637,30	75.860,97
		Kontribusi kategori (%)	28,62	28,75	28,87	28,78	28,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	210,72	213,14	213,61	233,13	250,51
		Kontribusi kategori (%)	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	147,83	163,72	166,12	171,83	185,08
		Kontribusi kategori (%)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	49.078,35	55.385,71	59.872,60	65.835,44	71.898,52
		Kontribusi kategori (%)	26,00	27,03	26,33	26,45	26,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	25.511,98	27.650,59	30.005,77	32.584,49	34.642,42
		Kontribusi kategori (%)	13,52	13,50	13,20	13,09	12,95
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	4.435,88	4.776,12	9.485,98	11.485,75	12.311,60
		Kontribusi kategori (%)	2,35	2,33	4,17	4,61	4,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.233,22	5.665,45	6.970,48	7.961,83	8.654,44
		Kontribusi kategori (%)	2,77	2,77	3,07	3,20	3,23
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	18.085,59	18.886,96	19.604,74	21.282,49	23.360,87
		Kontribusi kategori (%)	9,58	9,22	8,62	8,55	8,73
K		Nilai (dalam Milyar Rupiah)	8.155,86	8.718,46	9.524,47	9.891,71	10.126,61

NO	KATEGORI/ SUB KATEGORI	NILAI/ KONTRIBUSI	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2020-2024 (DALAM MILYAR RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Kontribusi kategori (%)	4,32	4,26	4,19	3,97	3,78
L	Real Estate	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.407,70	5.685,16	6.090,51	6.576,52	6.990,13
		Kontribusi kategori (%)	2,87	2,77	2,68	2,64	2,61
M	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.324,33	1.379,62	1.538,79	1.710,03	1.922,43
		Kontribusi kategori (%)	0,70	0,67	0,68	0,69	0,72
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.774,58	5.821,37	6.054,64	6.438,38	7.100,97
		Kontribusi kategori (%)	3,06	2,84	2,66	2,59	2,65
O	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.567,51	5.659,48	5.777,47	6.157,22	6.829,06
		Kontribusi kategori (%)	2,95	2,76	2,54	2,47	2,55
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.823,71	1.850,88	1.919,12	2.061,14	2.239,06
		Kontribusi kategori (%)	0,97	0,90	0,84	0,83	0,84
Q	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.993,28	2.024,17	2.302,68	2.551,17	2.759,62
		Kontribusi kategori (%)	1,06	0,99	1,01	1,02	1,03
TOTAL PDRB ADHB		Jumlah (dalam Milyar Rupiah)	191.352,04	188.731,7	227.373,36	248.909,48	267.551,35
TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD PDRB		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025



Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Gambar 2.11 Grafik Tiga Sektor Terbesar Rata-rata kontribusi PDRB ADHB di Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tabel 2.8 Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024

NO	KATEGORI/ SUB KATEGORI	NILAI / KONTRIBUSI	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2020-2024 (DALAM MILYAR RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.106,08	1.141,64	1.169,22	1.184,14	1.188,58
		Kontribusi kategori (%)	0,80	0,79	0,76	0,73	0,70
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	173,67	179,61	170,72	174,76	181,70
		Kontribusi kategori (%)	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	36.020,69	37.990,51	40.131,85	41.796,24	42.812,37
		Kontribusi kategori (%)	26,18	26,25	26,23	25,82	25,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	171,50	173,22	171,12	184,76	196,01
		Kontribusi kategori (%)	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	123,68	131,24	132,79	136,25	138,59
		Kontribusi kategori (%)	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	34.031,87	36.235,04	36.666,19	38.714,97	41.759,68
		Kontribusi kategori (%)	24,73	25,04	23,96	23,92	24,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	19.756,74	21.039,60	21.865,39	22.939,43	23.886,14
		Kontribusi kategori (%)	14,36	14,54	14,29	14,17	13,97
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	3.184,25	3.424,05	6.128,51	6.775,97	7.212,63
		Kontribusi kategori (%)	2,31	2,37	4,01	4,19	4,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	3.770,08	4.039,33	4.859,46	5.482,66	5.867,40
		Kontribusi kategori (%)	2,74	2,79	3,18	3,39	3,43
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	18.654,55	19.479,19	20.217,45	21.909,64	23.814,61
		Kontribusi kategori (%)	13,56	13,46	13,21	13,54	13,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.457,98	5.560,38	5.581,21	5.681,71	5.762,17
		Kontribusi kategori (%)	3,97	3,84	3,65	3,51	3,37
L	Real Estate	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	4.334,92	4.497,48	4.728,54	5.053,43	5.351,24

NO	KATEGORI/ SUB KATEGORI	NILAI / KONTRIBUSI	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2020-2024 (DALAM MILYAR RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Kontribusi kategori (%)	3,15	3,11	3,09	3,12	3,13
M	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	873,42	900,15	957,00	1.026,95	1.133,59
		Kontribusi kategori (%)	0,63	0,62	0,63	0,63	0,66
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	3.996,12	3.937,30	4.010,14	4.177,13	4.504,35
		Kontribusi kategori (%)	2,90	2,72	2,62	2,58	2,63
O	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	3.283,67	3.287,61	3.351,58	3.564,40	3.895,27
		Kontribusi kategori (%)	2,39	2,27	2,19	2,20	2,28
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.197,89	1.212,98	1.246,53	1.314,03	1.410,47
		Kontribusi kategori (%)	0,87	0,84	0,81	0,81	0,83
Q	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.464,88	1.475,25	1.610,90	1.731,83	1.832,90
		Kontribusi kategori (%)	1,06	1,02	1,05	1,07	1,07
TOTAL PDRB ADHK		Jumlah (dalam Milyar Rupiah)	137.601,90	144.704,57	152.995,40	161.848,30	170.947,72
TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI TERHADAP PDRB		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Tabel 2.9 PDRB ADHK Kota Semarang Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54.271,35	55.708,27	58.495,08	62.643,54	65.264,75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	871,92	914,21	959,52	1.036,00	1.173,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13.597,03	13.763,06	13.800,90	14.152,15	14.504,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	82.578,49	87.457,76	87.970,16	91.912,14	97.905,34
5. Perubahan Inventori	1.100,88	812,98	972,55	1.010,16	271,99
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-14.817,69	-13.951,72	-9.198,84	-8.725,70	-8.172,65
Produk Domestik Regional Bruto	137.601,98	144.704,57	152.999,37	161.842,11	170.947,72

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara umum sama dengan konsep investasi sebagai salah satu pembentuk PDRB, terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Secara terperinci, PMTB terdiri dari PMA, PMDN, perorangan (Koperasi, swasta dan lainnya), belanja modal pemerintah, dan juga perubahan stok. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat

diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional.

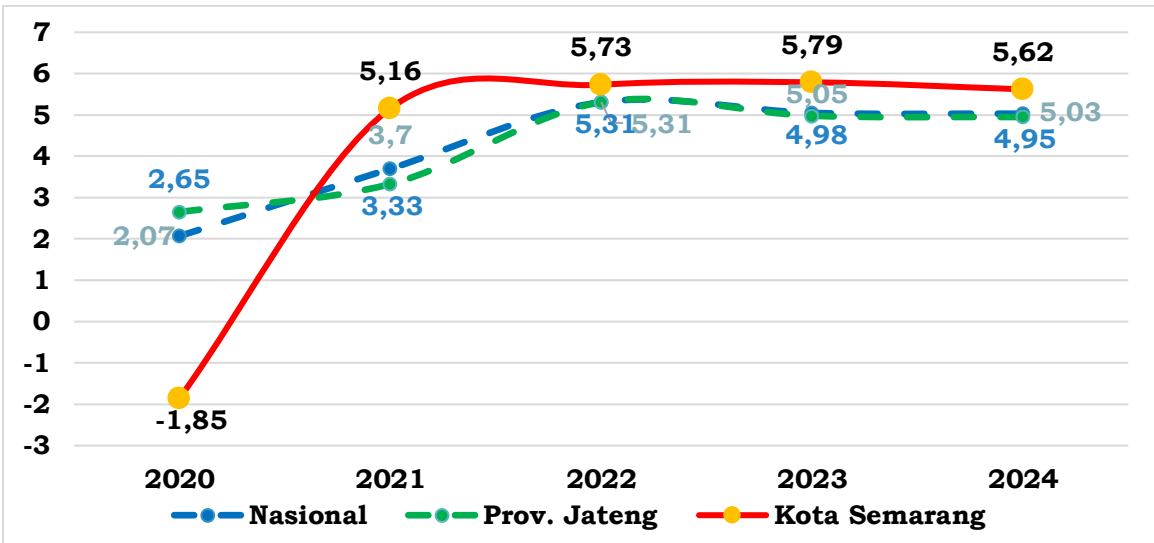
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori/Sub Kategori Tahun 2020-2024

Kategori/Sub Kategori		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	3,22	2,42	1,28	0,38
B	Pertambangan dan Penggalan	2,49	3,42	-4,95	2,37	3,97
C	Industri Pengolahan	0,20	5,47	5,64	4,16	2,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	1,00	-1,21	7,50	6,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,48	6,12	1,17	2,61	1,72
F	Konstruksi	-5,23	6,47	1,19	5,59	7,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,72	6,49	3,92	4,91	4,13
H	Transportasi dan Pergudangan	-40,16	7,53	79,01	10,56	6,44
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-17,10	7,14	20,30	12,82	7,02
J	Informasi dan Komunikasi	20,31	4,42	3,79	8,37	8,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,75	1,88	0,37	1,80	1,42
L	Real Estate	-0,08	3,75	5,14	6,87	5,89
M, N	Jasa Perusahaan	-7,94	3,06	6,32	7,31	10,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,24	-1,47	1,85	4,16	7,83
P	Jasa Pendidikan	-2,51	0,12	1,95	6,35	9,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,09	1,26	2,77	5,41	7,34
R, S, T, U	Jasa lainnya	-14,80	0,71	9,20	7,51	5,84
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK		-1,85	5,16	5,73	5,79	5,62

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024 (Data diolah)

Tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor jasa Perusahaan sebesar 10,38, jasa pendidikan sebesar 9,28, serta informasi dan komunikasi sebesar 8,69.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2020 hingga mencapai minus 1,85 yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi makro kembali mengalami peningkatan pasca Pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan capaian sebesar 5,16 pada tahun 2021 dan semakin meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,79. Berikut dapat dilihat perbandingan LPE Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024:



Sumber: BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2025 (Data Diolah)

Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

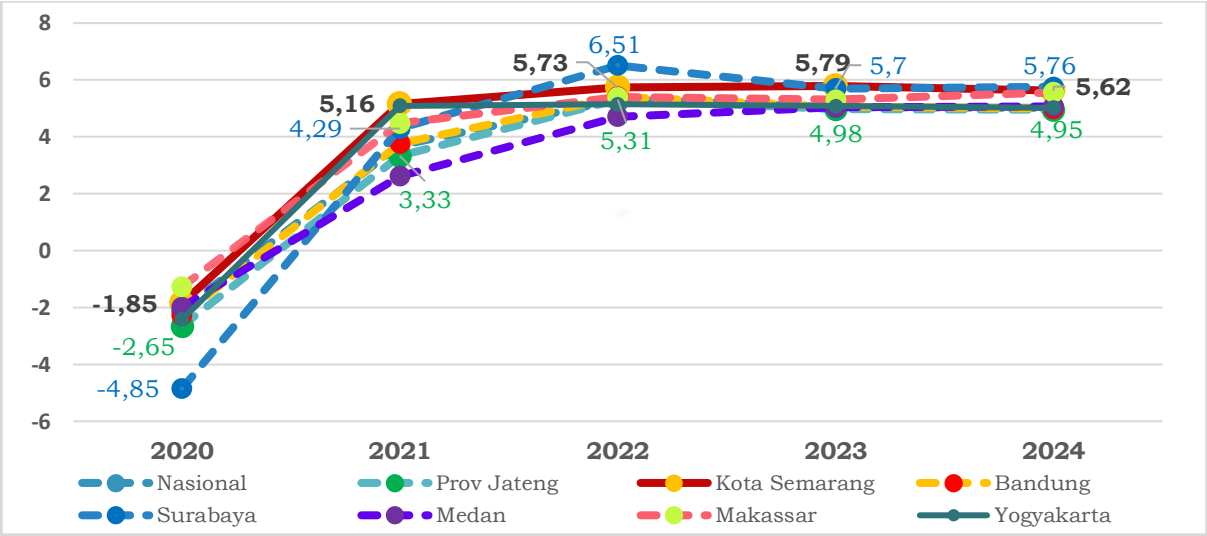
Selain Kota Semarang, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh berbagai kota besar lainnya di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, yang menunjukkan tren positif dalam perkembangan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, jasa keuangan, teknologi informasi, logistik, serta perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan investasi, kemajuan infrastruktur, inovasi teknologi, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung iklim usaha dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peran kota-kota besar sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan menjadikan mereka sebagai magnet pertumbuhan yang mampu menarik sumber daya manusia berkualitas dan modal dari berbagai daerah, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai penggerak utama ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Berikut disajikan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang jika disandingkan dengan kota besar setara.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jateng, Nasional, dan Kota Besar Setara Tahun 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Semarang	-1,85	5,16	5,73	5,79	5,62
Bandung	-2,28	3,76	5,41	5,07	4,99
Surabaya	-4,85	4,29	6,51	5,70	5,76
Medan	-1,98	2,62	4,71	5,04	5,07
Makassar	-1,27	4,47	5,40	5,31	5,56
Yogyakarta	-2,42	5,09	5,15	5,08	5,03
Jawa Tengah	-2,65	3,33	5,31	4,98	4,95
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS, 2025

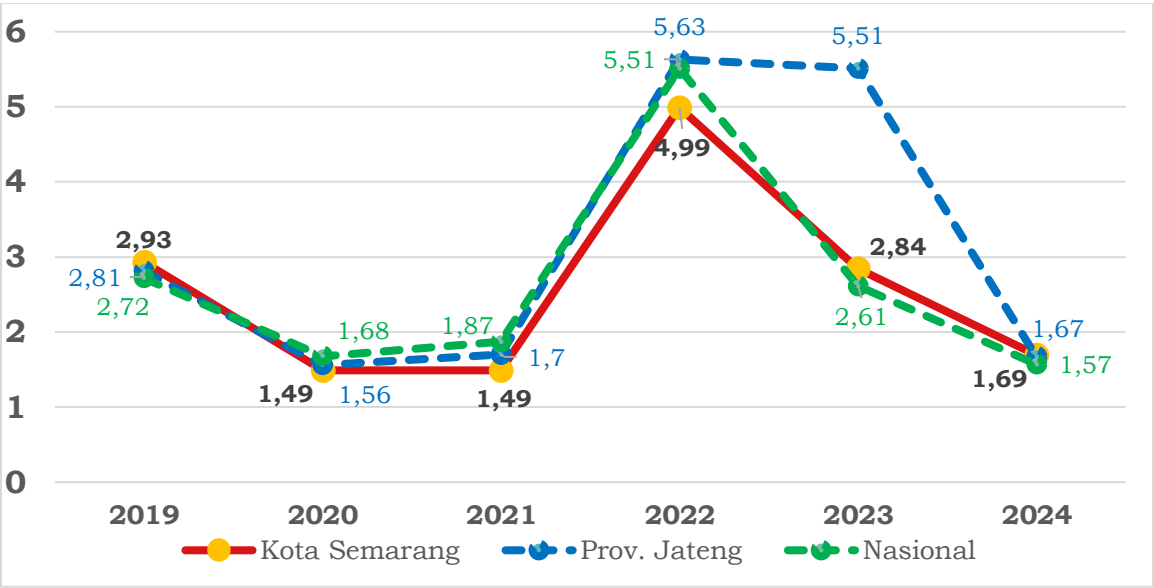
LPE di Kota Semarang mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan daya tahan dan perkembangan positif di berbagai sektor ekonomi. Tren ini menunjukkan bahwa Kota Semarang terus mengalami kemajuan dalam aktivitas perdagangan, jasa, industri, serta sektor pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dengan angka LPE turun menjadi 5,62. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dinamika ekonomi global maupun tantangan domestik yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di kota ini. Faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan kebijakan perdagangan, serta fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada investasi dan daya beli masyarakat. Sementara itu, faktor internal seperti perubahan kebijakan daerah, perlambatan sektor unggulan, serta perubahan pola konsumsi dan produksi juga bisa menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan. Berikut disajikan grafik pergerakan LPE Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional pada kurun waktu 2020-2024:



Sumber: BPS, BPS Prov. Jateng, BPS Kota Semarang, 2025 (Data diolah)
Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jateng, dan Nasional Tahun 2020-2024

b. Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Berikut perbandingan laju inflasi Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS 2025
Gambar 2.14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2024 lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, laju inflasi di Kota Semarang

tercatat sebesar 1,69%, berada sedikit di atas angka inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 1,67%, serta melampaui inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57%.

Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan inflasi yang relatif lebih tinggi di tingkat kota dibandingkan dengan skala provinsi dan nasional. Beberapa faktor utama yang memengaruhi laju inflasi di Kota Semarang antara lain adalah kenaikan harga komoditas pangan. Kenaikan harga energi, seperti LPG non-subsidi dan bahan bakar minyak, juga memberikan andil terhadap peningkatan laju inflasi di wilayah ini. Meskipun demikian, secara umum, inflasi Kota Semarang masih berada dalam kisaran yang relatif terkendali, mencerminkan efektivitas koordinasi antar pemangku kebijakan.

c. PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan proyeksi jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel 2.12 PDRB per Kapita Kota Semarang Tahun 2020-2024

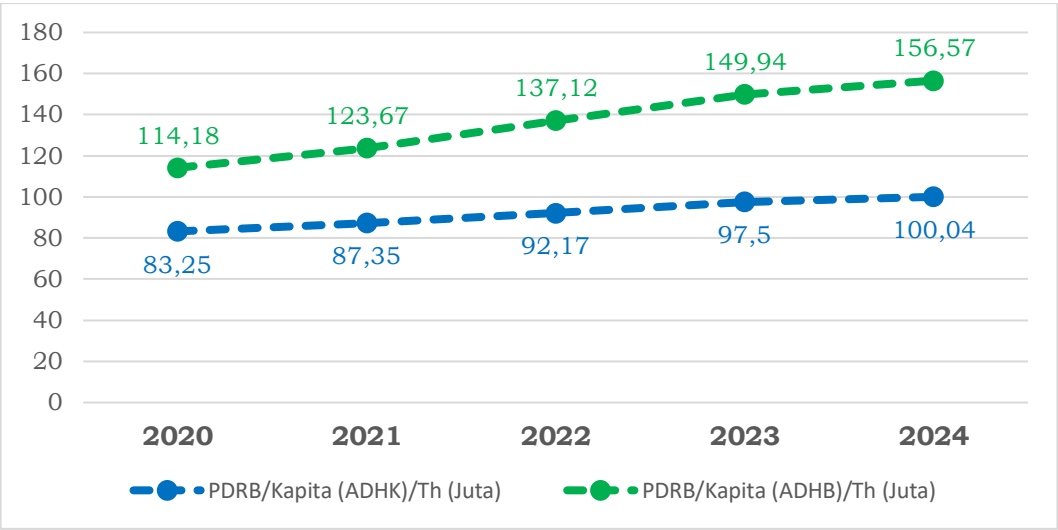
URAIAN	PDRB (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar)	188.731,69	204.871,00	227.619,17	248.902,61	267.551,35
PDRB ADHK (Miliar)	137.601,98	144.704,57	152.999,37	161.849,11	170.947,72
PDRB/Kapita (ADHB)/Th (Juta)	114,18	123,67	137,12	149,94	156,57
PDRB/Kapita (ADHK)/Th (Juta)	83,25	87,35	92,17	97,50	100,04

Sumber: BPS, Disdukpendukcapil, 2025

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan dari Rp137.601,98 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp267.551,35 Miliar pada tahun 2024. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp137.601,90 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp170.947,72 Miliar pada tahun 2024. Kontribusi tiga sektor terbesar pada PDRB ADHB disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 28,67%), Konstruksi (rata-rata persentase lima tahun terakhir 26,54%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 13,25%). Selain itu, kontribusi terbesar pada PDRB ADHK disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 25,90%), Konstruksi (rata-rata persentase lima tahun terakhir 24,42%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata persentase lima tahun terakhir sebesar 14,27%).

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB), yang tidak memperhitungkan inflasi, tercatat sebesar Rp156,57 juta per jiwa per tahun pada 2024. Sementara itu, PDRB per kapita

atas dasar harga konstan (ADHK), yang telah disesuaikan dengan inflasi, mencapai Rp100,04 juta per jiwa per tahun di tahun yang sama. Data ini juga menunjukkan tren peningkatan PDRB per kapita secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan asumsi distribusi kemakmuran yang merata. Selain itu, pertumbuhan PDRB per kapita juga mencerminkan bahwa penduduk Kota Semarang semakin memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi, serta adanya peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, peningkatan PDRB per kapita yang berkelanjutan menandakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan. Berikut disajikan grafik PDRB Kota Semarang dalam kurun waktu 2020-2024:



Sumber: BPS Kota Semarang, 2025 (Data diolah)

Gambar 2.15 Grafik PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, PDRB ADHK per kapita per tahun dan PDRB ADHB per kapita per tahun dari tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Nilai tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2024, dengan PDRB ADHK per kapita per tahun sebesar 100,04 juta rupiah dan PDRB ADHB per kapita per tahun sebesar 156,57 juta rupiah.

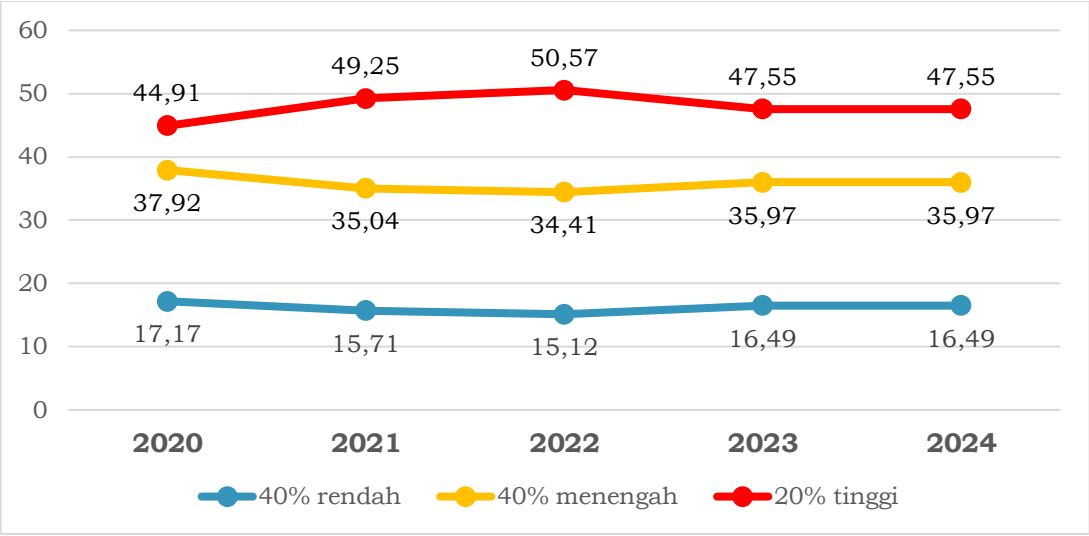
d. Rasio gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Rasio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Rasio gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 ($0 < \text{Koefisien Gini} < 1$).

Secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $0,00 < G < 0,30$ → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- $0,30 < G < 0,50$ → pemerataan / ketimpangan sedang
- $G > 0,50$ → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Berikut disajikan grafik ketimpangan penduduk Kota Semarang pada kurun waktu 2020-2024:



Sumber: BPS, BPS Kota Semarang, 2025 (Data diolah)
Gambar 2.16 Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2020-2024

Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah sebesar 16,49% pada tahun 2024, lebih rendah daripada tahun 2022 sebesar 15,12%. Selain itu, untuk 40,00% penduduk lapisan menengah/sedang terjadi penurunan bagian pendapatan yaitu dari 34,41% pada tahun 2022 menjadi 35,97% pada tahun 2024. Sedangkan, 20,00% penduduk lapisan atas, terjadi peningkatan bagian pendapatan yaitu 50,57% pada tahun 2022 menjadi 47,55% pada tahun 2024. Rasio gini Kota Semarang di tiga tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,44 tahun 2023 sebesar 0,40 dan tahun 2024 sebesar 0,38. Berikut disajikan tabel perbandingan Rasio gini Kota Semarang dengan kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dalam kurun waktu Tahun 2020-2024:

Tabel 2.13 Rasio gini Kota Semarang dengan Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

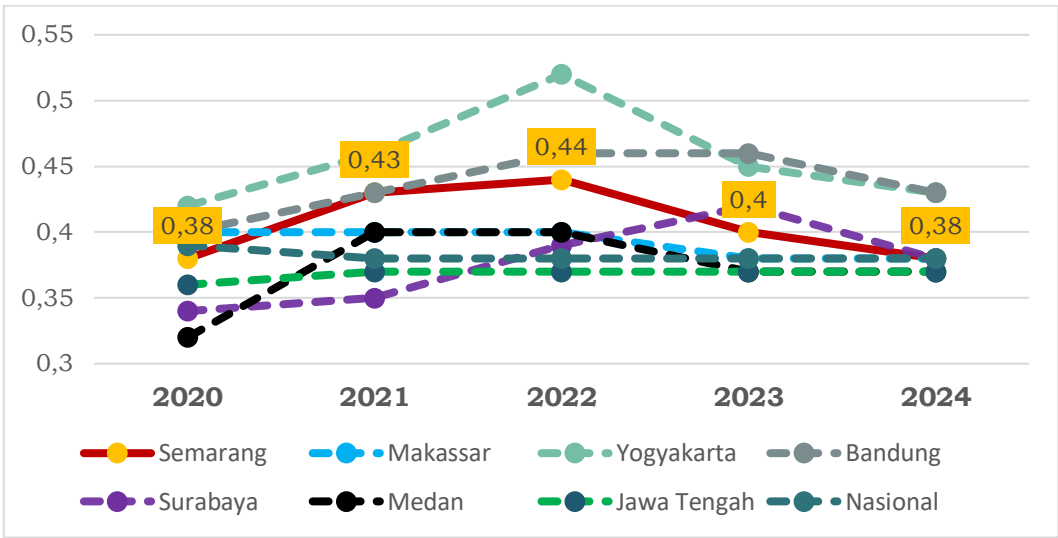
NO	KAB/KOTA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	Angka	0,380	0,430	0,440	0,400	0,430
2	Makassar	Angka	0,400	0,400	0,400	0,380	0,360
3	Yogyakarta	Angka	0,420	0,460	0,520	0,450	0,450
4	Bandung	Angka	0,400	0,430	0,460	0,460	0,430
5	Surabaya	Angka	0,340	0,350	0,390	0,420	0,380
6	Medan	Angka	0,320	0,400	0,400	0,373	0,356
7	Jawa Tengah	Angka	0,360	0,370	0,370	0,370	0,370
8	Nasional	Angka	0,390	0,380	0,380	0,380	0,380

Sumber: BPS, 2025

Rasio Gini digunakan untuk memberikan gambaran terkait tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan di Kota Semarang. Pendekatan melalui Rasio Gini dilakukan dengan mengidentifikasi pola pengeluaran suatu masyarakat, baik pada masyarakat taraf rendah, sedang maupun tinggi. Ketimpangan penduduk Kota Semarang pada kurun waktu 2020-2024 ditunjukkan pada tabel di atas. Rasio Gini Kota Semarang meningkat menjadi 0,430 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi meningkat antara kelompok-kelompok masyarakat. Pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai upaya yang cukup efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat. Hal ini perlu menjadi

perhatian dalam menentukan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota dalam menciptakan pemerataan ekonomi, sehingga ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi dapat dikurangi secara signifikan.

Berikut disajikan grafik perbandingan Rasio gini Kota Semarang dengan Kota Besar Setara, Provinsi, Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024 sebagai berikut :

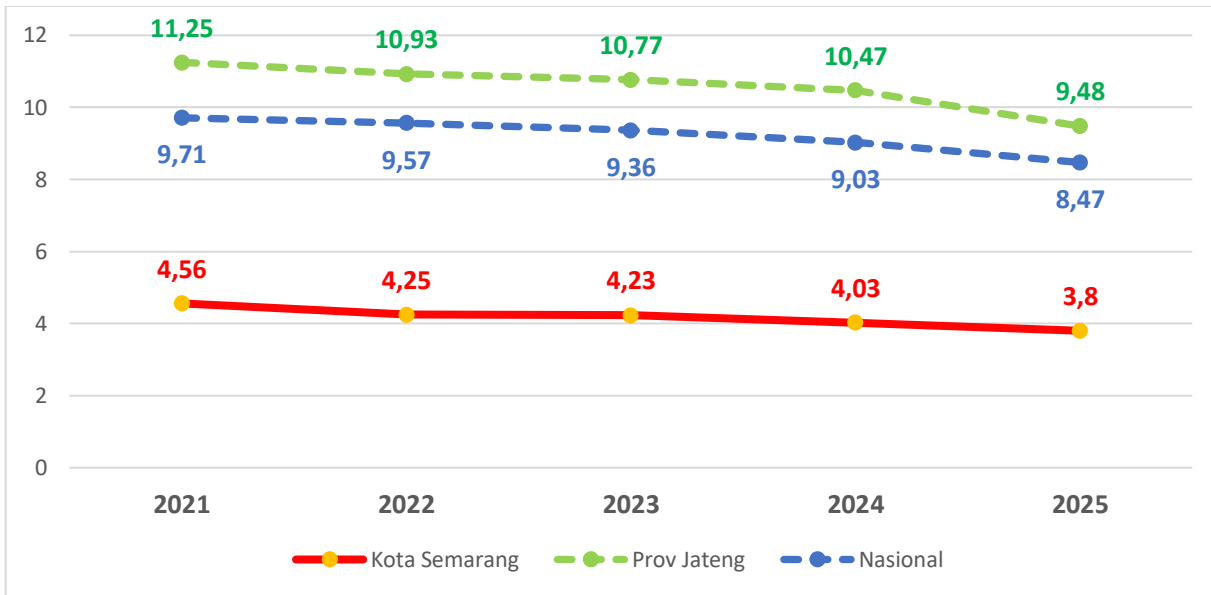


Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2025 (Data diolah)

Gambar 2.17 Perbandingan Rasio gini Kota Semarang dengan Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

e. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin di Kota Semarang kondisinya cenderung menurun sejak tahun 2020-2024 akibat masa transisi pasca pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2019-2020. Persentase penduduk miskin ini termasuk yang terendah dibandingkan tingkat kemiskinan Kabupaten atau Kota lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Telah banyak hal yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pasca pandemi, mulai dari pemberian bantuan sosial, relaksasi kredit/p embiayaan/pajak, juga refokusing anggaran di Kota Semarang baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD untuk penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan mekanisme padat karya. Akan tetapi, dampak pukulan ekonomi masih tidak bisa dihindarkan. Pada periode lima tahun terakhir (2021-2025), terlihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang sebagai berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, BPS Nasional, 2024

Gambar 2.18 Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2021-2025

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Semarang dan kota besar lainnya dapat terlihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

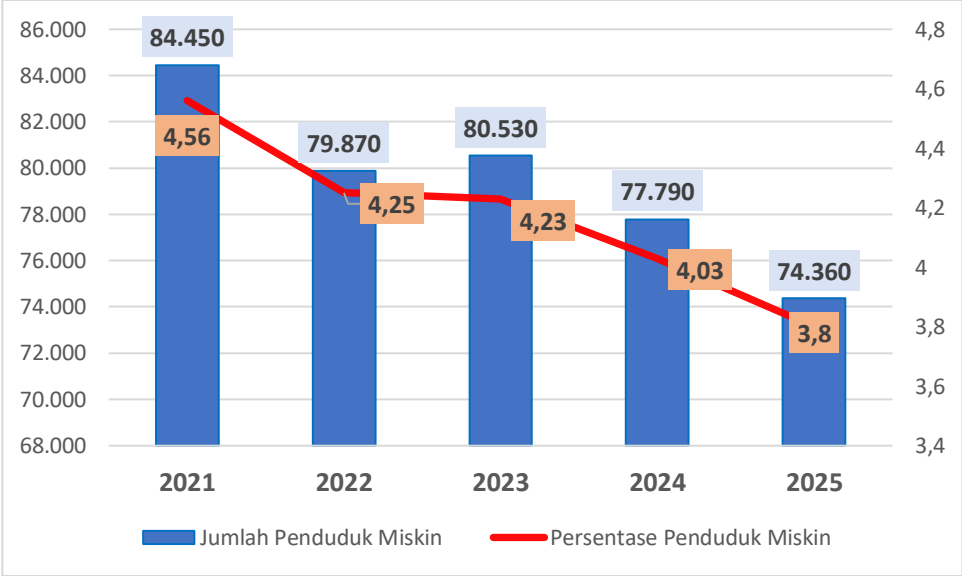
KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN					PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Semarang	84.450	79.870	80.530	77.790	74.360	4,56	4,25	4,23	4,03	3,80
Bandung	112.500	109.820	102.800	101.100	99.120	4,25	4,37	4,25	3,87	3,78
Surabaya	152.490	138.210	136.370	116.620	105.090	5,23	4,72	4,65	3,96	3,56
Medan	193.030	187.740	187.280	187.040	171.600	8,34	8,07	8,00	7,94	7,25
Makassar	74.690	71.830	80.320	79.530	71.630	4,82	4,58	5,07	4,97	4,43
Yogyakarta	34.070	29.680	29.480	28.790	28.580	7,69	6,62	6,49	6,26	6,14
Jawa Tengah	3.934.010	3.858.230	3.791.500	3.400.000	3.370.000	11,25	10,93	10,77	10,47	9,48
Nasional	26.503.650	26.363.270	25.900.000	24.060.000	23.850.000	9,71	9,57	9,36	9,03	8,47

Sumber: BPS, 2025

Jika dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin kota besar setara yang terdiri dari Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Yogyakarta capaian Kota Semarang berada di urutan ketiga terendah diantara kota besar lain di Indonesia yaitu sebesar 3,80%. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin hanya mengalami penurunan sebesar 0,23%. Sedangkan rata-rata penurunan persentase penduduk miskin dari kota lainnya telah mencapai 0,098%. Jika ditinjau dari persentase kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, kondisi di Kota Semarang selalu lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan bahkan tingkat Nasional. Hal Ini menunjukkan bahwa indikator presentase kemiskinan pada Tujuan ke-1 Pembangunan Berkelanjutan atau TPB yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik.

Jika ditinjau dari jumlah penduduk miskin di Kota Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 jumlahnya sebesar 74.360 jiwa dengan penurunan penduduk miskin dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 3.430 jiwa. Kota Semarang menjadi kota ketiga dibandingkan dengan kelima kota-kota besar

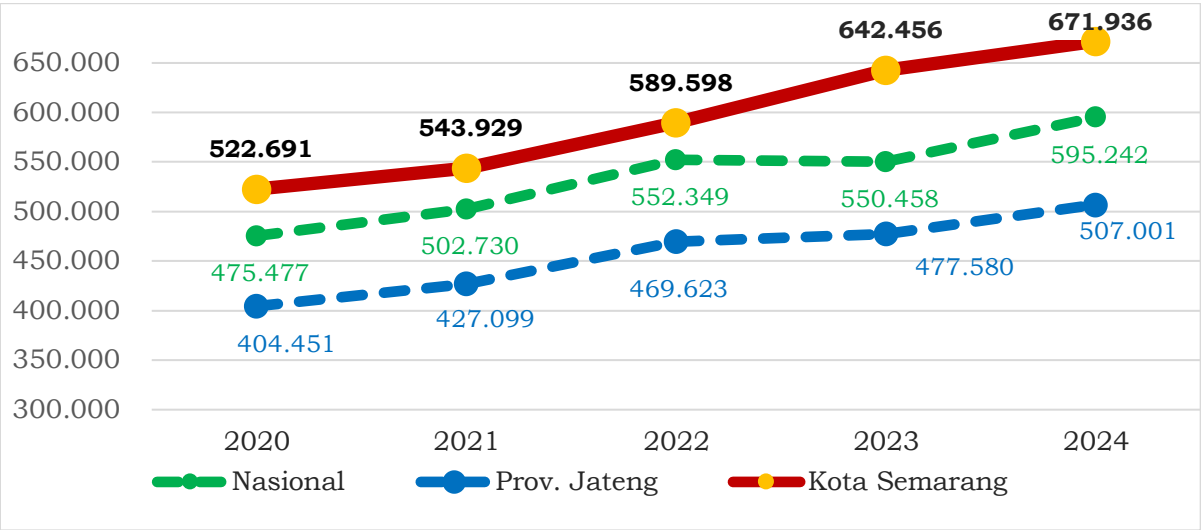
setara pada capaian jumlah penduduk miskin pada tahun 2025. Begitu pula jika dibandingkan dengan dengan penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2024 ke 2025 nasional yang mencapai 1.840.000 jiwa, dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 391.500 jiwa. Dari tahun 2021-2025 perubahan pertumbuhan penduduk miskin cenderung mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah penduduk miskin di Kota Semarang paling rendah berada di tahun 2025 dengan persentase penduduk miskin juga berada pada angka terendah. Capaian penduduk miskin di Kota Semarang ini dapat disimpulkan masuk ke dalam kategori yang baik. Berikut disajikan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Semarang tahun 2021-2025 :



Sumber: BPS Kota Semarang, 2025 (Data diolah)

Gambar 2.19 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2021-2025

Garis kemiskinan sebagai garis batas ukuran seseorang dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau tidak, merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran perkapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dalam pemenuhan kebutuhan pokok lebih tinggi (diatas) garis kemiskinan, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin, demikian pula sebaliknya.



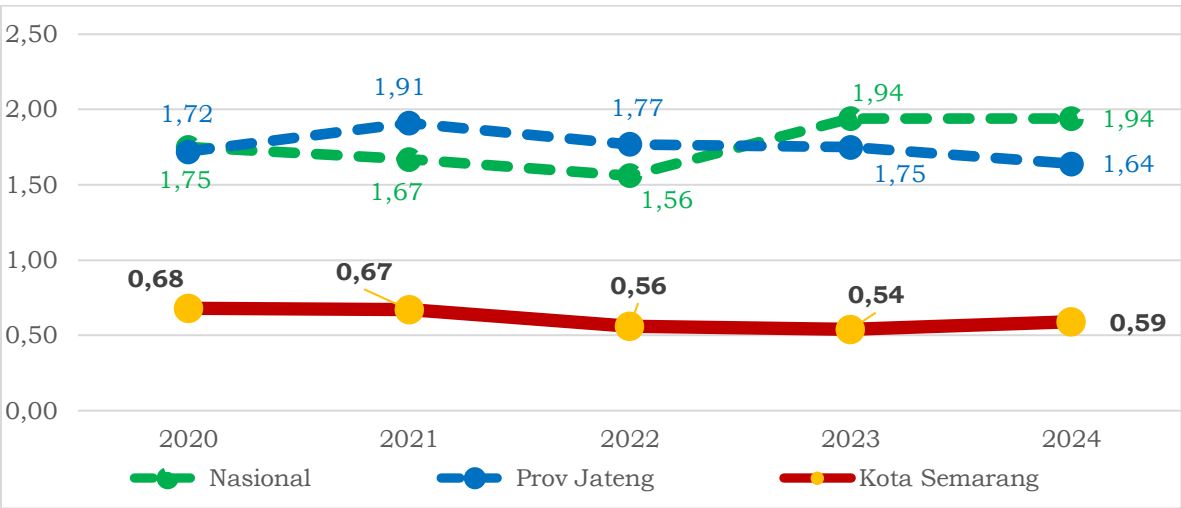
Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.20 Garis Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024

Dilihat dari perbandingan garis kemiskinan antara Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, terlihat bahwa batas ukuran kemiskinan di Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ukuran Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Artinya orang miskin di Kota Semarang, belum tentu tergolong miskin jika diukur menggunakan garis kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

f. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Gambaran indeks kedalaman kemiskinan Kota Semarang selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kota Semarang lebih rendah, dibandingkan dengan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Artinya upaya untuk mengentaskan warga miskin di Kota Semarang akan lebih mudah dilakukan karena kesenjangan terhadap garis kemiskinan tidak terlalu jauh. Berikut disajikan angka indeks kedalaman kemiskinan.



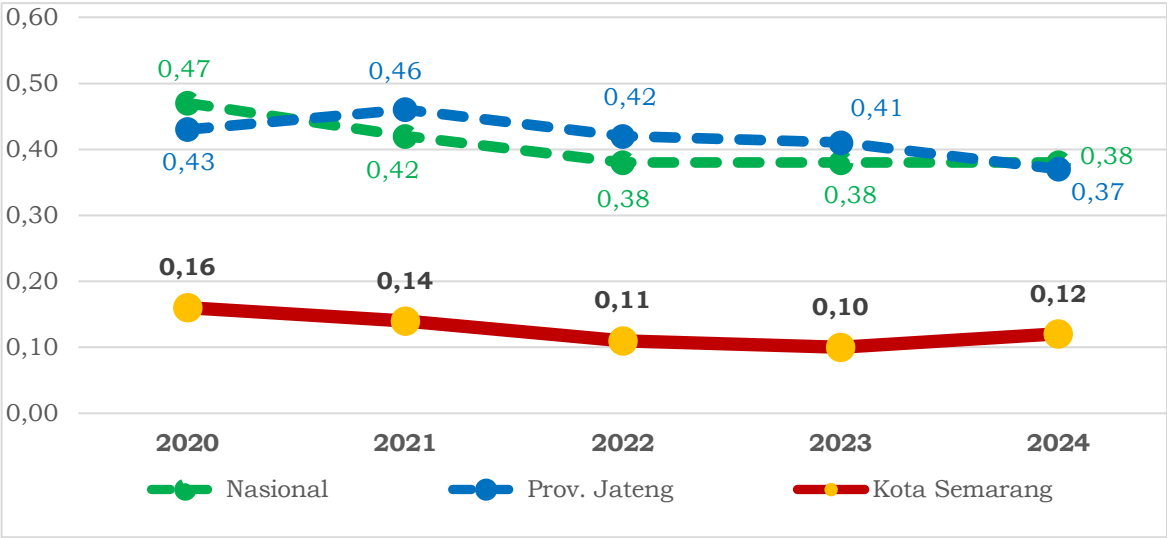
Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2024

Gambar 2.21 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama tahun 2020 sampai tahun 2024, terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinan Kota Semarang selalu menduduki peringkat terbawah jika dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan yang diraih Provinsi Jawa Tengah dan pada tingkat nasional. Artinya, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di kota ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional.

Indeks keparahan kemiskinan yang rendah di Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun masih ada kelompok penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, distribusi pengeluaran di antara mereka lebih merata. Dengan kata lain, ketimpangan antara mereka yang paling miskin dan yang sedikit lebih

mampu di kalangan penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain, baik pada tingkat provinsi, maupun nasional. Capaian indeks keparahan kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terlihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.22 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024

Meski nilai indeks keparahan kemiskinan Kota Semarang tercatat paling rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional, namun terjadi peningkatan indeks sebesar 0,02 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif lebih rendah, ada sedikit peningkatan dalam kesenjangan pengeluaran di kalangan kelompok miskin. Artinya, meskipun secara keseluruhan distribusi pengeluaran di antara mereka lebih merata, ada beberapa kelompok masyarakat miskin yang mungkin mengalami kesulitan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang menyebabkan sedikit peningkatan ketimpangan.

Peningkatan kecil pada indeks keparahan kemiskinan ini bisa menjadi indikator bahwa meskipun upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan, masih ada tantangan dalam menjangkau kelompok yang paling rentan dan membutuhkan bantuan lebih besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memastikan bahwa bantuan dan program pemberdayaan ekonomi dapat lebih efektif dalam meratakan pengeluaran di seluruh lapisan masyarakat miskin, dan mencegah ketimpangan yang lebih besar di masa depan.

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kota Semarang				Prov Jateng		Nasional	
		Versi Pemkot		Versi BPS		Versi BPS		Versi BPS	
		Smg/DTKS Kemensos							
		Jiwa	(%)	Jiwa (ribu)	(%)	Jiwa (ribu)	(%)	Jiwa (ribu)	(%)
1	2020	271.396	16,15	79,58	4,34	3.980,90	11,84	27.549,69	10,19
2	2021	407.363	24,23	84,45	4,56	3.934,01	11,25	26.503,65	9,71
3	2022	186.675	11,06	79,87	4,25	3.858,23	10,93	26.363,27	9,57
4	2023	186.506	11,05	80,53	4,23	3.791,50	10,77	25.900,00	9,36
5	2024	155.857	9,15	77,79	4,03	3.400,00	9,58	24.060,00	8,57

Sumber: Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/680/2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015, Jateng.bps.go.id; bps.go.id, Dinas Sosial, 2025

Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Kota Semarang, data update September 2024 dapat diketahui bahwa rasio penduduk miskin Kota Semarang pada tahun 2024 menyentuh angka 4,03% atau sebesar 77,79 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 4,23% dan bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 9,58%. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial Kemensos Kota Semarang, jumlah penduduk warga miskin Kota Semarang tahun 2021-2024 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2024 mencapai angka 155.857 jiwa.

Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota,Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH dan berbagai program kegiatan lainnya. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam *Sustainable Development Goals* (Tujuan 1:Tanpa Kemiskinan) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

g. Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak terhadap perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya tingkat kemiskinan, dan dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Kriminalitas dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Jumlah tindak pidana menonjol (*crime index*) menurut jenis dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.16 Jumlah Tindak Pidana Menonjol (*Crime Index*) Menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	Kasus	1.330	1.253	1.335	1.290	1.196
	a. Pencurian dengan pemberataan	Kasus	0	14	138	162	92
	b. Pencurian ranmor	Kasus	33	31	91	40	34
	c. Pencurian dengan kekerasan	Kasus	4	7	11	23	10
	d. Penganiayaan	Kasus	19	38	115	168	23
	e. Pembunuhan	Kasus	3	1	6	5	2
	f. Perkosaan	Kasus	0	0	2	5	1
	g. Uang Palsu	Kasus	0	0	0	18	25
	h. Narkotika	Kasus	0	0	21	138	166
	i. Perjudian	Kasus	0	1	7	4	26
	j. Pemerasan/Ancaman	Kasus	3	3	16	5	12
	k. Lainnya	Kasus	1.268	1.084	928	722	805

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 2025

Selain aparat kepolisian, peran Satpol PP Kota Semarang juga sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan mengurangi angka kriminalitas. Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah, menangani pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum, serta memastikan masyarakat mematuhi berbagai peraturan yang ada. Keberadaan Satpol PP di lapangan, baik dalam melakukan patroli rutin maupun mengatasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan gangguan, sangat membantu dalam mencegah munculnya tindak kriminal. Satpol PP juga sering kali bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan kerusuhan sosial, kerusakan fasilitas umum, atau pelanggaran berat yang berhubungan dengan ketertiban. Dalam banyak kasus, peran Satpol PP yang cepat tanggap dalam menangani pelanggaran di tingkat lokal dapat mencegah berkembangnya potensi kejahatan yang lebih besar. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan disiplin terhadap peraturan yang ada.

Selain itu, program-program yang melibatkan aparat keamanan dan masyarakat, seperti patroli rutin, peningkatan kehadiran polisi di area rawan, serta edukasi hukum kepada masyarakat, telah membuahkan hasil yang signifikan. Teknologi juga berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk memantau dan mendeteksi potensi kejahatan lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum kejadian terjadi. Peningkatan kesejahteraan ekonomi juga turut berperan dalam menurunkan angka kriminalitas. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial, mereka cenderung lebih sedikit terlibat dalam kegiatan kriminal. Dengan berjalannya waktu, angka kriminalitas yang menurun ini memberi harapan bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan, ketertiban dan keamanan dapat terus terjaga dengan baik di masa depan.

Ke depan, upaya yang perlu dilakukan oleh Satpol PP sangat penting untuk mengurangi gangguan kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Hal ini dilakukan agar lonjakan gangguan kriminalitas tidak terjadi di kemudian hari seperti pada tahun 2021 ke tahun 2022. Satpol PP, sebagai garda terdepan dalam penegakan ketertiban umum, memiliki peran yang krusial dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal di masyarakat. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah intensifikasi patroli rutin di berbagai area rawan kejahatan. Dengan kehadiran Satpol PP yang lebih terlihat di tengah masyarakat, potensi terjadinya gangguan keamanan bisa diminimalisir, karena pelaku kejahatan cenderung menghindari lokasi yang diawasi dengan ketat. Selain itu, Satpol PP juga perlu terus meningkatkan penegakan peraturan daerah yang ada, baik yang berkaitan dengan ketertiban umum maupun pelanggaran-pelanggaran ringan yang dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar jika tidak ditangani dengan segera. Dengan memastikan peraturan ditaati secara konsisten, Satpol PP dapat mengurangi ruang gerak bagi tindakan kriminal. Kerjasama yang lebih erat antara Satpol PP dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya juga harus diperkuat. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa penanganan gangguan keamanan dapat lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi dengan baik. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan

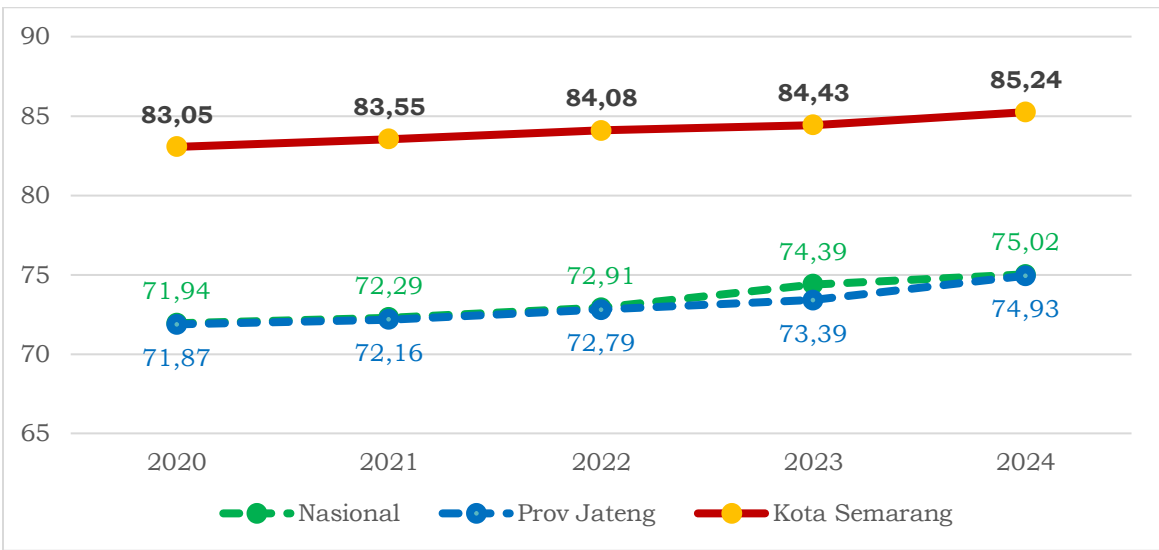
gangguan kriminalitas dapat berkurang secara signifikan, dan ketertiban serta keamanan masyarakat dapat terus terjaga.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2024 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 menjadi 83,55, dan juga mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 dan 2023 yang menjadi secara berturut-turut yaitu 84,08 dan 84,43. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Adapun skor-skor dari indikator pembentuk IPM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata2 Lama Sekolah (RLS)	Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah)
2020	77,34	15,52	10,53	15.243
2021	77,51	15,53	10,78	15.425
2022	77,69	15,54	10,80	16.04
2023	77,90	15,55	10,81	16.420
2024	78,23	15,57	11,05	16.990

Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data capaian indikator pembentuk IPM yang terlampir, dapat diamati bahwa setiap komposit indikator yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi selalu mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pembangunan yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks Kota Semarang, hasil yang positif ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam berbagai bidang yang menjadi pondasi utama pembangunan.

Di sektor kesehatan, misalnya, tercatat adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat, yang berkontribusi pada turunnya angka kematian dan meningkatnya harapan hidup. Selain itu, upaya-upaya peningkatan fasilitas kesehatan dan program kesehatan preventif di berbagai level juga berperan dalam memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Sementara itu, di bidang pendidikan, Kota Semarang berhasil memperluas akses dan kualitas pendidikan yang semakin merata, baik di tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya meminimalisir kesenjangan dalam akses pendidikan dengan menyediakan berbagai program beasiswa, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah. Semua upaya ini memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan. Di sektor ekonomi, Kota Semarang mengalami perkembangan yang signifikan, dengan terus berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa, konstruksi dan industri pengolahan yang memacu pertumbuhan ekonomi kota. Kebijakan yang mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sektor UMKM juga turut membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan, seperti aksesibilitas transportasi dan konektivitas antar daerah, juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi penduduk setempat.

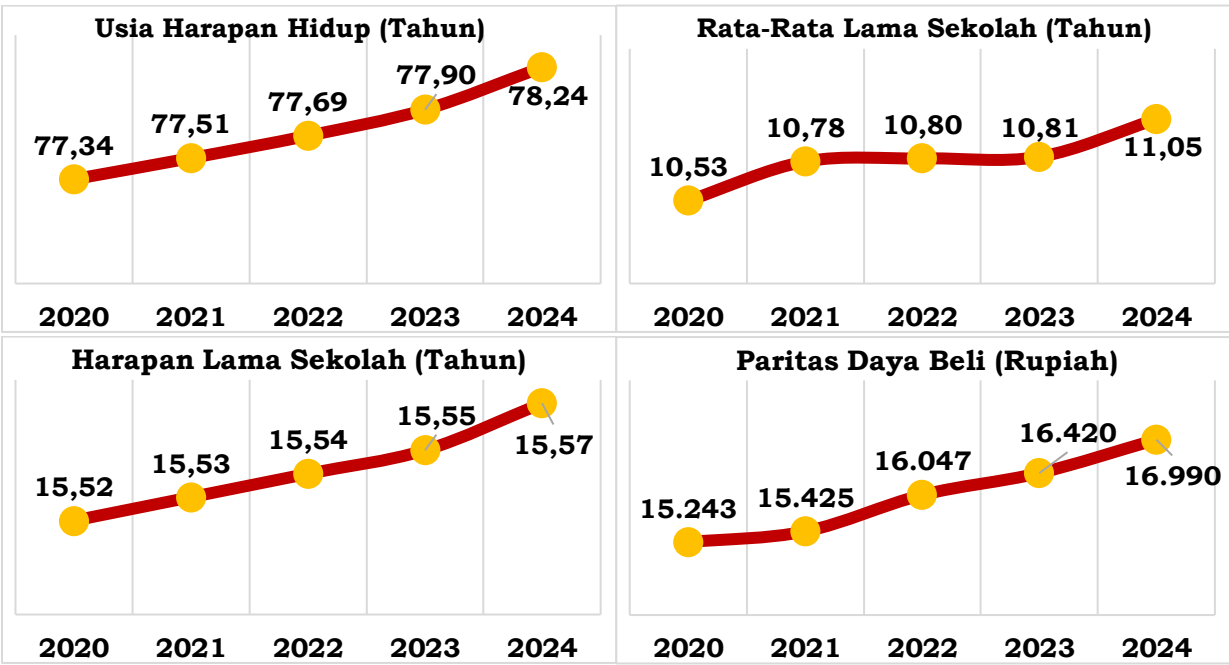
Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kota Semarang menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi telah berjalan dengan baik, menciptakan sinergi yang mendukung tercapainya kesejahteraan yang lebih merata. Pencapaian ini tentu saja merupakan hasil dari kerja keras pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan melanjutkan upaya peningkatan di ketiga sektor ini, Kota Semarang memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi model pembangunan kota yang berkelanjutan. IPM Kota Semarang dan Pertumbuhan IPM Kota Semarang serta Perbandingan IPM Kota Semarang dengan IPM kota-kota besar setara ditunjukkan pada gambar berikut :

Tabel 2.18 IPM Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

NO	KOTA/ PROVINSI/ NASIONAL	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semarang	Angka	83,05	83,55	84,08	84,43	85,24
2	Bandung	Angka	81,51	81,96	82,50	83,04	83,75
3	Surabaya	Angka	82,23	82,31	82,74	83,99	84,69
4	Medan	Angka	80,98	81,21	81,76	82,61	83,23
5	Makassar	Angka	82,25	82,66	83,12	83,52	83,90
6	Yogyakarta	Angka	86,61	87,18	87,69	88,61	89,10
7	Jawa Tengah	Angka	71,87	72,16	72,79	73,39	74,93
8	Nasional	Angka	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02

Sumber: BPS, 2025

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi dampak pandemi, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta mengoptimalkan berbagai program pembangunan yang berfokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Selain itu, kenaikan yang konsisten ini juga menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, serta program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif. Berbagai langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan IPM, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan yang lebih merata di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Adapun skor-skor dari indikator pembentuk IPM sejak tahun 2020-2024 mengikuti tabel sebagai berikut.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Gambar 2.24 Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2020-2024

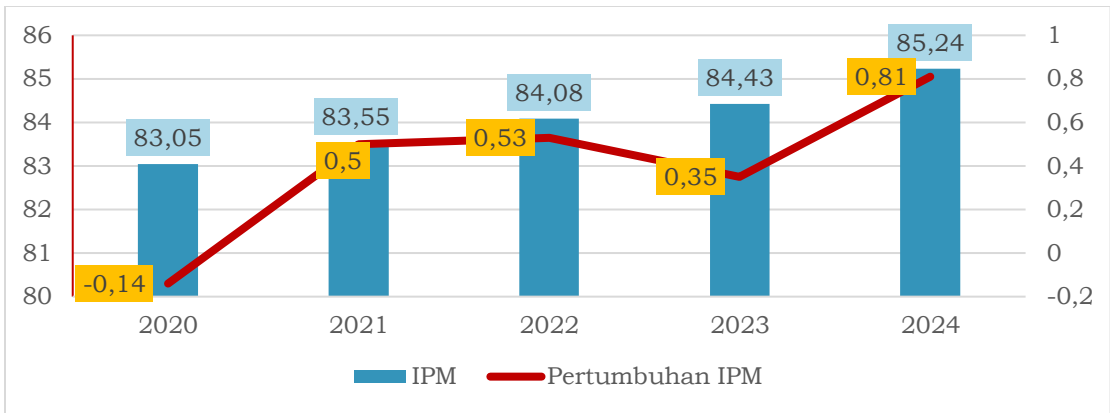
Berdasarkan data capaian indikator pembentuk IPM yang terlampir, dapat diamati bahwa setiap komposit indikator yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi selalu mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam

implementasi kebijakan pembangunan yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks Kota Semarang, hasil yang positif ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam berbagai bidang yang menjadi pondasi utama pembangunan.

Di sektor kesehatan, misalnya, tercatat adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat, yang berkontribusi pada turunnya angka kematian dan meningkatnya harapan hidup. Selain itu, upaya-upaya peningkatan fasilitas kesehatan dan program kesehatan preventif di berbagai level juga berperan dalam memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Sementara itu, di bidang pendidikan, Kota Semarang berhasil memperluas akses dan kualitas pendidikan yang semakin merata, baik di tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya meminimalisir kesenjangan dalam akses pendidikan dengan menyediakan berbagai program beasiswa, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah. Semua upaya ini memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan. Di sektor ekonomi, Kota Semarang mengalami perkembangan yang signifikan, dengan terus berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa, konstruksi dan industri pengolahan yang memacu pertumbuhan ekonomi kota. Kebijakan yang mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sektor UMKM juga turut membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan, seperti aksesibilitas transportasi dan konektivitas antar daerah, juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi penduduk setempat.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kota Semarang menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi telah berjalan dengan baik, menciptakan sinergi yang mendukung tercapainya kesejahteraan yang lebih merata. Pencapaian ini tentu saja merupakan hasil dari kerja keras pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan melanjutkan upaya peningkatan di ketiga sektor ini, Kota Semarang memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi model pembangunan kota yang berkelanjutan.

IPM Kota Semarang menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata IPM Nasional. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang telah berjalan dengan baik dan berhasil menciptakan kemajuan yang signifikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan posisi IPM yang lebih tinggi dari provinsi lainnya, Kota Semarang menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Berikut disajikan grafik pertumbuhan IPM Kota Semarang untuk kurun waktu tahun 2020-2024.



Sumber: BPS, 2025

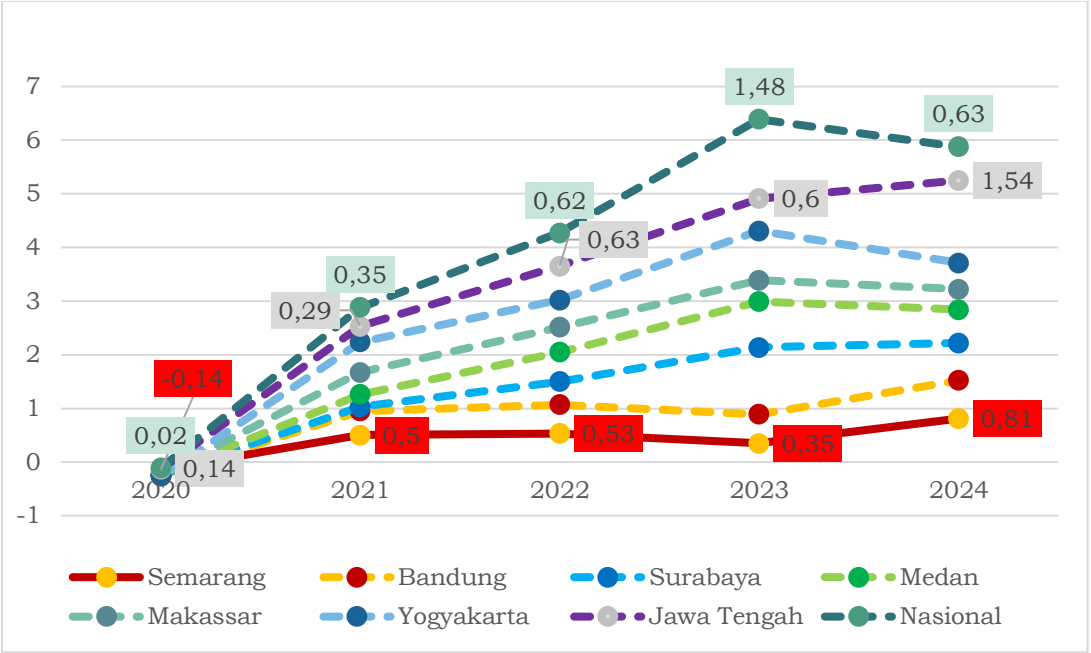
Gambar 2.25 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2020-2024

Pertumbuhan IPM Kota Semarang pada tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Setelah pandemi covid-19, IPM Kota Semarang kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,5; tahun 2022 sebesar 0,53, tahun 2023 sebesar 0,35, dan pada tahun 2024 sebesar 0,81 hingga IPM Kota Semarang pada tahun 2024 mencapai 85,24. Pertumbuhan IPM Kota Semarang di tahun 2024 tertinggi dibandingkan pertumbuhan IPM kota besar lainnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut data pertumbuhan IPM Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.

Tabel 2.19 Pertumbuhan IPM Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasioal Tahun 2020-2024

KABUPATEN/ KOTA	IPM					PERTUMBUHAN IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Semarang	83,05	83,55	84,08	84,43	85,24	-0,14	0,5	0,53	0,35	0,81
Bandung	81,51	81,96	82,50	83,04	83,75	-0,11	0,45	0,54	0,54	0,71
Surabaya	82,23	82,31	82,74	83,99	84,69	0,01	0,08	0,43	1,25	0,70
Medan	80,98	81,21	81,76	82,61	83,23	0,01	0,23	0,55	0,85	0,62
Makassar	82,25	82,66	83,12	83,52	83,90	0,00	0,41	0,46	0,40	0,38
Yogyakarta	86,61	87,18	87,69	88,61	89,10	-0,04	0,57	0,51	0,92	0,49
Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79	73,39	74,93	0,14	0,29	0,63	0,6	1,54
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	0,02	0,35	0,62	1,48	0,63

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2025



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2024

Gambar 2.26 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sementara itu, Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Semarang pada Tahun 2024 sebesar 0,34 tahun, lebih besar dibandingkan dengan kenaikan kota besar setara Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Yogyakarta yang masing-masing tumbuh 0,33 tahun, 0,19 tahun, 0,23 tahun, 0,09 tahun dan 0,20 tahun. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan AHH Kota Semarang lebih besar dari pertumbuhan nasional yang sebesar 0,26 tahun pada tahun 2024. Berikut disajikan data dan grafik terkait dengan AHH dan Pertumbuhan AHH Kota Semarang Tahun 2020-2024:

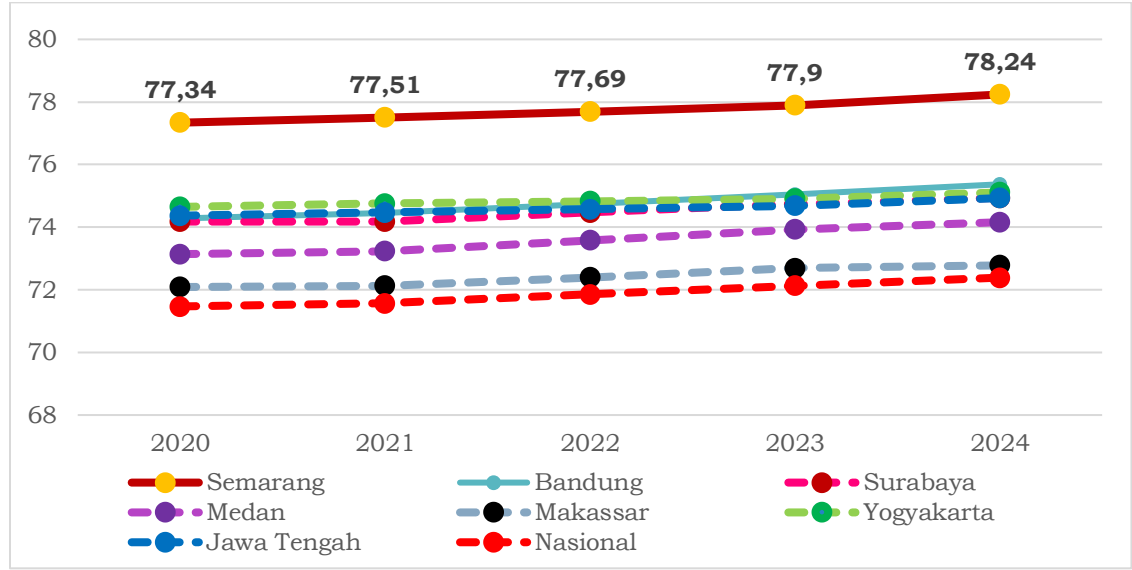
Tabel 2.20 Pertumbuhan AHH Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasioal Tahun 2020-2024

Kab/Kota	AHH					Pertumbuhan AHH				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Semarang	77,34	77,51	77,69	77,90	78,24	0,09	0,17	0,18	0,21	0,34
Bandung	74,28	74,46	74,75	75,04	75,37	0,14	0,18	0,29	0,29	0,33
Surabaya	74,18	74,18	74,47	74,75	74,94	0,05	0,00	0,29	0,28	0,19
Medan	73,14	73,23	73,58	73,93	74,16	0,16	0,09	0,35	0,35	0,23
Makassar	72,09	72,13	72,40	72,69	72,78	0,09	0,04	0,27	0,29	0,09
Yogyakarta	74,65	74,76	74,83	74,91	75,11	0,09	0,11	0,07	0,08	0,20
Jawa Tengah	74,37	74,47	74,57	74,69	74,93	0,14	0,10	0,10	0,12	0,24
Nasional	71,47	71,57	71,85	72,13	72,39	0,13	0,10	0,28	0,28	0,26

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024

Pertumbuhan AHH yang signifikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan layanan kesehatan, fasilitas medis, serta program kesehatan preventif dan promotif. Misalnya, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dengan perbaikan kualitas fasilitas layanan kesehatan seperti pembangunan gedung rawat inap di RSUD KRMT Wongsonegoro, rehabilitasi dan pembangunan puskesmas baru, serta edukasi kesehatan masyarakat yang semakin baik, semua berkontribusi pada

penurunan angka kematian dan perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan. Pertumbuhan peningkatan AHH yang lebih baik ini juga mencerminkan kesuksesan berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup, seperti peningkatan sanitasi, akses air bersih, serta perbaikan kondisi lingkungan hidup yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan memberikan akses yang lebih baik bagi warganya untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Dengan terus berfokus pada peningkatan sektor kesehatan dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, Kota Semarang berpotensi untuk terus meningkatkan AHH warganya di masa yang akan datang.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.27 Pertumbuhan AHH Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan RLS Kota Semarang sebesar 0,24 tahun pada tahun 2024. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan dengan kenaikan kota setara lain. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan RLS Kota Semarang lebih tinggi dari pertumbuhan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 0,08 dan 0,01 tahun. Pertumbuhan RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) Kota Semarang sebesar 10,81 tahun pada tahun 2023. RLS tersebut telah melampaui target tahun 2022 yaitu sebesar 10,59 tahun. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2023 RLS Kota Semarang naik sebesar 0,01 tahun. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan Bandung, Surabaya, Medan dan Yogyakarta. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan RLS Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,08 tahun. Data RLS dan pertumbuhan RLS dapat dilihat melalui tabel dan grafik yang digambarkan sebagai berikut.

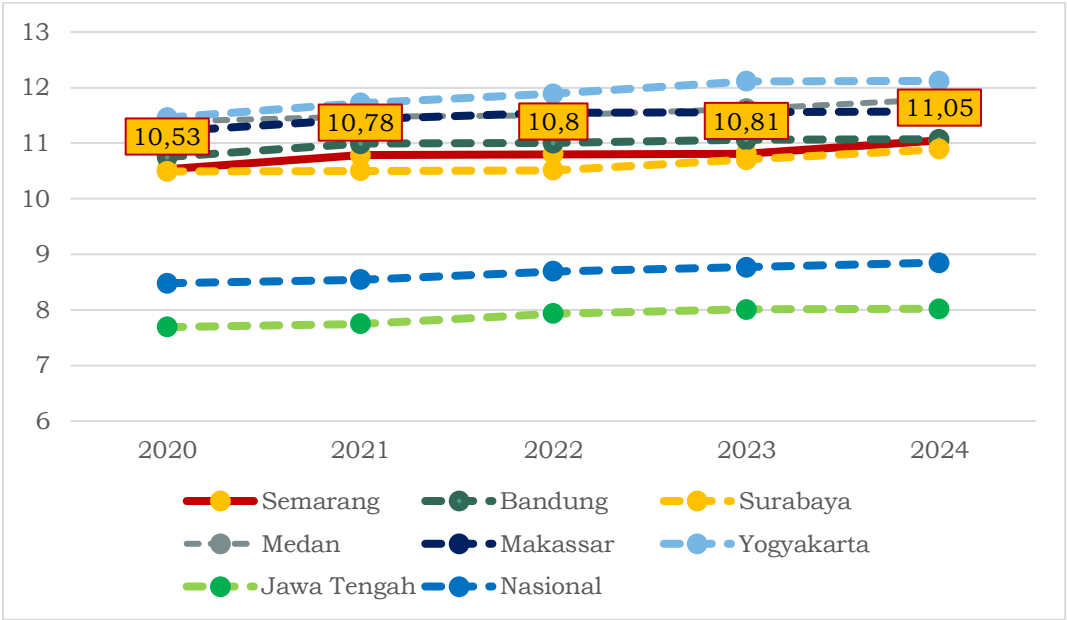
Tabel 2.21 Pertumbuhan RLS Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasioal Tahun 2020-2024

Kab/ Kota	RLS					Pertumbuhan RLS				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Semarang	10,53	10,78	10,80	10,81	11,05	0,01	0,25	0,02	0,01	0,24
Bandung	10,75	10,99	11,00	11,06	11,07	0,11	0,24	0,01	0,06	0,01
Surabaya	10,49	10,50	10,51	10,70	10,89	0,01	0,01	0,01	0,19	0,19
Medan	11,39	11,48	11,50	11,62	11,79	0,01	0,09	0,02	0,12	0,17
Makassar	11,21	11,43	11,55	11,56	11,57	0,11	0,22	0,12	0,01	0,01
Yogyakarta	11,46	11,72	11,89	12,11	12,12	0,01	0,26	0,17	0,22	0,01
Jawa Tengah	7,69	7,75	7,93	8,01	8,02	0,18	0,06	0,18	0,08	0,01
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85	0,17	0,06	0,15	0,08	0,08

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024

Kenaikan RLS yang signifikan di Kota Semarang ini mencerminkan beberapa faktor positif, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, keberhasilan program-program pemerintah yang mendukung akses pendidikan yang lebih merata, serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu, mungkin ada juga peran sektor swasta atau lembaga Pendidikan non-formal yang turut mempercepat laju peningkatan RLS di Kota Semarang.

Namun, meskipun ada kenaikan yang cukup signifikan, masih banyak yang perlu diperhatikan, karena capainnya masih di bawah beberapa kota setara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya seperti kesenjangan antar wilayah, kualitas pendidikan di tiap tingkat, dan pemerataan kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus berupaya untuk menjaga dan mempercepat laju pertumbuhan RLS ini agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kota Semarang.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.28 Pertumbuhan RLS Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan HLS (Harapan Lama Sekolah) Kota Semarang sebesar 15,55 tahun pada tahun 2023, sedikit lebih rendah target tahun 2023 sebesar 15,58 tahun. Meski demikian pertumbuhan HLS Kota Semarang positif meningkat

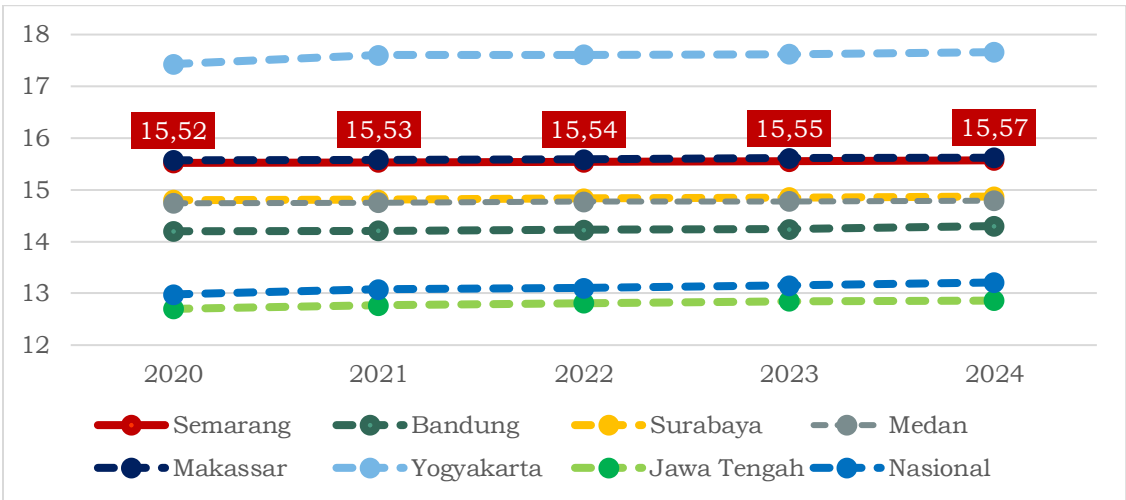
sebesar 0,01 tahun. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan kota besar setara lain seperti Bandung, Surabaya, Medan dan Yogyakarta. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, pertumbuhan HLS Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan provinsi dan nasional. Data terkait HLS ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Pertumbuhan HLS Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Kab/Kota	HLS					Pertumbuhan HLS				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Semarang	15,52	15,53	15,54	15,55	15,57	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Bandung	14,20	14,21	14,23	14,24	14,30	0,01	0,01	0,02	0,01	0,06
Surabaya	14,80	14,81	14,83	14,85	14,87	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Medan	14,74	14,75	14,77	14,78	14,79	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Makassar	15,57	15,58	15,59	15,61	15,62	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
Yogyakarta	17,43	17,60	17,61	17,62	17,66	0,15	0,17	0,01	0,01	0,04
Jawa Tengah	12,70	12,77	12,81	12,85	12,86	0,02	0,07	0,04	0,04	0,01
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21	0,03	0,10	0,02	0,05	0,06

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024

Pertumbuhan HLS Kota Semarang yang lebih kecil dibandingkan dengan Bandung dan Yogyakarta, serta capaian provinsi dan nasional, menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, laju peningkatan harapan lama sekolah di Semarang masih belum secepat kota-kota lainnya. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas dan akses pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, atau adanya tantangan struktural yang menghambat perkembangan sistem pendidikan. Peningkatan yang lebih lambat dibandingkan dengan Bandung, Yogyakarta, provinsi dan nasional dapat menjadi indikator bahwa masih ada ketimpangan atau kendala di Kota Semarang yang perlu diatasi. Mungkin ada kekurangan dalam fasilitas pendidikan, kurangnya keterjangkauan bagi kelompok masyarakat tertentu, atau kurangnya perhatian terhadap kualitas pendidikan.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.29 Pertumbuhan HLS Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

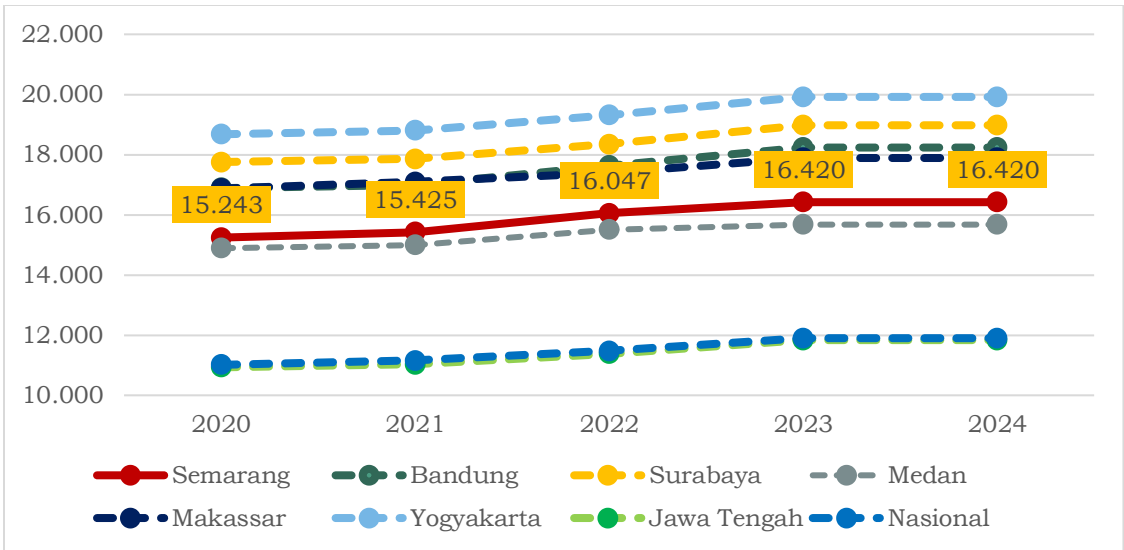
Pada tahun 2024 pengeluaran per kapita Kota Semarang sebesar 16.420 ribu rupiah/orang/tahun, lebih kecil dibandingkan dengan kota besar setara Bandung, Surabaya, Makassar dan Yogyakarta namun lebih besar dibanding

dengan Kota Medan. Pengeluaran per kapita Kota Semarang lebih besar dari pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar 11.835 ribu rupiah/orang/tahun dan pengeluaran per kapita nasional yang sebesar 11.899 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.23 Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasioal Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita					Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Semarang	15.243	15.425	16.047	16.420	16.990	-307	182	622	373	570
Bandung	16.887	16.996	17.639	18.236	18.795	-367	109	643	597	559
Surabaya	17.755	17.862	18.345	18.977	19.666	-99	107	483	632	689
Medan	14.890	14.999	15.503	15.674	16.069	-143	109	504	171	395
Makassar	16.873	17.097	17.406	17.889	18.386	-116	224	309	483	497
Yogyakarta	18.678	18.801	19.319	19.920	20.603	-447	123	518	601	683
Jawa Tengah	10.930	11.034	11.377	11.835	12.276	-172	104	343	458	441
Nasional	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341	-286	143	323	420	442

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024



Sumber: BPS,2025

Gambar 2.30 Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kota Semarang, Kota Besar Setara Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada saat pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020, kondisi perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Kota Semarang, mengalami dampak yang signifikan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan dampak ekonomi tersebut adalah pengeluaran per kapita yang mengalami penurunan. Di Kota Semarang, pengeluaran per kapita tercatat mengalami penurunan sebesar 307 ribu rupiah per orang per tahun pada masa pandemi. Penurunan ini dapat dimaklumi mengingat banyaknya sektor ekonomi yang terhenti atau terhambat akibat pembatasan sosial, penurunan aktivitas bisnis, dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan mereka. Banyak individu yang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang, sementara

sektor-sektor usaha, seperti pariwisata, restoran, dan perdagangan, juga mengalami penurunan tajam dalam aktivitasnya. Semua faktor ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, yang terlihat jelas dalam penurunan pengeluaran per kapita.

Setelah berlalunya masa puncak pandemi Covid-19, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mengacu pada data yang ada, pengeluaran per kapita di Kota Semarang mulai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setelah tahun 2020. Berdasarkan tabel yang tersedia, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan berturut-turut pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dengan nominal angka peningkatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita mengalami kenaikan sebesar 182 ribu rupiah per orang per tahun. Meskipun nominal kenaikan ini terbilang moderat, namun ini merupakan indikasi awal bahwa masyarakat mulai kembali menggerakkan roda perekonomian melalui konsumsi, meskipun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpastian ekonomi yang masih menyelimuti.

Pada tahun 2022, peningkatan pengeluaran per kapita mengalami lonjakan yang cukup besar, yakni sebesar 622 ribu rupiah per orang per tahun. Lonjakan ini mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam daya beli masyarakat. Peningkatan yang besar ini bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemulihan sektor-sektor yang terdampak pandemi, program bantuan sosial atau stimulus ekonomi dari pemerintah yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta kembalinya kepercayaan konsumen untuk berbelanja dan mengkonsumsi barang dan jasa. Dengan meningkatnya pengeluaran masyarakat, ekonomi mulai bergerak lebih dinamis, menciptakan lebih banyak peluang bagi bisnis lokal untuk berkembang.

Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024, meskipun pengeluaran per kapita masih terus meningkat, kenaikan yang tercatat sebesar 373 ribu rupiah per orang per tahun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, capaian pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kota Semarang telah benar-benar pulih dan bahkan mengalami penguatan lebih lanjut. Peningkatan pengeluaran ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa daya beli masyarakat semakin tinggi, yang pada gilirannya mencerminkan bahwa kondisi ekonomi secara keseluruhan telah membaik. Semakin tingginya pengeluaran per kapita ini juga dapat menjadi indikator bahwa masyarakat Kota Semarang semakin sejahtera, dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik dan juga memiliki kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih berkualitas.

Peningkatan pengeluaran per kapita ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi, tetapi juga berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk mengakses berbagai produk dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, masyarakat bisa lebih banyak berbelanja kebutuhan sehari-hari, mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan, atau bahkan berlibur dan menikmati fasilitas rekreasi yang turut mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata. Namun, meskipun ada tren positif yang tercatat, penting untuk mencermati bahwa peningkatan pengeluaran per kapita tidak

selalu merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memperhatikan segmen-segmen yang mungkin belum merasakan dampak positif dari pemulihan ekonomi ini. Sebagai contoh, masyarakat di daerah pinggiran atau yang bergantung pada sektor yang belum pulih sepenuhnya, seperti sektor informal, mungkin belum merasakan manfaat yang signifikan dari peningkatan daya beli ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong inklusivitas dalam pemulihan ekonomi dan memastikan bahwa program-program sosial serta bantuan yang tepat sasaran dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan pengeluaran per kapita di Kota Semarang pasca-pandemi adalah sebuah sinyal positif yang menggambarkan bahwa perekonomian Kota Semarang sudah mulai bangkit. Masyarakatnya semakin mampu untuk mengkonsumsi lebih banyak, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk menjaga tren positif ini, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pemerataan manfaat pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor.

b. Kesempatan kerja

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah atau negara. Indikator ini sangat penting untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja di suatu tempat, karena semakin tinggi TPT, semakin besar pula jumlah individu yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan meskipun telah aktif mencari pekerjaan. Dengan memantau TPT, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa besar kesempatan kerja yang tersedia di wilayah tersebut.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali sektor perekonomian dan ketenagakerjaan. Selama pandemi, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, sementara yang lain terpaksa mengalami pengurangan jam kerja atau bahkan perubahan signifikan dalam cara mereka bekerja. Banyak sektor industri yang terdampak, dan banyak bisnis yang terpaksa menutup operasional mereka sementara waktu atau mengurangi kapasitasnya. Akibatnya, banyak individu yang terpaksa menghadapi situasi sulit, seperti tidak dapat bekerja atau menghadapi ketidakpastian dalam jam kerja dan pendapatan.

Di samping itu, pandemi juga memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi, terutama dalam hal penggunaan teknologi digital. Kehadiran teknologi ini memungkinkan berbagai

jenis pekerjaan dapat dilakukan dari jarak jauh (remote), yang memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat kerja. Hal ini membuat pola kerja yang sebelumnya lebih terikat dengan lokasi fisik dan jam kerja yang tetap, kini bisa dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan individu. Akan tetapi, perubahan ini juga menuntut pekerja untuk terus mengembangkan keterampilan mereka, terutama dalam penggunaan teknologi dan pengetahuan digital. Dalam rangka memulihkan sektor ketenagakerjaan pasca-pandemi, langkah penting yang perlu diambil adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan meningkatkan kompetensi mereka. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai hal ini adalah melalui pelatihan vokasi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang telah berubah. Pelatihan ini tidak hanya akan memberikan keterampilan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga mempersiapkan para pekerja untuk menghadapi tantangan baru di dunia kerja yang semakin bergantung pada teknologi digital dan fleksibilitas waktu serta tempat kerja. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi yang tepat sangat penting agar pekerja dapat lebih siap bersaing dan beradaptasi dengan dunia kerja pasca-pandemi, sekaligus membantu menurunkan angka pengangguran yang mungkin meningkat akibat dampak pandemi.

Dalam lingkup Kota Semarang, TPT dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 naik tajam menjadi sebesar 9,57% karena pandemi Covid-19 dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi sebesar 9,54% dan di tahun 2022 telah mencapai 7,60%. Pada tahun 2023, TPT di Kota Semarang semakin turun menjadi 5,99% dan tahun 2024 kembali menurun menjadi 5,82%. Adapun tren TPT Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.24 Perkembangan TPT di Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Semarang	9,57	9,54	7,60	5,99	5,82
Bandung	8,18	11,19	11,46	8,83	7,40
Surabaya	5,76	9,79	9,68	6,76	4,91
Medan	8,53	10,74	10,81	8,67	8,30
Makassar	15,92	13,18	11,82	10,60	9,71
Yogyakarta	4,80	9,16	9,13	6,07	5,80
Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	5,13	4,78
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,32	4,91

Sumber: BPS, 2025

TPT di Kota Semarang pada tahun 2024 adalah 5,82%. Persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Akan tetapi, angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kota-kota besar setara. Hal ini menunjukkan bahwa presentase jumlah penganggur di Kota Semarang lebih rendah daripada kota-kota besar setara.

Meski demikian, masih banyak langkah konkret yang perlu diambil untuk menurunkan angka TPT, mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah utama adalah memastikan bahwa tenaga kerja yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, yang dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, maupun informal melalui pelatihan-pelatihan, baik di BLK maupun LPK Swasta. Selain itu, penting juga untuk memfasilitasi proses penempatan tenaga kerja ke dunia usaha dengan cara yang lebih efisien dan

efektif. Upaya ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, seperti dunia usaha dan lembaga pendidikan, untuk saling berkomunikasi dan mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja secara lebih tepat. Hal ini akan menciptakan suatu "link and match" yang lebih baik, di mana pelatihan dan keterampilan yang diberikan dapat selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Selain itu, penting juga untuk melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap pekerja sektor non-formal, seperti mereka yang bekerja di platform belanja daring, ojek online, dan sektor informal lainnya.

Pendataan yang tepat ini menjadi sangat penting mengingat tren ekonomi yang kini lebih banyak bergerak ke sektor non-formal. Sektor ini dinilai lebih praktis dan menguntungkan, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Semarang, di mana masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dan lebih mengutamakan kemudahan, serta fleksibilitas dalam bekerja. Oleh karena itu, jika sektor non-formal berkembang pesat, ini bisa menjadi strategi cadangan bagi pemerintah kota untuk mengurangi angka pengangguran, dengan memberdayakan individu-individu yang menganggur untuk bekerja dalam sektor tersebut.

TPT di Kota Semarang jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Tengah menunjukkan bahwa angkanya masih lebih tinggi. Selain dampak dari pandemi Covid-19, tingginya TPT di Kota Semarang juga dipengaruhi oleh faktor struktural, salah satunya adalah jumlah masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menciptakan situasi di mana banyak individu yang memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Masyarakat pada kriteria tersebut mungkin enggan menerima pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan yang telah diperoleh, sehingga tingkat pengangguran di Kota Semarang menjadi lebih tinggi daripada di kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini diperburuk dengan rendahnya persentase pekerja di sektor pertanian Kota Semarang pada tahun 2023, yang hanya mencatatkan angka 2,24%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, di mana sektor pertanian masih menyerap lebih dari 30% tenaga kerja, bahkan di atas 40% tenaga kerja. Adapun capaian TPT di Kota Semarang dan beberapa kabupaten kota lain di Provinsi Jawa Tengah mengikuti uraian sebagai berikut.

Tabel 2.25 Perkembangan TPT di Kota Semarang, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Semarang	9,57	9,54	7,60	5,99	5,82
Grobogan	4,50	4,38	4,40	4,02	3,23
Rembang	3,69	4,83	1,76	2,06	2,84
Wonogiri	4,27	2,43	1,95	1,92	2,40

Sumber: BPS, 2025

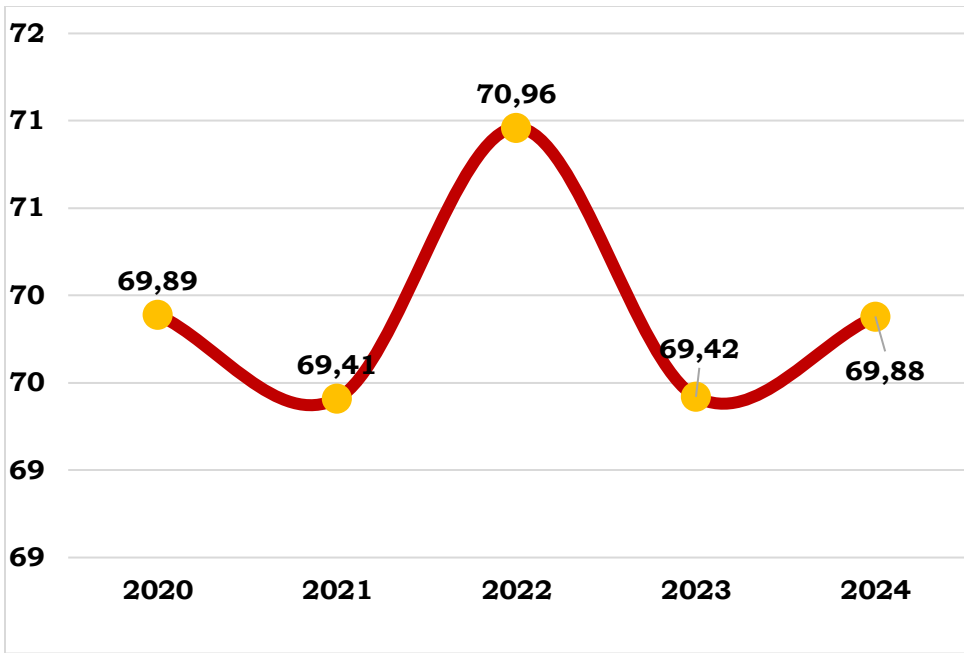
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPAK, maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja pada daerah tersebut. Fluktuasi TPAK di Kota Semarang yang tetap berada pada kisaran 69,00 hingga 71,00 persen menunjukkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja di kota ini relatif stabil. Kondisi ini mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan partisipasi masyarakat dalam dunia kerja, meskipun tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan sektor industri, dan kebijakan ketenagakerjaan. Perkembangan TPAK di Kota Semarang dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	TPT (%)		TPAK (%)	
	Prov. Jateng	Kota Semarang	Prov. Jateng	Kota Semarang
2020	6,48	9,57	69,43	69,89
2021	5,95	9,54	69,58	69,41
2022	5,57	7,60	70,84	70,96
2023	5,13	5,99	71,72	69,42
2024	4,78	5,82	73,74	69,88

Sumber: BPS, 2025



Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Pada tahun 2024, angka TPAK berada pada 69,88%, lebih rendah dari angka TPAK Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,74%. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja di level kota, yang akan berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan TPAK di Kota Semarang dapat memberikan peluang lebih besar dalam menarik investasi, karena investor cenderung tertarik pada daerah dengan angkatan kerja yang lebih besar dan siap untuk bekerja. Selain itu, meningkatnya TPAK juga bisa mencerminkan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja, yang lebih kompeten dan siap beradaptasi dengan berbagai kebutuhan dunia usaha. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya bersama antara pemerintah kota dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan, serta pengembangan sektor-sektor yang berpotensi menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja dan TPAK yang mendekati angka provinsi atau bahkan melebihi angka tersebut, Kota Semarang memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang lebih kompetitif, tidak hanya dalam menarik investasi, tetapi juga dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perkembangan angaktnan kerja Kota Semarang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

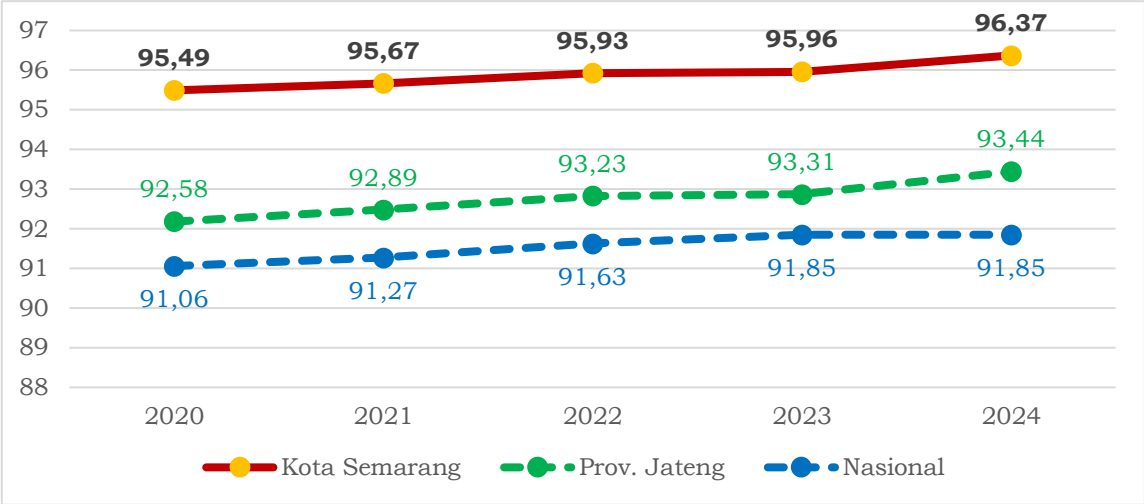
Tabel 2.27 Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja:					
Bekerja	925.963	936.076	994.091	873.358	891.497
Pengangguran Terbuka	98.001	98.718	81.736	55.656	55.121
Total Angkatan Kerja	1.023.964	1.034.794	1.075.827	929.014	946.618

Sumber: BPS Prov. Jateng 2024

c. Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pencapaian IPG Kota Semarang selalu melebihi IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional.



Sumber : BPS Nasional, 2024
Gambar 2.32 Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengahdan Nasional tahun 2020-2024

IPG Kota Semarang pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 96,37%, yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,44% dan Nasional sebesar 91,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang semakin baik. Dibandingkan dengan 5 besar setara, Kota Semarang menempati posisi di bawah Kota Yogyakarta yang mencapai angka 98,65% seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28 Perbandingan IPG Kota Semarang dengan Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Semarang	95,49	95,67	95,93	95,96	96,37
Bandung	94,68	94,72	94,81	94,71	94,87
Surabaya	93,58	93,90	94,21	94,36	94,53
Medan	94,00	93,76	93,85	94,13	94,49
Makassar	94,47	94,44	94,52	94,65	94,99
Yogyakarta	98,16	98,32	98,48	98,47	98,65
Jawa Tengah	92,58	92,89	93,23	93,31	93,44
Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

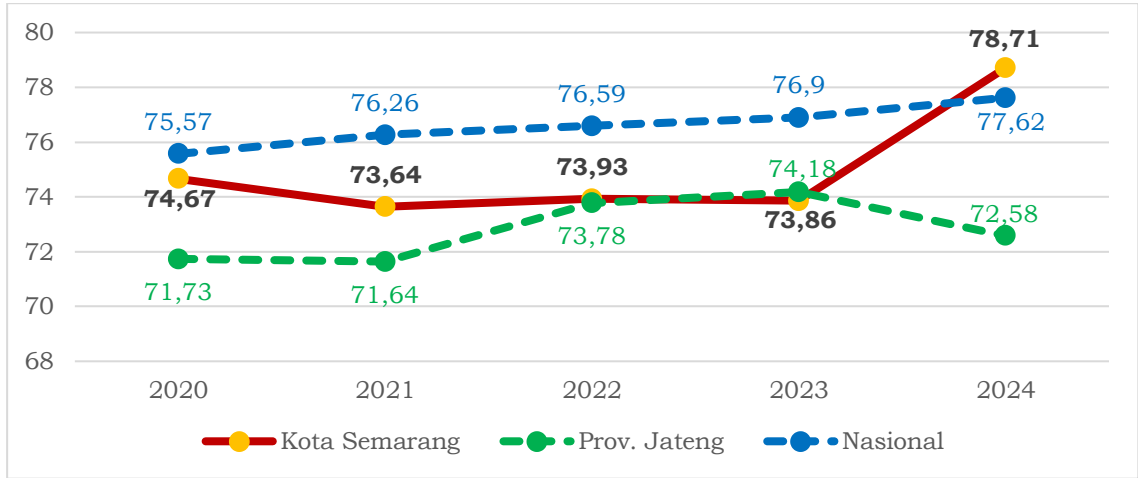
Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kota Semarang telah berhasil mencapai tingkat kesetaraan dan keadilan gender yang lebih baik jika dibandingkan dengan Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional. Pencapaian ini mencerminkan adanya upaya yang lebih signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan publik dan sosial, serta memperlihatkan kemajuan dalam memperkuat peran

perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, masyarakat di Kota Semarang kini dapat merasakan manfaat dari lingkungan yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapatkan hak-haknya secara setara. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan melalui program-program penyuluhan yang menysasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja, dengan tujuan untuk menghilangkan stereotip dan diskriminasi berbasis gender.

d. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Progres IDG dari tahun 2020-2024 terlihat pada gambar sebagai berikut.



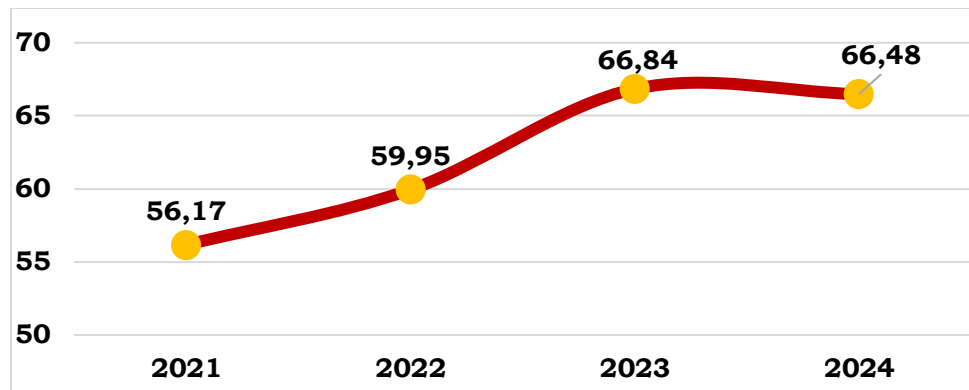
Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2.33 Perkembangan IDG Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kota Semarang mengalami lonjakan indeks pemberdayaan gender yang cukup besar pada tahun 2024 menjadi sebesar 78,71, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam pemberdayaan gender di kota ini. IDG Kota Semarang tahun 2024 melebihi capaian IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

e. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga iBangga digunakan untuk menggambarkan tingkat peran dan fungsi keluarga dalam masyarakat, serta bagaimana kondisi keluarga dapat berkontribusi terhadap pembangunan suatu daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 3 Tahun 2022, yang mengatur mengenai sistem penilaian pembangunan keluarga. Nilai iBangga diukur sejak tahun 2021, memiliki peran penting dalam mengklasifikasikan status pembangunan keluarga di suatu wilayah, yang dapat digolongkan ke dalam kategori tangguh, berkembang, atau rentan. Penilaian ini berdasarkan tiga dimensi utama yang mencakup ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Adapun capaian iBangga Kota Semarang mengikuti tabel sebagai berikut.



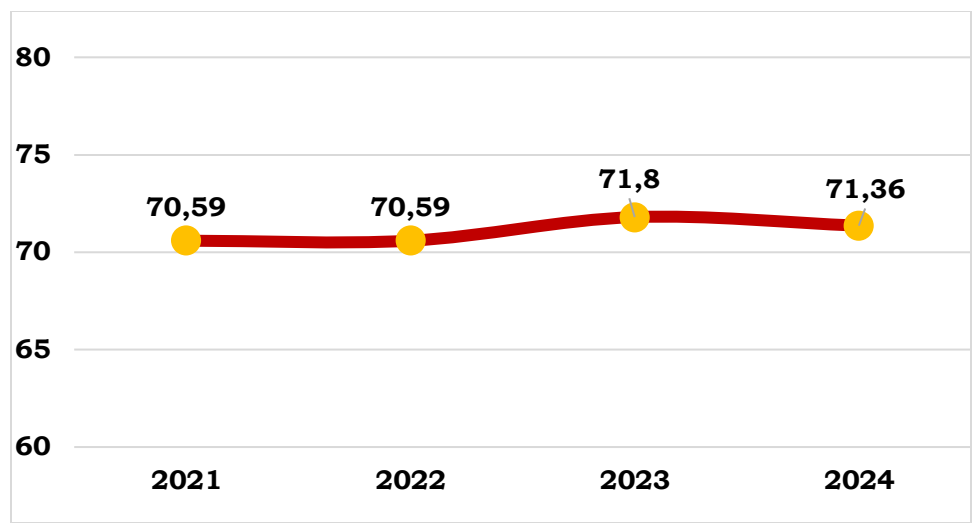
Sumber: BKKBN RI, 2025

Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Semarang Tahun 2021-2024

iBangga di Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2024 cenderung menurun sedikit menjadi 66,48. Meskipun ada penurunan, angka ini tidak terlalu signifikan dan masih berada dalam rentang yang cukup baik, yaitu di angka 66,00. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, kualitas kehidupan keluarga di Kota Semarang secara keseluruhan masih berada pada tingkat yang memadai dan stabil. Penurunan kecil ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi sosial-ekonomi, ketimpangan dalam distribusi program-program pemberdayaan keluarga, atau hambatan dalam implementasi kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Namun, karena penurunan ini tidak terlalu besar, hal ini juga mencerminkan bahwa keluarga di Kota Semarang masih cukup tangguh dan mampu menjaga kesejahteraan mereka meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan yang relatif kecil, angka 66,48 tetap menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kota Semarang berada pada jalur yang cukup baik. Ini memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut guna memastikan bahwa keluarga-keluarga di Kota Semarang tetap dapat berkembang secara mandiri, harmonis, dan bahagia. Pemerintah dan lembaga terkait dapat terus berfokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga dengan memperkuat program-program yang mendukung ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga agar dapat menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

f. Indeks Perlindungan Anak (IPA)



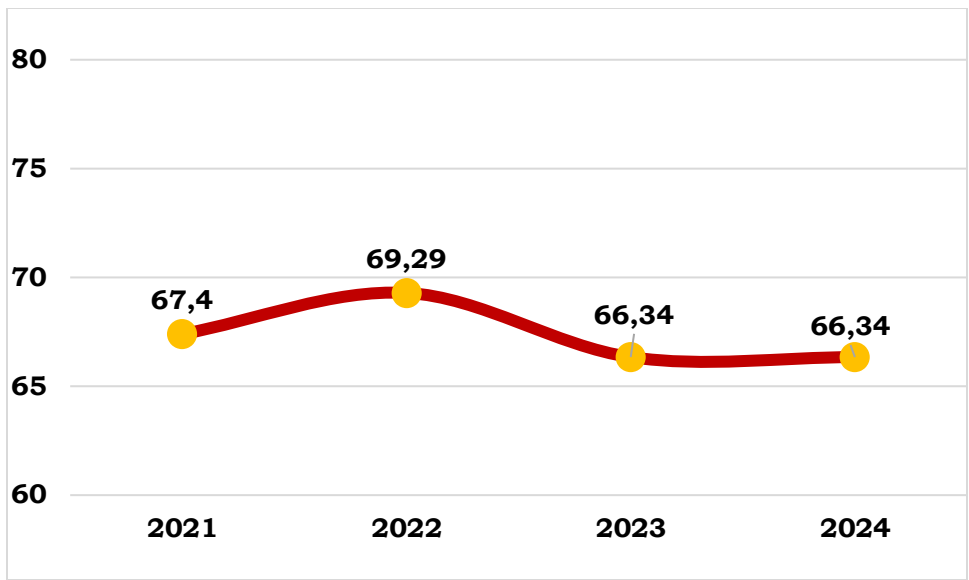
Sumber: SIGA Kementerian PPPA, 2025

Gambar 2.35 Indeks Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2024

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi, melindungi, dan menjamin hak-hak anak yang diukur sejak tahun 2021. Analisis terhadap tren IPA Kota Semarang dari tahun 2021 hingga 2024 menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak serta merumuskan langkah strategis ke depan. Pada tahun 2021–2022, nilai IPA berada pada angka yang sama yaitu 70,59. Kondisi ini menunjukkan stabilitas capaian namun belum menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan nilai menjadi 71,80 yang mencerminkan perbaikan pada layanan dan kebijakan terkait perlindungan anak. Namun tahun 2024 mencatat sedikit penurunan menjadi 71,36 yang perlu dicermati sebagai tanda bahwa beberapa indikator mungkin menghadapi tantangan. Stabilitasnya IPA Tahun 2021–2022 disebabkan oleh fokus pemeliharaan capaian dan minimnya perubahan strategis. Peningkatan pada 2023 didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektor dan meningkatnya akses terhadap layanan dasar anak. Penurunan pada 2024 dapat dipengaruhi oleh meningkatnya laporan kasus kekerasan, keterbatasan anggaran, atau belum optimalnya implementasi program secara merata. Analisis ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Kota Semarang telah berjalan cukup baik dengan tren peningkatan nilai IPA sepanjang 2021–2024. Meski demikian, upaya berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memastikan semua indikator perlindungan anak dapat meningkat secara konsisten dalam rangka mewujudkan Kota Semarang yang semakin ramah dan aman bagi anak.

g. Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)

Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) merupakan indikator yang menggambarkan upaya dan kapasitas suatu daerah dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, baik melalui kebijakan, layanan, regulasi, maupun dukungan lingkungan sosial yang aman dan ramah bagi anak yang diukur sejak tahun 2021.



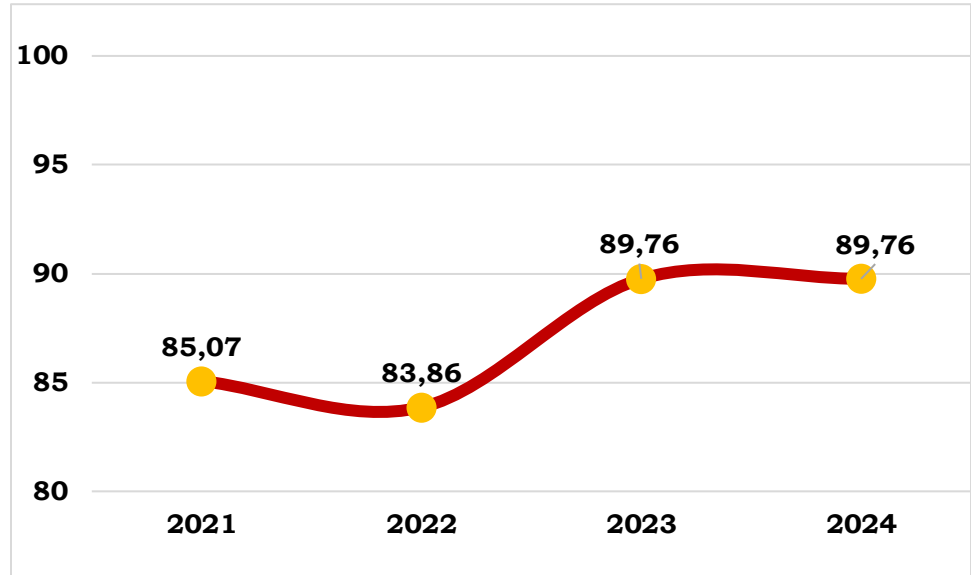
Sumber: SIGA Kementerian PPPA, 2025

Gambar 2.36 Indeks Perlindungan Hak Anak Kota Semarang Tahun 2021-2024

Nilai IPHA yang tinggi menunjukkan semakin kuatnya sistem perlindungan anak di tingkat kota. Selama periode 2021–2024, nilai IPHA Kota Semarang menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021, indeks berada pada angka 67,4, kemudian mengalami peningkatan menjadi 69,29 pada tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan adanya penguatan kebijakan dan layanan perlindungan anak, termasuk upaya peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak, optimalisasi forum anak, serta penguatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 66,34, dan nilai tersebut tetap sama pada tahun 2024. Penurunan serta stagnasi ini mengindikasikan adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek pemenuhan hak dasar anak, pencegahan kekerasan, peningkatan partisipasi anak, serta kualitas layanan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Faktor-faktor seperti peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, kebutuhan penguatan sistem pelaporan dan respons cepat, serta ketimpangan akses layanan di beberapa wilayah dapat menjadi penyebab perlambatan capaian indeks. Stabilitasnya nilai pada 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa meskipun upaya perbaikan telah dilakukan, dampaknya belum cukup signifikan untuk meningkatkan capaian indeks. Secara keseluruhan, tren IPHA Kota Semarang dalam empat tahun terakhir menegaskan perlunya strategi yang lebih kokoh dan terarah untuk mendorong peningkatan kualitas pemenuhan hak anak. Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas layanan, serta inovasi dalam pencegahan kekerasan dan pelibatan aktif anak perlu menjadi fokus prioritas dalam perencanaan pembangunan.

h. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)



Sumber: SIGA Kementerian PPPA, 2025

Gambar 2.37 Indeks Perlindungan Khusus Anak Kota Semarang Tahun 2021-2024

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kapasitas daerah dalam memberikan pemenuhan perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi tertentu dan memerlukan perhatian ekstra, seperti anak penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak terlantar, hingga anak yang terdampak bencana. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan, kebijakan, serta intervensi perlindungan khusus yang responsif dan efektif yang diukur sejak tahun 2021.

Berdasarkan data tahun 2021–2024, IPKA Kota Semarang menunjukkan dinamika yang relatif stabil namun dengan peningkatan signifikan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai IPKA tercatat sebesar 85,07, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2022 menjadi 83,86. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam layanan perlindungan khusus, terutama pascapandemi yang meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan, masalah kesehatan mental, maupun kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Namun demikian, kinerja perlindungan anak Kota Semarang kembali mengalami lompatan positif pada tahun 2023, dengan nilai meningkat drastis menjadi 89,76, dan berhasil dipertahankan pada tahun 2024 dengan nilai yang sama. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program strategis, seperti penguatan layanan PATBM, optimalisasi UPTD PPA, peningkatan respons kasus kekerasan berbasis Sistem Informasi Online, serta kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan kepada kelompok anak rentan.

Secara keseluruhan, tren empat tahun terakhir menunjukkan bahwa Kota Semarang mampu kembali memperkuat efektivitas intervensi perlindungan khusus anak setelah mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Nilai yang stabil tinggi pada 2023 dan 2024 menegaskan bahwa Semarang berada pada jalur yang baik dalam memastikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus mendapatkan layanan yang memadai, cepat, dan responsif.

i. Kota Layak Anak (KLA)

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen sekaligus kinerja ini terlihat dengan diterimanya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Mentor dan predikat Kota Layak Anak kategori Utama dari Kementerian PPPA. Penyelenggaraan upaya terkait juga diperkuat dengan ditetapkannya Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Disisi lain Rasio KDRT pada tahun 2024 sebesar 0,031 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Sedangkan dengan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar 25,08 meningkat menjadi sebesar 25,78 pada tahun 2024, dan semuanya telah dapat ditangani sebesar 100%. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT dan korban kekerasan semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga Pelayanan Rumah Duta Revolusi Mental RDRM yang menyediakan layanan konsultasi masalah anak, remaja dan keluarga, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Sejak 2021, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Semarang tercatat stabil di angka 70,59. Meskipun belum meningkat secara angka, sejumlah upaya strategis seperti penerbitan Perda Kota Layak Anak, serta pencapaian predikat Kota Layak Anak kategori Utama pada 2023 mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi hak anak. Dengan memperluas perlindungan berbasis masyarakat dan memprioritaskan aspek pencegahan, IPA Kota Semarang berpotensi naik signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran, prakarsa, dan keberdayaan masyarakat terlihat pada kinerja pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1) Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kab/Kota, serta 2) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang diatur lebih lanjut melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang diantaranya memuat mekanisme penghitungan Indeks Pencapaian SPM, di mana untuk capaian SPM sebelum tahun 2022 dilakukan hanya pada aspek penerima layanan, sedangkan mulai tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM mempunyai bobot sebesar 80% dari aspek penerima layanan dan 20% lainnya dinilai dari capaian kualitas mutu layanan. Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan umum mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan, diantaranya Pendampingan BOP/BOS Sekolah Swasta, Beasiswa Miskin, serta Beasiswa Miskin Berprestasi mulai jenjang Pendidikan SD/MI hingga jenjang Perguruan Tinggi. Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan tahun 2024:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 5-6 tahun sebesar 97,57% pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 85,87%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia PAUD yang bersekolah pada jenjang tersebut.

Di sisi lain persentase pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 sebesar 62,02% pada tahun 2024, persentase ini menurun jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 81,53%. Presentase guru jenjang PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum bisa mencapai target 98,8% disebabkan untuk guru PAUD yang saat ini berjumlah 4.974 dengan lulusan minimal S1/D-IV hanya sebanyak 3.085 guru PAUD yang terdiri dari TK, RA, KB, TPA, Pos PAUD saat ini berjumlah 1.597 satuan pendidikan.

Untuk guru TK/RA dari total guru sebanyak 2.663 orang yang merupakan lulusan minimal S1/D-IV sebanyak 2.123. Sedangkan untuk di luar TK/RA, dari jumlah guru sebanyak 2.311 orang, yang merupakan lulusan minimal S1/D-IV baru sebanyak 962.

Hal ini bisa dimaklumi karena untuk KB, TPA, Pos PAUD merupakan rintisan menuju TK/RA yang biasanya diawali dari kepedulian masyarakat terhadap adanya anak-anak di lingkungan.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar sembilan tahun, terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. APK dan APM SD/MI pada tahun 2024 masing-masing sebesar 103,12% dan 91,03% sedangkan angka putus sekolah cenderung tetap ada sebesar 0,01%. Beberapa kondisi yang meningkat pada tahun 2024 terjadi pada angka kelulusan sebesar 99,83% dan persentase pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 menjadi sebesar 96,83%. Selain itu, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2024 mencapai 102,47%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 98,18%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dasar sembilan tahun, dan semakin banyak masyarakat yang percaya terhadap kualitas pendidikan di Kota Semarang.

Di sisi lain APM SMP/MTs pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 85,18% jika dibandingkan dengan tahun 2023, demikian pula persentase Pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 96,21%. Angka kelulusan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 100%. Sedangkan angka putus sekolah cenderung tetap ada sebesar 0,01%.

Pelayanan urusan Pendidikan di bidang sarana gedung sekolah juga menjadi perhatian bersama. Untuk tahun 2024, kondisi bangunan sekolah SD/MI mengalami peningkatan menjadi sebesar 87,00%. Hal ini disebabkan pelaksanaan perbaikan bangunan telah dilakukan sehingga proses belajar mengajar berjalan baik. Namun, fasilitas pendidikan berupa gedung SMP/MTs dengan kondisi baik sedikit mengalami penurunan 0,01% menjadi sebesar 92,46%.

3. Pendidikan Non-Formal Pendidikan

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Non formal berupa pendidikan kesetaraan yang memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan keterampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Semarang sudah memiliki sekolah yang berbasis inklusi, baik pada jenjang sekolah dasar, maupun sekolah menengah pertama. Selain itu untuk mendukung pencapaian SDG's pendidikan, di Kota Semarang sudah banyak LPK Swasta yang dikembangkan yaitu sebanyak 119 lembaga. Selanjutnya, di Kota Semarang juga telah terdapat kelembagaan PKBM sebanyak 42 lembaga

dan yang terakreditasi B dengan jumlah sebanyak 18 lembaga. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan dasar					
a.	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	33,68	34,19	36,81	37,67	38,30
b.	Rasio guru/murid	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18
c.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	3:20:28	4:20:28	1:20:28	2:20:28	1:20:28
2	Pendidikan Menengah					
a.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)	27,92	27,86	26,86	28,64	29,54
b.	Rasio guru terhadap murid	1:17	1:17	1:17	1:18	1:15
c.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	3:17:32	4:17:32	5:17:32	1:18:32	1:15:32
3	Angka Putus Sekolah					
a.	SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
b.	SMP/MTs	0,04	0,06	0,01	0,01	0,01
4	Angka Kelulusan					
a.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,98	100	97,22	98,87	99,83
b.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,95	99,95	100	99,55	100
5	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	103.47	100	95,05	98,18	102,47
6	Fasilitas Pendidikan					
a.	SD/MI Kondisi Bangunan Baik	86,44	95	65	86,16	87
b.	SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	92,95	99	80	92,47	92,46
7	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)					
	- Jenjang PAUD	72,87	98	81.33	81,53	62,02
	- Jenjang SD/MI	96,43	97	93.33	96	96,83
	- Jenjang SMP/MTs	96,95	98	88.57	96,55	96,21
8	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi umum	NA	1,92	1,94	75,64	79,55
9	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi umum	NA	1,78	1,72	55,55	69,97
Indikator SDGs						
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Tujuan 4 Target1)	97,66	90	90,41	89,89	91,03
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	84,88	80	73,11	83,41	85,18
12	APK PAUD 5–6 Tahun (Tujuan 4 Target 2)	83,01	81,5	116,76	85,87	97,57
13	APK SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 1)	116,67	100	103,71	109,88	103,12
14	APK SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 1)	115,59	100,00	98,95	114,95	105,59
15	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,53	10,55	10,80	10,81	11,05

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Rapor Pendidikan, Bappeda Kota Semarang, 2024

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Bidang Urusan Pendidikan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80%(A) + 20%(B)
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD: (Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 Tahun)/(Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun)x100x 100%	86,50% <u>44.233</u> 51.135	107,97% <u>54.234</u> 50.231	89,53% <u>44.656</u> 49.880	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs): Jumlah Peserta Didik Usia 7-15 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-15 Th	77,95% <u>185.604</u> 238.093	95,56% <u>231.952</u> 242.351	100,81% <u>242.758</u> 240.798	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan dasar (SD/MI): Jml Peserta Didik Usia 7-12 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-12 Th		95,59% <u>154.453</u> 161.580	103,45% <u>165.544</u> 160.018	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs): Jml Peserta Didik Usia 13-15 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 13-15 Th		95,51% <u>77.147</u> 80.771	95,59% <u>77.214</u> 80.780	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan: Jml Peserta Didik Kesetaraan Usia 7-18 thn ----- x 100% Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah	6% <u>1.650</u> 27.501 (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah)	26,22% <u>1.617</u> 6.166 (dengan pembagi Jml pendudu k Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menenga h)	84,12% <u>3.226</u> 3.835 (dengan pembagi Jml pendudu k Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menenga h)	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Kerjasama dan Otda, Dinas Pendidikan, 2024

Dari data tersebut di atas, jika dilihat dari aspek capaian penerima layanan dasar, secara umum capaian SPM tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan predikatnya hampir semua mengalami peningkatan dari tuntas pratama dan tuntas madya ke tuntas utama. Permasalahan yang

dijumpai di antaranya masih terdapat kekurangan guru dan tenaga kependidikan (GTK) ASN sehingga dipenuhi dengan GTK non ASN dan bahkan GTK paruh waktu yang dibiayai dengan dana BOSP. Di samping itu, juga masih terdapat anak putus sekolah meskipun kebijakan sekolah gratis dan juga beasiswa siswa miskin dan miskin berprestasi semakin diperluas pemanfaatannya. Perlu upaya nyata dan keseriusan berbagai pihak dalam peningkatan Indeks SPM pada bidang urusan pendidikan, diantaranya koordinasi dengan berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait kewenangan jenjang SMA/MA dan juga Paket C.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja yang ada, Kota Semarang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya: Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Inovasi Pencapaian Program UHC Kota Semarang 100% didukung dengan Peran Lintas Program dan Lintas Sektor secara Gotong Royong (PANGERAN DIPONEGORO) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selain itu, capaian ini juga didukung dengan adanya penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atas dukungan dan kontribusi dalam program jaminan kesehatan nasional dengan pencapaian UHC. Selain itu, penghargaan lain di bidang kesehatan juga diterima oleh RSD KRMT Wongsonegoro yang masuk ke dalam Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah untuk Aplikasi Sistem Informasi Harian Terpadu (SI RINDU) Tahun 2022-2023.

Terkait percepatan penanggulangan stunting di Kota Semarang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 21,30% pada tahun 2021 menjadi sebesar 10,40% pada tahun 2022, meningkat pada tahun 2023 sebesar 15,70% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 11,20% sesuai release dari survei status gizi Indonesia atau SSGI. Penanganan stunting ini dilakukan secara holistik dan integratif melalui inovasi program yang dilakukan di antaranya: Pelangi Nusantara yang didalamnya terdapat kegiatan Wisata Edukasi Gizi, Duta Kesehatan, Kebun Gizi, Penyusunan dan Pembuatan menu Balita dan Ibu Hamil. Selain itu juga Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), Kegiatan *day care* di Rumah Pelita (Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor bagi Baduta). Selain itu Kota Semarang sudah mempunyai SK TPPS, Tim TPPS, penyelenggaraan kegiatan melalui konvergensi aksi, serta Perwal Percepatan Penurunan Stunting yang mengacu pada Perpres.

Kinerja dalam penanganan Penyakit Menular AIDS, TB dan Malaria (ATM) perlu ditingkatkan melibatkan lintas sector dan masyarakat sipil peduli terhadap ATM, karena trennya menunjukkan kecenderungan menurun. Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.31 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26
2	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	2	2	1,9	1,9	0,24
3	Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	2,16	2,21	2,43	1,82	2,01
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	2,96	2,94	3,36	5,21	3,04
5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,29%	0,31%	0,32%	0,33	0,35
6	Persentase RS Rujukan tingkat kota yang terakreditasi	89,65%	78,12%	65,63%	96,90	97,30
7	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	96,11	95,9	96,98	97,35	97,5
8	Nilai Kinerja BLUD Baik	71,85	73,2	87,5	86,37	83,79
Indikator SDGs						
9	Cakupan kelurahan UCI (%) (1.4.1.(b))	98,7	100	100	100	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan puskesmas (%)	231,25	231,25	237,5	237,5	243,75
13	Cakupan pembantu puskesmas	21,46	21,46	26,38	21	19,77
14	Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (Wasting: BB/TB) pada Balita (1.3.1.(a))	1,99	2,2	1,16	0,91	0,89
15	Cakupan pertolongan persalinan di faskes (1.4.1.(a))	100	100	100	100	100
16	Rasio akseptor KB per 1000 PUS (1.4.1.(c))	76,94	73,88	78	81,1	81,1
17	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting: TB/U) pada balita (Balita) (2.2.1*)	3,13	3,1	1,55	1,06	1,04
18	% kasus stunting anak dibawah dua tahun (Baduta) (2.2.1.(a))	2,48	2,81	1,27	0,54	0,52
19	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (2.2.2.(b))	71,31	71,91	74,33	83,7	9,05
20	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (3.1.1*)	100	94,24	99,24	100	100
21	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (3.1.2*)	71,35	95,32	67,25	79,8	80,44
22	Jumlah kasus kematian ibu	17	21	15	16	15
23	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (3.1.2.(a))	100	100	100	100	100
24	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)(3.2.1*)	100	100	100	100	100
25	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. (3.2.1*)	7,01	6,95	6,5	7,44	9,08
26	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. (3.2.2*)	100	100	100	100	100
27	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000	6,09	6,04	5,6	7,09	7,99

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	kelahiran hidup. (3.2.2(a))					
28	Kelurahan UCI (3.2.2.(b))	98,7	100	100	100	100
29	Prevalensi HIV (3.3.1(a))	0,387	0,413	0,451	0,415	0,459
30	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (3.3.1(b))	79,18	100	100	100	100
31	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (3.3.1(b))	293	260	260*	464	455,2
32	Prevalensi penduduk malaria per 1000 penduduk (3.3.3*)	0,018	0,035	0,041	0,027	0,038
33	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Malaria	100	100	100	100	100
34	Jumlah Kasus Hepatitis B (3.3.4.(a))	441	406	406*	386	403
35	Jumlah Kasus Kusta (3.3.5*)	8	10	10*	10	23
36	Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (3.4.1.(b))	88,6	100	100	100	100
37	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (3.4.2(a))	100	100	100	100	100
38	Cakupan peserta KB aktif (3.7.1*)	74,99	73,88	76,08	77,72	77,73

Sumber: BPS & LKPJ Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Capaian mengenai kesehatan ibu dan anak cenderung membaik namun masih perlu upaya penekanan kasus. Khusus untuk kematian neonatal, kematian ibu dan kematian balita, meningkat pada tahun 2024 sedangkan kasus stunting di Kota Semarang jumlahnya masih fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, tetapi menunjukkan peningkatan kasus pada tahun 2023. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi Kota Semarang terkait kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak nantinya. Pemerataan pelayanan kesehatan ibu dan anak sudah dilakukan oleh puskesmas dan posyandu yang ada, namun hal ini belum cukup.

Pada tahun 2024, Kota Semarang mencatat 0,038 per 1000 penduduk atau sebanyak 63 kasus malaria, yang terdiri atas 56 kasus baru dan 7 kasus relaps. Seluruh kasus tersebut bersumber dari luar wilayah Kota Semarang yang terbawa masuk ke dalam wilayah kota. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 46 kasus dengan nilai Annual Parasite Incidence (API) sebesar 0,027 per 1.000 penduduk. Meskipun terdapat peningkatan jumlah kasus pada tahun 2024, angka API tetap berada pada tingkat rendah, yaitu mendekati 0,04 per 1.000 penduduk. Dalam pengendalian kasus malaria tersebut, telah dilaksanakan berbagai upaya strategis pada tahun 2024, seperti (1) Penguatan kapasitas tenaga laboratorium melalui optimalisasi peran Asisten Tenaga Laboratorium Mikroskopis (ATLM) di seluruh puskesmas, yang diwujudkan dalam bentuk: pelatihan keterampilan pembacaan preparat mikroskopis dan peningkatan kompetensi dalam penegakan diagnosis malaria. (2) Peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium, yang dilaksanakan melalui kegiatan uji silang sediaan darah ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Balabkespak). Pelaksanaan deteksi dini dan surveilans aktif, yang mencakup: kegiatan skrining terhadap pendatang dari wilayah endemis malaria dan pemeriksaan terhadap kontak erat pasien

terkonfirmasi malaria. (3) Pelaksanaan survei entomologi pada wilayah reseptif, yakni wilayah yang memiliki potensi menjadi tempat berkembang biaknya vektor malaria.

Untuk kasus HIV/AIDS, terdapat 680 kasus pada tahun 2024, meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan cakupan dan akses terhadap layanan deteksi dini. Selama tahun 2024, tersedia 79 titik layanan pemeriksaan HIV yang tersebar di puskesmas, rumah sakit, klinik Balkesmas, dan PKBI. Ketersediaan layanan yang luas telah meningkatkan jumlah deteksi kasus, yang mencerminkan peningkatan cakupan layanan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini HIV.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk menanggulangi permasalahan HIV pada tahun 2024 antara lain: (1) Perluasan layanan pengobatan ARV, termasuk: Layanan pengambilan obat pada malam hari (contoh: Lydia Dimari); Layanan pengantaran obat secara gratis melalui program Layar Artis; dan Layanan drive-thru untuk pengambilan obat, yang terintegrasi dengan layanan TBC. (2) Skrining terpadu dan kolaboratif terhadap kelompok prioritas, meliputi: Ibu hamil; Pasien tuberkulosis (TBC); Pasien dengan infeksi menular seksual (IMS); Populasi kunci (LSL, pengguna napza suntik); Warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang urusan kesehatan, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.32 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator SPM	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil: Jml bumil yg dilayani SS ----- x 100% Jml sasaran ibu hamil	100% <u>23.885</u> 23.885	100% <u>22.040</u> 22.040	100% <u>22.872</u> 22.872	100% <u>20.698</u> 20.698	100% <u>18.192</u> 18.192	100% <u>4.716.391</u> 4.716.391	100%
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin = Jml ibu bersalin yg dilayani SS ----- x 100% Jml sasaran ibu hamil	100% <u>23.885</u> 23.885	100% <u>22.040</u> 22.040	100% <u>22.330</u> 22.330	100% <u>20.098</u> 20.098	101,18% <u>17.236</u> 17.440	100% <u>109.933</u> 109.933	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir = Jml BBL yg dilayani SS (KN1) ----- x 100% Jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup)	100,02% <u>23.829</u> 23.825	100% <u>22.030</u> 22.030	100% <u>22.304</u> 22.304	100% <u>20.047</u> 20.047	101,15% <u>17.203</u> 17.401	100% <u>182.795</u> 182.795	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita = jml balita yg	88,78% <u>65.137</u>	100% <u>100.403</u>	100% <u>89.239</u>	100% <u>68.759</u>	100,59% <u>66.570</u>		100%

No	Indikator SPM	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
	dilayani SS ----- x 100% Jml balita di wilayah kerja	73.369	100.403	89.239	68.759	66.965		
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar jml anak usia Dikdas yg dilayani SS ----- x 100% jml semua anak usia dikdas	97,81% <u>215.016</u> 219.821	100% <u>227.547</u> 227.547	100% <u>227.182</u> 227.182	100% <u>224.808</u> 224.808	100% <u>224.808</u> 224.808		100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif = usia pengunjung 15-59 tahun ----- x 100% Jumlah warga negara usia 15–59 tahun	100% <u>1.014.944</u> 1.014.944	100% <u>1.112.588</u> 1.112.588	100% <u>1.125.431</u> 1.125.431	100% <u>1.116.174</u> 1.116.174			100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut = usia pengunjung >60 tahun ----- x 100% Jumlah WN usia > 60	85,98% <u>154.847</u> 180.096	100% <u>184.027</u> 184.027	100% <u>164.287</u> 164.287	100% <u>169.404</u> 169.404	100% <u>188.374</u> 188.374	100% <u>188.374</u> 188.374	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = jml pendrt hipert > 15 tahun ----- x 100% Jml est penderita hipert >15th	88,60% <u>255.727</u> 288.619	100% <u>289.903</u> 289.914	100% <u>290.910</u> 290.910	100% <u>321.721</u> 321.721			100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) = jml penderita DM > 15 tahun ----- x 100% jml est penderita DM usia >15 th	100% <u>40.303</u> 40.303	100% <u>40.483</u> 40.483	100% <u>40.623</u> 40.623	100% <u>41.468</u> 41.468			100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) = jml ODGJ berat di wil kerja kota ----- x 100% Jml ODGJ Berat berdsr proyeksi wil kerja kota	100% <u>4.172</u> 4.172	100% <u>4.215</u> 4.215	100% <u>4.218</u> 4.218	100% <u>4.222</u> 4.222			100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) = jml orang terduga TBC yg dilak pemriksa ----- x 100% Jml orang yg terduga TBC kurun waktu 1	34,55% <u>7.770</u> 22.487	100% <u>15.853</u> 15.853	100% <u>37.270</u> 37.270	100% <u>38.509</u> 38.509			100%

No	Indikator SPM	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
	th							
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV = jml org dgn resiko terinfeksi HIV yg mendapat pelayanan sesuai standar ----- x 100% Jml orang dgn risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota	98,81% <u>37.681</u> 38.136	99,72% <u>27.790</u> 27.869	100% <u>33.592</u> 33.592	100% <u>36.669</u> 36.669			100%

Sumber: Laporan SPM, Bag. Otda dan Kerjasama, Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk penghitungan capaian SPM termasuk pada bidang kesehatan sejak tahun 2022 dinilai dari dua aspek, yaitu aspek capaian penerima layanan dan aspek mutu layanan. Capaian SPM tahun 2024 dari aspek penerima layanan dan capaian mutu minimal layanan dasar sudah mencapai 100% dan semua aspek masuk ke dalam kategori tuntas paripurna. Walaupun seluruh nilai SPM pada bidang kesehatan capaiannya sudah 100%, namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala dalam melaksanakan urusan kesehatan di antaranya adalah perubahan masalah kesehatan yang ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk, transisi epidemiologi dan transisi risiko akibat perubahan pola hidup. Selain itu, kesadaran masyarakat terkait kesehatan anak juga masih rendah, kebanyakan dari masyarakat masih menganggap bahwa pemeriksaan merupakan kebutuhan puskesmas saja. Selain itu, jumlah tenaga non kesehatan terlatih, kader kesehatan, sarana prasarana yang belum optimal juga merupakan tantangan tersendiri dalam menjalankan urusan kesehatan.

- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kinerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diukur diantaranya dari kemantapan jalan, pengendalian banjir, berfungsinya drainase dan irigasi, menurunnya area kawasan kumuh, pengelolaan sarana prasarana persampahan, cakupan pelayanan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan lainnya. Berbagai kondisi ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

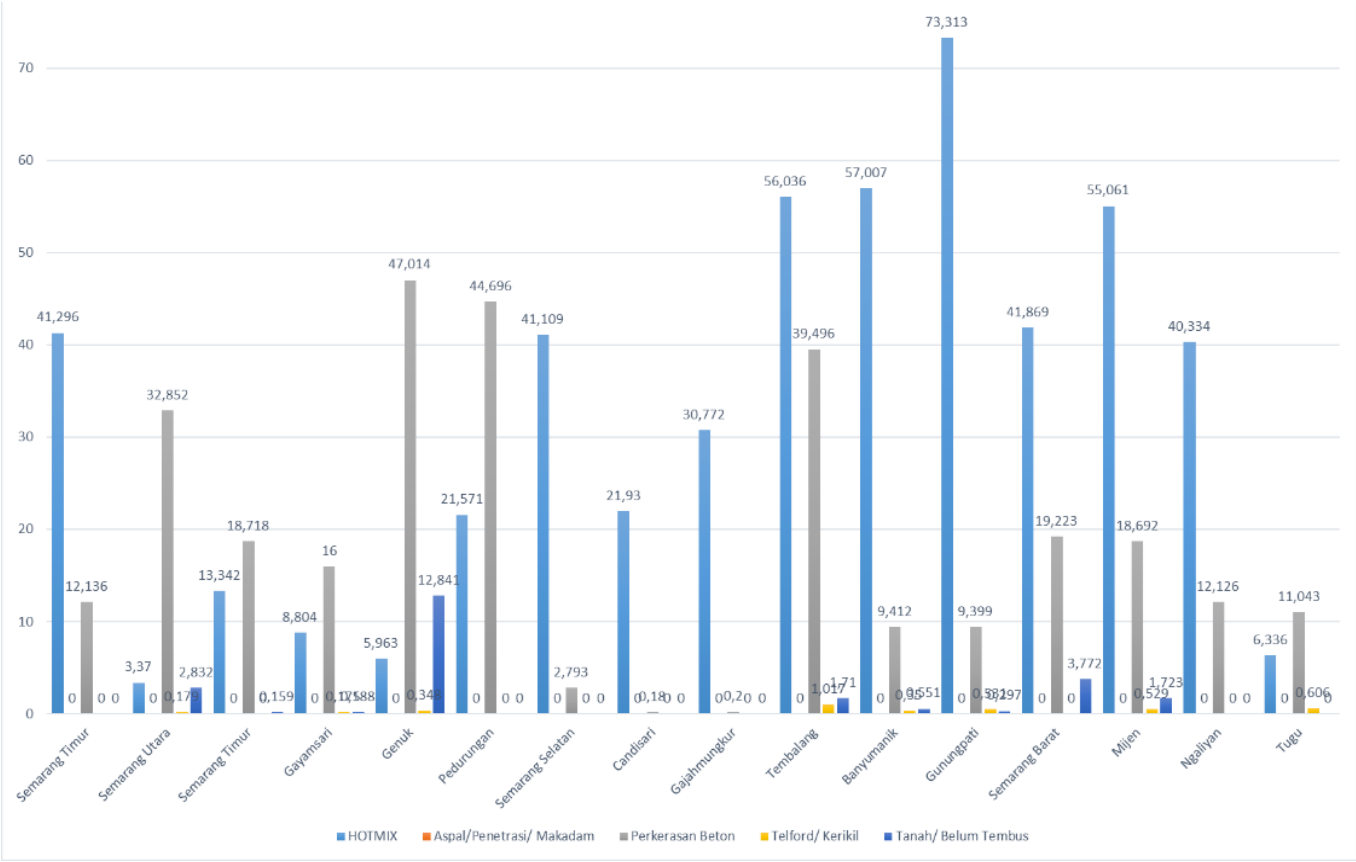
Tabel 2.33 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (%)	NA	94,60	96,52	96,57	96,57*
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS (%)	NA	97,25	97,25*	97,25*	97,25*
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	79	80,64	81,8	83	83*
4	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	90,42% (759,42 km)	92,38% (775,88 km)	92,52% (778,12 km)	93,004% (781,141 km)	93,273% (783,404 km)
5	Rasio kepatuhan IMB (%)	55,04	55,56	51,25	62,1	95,65
6	Persentase luas sawah beririgasi (%)	43	43	43	43	65,43
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	NA	NA	33,60	33,60	33,62
8	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0,21	88,01	76,62	40,55	18,78
9	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	22	24,35	26,18	27,10	27,67
10	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80	82,5	82,5	82,5*	82,5*
11	Persentase sampah yang terangkut dari TPS ke TPA	89,5	90	90,50	91	91,50
12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	86,51	98,93	98,94	99,04	99,04*
13	Persentase kawasan banjir dan rob (%)	1,30 (Hanya jalan dan permuki man)	2,7 (Jalan, permuki man, tambak, sawah)	1,74 (Jalan, permuki man, tambak, sawah)	1,715	1,645
14	Persentase kawasan banjir (%)	3,73	3,4	2,37	2,34	2,23

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
15	Persentase kawasan rob (%)	2	2	1,11	1,09	1,06
16	Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik (%)	95,87	96,96	97,46	100,17	101,21
	Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	73.141	74.815	77.557	79.718	80.542
	Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang	76.292	77.161	77.557	79.718	79.580
Indikator SDGs						
17	Persentase rumah tangga yg terlayani air minum	96,28	97,14	98,94	99,62	99,80
18	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	96,28	96,28	96,28	96,28	96,28
19	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	91	91	91	91	91
20	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun	1	1	1	1	1
21	Indeks kualitas air	50,44	50	33,76	46	45,56
22	Rasio Ruang Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Semarang (%)	44,21	44,23	44,36	44,48	4,48*
23	Persentase kesesuaian Tata Ruang	96,73	100	100	100	100
24	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	NA	NA	54,81	54,62	54,62*

Sumber: BPS, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, 2024

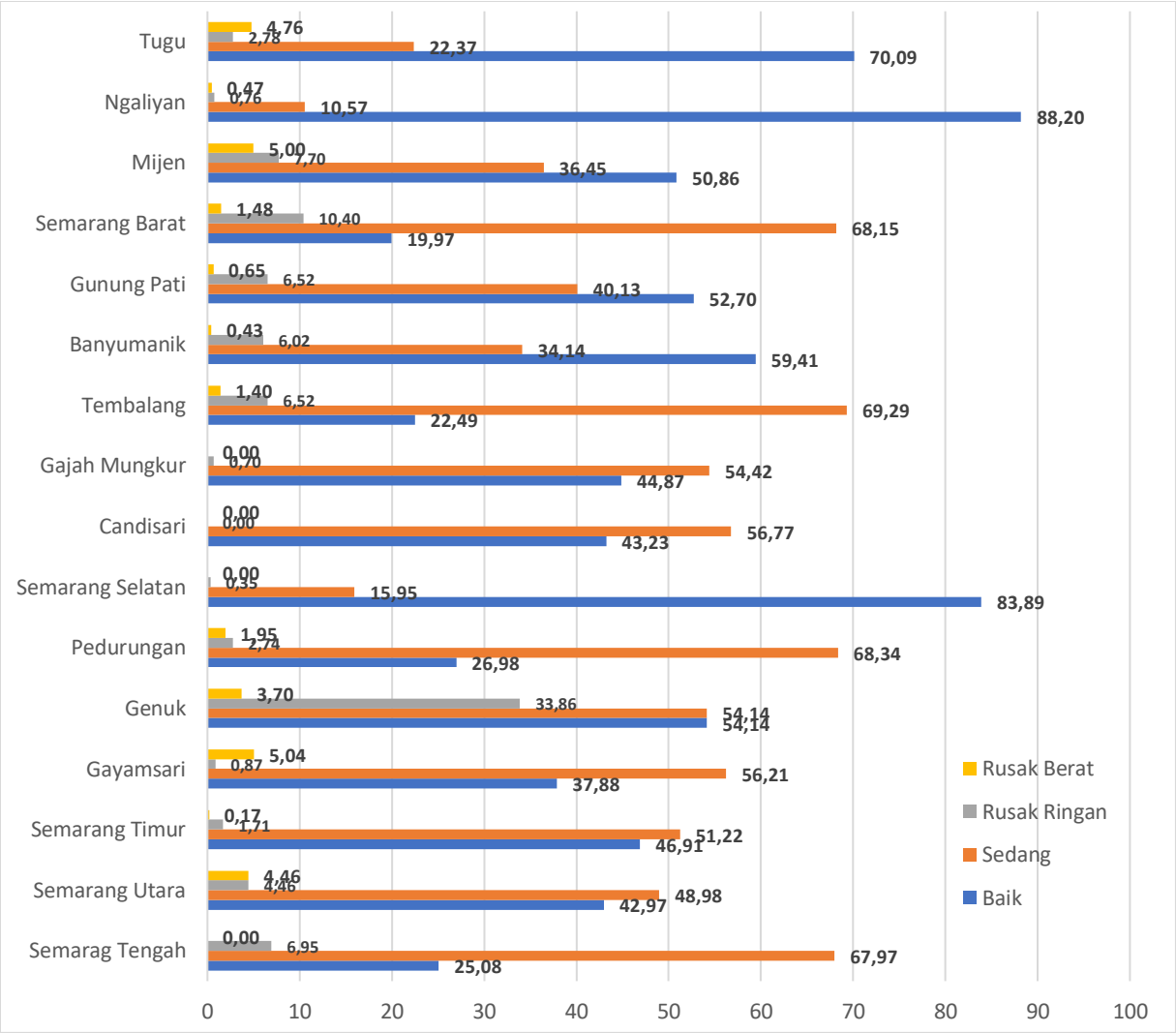
Untuk pembangunan infrastruktur bidang jalan melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/360 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di Wilayah Kota Semarang, ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang tahun 2024 didominasi oleh perkerasan aspal *hot mix* dengan proporsi mencapai 61,11% (513,239 km); disusul dengan perkerasan jenis beton blok/rigid sebesar 36,33% (305,106 km); telford/kerikil sebesar 0,29% (2,449 km) dan tanah/belum tembus sebesar 2,27% (19,107 km). Khusus untuk jalan dengan kondisi tanah secara keseluruhan masih terdapat pada 10 kecamatan, namun yang masih dominan berlokasi di wilayah Kecamatan Genuk sepanjang 9,587 km, Kecamatan Semarang Barat sepanjang 3,659 km, Kecamatan Mijen 1,999 km. Secara lengkap kondisi tersebut terbagi ke dalam wilayah kecamatan seperti terlihat pada profil sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

Gambar 2.38 Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2024

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Wali Kota tentang status jalan sepanjang 839,901 km, pada tahun 2024 persentase jalan dalam kondisi baik pada hampir seluruh kecamatan berada pada angka di atas 50%. Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil antara lain adalah Kecamatan Genuk, Semarang Utara dan Semarang Barat. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasian program dan kegiatan selanjutnya. Adapun data lengkapnya mengikuti gambar sebagai berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

Gambar 2.39 Kondisi Jalan per Wilayah Kecamatan Kota Semarang Tahun 2024

Untuk penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kawasan banjir dan rob, diantaranya dengan penataan sungai besar, normalisasi saluran drainase, pemeliharaan jaringan irigasi, operasionalisasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir, operasionalisasi dan pemeliharaan embung/penampung air lainnya, serta pemeliharaan polder/kolam retensi. Namun demikian, dikarenakan terdapat perubahan variabel dalam perhitungan kawasan banjir dan rob, dimana untuk tahun 2022 selain jalan dan permukiman juga memperhitungkan komponen kawasan ladang dan persawahan yang terdampak banjir dan rob, mengakibatkan terjadinya penurunan persentase kawasan banjir dan rob dari sebesar 3,48% di tahun 2023 menjadi sebesar 3,29% tahun 2024 dengan rincian luasan banjir sebesar 2,23% dan rob seluas 1,06% dari seluruh luas wilayah Kota Semarang.

Kondisi infrastruktur Kota Semarang dilihat dari Penerangan Jalan Umum diharapkan menunjukkan peningkatan utamanya wilayah pinggiran karena hal ini juga sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan terhadap kejahatan. Jumlah lampu penenrangan jalan umum dalam kondisi baik sebesar

80.542 Pemenuhan 80.542 titik dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan di luar APBD. Selain dari aspek pemenuhan titik lampu, dalam rangka pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dan juga penghematan energi, Kota Semarang secara bertahap juga melakukan retrofit terhadap PJU konvensional menjadi PJU berbasis LED.

Kinerja dalam bidang persampahan menuju “*waste to energy*” menunjukkan perkembangan yang signifikan, berkat sinergitas peran masyarakat dan *stakeholder* persampahan lainnya. Pada tahun 2023 produk sampah harian diperkirakan sebesar 1.181,06 ton, di mana yang terangkut masuk ke TPA Jatibarang lebih dari 91,00% per hari dengan komposisi material organik sebesar $\pm 62\%$ dan sisanya material anorganik. Mengingat sumbangan terbesar berasal dari sampah domestik, besar kiranya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pilah sampah/bank sampah, sedangkan sisanya menjadi tugas Pemerintah dalam mengelolanya. Dalam upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah di Kota Semarang, telah dilakukan beberapa sebagai upaya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir diantaranya Gerakan Implementasi Ekonomi Sirkular pengelolaan Sampah Hulu Perkotaan berbasis Entitas berkelanjutan (GERAI ESHP), Patroli Pakde Uzt, gerakan peduli TPS bersih bermanfaat, pemanfaatan sampah organik menjadi *ecoenzym*, budidaya manggot/BSF pemakan sampah organik, *biowash*, dan penguatan kelembagaan KSM Kebersihan pada 16 Kecamatan di Kota Semarang. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang mencapai 100%, sedangkan persentase kepatuhan bangunan ber-IMB pada tahun 2023 sebesar 62,10% dari target 62,10%. Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Urusan Pekerjaan Umum, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.34 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020 – 2024

No	Indikator SPM	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari Jml yang dilayani Sesuai Standar -----x 100% Jumlah sasaran (1 SR melayani 8 jiwa)	96,28% <u>1.623.225</u> 1.685.909	97,14% <u>1.638.931</u> 1.687.222	98,94% <u>556.977</u> 562.943	80% (567.250 RT)	80% (573.262 RT)	20%	100.00%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jml yang dilayani Sesuai Standar -----x 100% Jumlah sasaran	86,51% <u>382.195</u> 441.814	98,93% <u>556.442</u> 562.444	98,94% <u>556.991</u> 562.943	80% (563.937 RT)	80% (569.223 RT)	20%	100.00%

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda dan Kerjasama, Dinas Perkim, 2024

Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan tren yang positif. Untuk cakupan layanan pemenuhan air minum sebanyak 573.262 RT baik yang terlayani dengan jaringan PDAM (jaringan perpipaan) maupun melalui jaringan non perpipaan, dengan menggunakan asumsi 1 Rumah Tangga (RT) melayani 8 jiwa dengan standar mutu 60 liter/orang/hari dengan kondisi air tidak keruh, tidak berasa dan tidak berwarna.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja pada penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman pada tahun 2024 terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio permukiman layak huni	98,17	98,63	98,34	98,79	99,31
2	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0,21 (Dari 415,83 Ha)	0,14 (Dari 415,83 Ha)	76,62% (dari 431,54 Ha)(Eksist 330,65 Ha)	23,38	81,22% (dari 431,54 Ha)
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	934	1.670	1.713	1.332	1.729
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100 (9 perum)	100 (10 perum)	100 (25 perum)	100 (16 perum)	100 (17 perum)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	45,5	41,01	40,05	39,05	37,90

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang dapat diketahui bahwa telah ditetapkan luas permukiman kumuh adalah sebesar 415,83 ha atau 4,16 km2 atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang. Kinerja sampai dengan tahun 2021, luas lingkungan permukiman kumuh yang belum tertangani menyisakan seluas 52,85 Ha. Pada tahun 2022, dikarenakan adanya pembaharuan SK Kumuh pada tahun 2021 melalui SK Walikota Semarang Nomor 050/275, maka didapat luas kawasan kumuh terbaru menjadi 431,54 Ha. Selain itu, pada tahun tersebut, juga terdapat perubahan definisi operasional yang menyesuaikan dengan definisi operasional sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka yang sebelumnya pembagi indikator luas lingkungan permukiman kumuh adalah luas Kota Semarang dan dengan adanya SK tersebut maka pembagi indikator luas lingkungan permukiman kumuh adalah luas berdasarkan SK Kumuh. Oleh sebab itu, capaian luas lingkungan pemukiman kumuh (%) mengalami perubahan capaian dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,14% dari 415,83 Ha menjadi 76,62% dari 431,54 Ha pada tahun 2022, atau sebesar 330,65 Ha. Pada tahun 2024 ini, kawasan kumuh yang ditangani adalah 81,22% dari 431,54 Ha atau sebesar 350,50 Ha. Kinerja lain dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, pada tahun 2024 persentase rumah layak huni mengalami peningkatan menjadi 99,31%. Adapun Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 2.36 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 – 2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80% (A) + 20% (B)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	100% <u>2 unit</u> 2 unit	100% <u>17 unit</u> 17 unit	100% <u>8 unit</u> 8 unit	100% <u>27 unit</u> 27 unit	100% <u>24 unit</u> 24 unit	100% <u>24 unit</u> 24 unit	100%
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100% <u>97 KK</u> 97 KK	100% Tidak ada relokasi	100% <u>38 KK</u> 38 KK	100% <u>33 unit</u> 33 unit	100% <u>3 unit</u> 3 unit	100% <u>3 unit</u> 3 unit	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda dan Kerjasama, Dinas Perkim, 2024

Capaian SPM pada bidang Urusan Perumahan Rakyat selalu menunjukkan predikat tuntas paripurna, dengan jumlah sasaran penerima layanan yang fluktuatif. Walaupun tercapai dengan baik, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian SPM pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kendala tersebut di antaranya adalah kesulitan dalam mengakses rumah korban bencana pada saat kendaraan mengangkut material saat pengerjaan rehabilitasi rumah korban bencana, sehingga karena harus dilakukan secara manual, sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih lama. Selain itu, jumlah masyarakat yang terelokasi seharusnya bisa lebih meningkat, namun karena masih adanya penolakan oleh warga masyarakat akan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum, maka jumlah yang terelokasi hanya berjumlah 38 KK.

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Perkembangan pemerintahan pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,93	0,93	0,69	1,61	0,54
2	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	0,93	0,81	0,81	0,57	0,49
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	30,43	30,43	30,43	31,81	54,9
4	Partisipasi Pemilih Pada Pilpres/Pileg/Pilkada (%)	68,62	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	71,25
5	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i> / 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	77,04	79,87	79,87	88,55	89,44
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	62%	62%	64% (32/50 perda)	66% (33/50 perda)	68% (34/50 perda)
7	Indeks Risiko Bencana (1.5.1.(e))	115,52	108,63	103,49	99,41	94,31
8	Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,64	0,65	0,65	0,72
Indikator SDGs						
9	Kelurahan Siaga Bencana (renja) (1.5.1.(a))	58	64	64	64	64
10	Persentase pemenuhan bagi korban bencana (1.5.1.(b))	100	100	100	100	100
11	Pendampingan psikososial korban bencana sosial. (1.5.1.(c))	90	90	90	90	90
12	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (1.5.1.(d))	16	16	16	26	26
13	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Daerah (1.5.3*)	1	1	1	1	1
14	Jumlah kota (kelurahan) tangguh bencana yang terbentuk. (11.5.1.(b))	21	22	30	34	35

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
15	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (16.1.1.(a)) (angka kriminalitas)	3	1	6	5	2

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa tingkat waktu tanggap (*response time rate* atau 15 menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2024 sebesar 89,44% artinya dari 489 kejadian kebakaran, 433 telah dilayani sesuai dengan *response time* oleh petugas pemadam kebakaran. Hal ini disebabkan terjadinya lonjakan intensitas kebakaran musim kemarau dan waktu kejadian bencana kebakaran yang hampir bersamaan, menyebabkan personil pemadam yang tersebar di pos pemadam di 7 Kecamatan se-Kota Semarang tidak mampu memberikan pelayanan sesuai *respose time* 15 menit. Sehingga selain diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras, serta SDM pemadam kebakaran, juga perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kinerja positif juga terjadi pada capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) yang trennya menurun dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu selalu ditingkatkan kesadaran masyarakat, antisipasi, tindak pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana ke depannya.

Dari data di atas, dapat dilihat pula bahwa persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan oleh Satpol PP Kota Semarang berada pada angka 68,00%. Dari 50 Perda dan Perkada yang ditegakkan terdapat 34 Perda dan Perkada yang diampu oleh Satpol PP Kota Semarang. Sedangkan dari sisi angka kriminalitas, terlihat bahwa terjadi penurunan angka kriminalitas pada tahun 2024 menjadi 1.221 kasus dari 1.293 kasus pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP Kota Semarang dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas kedinasan telah dilaksanakan dengan baik. Dari 1.293 kasus yang ada tersebut, jenis kasus yang terbanyak terjadi di antaranya adalah narkoba, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ranmor. Oleh sebab itu, masih diperlukan berbagai upaya dan langkah konkrit agar jumlah kasus kriminal dapat lebih ditekan, terutama pada ketiga jenis kasus yang memiliki jumlah kejadian terbanyak.

Merujuk pada Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Semarang tahun 2023-2027 Kota Semarang sangat berpotensi memiliki beberapa bahaya bencana yang meliputi sembilan potensi bencana yaitu bencana banjir, banjir bandang, banjir rob, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor. Kota Semarang menghadapi berbagai tantangan kebencanaan yang signifikan, terutama terkait dengan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran. Indeks Risiko Bencana Kota Semarang turun menjadi 99,41 di tahun 2024. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 503 kejadian bencana yang tercatat, meliputi bencana banjir (45 kejadian), rob (3 kejadian), Tanah longsor (206 kejadian), Puting Beliung (26 kejadian), Rumah Roboh (70 kejadian), Kebakaran (69 kejadian), pohon tumbang (82 kejadian), dan rumah amblas (1 kejadian).

Bencana tanah longsor dan banjir menjadi masalah utama yang patut mendapat perhatian di Kota Semarang, karena memiliki intensitas kejadian yang cukup sering terjadi di Kota Semarang. Faktor utama penyebabnya adalah curah hujan tinggi yang menyebabkan pergerakan tanah, serta kondisi geografis daerah yang memicu kejadian banjir dan tanah longsor sering terjadi di Kota Semarang khususnya di wilayah Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Banyumanik, Semarang Utara, dan Semarang Timur.

Dari data di atas terkait Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dapat dilihat bahwa ketahanan Kota Semarang di tahun 2024 dalam menanggulangi bencana berada pada kategori yang cukup baik, terlebih terdapat peningkatan nilai IKD, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam mengelola kebencanaan juga semakin baik. Peningkatan nilai IKD yang berbanding terbalik dengan penurunan Indeks Risiko Bencana menunjukkan bahwa Kota Semarang semakin tangguh dalam menghadapi bencana. Kondisi ini mencerminkan efektivitas berbagai strategi mitigasi yang telah diterapkan, baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural terlihat dari pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana yang semakin masif, seperti penguatan sistem drainase, pembangunan tanggul dan polder di daerah pesisir. Modernisasi sistem peringatan dini dan pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam mengurangi dampak bencana. Selain itu, pendekatan non-struktural juga semakin diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, simulasi evakuasi, serta keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan mitigasi telah membangun kesadaran kolektif untuk menghadapi risiko yang ada.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar pada bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80% (A) + 20% (B)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100% <u>0 orang</u> 0 orang	100% <u>0 orang</u> 0 orang	100%	100 %	80%	20%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100% <u>60 orang</u> 60 orang	100% <u>1.687.222</u> 1.687.222	100% <u>500 orang</u> 500 orang	100%	80%	20%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	86,3% <u>790 orang</u> 890 orang	100% <u>1.975</u> 1.975	100% <u>900</u> 900	100%	80%	20%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% <u>59</u> 59	100% <u>1.255</u> 1.255	100% <u>1.255</u> 1.255	100%	80%	20%	100%

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (B)	IP SPM = 80% (A) + 20% (B)
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100% <u>1.680.417</u> 1.680.417	97,32% <u>837</u> 860	100% <u>936</u> 936	100%	80%	19,65	99.65%
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100% <u>100%</u> 100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Kerjasama dan Otda, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, 2024

Capaian SPM pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sejak tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang positif. Di antara SPM layanan di Bidang Trantibum, kinerja yang tidak mencapai paripurna terdapat pada jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kendala yang dihadapi terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di antaranya adalah belum terdapat RISP KP dan manajemen pemadaman kebakaran ditingkat Kota, selain itu juga kapasitas SDM personil pemadam yang belum optimal (36,75% belum bersertifikasi) serta sarpras pemadam kebakaran yang kurang representatif (mobil tangga/snorkel rusak, sedangkan kebutuhan pemadaman digedung bertingkat meningkat, alat pelindung diri yang jumlahnya terbatas). Sedangkan secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinas antara lain:

- Belum terpenuhinya standar teknis terkait jumlah dan kualitas sarana prasarana dan juga jumlah dan kualitas personil pelaksana layanan.
- Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- Jumlah pos pemadam kebakaran beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum ada di setiap kecamatan untuk meningkatkan respon time.
- Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang rendah.
- Kurangnya sarana prasarana yang dapat membantu pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku di Kota Semarang.
- Belum optimalnya personil perlindungan masyarakat yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pembangunan pada Urusan Sosial ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang penanganannya bersifat multidimensional. Tingkat kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2024 berada pada angka 4,03%. Angka ini menurun dari persentase penduduk miskin dari tahun 2023 yang berada pada angka 4,23%, Jika ditinjau dari persentase kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, kondisi di Kota Semarang selalu lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan

Provinsi Jawa Tengah dan bahkan tingkat Nasional. Hal Ini menunjukkan bahwa indikator presentase kemiskinan pada Tujuan ke-1 Pembangunan Berkelanjutan atau TPB yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun 2022 jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencapai 755.979 , hal ini dikarenakan komponen PPKS salah satunya adalah korban bencana, dalam konteks ini bencana yang dimaksud adalah wabah covid, dan pada tahun 2023 jumlah PPKS menurun drastis dikarenakan salah satu komponen PPKS (korban bencana/wabah covid) sudah tidak dihitung lagi maka terjadi penurunan drastis terhadap jumlah PPKS. Pada tahun 2023 hanya menghitung data jumlah PPKS yang layak bantuan sosial.

Berdasarkan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, data awal terdapat sebanyak 21.863 KK (102.394 individu) desil 1 data P3KE yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar di 16 kecamatan 177 kelurahan. Setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi pada data tersebut, data penduduk yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem sejumlah 518 KK/2446 individu dan telah ditetapkan dalam SK walikota nomor 050/670 tahun 2023. Pada Tahun 2025 meningkat menjadi sebanyak 1.024 KK (5.519 Individu), setelah dilakukan verifikasi dan validasi pada data tersebut, data penduduk yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem sejumlah 980 keluarga (5.093 individu) dan telah ditetapkan dalam SK walikota nomor 000.7/318 tahun 2025.

Jumlah PPKS mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 87.766. hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah penerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan PPKS. Kinerja Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS	518.358	501.322	755.979	192.715	40.358
2	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	516.759	501.322	755.979	192.715	40.358
3	PPKS yang memperoleh bantuan sosial	513.287	258.154	607.353	192.715	40.358
4	Jumlah sarana sosial/panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi	119	105	144	164	164
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100
Indikator SDGs						
6	Persentase penduduk miskin versi Perda Kt Smg (%) (indikator 1.2.1*)	16,15	24,13	11,06	11	11*

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
7	Cakupan disabilitas miskin yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar (%) (indikator 1.3.1.(c))	100	100	100	100	100
8	Persentase Rumah Tangga miskin / jiwa yang memperoleh Program PKH (%) (indikator 1.3.1.(d))	7,99	7,99	14,72	8,68	8,68*
9	Tingkat kemiskinan BPS (%) (indikator 10.1.1.(a))	4,34	4,56	4,25	4,23	4,03

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Urusan Sosial, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 40 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 – 2024

No	INDIKATOR SPM	2020	2021	2022	2023	2024		
						PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	CAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR(B)	IP SPM = 80% (A) + 20% (B)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% <u>176 orang</u> 176 orang	100%	100% <u>150 orang</u> 150 orang	80%	80%	20%	100%
2	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% <u>29 orang</u> 29 orang	100%	100% <u>24 orang</u> 24 orang	80%	80%	20%	100%
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% <u>148 orang</u> 148 orang	100%	100% <u>102 orang</u> 102 orang	80%	80%	20%	100%
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100% <u>292 orang</u> 292 orang	100%	100% <u>83 orang</u> 83 orang	80%	80%	20%	100%
5	Persentase (%) korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100% <u>510.650</u> 510.650	100%	100% <u>14.274 orang</u> 14.274 orang	80%	80%	20%	100%

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda dan Kerjasama, Dinas Sosial, 2024

Permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan layanan SPM bidang urusan sosial adalah:

- a. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya fakir miskin.
- b. Masih kurang memadainya rumah singgah/*shelter* yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah pemerlu pelayanan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/*shelter* dan rumah autis yang dimiliki Dinsos Kota Semarang dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
- d. Masih banyaknya SDM relawan sosial yang belum memiliki kompetensi atau *skill* yang tepat dalam penanganan masalah sosial.

- e. Masih kurangnya peran masyarakat atau dunia usaha melalui CSR yang dilibatkan dalam penanganan masalah sosial.
- f. Proses validasi data terhadap PPKS yang belum dilakukan secara maksimal.

2.1.3.2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

a. **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Sasaran utama pembangunan urusan tenaga kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Beberapa indikator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.41 Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS)	69,89%	69,41%	70,96%	69,42%	69,88%
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	90,43%	90,43%	92,40%	94,01%	94,18%
3	Jumlah Penduduk Usia Kerja	1.191.265	1.490.742	1.516.197	1.338.215	1.354.593
4	Angkatan Kerja			1.075.827	929.014	946.618
	Jumlah Bekerja	925.963	936.076	994.091	873.358	891.497
	Jumlah Pengangguran Terbuka	98.001	98.718	81.736	55.656	55.121
	Total Angkatan Kerja	1.023.964	1.034.794	1.075.827	929.014	946.618
5	Bukan Angkatan Kerja	441.157	455.948	440.370	409.201	407.975
	Sekolah	151.538	165.797	139.678	123.051	123.051*
	Mengurus Rumah Tangga	232.208	222.279	241.445	221.193	221.193*
	Lainnya	57.411	67.872	59.247	64.957	64.957*
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	NA	78,94% (15 keg)	80,95% (17 keg)	80,95% (17 keg)	80,95
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	74%	68,14% (198150 dari 272399 TK)	72,74% (173421 dari 254511 TK)	77,09% (210904 dari 273592 TK)	79,06

INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS		2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	50 (158 kasus, 79 PB)	50 (158 kasus, 79 PB)	50 (158 kasus, 79 PB)*	70,51 (78 kasus, 55 PB)	70,63
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (8.5.2*)	9,57	9,54	7,6	5,99	5,82

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 sebesar 69,88% meningkat jika dibandingkan dengan 2023 sebesar 69,42%. Angkatan kerja harus diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan. Demikian pula yang terjadi di Kota Semarang, investasi dengan pelibatan tenaga kerja lokal menyebabkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Selain itu dengan banyaknya program kegiatan peningkatan kompetensi pencari kerja baik pada BLK maupun LPK membuat banyak pencari kerja yang ditempatkan baik pada pekerja formal, maupun sebagai wirausaha baru. Terlihat TPT di Kota Semarang terus menurun dari tahun 2018 hingga mencapai 5,82% pada tahun 2024. Penurunan TPT ini juga mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi semakin baik dan tenaga kerja yang ditempatkan juga semakin banyak. Jika ditinjau dari UMK, dapat dilihat bahwa Kota Semarang selalu mengedepankan kesejahteraan dari setiap masyarakatnya, hal ini terlihat bahwa UMK di Kota Semarang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan selalu menjadi Kota dengan nominal tertinggi se-Jawa Tengah. Adapun progres UMK sejak tahun 2020-2024 terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.42 UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2020-2024

UMK DAN KHL	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Upah Minimum Kota Semarang (Rp)	2.715.000	2.810.025	2.835.021	3.060.348	3.243.969

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2024

Angka penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup bervariasi di tahun 2024, berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa penyelesaian dalam bentuk Persetujuan Bersama (PB) adalah sebesar 61 kasus, hal ini diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi hubungan industrial. Oleh sebab itu, masih perlu banyak upaya preventif yang dilakukan oleh Disnaker Kota Semarang untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial. Adapun data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus yang ditangani:		150	159	108	127	123
Penyelesaian:						
1	Dalam bentuk PB	84	63	63	72	61
2	Tahap anjuran mediator	51	33	33	45	42
3	Secara bipartite usai mediasi	21	10	10	6	5
4	Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor	3	2	2	6	3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2024

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen sekaligus kinerja ini terlihat dengan diterimanya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Mentor dan predikat Kota Layak Anak kategori Utama dari Kementerian PPPA. Penyelenggaraan upaya terkait juga diperkuat dengan ditetapkannya Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Disisi lain Rasio KDRT pada tahun 2024 sebesar 0,031 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Sedangkan dengan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar 25,08 meningkat menjadi sebesar 25,78 pada tahun 2024, dan semuanya telah dapat ditangani sebesar 100%. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT dan korban kekerasan semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga Pelayanan Rumah Duta Revolusi Mental RDRM yang menyediakan layanan konsultasi masalah anak, remaja dan keluarga, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum

Tabel 2.44 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,26%	17,14%	59,38%	48,89%	48,90%
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,01%	0,017%	0,028%	0,027%	0,03%
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	17,04	18,78	25,46	25,08	25,78
4.	Persentase Perempuan Korban	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
	Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	(146 orang)	(160 orang)	(217 orang)	(214 orang)	(247 korban)
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,67	73,64	73,93	73,86	78,71
6.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	70,59	70,59	71,80	71,36
7.	Rasio KDRT	0,029	0,02	0,025	0,025	0,031
8.	Indeks Perlindungan Anak	NA	70,59	70,59	71,80	71,36
Indikator SDGs						
9.	Cakupan program pengarusutamaan gender	97	97	98	100	100
10.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan	0,0041	0,0052	0,0092	0,01	0,0095
11	Pemberdayaan terhadap korban KDRT	100	100	100	100	100
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,67	73,64	73,93	73,86	78,71

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Capaian indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2024 sebesar 0,025% dengan jumlah anak korban kekerasan yang ditangani sebesar 121 orang dari jumlah anak usia 0-19 tahun sebesar 485.255 anak. Hal ini menurun sebesar 0,002% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 0,027%. Dengan penurunan tersebut semua anak korban kekerasan pada tahun 2024 dapat ditangani oleh DP3A Kota Semarang dengan baik.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Inovasi pada penyelenggaraan urusan pangan dalam rangka antisipasi inflasi dampak kenaikan bahan bakar di Kota Semarang diantaranya dengan melaksanakan pasar pangan murah dan aman melalui program Pak Rahman sebanyak 197 kali yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan seperti Bulog, Indoguna, BUMP, Fresh Mart, Pengusaha Sayur, UMKM Pangan Lokal. Dan upaya ini secara efektif cukup mampu menahan inflasi dari sisi pemutusan rantai pemasokan penawaran barang pangan.

Kinerja lain adalah tercapainya pola pangan harapan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 92,16%, dimana semakin tinggi nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) maka akan semakin beragam konsumsi pangan masyarakat dan menuju PPH. Ketersediaan pangan berupa beras berdasarkan data tahun 2024 sebesar 701.497,02 ton, sedangkan tingkat kebutuhan pangan masyarakat Kota Semarang sebesar 166.256,89 ton, sehingga cadangan pangan masyarakat sebesar 421,94%.

Distribusi Pangan didukung oleh Mekanisme dan alur distribusi pangan (terutama berupa beras) kepada warga miskin yang sesuai aturan juga telah tercapai 100%. Demikian pula terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang. Selain itu juga berhasil menurunkan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan mencapai 0%, melalui Intervensi daerah rentan rawan pangan prioritas 1,2,3 dengan

berbagai kegiatan antara lain: memberi bantuan beras melalui Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM-Beras), penyelenggaraan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), peningkatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Pelatihan pengembangan ketersediaan pangan dan Rakor dengan multistekholder lintas sektoral. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menginisiasi Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (Garang Asem) dan Penggunaan Pangan Lokal melalui kegiatan Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi (Pisang Legi) yang telah dilegalisasi melalui Surat Edaran Wali Kota. Beberapa kinerja pada Urusan Pangan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor/hari	89,1	89,1	91,2	91,8	92,16
2	Ketersediaan Energi/ Kapita	Kkl/Kapita/ Hari	3,054	3,055	3,056	3,057	2,924
3	Tingkat Keamanan Pangan	%	91,26	91,27	84,6	84,61	87,44
4	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	252,05	252,806	367,51	409,01	421,94
5	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	7	6	3,4	0,56	0
6	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	NA	NA	99,4	98,30	96,84

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024

- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
- Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota lebih pada dukungan pada program Reformasi Agraria bekerjasama dengan Kantor Pertanahan/BPN terutama dalam hal fasilitasi atau mediasi sengketa tanah yang terjadi di wilayahnya.
- Capaian kinerja pada tertib administrasi pertanahan ditunjukkan dengan konsistennya ketertiban administrasi pertanahan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sebesar 90,63%. Penyelesaian kasus tanah negara cenderung konsisten dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang selalu mencapai 100%. Terdapat 61 kasus yang diselesaikan di tahun 2024. Adapun realisasi kinerja pada urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.46 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tertib Administrasi Pertanahan (%) (Peningkatan <i>Data Base</i> Pertanahan)	88,27	87,18	87,14	90,63	90,63
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100% 15 kasus	100% 27 kasus	100% 61 kasus	100%* 61 kasus	100%* 61 kasus
3	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	58,00%	12,79%	12,79%	88,89%	88,89%
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	60,00%	11,08%	11,08%	100%	100%

Sumber: BPN dan Dinas Penataan Ruang, 2024

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja Kinerja penyelenggaraan pada urusan Lingkungan Hidup ditandai dengan diraihnya :

1. Penghargaan Nirwasita Tantra sebagai Entitas Pemerintah kategori Kota Besar Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2. Penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklam dengan kategori partisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan program kampung iklim (proklam) di daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
3. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional (SMA Karangturi Semarang dan SMA N 16 Semarang),
4. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi (SMA N 8 Semarang, SD N Bulu Lor Semarang, SD Petra Semarang, dan SD N Peleburan 03 Semarang),
5. Penghargaan Kampung Iklim (Proklam) Tingkat Nasional (Program Kampung Iklim dengan kategori Trophy Proklam Utama diberikan kepada RW 15, Kelurahan TanjungMas, Kecamatan Semarang Utara dan Program Kampung Iklim dengan kategori Trophy Proklam Lestari diberikan kepada RW 03, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik).

Proklam merupakan wujud implementasi dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan partisipasi masyarakat yang didampingi oleh beberapa instansi terkait melalui kegiatan pengomposan, pembuatan *eco brick*, penghijauan, wana tani, pewadahan sampah, pemanenan air hujan, sumur tadah hujan, pemanfaatan kolam retensi banjir, pemanfaatan air leri, *urban farming*, lilin daur ulang jelantah dan sebagainya. Sampai dengan tahun 2024 Kota Semarang sudah memiliki 97 Proklam dengan rincian 5 Proklam Madya, 66 Proklam Pratama, dan 24 ProKlim Utama.

Selain itu juga dilakukannya Program Strategis untuk menunjang terhadap peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, diantaranya: pembatasan penggunaan plastik, secara periodik dilaksanakan *Car Free Day*, juga penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari pemilahan, pengumpulan pengolahan dan pemrosesan akhir. Sehingga sampai dengan saat ini terdapat 497 unit bank sampah di masyarakat, juga rumah kompos, dan TPS3R, yang masih menyisakan sebanyak 3.481,14 ton sampah atau sebesar 0,81% yang belum dikelola, baik yang dikurangi maupun yang di tangani.

Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Semarang tahun 2023 sesuai Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.47 Data Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Semarang Tahun 2024

NO	KETERANGAN	NILAI (TON/TAHUN)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	434.243,97
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (27,66%)	120.152,30
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	2.487,92
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	32,51
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	117.631,87
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH (71,34%)	309.809,86
d	Pemilahan/Pengumpulan	0
e	Pengangkutan	0
f	Pengolahan	317,55
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	317,55
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0
g	Pemrosesan akhir	309.492,31
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	309.492,31
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + IIIf) = (27,74%)	120.469,85
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) = (72,26%)	313.774,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan emisi GRK dalam 4 sektor sebagai berikut:

Tabel 2.48 Upaya Penurunan Emisi GRK

NO	SEKTOR	KEGIATAN	AKSI MITIGASI	PENURUNAN EMISI 2022	PENURUNAN EMISI 2023	PENURUNAN EMISI 2024*
1	Sektor Energi	Efisiensi Energi	penggantian lampu menjadi LED (<i>Light-Emitting Diode</i>)	11.604,10 Ton CO ₂ eq	301,31 Ton CO ₂ eq	301,31 Ton CO ₂ eq
			penggantian LPJU dengan LED (<i>Light-Emitting Diode</i>)	34,59 Ton CO ₂ eq	4.112,31 Ton CO ₂ eq	4.112,31 Ton CO ₂ eq
		On Grid PLTS	penggunaan PLTS untuk penerangan jalan umum	34,14 Ton CO ₂ eq	6,32 Ton CO ₂ eq	6,32 Ton CO ₂ eq
			PLTS <i>solar home system</i>	1.891,84 Ton CO ₂ eq	736 Ton CO ₂ eq	736 Ton CO ₂ eq
			Pembangunan PLTB		5,31 Ton CO ₂ eq	5,31 Ton CO ₂ eq
2	Sektor Transportasi	Area Traffic Control System (ATCS)	Pemasangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) untuk mengendalikan kemacetan di 51 simpang	18,06 Ton CO ₂ eq		
			Pembangunan ITS/ATCS		3.846,88 Ton CO ₂ eq	3.846,88 Ton CO ₂ eq
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		11,20 Ton CO ₂ eq	11,20 Ton CO ₂ eq
		Reformasi Sistem Transit (<i>Bus Rapid Transit</i>) BRT	Peningkatan semi transit (BRT)	47.743,10 Ton CO ₂ e	355,21 Ton CO ₂ eq	355,21 Ton CO ₂ eq

NO	SEKTOR	KEGIATAN	AKSI MITIGASI	PENURUNAN EMISI 2022	PENURUNAN EMISI 2023	PENURUNAN EMISI 2024*
3	Sektor Lahan	Peningkatan cadangan carbon melalui penanaman dengan melibatkan sektor pemerintahan, masyarakat dan pelaku usaha	Peningkatan fasilitasi rehabilitasi mangrove dan hutan mangrove	93,72 Ton CO2e	9.364,30 Ton CO2eq	9.364,30 Ton CO2eq
			Penanaman ruang terbuka hijau (gerakan iji royo royo) dipermukiman, perkantoran, RS, lembaga pendidikan	446,98 Ton CO2e	257.058,50 Ton CO2eq	257.058,50 Ton CO2eq
			Pengembangan hutan rakyat dan gerakan menanam pohon	84,88 Ton CO2e		
			Fasilitasi bantuan bibit		400,61 Ton CO2eq	400,61 Ton CO2eq
			Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)		22,77 Ton CO2eq	22,77 Ton CO2eq
			Pengelolaan kawasan konservasi		2.895,72 Ton CO2eq	2.895,72 Ton CO2eq
4	Sektor Pertanian dan peternakan	Pengembangan biogas ternak	Pengelolaan kotoran ternak (pengelolaan biogas)	4.340,18 Ton CO2e	1.784,30 Ton CO2eq	1.784,30 Ton CO2eq
		Pengeolaan Tanaman Terpadu (PTT)		6.844,14 Ton CO2e		
		Varietas padi rendah emisi	Pengembangan varietas padi rendah emisi	6.268,76 Ton CO2e	5.776,21 Ton CO2eq	5.776,21 Ton CO2eq
		Subtitusi pupuk kimia dengan organik	Penggunaan pupuk organik dan kompos	147,14 Ton CO2e	0,02 Ton CO2eq	0,02 Ton CO2eq
			Peningkatan penggunaan pupuk organik dan biomasa	241,12 Ton CO2e	265,74 Ton CO2eq	265,74 Ton CO2eq
		Pembangunan rumah kompos	Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO)	124.091,54 Ton CO2e	1,11 Ton CO2eq	1,11 Ton CO2eq
5	Sektor Limbah	Optimalisasi fasilitasi penanganan dan pengurangan sampah di Kota Semarang	Pembangunan TPA <i>controlled landfill system</i>	38,33 Ton CO2e		
			Pembangunan TPS 3 R	6.505,60 Ton CO2e	3.229,84 Ton CO2eq	3.229,84 Ton CO2eq
			Pengelolaan sampah 3R di rumah tangga perkotaan	0,46 Ton CO2e		
			Pembangunan bank sampah	2.859,69 Ton CO2e	89.440,20 Ton CO2eq	89.440,20 Ton CO2eq
			Pembangunan fasilitas kompos di TPA	32.007,19 Ton CO2e		
			Data sistem blank	2.517,81 Ton CO2e		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan menggunakan definisi operasional lama pada tahun 2024 mengalami peningkatan kinerja. Berdasarkan data diketahui bahwa IKLH tahun 2024 mencapai angka sebesar 59,41 sedangkan IKLH pada tahun 2023 sebesar 56,84. Walaupun demikian, IKLH ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang mencapai 66,05. Peningkatan IKLH di tahun 2024 ini terjadi karena adanya peningkatan Indeks Kualitas Udara sebesar 9,35 dan peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 0,72. Sedangkan perlu dilakukan berbagai upaya lebih lanjut untuk meningkatkan nilai IKLH, mengingat Indeks Kualitas

Air (IKA) tahun 2024, nilainya justru lebih rendah sebesar 0,44 dibanding tahun 2023. Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2020-2024, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	66,05	59,60	51,32	56,84	59,41
2	Indeks kualitas air (IKA)	50,44	50,00	33,76	46,00	45,56
3	Indeks kualitas udara (IKU)	95,20	75,00	77,38	80,55	86,90
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,90	47,58	33,28	31,63	32,35
5	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	172,34	173,68	73,59	86,15	83,26
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:					
	1. Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenisnya	22,00	24,35	26,18	27,10	27,67
	2. Persentase penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenisnya	75,11	74,21	72,88	72,10	71,34
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	85,00	85,20	86,08	88,23	88,62
Indikator SDGs						
8	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (11.6.1.(a))	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50
9	Jumlah Bank Sampah yang beroperasi (11.6.1.(b))	112	125	225	497	664
10	Jumlah ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan (perush)	50	39	23	29	38

Sumber: Bappeda, DLH Kota Semarang, 2024

Untuk diketahui, terdapat penyesuaian perhitungan yang diterapkan pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta komponennya. Penyesuaian perhitungan tersebut berdasarkan Surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023. Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut IKA-INA yang mengacu pada NSF-WQI (*National Sanitation Foundation Water Quality Index*). Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu *Particulate Matter* 2.5 mikron (PM 2.5). Rumus perhitungan IKL menjadi semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Masih belum optimalnya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Semarang.

- f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2024 adalah 99,35% atau 1.280.090 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 1.288.430 orang. Sedangkan 0,65% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el, ataupun penduduk yang melakukan mutasi kedatangan yang belum rekam KTP-el. Capaian kinerja tersebut, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terdapat penurunan sejumlah 0,22%. Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan kinerja di tahun 2024 adalah adanya lonjakan penambahan Wajib KTP-el dikarenakan peristiwa kependudukan seperti pindah datang atau mutasi penduduk dan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian Wajib KTP-el.

Tabel 2.50 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60.57%	62.05%	60.87%	66,45%	71,06%
3	Kepemilikan akta kelahiran	93.42	95	97.85	98,25	98,35%
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100	100	100	100	100
5	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	45	65	100	100	100
6	Perekaman KTP elektronik	98.07%	98.48%	96.93%	99,57%	99,35%
Indikator SDGs						
7	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran (0-5 Tahun)	98,66%	99,07%	99,44%	99,62%	99,64%
8	Rasio bayi berakta kelahiran (1.4.1.(j))	98.81%	99.26	99.48%	99.69%	99.61%
9	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dispendukcapil, 2024

Persentase capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,06%, ditunjukkan dengan terdapat 293.041 anak yang memiliki KIA dari jumlah penduduk usia KIA yang sebanyak 412.396 anak. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan jumlah anak usia wajib KIA dari tahun sebelumnya dan terdapat jumlah anak yang memiliki KIA yang sudah berusia diatas 17 tahun maka sudah tidak dihitung ke dalam capaian kepemilikan KIA. Akan tetapi capaian KIA tahun 2024 sebesar 71,06% telah mencapai target nasional yang telah ditetapkan sebesar 60% pada tahun 2024.

Capaian tersebut akan terus ditingkatkan untuk tahun yang akan datang, dengan menerapkan pelayanan online adminduk yaitu Aplikasi SiD'nOK, melaksanakan pelayanan paket terintegrasi dengan penerbitan akta kelahiran sekaligus akan mendapatkan KIA dan Kartu Keluarga (KK) atau yang disebut Paket 3 in 1. Selain itu dilaksanakan pula kerjasama pemanfaatan KIA dengan 9 (sembilan) Mitra KIA yaitu Toko Buku Gramedia, Toko Buku Merbabu, Toko Buku Toha Putra, English First, Halmahera Music, Klub Merby, Jungle Toon Water Park, BRT Trans Semarang dan Club House Graha Wahid. Kerjasama ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan nilai manfaat bagi anak yang memiliki KIA, selain itu untuk menarik minat warga agar membuat KIA bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari.

g. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian presentase LPM aktif di tahun 2024 sebesar 100%.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja. Adapun permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu masih kurangnya pemahaman terkait fungsi lembaga kemasyarakatan sehingga terus dilakukan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.51 Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase LPM aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

h. **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 serta Surat Mendagri Nomor 470133761SJ dan 470133751SJ tanggal 5 Juni 2020, Kota Semarang telah menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 pilar, yang terdiri dari: Pengendalian Kuantitas Penduduk; Peningkatan Kualitas Penduduk; Pembangunan Keluarga; Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan Penataan Administrasi Kependudukan. Dan semuanya telah diinternalisasikan dalam program dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu juga telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2022 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045.

Capaian kinerja pada indikator yang telah ditetapkan tahun 2024 sebagian besar dapat tercapai dengan baik dan apabila dibandingkan dengan capaian

tahun 2023 sebagian besar indikator terdapat peningkatan. Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Peningkatan pembinaan dan pendampingan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, UPPKA) perlu dilakukan terus-menerus.

Tabel 2.52 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGs	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Fertility Rate (TFR)	1,99	1,86	1,75	1,74	1,76
2	Jumlah peserta KB Aktif	194,631	175,603	181,864	185,880	180,062
3	Rasio Akseptor KB per 100 PUS	76,94	72,71	76,08	77,72	77,73
4	Jumlah PIK Remaja perjumlah kelurahan	73	73	81	76	84
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Aktif	48,85	40,16	72,9	69,51	72,08
6	Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	BKB: 274 BKR: 124 BKL: 212	BKB: 283 BKR: 131 BKL: 218	BKB: 276 BKR: 113 BKL: 216	BKB: 286 BKR: 108 BKL: 218	BKB: 332 BKR: 121 BKL: 229
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	75,40%	76,94%	77%	76,09%	121%
Indikator SDGs						
8	Cakupan peserta KB aktif	76,94	73,88	76,08	77,72	77,73
9	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern	25,19	29,03	29,58	31,41	39,17
10	Cakupan PUS unmet need (5.6.1.(a))	10,46	10,89	9,13	8,42	5,13

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada tahun 2024, ditandai diantaranya dengan diterimanya Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk kategori Pemerintah Kota yang dalam penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan indikator paling baik. Selain itu, Kota Semarang juga menerima Anugrah Jawa Pos Radar Semarang Tahun 2024 Kategori Transportasi Ramah Disabilitas.

Pada tahun 2024 jumlah kecelakaan sebesar 5.665 kejadian, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 748,05% dari jumlah kejadian kecelakaan tahun 2023 sebanyak 668 kasus. Sedangkan korban meninggal dunia mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 201 korban dari tahun 2023 yang sebesar 31 korban. Selain itu, korban dengan luka berat sebanyak 4 korban dan luka ringan sebanyak 1.435 korban. Demikian pula secara material terjadi peningkatan kerugian material menjadi 4.190.300.000,00 pada tahun 2024. Adapun identifikasi lima lokasi rawan kecelakaan tahun 2024, adalah: Jalan Brigjend Sudiarto (68 Kasus); Jalan Perintis Kemerdekaan (66 kasus); Jalan Urip Sumoharjo (44 kasus); Jalan Setiabudi (44 kasus) dan Jalan Arteri Yos Sudarso (23 kasus). Beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Polresta Semarang diantaranya: Patroli & Turlalin, membentuk Tim Urai Kepadatan, Rekayasa arus lalu lintas dan mensiagakan

derek, koordinasi dengan Ambulance Hebat dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Beberapa ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas masih menjadi isu yang harus segera dipecahkan. Indikator Jumlah titik/ruas rawan macet yang pada tahun 2020 terdapat 3 lokasi (Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Siliwangi), pada tahun 2021 bertambah 1 lokasi yaitu Jl. Elang. Hal ini disebabkan adanya bangkitan-bangkitan perjalanan baru di lokasi tersebut, berupa perumahan/permukiman baru, tempat pendidikan dan pusat ekonomi. Jumlah titik / lokasi rawan kemacetan sudah sesuai target yang ditetapkan dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perbaikan. Lokasi rawan kemacetan pada tahun 2022 tercatat 3 lokasi yaitu Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Jl. Siliwangi. Pada Tahun 2023 ini untuk Jl. Elang yang pada tahun lalu masih padat sudah berangsur mengalami kelancaran. Hal ini didukung oleh rekayasa lalu lintas dan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi tersebut antara lain Traffic Light, rambu-rambu, dan marka jalan. Salah satu indikator titik kemacetan adalah kinerja tingkat pelayanan jalan (LOS). Berikut merupakan LOS pada tiga ruas jalan tersebut:

Tabel 2.53 Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan (LOS) Tahun 2024

NO	RUAS JALAN	STATUS JALAN	V/C	LOS
1	Jalan Brigjend Sudiarto	Provinsi	0,89	D
2	Jalan Setiabudi	Nasional	0,97	E
3	Jalan Siliwangi	Nasional	0,87	D

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Dari data di atas ketiga ruas jalan tersebut termasuk dalam tingkat pelayanan D dan E sehingga membutuhkan penanganan. Sejauh ini Pemerintah Kota Semarang telah berupaya melakukan penanganan di ketiga ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan lalu lintas meski belum optimal menurunkan V/C rasio jalan. Dan karena ketiga ruas jalan dimaksud termasuk ke dalam kewenangan Provinsi dan Nasional sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melakukan penanganan.

Pada Jalan Bringjend Sudiarto yang merupakan jalan utama dari Kabupaten Grobogan ke Kota Semarang sudah terdapat perencanaan pembangunan flyover di Simpang Fatmawati, proses saat ini sudah dilakukan penyusunan DED oleh Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017. Sedangkan pada Jalan Setiabudi sudah terdapat perencanaan pembangunan flyover di Simpang Patung Diponegoro merupakan salah satu program penjabaran Perpres No 79 Tahun 2019 untuk mendukung perkembangan kawasan ekonomi kedungsepur dan KSPN Borobudur, dan saat ini progres perencanaan pembangunan sudah dilakukan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jalan dan Jembatan Provinsi Jateng - DIY pada tahun 2021 oleh BBJN Wilayah Jateng DIY dan berdasarkan kajian tersebut akan dilakukan pembangunan pada tahun 2034. Selain itu pemerintah Kota Semarang juga berencana melakukan upgrade Simpang Ber-Apill di wilayah Tembalang dan sekitarnya menjadi simpang Ber-Apill terkoordinasi ATCS. Sedangkan pada ruas Jalan Siliwangi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas terdapat perencanaan Pembangunan Harbour Tol yang

menyambung dari Pesisir Kendal menuju Pelabuhan Tanjung Mas dan merupakan salah satu program penjabaran Perpres No 79 Tahun 2019 untuk mendukung perkembangan kawasan ekonomi kedungsepur dan KSPN Borobudur.

Kondisi lalu lintas di Kota Semarang secara umum masih dalam kondisi normal, meski demikian untuk pelayanan transportasi diperlukan peningkatan rekayasa lalu lintas, layanan angkutan massal, serta peningkatan prasarana lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas.

Tabel 2.54 Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2020-2024

URAIAN		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	koridor	8	11	12	12	12
2	Load Faktor Trans Semarang						
A	Koridor 1 (T Mangkang - T Penggaron)	%	41,53	43,46	65,68	69,72	74,15
B	Koridor 2 (T Terboyo - T Sisemut)	%	60,63	56,80	82,87	82,82	84,03
C	Koridor 3 (Tanjung Emas - Akpol)	%	34,27	50,20	94,37	101,00	94,84
D	Koridor 4 (Terminal Cangkiran – St Tawang)	%	42,91	38,08	60,93	77,42	77,45
E	Koridor 5 (Meteseh - Bandara - PRPP)	%	63,09	55,77	78,23	84,86	89,88
F	Koridor 6 (Undip - Unnes)	%	23,53	24,89	50,29	61,84	96,99
G	Koridor 7 (T. Terboyo - Soekarno Hatta - Pemuda)	%	46,45	52,44	54,47	65,04	66,21
H	Koridor 8 (T. Cangkiran - T. Gunung pati - Sp Lima)	%	45,26	45,80	76,51	86,60	79,13
I	Feeder 1 (Ngaliyan - Madukoro - Ngaliyan)	%	13,47	17,42	37,41	60,91	76,23
J	Feeder 2 (T. Terboyo - Lamper Tengah - Soekarno Hatta - T. Terboyo)	%	10,87	6,06	23,02	36,54	45,14
K	Feeder 3 (Banyumanik - Penggaron)	%			55,85	36,54	96,88
L	Feeder 4 (Terminal Gunungpati - Unnes - BSB)	%		7,50	8,74	12,38	30,24
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail)	%	63,13	65,09	67,71	69,32	71,99
4	Ketersediaan terminal Terminal Tipe C	unit	3	3	5	3	3
5	Ketersediaan sarana pendukung moda transportasi massal (halte BRT)	unit	376	376	437	438	432
6	Cakupan wilayah terlayani transportasi	%	70	75	75	NA	75
7	Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis	%	83,42	90,05	86,42	NA	90,04
8	Persentase pengelolaan Parkir <i>On the Street</i>	%	NA	NA	86,42	90,06	90,04

URAIAN		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
9	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	10.935.306	12.028.837	15.869.466	22.956.716	20.485.658
10	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	Titik/ruas rawan macet	3	4	3	3	2
11	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	1913	1932	2191	2026	1993
Indikator SDGs							
12	Jumlah penumpang BRT (11.2.1.(a))	Penumpang	6.835.778	6.207.674	11.013.922	13.146.318	13.135.009
13	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar (11.2.1.(b))	NA	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Pelayanan BRT saat ini terdapat 8 koridor, 4 *feeder*, dan 1 layanan malam yang sudah menjangkau ke wilayah-wilayah pinggiran Kota Semarang. Terkait rencana pengembangan rute baru, membutuhkan penambahan anggaran operasional BRT yang saat ini sudah cukup besar $\pm$ 4.5% APBD Tahun 2024. Sehingga saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan seperti peremajaan armada yang banyak mendapat sorotan publik dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Selain itu beberapa terminal tipe C seperti Terminal Tipe C Cangkiran, Gunungpati dan Terboyo secara perlahan telah menjadi lokasi *park and ride* penumpang untuk sisi selatan dan utara kota Semarang. Sehingga perlu didukung untuk sisi timur yang terintegrasi dengan layanan Trans Jateng di Terminal Tipe B Penggaron yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Arus penumpang angkutan umum telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 22.308.400 penumpang dari target 16.010.382 penumpang atau tercapai 127,95%. Hal ini ditunjang oleh perbaikan pelayanan angkutan umum dan pergerakan kegiatan ekonomi yang meningkat sehingga masyarakat mulai kembali menggunakan angkutan umum. Penggunaan angkutan umum oleh masyarakat menjadikan kondisi lalu lintas lancar, dan biaya perjalanan yang murah

Kepemilikan kir angkutan umum di tahun 2024 sebesar 1.993 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2.026. Kepemilikan kir angkutan umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Kir/uji laik sebagai upaya meningkatkan keamanan angkutan umum.

Persentase fasilitas perlengkapan jalan meningkat jika dibandingkan tahun 2023 dimana pada tahun 2024 berhasil mencapai 71,99%. Dampak dari pencapaian ini adalah cukup tersedianya perlengkapan jalan dalam rangka rekayasa lalu lintas, yang berguna dalam mengatur lalu lintas sehingga lalu lintas di jalan menjadi lebih tertib.

j. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, ditandai diantaranya dengan diterimanya predikat sangat baik untuk “Sapa Mbak Ita” dari Kementerian Dalam Negeri, Juara I Lomba

Pertunjukan Rakyat FK Metra Jawa Tengah 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Juara I Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) oleh UGM, dan Badan Publik Informatif pada Penganugerahan Badan Publik Dalam Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik di Kota Semarang pada tahun 2023 terlaksana forum koordinasi PPID serta pengelolaan Pusat Informasi Publik. Dan sebagai dasar pelaksanaannya telah di tetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/122 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pengelolaan laporan layanan pengaduan yang masuk selama tahun 2024 melalui kanal-kanal yang tersedia telah diterima laporan sebanyak 5.378 menurun dari tahun 2023 sebesar 6.129. Laporan tahun 2024 yang masuk seluruhnya merupakan pengaduan. Sedangkan, tidak ada laporan terkait permintaan informasi dan aspirasi yang masuk. Dari 5.378 laporan, 4.888 laporan atau 90,89% laporan telah selesai, 55 laporan selesai bersyarat, dan 435 laporan masih dalam proses. Lima OPD yang paling banyak mendapat laporan pada tahun 2024 yaitu Dinas Perhubungan dengan 1.150 laporan, Dinas Pekerjaan Umum dengan 1.045 laporan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 763 laporan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 321 laporan, dan Satpol PP dengan 295 laporan. Topik yang paling banyak dilaporkan sepanjang tahun 2024 yaitu jalan rusak 437 laporan, pemangkasan pohon 269 laporan, lampu PJU padam 246 laporan, parkir 226 laporan, dan banjir 216 laporan.

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan pengelolaan dan monitoring evaluasi Pengaduan Call Center 112 Kota Semarang. Panggilan melalui CC 112 selama tahun 2023 sebanyak 26.933, dengan rincian 12.336 yang merupakan panggilan yang valid, 5.938 merupakan prank, 4.201 merupakan ghost dan 4.458 merupakan informasi. Topik panggilan adalah Ambulance Transportasi, Ambulance Transportasi PMI, Pemeriksaan, Home Care, Kecelakaan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Evakuasi Hewan Liar, Gangguan Lalu Lintas, Bencana Alam, Ambulance Jenazah Pmi, Kebakaran, Keamanan Dan Ketertiban Umum / Masyarakat, Balap Liar, Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar, Pohon Tumbang, Lampu PJU Padam, Tiang Listrik Rubuh (PJU/PLN/Telkom), Kabel Menjuntai, Rescue, Pipa Bocor, Evakuasi Kecelakaan, Kriminalitas, Kerusakan/Tawuran, Penemuan Mayat, Kekerasan Perempuan/Anak/KDRT, Ambulans Jenazah Disperkim, Covid 19. Kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75,33	75,95	95,23	95,87	95,00
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/ replikasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i> sesuai dengan <i>Masterplan</i>	75	80	100	100	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2024

Kinerja pada urusan komunikasi dan informatika menunjukkan kinerja yang positif, terkait akses internet di OPD, integrasi sistem, cakupan penyebaran dan penyediaan informasi publik serta implementasi masterplan *smart city*.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, diantaranya: Belum maksimalnya penanganan hoaks di Kota Semarang, terkendalanya koordinasi terkait pelayanan informasi dengan badan vertikal di Kota Semarang, ancaman keamanan informasi yang semakin meningkat seperti *hacking*, *phising*, dan *deface*, serta OPD tidak memahami proses bisnis dan tidak memiliki dokumentasi saat berkeinginan membuat aplikasi sehingga menyulitkan proses develop sistem.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam penyelenggaraan urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah untuk menyelesaikan permasalahan terkait kesulitan pemasaran produk dan akses permodalan bagi KUMKM, kota semarang mempunyai program kredit wibawa bagi Koperasi dan pelaku UMKM serta melaksanakan Fasilitasi kemitraan antara koperasi dan UMKM dan melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha bersama Gerai Oleh-oleh Bandara A.Yani Semarang, Hotel Santika, Supermarket *Carrefour*, Superindo, Pangan Mart dan *Sampoerna Retail Community* (SRC) untuk memperluas akses jangkauan pemasaran bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

Di samping itu juga dikembangkan sebuah sistem pendataan UMKM di kota Semarang melalui SI-UMI (Sistem Informasi Usha Mikro) untuk memperoleh data dan informasi terkait perkembangan UMKM di Kota Semarang.

Tabel 2.56 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH/ SDGS	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UMKM yang dibina	Orang	2.822	3.575	5.220	4.006	4.987
2	Jumlah koperasi aktif	unit	637	638	561	567	571

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH/ SDGS	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah seluruh koperasi	unit	718	720	732	736	736
4	Persentase koperasi aktif	%	88,72	88,61	76,64	77,04	77,58
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	10,24	11,00	16,93	17,17	17,40
6	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50,70	52,00	48,22	58,91	59,72
Indikator SDGs							
7	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan. (8.3.1.(c))	%	1.899/ 16.802x 100% = 11,30% (Kredit Wibawa)	2.238/ 21.065x 100% = 10,62% (Kredit Wibawa)	2.361/ 29.611x 100% = 7,97% (Kredit Wibawa)	2.415/ 30.024 x 100% = 8,04% (Kredit Wibawa)	2.416/ 30.421 x 100% = 7,94% (Kredit Wibawa)

Sumber: Dinas Koperasi & UM, 2024

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2024 sebesar 77,58% meningkat dari tahun 2023 sebesar 77,04%. Selain itu, tidak ada perubahan jumlah koperasi dari tahun 2023 sehingga jumlah koperasi terdaftar di Kota Semarang sebesar 736 koperasi. Disisi lain terjadi peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha dari tahun 2023 sebesar 17,17%, meningkat menjadi sebesar 17,40% pada tahun 2024.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah kinerja dalam urusan penanaman modal. Di mana kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum, menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Pada tahun 2024 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik, dimana persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 96,71% melebihi target yang ditetapkan sebesar 95,50%. Beberapa capaian urusan wajib penanaman modal di Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.57 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	18.209.772	22.538.063	24.662.877	27.205.700	28.261.147
2	Persentase peningkatan investasi	(40,21%)	3,09%	10,24%	10,31%	10,03%
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	344	416	675	556	550
4	Persentase ijin terbit sesuai SP	98,70%	99,33%	95,63%	95,69%	96,71%

Sumber: DPMPTSP, 2024

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) dari yang ditargetkan 492 investor mencapai 550 Investor. Namun, realisasi jumlah investor di tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 556 investor. Semakin banyaknya investasi yang masuk di Kota Semarang akan membawa dampak positif, beberapa diantaranya adalah adanya peningkatan tenaga kerja bagi masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan terciptanya perubahan kualitas sumber daya manusia serta taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Nilai investasi tahun 2024 mencapai Rp28.261.147.000.000,- berhasil melebihi target kinerja RPJMD Kota Semarang yaitu sebesar Rp27.362.089.000.000 dan meningkat dari tahun 2023 yang sebesar Rp27.205.700.000.000,-.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya adanya tuntutan penyelarasan peraturan perundang-undangan sesuai amanat UU Cipta Kerja guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; adanya tuntutan pemberian fasilitasi perizinan bagi masyarakat pelaku usaha tradisional; dan adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, karena tempat olahraga di masa pandemi ini banyak yang ditutup selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Namun karena minat masyarakat terhadap kegiatan keolahragaan sangat tinggi, sehingga pengoperasionalan dengan pengetatan dan penyediaan sarpras untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat olah raga terbuka tidak bisa dihindari.

Organisasi kepemudaan yang aktif di tahun 2024 meningkat menjadi 48 organisasi dibanding tahun 2023 sebesar 37 organisasi. Sedangkan organisasi olahraga cenderung konsisten sebanyak 63 organisasi di tahun 2024. Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditandai dengan diraihnya kejuaraan prestasi pada tahun 2024 yaitu meraih 10 medali emas, 34 medali perak dan 52 medali perunggu dalam PON Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu atlet Kota Semarang menyumbangkan 12 medali emas, 4 medali perak, dan 11 medali perunggu dalam kejuaraan PEPARNAS di Surakarta. Kota Semarang juga menjadi juara umum pada POPDA Tingkat Jawa Tengah dan juara umum 2 pada PEPAPERDA Jawa Tengah di Surakarta. Berikut disajikan realisasi kinerja daerah urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga tahun 2020-2024.

Tabel 2.58 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan & Olahraga Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	74	25	30	37	48
2	Jumlah organisasi olahraga	63	45	63	63	63
4	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	6	6	6	8
5	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan/ <i>life skill</i> bagi pemuda	2 keg	2 keg	2 keg	10 keg	10 keg
6	Jumlah peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan/ <i>life skill</i> bagi pemuda (SDGs)	100 org	100 org	100 org	250 org	700 org
7	Peningkatan prestasi olahraga	NA	NA	8,92%	8,92%	9,81%
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95
9	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,035	0,035	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah Atlet prestasi dari yang ditargetkan 1212 Atlet mencapai 1118 Atlet atau berhasil mencapai target 92.24%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2024 terdapat beberapa Kejuaraan tingkat Daerah ataupun Tingkat Nasional yang Atlet Kota Semarang mengikuti Kejuaraan tersebut. Adapun peningkatan Atlet Kota Semarang terjadi dikarenakan adanya penambahan Atlet KKO Angkatan ke 3 dan Penambahan Atlet PSE (Program Semarang Emas) serta Penambahan Cabang Olahraga POPDA dimana Kota Semarang pada Kejuaraan tersebut mengirimkan semua Atlet di semua cabang Olahraga yang dipertandingkan adapun atlet Kota Semarang juga mengikuti beberapa Kejuaraan tingkat Nasional seperti Kejuaraan PON di Aceh dan Sumatera Utara dan juga Kejuaraan PEPARNAS di Surakarta.

n. **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Statistik ditandai dengan prestasi pada tahun 2024, diantaranya dengan diraihnya nilai 3,04 dengan predikat baik pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik RI.

Dasar pelaksanaan pengembangan Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang dan Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Kota Semarang adalah Peraturan Walikota No.25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi dukungan terhadap pencapaian sasaran, diantaranya: Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Membangun Metadata Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Pengembangan Infrastruktur, serta Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

Tabel 2.59 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2024

Indikator presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi mencapai 100% sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, demikian halnya integrasi sistem data dan statistik yang mengindikasikan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang telah dimanfaatkan oleh semua pihak. Capaian yang tinggi selalu dijaga dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pemahaman produsen data di OPD tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral & Penyebarluasan Informasi Geospasial dan melakukan pendampingan kepada produsen data dalam penyusunan metadata dan pengajuan rekomendasi statistik.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tingkat keamanan informasi pemerintah di tahun 2024 yaitu sebesar 100% berhasil konsisten mempertahankan prestasi dari tahun 2020. Peningkatan SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikat pada tahun 2023 yang meliputi Pelatihan Internal Audit ISO 27001:2013 dan Awareness of ISO 27001:2022, serta Surveillance I Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.

Tabel 2.60 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	NA	40,00%	50,00%	100%	100%

Sumber: Setda Kota Semarang dan Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2024

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja Bidang Kebudayaan dapat dilihat dari terlestarikannya cagar budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal. Terlestarikannya cagar budaya meningkat menjadi 129,22% di tahun 2024 dari angka 78,93% di tahun 2023. Sedangkan untuk apresiasi terhadap kesenian lokal tahun 2024 menurun menjadi 42,99% dibandingkan realisasi di tahun 2023 yang sebesar 64,96%. Hal ini disebabkan adanya pengaruh globalisasi, event yang mengapresiasi budaya modern seringkali lebih banyak daripada event yang mengapresiasi budaya lokal hal ini dikarenakan event budaya modern lebih mengedepankan teknologi, hiburan global dan tren terbaru sehingga event budaya lokal kurang diminati.

Adapun solusi untuk menindak lanjuti ketidak ketercapaian yaitu penyelenggaraan event budaya lokal melibatkan generasi muda dengan menggabungkan budaya tradisional dengan menciptakan karya yang lebih modern dan didukung dengan teknologi serta dipublikasikan melalui platform media sosial.

Tabel 2.61 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang	Kelompok	813	859	929	1.031	1.081
2	Jumlah grup kesenian	Kelompok	813	859	929	1.031	1.081
3	Jumlah gedung kesenian	Gedung	14	14	15	15	18
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Gedung	199	199	200	202	208
5	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata	Buah	12	12	12	12	12
6	Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	336	351	400	401	524
7	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	70,96	71,30	77,78	78,93	129,22

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
8	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	461	534	578	698
9	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	4	4	8	10	11
10	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	23,92	25,66	45,27	64,96	42,99

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2024

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan kebudayaan diantaranya:

1. Pengaruh seni budaya asing mengancam eksistensi seni budaya tradisional.
2. Pengaruh globalisasi komersialisasi dapat mengancam keberlanjutan cagar budaya.
3. Kurangnya regenerasi pada pembuat, pemain, penonton dan penanggap wayang.
4. Kurangnya pembaruan dan inovasi pada penyelenggaraan seni budaya tradisional.
5. Kurangnya media dan *platform* menampilkan konten seni budaya.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat solusi sebagai berikut:

1. Pemberdayaan bagi pelaku seni budaya untuk berinovasi karya seni budaya sehingga seni budaya tradisional tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas aslinya.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap komersial yang merusak cagar budaya dengan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi pelajar terkait teknik pembuatan, permainan dan penanggapan wayang serta menyelenggarakan festival wayang tingkat pelajar.
4. Melakukan kolaborasi antara seni budaya tradisional, kontemporer dan modern serta mengadaptasi teknologi seperti penggunaan multimedia sehingga penyelenggaraan seni budaya tradisional lebih menarik dan relevan.
5. Menjalin kerjasama dengan media sosial dan *platform streaming* serta pemanfaatan media sosial sebagai media informasi sehingga konten seni budaya menarik dan mudah diakses.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Berawal pandemi menyebabkan jumlah kunjungan *offline* pada perpustakaan Kota Semarang berkurang tajam, dan sebaliknya jumlah pengunjung pada perpustakaan digital meningkat sebagai dampak pandemi yang menerapkan social distancing. Untuk manajemen peminjaman *online* juga telah dikembangkan, sehingga masyarakat luas bisa meminjam buku untuk

lama waktu tertentu untuk dibaca melalui *smartphone*. Koleksi *ebook* perpustakaan Kota Semarang juga akan disediakan di beberapa tempat umum yang bisa diakses tanpa menggunakan koneksi internet, tetapi cukup dengan koneksi bluetooth dengan aplikasi tertentu.

Sibooky merupakan aplikasi buku digital yang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Pada Website ini tersedia koleksi ebook baik secara *open source* atau non komersil dan koleksi ebook komersil dengan menggunakan sistem DRM (*Digital Right management*).

Pada jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2024 sebanyak 1.410.937 pengunjung, berasal dari Kunjungan Perpustakaan Digital (*SiBooky*), Kunjungan Inlist, Layanan Terpadu, dan Perpustakaan Keliling dan ini jauh meningkat. Terdapat peningkatan signifikan pada pengunjung perpustakaan, hal ini didukung oleh peningkatan kunjungan perpustakaan digital *SiBooky*. *SiBooky* terus meningkatkan keberagaman koleksi dan jumlah koleksi yang masih perlu ditingkatkan, selain dari sistem informasinya (baik *user interface* maupun *user experience*). *Sibooky* saat ini juga dapat diakses pada tempat-tempat transit BRT maupun mitra Perpustakaan yang telah mendaftarkan diri menjadi Mitra perpustakaan kota semarang untuk dapat mengakses layanan *sibooky* bahkan dapat diberikan pinjaman buku.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Semarang di tahun 2024 sebesar 69,59% meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 69,17%. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2024 sebesar 1.410.937 orang yang meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 1.123.815 atau naik sebesar 25,55%. Peningkatan kunjungan perpustakaan didukung oleh meningkatnya jumlah koleksi buku di perpustakaan menjadi sebesar 118.904 buku di tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 115.548 buku.

Tabel 2.62 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan milik Pemerintah	1	1	1	1	1
	Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah	191	193	195	195	195
2	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	10.471	10.66 (peminjam)	588.851 (dari inlist, layanan terpadu, pusling, dan SiBooky)	1.123.815	1.410.937
3	Jumlah Koleksi buku perpustakaan	101.460	106.168	108.937	115.548	118.904
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	42,07%	45,00%	67,00%	69,17%	69,59%
5	Pengunjung perpustakaan per tahun	22,00%	24,00%	36,00%	66,53%	83,17%
6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	56,58	57,00	59,80	70,78	71,58

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2024

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Prestasi yang diperoleh pada penyelenggaraan urusan kearsipan pada tahun 2024 diantaranya: Peringkat 1 Pengawasan Kearsipan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Peringkat 7 Lembaga Kearsipan Daerah Tingkat Nasional.

Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/dipelihara mengalami peningkatan menjadi 37.707 arsip di tahun 2024. Klasifikasi dan rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara cenderung konsisten dari tahun 2023 ke tahun 2024 yang masing-masing sebesar 100% dan 95%. Dari keberhasilan capaian Bidang Kearsipan yang meningkat di tahun 2024 masih terdapat permasalahan yang muncul yaitu Aplikasi SRIKANDI yang menjadi *platform* pengolahan arsip dinamis pada wilayah Pemerintahan Kota Semarang masih sering mengalami kendala pada server nasional yang membuat kegiatan surat menyurat terhambat. Selain itu, masih banyak OPD di Pemerintah Kota Semarang yang belum menganggarkan sarpras penunjang kegiatan kearsipan disebabkan masih ada kekeliruan penempatan belanja barang jasa. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2.63 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik	28.055 arsip	29.000 arsip	30.500 arsip	31.608 arsip	27.102 arsip
2	Peningkatan klasifikasi arsip	10%	10%	100%	100%	100%
3	Rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara	99%	100%	95%	95%	95%
4	Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	50	50	50	51	52
5	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan /dipelihara	37.000 Arsip	37.000 Arsip	37.500 Arsip	37.605 Arsip	37.707 Arsip
6	Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi	83.491 Dokumen	83.491 Dokumen	84.991 Dokumen	85.060 Dokumen	85.162 Dokumen
7	Pameran tentang kearsipan yang diikuti	1 kali	1 kali	2 kali	3 Kali	2 Kali
8	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76,16%	76,00%	79,02%	80,76%	80,76%
9	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan	55,33%	56,00%	57,05%	59,80%	64,30%

No	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	publik dan kesejahteraan rakyat					
10	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	139.000 arsip	145.000 arsip	149.000 arsip	150.108 Arsip	150.108 Arsip

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2024

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebagai kota yang terletak di wilayah pesisir, Kota Semarang terus mengimplementasikan prinsip ekonomi biru dengan mengoptimalkan potensi bahari serta memperkuat pembangunan budidaya perikanan secara berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi dan pembinaan kepada kelompok pelaku usaha perikanan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir.

Kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2024, produksi perikanan tangkap mencapai 3.115,99 ton, meningkat dari 3.067,45 ton pada tahun 2023. Peningkatan serupa juga terjadi pada produksi perikanan budidaya, dari 3.896,25 ton pada tahun 2023 menjadi 3.961,42 ton pada tahun 2024. Dengan demikian, total produksi perikanan Kota Semarang pada tahun 2024 mencapai 7.077,41 ton, menandai adanya pertumbuhan konsisten di sektor ini.

Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai intervensi, seperti penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, serta peningkatan kualitas pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dukungan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir, di antaranya kemudahan operasional penangkapan ikan melalui pemberian subsidi BBM, serta meningkatnya aktivitas nelayan akibat semakin layaknya fasilitas TPI. Pada saat yang sama, peningkatan produksi perikanan budidaya juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui meningkatnya keterampilan pembudidaya dan penerapan teknologi inovatif yang telah disosialisasikan.

Selain pertumbuhan produksi, capaian lain yang menonjol pada tahun 2024 adalah meningkatnya angka konsumsi ikan menjadi 44,18 kg/kapita/tahun, serta naiknya produksi ikan olahan dari 17.688,98 ton pada tahun 2023 menjadi 17.802,22 ton pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor kelautan dan perikanan turut memperkuat rantai nilai dari hulu hingga hilir.

Meskipun capaian tersebut menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Di antaranya adalah masih adanya pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum memiliki izin usaha UPI beserta perizinan produknya, ketergantungan nelayan terhadap musim dan kondisi cuaca, serta tingginya biaya operasional bagi pembudidaya ikan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penyediaan dukungan yang lebih terarah masih dibutuhkan agar sektor kelautan dan perikanan Kota

Semarang mampu tumbuh lebih adaptif dan berkelanjutan. Berikut disajikan kinerja urusan kelautan dan perikanan Kota Semarang tahun 2020–2024.

Tabel 2.64 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan & Perikanan Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok pelaku usaha perikanan	Kelompok	215	235	235	196	174
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/Tahun	3.738,10	3.810,67	3.887,87	3.896,25	3.961,42
3	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/Tahun	2.801,12	2.901,45	3.008,92	3.067,45	3.115,99
4	Produksi ikan olahan	Ton/Tahun	17.485,00	17.506,11	17.604,14	17.688,98	17.802,22
5	Konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	40.16	40.166	43,26	43,75	44,18
6	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	6.539,12	6.487,98	6.896,79	6.963,70	7.077,41

Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan kepariwisataan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja positif di beberapa indikatornya dibandingkan kinerja pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Persentase Kenaikan Persentase Kunjungan wisata di tahun 2024 sebesar 13,13% yang telah melampaui dari target 6%. Sumbangan paling tinggi dirasakan pada jumlah wisatawan domestik, meskipun wisatawan mancanegarapun juga mengalami kenaikan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang sejumlah 7.345.373 orang dengan 7.321.077 orang wisatawan domestik dan 24.296 orang wisatawan mancanegara.

Keberhasilan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang tahun 2024 didukung oleh adanya pengelolaan daya tarik wisata yang dikelola dengan baik oleh pengelola dari swasta atau pemerintah. Daya tarik wisata pada tahun 2024 sebanyak 407 yang terdiri dari daya tarik wisata budaya sebanyak 58 lokasi, daya tarik wisata kuliner sebanyak 167 lokasi, daya tarik wisata pendidikan sebanyak 3 lokasi, daya tarik wisata religi sebanyak 41 lokasi, daya tarik wisata buatan sebanyak 93 lokasi, dan daya tarik wisata alam sebanyak 45 lokasi.

Roadmap pembangunan kepariwisataan secara komprehensif disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (Ripparkot) dimulai pada tahun 2025. Dalam upaya mencapai target kepariwisataan, Kota Semarang terus menggalakkan upaya peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti bahan cetak yang meliputi *leaflet* dengan menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang terdiri dari, *leaflet* museum kota lama, *leaflet Hidden Gem* Kota Semarang, *leaflet UPTD* wisata Kota Semarang, *leaflet tourism map*, *leaflet* Kota Lama, dan *leaflet*

gastronomi. Selain itu, media cetak yang dipublikasikan pariwisata Kota Semarang melalui surat kabar Jateng Post sebanyak 14 kali terbit serta media elektronik melalui *website*, media sosial Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu *instagram, youtube, twitter, live streaming* dan *facebook* serta aplikasi Konco Dolan. Upaya lain yang dilakukan yaitu mengikuti pameran kepariwisataan di Kota Yogyakarta, Kota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Bandung, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purworejo; pemilihan Denok Kenang Kota Semarang sebagai generasi muda yang mempromosikan daya tarik wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan; *Tourism Information Center* dan sistem informasi kepariwisataan (aplikasi); serta *Tourism Information Center* dan sistem informasi kepariwisataan (video). Berikut kinerja urusan pariwisata tahun 2020-2024.

Tabel 2.65 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kenaikan Kunjungan wisata	%	-59,77	-18,46	100,58	21,52	13,13
2	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang	Orang	3.266.931	2.663.761	5.343.151	6.492.875	7.345.373
	- Mancanegara	Orang	6.628	77	4.918	13.992	24.296
	- Domestik	Orang	3.260.303	2.663.684	5.338.233	6.478.883	7.321.077
3	Pendapatan sektor pariwisata	Juta Rupiah	190.758.295.291	207.712.087.923	357.978.839.578	447.122.505.670	468.977.857.125
4	Jumlah Destinasi Wisata	Obyek	71	200	373	381	407
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	Orang	5.109	427.305	770.439	799.896	1.251.084
6	Lama menginap MICE	hari	1,40	1,32	1,43	1,74	1,33
7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	-59,77 (3.266.931)	-18,46 (2.663.761)	100,59 (5.343.151)	21,52 (6.492.875)	13,13 (7.345.373)
8	Tingkat hunian akomodasi	%	30,32	31,74	54,01	57,11	57,48
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10,17	7,96	14,13	15,50	16,55

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2024

Dalam urusan pilihan pariwisata, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, sehingga menyebabkan tren beberapa indikator kinerja pada urusan pariwisata seperti di atas cenderung stagnan dan peningkatan trennya tidak terlalu besar, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Pengemasan atraksi wisata belum optimal, sehingga potensi yang dimiliki belum dapat ditampilkan secara menarik, inovatif, dan sesuai ekspektasi wisatawan saat ini.

- b. Diversifikasi produk wisata masih minim, menyebabkan pilihan aktivitas wisata kurang bervariasi dan belum mampu memenuhi kebutuhan berbagai segmen wisatawan seperti keluarga, milenial, maupun wisata tematik.
- c. Kualitas pelayanan pada destinasi belum merata, baik dari aspek kebersihan, keamanan, informasi layanan, maupun kesiapan fasilitas pendukung, sehingga pengalaman wisatawan tidak konsisten antar lokasi.
- d. Kompetensi SDM pariwisata belum setara, terutama pada kelompok masyarakat pengelola wisata berbasis komunitas yang masih membutuhkan peningkatan kemampuan dalam pelayanan, manajemen destinasi, dan komunikasi wisata.
- e. Promosi pariwisata belum menjangkau target pasar yang tepat, baik dari sisi pemilihan media, segmentasi audiens, maupun kreativitas materi publikasi, sehingga potensi kunjungan belum dapat dioptimalkan.

Adapun solusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelatihan pengemasan atraksi dan paket wisata bagi pelaku wisata agar mampu menciptakan atraksi yang lebih menarik, kreatif, dan kompetitif sesuai tren pariwisata saat ini.
- b. Mengembangkan dan merintis destinasi wisata baru yang dikelola masyarakat terutama di wilayah yang memiliki potensi budaya, kuliner, dan alam, sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal.
- c. Mendorong investasi sektor pariwisata baik melalui promosi peluang investasi maupun kemitraan dengan pihak swasta, untuk memperkuat sarana prasarana dan memperkaya atraksi wisata.
- d. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pariwisata secara rutin dan berjenjang, mulai dari keterampilan dasar pelayanan hingga manajemen destinasi untuk menciptakan kualitas layanan yang lebih baik.
- e. Memprioritaskan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata, sehingga tenaga kerja di sektor ini memiliki standar profesional yang diakui dan dapat meningkatkan daya saing destinasi.
- f. Meningkatkan jangkauan promosi secara kombinatorial antara media offline dan online, termasuk memaksimalkan media sosial, platform digital pariwisata, dan kegiatan pemasaran langsung untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
- g. Menggunakan strategi pemasaran digital yang lebih terarah seperti segmentasi berbasis data, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta penyusunan konten kreatif yang relevan dengan minat wisatawan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pertanian di Kota Semarang pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif secara keseluruhan, meskipun perkembangan antar subsektor masih bervariasi. Total produksi gabungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan mencapai 92.110,54 ton, meningkat 1,60% dibandingkan tahun 2023 sebesar 90.659,06 ton, serta menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Namun demikian, tidak semua subsektor mengalami pertumbuhan. Subsektor tanaman pangan justru mencatat penurunan signifikan sepanjang tahun 2020–2024. Produksinya menurun dari 34.376,31 ton pada tahun 2020 menjadi 22.788,80 ton pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam akibat alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, seperti yang terjadi di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, dengan rencana alih fungsi seluas 75 ha, serta di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang yang berubah menjadi kawasan kavling perumahan. Selain itu, lahan sawah di kawasan pesisir juga terdampak rob dan mengalami pertumbuhan mangrove seluas 30 ha, sehingga tidak dapat kembali digunakan sebagai sawah akibat keterbatasan biaya dan pengelolaan.

Berbeda dengan tanaman pangan, subsektor hortikultura menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Setelah sempat menurun menjadi 20.965,15 ton pada 2023, produksinya meningkat tajam menjadi 27.415,98 ton pada 2024 atau naik 30,76%. Peningkatan ini didorong oleh diversifikasi komoditas serta optimalisasi pemanfaatan lahan non-sawah yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Sementara itu, subsektor perkebunan memberikan kontribusi yang relatif kecil, tetapi tetap menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Produksinya naik dari 273,40 ton pada tahun 2020 menjadi 314,40 ton pada tahun 2024, mencerminkan pemeliharaan dan pengembangan komoditas yang konsisten oleh para pelaku usaha.

Jika digabungkan, total produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada tahun 2024 mencapai 50.519,18 ton, menurun dibandingkan 52.512,85 ton pada 2023 dan belum mencapai target sebesar 50.857,23 ton. Penurunan total ini sebagian besar disebabkan oleh merosotnya produksi tanaman pangan yang tidak mampu diimbangi oleh kenaikan hortikultura dan perkebunan.

Secara keseluruhan, data tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian Kota Semarang masih tumbuh positif, ditopang oleh performa hortikultura dan perkebunan, namun tetap menghadapi tantangan besar terutama pada komoditas tanaman pangan akibat alih fungsi lahan dan dampak rob di kawasan pesisir. Upaya peningkatan adaptasi lahan, perlindungan sawah berkelanjutan, dan penguatan ketahanan pangan menjadi penting untuk menjaga stabilitas produksi di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, subsektor peternakan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan total produksi pertanian Kota Semarang pada 2024. Produksi hasil peternakan meningkat dari 38.104,59 ton pada 2023 menjadi 41.535,94 ton pada 2024 atau naik 9,02%, melampaui target tahunan sebesar 36.219 ton. Peningkatan ini didukung oleh pengadaan benih dan bibit ternak dari daerah lain, peningkatan mutu genetik ternak, serta ketersediaan bahan pakan yang lebih optimal. Pada komoditas ruminansia, perbaikan distribusi pakan dan peningkatan kualitas genetik menghasilkan kenaikan produktivitas daging dan susu.

Keberhasilan subsektor peternakan juga tercermin dari capaian pengendalian penyakit hewan. Setelah pada tahun 2023 Kota Semarang masih

terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penyakit hewan lainnya, pada tahun 2024 jumlah kasus berhasil ditekan hingga -55,32%. Penurunan signifikan ini berdampak langsung pada kesehatan dan produktivitas ternak sapi, kambing, dan domba, terutama dalam konteks pengendalian PMK dan Lumpy Skin Disease (LSD). Keberhasilan ini tidak lepas dari peningkatan cakupan vaksinasi, pengawasan lalu lintas ternak, serta manajemen kesehatan hewan yang lebih baik.

Selain peningkatan produksi, Dinas Pertanian Kota Semarang juga meraih dua penghargaan tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 2024, yaitu Pembinaan Higiene Sanitasi menuju Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Terbaik, serta Kabupaten/Kota yang Menjalinkan Kerja Sama dengan BBPTT dalam Upaya Pengembangan Sektor Peternakan. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dalam memberikan rekomendasi NKV terbanyak serta pembelian bibit kelinci terbanyak di Jawa Tengah untuk mendukung pengembangan sentra ternak.

Secara umum, meskipun subsektor tanaman pangan mengalami penurunan yang cukup signifikan, pertumbuhan yang kuat pada subsektor hortikultura, perkebunan dan peternakan mampu menjaga tren positif kinerja pertanian dan peternakan Kota Semarang sepanjang 2020–2024. Hal ini tercermin dari tabel sebagai berikut.

Tabel 2.66 Hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	ton	86.525,11	87.028,62	96.657,56	90.659,06	92.110,54
Tanaman Pangan	ton	34.376,31	34.417,30	32.237,84	31.269,84	22.788,80
Hortikultura	ton	16.734,20	18.849,01	25.545,87	20.965,15	27.415,98
Perkebunan	ton	273,40	267,00	282,17	277,86	314,40
Peternakan	ton	35.141,20	33.495,31	38.591,68	38.104,59	41.535,94
Daging	ton	22.877,04	22.226,63	27.345,62	30.831,78	32.173,89
Telur	ton	8.506,71	3.269,11	8.111,46	5.930,24	7.976,85
Susu	ton	3.757,45	7.999,57	3.134,60	1.384,19	1.440,62

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Data populasi ternak di Kota Semarang pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antara subsektor ruminansia dan unggas. Pada kelompok ruminansia, populasi sapi perah cenderung menurun signifikan, dari 2.072 ekor pada 2020 menjadi hanya 754 ekor pada 2024, yang kemungkinan disebabkan oleh tingginya biaya pemeliharaan dan terbatasnya pasar lokal susu segar. Sapi potong mengalami fluktuasi, sempat turun di 2022, lalu naik di 2023, namun sedikit menurun kembali menjadi 3.427 ekor di 2024. Populasi kerbau relatif kecil dan stabil pada kisaran 265–967 ekor, dengan sedikit peningkatan menjadi 309 ekor pada 2024. Sebaliknya, kambing mengalami pertumbuhan signifikan, dari 7.800 ekor pada 2020 menjadi 10.150 ekor pada 2024, menunjukkan tingginya permintaan dan kemudahan pemeliharaan. Populasi domba relatif stabil, naik dari 3.116 ekor (2020) menjadi 3.143 ekor (2024).

Pada kelompok unggas, populasi ayam ras petelur meningkat dari 791.298 ekor (2020) menjadi puncaknya 864.200 ekor di 2023, sebelum turun sedikit

menjadi 854.486 ekor pada 2024. Ayam ras pedaging terus menunjukkan tren positif, dari 794.023 ekor (2020) menjadi 898.263 ekor (2024), mencerminkan tingginya permintaan daging ayam. Ayam buras mengalami penurunan di 2023 namun kembali naik menjadi 99.329 ekor di 2024. Itik mengalami pertumbuhan signifikan dari 23.773 ekor (2020) menjadi 32.457 ekor (2024). Sementara itu, populasi entog cenderung menurun dari 5.887 ekor (2020) menjadi 4.022 ekor (2024).

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa subsektor unggas, khususnya ayam ras pedaging dan petelur, menjadi tulang punggung populasi ternak Kota Semarang. Pada ruminansia, kambing menjadi komoditas yang populasinya tumbuh pesat, sedangkan sapi perah justru menghadapi tren penurunan yang signifikan. Hal ini tercermin pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.67 Populasi ternak di Kota Semarang pada periode 2020–2024

JENIS TERNAK	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A. RUMINANSIA						
Sapi Perah	ekor	2.072	2.311	1.633	1.751	754
Sapi Potong	ekor	4.039	4.300	3.104	3.507	3.427
Kerbau	ekor	967	927	265	305	309
Kambing	ekor	7.800	8.200	7.214	7.735	10.150
Domba	ekor	3.116	3.258	2.894	2.869	3.143
B. UNGGAS						
Ayam Ras Petelur	ekor	791.298	764.465	806.854	864.200	854.486
Ayam Ras Pedaging	ekor	794.023	784.119	815.474	876.000	898.263
Ayam Buras	ekor	112.750	110.557	98.209	95.885	99.392
Itik	ekor	23.773	23.934	25.692	26.302	32.457
Entog	ekor	5.887	5.682	5.583	5.108	4.022

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Berikut disajikan secara lebih rinci kinerja terkait penyelenggaraan urusan pertanian tahun 2020-2024.

Tabel 2.68 Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang)	10.285	9.902	10.108	10.186	10.381
2	Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok)	24	24	27	21	21
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (kelurahan)	91	104	124	177 kelurahan	177 kelurahan
4	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	35.045	33.254,34	39.690,27	38.104,59	41.535,94
5	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ton)	51.379	53.527,47	58.065,88	52.512,85	50.519,18
6	Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (Sertifikat NKV)	19	22	29	15	15
7	Produktivitas pertanian pangan utama (padi dan jagung) per hektar per tahun	6,38 ton/ha/ tahun	6,38 ton/ha/ tahun	6,96 ton/ha/ tahun	6,85 ton/ha/ tahun	6,82 ton/ha/ tahun
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-44,44%	-44,49%	7108%	-88,21%	-55,32%
9	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan – komoditas)	3 Kawasan	4 Kawasan	4 kawasan	5 kawasan	6 kawasan

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk indikator yang bernilai negatif dari yang seharusnya positif, berdasarkan Tabel 2.68 diketahui pula bahwa terjadi penurunan jumlah kelompok tani binaan dari sebelumnya 27 kelompok menjadi 21 kelompok. Penurunan ini bukan disebabkan melemahnya minat petani, melainkan hasil dari evaluasi keaktifan kelompok tani yang dilakukan oleh dinas terkait. Melalui evaluasi tersebut, kelompok tani yang dinilai tidak aktif dipisahkan dalam kelas tersendiri agar pembinaannya dapat lebih terarah. Dengan demikian, fokus pendampingan dialihkan kepada kelompok tani yang benar-benar aktif dan produktif, sehingga jumlah kelompok binaan yang tercatat mengalami pengurangan.

Selain itu, jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (Sertifikat NKV) juga mengalami penurunan cukup signifikan, dari 29 menjadi 15 sertifikat. Penurunan ini terjadi karena proses verifikasi dan penjaminan dilakukan lebih ketat untuk memastikan hanya pelaku usaha yang memenuhi standar higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan yang dapat memperoleh sertifikasi. Meskipun jumlahnya menurun, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas usaha peternakan serta menjamin keamanan produk hewan yang beredar di Kota Semarang.

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pilihan Pertanian antara lain Wabah Zoonosis seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease (LSD)* dan *Avian Influenza* yang masih menjadi ancaman di tahun 2024. Wabah yang ada menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para peternak karena menurunkan produksi dan produktivitas ternak bahkan juga menyebabkan kematian ternak sehingga menurunkan pendapatan peternak. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang masih terus terjadi menyebabkan keterbatasan lahan untuk produksi sehingga produksi tanaman pangan menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, kualitas kelembagaan petani yang masih rendah di mana dari 432 kelompok tani yang ada hanya 31 kelompok (7,17%) yang kualitasnya tinggi (berada pada kelas madya dan utama). Selain itu tingkat partisipasi anggota kelompok tani juga relatif sangat rendah dimana pada sebagian besar kelompok tani hanya beberapa anggota saja yang berperan aktif.

Ditinjau berdasarkan jenis penggunaannya, lahan di wilayah Kota Semarang dibagi atas lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2024 luas tanah sawah sebesar 2.195,26 Ha, sedangkan lahan pertanian bukan sawah sebesar 14.576,79 Ha dan lahan bukan pertanian sebesar 20.605,95 Ha. Lahan pertanian sawah umumnya ditanami padi dan palawija, sedang lahan pertanian bukan sawah ditanami tanaman buah-buahan, kayu-kayuan dan sayuran. Sebagai daerah urban, Kota Semarang kegiatan ekonominya terutama bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa. Sementara sektor pertanian walaupun kecil kontribusinya, namun potensinya masih ada terutama di Kecamatan Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Tugu, Tembalang, Pedurungan, Genuk, dan Banyumanik. Sedangkan di daerah perkotaan pertaniannya diarahkan pada pengembangan *urban farming*. Penanaman difokuskan pada komoditas yang berbasis pertanian perkotaan seperti cabai, tomat, terong, dan bawang. Walaupun lahan pertanian sawah

berkurang, namun lahan pertanian bukan sawah berjumlah 14.576,95 ha tetap dapat dioptimalkan untuk penanaman komoditas pertanian perkotaan.

Tabel 2.69 Jumlah Luas Panen dan Produksi Komoditas Padi di Kota Semarang Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	PRODUKTIVITAS (TON/HA)
1	Mijen	583,00	4.045,80	6,94
2	Gunungpati	515,50	3.333,25	6,47
3	Banyumanik	57,00	377,20	6,62
4	Tembalang	369,00	2.641,90	7,16
5	Pedurungan	78,00	487,20	6,25
6	Genuk	26,00	156,50	6,02
7	Semarang Barat	88,00	511,30	5,81
8	Tugu	625,00	4.335,70	6,94
9	Ngaliyan	311,00	2.188,50	7,04
10	Semarang Utara	-	-	-
11	Semarang Selatan	-	-	-
12	Semarang Tengah	-	-	-
13	Semarang Timur	-	-	-
14	Gajahmungkur	-	-	-
15	Candisari	-	-	-
16	Gayamsari	-	-	-
Total		2.652,50	18.077,35	59,23

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan dapat ditunjukkan diantaranya dengan prestasi mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan. Sebanyak 13 dari 52 pasar di Kota Semarang mendapat penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan. Selain itu, Pasar Johar mendapat penghargaan sebagai lokasi program pasar pangan segar aman dengan *rapid response* keamanan pangan terbaik dari Badan Pangan Nasional.

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Nilai ekspor Kota Semarang dari tahun ke tahun berfluktuasi. Nilai ekspor Kota Semarang mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 1.322.895.045,28 US\$ setelah mengalami peningkatan di tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini disebabkan Pada tahun 2024 bahan baku dari beberapa komoditi meningkat sehingga menyebabkan beberapa komoditi mengalami kenaikan harga dan penurunan volume ekspor; terdapat beberapa komoditi yang tidak mengekspor secara masif seperti pada waktu pandemi (APD dan Masker) sehingga beberapa komoditi tidak melakukan ekspor secara besar-besaran; serta para pemula ekspor banyak yang mengalami kesulitan ketika ingin melakukan ekspor dikarenakan ada kesulitan dalam melakukan registrasi awal.

Permasalahan yang terjadi di tahun 2023 yaitu Perkembangan teknologi dan permintaan pasar membuat alat-alat ukur digital dari luar berkembang sangat pesat sehingga menggusur penggunaan alat-alat ukur produksi dalam negeri (timbangan mekanik); berkurangnya potensi UTTP (meter taksi) yang saat

ini tergantikan dengan transaksi berdasarkan aplikasi (online); serta kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran di beberapa kota terdapat kendala kurangnya jumlah pengunjung disebabkan beberapa faktor diantaranya cuaca hujan dan bersamaan dengan pameran sejenis di lokasi lain. Berikut disajikan capaian kinerja indikator penyelenggaraan urusan perdagangan tahun 2020-2024.

Tabel 2.70 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	66,29%	72,96%	67,32%	76,00%	84,97%
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	83,33%	86,67%	118,75%	96,26%	105,17%
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	79,87%	NA	84	90,00%	90,00%
5	Nilai Ekspor kota Semarang	3.084.439.326,82 US\$	1.117.549.543,14 US\$	1.242.337.131 US\$	2.130.728.974,61 US\$	1.322.895.045,28 US\$

Sumber: Dinas Perdagangan, 2024

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian dinilai baik dengan diraihnya penghargaan Terbaik 1 kategori Kabupaten/Kota Bidang Industri Kreatif Digital Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Selasa, 29 Oktober 2024 di Museum Ronggowarsito Kota Semarang.

Pertambahan jumlah sentra IKM meningkat menjadi 24 sentra di tahun 2024. Dengan capaian ini diharapkan meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah. Dan Optimalisasi Sentra IKM. Memperluas jaringan pemasaran/penjualan produk IKM sehingga bisa dikenal dan bersaing baik ditingkat lokal maupun nasional. Hal ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan pelaku IKM yang pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat.

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2,64% lebih tinggi dari capaian pada tahun 2023 yang sebesar 0,98%. Selain itu, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan di tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 15,61% lebih tinggi dari capaian pada tahun 2023 yang sebesar 11,77%.

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan kinerja urusan perindustrian selama tahun 2024 yaitu pelaku IKM belum sepenuhnya memiliki keterampilan teknik produksi dan manajemen yang baik, pelaku IKM yang masih kesulitan dalam pemasaran produknya, adanya pelaku IKM yang belum peduli untuk mendapatkan legalitas usaha dan standarisasi produk dalam menjalankan usahanya, serta pelaku industri belum sepenuhnya memberikan data yang memadai terkait usahanya. Berikut disajikan data capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perindustrian tahun 2020-2024.

Tabel 2.71 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	28,62	28,75	28,87	28,78	28,78
2	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.805	2.840	2.885	3.719	3.817
3	Berkembangnya industri kreatif dan industri kecil	3.515	3.557	3.599	3.625	3.723
4	Jumlah kluster industri	10	10	10	10	10
5	Pengembangan kawasan sentra- sentra industri potensial	20 sentra	20 sentra	21 sentra	22 sentra	24 sentra
6	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,48%	1,42%	1,23%	0,98%	2,64%
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50%	50%	50%	50%	50%
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	0%	3,95%	11,87%	11,77%	15,61%
9	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	0	0	1	1	1
10	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0%	0%	12,50%	11,11%	25%
Indikator SDGs						
11	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	28,62	28,75	28,87	28,78	28,78

Sumber: Dinas Perindustrian, 2024

2.1.3.4. Unsur Pendukung

a. Sekretariat Daerah

Kinerja Unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diantaranya dapat ditunjukkan dengan penghargaan dan prestasi yang diterima Kota Semarang selama tahun 2024, diantaranya : Predikat BB (Sangat Baik) SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,12 lebih tinggi dari tahun 2023 yang sebesar 71,32. Hal ini menunjukkan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Pada tahun 2024 terdapat kinerja yang pencapaiannya melebihi target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,59 dari target yang ditetapkan sebesar 88,35 namun lebih rendah dari realisasi IKM tahun 2023 yang sebesar 90,72. Pemerintah Kota Semarang terus mengupayakan untuk selalu menjaga dan senantiasa meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat.

Kinerja pada bidang Penyusunan Produk Hukum Daerah pada tahun 2024 menghasilkan sebanyak 11 Peraturan Daerah Kota Semarang yang merupakan inisiatif Eksekutif, 66 Peraturan Walikota Semarang, dan 497 Keputusan Wali Kota Semarang. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penyediaan dan penyusunan Produk Hukum Daerah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah yaitu jumlah Raperda yang disetujui DPRD belum sesuai target dikarenakan pembahasan raperda tergantung keaktifan perangkat daerah pengusul dan Regulasi yang selalu berubah dari pemerintah pusat pada tahun berjalan. Berikut disajikan data realisasi kinerja penyelenggaraan unsur pendukung sekretariat daerah tahun 2020-2024.

Tabel 2.72 Realisasi Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP)	Predikat	B 68,52	B 69,44	BB 70,35	BB 71,32	BB 73,12
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,68	87,35	88,63	90,72	90,59
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69,78	71,03	72,68	84,14	89,21
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,44/ST	3,44/ST	3,43/ST	3,53/ST	3,296/ST
5	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	100	100
6	Jumlah Produk Hukum:						
	- Peraturan Daerah - Peraturan Wali Kota - Keputusan Wali Kota	Perda, Perwal, SK Wali kota	5 94 426	13 124 533	8 77 620	10 80 619	11 66 497
7	Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan	Kasus	28	23	28	51	92
8	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	Raperda	5 (dari target 16 Raperda)	13 (dari target 10 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

b. Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, kinerja DPRD diantaranya ditunjukkan dengan belum tercapainya pemenuhan target penetapan dari 16 Perda yang direncanakan pada tahun 2024. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini konsisten dari tahun sebelumnya. Meskipun belum mencapai target yang diharapkan, angka ini mencerminkan adanya upaya dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD, sekaligus menjadi evaluasi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang. Faktor-faktor yang memengaruhi capaian ini mencakup kualitas perencanaan, proses pembahasan, hingga koordinasi antar pihak terkait, yang dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kinerja lain terkait nomenklatur program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran DPRD telah termuat dalam RPJMD maupun RKPD di tahun 2024 sebesar 100%, sesuai nomenklatur Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tugas pokok dan fungsi DPRD untuk memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meraih beberapa penghargaan seperti peringkat terbaik ke 2 nasional dalam

penghargaan Anggota JDIHN Tahun 2024 dan penghargaan terbaik ke 2 dalam lomba JDIH Tingkat Jawa Tengah Tahun 2024. Berikut disajikan data kinerja penyelenggaraan unsur pendukung sekretariat DPRD tahun 2020-2024.

Tabel 2.73 Kinerja Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	5 (dari target 16 Raperda)	12 (dari target 14 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)

Sumber: Sekretariat DPRD, 2024

2.1.3.5. Unsur Penunjang

a. Perencanaan

Kinerja pada unsur penunjang Perencanaan dapat ditunjukkan diantaranya dengan diraihnya penghargaan, diantaranya: Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik 1 *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tahun 2024 dari BKKBN Republik Indonesia diserahkan 26 Juni 2024 di Kota Semarang; 5 Besar Kota pada *I-SIM For Cities* 2024 dari APEKSI dan PT. Surveyor Indonesia diserahkan 19 September 2024 di DKI Jakarta; Terbaik I Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah diserahkan 13 November 2024 di Bappeda Provinsi Jawa Tengah; Peringkat 2 Kategori Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng dalam rangka Gerakan Hemat Energi dan Air Tingkat Jawa Tengah pada *Earth Day* 2024 Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah diserahkan 22 April 2024 di Taman Syailendra Dieng Kabupaten Wonosobo; dan Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur pada *UI Green Metric* Ranking Tahun 2024 dari Universitas Indonesia diserahkan 8 Agustus 2024 di Universitas Indonesia.

Kinerja lain yang merupakan lintas sektor koordinasi ditandai dengan terbitnya regulasi terkait Dokumen Perencanaan Tahunan (Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Capaian kinerja pada Urusan Penunjang Perencanaan pada tahun 2023 diukur dari Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan 100%, dan Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan 100%. Capaian ini cenderung konsisten dari tahun sebelumnya.

Beberapa dukungan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja perencanaan tersebut diantaranya: Pelaksanaan Konsultasi Publik, Forum Lintas OPD, Musrenbang Kota, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian dan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Berikut disajikan data kinerja penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan tahun 2020-2024.

Tabel 2.74 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu	2	2	2	2	2
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	94,16	100	100	100	99,38
3	Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	75,70	79,44	81,50	82,30	83,99
4	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	2	2	2	2	2
5	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda, 2024

Dalam penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Terkait pengelolaan Satu Data, permasalahan yang dihadapi antara lain :
 - a. Pengelolaan Data Spasial dan Geoportal masih belum optimal dalam sistem Satu Data Kota Semarang;
 - b. Masih kurangnya kesadaran Produsen Data/Perangkat Daerah dalam mengelola data yang dihasilkan (menyimpan, mengamankan, mendokumentasikan, sampai mempublikasikan).
2. Belum terdapat petunjuk yang lengkap dan detail terkait pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Forum Kesehatan Kelurahan dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kecamatan/ Kelurahan.
3. Penanggulangan kemiskinan menghadapi tantangan, dimana Rilis angka kemiskinan ekstrem Kota Semarang tahun 2024 (BPS) adalah sebesar 0,31%. Dengan demikian dibutuhkan upaya serius dalam menurunkan kemiskinan, khususnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Dalam Pelaporan Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) terdapat beberapa data dukung yang perlu dikonfirmasi dan didiskusikan lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada Urusan Penunjang Perencanaan di tahun anggaran 2024 sebagaimana tersebut di atas, solusi pemecahan dan rencana tindak lanjutnya diantaranya yaitu :

1. Terkait permasalahan dalam pengelolaan Satu Data, rencana tindak lanjutnya antara lain :

- a. Sedang disusun regulasi tentang Penyelenggaraan Informasi dan Infastruktur Geospasial Kota Semarang yang diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan data Spasial di Kota Semarang;
 - b. Adanya alokasi anggaran pada Sub Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah (5.01.01.2.01.0008) yang baru ada di tahun 2025 diharapkan mampu meningkatkan kesadaran Produsen Data/Perangkat Daerah dalam mengelola data yang dihasilkan.
2. Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terkait anggaran Lembaga Kemasyarakatan di Kota Semarang, telah disusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/586/400.2.1/II/2024 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Kesehatan Kelurahan, dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kecamatan/Kelurahan Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran tersebut telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 26 Februari 2024. Selanjutnya sebagai upaya pemantauan, optimalisasi, dan akselerasi efektivitas kinerja Lembaga Kemasyarakatan terhadap dampak sosial ekonomi dan kepuasan masyarakat, pada tahun 2025 akan disusun Kajian Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan. Rekomendasi dan hasil evaluasi yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan perencanaan dan penganggaran kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.
 3. Terkait kemiskinan, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dari Pemerintah Kota Semarang. Pada tahun 2024, angka kemiskinan Kota Semarang adalah sebesar 4,03% (BPS) dan ditargetkan terus menurun hingga 3,09% - 3,31% di tahun 2029. Masih terkait kemiskinan, rilis angka kemiskinan ekstrem Kota Semarang tahun 2024 (BPS) adalah sebesar 0,31%. Dalam upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan *By Name By Address*, disertai identifikasi kebutuhan akan program intervensi. Data tersebut setelah ditetapkan akan menjadi data calon penerima manfaat dari program intervensi penanggulangan kemiskinan OPD pengampu, meliputi:
 - 1) Fasilitasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Bantuan Permakanan;
 - 3) Jaminan Kesehatan;
 - 4) Penanganan Stunting dan Gizi Buruk;
 - 5) Alat Bantu Penyandang Disabilitas;
 - 6) Layanan Pendidikan;
 - 7) Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
 - 8) Sumber Air Bersih;
 - 9) Sanitasi Permukiman;
 - 10) Layanan Ketenagakerjaan;
 - 11) Pengembangan UMKM;
 - 12) Layanan Keluarga Berencana;
 - 13) Pengembangan Pertanian/Peternakan/Perikanan.

Selain hal tersebut, beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang antara lain:

- 1) Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota;
 - 2) Pembaharuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota. Pembaharuan ini dilakukan karena telah terisi jabatan Wakil Wali Kota Semarang (dimana menurut Permendagri 53 Tahun 2020 diamanatkan Ketua TKPKD secara *ex officio* adalah Wakil Kepala Daerah).
4. Terkait Pelaporan Aksi HAM, pelaporan diharapkan tidak hanya terpenuhi secara kuantitas namun juga secara kualitas. Karena itu telah dilakukan langkah progresif dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dilanjutkan dengan *Desk* Pendampingan penginputan data pada Aplikasi SAPA HAM yang dilaksanakan berkala setiap caturwulan.
- Dalam Rakor dan *Desk* disampaikan terkait materi, petunjuk pengisian, sekapaligus asistensi bagi Perangkat Daerah dalam melakukan pengisian data. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 3 kegiatan Rakor dan *Desk* sebagai berikut :
- 1) Pelaporan Aksi HAM B.04 pada tanggal 3 dan 25 April 2024;
 - 2) Pelaporan Aksi HAM B.08 pada tanggal 22 Juli dan 15 Agustus 2024;
 - 3) Pelaporan Aksi HAM B.12 pada tanggal 12 dan 21 November 2024.

b. Keuangan

Kinerja pada unsur penunjang keuangan dapat ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kota Semarang meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2024 Kota Semarang menjadi pilot project dalam penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang pengukurannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan supervisi dari Kementerian Dalam Negeri dan memperoleh kategori Sangat Baik. Pada Tahun 2024 Kota Semarang telah melaksanakan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang pengukurannya dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dan memperoleh nilai A dengan predikat Baik. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik yang selanjutnya disebut TP2DD Terbaik Tingkat Kota Jawa-Bali TP2DD dimana Kota Semarang meraih Terbaik I. Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik Tahun 2024 dimana Kota Semarang meraih Terbaik I dengan Program Gerakan Transaksi Elektronik Kota Semarang (GESIT). Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, penyusunan APBD, serta Realisasi Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir maka pada tanggal 7 Juni 2024 Kepala Daerah telah mengirimkan Surat Permohonan Pembahasan untuk mendapat

Persetujuan Bersama DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Ketepatan waktu penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Telah dilakukan pembahasan bersama dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Semarang sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 tanggal 20 Desember 2024.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan per 7 Februari 2025, Belanja Daerah Kota Semarang tahun 2024 tercatat mencapai 92,37% mengalami penurunan dari 2023 sebesar 93,05%. Hal tersebut dapat dicapai atas kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang, DPRD Kota Semarang dan Masyarakat yang terus memberikan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2024 Aset Kota Semarang yang telah dikelola sebesar Rp21.315.424.332.709. Nilai aset yang belum dikelola sebesar Rp241.388.475.079 antara lain tuntutan ganti kerugian, aset lain-lain, dan aset yang dikuasai namun belum ditentukan penggunaannya. Sehingga diperoleh nilai aset yang dikelola mencapai 98,88%. Pemanfaatan aset Pemerintah Kota Semarang yang optimal dapat menambah pendapatan asli daerah sehingga program prioritas di Kota Semarang dapat terlaksana.

Tabel 2.75 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	46,01%	49,47%	51,23%	52,96%	52,77%
2	Persentase Silpa Terhadap APBD	1,65%	6,50%	5,17%	6,02%	5,01%
3	Persentase pengelolaan keuangan daerah	98,11%	96,42%	97,79%	97,88%	97,46%
4	Persentase nilai aset yang dikelola	NA	89,51%	98,55%	98,54%	98,88%

Sumber: Tahun 2024 LRA dan Neraca Unaudited BPK masih dalam proses pemeriksaan BPK

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer yang ditargetkan 100% mencapai 100,54%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 98,65%. Peningkatan realisasi pendapatan dana transfer dikarenakan salur Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 100% sesuai dengan kondisi perekonomian nasional yang semakin membaik dan pelaporan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) setiap semester oleh Pemerintah Kota Semarang semakin tertib.

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan sebesar 55,15% sedangkan rasio pendapatan transfer sebesar 44,85% terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan Kota Semarang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pendapatan transfer digunakan untuk belanja dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

c. Kepegawaian

Kinerja pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian dapat ditunjukkan salah satunya dengan diraihnya Penghargaan Bangkom Jateng Award Tahun 2024 dengan tema “Transformasi Organisasi Pembelajaran melalui Jawa Tengah Corporate University (Jateng Corpu)” dengan peringkat III tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Penghargaan BKN RI atas penerapan Sistem Merit tahun 2024 dengan nilai 312 dengan Predikat “Baik”.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Kota Semarang pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BKN menyebutkan bahwa nilai IP ASN adalah sebesar 85,99, indeks ini meningkat dibandingkan realisasi di tahun 2023 yang sebesar 85,99. Selain itu, Indeks Sistem Merit juga mengalami peningkatan sebesar 0,05 menjadi 0,78 di tahun 2024. Begitu pula dengan Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian di tahun 2024 sebesar 92,13 meningkat sebesar 1,02 dari tahun 2023.

Beberapa isu terkait pembinaan kepegawaian dapat dilihat dari belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam unsur penunjang kepegawaian terutama dalam assesment pegawai untuk pemetaan kompetensi, belum optimalnya pengintegrasian database kepegawaian di daerah dengan database kepegawaian pusat, dan masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki.

Tabel 2.76 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	82,28	83,84	83,84	85,40	85,99
2	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian	NA	91,79	91,88	91,11	92,13
3	Indeks Sistem Merit	NA	0,44	0,66	0,73	0,78
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	39,44%	65,41%	100%

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2024

d. Pendidikan dan Pelatihan

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan jumlah yang lulus sebesar 37 orang, meningkat dari tahun 2022 yang hanya 5 orang yang lulus. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 711 orang menjadi sebesar 1.514 orang di tahun 2024. Permasalahan dalam penyelenggaraan unsur penunjang pendidikan dan pelatihan yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi yang maksimal dalam pelaksanaan diklat serta sarana prasarana yang kurang terkadang mengalami kendala.

Tabel 2.77 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan	74 Orang	60 Orang	5 Orang	37 Orang	97,77

NO	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	dan pelatihan struktural	(Lulus 100%)	(Lulus 100%)	(Lulus 100%)	(Lulus 100%)	
2	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	397 Orang	397 Orang	404 Orang	711 Orang	1514 Orang
3	Rasio pegawai Fungsional (%)*	5,60%	16,15%	18,68%	43,27%	35,95%
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)*	100%	100%	39,44%	65,41%	100%
5	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	85%	85%	21%	24%	34,21%

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat, 2024

e. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pada unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan diantaranya ditunjukkan Kota Semarang meraih penilaian dan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap semangat dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan cara-cara inovatif.

Indeks Inovasi Daerah menunjukkan capaian penyelenggaraan inovasi di daerah. Pada tahun 2024 indeks inovasi daerah Kota Semarang mencapai 67,92 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 65,80 dan secara predikat Kota Semarang termasuk dalam kategori Inovatif. Secara struktur, Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel, dan 36 indikator. Jika dilihat dari cakupan perangkat daerah yang mendapatkan fasilitasi melaksanakan inovasi daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif, dan pada tahun 2024 mencapai 100% atau sebanyak 52 OPD secara keseluruhan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan yaitu belum disusunnya payung hukum inovasi daerah yang terintegrasi serta belum lengkapnya dokumen pedoman teknis dan SOP inovasi OPD.

Tabel 2.78 Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	21,57%	35,29%	47,06%	64,71%	100%
3	Indeks Inovasi Daerah	1.423 (DO lama)	57,49	60,79	65,80	67,92

Sumber: BRIDA, 2024

Jumlah kajian yang dilakukan pada tahun 2024 sebanyak 18 kajian, mengalami penurunan dari tahun 2023 sebanyak 21 kajian. Daftar kajian tahun 2024 tersebut adalah:

1. Sistem Informasi Rantai Pasok Pangan Dalam Mendukung Kota Semarang Mandiri Pangan;

2. Strategi Pengembangan Mijen Sebagai Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (Peningkatan Kinerja Dan Pembelajaran Budidaya Ikan Air Tawar Di Bbi Mijen, Pemkot Semarang);
3. Riset Strategi Inovatif Pengembangan Kampung Sawah Kawasan Mijen Yang Terintegrasi Dan Beriset Strategi Inovatif Pengembangan Kampung Sawah Kawasan Mijen Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan;
4. Kajian Identifikasi Pekerja Rentan Di Kota Semarang Dalam Upaya Perlindungan Ketenagakerjaan;
5. Kajian Potensi Pengembangan Ekosistem Iptek Kota Semarang;
6. Kajian Pengaruh Penggunaan Lahan Permukiman Terhadap Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang;
7. Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Riset Dan Inovasi Kota Semarang;
8. Analisis Faktor Risiko Dan Peta Sebaran Tb-Hiv Di Kota Semarang;
9. Warak Ngendok Sebagai Ikon Identitas Kota Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Untuk Pengembangan Perekonomian Daerah;
10. Kajian Pengelolaan Parkir On The Street Dan Off Street Di Kota Semarang;
11. Kajian Kecukupan Bangunan Air Dalam Upaya Pengendalian Banjir Kota Semarang;
12. Kajian Penyusunan Proses Bisnis Brista Kota Semarang;
13. Kajian Peningkatan Aksesibilitas Informasi Website Di Kota Semarang Melalui Integrasi Desain, Keamanan, Copywriting Dan Search Engine Optimization;
14. Strategi Penguatan Satu Data Terpadu Untuk Pengambilan Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien Di Pemerintah Kota Semarang;
15. Kajian Implementasi Teknologi Metaverse Dalam Peningkatan Pengelolaan Layanan Publik Di Kota Semarang;
16. Keberlanjutan Inovasi Pemerintah Daerah Kota Semarang: Studi Kasus Keberhasilan Dan Kegagalan Inovasi Dalam 5 Tahun Terakhir 2019-2024;
17. Kajian Preferensi Pengembangan Pasar Tradisional Di Kota Semarang;
18. Kajian Penyediaan Kendaraan Dinas pada Pemerintah Kota Semarang Melalui Sistem Sewa.

2.1.3.6. Unsur Pengawas

a. Inspektorat Daerah

Kinerja Inspektorat Daerah dapat terlihat dari diperolehnya Peringkat pertama Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2024 dari KPK RI dengan nilai 91,62 Kategori Pemerintah Kota.

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Semarang sebesar 3,158 (Terdefinisi) yang artinya Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan

praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Pemerintah Kota Semarang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Semarang telah memperoleh WTP selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut sejak Tahun 2016.

Selanjutnya sebagai upaya mewujudkan Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Pemerintah Kota Semarang melalui Inspektorat Kota Semarang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 telah melakukan pengawasan internal.

Tingkat kapabilitas pengawasan intern seringkali terkait dengan struktur tata kelola organisasi. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik kapabilitasnya APIP. Capaian kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2023 telah sepenuhnya berada pada level 3 (integrated).

Berdasarkan laporan BPKP Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah terkait penetapan hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 Indeks Penerapan Manajemen Risiko memenuhi kriteria pada tingkat “*Repeatable*” atau level 2 dengan skor sebesar 2,991. Adapun target yang diharapkan adalah dapat mencapai level 3 pada tahun 2025.

Hambatan atau permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam Urusan Pengawasan yaitu semakin kompleksnya penugasan pengawasan di Inspektorat Kota Semarang baik yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun penugasan mandatory menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan penugasan.

Tabel 2.79 Realisasi Kinerja Unsur Pengawas Inspektorat Daerah
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	1,57	2,025	2,82	2,86	2,991
3	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	3	2,639	3,012	3,086	3,158
4	Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
5	Nilai Survey penilaian Integritas (SPI)	NA	78,21	74,1	74,8	71,6

Sumber: Inspektorat, 2024

2.1.3.8. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

Sebagai unsur Kewilayahan, 16 Kecamatan di Kota Semarang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Secara umum kinerja kecamatan dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dimana pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98,30%, sedangkan kinerja dalam fungsi pemerintahan dan pelayanan publik diukur dengan persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) yang realisasinya sebesar 95,89%, pada fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Umum diukur dari persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat pelanggaran perda di kewilayahan sebesar 21,01%, sedangkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diukur dari Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang terealisasi sebesar 91,31%.

Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan adalah: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE); Persentase Tingkat partisipasi masyarakat; Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan Wawasan Kebangsaan ditingkat kewilayahan; dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif. Dimana keempat indikator tersebut mempunyai capaian positif pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di wilayahnya.

Disisi lain perangkat daerah kecamatan selalu memberikan dukungan terhadap kebijakan strategis (lintas sektor) Pemerintah Daerah di wilayahnya, seperti halnya keberlanjutan Program Urban Farming, Percepatan Penanganan Stunting, Penanganan Kemiskinan, Operasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Bencana.

Prestasi yang diperoleh pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Kewilayahan tahun 2024 adalah:

1. Juara III Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Di Regional II Tahun 2024;
2. Bina Keluarga Balita Harapan Bangsa Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati mendapat juara terbaik 1 Kelompok Bina Keluarga Balita Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah;
3. Juara 1 Tingkat Nasional Lomba Program Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana Kebakaran Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat;
4. Juara III Lomba Pokdarwis Tk. Propinsi Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur;

5. Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu tahun 2024 adalah meraih penghargaan Proklamasi Lestari di tingkat nasional. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Adapun capaian pada tahun 2024 secara rata-rata dari 16 kecamatan sesuai dari indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.80 Realisasi Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	82,17%	87,50%	90,11%	95,80%	95,90%
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	NA	82,50%	84,34%	100,00%	95,65%
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	NA	85,00%	91,00%	99,91%	95,89%
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	NA	95,00%	95,00%	100,00%	98,30%

Sumber: 16 Kecamatan, 2024 (Data diolah)

2.1.3.9. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai dalam pengukuran indeks demokrasi yang ditargetkan 72,80 tercapai 89,72 sehingga mampu mencapai hasil yang ditargetkan atau berhasil mencapai tercapai 123,24%. Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Kota Semarang yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), serta Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Jika dibandingkan dengan pengukuran indeks demokrasi tahun 2023, hasil tersebut turun sebesar 5,46 angka indeks atau sekitar 5,73%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2024 terdapat penyelenggaraan pesta demokrasi yaitu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPRD, DPD, DPR RI dan Pemilihan Kepala Daerah. Seluruh aspek pada Indeks Demokrasi tahun 2024 mengalami penurunan dimana aspek yang mengalami penurunan signifikan adalah Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga Demokrasi. Penurunan pada aspek kebebasan sipil salah satunya disebabkan oleh terjadinya peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan.

Pengukuran Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) pada tahun 2024 mencapai 84,34 indeks yang ditargetkan 74,00 indeks atau berhasil mencapai target 113,97%. Hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2023 sebesar 83,63 indeks. Kenaikan tersebut berupa, pemahaman masyarakat Kota Semarang mengenai Pancasila dan Wawasan kebangsaan semakin luas dan mendalam, penerapan dalam kehidupan sehari-hari sudah dilaksanakan terutama dalam interaksi dan

kebiasaan masyarakat Kota Semarang ditengah keberagaman yang tinggi. Beberapa tujuan dari Gerakan Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sudah dapat diterapkan dan dirasakan oleh sebagian masyarakat Semarang. Kegiatan yang mendorong Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah kegiatan Fun Game, Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, Dialog Kebangsaan, FGD Peningkatan Indeks Kota Toleran, FGD Penguatan Karakteristik dan Patriotik Generasi Muda, FGD Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, FGD Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Diskusi Panel Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dn Budaya, Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila pada tahun 2024 dari yang ditargetkan 2,2 indeks tercapai 3,78 indeks atau berhasil tercapai 171,81%. Jika dibandingkan pengukuran tahun 2023 hasil yang dicapai mengalami peningkatan 0,576. Hasil tersebut secara kualitatif didorong oleh kondisi faktual di Kota Semarang yang telah mengimplementasikan berbagai program pengamalan nilai-nilai Pancasila, diantaranya FGD Pemantapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Upacara Peringatan Hari Besar Nasional; Fun Game: Orientasi Pemantapan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; FGD Penguatan Karakteristik dan Jiwa Patriotik Generasi Muda; Pembinaan Kesadaran Bela Negara; Deradikalisasi Mantan Narapidana Teroris.

Tabel 2.81 Realisasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Demokrasi	Indeks	72,00	72,00	95,35	95,18	89,72
2	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	72,50	72,50	82,13	83,63	84,34

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Indeks Kinerja Ormas dari yang ditargetkan 58,00 mencapai 65,05 atau berhasil mencapai target 1Q 12,16%. Hasil capaian 2024 jika dibandingkan hasil capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan/ sejumlah 1,59%. Indeks kinerja organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang tahun 2024 menunjukkan hasil yang berada pada kategori Cukup, dengan total nilai indeks mencapai 65,05 dalam rentang nilai 50-74. Indeks ini dibagi ke dalam dua variabel utama, yaitu sumber daya yang mencatat nilai 39,12 dan program kerja dengan nilai 25,93. Variabel sumber daya meliputi aspek keuangan, sumber daya manusia, dan fasilitas organisasi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi telah memiliki fondasi internal yang cukup baik. Namun, variabel program kerja mencatat nilai yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program oleh organisasi kemasyarakatan masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal perencanaan strategis dan eksekusi yang konsisten.

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks kerukunan umat beragama dari yang ditargetkan 71.00 mencapai 83.86 atau berhasil mencapai target 117,75 %. Jika dibandingkan capaian tahun 2023 hasil tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,48% dimana capaian pada

tahun 2023 sejumlah 81,73. Survei tentang persepsi tentang kerukunan umat beragama diperoleh skor melalui “sikap dan interaksi antar umat beragama” memiliki Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kota Semarang sebesar 83,86 dengan rincian Dimensi Toleransi sebesar 85,00 Dimensi Kesetaraan dengan skor sebesar 83,25 dan Dimensi Kerjasama antar umat beragama diperoleh skor sebesar 83. Dari hasil skor yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama sudah berada pada level sangat tinggi, untuk itu pemeliharaan harus terus ditingkatkan demi tercapainya kehidupan beragama yang rukun, harmonis, dan selaras. Faktor yang Penguat Kerukunan Umat Beragama di Kota Semarang adalah Keberadaan Tempat Ibadah yang Merata dan Aksesible, Adanya Kegiatan Lintas Agama, Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Kerukunan dalam Kehidupan Beragama, Pendidikan Multikultural dan Toleransi, Kearifan Lokal dan Tradisi Toleransi, Tingkat Keamanan yang Relatif Tinggi.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

PDRB per kapita Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB per kapita di tahun 2024 yaitu sebesar 156,57 juta rupiah. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang dengan asumsi kesenjangannya tidak tinggi.

Tabel 2.82 Realisasi Kinerja Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	114,18	123,04	135,33	146,87	156,57
2	Nilai Ekspor	US\$	3.084.439 .326,82	1.117.549 .543,14	1.242.337 .131,00	2.130.728 .974,61	1.322.895 .045,28

Sumber: Bappeda Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah.

a. Aksesibilitas Daerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain:

- 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota. Dengan kondisi jalan Kota sesuai SK Wali kota sepanjang 839,901 km. Jalan dengan kondisi baik pada tahun 2024 yaitu sepanjang 422.677 km (50,32%), kondisi sedang sepanjang 360.727 km (42,95%),

- kondisi rusak ringan sepanjang 29.427 km (3,50%) dan kondisi rusak berat sepanjang 27.070 km (3,22%).
- 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang melayani penumpang domestik dan internasional. Pengembangan terminal baru telah beroperasi pada pertengahan tahun 2018 dan diharapkan akan makin meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Ahmad Yani. Pada bulan Mei 2024 Kementerian Perhubungan menurunkan status Bandara Ahmad Yani tidak lagi berstatus sebagai bandara internasional. Pada tahun 2024 terdapat 17.969 penerbangan dengan 8.696 kedatangan dan 9.007 keberangkatan serta 266 lok. Capaian penumpang pada tahun 2024 berjumlah 2.281.301 penumpang dengan 1.140.327 kedatangan, 1.139.435 keberangkatan dan 1.539 transit. Sedangkan, untuk penerbangan internasional terdapat 372 penerbangan dengan 342 kedatangan dan 30 keberangkatan dengan 145 penumpang.
 - 3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, juga beberapa kapal pesiar internasional telah singgah dipelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Emas melayani angkutan barang dan penumpang, ditunjang keberadaan Terminal Peti Kemas yang melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Jumlah penumpang kapal di tahun 2023 sebesar 373.826 orang.
 - 4) Terminal bus di Kota Semarang terdapat Terminal Penumpang Tipe A Mangkang (kewenangan Pusat) berlokasi di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Terminal Penumpang Tipe B Penggaron (kewenangan Provinsi) berlokasi di Kelurahan Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan, Terminal Penumpang Tipe C (kewenangan Pemerintah Kota Semarang) ada 3 (tiga) yaitu Terminal Cangkiran yang berlokasi di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen, Terminal Gunungpati yang berlokasi di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati dan Terminal Terboyo berlokasi di Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk yang melayani angkutan perkotaan, Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Jumlah penumpang tahun 2024 di terminal tipe C sebesar 216.383 penumpang, terminal tipe B sebesar 29.092 penumpang sedangkan untuk pengguna jasa layanan BRT sebesar 13.135.009 orang.
 - 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang yang dilayani oleh dua Stasiun yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan diutamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol. Jumlah penumpang kereta api pada tahun 2024 sebesar 6.654.753 penumpang.

Rasio Konektivitas kota berhasil sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 0.88. Angka ini menunjukkan bahwa 88% trayek angkutan umum sudah terlayani guna mendukung pergerakan masyarakat dalam beraktifitas.

Tabel 2.83 Realisasi Kinerja Fungsi Aksesibilitas Daerah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kabupaten /kota	Angka	0,56	0,57	0,58	0,85	0,88

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

b. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan wisata/rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran kota.

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yaitu dari angka 44,21% pada tahun 2020, meningkat menjadi 44,82% tahun 2024. Selain itu indikator persentase kesesuaian tata ruang dengan realisasi di tahun 2024 sebesar 100% berdasarkan jumlah permohonan KRK yang sesuai Tata Ruang.

Realisasi kesesuaian tata ruang tidak lepas dari Pengendalian pemanfaatan tata ruang yang sudah terdigitalisasi melalui aplikasi Tata Ruang Pro Investasi. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dan memberikan kemudahan investasi terutama kepastian lokasi bagi investor, sehingga permohonan KRK yang diajukan investor sudah dapat diinformasikan secara pasti ketetapan terkait kesesuaian tata ruangnya, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Tabel 2.84 Realisasi Kinerja Fungsi Penataan Wilayah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	44,21	44,67	44,82	45,05	44,82
2	Kesesuaian tata ruang	%	95,89	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

c. Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 176.042 pelanggan, meningkat menjadi 193.062 pelanggan pada tahun 2024, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 186.091 pelanggan. Demikian pula untuk pemakaian air dan penjualan air mengalami peningkatan pada tahun 2024 masing-masing menjadi sebesar 56.986,349 m3 dan Rp363.009,41 juta. Secara lengkap data banyaknya pelanggan, pemakaian dan penjualan air minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85 Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pelanggan	176.042	177.929	181.705	187.471	193.062
2.	Pemakaian Air (Ribuan m ³)	51.155,72	51.100,93	54.058,37	56.535,43	56.986,35
3.	Penjualan Air (Juta Rp)	276.735,11	293.638,47	301.868,88	328.719,54	363.009,41

Sumber: PDAM Kota Semarang 2024

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2024 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan.

Pengembangan kepariwisataan saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, akan tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2024, di Kota Semarang ada sebanyak 109 usaha akomodasi hotel berbintang, dengan jumlah kamar sebanyak 10.528 kamar dan 15.811 tempat tidur. Adapun rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang 1,87 malam, sedangkan tamu domestik 1,34 malam. Persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang tahun 2024 sebesar 57,26 persen.

Rumah makan atau restoran merupakan salah satu penunjang sektor pariwisata di Kota Semarang. Pada tahun 2024, jumlah rumah makan atau restoran sebanyak 1.722 unit. Usaha rumah makan atau restoran paling banyak dijumpai di Kecamatan Semarang Tengah yaitu sebesar 409 restoran. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religius. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.

2.1.4.3. Fasilitas Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

a. Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2024 angka kriminalitas sebesar 1.221 kejadian, menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2023 yang sebesar 1290 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun sebelumnya.

Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban pada tahun 2024 mencapai 10,18% yaitu dengan angka gangguan trantibum sebesar 1.444. Dari data tersebut adanya penurunan angka gangguan trantibum dibanding dari tahun 2023 yaitu 11,28% dengan angka gangguan trantibum sebesar 1.663 sesuai data yang ada.

Tabel 2.86 Realisasi Kinerja Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	Kasus	1.330	1.253	1.335	1.290	1.196
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	12,37	11,47	10,46	11,28	10,18

Sumber: Satpol PP Kota Semarang 2024

b. Kemudahan Perijinan

Sampai dengan tahun 2023, Perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lokal SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) dengan 27 jenis layanan. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah lainnya menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Adapun karakteristik izin berusaha oleh pelaku usaha adalah: berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Pada tahun 2024 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berhasil mencapai target persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 96,71% melebihi target yang ditetapkan yaitu 95,5%. Selain itu, capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yang sebesar 95,69%.

Tabel 2.87 Realisasi Kinerja Fungsi Kemudahan Perijinan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	98,70	99,33	95,63	95,69	96,71

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang 2024

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Sejak tahun 2010 hingga 2020, persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik ditahun 2010 sampai dengan tahun 2020, komposisi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 70,66%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan penduduk tahun 2020 sebesar 31,90% yang berada di bawah 50%. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas, dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 bergerak fluktuatif. TPAK mengalami peningkatan Kembali di tahun 2024 menjadi 69,88%. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi juga mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi sebesar 79,06%.

Tabel 2.88 Realisasi Kinerja Fungsi Kualitas Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

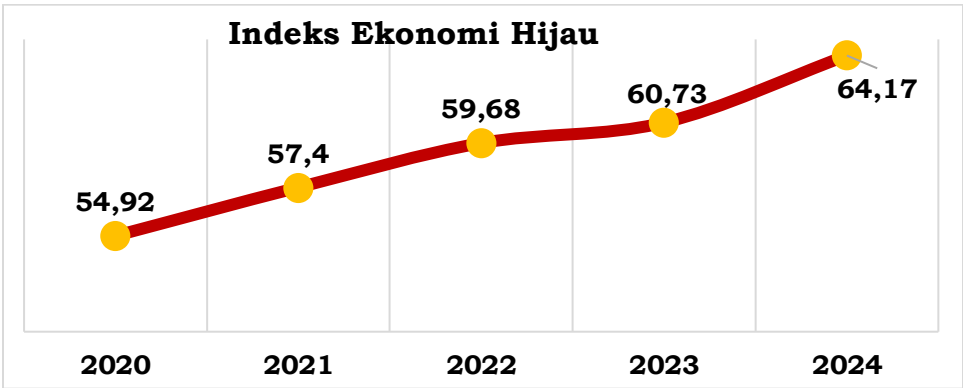
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,89	69,41	70,96	69,42	69,88
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	74,00	75,00	72,74	77,00	79,06
3	Rasio Ketergantungan Penduduk (Data Disdukcapil)	%	41,15	41,10	40,66	41,25	40,30

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Dispendukcapil Kota Semarang, 2024

2.1.4.5. Penerapan Ekonomi Hijau

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara, wilayah, atau perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonominya. Indeks ini berfungsi sebagai indikator dalam menilai efektivitas upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kota Semarang sebagai salah satu kota yang terus berkembang juga turut berupaya meningkatkan nilai indeks ekonomi hijau dengan berbagai program dan kebijakan yang mendukung ekonomi hijau. Berikut ini disajikan perkembangan capaian indikator Indeks Ekonomi Hijau Kota Semarang dari tahun ke tahun, yang mencerminkan sejauh mana kota ini telah bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.



Sumber: DLH Kota Semarang, Dispertan Kota Semarang, BPS Kota Semarang, 2024

Gambar 2.40 Indeks Ekonomi Hijau Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Angka)

Berdasarkan data yang ada di atas, dapat diketahui bahwa tren peningkatan capaian Indeks Ekonomi Hijau terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah meletakkan konsennya terhadap penerapan praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan yang mengedepankan investasi berbasis teknologi hijau, energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kota Semarang telah menggalakkan penghijauan massal, pengelolaan sampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM Tahun 2024, terdapat potensi transisi energi baru terbarukan yang terdiri dari:

- Potensi Angin (*Onshore*) sebesar 59,2 MW;

- Potensi Surya sebesar 6,5 GWp;
- Potensi Air sebesar 1 MW;
- Potensi Biomassa dari Sampah Kota sebesar 42,6 MW; dan
- Sampah Kota Teoritis sebesar 141,9 MW

Beberapa pengembangan yang telah dilakukan antara lain:

- PLTS *Rooftop* Balaikota Semarang
- PLTS dan PLT Angin Kampung Kuliner Pujasera Energi, Kec. Semarang Barat
- PLT Angin PAUD dan SD Mangunharjo, Kec. Tugu
- PLTS pada Kampung Tematik Hasta Karya dan Dung Tungkul, Kec. Tembalang
- PLTS Waduk Jatibarang
- PLTS Terapung Tambaklorok

Dengan peningkatan Indeks Ekonomi Hijau dari tahun ke tahun turut mengindikasikan bahwa ekonomi semakin mampu menciptakan pertumbuhan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kebijakan dan strategi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang secara tidak langsung dapat dikatakan berhasil dalam mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Selain itu, meningkatnya kesadaran tentang isu lingkungan pada masyarakat juga dinilai menjadi salah satu masukan meningkatnya permintaan untuk produk dan jasa yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, adanya peningkatan indeks ekonomi hijau dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi hijau.

2.1.5. Evaluasi Pelaksanaan Program Terhadap Target RKPD 2024 dan Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2024 ditunjukkan dengan capaian indikator program pembangunan Tahun 2024 yang terkompilasi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama periode Evaluasi Hasil terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, yang dikelompokkan dalam beberapa kategori status sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 tahun 2017, sebagaimana berikut:

- a. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target RKPD tahun 2024 sampai (*) memiliki status:
 - Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% ($X > 90\%$);
 - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75 % sampai dengan 90% ($90\% \geq X > 75\%$);
 - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ($75\% \geq X > 65\%$);
 - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ($65\% \geq X > 50\%$); dan
 - Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ($X \leq 50\%$).
- b. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target akhir RPJMD Tahun 2026 (**) memiliki status:
 - Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 54% ($X > 54\%$);
 - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 45% sampai dengan 54% ($54\% \geq X > 45\%$);
 - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 36% sampai dengan 45% ($45\% \geq X > 36\%$);
 - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 30% sampai dengan 36% ($36\% \geq X > 30\%$); dan
 - Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 30% ($X \leq 30\%$)
- c. Untuk Identifikasi Capaian pada periode akhir RPJMD (***)
 -  Tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026) lebih besar atau sama dengan 100 % ($100\% \geq X$);
 -  Akan Tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026) untuk capaian nilai sampai dengan atau diatas 60% hingga kurang dari 100% ($100\% > X \geq 60\%$) besar atau sama dengan 100% ($100\% > X$);
 -  Perlu Upaya Keras, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026) kurang dari 60% ($X < 60\%$).

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup).

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Program Terhadap Target Tahun 2022 dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan

Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2024 pada urusan wajib Pendidikan dalam kategori baik. Kondisi ini berdasarkan 12 indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan, dengan semua indikator dalam predikat sangat tinggi. Sedangkan terhadap target akhir periode RPJMD, dari 12 indikator yang ada, sebanyak 8 indikator telah tercapai, sedangkan 4 indikator lainnya dalam status akan tercapai.

Beberapa indikator perlu ditingkatkan capaiannya karena memiliki persentase belum mencapai 100% dibandingka n target tahun 2024 yaitu APK SD/MI; APK SMP/MTs; APK PAUD 5-6 tahun. Sedangkan, Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV memenuhi target, namun dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD, perlu ditingkatkan. Diperlukan peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs karena masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pada jenjang ini perlu kontribusi dari pemerintah Kota Semarang karena berimplikasi peningkatan literasi dan kualifikasi pendidikan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu guru terutama guru SD agar melanjutkan S1/D-IV. Hal ini perlu dilakukan tindaklanjut karena kualitas guru berpengaruh pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 Urusan Pendidikan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Kuangan SKPD											
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan pendidikan	APK SD/MI	%	111,71	91,47	81,87%	T	111,75	91,47	81,85%	ST		Dinas Pendidikan
	APK SMP/MTs	%	115,63	92,28	79,81%	T	115,65	92,28	79,79%	ST		Dinas Pendidikan
	APK PAUD 5-6 tahun	%	86,14	90,37	104,91%	ST	86,39	90,37	104,61%	ST		Dinas Pendidikan
	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	%	10,00	10,00	100,00%	ST	14,00	10,00	71,43%	ST		Dinas Pendidikan
Program pengembangan Kurikulum	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100,00	100,00	10,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	%	89,82	90,92	101,22%	ST	90,70	90,92	100,24%	ST		Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	%	100,00	90,01	90,01%	ST	100,00	90,01	90,01%	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya:

1. Kekurangan guru linear ijazah S-1/D-IV jenjang PAUD;
2. Rendahnya nilai literasi dan numerasi sehingga berpengaruh terhadap siswa dalam pemahaman pendidikan.

Upaya rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

1. Bekerjasama dengan perguruan tinggi yang melaksanakan program studi guru PAUD untuk dapat memberikan program khusus bagi guru PAUD yang telah ada untuk memperoleh semacam penyeteraan serta kemudahan untuk berkuliah melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk meningkatkan kualifikasi guru PAUD;
2. Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui upaya sebagai berikut:
 - a. Membiasakan sejak usia diri untuk mendengarkan dan membaca buku baik fiksi maupun non fiksi;
 - b. Minimal dalam 1 hari setiap minggunya, di satuan pendidikan dilaksanakan kegiatan membaca bersama atau bahkan menyampaikan resume atas buku bacaan yang telah dibaca siswa;
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk dijadikan media literasi;
 - d. Meningkatkan kemampuan pendidikan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui proses pembelajaran yang membuka ruang diskusi, refleksi serta adanya umpan balik dan dukungan.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan dalam Urusan Kesehatan diantaranya ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan sebagai penyedia fasilitas kesehatan terbaik yang diraih oleh Rumah Sakit Daerah (RSD) K.R.M.T Wongsonegoro. Di sisi lain pencapaian kinerja pada Urusan Kesehatan terlihat dari realisasi kinerja program RKPD dan RPJMD pada tahun 2024 baik, kondisi ini terlihat dari 9 indikator program terhadap target akhir RKPD 2024, terdapat 7 indikator kategori capaian Sangat Tinggi dan 2 sisanya dengan predikat Tinggi. Indikator yang capaiannya dibawah 100% yaitu Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar dan Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar.

Sedangkan, pencapaian kinerja dari 9 indikator program terhadap target akhir RPJMD terdapat 7 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. Indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan karena persentase capaian targetnya terhadap target tahun 2024 kurang dari 100% yaitu, Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar

sehingga kedepan perlu ditingkatkan upaya pencapaian indikator SPM. Selain itu, Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar juga perlu ditingkatkan dari pemenuhan standar dan penyediaan barang yang berlaku.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.90 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Kesehatan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kesehatan
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kesehatan, RSUD KRMT Wongso negro
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	%	100,00	97,64	97,64%	ST	100,00	97,64	97,64%	ST		Dinas Kesehatan
	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		RSUD KRMT Wongson egoro
	Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		RSUD KRMT WONG SONEG ORO
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kesehatan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	%	97,00	92,10	94,95%	ST	98,00	92,10	93,98%	ST		Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kesehatan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)
 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya:

1. Perubahan masalah kesehatan yang ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk (transisi demografi), transisi epidemiologi dan transisi risiko akibat perubahan pola hidup, peningkatan UHH dan perubahan iklim;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah orang tua murid dan pihak sekolah terkait pemeriksaan kesehatan anak dan masih beranggapan bahwa kebutuhan pemeriksaan hanya kebutuhan puskesmas saja;
3. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro ditunjuk oleh Kemenkes RI Sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Prioritas Kanker Jantung Stroke Uronefrologi Kepmenkes No HK.01.07.MENKES-1337-2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker. Saat ini, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro berada di strata madya. Untuk melangkah pada strata utama, diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai dengan strata utama;

Upaya rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

1. Penguatan *screening* pada masyarakat dengan intervensi personal MENTARI SEHAT NUSANTARA yaitu upaya untuk mendeteksi adanya gejala, potensi dan tanda-tanda dari suatu penyakit tertentu, sehingga dapat dilakukan diagnosis dan penanganan secara dini melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh atau *medical check up*;
2. Intervensi masalah kesehatan tidak lagi berbasis program melainkan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup;

3. Pembangunan gedung unit layanan kanker terpadu beserta sarana, prasarana dan alat kesehatan, serta menambahkan atau mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan profesi yang dibutuhkan dalam pengembangan pelayanan radioterapi;
4. Meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan agar sesuai dengan standar indikatornya;
5. Meningkatkan penghasilan dengan optimalisasi aset dan efisiensi perbelanjaan.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja dibidang penanganan luas kawasan permukiman kumuh dengan kriteria luasan dibawah 10 Ha pada tahun 2024 terealisasi sebesar 81.22% melebihi target yang ditetapkan sebesar 64.00%. Sedangkan terkait Rumah Tangga yang telah terlayani air minum sebesar 99,80% lebih dari target yang ditetapkan sebesar 55,75%, dimana penanganannya disinergikan melalui APBD Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Bantuan keuangan) dan APBD (DAK Fisik).

Pada tahun 2024 capaian persentase rumah tangga bersanitasi adalah sebesar 99,10% dari target 92,69%. Capaian ini diperoleh melalui pembangunan sarana sanitasi di Kota Semarang berupa pembangunan tangki septik skala individual perdesaan di Kelurahan Barusari, Semarang Selatan; Kelurahan Jomblang, Candisari; Kelurahan Karanganyar Gunung, Candisari; Kelurahan Ngadirgo, Mijen; Kelurahan Purwoyoso, Ngaliyan; Kelurahan Sendangmulyo, Tembalang; Kelurahan Tambakrejo, Gayamsari; Kelurahan Tegalsari, Candisari; Kelurahan Terboyo Kulon, Genuk serta Pembangunan dan perbaikan MCK Muktiharjo Kidul.

Pencapaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2024 urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target RKPD Tahun 2024 maupun target akhir RPJMD dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 16 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 12 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, dan 4 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Pencapaian target akhir RPJMD penyelenggaraan urusan PUPR tergolong baik, terdapat 12 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 4 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD. Jika di tahun 2023 terdapat 1 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapainya adalah persentase capaian targetnya terhadap target tahun 2023 kurang dari 100% yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, di tahun 2024 capaiannya sebesar 81,22 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 64,00. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.91 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob	%	98,15	97,78	99,62%	ST	98,75	97,78	99,02%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	%	55,75	99,80	179,01%	ST	59,84	99,80	166,78%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	92,69	99,10	106,92%	ST	92,75	99,10	106,85%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	66,00	65,20	98,79%	ST	68,00	65,20	95,88%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	%	64,00	81,22	126,91%	ST	100,00	81,22	81,22%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase reklame berizin	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	%	74.90	74.50	99.47%	ST	75,75	74,50	98,35%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%

**) ST: X>54%; T: 54%≥X>45%; S: 45%≥X>36%; R: 36%≥X>30%; dan SR : X≤30%

***)  : Sudah Tercapai (X≥ :100%)  : Akan Tercapai (100% > X>60%)

 : Perlu Upaya Keras (X≤60%)

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya:

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang dan perizinan bangunan gedung masih belum optimal. Hal ini dikarenakan luas wilayah yang harus ditangani tidak sebanding dengan jumlah SDM di Dinas Penataan Ruang.
2. Spesifikasi material yang terlalu tinggi, sehingga kualitas pekerjaan menjadi tidak optimal;
3. Pemberian bantuan sanitasi untuk individu yang mengalami kenadala aturan pemberian hibah/bansos.

Upaya rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

1. Usulan pemberian kewenangan pada kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan Dinas Penataan Ruang dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan bangunan gedung;
 2. Koordinasi dengan Pemprov Jateng sebelum pengesahan RKO untuk menentukan lokus pekerjaan karena anggaran bersumber dana Bankeu;
 3. Penyesuaian spek teknis atau material pekerjaan sesuai dengan kondisi lokus dan pertimbangan biaya serta peralatan;
 4. Perlu disusun Perwal aturan pemberian bantuan sanitasi skala individu.
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi penanganan rumah layak huni pada tahun 2024 sebesar 99,31%. Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% sesuai target yang dicapai. Capaian ini diperoleh dari terealisasinya sebanyak 16 perumahan yang telah menyerahkan PSUnya. Kinerja terkait persentase Ruang Terbuka Hijau adalah sebesar 44,36%.

Jika dilihat dari capaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2024 urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap target RKPD Tahun 2024 maupun target akhir RPJMD dalam kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruhnya dalam kategori capaian sangat tinggi. Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tergolong baik, terdapat 7 indikator yang telah mencapai target, dan sebanyak 1 indikator akan mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.92 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	99,42	99,31	99,89%	ST	100,00	99,31	99,31%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	44,36	44,60	100,54%	ST	44,46	44,60	100,31%	ST		Dinas Perumahan dan Kawas

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
												an Permukiman

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:
 *) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$
 **) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$
 ***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)
 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya:

1. Pengentasan kawasan permukiman kumuh belum optimal, karena penanganannya masih sektoral;
2. Data Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang, baik milik pribadi maupun swasta belum tersedia;
3. Belum terselesaikannya pengadaan lahan akibat penolakan oleh warga masyarakat;

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi antar lintas Perangkat Daerah untuk memetakan kebutuhan dan solusi tepat untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh;
2. Melakukan inventarisasi data Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang, baik milik pribadi maupun swasta;
3. Sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukannya rencana pengadaan lahan makam. Mencari alternatif lahan di lokasi lain untuk memenuhi kebutuhan pemakaman warga Kota Semarang.
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pencapaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2025 urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap target RKPD Tahun 2024 maupun target akhir RPJMD dalam kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 11 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 3 diantaranya dalam kategori capaian sangat tinggi, 6 kategori tinggi, dan 2 kategori sangat rendah yaitu Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran.

Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam

kategori baik, sebanyak 3 indikator telah tercapai, sebanyak 6 indikator dengan kategori akan tercapai, dan 2 indikator kategori perlu upaya keras. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.93 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	%	100,00	97,92	97,92%	ST	100,00	97,92	97,92%	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	88,09	88,09%	T	100,00	88,09	88,09%	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	90,00	90,00%	T	100,00	90,00	90,00%	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	88,99	88,99%	T	100,00	88,99	88,99%	ST		SatPol PP
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	10,00	13,31	133,10%	ST	10,00	13,31	133,10%	ST		SatPol PP
Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	%	20,00	20,00	100,00%	ST	27,00	20,00	74,07%	ST		BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamat	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Damkar

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
an Non Kebakaran	membahayakan manusia											
	Layanan Pemadam an yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	%	100,00	4,99	4,99%	SR	100,00	4,99	4,99%	SR		Damkar
	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	%	100,00	47,78	47,78%	SR	100,00	47,78	47,78%	T		Damkar
	Terselenggaraanya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Damkar
	Layanan Pemadam an, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakar	%	100,00	89,44	89,44%	T	100,00	89,44	89,44%	ST		Damkar

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	an dan Penyelamatan											

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$
 **) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)
 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum ketenteraman masyakat serta perlindungan masyarakat (setelah dilakukan penertiban, pelanggaran terus diulang);
2. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai;
4. Cakupan pelakasanaan kegiatan BPBD Kota Semarang belum memadai.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan penertiban sesuai pengaduan, sidang tindak pidana ringan, pengawasan pelanggaran perda serta patroli secara intensif (3x dalam sehari) pada wilayah rawan;
2. Memaksimalkan kerjasama antar instansi terkait sampai ke tingkat wilayah melalui kegiatan formal dan Non formal untuk mencari memetakan dan mencari solusi permasalahan ketertiban yang merupakan hal klasik di perkotaan besar;
3. Pemenuhan sarana bertugas dan atau seragam untuk seluruh petugas perlindungan masyarakat;
4. Penambahan SDM yang berkapasitas sesuai dengan kebutuhan.

6. Urusan Sosial

Capaian kinerja Urusan Wajib Sosial untuk indikator kinerja Tingkat kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 4,23%* sesuai dari Data BPS Kota Semarang. Berbanding terbalik jika melihat dari jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin pada tahun 2022 berjumlah 79,87 ribu orang dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin Kota Semarang kembali mengalami kenaikan menjadi 80,53 ribu orang.

Pada indikator kinerja persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100%, untuk indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota capaian target juga sama dengan tahun 2023 yaitu 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2024 pada Urusan Sosial menunjukkan kinerja yang baik. Terlihat dari 7 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, semua indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan sosial dari sebanyak 7 indikator kinerja, sebanyak 7 indikator kategori telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan sosial disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.94 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Sosial

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	%	89,00	100,00	112,36%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerluan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	71,96	100,00	138,97%	ST		Dinas Sosial

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Migran Bermasalah Sosial yang ditangani											
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	%	99,87	100,00	100,13%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	%	70,54	100,00	141,76%	ST	71,96	100,00	138,97%	ST	●	Dinas Sosial

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***) ● : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$) ► : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

▼ : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan sosial antara lain:

1. Pelaksanaan pengumpulan data belum memiliki Aplikasi pendukung untuk pengolahan dan pengelolaan Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti;
2. Penghitungan kebutuhan anggaran standar pelayanan minimal belum berpedoman pada hasil pendataan dan asesmen calon penerima layanan standar pelayanan minimal (spm) sesuai Permendagri No 59 Tahun 2021;
3. Penghitungan perencanaan dan penganggaran belum terperinci per jenis pelayanan dasar sesuai Permendagri No 59 Tahun 2021;
4. Sumber daya manusia pada bidang pengampu kegiatan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial yang masih kurang memahami teknis pelaksanaan pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial;
5. Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan Standar Pelayanan Minimal belum semuanya tersedia.

Untuk rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan data yang ada secara maksimal dengan melaksanakan koordinasi antar bidang;
 2. Pada penghitungan kebutuhan standar pelayanan minimal pada tahun selanjutnya akan dihitung kebutuhannya berpedoman pada hasil pendataan dan asesmen calon penerima Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial;
 3. Pada penganggaran tahun selanjutnya penghitungan kebutuhan anggaran berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan;
 4. Dilaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sumber daya manusia yang menangani secara terus menerus agar lebih memahami teknis pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Sosial;
 5. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada pada pelaksanaan pelayanan Standar Pelayanan Minimal.
7. Urusan Tenaga kerja

Terjadi kenaikan dalam jumlah angkatan kerja sebanyak 17.604 orang dari Tahun 2023, yang sebelumnya 929.014 orang, menjadi 946.618 orang pada tahun 2024. Di sisi lain, tercatat penurunan jumlah penganggur sebesar 535 orang dari tahun 2023, yaitu dari 55.656 orang menjadi 55.121 orang pada tahun 2024. Analisis data tersebut memberikan gambaran terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024, yang dihitung sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kota Semarang pada Tahun 2024 menunjukkan penurunan signifikan, yakni sebesar 0,17%, turun dari 5,99% pada tahun 2023 menjadi 5,82% pada tahun 2024. Penurunan TPT ini mencerminkan peningkatan lapangan kerja, menghasilkan dampak positif pada pendapatan masyarakat dan berhubungan positif dengan peningkatan tingkat kesejahteraan. Lebih lanjut, perubahan ini juga berpotensi memperkuat struktur ekonomi di wilayah Kota Semarang.

Dengan penurunan angka pengangguran, diharapkan dapat mengurangi Tingkat kemiskinan, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam menekan tingkat kriminalitas dan kejadian kejahatan di Kota Semarang dan berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat dan perkembangan wilayah. Selain itu, peran serta pemerintah untuk mendukung pencapaian target kinerja capaian jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan juga diperlukan, baik pada tenaga kerja formal dan informal. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi tenaga kerja dalam memperkuat struktur ekonomi di Kota Semarang.

Pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang mengukur persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, menunjukkan peningkatan sebesar 0,46% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 69,42% menjadi 69,88%. Peningkatan TPAK ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja di Kota Semarang bertambah yang dapat berdampak langsung pada roda perekonomian kota tersebut. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mengakibatkan bertambahnya potensi kontribusi ekonomi masyarakat, mempercepat pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen yang efisien

dalam menciptakan lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi yang sesuai agar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Semarang selalu meningkat setiap tahunnya.

Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada Tahun 2024 telah mengalami peningkatan sebanyak 2,06% dari Tahun 2023 sebanyak 77%menjadi 79,06%. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kota Semarang semakin banyak yang memiliki keterampilan tersertifikasi, sehingga memiliki daya saing yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensi dan harapannya. Peningkatan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi lokal. Tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan, industri, dan sektor ekonomi lainnya di Kota Semarang. Sebagai hasilnya, upaya untuk terus meningkatkan kualifikasi tenaga kerja perlu terus didorong, baik melalui pelatihan, pendidikan formal, maupun program sertifikasi kompetensi.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2024 pada urusan tenaga kerja menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 7 indikator yang dievaluasi, seluruhnya dalam kategori pencapaian sangat tinggi. Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan urusan tenaga kerja termasuk dalam kategori baik, terdapat 6 indikator termasuk kategori telah tercapai dan sebanyak 1 indikator kategori akan tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan tenaga kerja disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.95 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Tenaga Kerja

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Tenaga Kerja
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Tenaga Kerja
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase prog./keg. yang	%	70,00	80,95	115,64%	ST	80,00	80,95	101,19%	ST		Dinas Tenaga Kerja

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja											
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	78,00	79,06	101,36%	ST	80,00	79,06	98,83%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	68,00	111,71	164,28%	ST	72,00	111,71	155,15%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5,50	89,58	1628,73%	ST	5,70	89,58	1571,58%	ST		Dinas Tenaga Kerja

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja, antara lain:

1. Para pencari kerja kurang berminat terhadap lowongan kerja yang telah disebarluaskan;
2. Lowongan pekerjaan yang kurang sesuai dengan latar belakang pencari kerja.

Untuk rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi ketenagakerjaan bagi pencari kerja;
2. Melakukan *job canvassing* ke perusahaan untuk menawarkan pencari kerja yang ada pada database di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2024 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kinerja sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator program yang di evaluasi, masih terdapat 1 indikator dengan capaian sangat rendah, sedangkan 8 indikator lainnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam kategori sangat baik, dari sebanyak 9 indikator program, terdapat 9 indikator termasuk kategori telah tercapai dan 1 indikator termasuk kategori perlu upaya keras, yaitu Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan). Hal ini disebabkan semakin bertambahnya rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, tahun 2023 sebesar 25,08% meningkat 3,7% menjadi 28,78% pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.96 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per	%	12,84	28,84	-24,61%	SR	10,00	28,84	-88,40%	SR		DP3A

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	100.000 penduduk perempuan)											
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	%	0,01	0,02	200,00%	ST	0,01	0,02	200,00%	ST		DP3A
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)
 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya:

1. Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan yang masih sebatas seremonial belum berkelanjutan;
2. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga;
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
 2. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga di setiap Kelurahan di Kota Semarang;
 3. Peningkatan kualitas layanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan tindak kekerasan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
9. Urusan Pangan

Pada tahun 2024, persentase cadangan pangan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 12,93 menjadi 421,94 dari yang sebelumnya 409,01. Persentase daerah rentan rawan pangan juga mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya 0,56% menjadi 0% daerah rentan rawan pangan. Untuk skor pola pangan harapan juga mengalami peningkatan 0,36%, dari yang sebelumnya 91,8% menjadi 92,16%. Selanjutnya, persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan mengalami penurunan sebesar 1,46% dari yang sebelumnya 98,3% menjadi 96,84%.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2024 pada urusan Pangan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan pangan termasuk dalam kategori sangat baik, kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator program, terdapat 8 indikator termasuk kategori telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Pangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pangan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan	Ketersediaan Energi / Kapita	Kkal /Kapita	3.058	3.058	100,00%	ST	3.060	3.058	99,93%	ST		Dinas Ketahanan Pangan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presensi Cakupan Distribusi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,00	0,00	200,00%	ST	1,00	0,00	200,00 %	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presensi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	82,00	96,84	118,10%	ST	83,00	96,84	116,67%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%

**) ST: X>54%; T: 54%≥X>45%; S: 45%≥X>36%; R: 36%≥X>30%; dan SR : X≤30%

***) ● : Sudah Tercapai (X≥ :100%) ► : Akan Tercapai (100% > X>60%)

▼ : Perlu Upaya Keras (X≤60%)

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi urusan pangan pada tahun 2024 antara lain adanya ancaman sektor ketersediaan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global (badanpangan.go.id, 2024), yang diperburuk dengan kekeringan ekstrem sepanjang tahun telah terbukti terkait langsung dengan penurunan produksi padi nasional (berkas.dpr.go.id., 2024). Hal ini mempengaruhi ketahanan pangan terutama pada sisi ketersediaan, distribusi, serta penurunan kualitas hasil produksi pangan. Di sisi lain, menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP) Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan rumah tangga terbanyak se-Asia Tenggara, tepatnya 14,73 juta ton per tahun (Food Waste Index Report, 2024). Sehingga

perlu upaya penguatan ketahanan pangan dari aspek konsumsi dan keamanan pangan guna meminimalisir jumlah sampah pangan.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan mengambil langkah berbagai strategis dalam menanggulangi permasalahan pangan, mengingat Kota Semarang bukanlah daerah produsen pangan, diantaranya:

1. Dari sisi ketersediaan telah dilakukan penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan, dimana seluruh kelurahan di Kota Semarang sejumlah 177 kelurahan telah masuk kategori sangat tahan pangan. Penguatan ketersediaan pangan di Kota Semarang juga didukung dengan terjalannya Kerjasama Antar Daerah (KAD) secara bussiness to bussiness dengan memfasilitasi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Lumpang Semar Sejahtera untuk bekerjasama dengan BUMP/Gapoktan di wilayah produsen. Pada tahun 2024 KAD telah dilakukan dengan 3 Gapoktan di Kabupaten Karanganyar, serta melakukan koordinasi pendahuluan dengan Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang.
2. Dari aspek keterjangkauan dan akses pangan, Gerakan Pangan Murah melalui P okasi dengan jumlah bahan pangan tersalur lebih dari 422 ton. Selanjutnya, guna asar Pangan Rakyat Murah dan Aman (PAK RAHMAN) telah digelar di 176 titik l memenuhi permintaan masyarakat akan pangan murah dan aman melalui jejaring Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpangsemar) yang pada tahun 2024 telah terbentuk di 16 Kecamatan serta 177 Kelurahan. Upaya mendekatkan akses pangan juga didukung dengan pembentukan Kios Pangan sebanyak 19 Kios untuk menjual pangan pokok/strategis di bawah harga pasar sesuai dengan program Badan Pangan Nasional.
3. Mengingat Indonesia merupakan negara penghasil sampah pangan terbesar di ASEAN, maka gerakan Stop Boros Pangan terus digecarkan sebagaimana program Badan Pangan Nasional. Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (GaRANG ASEM) dan Promosi Pangan Lokal Enak Bergizi (Pisang Legi) yang diinsiasi Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 meningkatkan sosialisasi melalui lomba olahan pangan berbahan pangan lokal dan sisa pangan berlebih dengan peserta UMKM, PKK, serta pelajar di Kota Semarang.

10. Urusan Pertanahan

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan dalam memberikan dukungan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana ditargetkan seluruh tanah sudah bersertifikat di tahun 2025. Menyikapi hal tersebut di tahun 2023 Kota Semarang meluncurkan Sertifikat Elektronik Dan Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah. Peningkatan kinerja lain didapatkannya prestasi dan penghargaan, juara 1 pengelolaan penataan ruang kabupaten/kota terbaik se-Jawa Tengah. Pada tahun 2024, capaian indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum serta tersedianya tanah untuk masyarakat nilainya stabil dengan tahun sebelumnya dalam kategori sangat baik.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2024 pada urusan Pertanahan menunjukkan kinerja yang baik, yang ditunjukkan dari sebanyak 7 indikator

yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, semua indikator memiliki status pencapaian sangat tinggi. Sama halnya dengan target akhir RPJMD semuanya sebanyak 7 indikator telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan pertanahan disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.98 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pertanahan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Penetapan Tanah Ulayat	Terselesaikannya penetapan tanah ulayat	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Terkelolanya izin membuka tanah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Pernetagunaan Tanah	Terselesaikannya penatagunaan tanah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu:

1. Permasalahan pada Urusan Wajib Bidang Pertanahan lebih pada pembagian kewenangan antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang dalam membangun digitalisasi data pertanahan masih tergantung pada Kantor Pertanahan, sedangkan kebijakan Satu Peta menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang sebagai walidata geospasial, sehingga perlu adanya sinkronisasi data pertanahan antara peta bidang tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan dengan Peta Dasar Kota Semarang yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang.
2. SiLPA Dinas Penataan Ruang pada Urusan Pertanahan yang besar berasal dari SiLPA Hibah PTKL. Tidak optimalnya serapan anggaran ini disebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan PTKL karena target kinerja dan target anggaran yang ditentukan oleh penerima hibah yaitu Kantor Pertanahan melalui proposal APBD Murni 2024 tidak tercapai. Jika diuraikan secara singkat target SHAT sebanyak 25.000 bidang hanya tercapai 8.181 bidang saja, sedangkan permohonan anggaran hibah sebesar Rp15.292.438.000, hanya dapat terserap Rp5.972.002.987 atau 39,05% saja.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat MoU atau Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota
2. Semarang terkait *sharing* data pertanahan, dengan harapan kebijakan Satu Peta akan terwujud yang secara umum akan berdampak pada keberhasilan Reforma Agraria dan redistribusi tanah.
3. Menyusun kajian Evaluasi pelaksanaan PTSL dan PTKL di tahun anggaran 2024.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan pada urusan lingkungan hidup salah satunya ditandai dengan diraihnya penghargaan Sekolah Adiwiyata baik tingkat nasional maupun provinsi, dan juga adanya penghargaan kampung iklim (Proklam) Tingkat Nasional. Pada urusan lingkungan hidup, juga dilakukan program strategis untuk menunjang peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang di antaranya adalah pembatasan penggunaan plastik, secara periodik dilaksanakan *Car Free Day*, juga penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari pemilahan, pengumpulan pengolahan dan pemrosesan akhir. Sehingga sampai dengan saat ini terdapat 225 unit bank sampah di masyarakat, juga Rumah kompos, dan TPS3R.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator tujuan dari penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup juga meningkat kinerjanya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 56,84 mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 59,41. Adapun nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 45,56, sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 46,00. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan di 61 titik pengamatan di 33 sungai baik hulu maupun hilir. Sedangkan nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 86,9 yang datanya diambil dari hasil pantauan pada 4 titik yang mewakili area transportasi, permukiman, perkantoran dan industri. Sedangkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKTL) mencapai 32,35 yang merupakan hasil perbandingan jumlah luas tutupan dengan total luas wilayah di Kota Semarang.

Dalam mendukung upaya pengelolaan sampah Kota Semarang melakukan penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) yaitu suatu instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah untuk mengukur keberhasilan daerah dalam mengelola sampah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah. Penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) terdiri dari kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana pengangkutan sampah, penganggaran dan proses dalam pengelolaan sampah (sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pemahaman serta implementasi).

Berdasarkan hasil laporan Dinas Lingkungan Hidup pengurangan sampah di Kota Semarang mencapai 28,01% pada tahun 2024 terutama pada sampah rumah tangga dan sejenisnya. Hasil capaian kinerja indikator program terhadap target RKPD tahun 2024 melalui beberapa program yang telah dilaksanakan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar salah satunya yaitu adanya perubahan presentase perubahan emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca yang masih mengalami peningkatan dengan target awal sebesar 2,00 dan hasil realisasinya sebesar 5,98. Pada beberapa program yang telah diciptakan hal ini bertujuan untuk menanggulangi beberapa permasalahan lingkungan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Lingkungan Hidup

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlin dungan dan Pengelola an Lingkung an Hidup	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan	%	62,00	81,39	131,27%	ST	93,00	81,39	87,52%	ST		DLH

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	an pencemar an udara											
	Persen tase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemar an air	%	89,00	83,26	93,55%	ST	66,00	83,26	126,15%	ST		DLH
	Cakupan penghijau an wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Ha	30,00	48,66	162,20%	ST	50,00	48,66	97,32%	ST		DLH
	Persen tase perubahan emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca	%	2,00	5,98	299,00%	ST	2,00	5,98	299,00%	ST		DLH
Program Pengelola an Keanekarag aman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelola an taman keanekarag aman hayati (kehati) di	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
Program Pengendali an Bahan Berbaha ya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbaha ya Dan Beracun (Limbah B3)	Persen tase ketaatan penang gung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolah an B3 dan limbah B3	%	58,00	67,86	117,00%	ST	62,00	67,86	109,45%	ST		DLH
Program Pembina an Dan Pengawas an Terhadap Izin Lingkung	Persen tase pembina an dan pengawas an terkait Ketaatan Penang	%	85,60	88,62	103,53%	ST	86,00	88,62	103,05%	ST		DLH

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
an Dan Izin Perlindungan an Dan Pengelolaan an Lingkungan Hidup (PPLH)	gung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota											
	Persen tase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen tase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	53,00	53,00	100,00%	ST	58,00	53,00	91,38%	ST		DLH
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen tase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	12,00	19,51	162,58%	ST	13,00	19,51	150,08%	ST		DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen tase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	an hidup yang ditindaklan juti											
Program Pengelolaan an Persampahan	Persen tase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	91,50	91,50	100,00%	ST	92,00	91,50	99,46%	ST		DLH
	Persen tase Pengurang an Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	28,00	28,01	100,04%	ST	32,00	28,01	87,53%	ST		DLH
	Persen tase Penangana n Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	71,00	71,34	100,48%	ST	69,00	71,34	103,39%	ST		DLH

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup:

- Masih rendahnya nilai indeks kualitas air;
- Masih belum optimalnya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Semarang.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan :

- Memperketat pengawasan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah maupun sektor swasta;
- Memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat di tingkat tapak dengan mendorong masyarakat aktif dalam upaya pengelolaan sampah melalui insentif ekonomi ataupun pendampingan

12. Urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menunjukkan hasil persentase program yang telah di susun dengan target

capaian yang menunjukkan hasil persentase yang masih fluktuatif, Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP- el maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2024 adalah 99,35% di bawah target sebesar 99,50%. Penduduk yang belum memiliki KTP-el merupakan penduduk yang belum malkukan perekaman KTP-el ataupun penduduk yang melakukan mutasi kedatangan yang belum terekam KTP-el.

Hasil persentase anak yang memiliki KIA tahun 2024 sebesar 71,06, sedangkan targetnya adalah 74,00. Hal ini menunjukkan ketidaktercapaian target. Pada semua jenis program yang terbagi ke beberapa indikator kinerja menunjukan bahwa pada program pendaftaran penduduk dan program pencatatan sipil yang perlu adanya pembahasan lanjut mengenai target dengan hasil realisasi yang ada guna memperoleh adanya solusi dan penanganan untuk mencapai target selanjutnya.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2024 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 10 indikator yang dievaluasi, seluruhnya termasuk pada kategori pencapaian sangat tinggi. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 8 indikator yang telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai target akhir RPJMD.Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.100 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dispenduk Capil
	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dispenduk Capil
	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dispenduk Capil
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dispenduk Capil

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el	%	99,50	99,35	99,85%	ST	99,70	99,35	99,65%	ST		Dispenduk Capil
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	74,00	71,06	96,03%	ST	80,00	71,06	88,83%	ST		Dispenduk Capil
Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	97,50	98,35	100,87%	ST	98,00	98,35	100,36%	ST		Dispenduk Capil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dispenduk Capil
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dispenduk Capil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dispenduk Capil

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***) : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya capaian kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) belum dapat mencapai target dari target tahun 2024 sebesar 99,60% hanya tercapai sebesar 99,35%;
2. Belum optimalnya capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) belum dapat mencapai target dari target tahun 2024 sebesar 74% tercapai 71,06%.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan administarsi kependudukan terdapat upaya yang akan dilaksanakana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Melaksanakan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah SMP dan SMA di Kota Semarang, baik sekolah negeri maupun swasta;
2. Membuat Surat Edaran / undangan perekaman KTP-el by name by address bagi Wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman KTP-el
3. Melaksanakan jemput bola perekaman KTP-el bagi warga difabel, lansia dan orang sakit yang tidak bisa hadir ke tempat perekaman KTP-el;
4. Memperluas kerjasama inovasi KIA Goes To School dengan SMP di Kota Semarang baik negeri maupun swasta;
5. Kerjasama pemanfaatan KIA dengan 9 mitra KIA yaitu Toko Buku Gramedia, Toko Buku Merbabu, Toko Buku Toha Putra, English First, Halmahera Music, Klub Merby, Jungle Toon Water Park, BRT Trans Semarang dan Club House Graha Wahid. Dengan menunjukkan KIA akan mendapatkan diskon menarik di 9 Mitra KIA tersebut. SMA di Kota Semarang, baik sekolah negeri maupun swasta.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2024, Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berhasil lolos masuk tiga besar Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional dari Regional II Tahun 2024. Banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan, seperti program pilah sampah dari lingkup terkecil di rumah tangga, sehingga sampah yang dihasilkan di tingkat rumah tangga telah dimanfaatkan dan di saring di Bank Sampah Payung Lestari sebelum ke TPA, pengembangan budidaya lobster air tawar yang mengkonsumsi sampah-sampah organik sehingga aman bagi kesehatan. Banyak potensi-potensi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat dikembangkan, terlebih bagi wilayah Kelurahan/Kecamatan yang topografinya berada di wilayah potensial dataran rendah dan dataran tinggi.

Berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2024, dari 2 program dan indikator kinerja, seluruhnya berada pada kategori sangat baik, serta capaian terhadap target akhir RPJMD juga berada pada kategori sudah tercapai, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Administrasi Pemerintahan dan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:
 *) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$
 **) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$
 ***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)
 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yaitu masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Optimalisasi kegiatan kelembagaan kemasyarakatan di kelurahan.

Masih dijumpai kendala dalam penyelenggaraan kegiatan, di antaranya masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan. Adapun tindak lanjut yang akan ditempuh adalah dengan peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tabel hasil evaluasi capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan jumlah 4 program dengan jumlah 6 indikator kinerja yang hasil capaian terhadap target RKPD memenuhi 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 5 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan 1 indikator akan mencapai target akhir RPJMD. Pada indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini dilakukan agar tidak terjadinya *over population* sehingga perlu adanya monitoring dan sosialisai terkait jumlah di setiap anggota keluarga yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan setiap keluarga.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.102 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Disdalduk KB
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Disdalduk KB
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Disdalduk KB
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 th	%	0,50	0,17	166,00%	ST	0,50	0,17	166,00%	ST		Disdalduk KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	77,24	77,73	100,63%	ST	77,76	77,73	99,96%	ST		Disdalduk KB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	%	60,22	72,08	119,69%	ST	100,00	72,08	72,08%	ST		Disdalduk KB

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Pemasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB diantaranya:

1. Program KB masih kurang menarik bagi masyarakat, terutama KB pria;
2. Masih terdapat keluarga berisiko stunting yang tidak mau didampingi;
3. Masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya pola asuh terhadap keluarga (Balita, Remaja, Lansia);
4. Kemampuan kader masih belum sesuai dengan yang diharapkan;
5. Sekolah siaga kependudukan belum menjadi prioritas sekolah;
6. Fungsi Rumah Data belum optimal.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat, edukasi melibatkan tenaga pakar (keahlian khusus) dan penambahan uang pengganti tidak bekerja untuk KB pria;
2. Bekerja sama dengan kader, tokoh masyarakat, pemangku wilayah serta kolaborasi dengan OP
3. Memberikan pengertian pentingnya pendampingan keluarga berisiko stunting;
4. Kolaborasi dengan institusi dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang lain;
5. Peningkatan kapasitas kader sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini;
6. Penguatan pemahaman dan implementasi sekolah siaga kependudukan di satuan Pendidikan;
7. Mengadakan orientasi dan pemanfaatan rumah data.

15. Urusan Perhubungan

Pada data tahun 2024 menyebutkan bahwa terjadi penurunan arus penumpang angkutan umum sebesar 2.471.058 orang, dari yang sebelumnya 22.956.716 penumpang menjadi 20.485.658 penumpang. Kemudian, pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet juga mengalami pengurangan dari tahun 2023 sebanyak 3 titik menjadi 2 titik di tahun 2024.

Terdapat beragam sarana transportasi di Kota Semarang, diantaranya sarana dan prasarana pejalan kaki, jalur khusus sepeda, Jembatan penyebrangan orang (JPO), sarana dan prasarana angkutan umum jalan raya, angkutan umum kereta api, angkutan umum perairan, dan angkutan umum moda lainnya yang berdasarkan kondisi eksisting dapat digunakan secara optimal namun masih perlu perbaikan di beberapa titik-titik tertentu.

Pada hasil evaluasi dari tabel capaian kinerja indikator urusan perhubungan menghasilkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024 mengalami peningkatan pada target yang telah ditentukan hal ini akan terus dilanjutkan untuk RPJMD tahun yang akan datang. Pada urusan perhubungan ini menjadi salah satu tolak ukur sebagaimana efektivitas dan kondisi sistematis dari program dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan dalam upaya pengintegrasian aksesibilitas yang mampu selaras dengan kondisi eksisting yang ada. Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.103 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Perhubungan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026				OPD	
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	%	100.00	100.00	100.00%	ST	100.00	100.00	100.00%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100.00	100.00	100.00%	ST	100.00	100.00	100.00%	ST		Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	65.51	71.99	109.89%	ST	68.15	71.99	105.63%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase pengelolaan Parkir On the Street	%	90.00	90.04	100.04%	ST	94.00	90.04	95.79%	ST		Dinas Perhubungan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Jumlah trayek BRT	Tra yek	14.00	13.00	92.86%	ST	15.00	13.00	86.67%	ST		Dinas Perhubung an
	Persen tase pelanggar an lalu lintas angkutan umum	%	35.00	33.51	104.26%	ST	30.00	33.51	88.30%	ST		Dinas Perhubung an
	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	%	6.87	5.53	80.49%	T	7.00	5.53	79.00%	ST		Dinas Perhubung an

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aktivitas orang dan barang di jalan mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas;
2. Masih kurangnya maksimalnya pelayanan BRT Trans Semarang dalam melayani masyarakat;
3. Masih kurangnya ketertiban pengguna jalan dalam berlalu lintas dan parkir di tepi jalan umum sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah:

1. Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan penambahan pemasangan perlengkapan jalan dan rekayasa lalu lintasambahan pelayanan BRT pada ruas jalan yang belum terlayani angkutan umum massal;
2. Peningkatan pelayanan BRT baik dari segi armada maupun personil;
3. Peningkatan operasi penertiban dan pengendalian lalu lintas / parkir di tepi jalan umum.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, ditandai dengan diterimanya penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Pemerintahan Kota Semarang memperoleh nilai tertinggi sejumlah 95,68 dalam kategori Informatif Badan

Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,87% dari yang sebelumnya 95,87% menjadi 95%. Hal ini menjadi komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas penyebaran informasi publik di tahun-tahun berikutnya.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2024 termasuk dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 6 indikator yang dimiliki, semua indikator sebanyak 6 indikator termasuk pada kategori capaian sangat tinggi, termasuk capaian terhadap target akhir RPJMD keseluruhan indikator juga sudah tercapai. Hasil capaian secara kuantitatif yang sudah masuk ke status Sangat Tinggi (ST) dengan jumlah hasil yang sudah memenuhi target yaitu 100,00 yang sudah terlaksana. Sehingga pada evaluasi RPJMP ditahun mendatang jumlah target akan terus di pertahankan dan dilanjutkan nilai nya dikarenakan urusan komunikasi dan informatika yang menjadi kebutuhan sehari-hari bagi seluruh Masyarakat untuk melakukan interaksi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.104 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Komunikasi dan Informatika

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RPJMD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi ke masyarakat	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Pemasalahan yang ditemui di antaranya:

1. OPD terkait masih enggan menggunakan fitur tracking L3 di sistem *Call Center* 112 sehingga posisi dan lokasi petugas lapangan tidak bisa terdeteksi di system;
2. Layanan internet monitoring CCTV RT belum terpenuhi untuk semua RT di Kota Semarang dikarenakan keterbatasan anggaran;
3. Masih banyaknya keluhan terkait kecepatan internet yang tidak stabil dari OPD - OPD di Kota Semarang;
4. Banyaknya laporan masuk tentang kerusakan CCTV yang kepemilikan asetnya adalah aset milik kecamatan;
5. Masih banyaknya keluhan mengenai down / jaringan lemot pada internet kelurahan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan perintah dari pimpinan tertinggi agar OPD mau menggunakan fitur ini. baik melalui rapat Tepra dan surat edaran;
2. Pemenuhan Layanan internet monitoring CCTV RT secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ada;
3. Melakukan perbaikan secara berkala serta melakukan monitoring secara rutin;
4. Pengecekan terlebih dahulu jika ada laporan kerusakan CCTV yang masuk, apakah aset tersebut milik Kominfo atau milik Kecamatan. Jika Aset tersebut milik Kominfo segera kami tindak lanjuti, jika aset tersebut milik Kecamatan, laporan diteruskan ke Kecamatan;
5. Melakukan penggantian ISP (*Internet Service Provider*).
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemerintah Kota Semarang terus berupaya memperkuat pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berbagai program dan kebijakan diarahkan untuk mendorong terciptanya koperasi yang sehat dan UMKM yang berdaya saing sehingga mampu berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pengembangan koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui berbagai inovasi dan fasilitasi. Pemerintah menyediakan akses pembiayaan melalui Kredit Wibawa bagi koperasi dan pelaku UMKM, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti Gerai Oleh-oleh Bandara A. Yani Semarang, Hotel Santika, Carrefour, Superindo, Pangan Mart, dan SRC (Sampoerna Retail Community). Langkah ini bertujuan memperluas akses pemasaran, meningkatkan jejaring usaha, dan memperkuat posisi pelaku UMKM di pasar lokal maupun regional.

Untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, Pemerintah Kota Semarang juga mengembangkan SI-UMI (Sistem Informasi Usaha Mikro) sebagai instrumen pendataan UMKM yang akurat dan terintegrasi. Sementara itu, keberadaan berbagai jenis koperasi meliputi koperasi produsen, konsumen, hingga simpan pinjam mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat yang semakin tumbuh dan beragam. Koperasi-koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang efektif.

Pemerintah Kota Semarang meyakini bahwa meningkatnya persentase koperasi berkualitas berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset, serta bertambahnya jumlah koperasi aktif, akan memperkuat terwujudnya koperasi yang mandiri, akuntabel, sehat, dan berkelanjutan. Kondisi ini penting untuk memastikan koperasi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi anggotanya serta mendukung pemerataan pembangunan perekonomian daerah. Hal serupa berlaku pada sektor usaha mikro, di mana peningkatan usaha mikro yang naik kelas menjadi wirausaha dan tumbuhnya wirausaha baru berskala mikro diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, tantangan masih cukup besar, baik dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi maupun memperkuat ekosistem usaha mikro. Tantangan pada kelembagaan koperasi di antaranya meliputi belum optimalnya tata kelola kelembagaan, lemahnya literasi manajemen dan keuangan pengurus, kurangnya transparansi dalam pengelolaan usaha, serta minimnya digitalisasi layanan koperasi. Selain itu, sebagian koperasi belum memiliki kapasitas untuk memperluas skala usaha karena keterbatasan modal dan belum mengembangkan model bisnis yang adaptif terhadap dinamika pasar. Kondisi ini mengharuskan adanya penguatan kelembagaan koperasi secara menyeluruh melalui pendampingan manajemen, peningkatan kualitas pelaporan RAT, pengembangan literasi keuangan, serta perluasan akses pembiayaan. Tantangan serupa juga dihadapi oleh pelaku usaha mikro, terutama terkait terbatasnya akses permodalan, kemampuan manajemen usaha yang masih rendah, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta terbatasnya akses pemasaran, baik online maupun offline.

Berdasarkan uraian di atas, penguatan koperasi dan usaha mikro perlu didorong secara simultan melalui pembiayaan yang lebih inklusif (seperti Kredit Wibawa), fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta, perluasan akses pemasaran melalui jejaring ritel dan marketplace, serta pengembangan sistem pendataan berbasis digital seperti SI-UMI. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat transformasi koperasi menjadi koperasi modern yang produktif, sekaligus mendorong usaha mikro agar berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, pengawasan koperasi terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas koperasi serta memperkuat kepercayaan anggota terhadap kinerja lembaga koperasi. Hasilnya, persentase koperasi aktif meningkat dari 77,04% menjadi 77,58% atau naik sebesar 0,54%, sementara koperasi berkualitas meningkat dari 58,91 menjadi 59,72. Peningkatan tersebut diharapkan mampu memperkuat peran koperasi dalam perekonomian daerah.

Pada sektor usaha mikro, pelaku usaha yang dibina dan berhasil meningkatkan omzet pada tahun 2024 telah mencapai 53,28%. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah, baik melalui akses pemasaran secara online maupun offline, telah membantu mendorong pertumbuhan usaha mikro dan memperluas jangkauan pemasaran mereka. Secara rinci, pencapaian target kinerja pembangunan daerah Tahun 2024 pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.105 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status*)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status**)	Status***)	
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	%	3,00	0,00	0,00%	SR	3,00	0,00	0,00%	SR		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	50,00	68,34	136,68%	ST	50,00	68,34	136,68%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	32,00	44,00	137,50%	ST	35,00	44,00	125,71%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	10,00	41,30	413,00%	ST	10,00	41,30	413,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	%	1,00	1,84	184,00%	ST	2,00	1,84	92,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	27,00	30,82	114,15%	ST	30,00	30,82	102,73%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	3,00	5,47	182,33%	ST	3,00	5,47	182,33%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Umkm	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20,00	53,28	266,40%	ST	25,00	53,28	213,12%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM, masih dijumpai beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Masih adanya koperasi dengan kualitas kelembagaan koperasi dan kompetensi SDM pengelola/pengurus koperasi yang belum baik;
2. Masih rendahnya pemahaman manajemen kewirausahaan atau kemampuan manajemen usaha, teknologi dan digitalisasi pelaku usaha mikro dalam mengelola usahanya;
3. Masih terbatasnya akses pemasaran dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dalam pengembangan dan meningkatkan omset usahanya omsetnya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan jumlah koperasi berkualitas dari segi kelembagaan, keuangan maupun usahanya melalui Inkubasi Koperasi, memberikan

- fasilitasi uji kompetensi bagi pengurus/pengelola koperasi serta fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan bagi koperasi sehingga terwujud koperasi yang mandiri, meningkat aset dan omsetnya;
2. Melaksanakan pelatihan yang lebih efektif melalui inkubasi UMKM dan meningkatkan pelatihan terkait manajemen kewirausahaan, teknologi dan platform digital bagi pelaku usaha mikro;
 3. Meningkatkan penyelenggaraan fasilitasi akses pemasaran baik secara online maupun offline serta fasilitasi akses pembiayaan dengan lembaga perbankan bagi pelaku usaha mikro.
18. Urusan Penanaman Modal

Pada tahun 2024, jumlah investor berskala nasional di Kota Semarang jumlahnya sedikit mengalami penurunan dari yang sebelumnya 556 menjadi 550 investor. Namun, nilai investasi Kota Semarang terus meningkat di setiap tahunnya, tahun 2024 nilai investasi di Kota Semarang sebesar 28.261.147 sehingga dari hasil investasi ini memapu menarik peluang yang menjadi dorongan serta dukungan dalam kegiatan dan pembangunan Kota Semarang. Hasil Kinerja pada Urusan penanaman modal diukur dari pertumbuhan maupun nilai investasi di Kota Semarang. Berikut nilai investasi Kota Semarang dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2.106 Nilai Investasi Kota Semarang Tahun 2020-2024

Nilai Investasi Kota Semarang (Rp)				
2020	2021	2022	2023	2024
18.209.772.344.035	22.538.063.406.487	24.662.877.213.739	27.205.700.000.000	28.261.147.000.000

Sumber: DPMPTSP, 2024

Nilai investasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 kembali meningkat pasca pandemi. pada tahun 2024 nilai investasi telah mencapai Rp28.261.147.000.000,-.Pada hasil tabel capaian kinerja indikator program yang dengan hasil realisasinya sudah melebihi dari jumlah target yang telah ditentukan hasl ini juga didukung dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam mendukung sarana sebanyak 9 kegiatan pada program ini menajdi sarana dalam memacu tingkat penanaman modal yang akan di investasikan di Kota Semarang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Penanaman Modal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.107 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Penanaman Modal

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	Pena nam Modal	3700,00	3,795,00	102,57%	ST	3744,00	3,795,00	101,36%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Inves tor	541,00	550,00	101,66%	ST	654,00	550,00	84,10%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Ijin Terbit sesuai SP	%	95,50	96,71	101,27%	ST	96,00	96,71	100,74%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pengendali an Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	2,00	2,00	100,00%	ST	2,00	2,00	100,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	%	97,00	97,00	100,00%	ST	100,00	97,00	97,00%	ST		Dinas PM dan PTSP

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan penyelarasan peraturan perundang-undangan sesuai amanat UU Cipta Kerja guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Adanya tuntutan pemberian fasilitasi perizinan bagi masyarakat pelaku usaha tradisional;
3. Adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Perda Perizinan dan Non Perizinan;
2. Melaksanakan kegiatan Bantu Kembang Usaha Lancar Untuk Semarang Tanggap Pasar Tradisional (BAKUL SEGAR);
3. Mengajukan permohonan usulan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang strategis dekat dengan pusat ekonomi, perdagangan dan jasa. Mengajukan Permohonan usulan Lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang strategis dekat dengan pusat ekonomi perdagangan dan jasa.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan pemuda dan olahraga tahun 2024 termasuk kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator sebanyak 7 indikator termasuk kategori sangat tinggi. Jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 4 indikator telah tercapai sesuai target, dan 3 indikator lainnya akan mencapai target. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.108 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	40,00	40,00	100,00%	ST	50,00	40,00	80,00%	ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	jumlah Atlet prestasi	Jumlah	1212,00	1,212,00	100,00%	ST	1334,00	1,212,00	90,85%	ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	Lapangan	5,00	5,00	100,00%	ST	5,00	5,00	100,00%	ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas	Pembinaan Pembentukan karakter	Kegiatan	50,00	50,00	100,00%	ST	58,00	50,00	86,21%	ST		Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Kepramukaan	bagi anggota Pramuka											

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang belum maksimal, sehingga masih ada beberapa cabang olahraga yang harus mencari tempat latihan guna meningkatkan skill SDM atlet;
2. Kekurangan data terkait wirausaha muda;
3. Pindahannya beberapa atlet Kota Semarang ke kota lain;
4. Belum adanya *homebase* organisasi kepemudaan atau komunitas kepemudaan di Kota Semarang.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Semarang secara berkala;
2. Pembentukan kelompok wirausaha muda di masing-masing kecamatan di Kota Semarang;
3. Peningkatan kesejahteraan atlet di Kota Semarang;
4. Mengaktifkan kembali ruang-ruang di Gor Manunggal Jati guna kegiatan organisasi kepemudaan.

20. Urusan Statistik

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan statistik tahun 2024 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator kinerja mempunyai kategori capaian sangat tinggi, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dapat mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan statistik disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.109 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Statistik

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan statistik, diantaranya:

1. Belum tersedianya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Daerah;
2. Belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya ke Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang;
3. Belum optimalnya kapasitas SDM masing-masing OPD terkait tugas dan fungsinya sebagai walidata pendukung dan produsen data statistik sektoral;
4. Belum optimalnya penyusunan metadata data statistik sektoral masing-masing OPD dan belum optimalnya pengajuan rekomendasi kegiatan statistik.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di antaranya adalah:

1. Menyusun landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Daerah;
2. Melakukan integrasi data melalui aplikasi yang tersedia atau yang dimiliki oleh produsen data/OPD dengan Portal Semarang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
3. Optimalisasi kapasitas SDM pengelola data melalui Bimbingan Teknis;
4. Pendampingan dalam penyusunan metadata dan pengajuan rekomendasi statistik.

21. Urusan Persandian

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Persandian, khususnya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan: Kegiatan Launching Semarangkota CSIRT dan Terbentuknya Tim CISRT Tingkat Kota Semarang,

Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi, dan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan persandian tahun 2024 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 1 indikator telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan persandian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.110 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Persandian

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Infromasi, Statistik dan Persandian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Persandian, diantaranya adalah belum adanya lisensi keamanan informasi yang handal dan masih diperlukannya peningkatan kapasitas SDM bidang persandian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengadaan lisensi keamanan informasi yang handal dan pengiriman pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM bidang persandian.

22. Urusan Kebudayaan

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan kebudayaan tahun 2024 termasuk kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator dalam kategori sangat tinggi.

Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD dari 7 indikator sebagai alat ukur kinerja, terdapat 7 indikator yang sudah mencapi target akhir. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan kebudayaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.111 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Kebudayaan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok /Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	%	25,00	129,22	516,88%	ST	35,00	129,22	369,20%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok /Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	%	25,00	34,96	139,84%	ST	35,00	34,96	99,89%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	%	85,45	129,22	151,22%	ST	100,00	129,22	129,22%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Wajib Kebudayaan antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengemasan atraksi wisata;
2. Belum optimalnya diversifikasi produk wisata;
3. Kualitas pelayanan wisata yang belum merata;
4. Kompetensi sumber daya manusai pariwisata yang belum merata;
5. Promosi pariwisata yang belum semua bisa menjangkau target pasar.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat upaya yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pelatihan pengemasan atraksi dan paket wisata untuk masyarakat pelaku wisata;
2. Merintis wisata baru yang dikelola masyarakat dan mendorong investasi;
3. Pelatihan sumber daya manusia pariwisata untuk masyarakat pelaku wisata;
4. Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata sesuai prioritas;
5. Meningkatkan jangkauan promosi dengan kombinasi media *offline* dan *online*.

23. Urusan Perpustakaan

Kinerja pada urusan perpustakaan dapat ditunjukkan oleh Nilai Tingkat Gemar Membaca Kota Semarang pada tahun 2024 yakni di angka 69,59%. Adapun angka tersebut masuk dalam kategori Tinggi dengan interval sebagai berikut: 0-20 (Sangat rendah); 20,01-40 (Rendah); 40,01-60 (Sedang); 60,01-80 (Tinggi); 80,01-100 (Sangat Tinggi). Adapun survey dilakukan dengan mengambil sampel masyarakat kota Semarang dengan rentang usia 15-68 tahun. Adapun variable tingkat Gemar Membaca terdiri dari Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi Akses Internet. Indikator selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Semarang tahun 2024 sebesar 71,58.

Keberhasilan kinerja tersebut di atas didukung oleh kegiatan diantaranya: pembinaan Perpustakaan Sekolah sebanyak 90 lokasi perpustakaan sekolah

baik negeri maupun swasta yang diharapkan bersama-sama dalam hal peningkatan literasi. Dari aspek peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan diselenggarakan Bimtek pustakawan, pengembangan Bahan Pustaka dengan penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan sebanyak 200 eksemplar melalui hibah, kerjasama, CSR, hingga pengadaan. Kegiatan lainnya berupa Nonton Bareng Komunitas Sahabat Mata, Inovasi SiBuca (Sistem Informasi Buku Bercerita), Sosialisasi/Bimtek tentang naskah kuno dan lainnya.

Pencapaian kinerja RKPD urusan perpustakaan pada tahun 2024 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 5 indikator dalam capaian sangat tinggi. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 3 indikator telah mencapai target, dan 2 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.112 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Perpustakaan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	89,92	89,92%	T	100,00	89,92	89,92%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1,00	0,93	93,00%	ST	1,00	0,93	93,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi oleh Urusan Wajib Perpustakaan seperti rendahnya minat baca, keterbatasan koleksi buku, kurangnya fasilitas, serta minimnya tenaga perpustakaan yang kompeten. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam layanan perpustakaan belum optimal, dan dukungan anggaran masih terbatas, sehingga menghambat pengembangan perpustakaan yang lebih baik.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 berupa kampanye literasi, penambahan koleksi buku, serta perbaikan sarana dan layanan digital. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, integrasi sistem informasi, dan penguatan anggaran melalui kerja sama dengan berbagai pihak juga perlu didorong. Dengan langkah-langkah ini, perpustakaan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

24. Urusan Kearsipan

Kinerja pada urusan kearsipan dapat ditunjukkan capaian tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban pada tahun 2024 adalah mencapai 64%. Selain itu adalah tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah di angka 81%. Dukungan yang dilakukan dalam mencapai kinerja tersebut diantaranya adalah peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan manfaat memudahkan untuk masyarakat ataupun pemerintah itu dalam hal penggunaan manfaat arsip.

Untuk mencapai kinerja di atas, upaya lain yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan persentase jumlah arsip musnah sebesar 100%, dimana sebelumnya dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun. Selain itu juga dilaksanakan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dengan indikator terawatnya dan terjaganya arsip yang bernilai guna sekunder. Arsip yang bernilai guna sekunder memiliki peran dalam memberikan edukasi pendidikan, bahan untuk penelitian serta pengambilan keputusan. Berkaitan dengan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tentang standar operasional prosedur penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Hal ini penting dilakukan karena arsip yang bersifat tertutup merupakan arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip, serta menjadi pedoman pengelola arsip dalam penerbitan izin terhadap akses arsip yang bersifat tertutup. Sehingga terdapat batasan-batasan terhadap akses arsip yang dinilai dapat membahayakan

kestabilan negara serta meminimalisir penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan arsip.

Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Kearsipan pada tahun 2024 dalam kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 3 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD, semuanya telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada tahun 2024 urusan Kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.113 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Kearsipan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip musnah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	%	70,00	82,46	117,80%	ST	90,00	82,46	91,62%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi pada urusan bidang kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang masih belum menganggarkan sarana prasarana guna mendukung kegiatan pengolahankearsipan;
2. Aplikasi SRIKANDI masih belum efektif dikarenakan server yang ada masi memiliki kendala yang menyebabkan penciptaan arsip masih mengalami keterlambatan dalam pendistribusian surat;
3. Dalam penyampaian arsip statis melalui JIKN terkendala dikarenakan aplikasi tersebut masih mengalami perbaikan.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, akan dilakukan tindak lanjut:

1. Untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan tidak dianggarkannya sarana prasarana kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang akan menerbitkan Surat Edaran Tentang Penganggaran sarana dan prasarana kearsipan;
2. Dikarenakan aplikasi SRIKANDI hanya memiliki server terpusat, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang berupaya melakukan kordinasi dengan ANRI dan Kemenkominfo untuk menyelesaikan permasalahan pada aplikasi SRIKANDI;
3. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang akan berupaya menciptakan aplikasi penyampaian arsip statis guna mengatasi kendala pada aplikasi JIKN.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2024 kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 3115,99 Ton, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 3067,446 sehingga diasumsikan Kesejahteraan Nelayan meningkat dengan bertambahnya hasil tangkapan sehingga pendapatan nelayan meningkat. Kinerja lainnya adalah peningkatkan produksi perikanan budidaya mencapai 3.961,42 Ton, selain itu juga penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan dari yang ditargetkan 4 kasus dengan realisasi 0 kasus, hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha perikanan memiliki tingkat kesadaran yang semakin baik dari sebelumnya untuk mentaati peraturan perikanan yang berlaku. Produksi ikan olahan mencapai 17.802,22 Ton/Thn, hal ini mengindikasikan dengan meningkatnya produksi perikanan dimungkinkan bertambah pula jumlah pelaku usaha pengolah perikanan dan hasil olahan ikan dan juga dengan meningkatnya konsumsi ikan berarti kesadaran masyarakat semakin lebih baik untuk mengkonsumsi ikan sebagai kebutuhan untuk mencegah stunting dan gizi buruk.

Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 baik, kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruhnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu juga disandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 5 indikator telah mencapai target akhir RPJMD dan 3 indikator perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD. Yaitu Peningkatan Kapasitas SDM, Produksi perikanan tangkap. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan kelautan dan perikanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Kelautan dan Perikanan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Perikanan
	Peningkatan Kapasitas SDM	%	30,00	30,00	100,00%	ST	30,00	30,00	100,00 %	ST		Dinas Perikanan
	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Perikanan
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	3.113,69	3.115,99	100,07%	ST	3.213,00	3.115,99	96,98%	ST		Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	3.961,33	3.961,42	100,00%	ST	4.203,00	3.961,42	94,25%	ST		Dinas Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	kasus	3,00	0,00	200,00%	ST	1,00	0,00	200,00 %	ST		Dinas Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi ikan olahan	ton	17.631,86	17.802,22	100,97%	ST	17.986,00	17.802,22	98,98%	ST		Dinas Perikanan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:
 *) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$
 **) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$
 ***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)
 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1. Ketergantungan nelayan terhadap musim dan cuaca;
- 2. Keterikatan nelayan dengan pemberi modal;
- 3. Perubahan iklim dan dampaknya terhadap perikanan budidaya.

Tindakan lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, di antaranya:

- 1. Memberikan pelatihan kepada nelayan dan istri nelayan untuk menambah ketrampilan di saat musim hujan;
- 2. Membantu pengembangan koperasi nelayan serta membantu akses permodalan;
- 3. Diversifikasi jenis ikan yang di budidayakan.

26. Urusan Pariwisata

Hasil kinerja Urusan Pilihan Pariwisata pada tahun 2024 dapat ditunjukkan diantaranya dengan jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (5.405.696 orang), Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (9.282 orang), Tingkat Hunian Akomodasi (57,04%), Lama Tinggal Wisatawan (1,49 hari).

Hal ini didukung dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata melalui pelayanan prima untuk pelaku wisata dan penatausahaan kelembagaan serta pengelolaan desa wisata. Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didukung oleh Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Aktivitas yang dilakukan yaitu bimbingan teknis *citytour guide* untuk pemandu wisata, bintek pelayanan prima untuk pelaku wisata dan bintek penatausahaan kelembagaan untuk pokdarwis.

- 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

Aktivitas yang dilakukan yaitu apresiasi pokdarwis Jawa Tengah, gelar desa wisata Jawa Tengah, lomba pokdarwis, pelatihan digitalisasi: branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, *homestay*, kuliner, souvenir dan fotografi, pelatihan pemandu geowisata, pelatihan pemandu wisata budaya, pelatihan pengelolaan desa wisata, pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi wisata, pembinaan pokdarwis, pembuatan aplikasi SIEMPOK dan sosialisasi *branding* kepariwisataan.

Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan pariwisata pada tahun 2024 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 3 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang pariwisata, semuanya sebanyak 3 indikator termasuk kategori sangat tinggi. Demikian pula jika disandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD, sebanyak 2 indikator program telah tercapai target dan 1 indikator yang akan tercapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan pariwisata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.115 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pariwisata

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	%	80,00	99,57	124,46%	ST	100,00	99,57	99,57%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pilihan Pariwisata antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengemasan atraksi wisata;
2. Belum optimalnya diversifikasi produk wisata;
3. Kualitas pelayanan wisata yang belum merata;
4. Kompetensi sumber daya manusia pariwisata yang belum merata;
5. Promosi pariwisata yang belum semua bisa menjangkau target pasar.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat solusi sebagai berikut:

1. Pelatihan pengemasan atraksi dan paket wisata untuk masyarakat pelaku wisata;
2. Merintis wisata baru yang dikelola masyarakat dan mendorong investasi;
3. Pelatihan sumber daya manusia pariwisata untuk masyarakat pelaku wisata;
4. Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata sesuai prioritas;
5. Meningkatkan jangkauan promosi dengan kombinasi media *offline* dan *online*.

27. Urusan Pertanian

Mendasarkan pada Perwal No. 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan, Program Urban Farming telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, baik pada skala gedung pemerintahan, industri, sampai dengan pemanfaatan pekarangan & lahan kosong yang bersifat privat. Dan dampak yang dirasakan telah memberikan

pengaruh positif terhadap berbagai isu ketahanan pangan, inflasi, penanganan stunting, bahkan pada pengurangan kemiskinan ekstrem di kewilayahan.

Kinerja pertanian terkait Produktivitas pertanian per ha per tahun (6,85 ton/ha); jumlah kawasan pertanian perkotaan (177 kelurahan); presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (100%); dan jumlah sentra produk unggulan pertanian (5 kawasan) pada tahun 2024 menunjukkan kinerja positif.

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama dari yang ditargetkan 31 kelompok mencapai 34 kelompok. Pencapaian kinerja RKPD urusan pertanian pada tahun 2024 termasuk pada kondisi yang sangat baik. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 7 indikator program telah mencapai target akhir RPJMD dan sebanyak 2 indikator belum mencapai target yaitu indikator jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan pertanian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.116 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pertanian
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pertanian
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pertanian

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Keuangan OPD											
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	produksi hasil peternakan	Ton	36.219,00	41.535,94	114,68%	ST	36.822,00	41.535,94	112,80%	ST		Dinas Pertanian
	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	50.857,23	50.519,18	99,34%	ST	51.284,00	50.519,18	98,51%	ST		Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Ton	6,80	6,82	100,29%	ST	6,38	6,82	106,90%	ST		Dinas Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5,00	-53,92	1.078,40 %	ST	5,00	-53,92	1.078,40%	ST		Dinas Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	%	90,00	100,00	111,11%	ST	85,00	100,00	117,65%	ST		Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	Kelompok	31,00	34,00	109,68%	ST	36,00	34,00	94,44%	ST		Dinas Pertanian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian di antaranya adalah:

1. Ketersediaan prasarana pertanian yang memerlukan perbaikan/rehabilitasi seperti jaringan irigasi tersier dan sumber irigasi lainnya.Jaringan irigasi

tersier yang mengalami kebocoran dapat menyebabkan kehilangan air sehingga penyediaan air irigasi untuk lahan pertanian menjadi tidak optimal. Selain itu dilaporkan bahwa terdapat lahan pertanian seluas 180 ha yang tidak dapat teraliri air irigasi akibat adanya Normalisasi Kali Bringin di Kecamatan Tugu. Normalisasi Kali Bringin dilakukan dengan memperdalam saluran sekunder sehingga muka air menjadi lebih rendah dibandingkan dengan inlet saluran tersier yang sudah ada. Hal ini menyebabkan air tidak dapat mengalir ke lahan pertanian;

2. Wabah Zoonosis seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) dan Avian Influenza yang masih menjadi ancaman di tahun 2024. Wabah yang ada menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para peternak karena menurunkan produksi dan produktivitas ternak bahkan juga menyebabkan kematian ternak sehingga menurunkan pendapatan peternak;
3. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang masih terus terjadi menyebabkan keterbatasan lahan untuk produksi sehingga produksi tanaman pangan menurun dari tahun ke tahun;
4. Kualitas kelembagaan petani yang masih rendah Dimana dari 498 kelompok tani yang ada hanya 34 kelompok (6,83%) yang kualitasnya tinggi (berada pada kelas madya dan utama). Selain itu Tingkat partisipasi anggota kelompok tani juga relatif sangat rendah dimana pada sebagian besar kelompok tani hanya beberapa anggota saja yang berperan aktif;
5. Rendahnya minat generasi muda untuk melakukan praktik budidaya pertanian. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya regenerasi sumber daya manusia di bidang pertanian sehingga menyebabkan terhentinya usaha pertanian apabila tidak ada langkah strategis untuk menarik minat generasi muda;
6. Rantai pemasaran produk pertanian perkotaan belum terbentuk sehingga produksi dari kelompok-kelompok tani perkotaan belum dapat dipasarkan dengan optimal;
7. Adanya fenomena iklim el nino yang menyebabkan bulan kering berlangsung lebih lama di sebagian besar wilayah Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2024. Adanya fenomena iklim ini menyebabkan curah hujan menurun dengan signifikan sehingga persediaan air untuk pertumbuhan tanaman menjadi berkurang bahkan pada beberapa kasus tanaman mengalami kekeringan dan gagal tanam. Hal ini berakibat pada penurunan produktivitas tanaman secara total dan berimbas pada pendapatan petani;
8. Penurunan kualitas tanah sebagai akibat penggunaan bahan kimia yang terus-menerus. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan dosis anjuran pemakaian dapat menyebabkan tertumpuknya residu yang berakibat pada pengerasan struktur tanah. Hal ini menyebabkan produktivitas lahan menjadi berkurang.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud, adalah:

1. Meningkatkan prasarana pertanian melalui pembangunan, pemeliharaan maupun rehabilitasi terutama prasarana penyediaan air irigasi dan telah melakukan koordinasi dengan beberapa OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana untuk

menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi akibat adanya Normalisasi Kali Bringin di Kecamatan Tugu;

2. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pengendalian penyebaran wabah zoonosis PMK, LSD maupun avian influenza melalui upaya-upaya preventif maupun kuratif antara lain melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) bersama pihak-pihak terkait vaksinasi, biosecurity kandang ternak, pengawasan lalu lintas ternak dan pengobatan ternak;
3. Optimalisasi lahan pekarangan, lahan kosong maupun lahan yang belum dimanfaatkan serta mengembangkan budidaya pertanian di lahan sempit;
4. Meningkatkan kapasitas petani maupun kelembagaan petani dengan mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kelompok tani;
5. Melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada generasi petani muda di Kota Semarang dan memberikan wadah komunitas bagi petani muda yang sudah mulai mengembangkan usaha pertaniannya. Selain itu juga internalisasi teknologi baru di bidang pertanian seperti penggunaan IoT (*Internet of Things*) untuk menarik minat generasi muda pada dunia pertanian;
6. Mengembangkan pemasaran produk-produk hasil petani melalui pemasaran online, dan fasilitasi MoU antara petani dengan pelaku usaha BUMP, maupun Koperasi Petani yang dapat bertindak sebagai offtaker yang akan menyerap hasil panen petani;
7. Antisipasi fenomena iklim ekstrim elnino melalui: (a) melakukan pemetaan daerah yang berpotensi mengalami kekeringan untuk kemudian dirumuskan penyelesaian yang tepat, (b) menyiapkan adaptasi kekeringan melalui penerapan teknologi seperti penggunaan benih tahan kering, melakukan buka tutup saluran irigasi sebagai upaya penghematan air irigasi, memperbanyak daerah-daerah pemanenan air di hulu, (c) mendorong petani untuk mengakses KUR yang merupakan asuransi usaha tani untuk mengantisipasi kerugian petani akibat adanya gagal panen;
8. Meningkatkan kesehatan dan mengembalikan kesuburan tanah melalui praktek-praktek pertanian berkelanjutan (pertanian organik, pertanian regeneratif, pertanian terintegrasi) sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian.

28. Urusan Perdagangan

Indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yang belum mencapai target adalah persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif. Kinerja lainnya dilakukan kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dengan melaksanakan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaporkan pada sistem yang terintegrasi secara elektronik serta memenuhi target prosentase alat UTTP bertera-tera ulang.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan perdagangan pada tahun 2024 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator keberhasilan pembangunan bidang perdagangan, sebanyak 8 indikator termasuk kategori sangat tinggi, sedangkan 1 indikator berpredikat Tinggi. Jika disandingkan terhadap pencapaian terhadap target akhir RPJMD, terdapat 5 indikator program yang telah memenuhi target akhir RPJMD dan 3 indikator

akan mencapai target akhir RPJMD, serta 1 Indikator dengan capaian Sangat Rendah pada tahun 2024. Realisasi ekspor tahun ini mengalami peningkatan bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.117 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Perdagangan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	pas ar	22,00	18,00	81,82%	T	28,00	18,00	64,29%	ST		Dinas Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	3,99	9,97	249,87%	ST	3,80	9,97	262,37%	ST		Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	Mil yar doll ar	1.615.736.908,00	1.322.895.045,28	81,88%	ST	1.817.484.281,00	1.322.895.045,28	72,79%	ST		Dinas Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	%	81,00	84,97	104,90%	ST	91,00	84,97	93,37%	ST		Dinas Perdagangan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	bertanda tera sah yang berlaku											
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	%	30,00	30,00	100,00%	ST	60,00	30,00	50,00%	T		Dinas Perdagangan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:
 *) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$
 **) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$
 ***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)
 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman para pedagang tentang aset barang milik daerah;
2. Perkembangan teknologi dan permintaan pasar membuat alat-alat ukur digital dari luar berkembang sangat pesat sehingga menggusur penggunaan alat-alat ukur produksi dalam negeri (timbangan mekanik);
3. Berkurangnya potensi UTTP (meter taksi) yang saat ini tergantikan dengan transaksi berdasarkan aplikasi (online);
4. Kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran di beberapa kota terdapat kendala kurangnya jumlah pengunjung disebabkan beberapa faktor diantaranya cuaca hujan dan bersamaan dengan pameran sejenis di lokasi lain;
5. Kegiatan operasi pasar yang dianggarkan sebesar Rp4.900.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena Dinas Perdagangan tidak mempunyai juklak juknis dan dasar hukum untuk melakukan penjualan langsung barang kebutuhan pokok bersubsidi.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan:

1. Perlunya sosialisasi (pembinaan pedagang) bahwa gedung pasar yang telah dibiayai dengan APBD merupakan tanggung jawab bersama antara pedagang, pengelola pasar dan Pemerintah untuk memelihara bangunan tersebut;
2. Mendorong produsen alat ukur untuk dapat mengikuti perkembangan pasar;
3. Berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi terkait dengan penggunaan meter taksi online sebagai dasar pengenaan tarif;
4. Promosi dagang difokuskan pada kegiatan promosi yang berskala international dan bersinergi dengan pelaku usaha untuk lebih meningkatkan daya saing produk serta memberikan pelatihan bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan kampanye produk dan pelatihan dasar ekspor;

5. Dalam rangka pengendalian harga telah disusun aplikasi untuk melakukan pemantauan harga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah sehingga informasi tentang harga kebutuhan pokok dapat di informasikan secara *realtime*, serta bekerja sama dengan OPD terkait dalam melakukan stabilisasi harga dan penetrasi pasar jika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran.

Kegiatan operasi pasar yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar Rp4.900.000.000 pada tahun berjalan tidak dapat direalisasikan. Hal ini terjadi karena Dinas Perdagangan belum memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), maupun dasar hukum yang memadai untuk melakukan kegiatan penjualan langsung barang kebutuhan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan kegiatan tidak dapat dijalankan secara akuntabel dan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam aspek pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.

Sebagai bentuk penataan kebijakan, dilakukan evaluasi menyeluruh terkait relevansi kegiatan operasi pasar dalam struktur tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi pasar bersubsidi lebih tepat berada pada kewenangan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), karena secara regulatif telah memiliki dasar hukum dari Bappanas serta sesuai dengan tupoksi instansi tersebut yang berkaitan dengan stabilisasi pangan, pengendalian harga, dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan juga telah memiliki pengalaman dan kerangka program melalui Kempling Semar, sehingga dapat menjalankan fungsi operasi pasar dengan lebih terarah. Sejalan dengan evaluasi tersebut, pada proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2025–2029, kegiatan operasi pasar dikeluarkan dari agenda program Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan kemudian memfokuskan kembali perannya pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar berada dalam ruang lingkup kewenangan, yaitu:

1. Pelaksanaan Bazaar Ramadan sebagai agenda rutin tahunan untuk mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga wajar menjelang hari besar keagamaan.
2. Monitoring dan evaluasi (monev) ketersediaan dan stabilitas harga sembako serta LPG, baik secara mandiri maupun melalui tim gabungan yang melibatkan Bulog, BPOM, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, BUMP, dan Dinas Ketahanan Pangan. Kegiatan ini penting untuk memastikan stabilitas pasokan dan mencegah potensi gejolak harga di lapangan.
3. Koordinasi lintas sektor dalam memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar, khususnya pada periode rawan seperti hari besar keagamaan, musim liburan, atau ketika terjadi gangguan pasokan.

Sementara itu, kegiatan operasi pasar melalui skema Gerakan Pasar Murah dengan kegiatan berjudul Kempling Semar secara resmi dialihkan pelaksanaannya kepada Dinas Ketahanan Pangan. Dengan adanya dasar hukum, juklak, dan juknis yang telah tersedia, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah menjadi lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Dinas Ketahanan Pangan melalui program Kempling Semar memiliki mekanisme dan perangkat operasional yang lebih siap, sehingga mampu menjangkau masyarakat secara tepat sasaran. Melalui penataan ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih program antar-OPD, serta setiap kegiatan dapat dijalankan sesuai kewenangannya masing-masing. Dinas Perdagangan dapat kembali fokus pada fungsi pengawasan dan pengendalian perdagangan, sementara Dinas Ketahanan Pangan memperkuat perannya dalam stabilisasi pangan dan pelaksanaan operasi pasar bersubsidi.

29. Urusan Perindustrian

Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2024 termasuk baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan bidang perindustrian, semuanya mempunyai kategori capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 7 indikator pada kategori telah mencapai target akhir RPJMD, dan 1 indikator kategori akan mencapai target akhir RPJMD. Tidak ditemukan adanya usaha keras untuk meraih targetkinerja.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian meneruskan usahanya di tahun kemarin yaitumendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industri yang memadai dapat memberikan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM sebesar 88%.

Hal ini didukung dengan ketercapaian pertambahan IKM sebanyak 26 IKMatau 0,71% dengan target 0,5%. Dengan capaian ini diharapkan usaha terus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah, serta optimalisasi Sentra IKM. Memperluas konektivitas alur pemasaran/penjualan produk sehingga dapat meningkatkan daya saing bagi para pelaku IKM. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan perindustrian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.118 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Perindustrian

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perindustrian
	Persentase tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perindustrian

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Dinas Perindustrian											
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
	Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	%	88,00	96,00	109,09%	ST	100,00	96,00	96,00%	ST	▶	Dinas Perindustrian
	Persentase Pertambahan IKM	%	0,50	0,81	162,00%	ST	0,50	0,81	162,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	%	4,00	6,72	168,00%	ST	4,00	6,72	168,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Informasi Industri	%	0,50	2,31	462,00%	ST	0,50	2,31	462,00%	ST	●	Dinas Perindustrian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***) ● : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$) ▶ : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

▼ : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dijumpai pada penyelenggaraan Urusan Prindustrian yaitu Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) masih tahap pembahasan di Dewan, karena tahun 2024 terjadi masa transisi dewan.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan adalah Tahun 2025 akan diupayakan untuk proses ranperda RPIK menjadi Perda RPIK.

30. Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja RKPD sekretariat daerah pada tahun 2024 termasuk cukup baik, namun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari kategori pencapaian OPD dengan 13 indikator keberhasilan dengan 10 indikator kategori sangat tinggi, 3 indikator kategori tinggi. Jika disandingkan dengan target kinerja RPJMD 10 indikator telah mencapai target akhir dan akan tercapai sebanyak 2 indikator. Namun, diperlukan usaha keras untuk meningkatkan 1 indikator berupa angka indeks pelayanan publik. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada sekretariat daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.119 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Sekretariat Daerah

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	5,00	4,00	80,00%	T	100,00	4,00	4,00%	SR		Bagian Rumah Tangga
	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Administrasi Pembangunan
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Keuangan
	Peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian TU
	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	OPD	43,00	50,00	116,28%	ST	39,00	50,00	128,21%	ST		Bagian Organisasi
	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Pelayanan Publik	%	123,00	110,21	89,60%	T	133,00	110,21	82,86%	ST		Bagian Organisasi
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Kegiatan	9,00	8,00	88,89%	T	9,00	8,00	88,89%	ST		Bagian Kesra

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah dan Kepala Daerah	%	60,00	60,00	100,00%	ST	20,00	60,00	300,00%	ST		Bagian Otda dan Kerjasama
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Tapem
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	Dokumen	1,00	1,00	100,00%	ST	1,00	1,00	100,00%	ST		Bagian Administrasi Pembangunan
	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Pengadaan BJ
	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bagian Perekonomian dan SDA

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dijumpai pada penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip dokumen yang bersifat statis maupun dinamis, sehingga apabila dokumen tersebut dibutuhkan untuk penanganan perkara di Pengadilan menjadi suatu hambatan tersendiri;
2. Kurangnya pemahaman Perangkat terhadap materi maupun administrasi pada proses pengusulan rancangan produk hukum sehingga mengakibatkan lamanya penyusunan produk hukum.

Adapun rencana tindak lanjut atas permasalahan tersebut di antaranya:

1. Melakukan koordinasi dan memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah terkait pentingnya pedoman pengelolaan arsip daerah;
 2. Rutin melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka pengusulan dan pembahasan produk hukum.
31. Sekretariat DPRD

Pencapaian kinerja RKPD sekretariat DPRD pada tahun 2024 termasuk baik. Kondisi ini dilihat dari peningkatan status indikator yang hampir seluruhnya telah mencapai target akhir RPJMD. Berdasarkan target kinerja RPJMD terdapat 5 indikator dalam capaian kinerja, didapatkan 4 indikator kategori sangat tinggi telah mencapai dan 1 indikator kategori tinggi akan tercapai yaitu Jumlah Raperda yang disetujui DPRD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada Sekretariat DPRD disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.120 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Sekretariat DPRD

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Sekretariat DPRD
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Sekretariat DPRD
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Sekretariat DPRD
	persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	Raperda	17,00	10,00	58,82%	R	15,00	10,00	66,67%	ST		Sekretariat DPRD

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:
 *) ST: X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
 **) ST: X>54%; T: 54%≥X>45%; S: 45%≥X>36%; R: 36%≥X>30%; dan SR : X≤30%

***): Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)
▼ : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

▶ : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

Permasalahan yang dijumpai pada penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD diantaranya:

1. Adanya transisi pergantian dan pelantikan anggota DPRD Kota Semarang masa jabatan Tahun 2024 - 2029 sehingga belum terbentuk AKD;
2. Kurangnya kesiapan materi dari pengusul;
3. Padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

Adapun rencana tindak lanjut atas permasalahan tersebut diantaranya:

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kesiapan materi Raperda yang tertunda, koordinasi intensif dengan pengusul, serta penyesuaian dengan perubahan regulasi pusat. Selain itu, perlu dilakukan penataan ulang jadwal sidang yang lebih fleksibel bagi pimpinan dan anggota DPRD, serta meningkatkan koordinasi antara instansi terkait untuk mempercepat pembahasan dan persetujuan Raperda;
2. Mengantisipasi kondisi yang berkembang melalui peningkatan kecermatan dalam proses kegiatan sehingga dapat lebih baik dalam pencapaian tingkat kinerja serapan anggaran;
3. Mengkoordinasikan penjadwalan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

32. Unsur Penunjang Perencanaan

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Perencanaan pada tahun 2024 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan unsur penunjang Perencanaan dengan keseluruhan indikator telah mencapai target akhir RPJMD di angka 100%. Beberapa dukungan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja perencanaan tersebut diantaranya: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada unsur penunjang perencanaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.121 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Perencanaan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	%	100,00	99,66	99,66%	ST	100,00	99,66	99,66%	ST		Bappeda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	100,80	100,80%	ST	100,00	100,80	100,80%	ST		Bappeda
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100,00	100,57	100,57%	ST	100,00	100,57	100,57%	ST		Bappeda
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	98,35	98,35%	ST	100,00	98,35	98,35%	ST		Bappeda

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

33. Unsur Penunjang Keuangan

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Perencanaan pada tahun 2024 cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan unsur penunjang keuangan dengan indicator sangat tinggi, tinggi, dan sangat rendah. Jika disandingkan dengan target RPJMD 6 indikator kategori sangat tinggi telah tercapai, 1 kategori tinggi akan tercapai, dan 1 kategori rendah butuh usaha lebih. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan dengan presentase ketercapaian 20% dari target RPJMD menjadi 100%, khususnya pada program penunjang urusan pemerintahan daerah. Namun, masih perlu peningkatan kinerja pada program pengelolaan keuangan daerah, karena masih jauh dari target akhir RPJMD. Meskipun begitu, pendapatan asli daerah telah mencapai 97% dari target total Rp2,19 triliun baik dari pajak, retribusi, maupun dana transfer. Evaluasi dapat dilakukan dalam skema penerimaan PAD, khususnya optimalisasi sektor retribusi, sebab sebagai besar sektor pendapatan telah memenuhi target.

Pada APBD Perubahan Kota Semarang, pendapatan tercatat sebesar Rp5,4 triliun dan belanja Rp5,7 triliun sehingga ada defisit Rp266 miliar, namun langsung ditutup dengan surplus pembiayaan. Surplus itu didapatkan dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp318 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp52 miliar sehingga terdapat pembiayaan netto Rp266 miliar. Diakuinya, pada APBD Perubahan tahun ini terdapat sejumlah pergeseran disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, terutama menghadapi musim kemarau dampak dari fenomena El Nino. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.122 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Keuangan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	90,73	90,73%	ST	100,00	90,73	90,73%	ST		BPKAD, Bapenda
	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	95,96	95,96%	ST	100,00	95,96	95,96%	ST		BPKAD, Bapenda

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100,00	95,84	95,84%	ST	100,00	95,84	95,84%	ST		BPKAD, Bapenda
	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	%	100,00	98,50	98,50%	ST	100,00	98,50	98,50%	ST		BPKAD, Bapenda
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	1,02	5,01	-291,18%	SR	0,62	5,01	-608,06%	SR		BPKAD
	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	%	100,00	100,53	100,53%	ST	100,00	100,53	100,53%	ST		BPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	%	90,24	100,00	110,82%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10,00	30,53	305,30%	T	10,00	30,53	305,30%	ST		Bapenda

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Dalam pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan di tahun anggaran 2024, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya yaitu :

1. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Semarang menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat yaitu SIPD RI dimana SIPD RI tersebut masih proses pengembangan sehingga seringkali updating menu dan pemeliharaan sistem yang menyebabkan gangguan pada proses pengelolaan keuangan;
2. Adanya temuan BPK terkait Penatausahaan Piutang Retribusi pada SKPD karena belum seluruhnya melaksanakan secara tertib;
3. Beberapa SKPD tidak tepat waktu dan disiplin dalam melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja bulanan dengan BPKAD;
4. Belum optimalnya rekonsiliasi aset tiap SKPD dan penyusunan laporan BMD sehingga menghambat penyusunan laporan keuangan;
5. Belum optimalnya inventarisasi BMD pada tiap SKPD.

6. Tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Reklame disebabkan oleh :
 - a. Di tahun 2024 terdapat pemilihan presiden dan juga kepala daerah, sehingga banyak lokasi pemasangan reklame yang digunakan sebagai tempat untuk memasang alat peraga kampanye. Secara peraturan reklame yang digunakan sebagai alat peraga kampanye dibebaskan dari pajak.
 - b. Terdapat resistensi dari Biro Reklame pada saat penetapan Peraturan Wali Kota mengenai Nilai Sewa Reklame yang didalamnya terdapat kenaikan tarif reklame.
7. Tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Air Tanah disebabkan karena sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengarahkan Masyarakat agar beralih menggunakan air dari PDAM. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah dividen yang disetorkan oleh PDAM dimana di tahun 2023 realisasi dividen dari PDAM sebesar Rp27.819.177.315 sedangkan pada tahun 2024 realisasi dividen PDAM sebesar Rp33.716.451.417 atau meningkat sebesar 21% dibandingkan tahun sebelumnya.
8. Tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Barang dan Hasa Tertentu (PBJT)-Jasa Kesenian dan Hiburan disebabkan karena adanya resistensi akibat kenaikan tarif pada wajib pajak hiburan dan kesenian, yang mana hal ini menjadi pertimbangan dalam pemberian relaksasi bagi wajib pajak kesenian dan hiburan yang menyebabkan penerimaan pajak daerah tidak tercapai
9. Tidak tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh:
 - a. Target Pajak Bumi dan Bangunan yang terlalu tinggi dibanding target dan realisasi Tahun 2023. Target 2023 yaitu Rp619.344.341.443,00 atau naik sekitar 10,90% dan realisasi ditahun 2023 adalah sebesar Rp633.305.126.897,00, dan untuk realisasi di Tahun 2024 hanya sebesar Rp631.745.261.441,00
 - b. Jumlah Wajib Pajak PBB yang tetap namun target bertambah, dengan ketentuan PBB yang sama dengan Tahun 2023
 - c. Keadaan ekonomi dan adanya inflasi secara global, yang mempengaruhi ketidakpastian ekonomi sehingga berpengaruh pada kemampuan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Perusahaan yang menunda pembayaran walaupun sudah mendapatkan pengurangan
 - d. Banyak Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atas NJOP Tahun 2024 dan berdampak pada tidak dibayarnya PBB di Tahun 2024
10. Tidak tercapainya penerimaan BPHTB disebabkan oleh :
 - a. BPHTB bersifat transaksional sehingga apabila belum ada transaksi atau penandatanganan akta maka BPHTB belum dapat dibayarkan.
 - b. adanya resistensi dari masyarakat untuk melakukan transaksi BPHTB dikarenakan adanya kenaikan NJOP yang mendekati dengan harga pasar di tahun 2024.
 - c. Belum tersedianya menu PPJB pada aplikasi e-BPHTB menyebabkan notaris/PPAT belum dapat mendaftarkan transaksi Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) sehingga potensi dari PPJB belum dapat dioptimalkan.
 - d. Wajib Pajak menganggap bahwa PPJB belum sepenuhnya terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan secara utuh sehingga wajib pajak belum menganggap bahwa hal tersebut bukan menjadi kewajiban yang harus segera diselesaikan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, solusi pemecahan dan rencana tindak lanjutnya diantaranya yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kemeterian Dalam Negeri bila terjadi permasalahan dan menyampaikan usulan untuk pengembangan sistem;
2. Melakukan penyesuaian pada Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan menambahkan poin tentang pengakuan piutang retribusi tidak berdasarkan diterbitkannya surat ketetapan akan tetapi juga berdasarkan adanya serah terima layanan atau telah terjadi peristiwa/kejadian pemberian layanan dari Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat dan sosialisasi Peraturan Walikota tersebut kepada SKPD;
3. BPKAD telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD dan telah dilakukan sosialisasi SOP serta melakukan komunikasi intens dengan SKPD agar pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja dapat berjalan dengan lancar;
4. Menjadikan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD sebagai salah satu kriteria dan memiliki bobot dalam penilaian kinerja organisasi pada tahun 2025;
5. Melakukan percepatan tindak lanjut inventarisasi peralatan dan mesin berupa kendaraan dilanjutkan dengan pelaksanaan sensus inventarisasi peralatan dan mesin lainnya pada tahun 2025.
6. Akan dilaksanakan sosialisasi secara persuasif kepada wajib pajak reklame terkait Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Nilai Sewa Reklame atas adanya penyesuaian tarif nilai sewa reklame agar tidak muncul resistensi bagi wajib pajak agar tidak muncul resistensi bagi wajib pajak dan diberikan stimulus kenaikan ketetapan reklame pasca diberlakukannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Nilai Sewa Reklame.
7. Akan melakukan pendataan dan penggalan potensi serta pengawasan terkait pemanfaatan air bawah tanah di lingkungan industri maupun pusat bisnis juga berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP, PDAM dalam kegiatan pengawasan.
8. Akan melakukan sosialisasi, penggalan potensi dan pengawasan lebih mendalam kepada wajib pajak PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan dan memberikan solusi atas kenaikan tarif tersebut agar tetap dapat berusaha dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
 - a. Akan melaksanakan kegiatan konfirmasi tunggakan serta penagihanbekerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum, Kejaksaan maupun BPN guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Juga melakukan pemutakhiran obyek pajak yang belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
 - b. Akan menyiapkan pembaharuan menu dalam e-BPHTB mengenai PPBJ, dan melakukan sosialisasi kepada Notaris dan PPAT terkait pajak terhutang PPJB dimana pembayaran dan kewajibannya dilakukan pada saat ditandatanganinya PPJB secara sekaligus. Juga akan mendorong

BPN untuk mempercepat proses penyerahan sertifikat PTSL dan mendorong Notaris/PPAT untuk mempercepat proses transaksi jual beli.

34. Unsur Penunjang Kepegawaian

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara hasil penilaian mandiri tahun 2024 telah mencapai target RPJMD yaitu di angka 83 dan tahun ini telah mencapai di angka 85,40 dengan aspek penilaian Kualifikasi (21,35), Kompetensi (34,16), Kinerja (25,62), dan Disiplin (4,27). Disisi lain Nilai Sakip BKPP Kota Semarang ditargetkan mencapai angka 82, realisasi yang terjadi hingga akhir tahun 2024 telah mencapai angka 78,21, sehingga diperlukan peningkatan ekstra untuk mencapai angka tersebut mengingat RPJMD berakhir di tahun 2025. Dalam mendukung keberlangsungan tenaga kerja, seluruh jabatan fungsional diharapkan dapat bersertifikat kompetensi, hal ini dibuktikan dengan angka rasio yang masih 77% di tahun 2024.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang kepegawaian pada tahun 2024 tergolong baik, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, dengan rata-rata memiliki ketercapaian tinggi hingga sangat tinggi dan 1 indikator rendah pada rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, hanya 2 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 8 indikator akan mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada unsur penunjang kepegawaian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.123 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Kepegawaian

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BKPP
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BKPP
	Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BKPP

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	258,36	949,70	367,59%	ST	300,00	949,70	316,57%	ST		BKPP
	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	%	100,00	73,00	73,00%	S	100,00	73,00	73,00%	ST		BKPP
	Prosentase akurasi data kepegawaian	%	99,00	99,00	100,00%	ST	99,00	99,00	100,00%	ST		BKPP
	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	%	99,00	99,97	100,98%	ST	99,00	99,97	100,98%	ST		BKPP
	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	%	81,50	99,91	122,59%	ST	82,00	99,91	121,84%	ST		BKPP
	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,98	21,00	100,10%	ST	25,00	21,00	84,00%	ST		BKPP
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	100,00	100,00%	T	100,00	100,00	100,00%	ST		BKPP

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan utama dalam pencapaian program dan kegiatan yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama tahun 2024 adalah :

1. Dinamisnya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus menunggu petunjuk teknis untuk penyelenggaraan kegiatan yang mengakibatkan perubahan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sehingga berdampak pada pencapaian program dan kegiatan;
2. Tantangan Era Digital menyebabkan kebijakan dibidang kepegawaian dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian sehingga perlu berinvestasi dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian yang modern dan aman.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah,

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait aturan dan kebijakan yang berpengaruh terhadap proses kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melalui Konsultasi, Rapat-Rapat Koordinasi baik langsung atau melalui Daring;
2. Memanfaatkan teknologi informasi artificial intelligence dalam pengelolaan kepegawaian dengan mengintegrasikan dengan berbagai instansi terkait untuk memudahkan pelayanan dan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian.

35. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2024 telah menyelenggarakan pengembangan sumber daya aparatur didukung dengan pengembangan kompetensi teknis sebanyak 4 kali dan sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sebanyak 1 kali. Hal ini didukung dengan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mencapai target yaitu 100% (37 orang) dan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebanyak 711 orang di tahun 2024.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 tergolong cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, mempunyai capaian sangat tinggi. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, 1 indikator yang menjadi ukuran kinerja memiliki kinerja akan mencapai target akhir RPJMD.

Tabel 2.124 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	%	45,00	76,00	168,89%	ST	55,00	76,00	138,18%	ST		BKPP

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan utama dalam pencapaian program dan kegiatan yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama tahun 2024 adalah

1. Kualitas SDM Aparatur yang belum optimal hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan tour of duty bagi pegawai;
2. Pemeliharaan sarana prasarana penyelenggaraan diklat masih kurang optimal sehingga masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan diklat.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Kota Semarang melalui peningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan dan dimonitoring secara berkala;
2. Melaksanakan pengecekan berkala terhadap sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat.

36. Unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari aspek Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bisang Ekonomi dan Pembangunan, serta Inovasi dan Teknologi. Dalam pencapaian kegiatan berupa presentase pemenuhan penelitian dan pengembangan pada bidang-bidang terkait telah memenuhi target di akhir tahun 2024 sejumlah 100%. Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2024 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator dimaksud telah mencapai target akhir RPJMD.

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.125 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Brida

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan di tahun anggaran 2024, terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut di antaranya pendokumentasian data inovasi belum terintegrasi, perlu dilengkapi dokumen SOP BRIDA, kurangnya personil dari BRIDA khususnya administrasi sehingga JFT harus membantu tugas administrasi, tidak tersedianya dasar legal inovasi di Kota Semarang, kurang optimalnya JFT dalam melakukan penelitian mandiri.

Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan di tahun anggaran 2024, yaitu sudah disusunnya draft mengenai paying hukum inovasi, mendokumentasikan data inovasi melalui kanal Jelita Kota Semarang, sudah disusunnya draft SOP untuk kelengkapan BRIDA, usulan kebutuhan personil baik ASN maupun tenaga lepas yang beberapa sudah dipenuhi oleh BKPP, khususnya untuk mengampu administrasi sehingga JFT dapat berkonsentrasi dalam tugasnya di penelitian mandiri, senantiasa dilakukan pembaharuan dan updating jurnal riptek agar terakreditasi SINTA dan dapat meningkat statusnya.

37. Unsur Penunjang Pengawasan

Capaian kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2024 mempertahankan level dari tahun sebelumnya yaitu pada level 3 (integrated). Selanjutnya, penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan “Persentase Instansi Pemerintah

(K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) berhasil menyumbangkan 2,82 indeks.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang pengawasan pada tahun 2024 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 6 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya sebanyak 6 indikator semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, seluruhnya telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan pengawasan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.126 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Pengawasan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Inspektorat
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Inspektorat
	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Inspektorat
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	leveling	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST		Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,06	3,15	102,94%	ST	3,00	3,15	105,00%	ST		Inspektorat

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:
*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$
**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

● : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)
▼ : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

▶ : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

Dalam pelaksanaan Unsur Penunjang Pengawasan terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Semakin kompleksnya penugasan pengawasan di Inspektorat Kota Semarang baik yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun penugasan mandatory menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan penugasan;
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas membuat beberapa pegawai harus double job sehingga pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan kurang optimal;
3. Kurangnya kompetensi SDM di bidang tertentu (misalnya : bidang teknis konstruksi).

Rencana tindak lanjut terhadap hambatan serta permasalahan yang ada, adalah Inspektorat Kota Semarang sudah melakukan pengusulan penambahan pegawai CPNS/PPPK Auditor/PPUPD dan penambahan JFU ke BKPP, serta mengikutkan SDM untuk diklat di bidang teknis sesuai kebutuhan.

38. Unsur Kewilayahan

Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2024 pada unsur kewilayahan baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 4 indikator kategori telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 3 indikator akan mencapai target akhir RPJMD dengan angka diatas 90%.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.127 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Kewilayahan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	99,06	99,06%	ST	100,00	99,06	99,06%	ST		16 Kecamatan
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		16 Kecamatan
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	99,06	99,06%	ST	100,00	99,06	99,06%	ST		16 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	94,00	95,68	101,79%	ST	91,06	95,68	105,07%	ST		16 Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaa n Masyarakat Kelurahan	%	100,00	99,38	99,38%	ST	96,38	99,38	103,11%	ST		16 Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25,00	21,01	84,04%	T	10,00	21,01	210,10%	ST		16 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	%	98,00	91,31	93,17%	ST	90,00	91,31	101,46%	ST		16 Kecamatan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Abrasi di wilayah pesisir pantai kelurahan Mangunharjo, Mangkang Kulon dan Mangkang Wetan menyebabkan angka serapan PBB tidak maksimal, realisasi hanya sebesar91.42% dari target 100%;
2. Di Kecamatan Tembalang Kondisi eksisting lebar jalan yang kurang memadai mengakibatkan kemacetan pada beberapa ruas jalan di jam sibuk pagi dan sore;
3. Masih terdapat beberapa wilayah yang sering tergenang banjir seperti wilayah Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Bulu Lor dan Kelurahan Kuningan.
4. Adanya kemiskinan ekstrim di Kecamatan Semarang Timur, khususnya Kelurahan Kemijen dan Kelurahan Rejosari serta di Kecamatan Pedurungan khususnya Kelurahan Muktiharjo Kidul, Tlogosari Wetan, dan Palebon;
5. Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan Semarang Tengah dengan OPD teknis terkait (Satpol PP)dalam penertiban PKL ditrotoar maupun badan jalan;
6. Adanya angka stunting pada anak di Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Pedurungan;
7. Realisasi fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuandan perlindungan anak kurang optimal.
8. Belum optimalnya pendapatan PBB di Kecamatan Mijen khususnya dari tanah ex bengkok, yang disebabkan oleh tingginya nilai NJOP sehingga tidak ada penyewa tanah ex bengkok.
9. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih adanya warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, terutama di pinggir jalan dan sungai atau saluran.
10. Belum optimalnya jumlah pompa yang ada di Kecamatan Gayamsari yang bertujuan untuk penanganan banjir

11. Maraknya fenomena klitih/ kreak yang juga ada pada wilayah kecamatan gajahmungkur. klitih/ kreak tidak hanya menyasar pada kelompok tertentu, tetapi juga menyasar pada masyarakat umum secara acak. selain itu permasalahan lain yang dihadapi ialah kondisi geografis kecamatan gajahmungkur yang berbukit/faktor alam sehingga ketika musim hujan saat hujan turun sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin sering mengakibatkan pohon tumbang, hingga menutup jalan raya. sehingga mengakibatkan macet dan lalu lintas terhambat.
12. Tidak semua Kelurahan mampu melaksanakan kegiatan *Operation Maintenance* (OM) sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan perawatan yang dibutuhkan kantor kelurahan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Pendekatan personal/sosialisasi optimalisasi PBB ke warga masyarakat dan kegiatan jemput bola pembayaran PBB ke wilayah.
2. Usulan kepada dinas terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan pelebaran jalan;
3. Mengusulkan kepada dinas terkait untuk peninggian jalan yang masih menjadi langganan genangan air.
4. Pelaksanaan Monitoring bagi Warga Miskin guna Penurunan Jumlah Kemiskinan Ekstrem Di Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Pedurungan;
5. PKL yang ditata dengan baik berpeluang menjadi tujuan wisata kuliner baru;
6. Kolaborasi dengan stakeholder (perusahaan-perusahaan, RS) dan partisipasi donasi karyawan/karyawati se-kecamatan untuk penurunan angka stunting pada anak Di Kecamatan Kota Semarang.
7. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai PUG melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Kelurahan maupun Kecamatan.
8. Melakukan inventarisasi aset yang ada dari petani/lelang garap, melakukan koordinasi dengan Bapenda dan BPKAD untuk segera memberikan aturan dan mekanisme garap/lelang yang terjangkau oleh petani/penggarap, serta memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya petani/penggarap untuk dapat mentaati aturan yang berlaku.
9. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang sampah dan dampaknya serta mengusulkan penambahan depo sampah dilahan milik pemerintah yang memungkinkan;
10. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis untuk pemenuhan pompa di Wilayah Kecamatan Gayamsari
11. Kecamatan gajahmungkur bekerja sama dengan kepolisian/pihak yang berwajib untuk ikut aktif menghentikan segala bentuk aktivitas gangster yang mengganggu ketenangan masyarakat, tindakan yang sudah dilakukan ialah diadakannya patroli malam hari di wilayah kecamatan gajahmungkur bekerja sama dengan polsek dan koramil setempat. sedangkan untuk mengatasi permasalahan pohon tumbang di wilayah kecamatan gajahmungkur dibutuhkan kerjasama banyak pihak. Selama ini, dengan bekerjasama dengan dinas terkait sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pemangkasan pohon, kita juga usulkan untuk memeriksa batang pohon, yaitu pemerintah dan masyarakat bersama-sama memeriksa

- pohon. engurangan risiko angin ini antara lain dengan jalan memeriksa, memonitoring, dan meremajakan pohon
12. Pelatihan dan workshop untuk pegawai kecamatan dan kelurahan tentang manajemen pemeliharaan OM (Operation Maintenance) terkait tata cara pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapinya.

39. Unsur Kesatuan Bangsa Dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan melalui Indeks Demokrasi (89,72), Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) (84,34), Indeks Pengamalan Pancasila 3,78, Indeks Kebebasan Sipil 90,23, Indeks Kinerja Ormas 65,05, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama 83,86. Selain itu, persentase partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada tahun 2024 sebesar 71,25%.

Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2024 pada unsur kewilayahan sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, seluruh indikator telah mencapai target akhir RPJMD.Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2024 pada Fungsi Pengawasan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.128 Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	93,33	100,00	107,15%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	90,04	100,00	111,06%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2024	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2024	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pengamalan Pancasila	Indeks	2,20	3,78	171,82%	ST	2,00	3,78	189,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Kebebasan Sipil	%	66,00	90,23	136,71%	ST	70,00	90,23	128,90%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	%	70,00	71,25	101,79%	ST	70,00	71,25	101,79%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	58,00	65,05	112,16%	ST	60,00	65,05	108,42%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Dan PengembanganKe tahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	indeks kerukunan umat beragama	Indeks	71,00	83,86	118,11%	ST	72,00	83,86	116,47%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbud hankam	%	83,00	95,45	115,00%	ST	85,00	95,45	112,29%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tahun 2023 masih menemui beberapa permasalahan, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi terkait komponen-komponen pengungkit Indeks Demokrasi ke stakeholder terkait, misalnya terkait penganggaran di bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang belum mencapai batas minimal yang telah ditentukan;
2. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang tergolong rendah, yaitu 40,19%;
3. Kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang belum berkelanjutan sehingga kurang berdampak ke masyarakat luas;
4. Meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada aksi kriminalitas;
5. Masih adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh gangster di wilayah Kota Semarang.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi ke stakeholder terkait tentang komposit-komposit Indeks Demokrasi yang dapat diintervensi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Melaksanakan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas secara eksklusif serta memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat;
3. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang berfokus pada keberlanjutan program dan kegiatan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang melakukan inovasi pendidikan wawasan kebangsaan yang lebih menarik generasi muda, yaitu dengan mengkombinasikan pendidikan secara indoor dan outdoor, misalnya dengan event Fun Game Kebangsaan. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang juga menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Semarang guna membentuk kader-kader bela negara di wilayah masing-masing yang diwadahi dengan kegiatan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Dengan kegiatan dimaksud, diharapkan para kader dapat menyebarkan nilai-nilai bela negara di wilayahnya masing-masing dan memperkuat peran keluarga sebagai pondasi awal pembentukan karakter generasi muda;
5. Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku tertinggi wilayah (Forkopimda), masyarakat, perangkat daerah, maupun dengan instansi vertikal yang ada di daerah melalui Rapat-rapat Forkopimda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini Daerah, serta Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Semarang.

Dari sejumlah 299 indikator program yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, jika dibandingkan terhadap target RKPD pada tahun 2024 terdapat 277 indikator atau sebesar 92,64% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi ($90\% < X$), terdapat 15 indikator atau sebesar 5,02% dengan predikat kinerja Tinggi ($75\% < X \leq 90\%$), terdapat 1 indikator atau sebesar 0,33% dengan predikat kinerja Sedang ($65\% < X \leq 75\%$), terdapat 1 indikator atau sebesar 0,33% dengan predikat kinerja Rendah ($50\% < X \leq 65\%$), dan terdapat 5 indikator atau sebesar 1,67% dengan predikat kinerja Sangat Rendah ($X \leq 50\%$).

Sedangkan indikator program sebagai alat ukur keberhasilan, jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026), dari sejumlah 299

indikator program yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, jika dibandingkan terhadap target RPJMD 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 terdapat 286 indikator atau sebesar 95,65% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi ($90\% < X$), 2 indikator atau sebesar 0,67% dengan predikat Tinggi ($90 \geq X > 75$), dan terdapat 11 indikator atau sebesar 3,68% dengan predikat kinerja Sangat Rendah ($X \leq 50\%$).

Indikator kinerja dengan capaian Sangat Rendah terhadap target RKPD tahun 2024 tersebut adalah:

- a. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran;
- b. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran;
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan);
- d. Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- e. Persentase SILPA terhadap APBD.

2.2. Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Terhadap Target RKPD 2024 dan Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)

Secara makro, progres capaian 11 indikator tujuan dan 38 indikator sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2024 terhadap target tahun 2024, diperoleh rata-rata capaian untuk indikator tujuan sebesar 110,40% dengan predikat Sangat Tinggi (ST), dan rata rata capaian untuk 38 indikator sasaran sebesar 110,73% dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Jika dibandingkan terhadap target tahun 2024, seluruh indikator tujuan atau sebesar 100% termasuk pada kategori kinerja Sangat Tinggi (ST). Sedangkan dari sebanyak 38 indikator sasaran, terdapat 37 indikator atau sebesar 97,37% memiliki kinerja dengan kategori kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator atau sebesar 2,63% kinerja dengan kategori kinerja Sangat Rendah (R) yaitu nilai ekspor.

Sedangkan progres capaian 11 indikator tujuan dan 38 indikator sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD, diperoleh rata-rata capaian untuk indikator tujuan sebesar 102,50% dengan predikat Sangat Tinggi (ST), dan rata rata capaian untuk 38 indikator sasaran sebesar 103,86% dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD tahun 2026, seluruh indikator tujuan atau sebesar 100% termasuk pada kategori kinerja Sangat Tinggi (ST). Sedangkan dari sebanyak 38 indikator sasaran, 36 (94,74%) indikator sudah tercapai, 1 (2,63%) indikator akan tercapai, dan 1 (2,63%) indikator yang berstatus Perlu Upaya Keras yaitu Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet.

Rendahnya capaian nilai ekspor sebesar US\$ 1.322.895.045,28 dari target kinerja RKPD tahun 2024 US\$ 3.539.299.867,06 disebabkan diantaranya karena harga bahan baku beberapa komoditi meningkat sehingga menyebabkan beberapa komoditi mengalami kenaikan harga dan menyebabkan penurunan volume permintaan ekspor.

Rendahnya capaian pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet sebesar 2 titik dari target 0 titik disebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi di jalan mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas. Lokasi rawan kemacetan pada tahun 2024 tercatat 3 lokasi yaitu Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Jl. Siliwangi. Sejauh ini Pemerintah Kota Semarang telah berupaya melakukan penanganan di ketiga ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan lalu lintas meski belum optimal menurunkan kepadatan. Dan karena ketiga ruas jalan dimaksud termasuk ke dalam kewenangan Provinsi dan Nasional sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melakukan penanganan.

Berikut disajikan secara rinci capaian dari 11 indikator tujuan dan 38 indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2024.

Tabel 2.129 Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

Tujuan		Indikator Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
						2024	2024	%	2026	%
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			poin	84,40 - 86,00	85,24	101,00%	84,80 - 85,20	100,52%
		1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,60	15,57	99,81%	15,64	99,55%
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	11,05	104,15%	10,65	103,76%
				Angka Harapan Hidup	Tahun	77,54	78,23	100,89%	77,62	100,79%
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal			Persen	61,05	86,10	141,03%	72,50	118,76%
		2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	61,05	86,10	141,03%	72,50	118,76%
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka			Persen	6,50 – 7,60	5,82	110,46%	5,40 – 5,10	101,36%
		3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	Persen	94,29	95,90	101,71%	96,68	99,19%
		4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,15	69,88	99,62%	70,00	99,83%
				Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	78,00	79,06	101,36%	80,00	98,83%
		Tingkat kemiskinan			Persen	3,82 – 4,00	4,03	99,25%	3,86 – 3,74	92,25%
		5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,20 - 15,50	9,68	137,55%	14,60 - 14,90	133.70%
		6	Terwujudnya pemerataaan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	Persen	99,87	100,00	100,13%	100,00	100,00%
3	Meningkatny	Laju Pertumbuhan Ekonomi			ST	5,70-6,50	5,62	98,60%	5,90-6,30	95,25%

Tujuan		Indikator Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
						2024	2024	%	2026	%
	a pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing	7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$	3.539.299.867,06	1.322.895.045,28	37,38%	3.828.106.736,21	34,56%
				Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persen	6,00	13,13	200,00%	6,00	200,00%
		8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	% (Juta Rupiah)	7% (27.362.089 juta Rp)	10,03% (28.261.147 juta Rp)	143,29%	7 (31.326.856 juta Rp)	143,29%
				PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	104,12	156,57	150,37%	105,59	148,28%
				Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persen	28,84	29,70	102,98%	28,98	102,48%
				Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,72	28,35	98,71%	28,76	98,57%
4	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Demokrasi			Nilai	72,80	89,72	123,24%	73,60	121,90%
		9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74,00	84,34	113,97%	75,00	112,45%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Nilai Indeks	95,80	96,37	100,59%	95,96	100,43%
		10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks	75,20	73,86	98,22%	75,50	97,83%
		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban			Persen	9,90	5,96	139,80%	8,85	132,66%

Tujuan		Indikator Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
						2024	2024	%	2026	%
		11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.251	1.221	102,40%	1.176	96,17%
5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Persen	67,18	59,41	88,43%	67,52	87,99%
		12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	50,01	45,56	91,10%	53,00	85,96%
				Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	74,00	86,90	117,43%	96,20	90,33%
				Penurunan Emisi CO2	Ton CO2e	168.864,53	381.109,16	200,00%	198.965,07	191,55%
				Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	71,00	71,34	100,48%	69,00	103,39%
				Persentase ruang terbuka hijau	Persen	45,35	44,48	99,08%	45,83	97,05%
		Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur			Nilai	80,62	91,61	113,63%	85,00	107,78%
		13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	73,00	73,70	101,96%	79,00	93,29%
				Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	Persen	79,00	78,20	98,99%	84,00	93,10%
				Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	3,19	3,29	96,87%	3,00	90,33%
		14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	98,00	99,91	101,95%	100,00	99,91%
				Persentase rumah layak huni	Persen	99,42	99,31	99,89%	100,00	99,31%
		15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persen	87,00	99,08	112,74%	91,00	107,78%

Tujuan		Indikator Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
						2024	2024	%	2026	%
		16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	109,00	99,41	108,80%	105,00	105,32%
		17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5876	0,88	149,76%	0,60	146,67%
				Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	Jumlah	2	2	100,00%	0	0,00%
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai Indeks	76,00	89,21	117,38%	79,20	112,64%
		18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	>76,00/ BB	73,12/ BB	96,21%	>80/A	91,40%
				Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00%	WTP	100,00%
		19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,50	85,99	102,98%	85,00	101,16%
				Indeks SPBE	Skor 0-5	4,30	3,95	91,86%	5,00	79,00%
				Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,47/ ST	3,53/ ST	101,73%	>3,49/ ST	101,15%
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	88,35	90,59	102,54%	90	100,66%

Sumber: Data Bappeda Kota Semarang (diolah), 2025

Keterangan:

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR : $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 54\%$; T: $54\% \geq X > 45\%$; S: $45\% \geq X > 36\%$; R: $36\% \geq X > 30\%$; dan SR : $X \leq 30\%$

***)  : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X > 60\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X \leq 60\%$)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Semarang secara umum dapat terpilah dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; pembangunan yang masih diprioritaskan di wilayah tertentu

sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah; daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat; masih perlunya upaya dalam rangka pemenuhan kedaulatan pangan; pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan; serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang belum optimal.

2.5.1 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024

Permasalahan pembangunan di Kota Semarang diidentifikasi melalui data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Semarang. Yang menjadi catatan, gambaran umum di Kota Semarang tidak semua mencerminkan penurunan capaian namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan di Kota Semarang dengan dasar bahwa Kota Semarang adalah kota metropolitan yang tidak lagi mentolerir kondisi-kondisi minor seperti halnya tingkat kemiskinan, permukiman kumuh dan kondisi minor lainnya, apalagi pasca pandemi menunjukkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, meskipun posisi Kota Semarang saat ini untuk beberapa indikator makro ekonomi masih diatas rata-rata Jawa Tengah bahkan tingkat nasional.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kualitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:
Kesenjangan antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja. Pencari kerja kurang berminat terhadap lowongan kerja yang telah disebarluaskan karena kurang sesuai dengan latar belakang pencari kerja. Selain itu, tenaga kerja dari luar Kota Semarang mengisi lowongan kerja yang tersedia.
- b. Tingkat perlindungan perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:
Tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak dan perempuan. Di sisi lain, hal ini juga karena besarnya kemauan dan kesadaran warga Kota Semarang untuk melaporkan adanya kekerasan. Selain itu, masih kurangnya kegiatan untuk menunjang pemberdayaan perempuan dalam hal peningkatan kapasitas perempuan di posisi pengambil keputusan.
- c. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:
Masih banyak keluarga yang rentan miskin yaitu mudah jatuh miskin akibat krisis ekonomi, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Ketimpangan sosial dan akses yang tidak merata terhadap layanan dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah kumuh dengan sanitasi buruk dan perumahan tidak layak.

Infrastruktur yang tidak memadai dapat menurunkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

- d. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:

Kualitas pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan inklusi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), masih belum optimal, terutama dalam hal mutu layanan dasar dan kualitas pendidikan. Masih terdapat anak-anak yang putus sekolah serta pendidikan nonformal yang belum berjalan maksimal. Di sisi lain, sarana dan prasarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai. Layanan kesehatan di berbagai tingkatan masih perlu ditingkatkan, ditambah dengan masih adanya kasus balita stunting. Tingkat pengangguran yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan adanya persoalan ketenagakerjaan. Selain itu, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan juga masih perlu diperkuat.

- e. Pembangunan yang masih diprioritaskan di wilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah, dengan akar permasalahan yaitu:

Konektivitas antar wilayah belum sepenuhnya terwujud, yang berdampak pada keterbatasan akses dan pergerakan antar kawasan. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), terutama dari aspek kualitas air dan tutupan lahan, menunjukkan perlunya perhatian terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, waktu tempuh kendaraan yang masih tinggi mencerminkan potensi kemacetan di beberapa titik. Peningkatan kawasan strategis dan infrastruktur wilayah juga masih diperlukan untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan.

- f. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu:

Keterlibatan UMKM dalam pengembangan program ekonomi kreatif masih belum optimal, termasuk dalam aspek penguatan kelembagaan dan pemenuhan standar ekspor. Akses terhadap permodalan dan pemasaran produk koperasi serta IKM juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, daya saing UMKM dalam menembus pasar ekspor masih tergolong rendah. Pengembangan objek dan daya tarik wisata, termasuk kerjasama destinasi MICE, juga memerlukan optimalisasi lebih lanjut. Sementara itu, akses pemasaran bagi pelaku usaha mikro masih terbatas dan dominan menggunakan metode konvensional, sehingga perlu inovasi berbasis digital untuk memperluas jangkauan pasar.

- g. Masih perlunya upaya dalam rangka pemenuhan kedaulatan pangan, dengan akar permasalahan yaitu:

Akses terhadap pangan masih belum sepenuhnya memadai, dan terdapat ketergantungan yang tinggi pada jenis bahan pangan tertentu. Pemanfaatan lahan tidak produktif untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga juga belum optimal. Perlu dilakukan perluasan dan keberlanjutan program urban farming dengan mengoptimalkan potensi wilayah yang tersedia. Di sisi lain, perubahan iklim seperti peningkatan suhu dan penurunan curah hujan telah mengganggu musim tanam, menyebabkan keterlambatan penanaman, penurunan luas tanam, serta risiko gagal panen. Dampaknya, hasil panen menjadi lebih kecil, kualitasnya menurun, dan cita rasanya kurang baik.

Kondisi gagal panen ini berkontribusi pada berkurangnya pasokan pangan, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga dan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan pangan.

- h. Masih perlunya upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dengan akar permasalahan yaitu:

Cuaca ekstrem yang mengakibatkan debit air kurang, perubahan suhu ekstrim antara siang dan malam sehingga menyebabkan banyak kematian pada ikan, banyak timbul penyakit ikan karena stres pada ikan. Cuaca ekstrem juga menyebabkan hasil tangkapan ikan oleh nelayan menurun sehingga pendapatan nelayan juga menurun.

- i. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan, dengan akar masalah:

Permasalahan bencana di berbagai wilayah masih menjadi tantangan serius, ditandai oleh banjir dan rob yang kerap melanda kawasan pesisir dan dataran rendah, serta tanah longsor di daerah perbukitan yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan membahayakan keselamatan warga. Cuaca ekstrem juga menyebabkan pohon tumbang yang memperparah kerusakan. Minimnya sistem peringatan dini di banyak daerah menyebabkan keterlambatan informasi dan evakuasi, sehingga meningkatkan risiko dan dampak bencana. Penanganan bencana juga belum optimal akibat lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Upaya mitigasi masih terbatas, baik dalam bentuk perencanaan, edukasi masyarakat, maupun pembangunan infrastruktur yang tangguh. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sistem peringatan dini, koordinasi respons yang lebih efektif, serta strategi pengurangan risiko bencana secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat ketahanan wilayah dan meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.

- j. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang belum optimal, dengan akar permasalahan yaitu:

Akses, kemudahan, serta sarana dan prasarana pelayanan publik masih belum optimal. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga memerlukan peningkatan kualitas, terutama dalam menghadapi regulasi yang berpengaruh signifikan terhadap struktur keuangan daerah. Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan harus lebih berkualitas dan sesuai dengan ketentuan serta didukung oleh pengawasan internal yang efektif. Upaya menekan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat juga penting dilakukan guna menjaga kondisi yang kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.

2.5.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Semarang serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kemiskinan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:

Menanggulangi dan menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, dilakukan melalui berbagai pendekatan terpadu yang mencakup penyediaan akses terhadap kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, peningkatan perlindungan sosial juga menjadi fokus utama, yang diwujudkan melalui perbaikan kualitas permukiman, pemberian dukungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta pemenuhan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi sosial (rehabsos) agar lebih memadai dan berfungsi optimal. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat miskin menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan kemiskinan, yang dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan sosial di tingkat lokal serta pengembangan kampung tematik sebagai wadah bagi peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

2. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:

Meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), baik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, maupun pendidikan non-formal melalui program kesetaraan. Di bidang kesehatan, peningkatan layanan terus diupayakan melalui penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan lingkungan, serta penguatan upaya promotif dan preventif. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanganan stunting, serta penurunan angka *unmet need* dan kehamilan pada usia di bawah 20 tahun juga menjadi prioritas. Dalam rangka menurunkan angka pengangguran, langkah strategis yang diambil meliputi peningkatan kesempatan kerja dan perluasan jaringan ketenagakerjaan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja melalui program sertifikasi dan penempatan tenaga kerja. Di sisi lain, peningkatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dilakukan melalui penguatan pemberdayaan gender dan peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan, guna menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing.

3. Kesenjangan wilayah, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: Membangun konektivitas antar pusat-pusat ekonomi dilakukan melalui serangkaian strategi yang terintegrasi, yang mencakup peningkatan aksesibilitas wilayah menuju dan antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pengurangan titik-titik dan simpul kemacetan yang berpotensi menghambat mobilitas barang dan orang, serta penguatan kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Hal ini dapat mendukung efisiensi logistik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing regional secara keseluruhan.

4. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, di prioritaskan pada upaya-upaya untuk:

Meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah dilakukan melalui berbagai upaya strategis, antara lain dengan mendorong peningkatan investasi dan perluasan jaringan distribusi produk, penguatan sarana

pendukung usaha seperti pengurusan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta penyelenggaraan event yang secara langsung memberi manfaat bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Di sektor pariwisata, langkah-langkah pengembangan dan promosi destinasi wisata serta pelestarian seni budaya lokal diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, penguatan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan industri kecil menengah (IKM) dilakukan melalui peningkatan akses permodalan, pengembangan strategi *branding*, dan perluasan pasar. Seluruh upaya ini juga diarahkan untuk mendorong produk-produk UMKM agar mampu memasuki dan bersaing di pasar internasional secara berkelanjutan.

5. Kedaulatan pangan dan energi, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan secara menyeluruh, yang difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pangan lokal melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produktivitas petani, serta dukungan terhadap penggunaan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Di samping itu, penguatan sistem ketersediaan dan distribusi pangan juga menjadi prioritas utama guna menjamin kelancaran suplai dari sentra produksi ke konsumen akhir, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses logistik. Upaya ini turut didukung dengan perluasan dan keberlanjutan program urban farming yang memanfaatkan potensi lahan pekarangan, lahan tidur, maupun ruang terbuka kota sebagai sumber pangan alternatif, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan skala rumah tangga. Selain itu, penanganan terhadap daerah rawan pangan juga terus diintensifkan melalui identifikasi wilayah rentan, intervensi program pangan bersubsidi, serta penguatan cadangan pangan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan dalam situasi darurat dan menghadapi fluktuasi harga pasar.
6. Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
Menanggulangi kejadian bencana di Kota Semarang dilaksanakan secara komprehensif melalui berbagai pendekatan yang mencakup penanganan langsung terhadap bencana yang kerap terjadi, seperti rob, banjir, dan tanah longsor, dengan memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana, seperti pembangunan sistem drainase terpadu, tanggul penahan air, serta revitalisasi kawasan rawan bencana. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana juga menjadi fokus utama, baik melalui pembangunan fisik yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan konstruksi tahan bencana, maupun melalui pendekatan non-fisik berupa edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada masyarakat agar lebih tanggap dan siap dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan turut diintegrasikan ke dalam strategi mitigasi bencana, salah satunya melalui pengelolaan dan pengolahan sampah secara lebih efisien, termasuk inovasi pemanfaatan sampah menjadi sumber energi terbarukan atau diolah menjadi produk bernilai ekonomi,

- sehingga tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular yang berdampak positif bagi masyarakat.
7. Tata kelola pemerintahan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
Meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kota Semarang diarahkan pada pembentukan birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif melalui upaya penguatan kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi dan integritas, sebagaimana tercermin dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN. Selain itu, upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, demokratis, dan taat hukum juga menjadi bagian penting dari tata kelola yang baik, melalui penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Peningkatan kinerja pemerintah daerah juga diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan berbasis digital (*smart city*), yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta memperkuat akuntabilitas kinerja dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan. Di sisi lain, pelayanan publik terus dimantapkan dengan fokus pada peningkatan mutu layanan yang mudah diakses, transparan, dan efisien, guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta mendukung kemudahan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

2.4. Inovasi Daerah

Inovasi merupakan elemen kunci yang memainkan peran strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi motor penggerak utama dalam mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah secara lebih efisien dan berdampak luas. Melalui penerapan inovasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran, maupun teknologi dapat dilakukan secara lebih efektif, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya budaya kerja yang cerdas, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Kota Semarang telah mengintegrasikan berbagai upaya inovatif ini ke dalam kerangka kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa), sebagai sebuah ekosistem kolaboratif yang mendorong sinergi antar perangkat daerah, pemangku kepentingan, dunia usaha, serta masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi inovasi. Melalui sistem ini, setiap inovasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Adapun berbagai bentuk inovasi yang saat ini sedang dikembangkan maupun yang telah berhasil diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.130 Inovasi Daerah Yang Telah Dilaksanakan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
1	LOPISSEMAR	Lopissemar merupakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya ASN agar dapat berperan dalam pemberantasan gratifikasi dengan cara melaporkan setiap pemberian gratifikasi yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung
2	DHAYOH-E	Dengan menggunakan sistem penerimaan tamu berbasis Website/aplikasi kita dapat mendapatkan informasi lebih awal mengenai tamu yang akan datang baik kualitas, kuantitas maupun substansi yang akan dibicarakan dan waktu saat penerimaan, implikasinya kita lebih siap menerima tamu tersebut dengan menghadirkan narasumber yang sesuai topik- topik tersebut, bagi tamu yang akan datang bisa membuka aplikasi tersebut bisa membuka aplikasi kapan saja dan dimana saja dan lebih cepat. Pada tahun 2023 terdapat kebaharuan inovasi yaitu dengan penambahan fitur pemberitahuan melalui whatsapp sehingga pemohon tamu dan penerima tamu lebih mudah dalam menerima dan mengirim verifikasi permohonan tamu dan penambahan fitur upload foto.
3	IJOLKE (rejekI Jajan dOLan ning Kota sEmarang)	IJOLKE (rejekI Jajan dOLan ning Kota sEmarang) merupakan program yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang dalam bentuk memberikan penghargaan bagi masyarakat yang telah berbelanja baik di Hotel, Restoran maupun Hiburan yang ada di Kota Semarang.
4	QRIS-E PAKDE (QRIS PAJAK DAERAH DAN E-SPPT PBB)	QRIS untuk pembayaran pajak daerah dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara elektronik.
5	SEMARisk	Sistem Edukasi Monitoring dan Pelaporan Informasi Kebencanaan. Aplikasi yang menyediakan informasi seputar kebencanaan di Kota Semarang, seperti peta dasar, peta tematik, peta bencana banjir, peta bencana rob, peta bencana longsor, peta bencana kekeringan dan peta jaringan.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
6	ORIENTASI NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN (FUN GAME)	Kegiatan bernama “FUN GAMES PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA & WAWASAN KEBANGSAAN BAGI SISWA DI KOTA SEMARANG” dalam bentuk Fun Game yang dibuat dengan semangat kompetisi dipadukan dengan pengenalan ikon yang ada di kota Semarang Serta Sejarah. Tema inovasi ini adalah “Bangga Semarang, Bangga Indonesia”. Kegiatan Ditujuka Kepada Siswa/ Siswi SMP, SMA dan SMK Kota Semarang
7	Sistem Jalan Lingkungan	Sistem Informasi Jalan Lingkungan di Kota Semarang disusun untuk melakukan identifikasi karakteristik infrastruktur jalan lingkungan di Kota Semarang, dengan sistem ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi jalan lingkungan beserta perlengkapannya serta sebarannya di Kota semarang yang disajikan secara rinci berupa data deskripsi narasi, tabular/tabel, visual dan juga spasial selain itu sistem ini juga memberikan informasi detail mengenai kondisi dan informasi detail infrastruktur jalan lingkungan lainnya beserta perlengkapan jalan di Kota Semarang serta Aksi perubahan ini disusun dalam rangka menjawab tantangan dan kendala yang sering dihadapi oleh Disperkim dalam penanganan sarpras lingkungan khususnya jalan lingkungan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan jalan lingkungan yang efektif, efisien dan tepat sasaran berbasis spasial melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis web dan Android.
8	SIKEWAN	Sistem Informasi Kesehatan Hewan (Sikewan) Sistem Komunikasi dan Penyampaian Informasi untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sistem ini dapat mendukung terlaksananya pelayanan publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
9	TANDUR GULA ASEM	Tandur Gula Asem (pelesTARIA n DURian ungGUL loKAl KotA SEMarang) Terkait keberadaan beberapa variasi genetik dari tumbuhan lokal yang belum diperhatikan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		dan dilestarikan oleh Pemkot Semarang, sehingga beberapa jenis cenderung sudah sangat langka atau bahkan sudah punah. Seharusnya Dinas Pertanian mengembangbiakan/ membudidayakan untuk mempertahankan plasma nutfah tanaman asli Semarang. Sebagai contoh adanya durian Kholil dan Drian Malika yang menjadi ciri khas durian Semarang. Untuk meningkatkan kualitas buah-buahan di Kota Semarang diperlukan teknologi budi daya dan penanganan pascapanen yang tepat, sehingga produksi dan mutu menjadi lebih baik.
10	SIUMPAN (Sistem Informasi Spasial UMKM Perikanan Kota Semarang	Pemanfaatan data spasial hingga saat ini telah menjangkau hampir di semua sektor kehidupan, sehingga lebih memudahkan pengguna dalam memahami dan memanfaatkan semua jenis informasi yang ada. Semakin pesatnya perkembangan teknologi spasial dan dukungan sistem berbasis internet (online) mengintegrasikan informasi spasial dalam sebuah platform sistem spasial berbasis online (WebGIS), sehingga lebih memudahkan pengguna dalam mengaplikasikan di berbagai sektor
11	ARMADA TRANS SEMARANG RAMAH PENYANDANG DISABILITAS	Trans Semarang merupakan salah satu layanan transportasi umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan banyak digunakan oleh warga kota Semarang dan sekitarnya dalam bepergian dikarenakan tarif yang relatif terjangkau, ketepatan waktu, serta armadanya yang telah berpendingin udara.
12	TERANG GAN	Pelayanan TERANG GAN berupa sistem pelayanan berbasis online. Pelayanan ini memberikan kemudahan kepada konsumen terkait permohonan layanan tera ulang serta memberikan kemudahan kepada konsumen dalam hal komunikasi secara online
13	Aplikasi GIS PASAR	Dinas Perdagangan Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan menyediakan Aplikasi GIS sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang untuk menata kegiatan perdagangan di wilayah Kota Semarang.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
14	SEMARANG BUSINESS FORUM	Semarang Business Forum (SemBiz) merupakan kegiatan yang diadakan untuk para calon investor mendapatkan informasi yang diinginkan mengenai tempat/lahan, perizinan, dan informasi lainnya yang dapat menunjang nantinya jika berinvestasi di Kota Semarang.
15	Forum Media SAPA (Sayang Perempuan dan Anak Indonesia)	Forum Media Sayang Perempuan dan Anak Indonesia (SAPA) dibentuk dari jejaring pilar media pewartar atau pers di Kota Semarang. Jejaring ini sebagai alat penyebar informasi yang sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan berbagai macam program maupun himbauan dari pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang terkait pencegahan kekerasan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
16	Pemasangan Sistem Pipa Resapan Horizontal (PRH) Sebagai Upaya Konservasi Air Tanah dan Mitigasi Genangan & Banjir di Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang ingin menekankan pada bagian upaya pencegahan daya rusak air dengan pemanfaatan teknologi Pipa Resapan Horizontal. Teknologi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk memperkecil aliran air permukaan dan mengurangi debit air yang melalui saluran drainase sehingga saluran-saluran drainase dapat berfungsi optimal dan air permukaan dapat mengisi akuifer (lapisan pembawa air tanah) sehingga kandungan air tanah tetap terjaga.
17	PAKDE USZact (Pengawas Unit Mobile Sapu Bersih Zona Activity)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam upaya penanganan sampah perkotaan menginisiasi pembentukan Pengawas Unit Mobile Sapu Bersih Zona Activity dikenal dengan PAKDE USZact. Kegiatan tersebut di pelopori dengan penunjukan langsung kepada pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan patrol secara rutin dengan menyisiri wilayah yang ada di Kota Semarang dan didampingi langsung oleh PPNS.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
18	Gerakan Implementasi Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah Hulu Perkotaan (GERAJ ESHP)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menginisiasi Gerakan Implementasi Ekonomi Sirkular Pengurangan Sampah Hulu Perkotaan dalam rangka pengurangan sampah dari sumbernya dengan menghadirkan inovasi “GERAJ ESHP” yang mengandung esensi pencarian sumber (explorasi) dan ekstraksi ekonomi pengelolaan sampah pada masyarakat perkotaan khususnya di Kota Semarang melalui strategi insentif bagi KSM Kebersihan, Kelompok Proklm, dan Bank Sampah Unit.
19	SIMDAKOP (SISTEM INFORMASI DATA KOPERASI)	SIMDAKOP adalah Sistem Informasi Data Koperasi Kota Semarang. SIMDAKOP merupakan aplikasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk melakukan pendataan koperasi.
20	Layanan Informasi Kota Semarang	Layanan Informasi Kota Semarang adalah Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang. PPID adalah unit pelayanan informasi di Pemerintah Kota Semarang.
21	Kanal Pengaduan "Sapa Mbak Ita"	Sapa Mbak Ita adalah layanan pengaduan pelayanan publik Kota Semarang yang terintegrasi dengan layanan pengaduan Jawa tengah (LaporGub) dan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Sapa Mbak Ita dikelola oleh 4 admin utama di Diskominfo Kota Semarang dan didukung oleh 67 admin penghubung dari Perangkat Daerah/BUMD Kota Semarang.
22	Pantau Semar	Pantau Semar adalah sebuah aplikasi inovatif yang dirancang khusus untuk memudahkan warga Kota Semarang dalam mengakses informasi dan pantauan langsung dari berbagai kamera CCTV yang tersebar di seluruh wilayah kota untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Semarang.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
23	Layanan Aduan CSIRT	CSIRT (Computer Security Incident Response Team) membantu dalam mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak terkait dalam penanganan insiden keamanan siber, sehingga respons yang dilakukan lebih terarah dan efisien
24	FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL KOTA SEMARANG	Forum komunikasi media tradisional (FK Metra) dapat menjadi media diseminasi informasi dari pemerintah, dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) ke masyarakat. Diseminasi informasi yang dikemas dalam kesenian lokal akan lebih mengena ke masyarakat karena dalam komunikasi terjadi langsung dengan masyarakat.
25	MATA DEWA (PEMANTAUAN KUALITAS PANGAN DENGAN MELIBATKAN WARGA)	Pemantauan Kualitas Pangan dengan Melibatkan Warga (Mata Dewa) adalah program Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang untuk memantau keamanan pangan. Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti kepala sekolah, lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
26	JAS KAKAK	JAS KAKAK (Kerja Sama Percepatan Layanan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian) ini dapat mempercepat dan memudahkan dalam memberikan pelayanan administrasi penduduk kepada warga Kota Semarang, dan dapat meningkatkan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Semarang. sebagai program percepatan proses penerbitan akta kelahiran bagi masyarakat yang melahirkan di rumah sakit, klinik bersalin, dan praktik bidan mandiri di Kota Semarang yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Disdukcapil
27	KIA GOES TO SCHOOL	KIA Goes to School adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi siswa. Program ini juga bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya dokumen kependudukan.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
28	SISTEM ELEKTRONIK LAYANAN ARSIP SEMARANG (SELARAS)	Sistem Elektronik Layanan Arsip Kota Semarang adalah sistem layanan kearsipan berbasis website yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan arsip dari OPD yang telah menyerahkan arsipnya di Depo Arsip LKD Kota Semarang. SELARAS adalah sistem pengembangan yang menggantikan sistem pendahulunya yaitu Sistem Informasi Arsip Mandiri (Si AMAN).
29	Perpustakaan Digitasl "Si Booky"	Perpustakaan digital Si Booky menyediakan banyak bahan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Bahan bacaan yang disediakan oleh Si Booky adalah sebagai berikut. Bahan bacaan buku dengan jumlah lebih dari 3800 judul dari beragam kategori. Bahan bacaan jurnal dengan jumlah 170 judul dan tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris. Video literasi dari berbagai kategori yang menarik lebih dari 360 video
30	MAS PUGUH DAHAR UBI UBI (Masa Kadaluwarsa Pouches dari Tiga Puluh Hari Menjadi Enam Puluh Hari Berdasarkan Uji Bakteriologi)	Program inovasi MAS PUGUH DAHAR UBI merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam proses sterilisasi. Inovasi ini berdampak efisiensi dalam kebutuhan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) berupa pouches.
31	SIWON BERMAIN DI RSWN (Optimalisasi Siwongso dalam upaya efisiensi dan efektifitas berkas klaim BPJS manual menjadi elektronik di RSD K.R.M.TWongsonegoro)	Upaya digitalisasi proses klaim BPJS. hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit (Siwongso), Yang dulunya semua berkas persyaratan klaim dalam bentuk kertas, saat ini admission note, hasil pemeriksaan kesehatan pasien, SEP dan berkas persyaratan lainnya ditarik dan diintegrasikan dari aplikasi Siwongso kedalam bank data rumah sakit khusus klaim BPJS. sehingga mempermudah persyaratan administrasi pasien dan mempercepat pekerjaan petugas dalam kaitannya dengan pemenuhan kelengkapan berkas klaim BPJS
32	SI RESTU (SHARING INJEKSI READY TO USE) DI RUANG PERAWATAN ANAK	SI RESTU (Sharing Injeksi Ready to Use) adalah inovasi dalam sistem pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk menyediakan sediaan injeksi siap pakai secara sentralisasi di Instalasi Farmasi

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
	DI RSD KRMT WONGSONEGORO	Rumah Sakit, khususnya untuk bangsal anak.
33	SIMONA CANTIK (SISTEM MONITORING DAN PENCATATAN PENGGANTIAN ALAT SECARA PERIODIK)	suatu system monitoring dan pencatatan penggantian alat secara periodic. Inovasi ini diimplementasikan melalui prosedur yang telah ditetapkan serta dalam rangka peningkatan mutu perawatan pasien secara komprehensif dengan peningkatan integritas, loyalitas dan efektifitas kinerja pegawai di RSD KRMT Wongsonegoro kota Semarang guna mencapai indikator mutu dan keselamatan pasien.
34	SIMANTAP (Sistem Pelayanan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) Satu Atap)	SIMANTAP merupakan aplikasi MMPI yang berbasis digital, yang bisa dilakukan dengan cara pasien scan barcode melalui aplikasi SIMANTAP dan langsung bisa mengerjakan soal dengan estimasi waktu 60 menit, dengan adanya aplikasi ini sudah dipastikan jawaban soal tidak ada yang kosong atau terlewatkan yang bisa mempengaruhi keakuratan data saat pengolahan data test MMPI.
35	SIMAS PIJAR	SIMAS PIJAR merupakan inovasi sistem Informasi Peminjaman Ruang yang bertujuan untuk mengkoordinir dan memastikan kegiatan Pinjam Ruang/Gedung di Lingkungan Balaikota Semarang terlaksana secara tertib administrasi, dan teraktualisasi secara berkala dikarenakan Kegiatan Peminjaman Ruang di Lingkungan Balaikota Semarang sangat dinamis dari waktu ke waktu Kegiatan Pinjam Ruang dapat terdigitalisasi dan dapat realtime/ sewaktu-waktu dapat di akses dengan mudah dan lebih tertib administrasi, juga dapat dipantau oleh Kepala Daerah yaitu Wali Kota Semarang, dan seluruh pengguna Pinjam Ruang internal Pemerintah Kota Semarang (OPD Pemkot Semarang) serta Eksternal (Masyarakat Umum)
36	SILAPOS (Sistem Lapor Pengguni Kos)	SILAPOS merupakan sebuah inovasi yang digunakan untuk mewujudkan tertib penghuni kos di Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan tujuan yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		Kecamatan Tugu serta berdampak pada pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum, dan pencegahan kriminal
37	SEMARANG UTARA PELAYAN TERPADU INFORMASI PUBLIK (SEMUT ANTIK)	SEMUT ANTIK merupakan sistem pelayanan informasi publik berbasis AI yang memberikan informasi administratif kepada masyarakat secara otomatis melalui WhatsApp, dengan tujuan memudahkan warga dalam memperoleh informasi terkait pelayanan pemerintahan tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan.
38	KONTRA STRATEGI (Koin untuk Warga Semarang Tengah Kolaborasi dengan Swasta, Lembaga, dan Instansi Terkait)	KONTRA STRATEGI (Koin untuk Warga Semarang Tengah Kolaborasi dengan Swasta, Lembaga, dan Instansi Terkait) merupakan program inovasi yang digagas oleh Camat Semarang Tengah, Bapak Aniceto Magno Da Silva, AP, S.Sos, SH, MH sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, stunting, serta kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan Semarang Tengah.
39	SIP GEDANG MATENG (SISTEM PENYEWAAN GEDUNG SERBAGUNA DAN SPORT CENTER SEMARANG TENGAH)	Upaya untuk menjawab permasalahan atasmenggunakan fasilitas olahraga dan penyewaan gedung sering bertabrakan. Sehingga, diperlukan inovasi pembuatan sistem penyewaan gedung sebagai dan sport center Semarang Tengah. Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk melihat jadwal pemakaian gedung.
40	RUMAH PELUANG (Penanganan Inklusi Anak Stunting)	RUMAH PELUANG ini digunakan untuk mengedukasi dan juga membantu masyarakat yang memiliki kategori balita stunting, dan dibantu penanganannya mulai dari perbaikan gizi hingga pola pengurusan balita supaya terbebas dari stunting. Melalui kerja sama dengan puskesmas poncol dan puskesmas miroto, juga dengan forkopimcam Semarang Tengah, Camat Semarang Tengah berupaya menekan angka stunting di Kecamatan Semarang Tengah. Mulai dari sosialisasi ke bawah, melalui media sosial dan mengadakan kegiatan tiap hari jumat di

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		rumah peluang untuk seluruh penderita stunting di Kecamatan Semarang Tengah.
41	PUSAT PELAYANAN RAMAH ANAK	Pusat Pelayanan Ramah Anak sebagai wujud Kecamatan layak Anak di Kecamatan Kota Semarang Selatan. Hal ini untuk memberikan pelayanan yang ramah terhadap anak-anak.
42	SEMAR DELIMA	Pelayanan SEMAR DELIMA, merupakan hasil KOLABORASI atas tugas dan kewenangan dari masing-masing penyelenggara layanan yang terlibat dalam proses pengurusan dan penerbitan dokumen Akta Kematian. Penyelenggara layanan dimaksud adalah Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat dan Dinas Dukcapil Kota Semarang
43	JEMPUT BOLA SISIR PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	Rancangan perubahan dalam kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, memperbaiki sistem informasi, serta memperkuat penegakan hukum dalam perpajakan. Pembaharuan dalam kegiatan PPB dapat dilakukan melalui metode pengembangan sistem informasi, meningkatkan akurasi data dan informasi dan memperkuat penegakan hukum.
44	POIN DUA (POjok INformasi Digital Untuk wargA)	POIN DUA (POjok INformasi Digital Untuk wargA) memiliki manfaat bagi masyarakat karena memperoleh berbagai informasi yang dijadikan dalam satu wadah yaitu POIN DUA. Selain bagi masyarakat inovasi ini juga bermanfaat bagi petugas pelayanan yaitu dapat dengan mudah melakukan pemberian informasi kepada masyarakat serta dapat mempelajari teknologi terkini.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
45	BUKU SAKU PELAYANAN GENUK	Buku Saku Pelayanan Genuk berusaha memberikan kemudahan berupa informasi mengenai persyaratan-persyaratan kepengurusan dokumen, seperti KTP, Akte Kelahiran, KIA,dan sebagainya. Masyarakat cukup men scan barcode yang ada, maka informasi persyaratan-persyaratan tersebut akan muncul. Masyarakat dapat menyiapkan dokumen persyaratan tersebut terlebih dahulu, sehingga saat pergi ke kantor kelurahan atau Kecamatan, berkas sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal
46	Sigap Mas Camat	Inovasi SIGAP Mas Camat yang diperbaharui akan menjadi aplikasi layanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas,memberikan akses yang mudah bagi masyarakat disabilitas untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang mereka butuhkan. Aplikasi ini juga akan menjadi platform yang efektif untuk mendukung UMKM. Inovasi ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan yang tidka hanya berfokus pada pelayanan publik, tetapi juga pada pemberdayaan masyaakat disabilitas dan pelaku UMKM.
47	SANPIISAN (Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang)	Inovasi SANPIISAN merupakan bentuk sistem integrasi mendukung sinergitas seluruh sektor untuk bersama mendekatkan akses layanan kesehatan melalui upaya preventif memberdayakan masyarakat berkelanjutan. SANPIISAN terbukti: Menurunnya penyebab kematian ibu berdasarkan 4 terlalu: terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu banyak anak dan terlalu banyak dekat jarak kehamilan dan Menurunnya 3 keterlambatan penanganan: terlambat dalam mengambil keputusan, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat dalam mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan seingga Kota Semarang tidak menjadi lokus stunting dan dipresiasi menjadi Percontohan penurunan stunting Meningkatnya kunjungan Ibu hamil ke Fasilitas Kesehatan (realisasi Kunjungan ibu hamil 100%, Kunjungan ibu hamil ke 4

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		100%, Kunjungan nifas 100%) Ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan Layanan kesehatan kehamilan di Perusahaan bagi pekerja perempuan Peningkatan akurasi dan kecepatan pelaporan (15hari menjadi 1 hari/realtime Mutu Pelayanan kesehatan terjamin,meningkatkan kepercayaan Masyarakat mengikuti Program Universal Health Coverage Meningkatkan Perubahan perilaku positif-masyarakat dengan tercapai Indeks kesehatan Keluarga terbaik tahun 2022 Saat masa pandemi Covid-19 lalu, SANPIISAN tetap terlaksana karena telah menerapkan proses digitalisasi dimulai dari skrining oleh kader, janji-temu, konsultasi-online dan call emergency, menjadikan masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan tanpa harus tatap muka. Proses ini berjalan menjadi sangat cepat dan massif selama masa pandemi. SANPIISAN memberikan akses mudah, dekat dan tepat sasaran dengan bergerak Bersama lintas sektor serta masyarakat Kota Semarang dan didukung sistem informasi terintegra
48	Semar Greget	Dinas Kesehatan Kota Semarang membangun suatu inovasi program SEMAR GREGET, dengan 4 aspek utama antara lain Peningkatan Kecepatan Surveilans dan prediksi kasus dengan dukungan Tunggal Dara (Bersatu Tanggulangi Demam Berdarah) dan data iklim cuaca, Penguatan Penanggulangan DBD di masyarakat tingkat keluarga melalui GSRSJ (Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik), Penguatan Penanggulangan DBD di masyarakat sekolah melalui SiCentik (Siswa Cari Jentik), dan Penguatan penanggulangan DBD di masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan melalui gerakan pemberdayaan masyarakat Semarang Gencar Berantas Uget-Uget seminggu dua kali. SEMAR GREGET sesuai dengan kategori 2 yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas institusi publik untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya dalam kebijakan, rencana, keterbukaan, sumber daya manusia serta partisipasi.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
49	LIONAL MESI “Layanan Pendampingan Tumbuh Kembang dengan Aplikasi Sayang Anak dan IoT Antropometri Guna Wujudkan Semarang Zero Stunting”	Inovasi Lional Mesi telah diinisiasi sejak tahun 2022, kemudian dikembangkan dan digunakan pada awal tahun 2023 untuk pencatatan tumbuh kembang anak di Rumah Pelita. Inovasi Lional Mesi memiliki peran penting dalam mempermudah koordinasi dengan lintas sektor terkait penurunan stunting. Data pemantauan pada anak stunting dalam Sistem Informasi Manajemen Sayang Anak telah diintegrasikan dengan website stunting tingkat Pemerintah Kota Semarang (https://stunting.semarangkota.go.id/) agar dapat dilakukan pemantauan secara real time.
50	Raden Patah (Kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Semarang Dan Perguruan Tinggi Melalui Program Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kota Semarang	Rencana Program Inovasi meliputi PKS, Audiensi dan Sosialisasi Program magang ke Perguruan Tinggi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatkan pemenuhan sumber daya kesehatan, meningkatkan pelayanan kefarmasian, meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, meningkatkan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah).
51	LAWANG SEWU	Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu (LAWANG SEWU) dikembangkan sebagai implementasi dari dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dengan berfokus pada upaya promosi dan pencegahan penyakit. LAWANG SEWU merupakan salah satu upaya untuk mendukung SDGs no.3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyakit terutama PTM pada kelompok usia produktif di Kota Semarang dan memberikan stimulus kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan.
52	SOBAT IF (Sistem Obat Instalasi Farmasi)	Sistem Informasi SOBAT IF ini mampu, menjawab kebutuhan informasi tentang data penerimaan, pengeluaran, persediaan obat terkini, lokasi tempat penyimpanan obat dan BMHP serta penandaan obat yang akan memasuki masa kadaluarsa 3 bulan atau 6 bulan sehingga manajemen bisa segera mengambil keputusan atau

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti penanggung jawab obat program di Dinas Kesehatan dan tenaga kefarmasian di puskesmas dan rumah sakit, sehingga dapat menghindari kerugian aset negara.
53	LEBARAN KETUPAT	LEBARAN KETUPAT adalah sistem digitalisasi dalam pemantauan pengobatan pasien TBC, berbeda dari sebelumnya yang hanya menggunakan kartu pengobatan yang ditulis oleh petugas kesehatan secara manual. Pemanfaatan teknologi digital ini memudahkan petugas dalam mengendalikan serta memantau keberhasilan pengobatan pasien. Pada sisi pasien sistem digitalisasi ini dapat bermanfaat sebagai pengingat untuk pengambilan obat serta kontrol ke puskesmas. Inovasi ini juga memiliki nilai tambah dalam bentuk efisiensi pelayanan kesehatan pasien TBC yaitu petugas tidak perlu lagi mengingatkan pasien satu per satu pada hari sebelumnya untuk mengambil obat atau kontrol ke puskesmas. Selain itu, dengan adanya pelayanan pengiriman obat pada pasien yang berhalangan datang ke puskesmas untuk mengambil obat dapat meningkatkan efektifitas pelayanan kepada pasien TBC.
54	NASI GORENG	Inovasi NASI GORENG dapat membantu ibu balita dalam mendapatkan informasi gizi dengan tepat untuk mencegah terjadinya stunting. Inovasi ini dikembangkan oleh Puskesmas Genuk dan memberikan dampak positif terhadap penurunan stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Genuk. Inovasi ini berupa konsultasi gizi online yang promosinya dibagikan melalui instagram dan whatsapp hotline stunting. Inovasi ini sangat mudah untuk diterapkan karena hanya memanfaatkan smartphone
55	SISTEM DETEKSI MASA KADALUWARSA SEDIAAN FARMASI TERINTEGRASI	SEMASA ABADI merupakan inovasi mendeteksi potensi kadaluwarsa sediaan farmasi terintegrasi berbasis digital. Selama ini hanya dilakukan pencatatan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
	BERBASIS DIGITAL (SEMASA ABADI)	stok dan masa kadaluwarsa sediaan farmasi secara manual maka tidak ada warning system deteksi dini masa kadaluwarsa sediaan farmasi. Namun, sekarang deteksi dini sediaan farmasi dapat dilakukan jauh lebih dini dan lebih update melalui SEMASA ABADI. Bukan lagi secara manual atau menggunakan google <i>spreadsheet</i> .
56	OPTIMALISASI PEMANTAUAN IBU HAMIL DENGAN SELF MONITORING ANTENATAL CARE APPLICATION (SIP SEMOC)	SIP SEMOC merupakan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu di Puskesmas dan meningkatkan peran aktif ibu hamil dalam memantau kesehatan dirinya. Idealnya ANC dilakukan 6x kunjungan dengan ketentuan 2x ANC terpadu dengan dokter dan 4x dengan bidan. Sebelum dilakukan inovasi SIP SEMOC, ANC terpadu secara tatap muka di Puskesmas dengan media komunikasi buku KIA, Pengisian buku KIA kurang tertib, Ibu hamil membaca informasi edukasi melalui buku KIA, Akses ibu hamil terhadap pelayanan dokter dan petugas gizi terbatas, belum ada media digital yang spesifik untuk bidan Puskesmas memantau ibu hamil di wilayah binaannya. Setelah dilakukan inovasi maka ANC terpadu dapat dibantu secara online dengan media digital SEMOC App, ibu hamil dapat menginput hasil pemeriksaanya di SEMOC App sebagai catatan medik digital yang dimilikinya, Ibu hamil membaca informasi edukasi melalui SEMOC App, Terdapat chat konsultasi yang terhubung pada whatsapp dokter umum, dokter gigi, bidan dan nutrisionis yang direspon cepat, bidan dapat memantau ibu hamil binaannya lebih mudah melalui SEMOC App.
57	DIVA SEMARANG	Inovasi DIVA SEMARANG merupakan program deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara bagi seluruh warga di Wilayah Kerja Puskesmas Poncol Kota Semarang. Bentuk kebaruan dari inovasi DIVA SEMARANG adalah penggunaan aplikasi barcode link RASA MANIS di Poncol, Konsul telemedician TeledoIVA ke SP.OG Sub Spesialis Onkologi dan kolaborasi Lintas Sektor, pihak swasta,

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		LAPAS, LSM FKPB, Dharma Wanita Persatuan, instansi perguruan tinggi dan masyarakat untuk saling mendukung semua WUS melakukan IVA SADANIS dengan sasaran lebih luas serta waktu kegiatan lebih fleksibel.
58	LAMBORGINI (Lansia Menuju BuGaR dengan deteksi pIkun sejak diNI)	LAMBORGINI merupakan gagasan inovasi untuk meningkatkan angka harapan hidup lansia. Inovasi ini lahir dengan harapan agar lansia menjadi lebih sehat, bugar, produktif, bahagia dan jauh dari kepikunan. Kegiatan LAMBORGINI atau Lansia menuju bugar deteksi pikun sejak dini berupa kegiatan posyandu lansia dengan penambahan skrining deteksi kemandirian lansia, kebugaran lansia, dan kepikunan dengan tindak lanjut berupa kegiatan Senam jasmani, senam otak, terapi kognitif, rekreasi dan berkreasi (kerajinan tangan). Adanya kegiatan kreatifitas menjadikan inovasi LAMBORGINI berhasil menaikkan kunjungan lansia di poksila. Dimana sebelum adanya LAMBORGINI, kunjungan lansia di poksila menurun dan akhirnya 3 poksila membubarkan diri. Kemudian setelah adanya LAMBORGINI, berdiri 6 poksila baru.
59	RIVA CERDIK (peRIksa iVA CEgah DIini kanker serviK)	Inovasi RIVA CERDIK telah diimplementasikan selama 2 tahun dari tahun 2020-2021 dan mendapatkan dampak yang positif bagi masyarakat terutama wanita dengan usia produktif yang ditunjukan dengan capaian skrining kanker serviks dan payudara yang berbasis indikator kinerja. Berdasarkan data diatas dampak inovasi RIVA CERDIK dapat dilihat dari cakupan peserta yang mengikuti kegiatan skrining kaner servik dan payudara mengalami penigkatan setiap tahunnya. Dengan inovasi RIVA CERDIK pihak lain yang mereplikasi dapat meningkatkan jumlah cakupan peserta yang mengikuti kegiatan IVA dan SADANIS sehingga kasus kanker serviks dan payudara bisa dicegah dan menurun secara signifikan. Untuk menjaga dan meningkatkan inovasi RIVA CERDIK inovasi ini telah dievaluasi atau dinilai oleh

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		berbagai pihak, baik secara internal maupun secara eksternal. Evaluasi ditekankan pada sejauh mana kemampuan inovasi RIVA CERDIK yang menjamin kesehatan bagi wanita usia produktif dan dapat meningkatkan serta memberikan tingkat kepuasan bagi masyarakat
60	ANTER SEWA (ANC TERPADU SELAMATKAN JIWA)	Inovasi ANTER SEWA sangat inovatif karena sangat mampu mengatasi masalah kesehatan ibu hamil terutama menurunkan kasus kematian ibu hamil. Inovasi ini lebih efektif dalam mendeteksi permasalahan kesehatan ibu hamil sehingga dapat dengan segera memberikan intervensi dan tindak lanjut yang tepat sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. ANTER SEWA terdiri dari layanan pemeriksaan USG, digitalisasi pemberian edukasi kesehatan ibu hamil, pemantauan rujukan ibu hamil oleh tenaga kesehatan Puskesmas serta penyediaan sarana informasi dan konsultasi seputar kesehatan ibu hamil melalui grup WhatsApp Teman Bunda. Inovasi ANTER SEWA memiliki kebaruan dibandingkan dengan inovasi sejenis di instansi lain yaitu adanya pemanfaatan media digital dalam pemberian edukasi pasien serta pemantauan lebih lanjut terkait perujukan ibu hamil ke Rumah Sakit. Bidan Puskesmas akan memantau ibu hamil yang di rujuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit dengan menanyakan kepada ibu hamil yang bersangkutan secara pribadi melalui aplikasi WhatsApp. Apabila ibu hamil mengalami kesulitan dalam menggunakan rujukan, bidan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		Puskesmas akan berkoordinasi dengan kader kesehatan dan Rumah Sakit terkait sehingga ibu hamil dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai dengan rujukannya.
61	eS GEMPOL PLERET	Inovasi eS GEMPOL PLERET merupakan suatu implementasi untuk melakukan kegiatan skrining sebanyak-banyaknya. Implementasi eS GEMPOL PLERET dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan kerjasama dengan Lintas Program, Lintas Sektor, Jejaring, Kader dan Toma dalam menjangkit Suspect TB dan diharapkan dampaknya cakupan indikator-indikator Program P2TB yaitu cakupan suspect TB melampaui target, meningkatkan angka pengobatan TB dan meningkatkan angka kesembuhan Penderita TB
62	SEMARAK DUGDERAN (ANC Puskesmas Terpadu dan Kolaboratif Dengan USG Demi Persalinan yang aman)	Inovasi SEMARAK DUGDERAN memiliki keunggulan dalam penanganan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Ada Keunikan inovasi SEMARAK DUGDERAN yaitu merupakan Rangkaian Pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu dan kolaboratif di Puskesmas untuk mencapai persalinan yang aman dan tepat. Inovasi SEMARAK DUGDERAN memiliki nilai tambah dalam bentuk efisiensi anggaran dan memiliki kemudahan dalam menyebarkan informasi seputar kesehatan ibu dan anak. Ada Kebaruan inovasi SEMARAK DUGDERAN dengan pemanfaatan teknologi berupa: SIMPUS elektronik, Whatsapp, USG, dan aplikasi SIGASPOL

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
63	SECANGKIR KOPI JONN (Senyum Ceria Anti Karang Gigi dan Kontrol Gigi Praktis Jalur Online)	SECANGKIR KOPI JONN (Senyum Ceria Anti Karang Gigi dan Kontrol Gigi Praktis Jalur Online) di buat karena melihat kurangnya kesadaran masyarakat tentang masalah karang gigi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang kontrol gigi rutin ke dokter gigi. Inovasi ini ditujukan untuk semua kalangan usia, dari orang tua, dewasa hingga anak – anak. Inovasi SECANGKIR KOPI JONN masuk dalam kategori pelayanan publik dimana menjadikan pelayanan pembersihan karang gigi menjadi lebih optimal dan akses pendaftaran yang didukung platform digital menjadi mudah di gunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan waktu tunggu menjadi lebih singkat.
64	DEDI CARI MAMA	MAMA (DEteksi Dini CA ceRvIx dan ca MAMmAe). DEDI CARI MAMA merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara melalui upaya promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif yang melibatkan berbagai sektor terkait sehingga dapat meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Inovasi DEDI CARI MAMA (DEteksi Dini CA ceRvIx dan ca MAMmAe) diharapkan akan meningkatkan jumlah skrining pada sasaran WUS 30-50 tahun bagi peserta FKTP di Puskesmas Padangsari & Klinik Swasta di Kecamatan Banyumanik. Selain itu hasil pemeriksaan skrining kanker serviks dan kanker payudara sudah terstandarisasi karena bekerjasama dengan Laboratorium CITO. Indikator keberhasilan DEDI CARI MAMA (DEteksi Dini CA ceRvIx dan ca MAMmAe) yaitu kegiatan berjalan secara rutin 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Kondisi sebelum adanya inovasi adalah belum adanya layanan pemeriksaan IVA/Papsmear & Sadanis di Puskesmas, sehingga apabila pasien memiliki keluhan akan dirujuk untuk melakukan pemeriksaan penunjang di Laboratorium. Setelah diadakan kegiatan DEDI CARI MAMA (DEteksi Dini CA ceRvIx dan ca

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		MAMmAe), maka sasaran WUS yang akan periksa lebih nyaman & mudah karena tidak perlu ke laboratorium.
65	KLUB PELANGI	Klub pelangi berfokus pada pencegahan stunting dilaksanakan dengan kelas ibu dan remaja, pemeriksaan & pendampingan tenaga kesehatan, pemberian Tablet Tambah Darah serta pemberian ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Inovasi ini memiliki kebaruan dengan memanfaatkan teknologi (video animasi, barcode gform, WhatsApp grup) dan didukung dana BOK / BLUD dan swadaya masyarakat, lintas sector dan program Puskesmas, dilaksanakan dengan metode pendataan, pertemuan, pemeriksaan, pemberian PMT, Tablet Tambah Darah dan pengingat konsumsi Tablet Tambah Darah. Tujuan inovasi Klub pelangi ini yaitu meningkatkan asupan gizi dan kapasitas perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup sehingga memberikan kontribusi pada penurunan kemiskinan dan stunting. Pokok penting klub pelangi terletak pada usaha peningkatan pengetahuan, kepatuhan konsumsi TTD serta ketrampilan sasaran.
66	MASPUR HEPI (PUSKESMAS PURWOYOSO ATASI HIPERTENSI DENGAN TAMAN HEPI)	MASPUR HEPI adalah inovasi yang lahir karena tingginya angka hipertensi dan risiko hipertensi yang meningkat bagi kaum lansia. Melakukan pemetaan untuk menentukan daerah rentan dan melaksanakan intervensi dengan swadaya masyarakat. Inovasi MASPUR HEPI atau Puskesmas Purwoyoso atasi Hipertensi dengan Taman Hapi. berbasis pemberdayaan masyarakat yang , menggandeng lintas sector terkait. Proses pembuatan dan pengerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati, pelaksanaan melibatkan pemangku wilayah setempat RT, RW, kelurahan, serta puskesmas. Output yang dihasilkan yaitu masyarakat berdaya dan mandiri bisa memanfaatkan Taman Hapi dan mengolahnya untuk menurunkan angka hipertensi.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
67	PESONA SRIGUNTING	Inovasi Pesona Srigunting ini dibentuk sebagai Upaya penanganan kesehatan gizi terpadu yang penanganannya melibatkan kolaborasi antar program dan lintas sektor agar dapat membuat pelayanan yang maksimal bagi ibu hamil dan bayi atau balita stunting di Puskesmas Bandarharjo. Tujuan : Inovasi Pesona Srigunting dibuat sebagai salah satu Upaya untuk dapat mencegah dan mengendalikan banyaknya Kasus Stunting yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor KIA serta faktor gizi diwilayah Puskesmas Bandarharjo yang dilakukan secara berkesinambungan dengan dukungan Lintas Sektor, Pihak Swasta, LSM, dan Masyarakat
68	KEMILAU HATI (Kawal Semua Ibu Hamil Untuk Cegah Kematian Ibu dan Bayi)	Permasalahan angka kematian ibu dan bayi dapat dicegah dengan inovasi KEMILAU HATI (Kawal Semua Ibu Hamil Untuk Cegah Kematian Ibu dan Bayi). Angka Kematian Ibu (AKI) di PUSKESMAS KROBOKAN tahun 2023 yaitu 1 kasus. Angka Kematian Bayi (AKB) di PUSKESMAS KROBOKAN tahun 2023 yaitu 2 kasus. Masih adanya Angka Kematian Ibu dan Bayi masih menjadi permasalahan utama di PUSKESMAS KROBOKAN. Mengatasi masalah di atas, dilahirkan inovasi KEMILAU HATI
69	ATM Pencari Kerja	ATM Pencari Kerja ini digunakan dengan cara mengoperasikan komputer yang tersedia pada ruang pelayanan secara mandiri dan masyarakat dapat memperoleh output yang diinginkan melalui komputer tersebut. Inovasi ini juga sebagai langkah konkret untuk mempercepat pelayanan dan mengurai antrian pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
70	LIDYA DIMARI (Layanan Tes HIV dan Pengobatan ARV di Malam Hari)	Inovasi Layanan Tes HIV dan Layanan ARV di Malam Hari (LIDYA DIMARI) merupakan pelayanan HIV serta perawatan dukungan dan pengobatan pada orang dengan HIV dan AIDS di Puskesmas di Kota Semarang dengan waktu di luar jam kerja/pelayanan Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan LIDYA DIMARI dilakukan dengan Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor, yakni Bersama LSM Peduli AIDS. Inovasi ini hadir sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan penggalangan komitmen dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, LSM dan masyarakat untuk bersama memerangi HIV/AIDS tanpa adanya stigma dan diskriminasi dalam pelayanan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pengendalian HIV.
71	PANSOS (Pawon Sehat Ngopeni Stunting)	PANSOS (PAWON SEHAT NGOPENI STUNTING) lahir pada tanggal 1 September 2023. Ini merupakan inovasi yang dikembangkan karena masih banyak ditemukan balita risiko stunting di Kota Semarang. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan tentang asupan makanan bergizi yang baik dalam pencegahan stunting. Tujuan PANSOS adalah untuk mendukung SDGs no.2 yaitu Tanpa Kelaparan melalui upaya pemberian bahan makanan bergizi bagi keluarga risiko stunting dan SDGs no.3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui edukasi dan praktek baik penyajian menu makanan bergizi dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Semarang.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
72	SAYANG BUNDAKU (Siap Melayani Ibu Dan Bayi Dalam Satu Gedung Plus Akupressure)	SAYANG BUNDAKU (Siap Melayani Satu Gedung ibu dan bayi plus akupressure) adalah inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak di UPTD Puskesmas Kedungmundu di lakukan di dalam satu gedung (gedung KIA) mulai dari pendaftaran, pelayanan sampai pasien pulang semua dilakukan di dalam gedung tersendiri. Kegiatan meliputi pemeriksaan oleh bidan ,laboratorium, dokter umum, dokter gigi, gizi, pemeriksaan USG, pelayanan farmasi , kelas ibu hamil dan akupressure ,kelas ibu Balita dan memadukan berbagai macam inovasi. Tujuan dari inovasi adalah menyelenggarakan pelayanan terpadu sehingga mempermudah akses pelayanan ibu dan anak.
73	Daycare Rumah Pelita (Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor bagi Baduta dan Balita)	Daycare Rumah Pelita terintegrasi dengan sistem informasi Sayang-Anak sebagai website penyedia data stunting dan pemantauan harian balita yang diintervensi di Daycare Rumah Pelita. Sistem itu juga terintegrasi dengan website stunting.semarangkota.go.id milik Pemerintah Kota Semarang yang digunakan bersama seluruh OPD dalam penanganan stunting di Kota Semarang.
74	OSAKA NAGASAKI “Optimalisasi Pendaftaran Kunjungan Berulang Dengan Memanfaatkan Google Spreadsheet Sebagai Pengingat Kontrol Pasien”	OSAKA NAGASAKI (Optimalisasi Pendaftaran Kunjungan Berulang Dengan Memanfaatkan Google Spreadsheet Sebagai Pengingat Kontrol Pasien) adalah inovasi pelayanan pendaftaran untuk pasien lama UPTD Puskesmas Kedungmundu yang melakukan pemeriksaan membutuhkan kunjungan berulang mengenai penyakit/tindakan kasus tertentu tujuannya pasien mendapatkan penyembuhan kesehatan secara optimal. Pasien akan diingatkan secara otomatis oleh petugas untuk melakukan kontrol berulang melalui pesan/pengingat khusus. Selain itu inovasi ini memberikan kemudahan pasien lama agar tidak perlu mengantri lama di loket pendaftaran, pasien hanya perlu konfirmasi dan sudah otomatis menjadi pasien online H-1, setelah

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		itu pasien dapat menunggu di poli yang dituju.
75	PENGEMBANGAN APLIKASI LUNPIA [TIKET MASUK MUSEUM]	Fitur Pesan Tiket masuk Museum Kota Lama pada Aplikasi LUNPIA Keunggulan informasi yang di sampaikan dapat diterima masyarakat dengan baik dan memudahkan masyarakat khususnya dalam informasi aksesmasuk ke Museum Kota Lama, sekaligus memudahkan pelayanan masyarakat untuk lebih mengenal Aplikasi LUNPIA yang sudah ada sebelumnya.
76	MASITA (Berdasimas Input Data)	Tersedianya Aplikasi MASITA yang dapat menginput data kunjungan edukasi yang sudah dilaksanakan sehingga dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang sudah dilakukan. Selain itu juga laporan kegiatan dokumentasi ini juga digunakan untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak (KLA).
77	Kanal Pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik	Pelayanan informasi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan dalam memasarkan, memperkenalkan sebuah produk atau jasa, penyampaian informasi yang akurat sangat dibutuhkan sebagai sarana peningkatan pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga atau organisasi baik itu dalam pemerintahan atau swasta. Penyampaian informasi yang akurat dalam hal ini kebenaran atas informasi dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan kenyamanan dari konsumen kepada pihak yang menyebarkan informasi. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan masyarakat, selanjutnya dikembangkan Kanal Pengaduan dan Informasi Kecamatan Ngaliyan menggunakan Wathsapp Pengaduan dan Konsultasi, Layanan ini diharapkan dapat menjadi wadah pertama bagi warga masyarakat, khususnya warga wilayah Kecamatan Ngaliyan untuk menyampaikan keluhan, aduan dan informasi terkait pelayanan publik langsung ke whatsapp pengaduan dan Informasi Kecamatan Ngaliyan. Selain itu, sebagai salah satu

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		cara untuk berkomunikasi langsung dengan warga
78	Diari Kejujuran	Diari Kejujuran ini dilatarbelakangi maraknya kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh oknum pejabat baik di tingkat daerah maupun nasional. Peserta didik setingkat SMP adalah bagian dari generasi emas yang harus memiliki karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari karakter integritas.
79	Penguatan Literasi dan Numerasi "Lintang Timur" SMP NEGERI 27 SEMARANG	Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
80	SEPTY (Safety Device for Patient and User Safety)	inovasi ini untuk mempermudah dalam pengelolaan peralatan kesehatan yang ada di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang yang terdiri dari Inventarisasi, Work Order (pelaporan dan penanganan kerusakan), pengelolaan sparepart, pengukuran terhadap Standar Pelayanan Minimal, penarikan kembali (recall), mutasi (perpindahan alat atau barang antar-ruangan), capaian kinerja pegawai, penentuan nilai aset-batas anggaran pemeliharaan dan pengelolaan panduan/SPO/buku manual.
81	KELADI BERKAH (Kelola Sampah Jadi Berkah)	KELADI BERKAH adalah menghasilkan kreatifitas tinggi, plastic dicacah menjadi serpihan dan dicampurkan untuk bahan pembuatan pot. Pembuatan lilin dari jelantah serta pemanfaatan komposter, biopori, Jelantah untuk biodiesel, Pemanfaatan sampah organik untuk pembuatan POC (Pupuk organik Cair)
82	GEMPITA (Gerakan Gajahmunkur Serius Melawan Penyakit Tidak Menular)	Inovasi GEMPITA memiliki keunggulan sebagai hasil kreativitas dari Programer PTM Puskesmas Pegandan untuk menjangkau pelayanan deteksi dini penyakit tidak menular di masyarakat. Inovasi ini menjadi standar pelayanan di UKP khususnya bagi penderita penyakit tidak menular dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi kader Posbindu PTM

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
83	SIMPEL SAT SET NDA	Simpel Sat Set, nda! Merupakan suatu ide/ inovasi dari Puskesmas untuk menyediakan layanan Fisioterapi dengan memberikan keuntungan bagi Masyarakat di Wilayah Puskesmas Pandanaran
84	MASPULIN (Puskesmas Peduli Ibu Bersalin)	Puskesmas Peduli Ibu Bersalin (MASPULIN) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Puskesmas Ngesrep dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya dalam perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Inovasi dimulai pada bulan Januari 2023 sebagai upaya mempermudah akses dan menarik minat ibu hamil yang akan bersalin di Puskesmas Ngesrep untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dan berkualitas.
85	SERULING PAGI (Seruan Perlindungan Gigi Pada Anak Sejak Dini)	SERULING PAGI (Seruan Perlindungan Gigi pada Anak dari dini) merupakan inovasi dengan melakukan penyuluhan edukasi pentingnya menjaga Kesehatan gigi mulut pada anak dengan media lembar balik dan video penyuluhan menjaga kesehatan gigi mulut anak.
86	PARIKESIT (Pariwisata Kesehatan Puskesmas Miroto)	Kegiatan PARIKESIT ini meliputi : SEHAT GIGIMU (Sayangi Kesehatan Gigi dan Mulut), MAMI DARZI (Masyarakat Miroto Sadar Gizi), HOME PIMPAH (Pilah Sampah Dari Rumah), dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
87	PANGKAT MAS POLRI	Rancang Bangun Inovasi PANGKAT MAS POLRI (Upaya Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Dengan Kelompok Asuhan Mandiri)
88	Keliling Cek Gula Darah dan Tensi serta Pendampingan Kefarmasian	Inovasi Keliling Cerah Pisan terbukti dapat meningkatkan capaian DM terkendali sebanyak 8,75% (dari 58 pasien menjadi 70 pasien) melalui pemeriksaan gula darah dan tensi serta pendampingan kefarmasian. Melalui KELILING CERAH PISAN Puskesmas Lamper Tengah melakukan pemantauan kesehatan pasien prolansis melalui kunjungan rumah, transfer pengetahuan Kesehatan lansia melalui WA grup prolansis

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
89	LIPERPOL SERU (Link Pendaftaran Puskesmas Online Pasien Baru)	LIPERPOL SERU (Link Pendaftaran Puskesmas Online Pasien Baru) adalah inovasi pelayanan pendaftaran online untuk pasien baru di UPTD Puskesmas Kedungmundu dimana pasien tidak perlu mengantri lama, memudahkan petugas pendaftaran dalam mengentri data pasien baru, dan pasien tidak perlu bingung dalam menyiapkan identitas yang perlu dibawa yang terkadang lupa untuk dibawa pasien (KK, KTP, BPJS).
90	TANJUNGMASKU (Temukan dan Ajak Ibu Hamil oleh Nakes Berkunjung ke Puskesmas Kedungmundu)	Inovasi Tanjungmasku berdampak pada masyarakat kegiatan pendampingan ibu hamil pada inovasi ini dapat berdampak pada masyarakat yaitu masyarakat menjadi lebih siaga dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.
91	ANJASMORO	puskesmas Karangdoro membuat inovasi yang berorientasi pada kesehatan tradisional dengan membuat program rutin minum jamu bersama petugas dan pengunjung puskesmas Karangdoro dengan nama ANJASMORO
92	LASKAR SEJATI	LASKAR SEJATI merupakan inisiatif yang mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan dengan fokus pada kesejahteraan lansia di Karangdoro. Program ini bertujuan menjaga kesehatan jasmani, rohani, dan fungsi kognitif lansia agar tetap aktif dan mandiri. LASKAR SEJATI berperan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui kegiatan kesehatan, spiritual, seta sosial. Program ini selaras dengan strategi "Puskesmas Santun Lanjut Usia" yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau bagi lansia
93	RAGA SI MAS KARA	RAGA SI MASKARA (Gerakan Cegah Hipertensi Puskesmas Karangayu) dilaksanakan untuk mengontrol pasien hipertensi agar terbiasa melakukan pengobatan serta dapat terbiasa ber prilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan RAGA SI MAS KARA diharapkan masyarakat bisa mengetahui faktor penyebab hipertensi serta pencegahan hipertensi. Sehingga

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		kejadian penyakit hipertensi dapat terjadi penurunan
94	INGSUL RUNCING	INGSUL RUNCING adalah Inovasi GINGSUL RUNCING ini sangat berdampak dalam upaya peningkatan kesehatan Gigi dan mulut di masyarakat. Dengan inovasi ini masyarakat juga akan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan Gigi dan mulut sejak dini secara bersama-sama bergerak untuk mencegah dan menurunkan stunting. Kebaruan Inovasi GINGSUL RUNCING ini memiliki keunikan sebagai hasil kreativitas dari Puskesmas Karanganyar di Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai salah satu upaya terhadap penanganan stunting melalui perbaikan kesehatan gigi. Inovasi ini berbasis masyarakat serta keterlibatan kader kesehatan, guru UKS, jaring jejaring, dan lintas sektor.
95	Sistem Manajemen Laboratorium Pekerjaan Umum Kota Semarang	Sistem Informasi Manajemen Pengujian Lab. Dimana sistem tersebut bertujuan untuk menyimpan seluruh rekap data hasil pengujian material yang ada di UPTD Laboratorium. Sehingga dengan adanya sistem ini dapat menyatukan seluruh data rekap pengujian material beserta data-data terkait yang ada di UPTD Laboratorium
96	MAKAN WAE NASI BAKAR (peMAKAiaN WA untuk mEmberikan iNformASI atau laporan keBAKARan)	Upaya untuk meningkatkan layanan respon cepat dan akurat dalam penerimaan laporan maupun penanggulangan kebakaran serta penyediaan kanal pelaporan kebakaran yang mudah diakses oleh Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran menyediakan kanal pelaporan kebakaran yang mudah, murah, dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yaitu whatsapp.
97	FOKUS CANDISARI (FORUM KHUSUS USAHA MASYARAKAT CANDISARI	Pembentukan Forum UMKM bertujuan untuk mengatasi tantangan ini dan mempromosikan pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM di wilayah kecamatan Candisari.UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di wilayah kecamatan Candisari. Namun, seringkali mereka menghadapi berbagai tantangan seperti akses terbatas terhadap pasar, permodalan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		yang terbatas, dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan informasi.
98	TEBAR PESONA (TERPADU BERSAMA PENDUKUNG SEBAYA ATASI HIV AIDS)	TEBAR PESONA adalah inovasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Halmahera Kota Semarang dalam program HIV/AIDS untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pengobatan Orang dengan HIV (ODHIV) melalui strategi kolaboratif berbasis telemedicine dan pendampingan komunitas. Inovasi ini bertujuan menekan angka pasien yang Loss to Follow Up (LFU) serta meningkatkan kepatuhan ODHIV dalam terapi antiretroviral (ARV) guna mendukung pencapaian target nasional Triple 95s (95-95-95) pada tahun 2030.
99	ARJUNA (ARMADA JEMPUT BOLA PELAYANAN PAJAK ANDA)	Dengan adanya layanan jemput bola melalui ARJUNA, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dan kenaikan jumlah wajib pajak yang patuh. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
100	TERANG GAN	Pelayanan TERANG GAN berupa sistem pelayanan berbasis online. Pelayanan ini memberikan kemudahan kepada konsumen terkait permohonan layanan tera ulang serta memberikan kemudahan kepada konsumen dalam hal komunikasi secara online. Dengan adanya TERANG GAN, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan jumlah UTTP yang di tera ulang. Selain itu pelanggan menjadi lebih mudah mendapatkan informasi dan konsultasi seputar kemetrolagian tanpa harus datang ke kantor. Adanya TERANG GAN dapat meminimalisir kesalahan dalam memberikan informasi, karena sudah melalui satu pintu official whatsapp LARAS (Layanan Online Metrologi Semarang). TERANG GAN juga memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan pendaftaran pelayanan tera ulang dimanapun dan kapanpun.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
101	Kamera Traffic Counting Smart ATCS	ATCS Dinas perhubungan kota Semarang melakukan pendataan kendaraan yang melintas secara otomatis menggunakan kamera lalu lintas. Petugas ATCS mendapatkan informasi lalu lintas per ruas jalan secara realtime untukantisipasi lalu lintas. Dinas perhubungan dan instansi terkait mendapatkan data lalu lintas sebagai bahan management rekayasa lalu lintas maupun data pendukung Keputusan lainnya. Masyarakat umum baik dari akademisi maupun lembaga terkait dapat menggunakan data untuk kepentingan yang diperbolehkan.
102	ONE STOP SERVICE PELAYANAN	Kecamatan Tembalang Kota Semarang melaksanakan Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) dimana semua pelayanan melalui satu pintu di ruang Pelayanan Publik, kemudian didistribusikan ke Kasi yang membidangi atau yang menjadi tusinya. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran penerima layanan inovasi adalah kelompok rentan dan disabilitas, karena cukup mendatangi satu pintu ruang pelayanan publik, sudah menerima pelayanan.
103	KOLAK LABU (Kelompok Pemantauan Ibu Hamil Anemia dan KEK Melalui Kelas Ibu Hamil)	KOLAK LABU merupakan pelayanan masyarakat dengan menggunakan metode pertemuan kelompok yang membahas mengenai kesehatan pada ibu hamil dalam upaya menurunkan angka KEK dan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas. Implementasi KOLAK LABU melalui kelas ibu hamil yang dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan lintas sectoral sehingga dapat meningkatkan mutu kegiatan kelas ibu hamil dan mencapai tujuan untuk menurunkan angka KEK dan anemia pada Ibu Hamil, dengan implementasi KOLAK LABU juga dapat mendekatkan pelayanan kesehatan dengan masyarakat
104	MASDARLINGKU	inovasi MASDARLINGKU (Masyarakat Peduli Sampah dan Sadar Lingkungan untuk UHC). sebagai dukungan kepada keputusan walikota semarang yang tertuang dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 43

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Inovasi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mendirikan bank sampah dalam mengelola sampahnya yang terbuang menjadi uang. Hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri dan bisa membantu dalam pembiayaan dan pendanaan iur UHC maupun pemanfaatan lainnya. Ini sejalan dengan pemikiran dari Pemerintah Kota Semarang, dalam ini dibawah kendali Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk bekerjasama dengan BPJS dalam pembayaran UHC oleh komunitas bank sampah.
105	ELING POTO MOE	“ ELING POTO MOE” Konseling Apoteker Tentang Obat Melalui Online. Inovasi ELING POTO MOE Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien/keluarga pasien antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek samping, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan dan penggunaan obat.
106	SEMAWIS	Pendekatan Holistik Berbasis Keluarga Rancang Bangun: PIS-PK dirancang untuk mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan seluruh anggota keluarga dalam upaya meningkatkan kesehatan. Fokus utama adalah pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perubahan perilaku untuk gaya hidup sehat. Pokok Perubahan: Menggeser paradigma dari perawatan kesehatan yang reaktif menjadi preventif dan promotif. Mendorong perubahan perilaku kesehatan di tingkat individu dan keluarga untuk mengurangi faktor risiko penyakit dan mempromosikan pola hidup sehat.
107	Portal Satu Data	Aplikasi yang akan menjadi sumber rujukan data-data penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang.
108	Mata Si-Intel	Manajemen Talenta Berbasis Artificial Intelligence-Merupakan aplikasi berbasis Artificial Intelligence yang berfungsi untuk manajemen talenta ASN, menilai potensi dan kompetensi secara efisien. Aplikasi ini

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		dirancang untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme ASN dengan cara mengidentifikasi dan mengembangkan talenta mereka.
109	JELITA (Jendela Inovasi Kota Semarang)	Merupakan sebuah portal yang digunakan sebagai wadah untuk optimalisasi pengelolaan database inovasi daerah, baik inovasi masyarakat maupun inovasi pemerintah daerah.
110	SIWASIAT (Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat)	Adalah suatu system terpadu terdiri dari beberapa system pengawasan berbasis website yang dimiliki Inspektorat Kota Semarang yaitu Simwas (Sistem Pengawasan) Auditor , serta Simwas PPUPD.
111	Ndarboy Mateng	(Ndandani Omah Bareng Bang Moy Semarang Tengah) sebagai tindak lanjut kegiatan pengumpulan sedekah uang koin, yang digunakan untuk membantu renovasi rumah warga Semarang Tengah yang memerlukan bantuan.
112	Ngobong Carang	(Ngopi Bareng Om Camat Semarang Tengah) Sebuah inovasi Kecamatan Semarang Tengah untuk menyerap aspirasi warga dan mendekatkan diri kepada warga untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan.
113	SEMAR ASYIK	(Semarang Barat Ahad Resik) Program Kegiatan yang dilakukan tiap Ahad/Minggu dengan melibatkan Kecamatan, Kelurahan, serta warga masyarakat untuk melaksanakan kerjabakti yang menjadikan lingkungan bersih dan nyaman.
114	SEMAR IDOL	(Semarang Barat Idol) sebuah inovasi untuk mendekatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan kepada masyarakat melalui seni budaya, serta wadah komunikasi melalui seni musik.
116	PERWIRA SEKTI	Pengurusan Wirausaha Produk Industri Rumah Tangga dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah Platform yang berisi informasi terkait izin pangan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) meliputi alur, persyaratan, video tutorial, pelayanan dan pendampingan serta konsultasi online

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
117	PERGI KE SURGA (Pelayanan Perawatan Gratis pada Kasus Paliatif Bagi Warga Kota Semarang)	Inovasi yang fokus dalam perawatan Kesehatan pada kondisi pasien Paliatif, serta edukasi pentingnya kemandirian perawatan oleh Keluarga
118	AMBULAN HEBAT / AMBULAN KEGAWATAN	Pelayanan Kesehatan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal kegawatdaruratan medis yang dikembangkan juga melayani kasu non gawat darurat, pada tahun 2023 nama Ambulan Hebat berganti menjadi AMBULAN KEGAWATAN
119	GALAKSI BIMA SAKTI	Membentuk masyarakat tanggap darurat dalam menghadapi kegawatdaruratan medis, Bencana, Kecelakaan , Korban massal dan kegawatdaruratan sehari-hari
120	SEMAR BETUL	SEMAR BETUL (Semarang Berantas Tuberkulosis) merupakan inovasi pengendalian TBC berbasis wilayah tinggal yang terintegrasi dengan dukungan sistem informasi digital. SEMAR BETUL bertujuan menurunkan angka kematian TBC dan menurunkan kejadian gagal pengobatan, dengan penanganan berbasis wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi. SEMAR BETUL dilaksanakan dengan penanganan pasien tidak hanya dilakukan oleh faskes pengobatan saja, namun Puskesmas wilayah kerja memastikan pasien menyelesaikan pengobatan hingga sembuh.
121	PANGLIMA SUDIRMAN	"Panglima Sudirman" Program Percepatan Penurunan Penyakit Menular Melalui Sistem Distribusi Kerentanan Penyakit Tuberkulosis. Merupakan sistem distribusi kerentanan penyakit yang menggunakan AI (Artificial Intelligence), dibuat untuk mengenali dan memberikan pengambilan keputusan atas resiko Tuberkulosis
122	SAYANG BUNDA	"Sayang Bunda" merupakan aplikasi untuk Ibu hamil dan ibu Nifas yang menginginkan pendampingan atau konsultasi. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan ibu hamil dan memastikan kehamilan yang sehat

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
123	TEMAN BUNDA	TEMAN BUNDA (sysTem intEgrated MaternAl NewBorN and neonAtal semarang)merupakan manajemen big data ibu hamil , nifas dan Bayi baru lahir, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan mengembangkan satu data warehouse
124	Melon Musk	Program pengentasan stunting yang melibatkan remaja milenial dalam edukasi, promosi, dan pemberian bantuan makanan bagi balita dan ibu hamil
125	UCOK BABA	Uji Screening Bahan Air dan Bahan Makanan (UCOK BABA) Untuk mencegah penyakit akibat cemaran makanan dan minuman dan adanya peningkatan hygiene sanitasi dalam pengelolaan makanan di kantin sekolah.
126	GEPREK SEMMUR (GERAKAN PEREMPUAN EKONOMI KREATIF SEMARANG TIMUR)	Gerakan Perempuan Ekonomi Kreatif yang diberikan khusus untuk Perempuan usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan pelatihan nantinya akan diberikan pelatihan agar Perempuan Semarang Timur bisa mandiri, inovatif, kreatif dan mempunyai usaha atau penghasilan sendiri.
127	SIMADU - SISTEM INFORMASI MONITORING ADUAN	Si Madu (Sistem Monitoring Aduan) Kecamatan Gajahmungkur adalah sebuah platform website dan bot otomatisasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mempercepat proses penanganan aduan dengan cara memantau secara otomatis aduan warga yang disampaikan melalui kolom komentar di akun Instagram milik pemerintah Kota Semarang.
128	DENI CAKNAN	(Gerakan Deteksi Dini Kanker Serviks Dan Sadanis di Semua Lini Masyarakat Puskesmas Bugangan Kota Semarang) diharapkan dapat membantu meningkatkan capaian pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks Dan Sadanis di Semua Lini Masyarakat Puskesmas Bugangan. Peningkatan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara, yaitu dengan memberikan penyuluhan Wanita Usia Subur (WUS) tentang pentingnya Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara, dan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		pelayanan IVA SADANIS ke masyarakat Puskesmas Bugangan.
129	TRANSFORMER MAS GANAN	(Demonstrasi Modifikasi Olahan Menu Makanan Tambahan Balita di Puskesmas Bugangan) diharapkan dapat membantu menunjang peningkatan berat badan anak. Kegiatan ini diawali dengan membuat rekap data penimbangan balita yang tidak naik berat badannya. Kemudian dilakukan validasi (penimbangan ulang) bagi balita yang tidak naik berat badannya. Kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi modifikasi resep menu makanan tambahan pada orang tua balita yang tidak naik berat badannya. Orang tua balita juga diajak mempraktikkan langsung pembuatan modifikasi menu makanan tambahan, diharapkan orang tua dapat membuat secara mandiri di rumah. Setelah dilakukan demonstrasi pada orangtua balita dilakukan penimbangan ulang untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan berat badan setelah dilakukan intervensi.
130	MAMI BERANTING (MASYARAKAT MIJEN BERSAMA ATASI STUNTING)	Inovasi MAMI BERANTING telah diimplementasikan sejak berlakunya Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mijen Nomor P/02D/440/I/2022 tentang Program Inovasi Puskesmas di UPTDPuskesmas Mijen dengan melibatkan petugas kesehatan Puskesmas, kader kesehatan, pihak Kelurahan, Kecamatan, Sekolah, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Inovasi MAMI BERANTING sangat inovatif sehingga mampu mengatasi permasalahan kasus stunting. Inovasi ini memiliki yaitu (1) pelaksanaan edukasi baik secara langsung (individu maupun kelompok) maupun melalui media digital yang dapat diakses masyarakat secara efisien.dan (2) adanya pemeriksaan status kesehatan secara menyeluruh, baik kesehatan fisik secara umum dan khusus sampai pada status kesehatan lingkungan yang berdampak secara langsung pada kelompok rentan sebagai sasaran program inovasi. Kegiatan MAMI BERANTING merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan asesmen, intervensi, dan monitoring evaluasi bagi

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		balita, ibu hamil, remaja, dan calon pengantin.

Sumber: Bida Kota Semarang, 2025

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2026 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan nasional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global dan domestik, kondisi ekonomi daerah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBD tahun 2026. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global, telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kota Semarang, serta arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025 – 2029.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Situasi ekonomi global 2024-2025 masih menghadapi tantangan, dengan kinerja perekonomian yang bervariasi antarnegara serta ketidakpastian yang meningkat di awal 2025. Sepanjang tahun 2024, negara-negara Asia, seperti India, Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Indonesia tumbuh solid di tengah situasi ekonomi global yang volatil. Di sisi lain, perekonomian negara-negara Eropa mulai membaik, sejalan dengan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat inflasi yang mendekati target European Central Bank (ECB). Meski demikian, Jerman yang merupakan perekonomian terbesar di Eropa terus mengalami pelemahan sepanjang tahun 2024, terutama akibat pelemahan permintaan

domestik, tingginya harga energi, berkurangnya permintaan luar negeri terutama dari Tiongkok, serta kondisi politik domestik yang mempengaruhi investasi. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat mencatat pertumbuhan solid yang didorong oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, meski di tengah inflasi yang tinggi dan suku bunga yang masih relatif tinggi.

Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat memasuki 2025, seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang memicu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan paling signifikan terjadi di AS, terutama terkait kebijakan tarif. Pengumuman kebijakan tarif resiprokal oleh AS pada 2 April 2025 memicu gejolak signifikan pada pasar keuangan global. Tarif impor tinggi yang diterapkan AS pada mitra dagangnya, yang kemudian direspon dengan tindakan retaliasi oleh Tiongkok, telah memicu peningkatan tensi perdagangan internasional. Kondisi pemburukan perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun 2025.

Bagi Indonesia, transmisi dampak terjadi melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan jalur arus modal (KEM_PPKF 2026). Dari jalur perdagangan, tarif AS berpotensi menurunkan ekspor Indonesia langsung ke AS maupun secara tidak langsung melalui penurunan permintaan negara-negara mitra dagang Indonesia (khususnya Tiongkok dan negara tujuan ekspor Indonesia) yang selanjutnya memicu penurunan harga komoditas global. Hal ini berisiko menekan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan negara, kemampuan negara melakukan belanja, serta peningkatan beban utang. Dari jalur arus modal, ketidakpastian global meningkatkan volatilitas sektor keuangan. Sentimen negatif di pasar keuangan telah memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang ke aset safe haven seperti emas dan obligasi Eropa dan Jepang. Tekanan arus modal keluar ini menyebabkan depresiasi rupiah, yang selanjutnya dapat meningkatkan biaya impor dan berisiko mendorong inflasi domestik.

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (yoy) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, turut ditopang peran Pemerintah melalui stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta intervensi harga pangan. Investasi tumbuh membukukan pertumbuhan moderat sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi akibat high base effect pemilu 2024, meskipun belanja meningkat di akhir triwulan. Ekspor masih stabil ditopang oleh ekspor sawit yang mencakup 36 persen dari total ekspor, diikuti baja hasil hilirisasi (6,6 persen). Dari sisi produksi, pertanian menjadi penopang dengan pertumbuhan melampaui 10 persen terutama didukung distribusi pupuk yang semakin baik sehingga petani dapat mengoptimalkan momentum panen raya. Industri pengolahan yang menjadi andalan melalui hilirisasi juga tumbuh solid.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Regional

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung sepanjang tahun 2024, kinerja ekonomi Jawa Tengah tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Hingga akhir tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibandingkan capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen. Meski mengalami perlambatan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92 persen (c-to-c), meskipun sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03 persen (c-to-c).

Dari sisi kontribusi, Jawa Tengah memiliki peranan penting dalam perekonomian Pulau Jawa maupun nasional. Jawa Tengah berkontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa dan 8,25 persen terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini menempati posisi ketiga tertinggi di kawasan Jawa setelah DIY (5,03 persen) dan Banten (4,79 persen), serta di atas Jawa Timur (4,93 persen) dan DKI Jakarta (4,90 persen). Faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,05 persen, menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Ekspor meningkat sebesar 4,25 persen, didorong oleh permintaan dari pasar internasional, terutama untuk produk industri seperti alas kaki. Sementara itu, investasi tumbuh sebesar 1,88 persen, sejalan dengan kelanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional serta proyek-proyek swasta di wilayah Jawa Tengah. Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi motor utama pertumbuhan. Industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen, didukung oleh peningkatan impor bahan baku industri, khususnya bahan baku alas kaki yang meningkat 4,22 persen (yoy) akibat naiknya permintaan dari pasar Amerika Serikat dan Eropa. Sektor konstruksi juga menunjukkan performa positif dengan pertumbuhan sebesar 0,83 persen, selaras dengan peningkatan penjualan semen yang tumbuh 9,73 persen.

Stabilitas ekonomi Jawa Tengah tercermin pula dari kondisi inflasi yang terkendali. Inflasi Jawa Tengah selama 2024 tercatat sebesar 1,67 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2,89 persen. Inflasi tetap berada dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen, dengan komoditas

penyumbang utama inflasi yaitu emas, beras, minyak goreng, kopi bubuk, dan sigaret kretek mesin. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Tegal sebesar 2,19 persen, sedangkan terendah di Kota Surakarta sebesar 1,50 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang solid turut berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita meningkat dari Rp45,17 juta di tahun 2023 menjadi Rp47,97 juta di tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil turun menjadi 4,78 persen pada Agustus 2024, dari sebelumnya 5,13 persen. Kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan dari 10,77 persen (Maret 2023) menjadi 9,58 persen (September 2024). Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan Rasio Gini membaik, dari 0,369 menjadi 0,364.

Melihat capaian tersebut, perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,90-6,30 persen. Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang 3 ± 1 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan diproyeksikan turun ke 3,86-3,74 persen, TPT ke kisaran 5,40-5,10 persen, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp50,73-51,73 juta, dan Rasio Gini membaik ke 0,360. Stabilitas ekonomi yang terjaga ini diharapkan akan memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah di masa depan.

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 difokuskan pada penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, serta inklusif. Arah kebijakan meliputi peningkatan kapasitas sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, didukung infrastruktur merata dan berkualitas. Pemerintah mendorong investasi, meningkatkan rasio kemandirian fiskal, serta memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerataan ekonomi diutamakan dengan perluasan lapangan kerja, akses ekonomi produktif, serta pemerataan layanan dasar bagi masyarakat miskin. Pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan berkualitas. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan pelatihan tenaga kerja, pemagangan sesuai kebutuhan dunia usaha, serta pemberdayaan angkatan kerja. Kesejahteraan petani didorong melalui penguatan database, peningkatan kompetensi, akses pasar, serta perlindungan usaha tani. Selain itu, pembangunan ekonomi hijau terus dikembangkan untuk menciptakan green jobs dan investasi ramah lingkungan. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan sektor keuangan syariah, UMKM, serta pemanfaatan ekonomi digital. Seluruh strategi ini bertujuan menciptakan ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Untuk kondisi perekonomian di Kota Semarang, Laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan daya tahan dan perkembangan positif di berbagai sektor ekonomi. Tren ini menunjukkan bahwa Kota Semarang terus mengalami kemajuan dalam aktivitas perdagangan, jasa, industri, serta sektor pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dengan angka LPE turun menjadi 5,62. Penurunan

ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dinamika ekonomi global maupun tantangan domestik yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di kota ini. Faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan kebijakan perdagangan, serta fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada investasi dan daya beli masyarakat. Sementara itu, faktor internal seperti perubahan kebijakan daerah, perlambatan sektor unggulan, serta perubahan pola konsumsi dan produksi juga bisa menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

Kondisi perekonomian daerah tahun 2026 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a) Isu perubahan iklim

Perubahan iklim yang semakin ekstrem juga meningkatkan risiko ketahanan pangan dan energi global. Bencana alam akibat faktor iklim yang lebih sering terjadi dapat mengganggu produksi pertanian dan memicu volatilitas harga pangan internasional. Di sisi lain, transisi menuju energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon mengubah struktur permintaan energi dan komoditas mineral, sehingga menuntut negara-negara untuk mampu menyesuaikan diri dengan tren ini, apabila tidak ingin kehilangan daya saing di sektor ekspor energi dan bahan baku industri hijau. Hal ini berdampak pada perlunya kebijakan dan strategi mendukung green economy investment yang masih perlu ditingkatkan implementasinya di Kota Semarang, khususnya pada sektor IKM dan UMKM. Perubahan iklim juga dapat berpengaruh terhadap penurunan kondisi infrastruktur di Kota Semarang. Isu terkait ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina

Konflik antara Rusia dan Ukraina diindikasikan akan berdampak terhadap terganggunya pasokan pangan global yang mendorong peningkatan harga pangan global sehingga mengakibatkan krisis pangan dunia. Hal ini karena Rusia dan Ukraina adalah negara eksportir gandum/terigu terbesar di dunia. Krisis pangan akan sangat berdampak terhadap negara berpendapatan rendah, negara dengan konsumsi gandum yang tinggi, dan mendorong substitusi komoditas pangan di berbagai negara. Selain itu, kondisi perang dagang dan perebutan pengaruh antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia (Amerika Serikat dan Tiongkok) menjadi hal yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan di tahun 2026.

b) Isu terkait eskalasi perang dagang dan perang tarif

Ketidakpastian global diperkirakan masih tinggi dalam beberapa tahun ke depan, dipicu oleh fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya proteksionisme. Polarisasi ekonomi dunia, terutama akibat ketegangan perdagangan dan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, berpotensi menghambat perdagangan internasional dan investasi global. Risiko eskalasi perang dagang, seperti kenaikan tarif AS terhadap Kanada,

Meksiko, dan Tiongkok, pengenaan tarif atas produk baja dan aluminium yang masuk pasar AS, serta tarif resiprokal pada mitra dagang AS, juga dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan potensi inflasi dan menekan kinerja perdagangan internasional. Dampaknya eskalasi perang dagang juga dirasakan Indonesia, khususnya Kebijakan tarif baru yang diluncurkan oleh Pemerintah Amerika Serikat di tahun 2025 membawa dampak jangka pendek dan jangka panjang. Pasar yang cenderung protektif, akan membuat pasar ekspor Indonesia jadi terganggu. Di sisi lain, pasar ekonomi Indonesia yang besar menjadi daya tarik bagi negara-negara lain untuk mengalihkan pasarnya dari Amerika Serikat ke Indonesia yang akan mengakibatkan peningkatan nilai impor. Konstelasi ekonomi yang cenderung berkelompok juga dapat menjadi potensi sekaligus tantangan ekonomi bagi ekonomi Indonesia.

Selain isu-isu tersebut, pertumbuhan perekonomian tahun 2025-2026 juga masih dibayangi oleh beberapa risiko dan tantangan lainnya, antara lain:

1) Pemulihan Ekonomi pasca pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian terutama bagi UMKM lokal. Pencabutan status pandemi dan berubah menjadi endemi merupakan peluang bagi sektor UMKM untuk kembali pulih seperti kondisi sebelum Covid-19.

2) Inovasi disruptif

Disruptive innovation merupakan suatu inovasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dan dapat secara drastis mengubah pasar, seperti fenomena kecerdasan buatan yang berpotensi menghilangkan pekerjaan tertentu yang bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Hal ini dapat disikapi sebagai tantangan, namun juga bisa menjadi potensi usaha baru bagi generasi muda yang lebih kreatif. Inovasi disruptif yang didominasi oleh perkembangan teknologi informasi ini tidak dapat dihindari karena masyarakat akan lebih memilih kemudahan dalam setiap aspek kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan mendukung seluruh pengusaha baik yang berplatform *online* maupun *offline* agar tetap dapat berkompetisi di pasar domestik maupun global.

3) Ancaman Inflasi

Polarisasi perdagangan yang terbentuk akan menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar yang mengganggu rantai pasok global, sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan yang memicu tekanan inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun inflasi di Kota Semarang sepanjang tahun 2024 relatif terkendali, namun kewaspadaan terhadap potensi inflasi tetap harus diperhatikan.

Di sisi lain, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Semarang di tahun 2026 antara lain:

- 1) Semarang memiliki potensi dari sisi lokasinya yang berada di tengah jalur nasional dan regional. Jalur masuknya pun lengkap, mulai dari Pelabuhan Tanjung Emas, Tol Trans Jawa, Stasiun Kereta Api, serta

Bandara Internasional Ahmad Yani, termasuk adanya akses penerbangan langsung dari Kota Semarang ke IKN melalui Balikpapan;

- 2) Potensi alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD yang masih cukup besar dan belum dioptimalkan, terutama yang berasal dari CSR perusahaan;
- 3) Adanya *Major Project* di Provinsi Jawa Tengah seperti Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Batang, dan KSPN Borobudur yang diharapkan akan ikut memberikan dampak pada perekonomian Kota Semarang sebagai *hub* kawasan-kawasan tersebut.
- 4) Adanya Proyek Startegis Nasional di Provinsi Jawa Tengah seperti Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Batang, dan KSPN Borobudur yang diharapkan akan ikut memberikan dampak pada perekonomian Kota Semarang sebagai hub kawasan-kawasan tersebut.
- 5) Pengembangan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas terus dilakukan di Kota Semarang, sehingga dukungan terhadap pertumbuhan investasi dapat terjaga untuk menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri;
- 6) Pemerintah Daerah Kota Semarang berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang keterampilan sehingga menopang berbagai kegiatan bisnis dalam skala kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini termasuk pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan kinerja bisnis dan mengakses sumber pendanaan dan *market place*;
- 7) Inflasi yang relatif terkendali dan terhitung stabil. Laju inflasi tahun 2024 sebesar 1,67%, ini termasuk angka yang bagus ditengah gonjang ganjing adanya perang geopolitik, terlebih di tahun sebelumnya Kota Semarang mengalami peningkatan inflasi. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, Kota Semarang tidak termasuk tinggi inflasinya.

Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Semarang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 maka prospek perekonomian daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang Tahun 2026 ditargetkan antara 5,9-6,3%;
- Sedangkan tingkat inflasi tahun 2026 ditargetkan akan berada di kisaran $2,5 \pm 1\%$ dengan asumsi Pemerintah Kota Semarang mampu menjaga harga komoditas dasar di tingkat domestik;
- Nilai Investasi akan naik dari sisi PMTB yaitu 9.974.250.000.000;
- Dengan optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, maka Tingkat kemiskinan 2026 ditargetkan turun menjadi 3,7%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2026 ditargetkan 5,4-5,1 % dari total seluruh angkatan kerja di Semarang.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara

efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2025-2029. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan agar daerah lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu juga untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan pemantauan dan evaluasi guna menjaga sinergitas kebijakan fiskal nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 di tahun 2026, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem pangan kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 di tahun 2026 melalui peningkatan penerimaan daerah, penajaman alokasi belanja, dan upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Suatu daerah yang kemampuan keuangannya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Gambaran realisasi dan proyeksi keuangan daerah serta kerangka pendanaan kemampuan keuangan Daerah Kota Semarang tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 s/d 2026

URAIAN	TA 2023			TA 2024			TA 2025		TA 2026
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	TARGET RKPD
PENDAPATAN DAERAH									
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.865.712.538.632	2.884.216.349.076	2.835.150.144.867	3.161.678.857.823	3.163.314.524.405	2.885.308.677.872	3.826.262.515.007	3.904.690.263.565	4.176.592.395.099
Pajak Daerah	2.190.083.500.000	2.200.262.872.393	2.132.818.531.293	2.389.028.620.494	2.389.028.620.494	2.198.600.674.075	3.040.722.250.000	3.090.722.250.000	3.280.490.000.000
Retribusi Daerah	149.306.250.120	152.519.479.211	128.708.007.029	666.461.818.551	666.899.665.632	539.634.310.123	688.841.797.729	695.371.570.256	755.309.439.267
<i>a. Retribusi Non BLUD</i>	149.306.250.120	152.519.479.211	128.708.007.029	218.359.266.726		131.401.087.135			
<i>b. Retribusi BLUD</i>				448.102.551.825		408.233.222.988			
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	73.297.199.962	76.956.408.922	73.271.009.532	79.688.418.778	79.688.418.778	83.624.549.830	84.386.062.278	80.494.038.309	89.792.419.488
Lain - lain PAD yang Sah	453.025.588.550	454.477.588.550	500.352.597.013	26.500.000.000	27.697.819.501	63.449.143.844	12.312.405.000	38.102.405.000	51.000.536.344
<i>a. BLUD</i>				-		-	-		-
<i>b. Selain BLUD</i>				26.500.000.000		-	-		-
Pendapatan Transfer	1.962.790.329.000	2.552.233.158.470	2.517.721.130.912	2.069.914.957.000	2.572.698.050.218	2.582.518.050.609	1.780.983.757.201	2.373.395.332.308	1.405.080.804.400
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.380.790.329.000	1.891.887.390.670	1.908.875.148.905	1.487.914.957.000	1.969.330.706.218	2.001.687.134.069	1.549.748.172.000	2.078.070.424.308	1.141.882.315.000
Dana Perimbangan	1.371.841.248.000	1.877.271.611.670	1.894.259.369.905	1.456.961.374.000	1.938.377.123.218	1.970.733.551.069	1.549.748.172.000	2.078.070.424.308	1.141.882.315.000
Dana Insentif Daerah (DID)	8.949.081.000	14.615.779.000	14.615.779.000	30.953.583.000	30.953.583.000	30.953.583.000	-		-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	582.000.000.000	660.345.767.800	608.845.982.007	582.000.000.000	603.367.344.000	580.830.916.540	231.235.585.201	295.324.908.000	263.198.489.400
Pendapatan Bagi Hasil	582.000.000.000	623.502.767.800	577.657.021.099	582.000.000.000	582.000.000.000	570.096.274.220	231.235.585.201	274.695.908.000	263.198.489.400
Bantuan Keuangan	-	36.843.000.000	31.188.960.908	-	21.367.344.000	10.734.642.320	-		-
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	22.162.938.117	-
Hibah	-	-	-	-	-	-	-		-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-		-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	22.162.938.117	-
Jumlah Pendapatan Daerah	4.828.502.867.632	5.436.449.507.546	5.352.871.275.779	5.231.593.814.823	5.736.012.574.623	5.467.826.728.481	5.607.246.272.208	6.300.248.533.990	5.581.673.199.499

URAIAN	TA 2023			TA 2024			TA 2025		TA 2026
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	TARGET RKPD
BELANJA DAERAH									
Belanja Operasi	3.932.024.402.000	4.484.934.176.183	4.245.924.121.376	4.185.641.689.236	4.714.629.692.892	4.391.696.983.728	4.452.195.277.608	5.240.386.471.717	4.987.919.468.733,76
Belanja Pegawai	1.629.553.033.842	1.758.299.040.212	1.687.456.380.696	1.799.293.800.988	1.935.552.704.362	1.859.371.617.699	2.019.380.050.124	2.124.755.330.167	1.906.678.819.613
Belanja Barang dan Jasa	2.184.824.451.158	2.497.716.928.786	2.342.511.823.419	2.242.762.248.006	2.531.552.749.870	2.292.957.503.574	2.342.570.385.755	2.927.214.938.594	2.935.974.803.390,76
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	3.500.000.000	147.490.500	234.143.184.455	3.500.000.000	-	-
Belanja Hibah	110.017.617.000	221.288.907.185	208.900.517.261	134.203.895.712	242.023.903.630	5.224.678.000	78.607.041.729	185.177.102.956	135.314.845.730,00
Belanja Bantuan Sosial	7.629.300.000	7.629.300.000	7.055.400.000	5.881.744.530	5.352.844.530	-	8.137.800.000	3.239.100.000	9.951.000.000
Belanja Modal	981.957.166.912	1.206.866.061.806	1.089.358.396.203	1.190.512.552.452	1.220.323.934.380	1.103.981.680.801	1.147.623.934.597	1.152.546.897.378	857.253.730.765,24
Belanja Modal Tanah	38.803.972.800	37.488.639.117	35.823.835.646	122.576.913.626	62.782.873.626	37.577.129.977	1.214.101.000	4.821.294.000	10.650.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.024.522.897	330.540.229.212	305.420.994.800	219.367.539.349	278.862.510.651	247.156.332.941	185.372.494.583	228.844.228.939	150.514.898.918,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	356.771.811.988	311.947.815.903	266.929.266.612	365.060.747.645	340.613.018.294	303.458.858.290	355.339.172.941	342.327.372.084	205.732.815.934,65
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	443.856.041.286	510.441.436.665	465.608.870.162	481.544.087.026	523.784.445.932	501.661.302.009	603.423.026.145	555.567.949.125	487.000.964.187,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.339.589.831	16.406.350.619	15.537.411.483	823.392.542	13.104.873.595	13.054.457.584	436.695.132	13.775.590.155	2.161.100.784,48
Belanja Modal Aset Lainnya	161.228.110	41.590.290	38.017.500	1.139.872.264	1.176.212.282	1.073.600.000	1.838.444.796	7.210.463.076	1.193.950.940
Belanja Tidak Terduga	69.839.913.090	11.116.363.820	5.182.995.600	84.458.933.581	22.109.804.214	3.327.666.030	99.607.975.983	71.828.025.041	15.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	69.839.913.090	11.116.363.820	5.182.995.600	84.458.933.581	22.109.804.214	3.327.666.030	99.607.975.983	71.828.025.041	15.000.000.000
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Belanja Daerah	4.983.821.482.002	5.702.916.601.809	5.340.465.513.179	5.460.613.175.269	5.957.063.431.486	5.499.006.330.559	5.699.427.188.188		5.860.173.199.499
Surplus / (Defisit) Belanja Daerah	(155.318.614.370)	(266.467.094.263)	12.405.762.600	(229.019.360.446)	(221.050.856.863)	(31.179.602.078)	(92.180.915.980)	(164.512.860.146)	(278.500.000.000)
PEMBIAYAAN DAERAH									
Penerimaan Pembiayaan	270.790.614.370	318.939.094.263	318.939.094.263	296.341.360.446	288.372.856.863	288.372.784.863	153.680.915.980	194.512.860.146	300.000.000.000
Sisa lebih Perhitungan Anggaran	270.790.614.370	318.939.094.263	318.939.094.263	296.341.360.446	288.372.856.863	288.372.784.863	153.680.915.980	194.512.860.146	300.000.000.000

URAIAN	TA 2023			TA 2024			TA 2025		TA 2026
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	TARGET RKPD
Tahunsebelumnya (SiLPA)									
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-		-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-		-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-		-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-		-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-		-
Pengeluaran Pembiayaan	115.472.000.000	52.472.000.000	42.972.000.000	67.322.000.000	67.322.000.000	62.703.035.639	61.500.000.000	30.000.000.000	21.500.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-		-
Penyertaan Modal Daerah	111.472.000.000	52.472.000.000	42.972.000.000	63.322.000.000	63.322.000.000	62.703.035.639	57.500.000.000	30.000.000.000	20.500.000.000
<i>PT, Bhumi Pandanaran Sejahtera</i>	<i>11.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	-	-	-	-	<i>4.000.000.000</i>		<i>5.000.000.000</i>
<i>PDAM Tirta Moedal</i>	<i>48.972.000.000</i>	<i>18.972.000.000</i>	<i>18.972.000.000</i>	<i>37.322.000.000</i>	<i>37.322.000.000</i>	-	<i>30.000.000.000</i>		<i>10.000.000.000</i>
<i>PD BPR Bank Pasar</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	-	<i>2.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	-	<i>500.000.000</i>		-
<i>PD BPR BKK</i>	-	-	-	-	-	-	-		<i>500.000.000</i>
<i>PT Taman Satwa</i>	<i>25.000.000.000</i>	<i>5.000.000.000</i>	-	-	-	-	-		<i>5.000.000.000</i>
<i>Bank Jateng</i>	<i>24.000.000.000</i>	<i>24.000.000.000</i>	<i>24.000.000.000</i>	<i>24.000.000.000</i>	<i>24.000.000.000</i>	-	<i>23.000.000.000</i>		-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-		-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-	4.000.000.000		1.000.000.000
<i>Dana bergulir</i>	<i>4.000.000.000</i>	-	-	<i>4.000.000.000</i>	<i>4.000.000.000</i>	-	<i>4.000.000.000</i>		<i>1.000.000.000</i>
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai	-	-	-	-	-	-	-		-

URAIAN	TA 2023			TA 2024			TA 2025		TA 2026
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	TARGET RKPD
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
Pembiayaan Netto	155.318.614.370	266.467.094.263	275.967.094.263	229.019.360.446	221.050.856.863	225.669.749.224	92.180.915.980	164.512.860.146	278.500.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	288.372.856.863	-	-	194.490.147.146	-		-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2025

Retribusi pada struktur tahun 2026 menggunakan nomenklatur sesuai UU no 1 tahun 2022

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan instrumen yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dinilai melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026 dan kemungkinan di tahun-tahun mendatang, membuat perlunya peningkatan kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui belanja daerah tidak terlepas dari kapasitas fiskal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - Penerapan ketentuan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sudah menetapkan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah sebelumnya belum ada membuat potensi pendapatan yang semakin meningkat.
 - Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan, antara lain melalui pemutakhiran data potensi pajak;
 - Pengoptimalan potensi OPSEN pajak kendaraan bermotor melalui sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait serta peningkatan sosialisasi, operasi dan penambahan titik layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran pajak berbasis IT (e-tax), peningkatan ketaatan wajib pajak, dan peningkatan SDM untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak, termasuk di dalamnya peningkatan basis data pajak dengan menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung;
 - Mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi melalui optimalisasi objek retribusi yang belum maksimal pendapatannya dengan bekerjasama dengan pihak di luar Pemerintah Kota Semarang, termasuk dari Kejaksaan dan Kepolisian serta peningkatan data potensi retribusi dengan mendasarkan kepada kondisi aktual.
- 2) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden kepada Pemda atas Penyertaan Modal perusahaan milik daerah, antara lain dari PDAM, PT. BPS, Perusda Bank Pasar, Perusda BPR/BKK, PT. Taman Satwa, dan PT. Bank Jateng;
- 4) Optimalisasi aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sumber pendapatan daerah;

- 5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Penyesuaian akibat penurunan belanja Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026; dan
- 7) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Arah kebijakan pendapatan daerah memperhatikan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2026 sebesar Rp5.581.673.199.499,-;
- 2) Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp4.176.592.395.099,-;
- 3) Dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp3.280.490.000.000,-; Retribusi Daerah sebesar Rp755.309.439.267,-; yang terdiri dari Retribusi Non BLUD sebesar Rp291.732.967.895,- dan Retribusi BLUD sebesar Rp463.576.471.372,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp89.792.419.488,-; serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp51.000.536.344,-.

Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2026

No	URAIAN	PROYEKSI
4	PENDAPATAN DAERAH	5.581.673.199.499
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.176.592.395.099
4.1.01	Pajak Daerah	3.280.490.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	47.339.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	26.810.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	804.600.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	781.390.000.000
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	995.000.000.000
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	310.000.000.000
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	375.000.000.000
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	235.000.000.000
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	30.000.000.000
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	45.000.000.000
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	400.000.000.000
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	225.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	755.309.439.267
	NON BLUD	291.732.967.895
	DINAS PENDIDIKAN	867.074.633
	DINAS PEKERJAAN UMUM	321.838.000
	DINAS PENATAAN RUANG	62.100.119.427

No	URAIAN	PROYEKSI
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.325.000.000
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	57.245.000
	DINAS TENAGA KERJA	5.896.235.000
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	55.000.000.000
	DINAS PERHUBUNGAN	29.819.019.025
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12.635.109.472
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5.089.640.000
	DINAS PERIKANAN	294.015.153
	DINAS PERTANIAN	418.514.302
	DINAS PERDAGANGAN	100.000.000.000
	DINAS PERINDUSTRIAN	56.160.000
	BAGIAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	313.025.625
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.105.000.000
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	95.026.700
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	8.570.000
	KECAMATAN SEMARANG UTARA	8.089.200
	KECAMATAN SEMARANG BARAT	5.900.000
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	6.000.000
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	58.850.000
	KECAMATAN GUNUNG PATI	3.434.700
	KECAMATAN TUGU	6.400.000
	KECAMATAN MIJEN	7.069.758
	KECAMATAN GENUK	4.098.742
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	10.418.590
	KECAMATAN TEMBALANG	15.799.620
	KECAMATAN CANDISARI	5.174.948
	KECAMATAN BANYUMANIK	29.960.000
	KECAMATAN NGALIYAN	65.900.000
	KECAMATAN GAYAMSARI	39.600.000
	KECAMATAN PEDURUNGAN	64.680.000
	BLUD	463.576.471.372
	RSUD KRMT WONGSONEGORO	323.186.905.419
	UPTD TRANS DINAS PERHUBUNGAN	40.500.000.000
	UPTD PUSKESMAS DINAS KESEHATAN	92.887.916.675
	DINAS KESEHATAN LAB KESEHATAN	2.001.649.278
	RSUD MIJEN	5.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89.792.419.488
	PDAM Tirta Moedal	33.001.031.250
	PT. BUMI PANDANARAN SEJAHTERA (BPS)	431.577.551
	PERUSDA BRP BANK PASAR	1.004.000.000
	PERUSDA BPR BKK	1.177.482.174
	PT. TAMAN SATWA	1.423.078.513
	PT. BANK JATENG	52.755.250.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.000.536.344
	RSUD KRMT WONGSONEGORO	6.500.536.344
	DINAS PERDAGANGAN	1.000.000.000

No	URAIAN	PROYEKSI
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.500.000.000
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.000.000.000

Sumber : Bappeda, Bapenda Kota Semarang, 2025
Retribusi pada struktur tahun 2025 menggunakan nomenklatur sesuai UU no 1 tahun 2022

4) Pendapatan Transfer tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.405.080.804.400,-. Angka ini menyesuaikan dengan kebijakan transfer ke daerah terbaru dari Kementrian Keuangan. Pemerintah Kota Semarang akan mengalokasikan target Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif daerah (DID), serta Bantuan Keuangan (Bankeu) setelah ada kepastian anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2022 s/d 2025), Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu lebih besar daripada Pendapatan Transfer dengan perbandingan rerata antara PAD: Pendapatan Transfer: Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah 74,83: 25,17: 0,00. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Kota Semarang memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Di rencana tahun 2026, rasio kemandirian fiskal daerah ini diperkirakan berada di 74,83%. Porsi Pendapatan Transfer yang lebih kecil menunjukkan rendahnya celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Secara lengkap, persentase sumber pendapatan daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2025 dan Proyeksi 2026

KEUANGAN DAERAH	2022	2023	2024	2025	2026
	APBD Induk	APBD Induk	APBD Induk	APBD Induk	Proyeksi RKPD
Pendapatan Asli Daerah / PAD (%)	53,46	59,35	60,43	68,24	74,83
Pendapatan Transfer (%)	46,54	40,65	39,57	31,76	25,17
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2025

Tabel 3.4 Rincian Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022-2025 dan Proyeksi 2026

KEUANGAN DAERAH	APBD Induk 2022	APBD Induk 2023	APBD Induk 2024	APBD Induk 2025	Proyeksi RKPD 2026
	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)
1) Pajak Daerah	78,05	76,42	75,56	79,47	78,54
2) Retribusi Daerah	4,93	5,21	21,08	18,00	18,08
3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1,74	2,56	2,52	2,21	2,15
4) Lain-lain PAD yang Sah	15,27	15,81	0,84	0,32	1,22
Pendapatan Asli Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

KEUANGAN DAERAH	APBD Induk 2022	APBD Induk 2023	APBD Induk 2024	APBD Induk 2025	Proyeksi RKPD 2026
	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	74,80	70,35	71,88	87,02	81,27
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	25,20	29,65	28,12	12,98	18,73
Pendapatan Transfer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1) Hibah	-	-	-	-	-
2) Dana Darurat	-	-	-	-	-
3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dari sisi APBD Induk, alokasi Belanja Daerah Kota Semarang selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2022-2025) didominasi oleh Belanja Operasi dengan rerata 85,12%, disusul kemudian oleh belanja modal dengan rerata 14,63% dan belanja tidak terduga dengan rerata 0,26% dari belanja daerah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Persentase Pembentuk Belanja Daerah Tahun 2022 s/d 2025 dan Proyeksi 2026

KEUANGAN DAERAH	2022	2023	2024	2025	2026
	APBD Murni	APBD Murni	APBD Murni	APBD Murni	Proyeksi RKPD
Belanja Operasi (%)	78,01	78,90	76,65	80,21	85,12
Belanja Modal (%)	21,00	19,70	21,80	18,88	14,63
Belanja Tidak terduga (%)	0,99	1,40	1,55	0,91	0,26
BELANJA DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2025

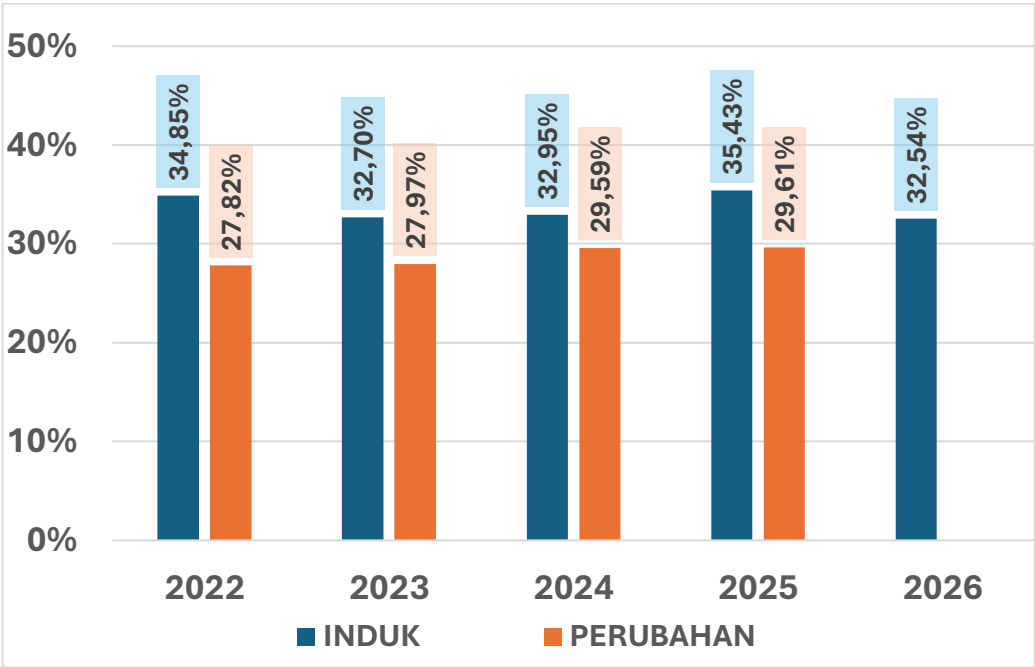
Alokasi Belanja Daerah RKPD tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Total Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2026 mencapai Rp5.860.173.199.499. Belanja ini menurun jika dibandingkan dengan belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2025 yang mencapai Rp6.464.761.394.136, atau menurun sebesar Rp604.588.194.637. Penurunan ini disebabkan karena belanja dari DAK, Bantuan Keuangan Provinsi serta Dana Insentif Fiskal yang belum

diperhitungkan serta adanya penurunan penerimaan Transfer ke Daerah pada Dana Transfer Umum.

Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD tahun 2026 adalah:

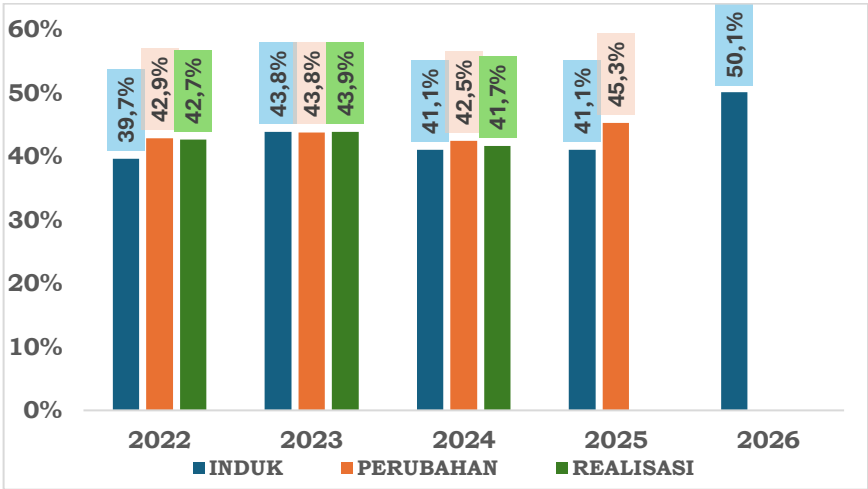
- 1) Proyeksi struktur keuangan Belanja Daerah disusun dengan memperhatikan kondisi realisasi, namun tetap memperhatikan besaran belanja wajib/mengikat dan kebutuhan prioritas di tahun berjalan. Pada proyeksi RKPD 2026, proporsi belanja operasi terhadap belanja daerah sebesar 85,12%, proporsi belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 14,63%, dan proporsi belanja tidak terduga terhadap belanja daerah sebesar 0,26%.
- 2) Belanja Daerah tahun 2026 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan *mandatory spending* seperti pengalokasian anggaran minimal pada sektor Pendidikan dan Kesehatan.
 - b. Penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - c. Pemenuhan program prioritas Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
 - d. Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah.
 - e. Mendorong pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi daerah.
 - f. Pengembangan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar wilayah. Oleh karena itu, Kota Semarang mengalokasikan anggaran bagi kelurahan-kelurahan melalui fasilitasi musrenbangkel sebagai anggaran pendamping selain anggaran kelurahan yang bersumber dari DAU.
 - g. Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, antara lain Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengendalian inflasi.
- 3) Belanja pegawai pada RKPD 2026 meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun tanpa memperhitungkan belanja pegawai yang dianggarkan melalui DAK, karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan resmi dari Kementerian terkait. Secara besaran anggaran, belanja Pegawai menurun dari Rp2.124.755.330.167 pada Perubahan APBD TA 2025, menjadi sebesar Rp1.906.678.819.613 pada RKPD Tahun 2026. Menurun sebesar Rp218.076.510.554. Penurunan tersebut terjadi karena ada perubahan asumsi-asumsi perhitungan yang digunakan, antara lain terkait dengan akses.
Secara total, proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah untuk kebutuhan di tahun 2026 adalah sebesar 32,54%. Porsi belanja pegawai tersebut belum memperhitungkan alokasi belanja pegawai yang bersumber dari DAK.

Perhitungan gaji dan tunjangan tersebut juga berpedoman pada ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi PNS, CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dalam rancangan belanja pegawai tahun 2026, Gaji dan tunjangan diperhitungkan sebanyak 14 kali dengan telah memperhitungkan antisipasi pemberian Gaji dan Tunjangan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR).



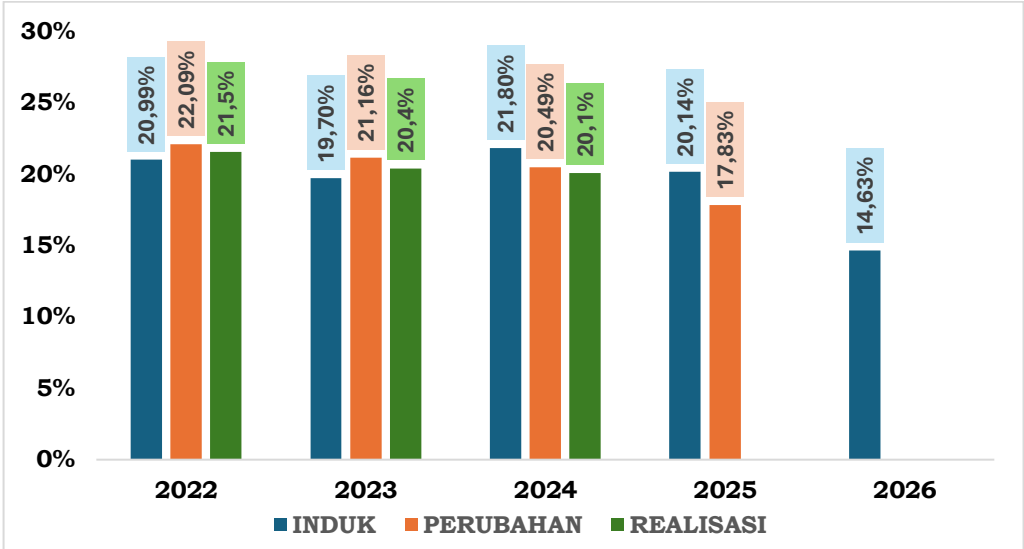
Gambar 3.1 Porsi APBD Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah (%)

- 4) Untuk belanja Barang dan Jasa, pada RKPD 2026 porsi alokasi belanja barang dan jasa ditargetkan sebesar 50,10% dari total belanja daerah, yaitu sebesar Rp.2.935.974.803.390,76 Bagian terbesar dari belanja barang dan jasa ini digunakan untuk belanja penunjang layanan publik, antara lain untuk Operasional RT dan RW, belanja BLUD, belanja *Universal Health Coverage* (UHC); pembayaran PPPK Paruh Waktu, Alih daya dan Penyedia jasa Lainnya Perorangan; penyediaan layanan transportasi publik Trans Semarang; pemeliharaan jalan, jembatan, sarana prasarana lingkungan permukiman serta penerangan jalan umum. Hal ini mengingat belanja barang dan jasa sifatnya mendukung kegiatan dan pemeliharaan.



Gambar 3.2 Porsi APBD Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah (%)

- 5) Belanja hibah dan bantuan sosial yang dialokasikan pada RKPD 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Besaran hibah pada RKPD Tahun 2026 menurun jika dibandingkan dengan hibah pada Perubahan APBD TA 2025 (menurun sebesar Rp49.862.257.226). Untuk belanja bantuan sosial, terdapat kenaikan sebesar Rp6.711.900.000.
- 6) Proyeksi belanja modal pada RKPD 2026 adalah sebesar Rp857.253.730.765,24 atau 14,63% dari pagu belanja daerah. Belanja Modal ini merupakan investasi langsung terhadap kebutuhan penyelesaian permasalahan kota.



Gambar 3.3 Porsi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah (%) dan Jasa Terhadap Belanja Daerah (%)

- 7) Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Semarang. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya. Sebagai antisipasi terhadap hal tersebut, BTT pada RKPD Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp15.000.000.000,- atau 0,26% dari total belanja daerah.

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2022 s/d 2026

URAIAN	TA 2023			TA 2024			TA 2025		TA 2026
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	TARGET RKPD
BELANJA DAERAH									
Belanja Operasi	3.932.024.402.000	4.484.934.176.183	4.245.924.121.376	4.185.641.689.236	4.714.629.692.892	4.391.696.983.728	4.452.195.277.608	5.240.386.471.717	4.987.919.468.733,76
Belanja Pegawai	1.629.553.033.842	1.758.299.040.212	1.687.456.380.696	1.799.293.800.988	1.935.552.704.362	1.859.371.617.699	2.019.380.050.124	2.124.755.330.167	1.906.678.819.613
Belanja Barang dan Jasa	2.184.824.451.158	2.497.716.928.786	2.342.511.823.419	2.242.762.248.006	2.531.552.749.870	2.292.957.503.574	2.342.570.385.755	2.927.214.938.594	2.935.974.803.390,76
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	3.500.000.000	147.490.500	234.143.184.455	3.500.000.000	-	-
Belanja Hibah	110.017.617.000	221.288.907.185	208.900.517.261	134.203.895.712	242.023.903.630	5.224.678.000	78.607.041.729	185.177.102.956	135.314.845.730,00
Belanja Bantuan Sosial	7.629.300.000	7.629.300.000	7.055.400.000	5.881.744.530	5.352.844.530	-	8.137.800.000	3.239.100.000	9.951.000.000
Belanja Modal	981.957.166.912	1.206.866.061.806	1.089.358.396.203	1.190.512.552.452	1.220.323.934.380	1.103.981.680.801	1.147.623.934.597	1.152.546.897.378	857.253.730.765,24
Belanja Modal Tanah	38.803.972.800	37.488.639.117	35.823.835.646	122.576.913.626	62.782.873.626	37.577.129.977	1.214.101.000	4.821.294.000	10.650.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.024.522.897	330.540.229.212	305.420.994.800	219.367.539.349	278.862.510.651	247.156.332.941	185.372.494.583	228.844.228.939	150.514.898.918,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	356.771.811.988	311.947.815.903	266.929.266.612	365.060.747.645	340.613.018.294	303.458.858.290	355.339.172.941	342.327.372.084	205.732.815.934,65
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	443.856.041.286	510.441.436.665	465.608.870.162	481.544.087.026	523.784.445.932	501.661.302.009	603.423.026.145	555.567.949.125	487.000.964.187,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.339.589.831	16.406.350.619	15.537.411.483	823.392.542	13.104.873.595	13.054.457.584	436.695.132	13.775.590.155	2.161.100.784,48
Belanja Modal Aset Lainnya	161.228.110	41.590.290	38.017.500	1.139.872.264	1.176.212.282	1.073.600.000	1.838.444.796	7.210.463.076	1.193.950.940
Belanja Tidak Terduga	69.839.913.090	11.116.363.820	5.182.995.600	84.458.933.581	22.109.804.214	3.327.666.030	99.607.975.983	71.828.025.041	15.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	69.839.913.090	11.116.363.820	5.182.995.600	84.458.933.581	22.109.804.214	3.327.666.030	99.607.975.983	71.828.025.041	15.000.000.000
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	4.983.821.482.002	5.702.916.601.809	5.340.465.513.179	5.460.613.175.269	5.957.063.431.486	5.499.006.330.559	5.699.427.188.188	6.464.761.394.136	5.860.173.199.499
Surplus / (Defisit) Belanja Daerah	(155.318.614.370)	(266.467.094.263)	12.405.762.600	(229.019.360.446)	(221.050.856.863)	(31.179.602.078)	(92.180.915.980)	(164.512.860.146)	(278.500.000.000)

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan APBD Murni, alokasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang dari tahun 2021-2024 sebagian besar bersumber dari SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir). Besaran penyertaan modal memperhatikan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, namun di tahun 2026 terdapat penyertaan modal yang nilainya di bawah Perda karena bertujuan untuk mendorong kemandirian BUMD tersebut. Adapun rencana Penyertaan Modal Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rencana Penyertaan Modal Daerah Kota Semarang Tahun 2026

No	BUMD	Rencana Penyertaan Modal Tahun 2026 (Rp)
1	PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera	5.000.000.000
2	PDAM Tirta Moedal	10.000.000.000
3	PD BPR Bank Pasar	-
4	PT Taman Satwa	5.000.000.000
5	Bank Jateng	-
6	Perusda BPR BKK	500.000.000
Jumlah		20.500.000.000

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang, 2025

Pada RKPD Tahun 2026 memperhitungkan alokasi penerimaan pembiayaan yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp300.000.000.000,- yang berasal dari Silpa. Besaran SiLPA ini disusun dengan memperhatikan potensi serapan belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah di tahun anggaran 2025. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang dikeluarkan direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp20.500.000.000,- dan Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir) sebesar Rp1.000.000.000,-.

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 s/d 2026

URAIAN	TA 2023			TA 2024			TA 2025		TA 2026
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	TARGET RKPD
PEMBIAYAAN DAERAH									
Penerimaan Pembiayaan	270.790.614.370	318.939.094.263	318.939.094.263	296.341.360.446	288.372.856.863	288.372.784.863	153.680.915.980	194.512.860.146	300.000.000.000
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahunsebelumnya (SiLPA)	270.790.614.370	318.939.094.263	318.939.094.263	296.341.360.446	288.372.856.863	288.372.784.863	153.680.915.980	194.512.860.146	300.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	115.472.000.000	52.472.000.000	42.972.000.000	67.322.000.000	67.322.000.000	62.703.035.639	61.500.000.000	30.000.000.000	21.500.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	111.472.000.000	52.472.000.000	42.972.000.000	63.322.000.000	63.322.000.000	62.703.035.639	57.500.000.000	30.000.000.000	20.500.000.000
PT, Bhumi Pandanaran Sejahtera	11.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	4.000.000.000		5.000.000.000
PDAM Tirta Moedal	48.972.000.000	18.972.000.000	18.972.000.000	37.322.000.000	37.322.000.000	-	30.000.000.000		10.000.000.000
PD BPR Bank Pasar	2.500.000.000	2.500.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-	500.000.000		-
PD BPR BKK	-	-	-	-	-	-	-		500.000.000
PT Taman Satwa	25.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-	-	-		5.000.000.000
Bank Jateng	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	-	23.000.000.000		-

URAIAN	TA 2023			TA 2024			TA 2025		TA 2026
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI	INDUK	PERUBAHAN	TARGET RKPD
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-		-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-	4.000.000.000		1.000.000.000
<i>Dana bergulir</i>	<i>4.000.000.000</i>	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-	4.000.000.000		1.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-		-
Pembiayaan Netto	155.318.614.370	266.467.094.263	275.967.094.263	229.019.360.446	221.050.856.863	225.669.749.224	92.180.915.980	164.512.860.146	278.500.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	288.372.856.863	-	-	194.490.147.146	-		-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas Pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2026. Prioritas Daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026 didasarkan pada:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029;
5. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045; dan
6. Pokok-pokok pikiran DPRD.



Gambar 4.1 Komponen Penyusunan RKPD Kota Semarang 2026

4.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045

Visi Kota Semarang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah “Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan”. Terdapat beberapa isu-isu yang dihadapi oleh Kota Semarang, yang meliputi rendahnya akses terhadap layanan sosial, ketimpangan kesejahteraan, kualitas infrastruktur perkotaan yang rendah, tingginya dampak bencana, dan sistem regulasi. Kunci transformasi Kota Semarang adalah fokus pada perdagangan berorientasi wisata,

transformasi menjadi *Smart City* dan *Society 5.0*, serta pembangunan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Visi bertujuan untuk mengatasi isu-isu tersebut dengan meningkatkan akses terhadap layanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur perkotaan, mengurangi dampak bencana, memperkuat regulasi, dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Visi ini berupaya memberikan solusi inovatif dan menjadi inspirasi bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Penjelasan makna visi tersebut adalah sebagai berikut:

Kota Metropolitan, mengandung arti peran dan fungsi Kota Semarang sebagai pusat aglomerasi wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Metropolitan Semarang diartikan sebagai metropolitan yang tidak hanya dibatasi oleh delineasi administratif tapi juga berdasarkan keterkaitan fungsi dengan daerah di sekitarnya. Dengan posisi letak Kota Semarang yang strategis yaitu di antara kota Jakarta dan kota Surabaya, berdekatan dengan Kawasan Industri Batang, Kendal, dan Brebes (pusat industri manufaktur dan teknologi di Indonesia), terhubung dengan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) nasional Candi Borobudur, dan peluang kedekatan akses dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru, di tahun 2045 Kota Semarang diharapkan dapat menjadi metropolitan yang berfungsi sebagai superhub yang didukung oleh konektifitas dan aksesibilitas yang baik. Dengan demikian perekonomian Kota Semarang akan meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pulau Jawa, yang berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045 diarahkan menjadi megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai Kota Metropolitan, di tahun 2045 Kota Semarang dapat menjadi kota yang meningkat kualitas perannya sebagai tempat bermukim, pusat kegiatan dan pelayanan ekonomi (bekerja), serta jasa pendukung lainnya (rekreasi) yang nyaman dan layak, serta dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang dan wilayah sekitarnya.

Kota Layak Huni, Mengandung arti bahwa Kota Semarang di tahun 2045 merupakan kota yang nyaman untuk dihuni dan beraktivitas oleh seluruh warga Kota Semarang maupun oleh warga sekitar Kota Semarang, baik dari sisi fisik (fasilitas perkotaan, permukiman, prasarana, sarana, dan lain-lain) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, karakter budaya, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). Sebagai kota yang layak huni, Kota Semarang diharapkan akan memiliki kualitas hidup tinggi, yang didukung oleh akses yang adil ke layanan perkotaan yang efisien; infrastruktur berkualitas, cerdas dan ramah lingkungan; sistem pemerintahan yang adaptif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pengambilan keputusan; memiliki perencanaan kota yang holistik; tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim; memiliki sistem ekonomi kota yang sirkular dan inklusif; memiliki sistem transportasi cerdas berkelanjutan.

Kota yang Maju, mengandung arti berdaya saing tinggi, tangguh, modern, inovatif, dan adil. Perekonomian Kota Semarang mampu berdaya saing tinggi, tumbuh di atas nasional dan provinsi dan berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pengembangan potensi sektor-

sektor unggulan, terutama pada sektor jasa pendukung industri dan perdagangan, dengan sumber daya manusianya yang produktif, kreatif dan unggul serta mampu bersaing di persaingan global. Kota yang tangguh, yang mampu mengantisipasi, menghadapi dan menangani tantangan dan krisis dari alam dan non alam dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kota yang modern, yang cerdas dengan dukungan infrastruktur mutakhir, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan layanan perkotaan yang cerdas, efisien, efektif, terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau, yang didukung oleh riset dan inovasi. Kota yang memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar berpendidikan tinggi, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan teknologi terbaru, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan inovasi di berbagai sektor untuk menunjang produktivitas dan peningkatan kualitas hidup kota dan warganya. Dengan kota dan warga yang terus berinovasi, maka Kota Semarang menjadi kota yang efisien, efektif dan berkelanjutan, yang mampu menghadapi tantangan global yang kompleks dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Kota yang adil, mampu menghadirkan layanan perkotaan dan kesejahteraan yang inklusif ke seluruh masyarakat Kota Semarang secara adil dalam segala aspek tanpa diskriminasi.

Kota yang Berkelanjutan, mengandung arti bahwa Kota Semarang menerapkan pembangunan yang menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan daya dukung dan daya tampung, dan memperhatikan kearifan lokal.

Dalam perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tangguh dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Adaptif dan Ramah Lingkungan;
4. Mewujudkan Ketahanan Kota yang Berbasis Ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas, dan Masyarakat; dan
5. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Dinamis, Efektif, dan Akuntabel.

4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah: “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, Dan Inklusif”. Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan

menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas ekspor-impor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dengan penguatan implementatif yang diarahkan pada ketahanan energi seperti transisi energi berbasis potensi lokal maupun efisiensi energi pada bangunan publik dan

transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- a. Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- b. Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- c. Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- d. Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.
2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.
3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.
4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.
5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.
6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.
7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

4.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Dalam sistem perencanaan pembangunan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Tahun 2026 merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 ini disusun dengan mempedomani RPJMD Tahun 2025-2029 karena masih dalam proses penyelesaian. Selain memperhatikan visi dan misi pembangunan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, isu strategis, dan prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional, penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kesesuaian dengan dokumen perencanaan, urgensi penanganan isu, dan kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Untuk memberikan arah kebijakan tematik untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka perwujudan visi Kota Semarang, maka ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Tahun 2025 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata
- Tahun 2026 : Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- Tahun 2027 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Produk Unggulan Daerah
- Tahun 2028 : Peningkatan Infrastruktur Strategis Kota
- Tahun 2029 : Penguatan Daya Saing Yang Mendorong Perekonomian Kota
- Tahun 2030 : Perwujudan Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif.

Tema pembangunan Kota Semarang tahun 2026 difokuskan pada “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” sebagai langkah awal pemenuhan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Tahun 2026 ini merupakan bagian tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, sekaligus merupakan tahun penguatan landasan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, maka target indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.1. Target di tahun 2026 merupakan target di RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah dilakukan sinkronisasi dengan target Provinsi Jawa Tengah pada forum Rapat Kerja Teknis.

Tabel 4.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026

POKOK VISI/MISI/TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
VISI : KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF						
Pokok Visi 1: Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif						
MISI 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.						
T1	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,90-6,30
		S1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE Sektor Perdagangan dan Jasa	Persen	7,4
		S2	Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	PMTB terhadap PDRB	Persen	59,67
		S3	Terjaganya Stabilitas harga barang dan jasa	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ±1
MISI 5: Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan						
T2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat			Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka	0,56
		S4	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan	Tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah	Persen	57,65
		S5	Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis	Tingkat pengembangan kawasan strategis	Persen	52,41
MISI 1: Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian						
MISI 2: Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi						
T3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian			Indeks Pembangunan Manusia	Angka	86,25
		S6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan	Indeks Kesehatan	Angka	0,915
		S7	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	Indeks Pendidikan	Angka	0,805
		S8	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,25
MISI 1: Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian						
T4	Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif			Indeks pembumian pancasila dan wawasan kebangsaan (IP2WK)	Angka	85,74
		S9	Meningkatnya kualitas demokrasi politik	Indeks Demokrasi	Angka	85,86
		S10	Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan	Angka Kriminalitas	Kasus	1.180

POKOK VISI/MISI/TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2026
VISI : KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF							
Pokok Visi 2: Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif							
MISI 3: Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak							
MISI 4: Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.							
T5	Menurunnya kemiskinan secara inklusif			Tingkat Kemiskinan	Persen	3,86-3,74	
				Rasio Gini	Angka	0,402	
		S11	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat	Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	65,11	
		S12	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	Rp Juta	205,28	
		S13	Meningkatnya akses lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,40-5,10	
				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	70,13	
Pokok Visi 3: Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif							
MISI 6: Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat							
T6	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat			Nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota	Nilai	0,373	
		S14	Menurunnya dampak perubahan iklim	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	858.546,65	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,94	
		S15	Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	Angka	90,5 - 88,66	
		S16	Menurunnya banjir dan rob	Persentase Kawasan Banjir dan Rob	Persen	2,97	
Pokok Visi 4: Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif							
MISI 7: Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas							
T7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	90,66	
		S17	Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	75,89	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	79,49	
				Indeks Integritas Nasional	Angka	77,25	
		S18	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks pelayanan publik	Angka	4,52	
		S19	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	82,58	

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025.

4.4. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema RKP Nasional Tahun 2026	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Tema RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional.	Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

4.4.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 4.2.



Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi	: 5,80 -6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	: 4,44 - 4,96%
3. Rasio Gini	: 0,377 - 0,380
4. Indeks Modal Manusia	: 0,57
5. Tingkat Kemiskinan	: 6,5 - 7,5%

Dalam RKP Tahun 2026, Wilayah Jawa salah satunya akan fokus pada pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, serta kawasan komoditas unggulan. Kota Semarang termasuk dalam kawasan pengembangan industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus serta pengembangan kawasan metropolitan WM Semarang.

Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Jawa Tahun 2026, antara lain:

1. Pengelolaan *urban governance* termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
2. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang (Tahap I Jawa Barat, Jawa Tengah, Dikoordinasikan Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral;
3. Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai;
4. 66 Jalan Tol Semarang - Demak Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum;
5. A5 WM Semarang;
 - a) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Semarang melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter;
 - b) Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak;
 - c) Pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab. Kendal);
 - d) Pembangunan TPST Bokongsemar;

- e) Prasarana pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis Kabupaten Demak;
 - f) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu.
6. Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus;
- a) Pengembangan koridor industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki);
 - b) Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri Seafer;
 - c) Pengembangan dan Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam di Kabupaten Demak.

4.4.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada tema “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi	: 5,00 - 6,00%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	: 4,71 - 4,27%
3. Indeks Modal Manusia	: 0,62
4. Tingkat Kemiskinan	: 8,70 - 8,53%
5. PDRB Per Kapita	: 52 – 55 juta rupiah
6. Indeks Reformasi Birokrasi	: 92,00
7. Indeks Integritas Nasional	: 80,97
9. Indeks Demokrasi Indonesia	: 86,46 – 89,50
10. Otonomi Fiskal Daerah	: 65,72%
11. Inflasi	: 1,50-3,50%
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	: 75,73

Dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029, implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Kedungsepur berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program unggulan dan program strategis selama lima tahun ke depan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Industri Kendal-Demak-Semarang (industri prioritas: kimia, mesin, perlengkapan industri, makanan dan minuman alas kaki, tekstil, daging, jamu, dan pengolahan ikan)
2. Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai *Global City*

3. Pengembangan Cultural Heritage Tourism (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api ds)
4. Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, bawang merah, tanaman perkebunan, sapi perah, kerbau, kambing, ayam buras, kedelai, garam dan perikanan tangkap)

4.4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2026. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, dirangkum pada uraian di bawah ini:

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Pokok-Pokok Pikiran
1.	Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	a. Memberikan pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga sehingga mendapatkan keterampilan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar bisa dimanfaatkan serta diadakan penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan; b. Mendorong Pemerintah untuk mencari solusi konkret terkait penutupan tempat pembuangan sampah ilegal (<i>illegal dumping</i>); c. Menyediakan alternatif tempat penampungan sampah sementara yang memadai, dapat diakses oleh truk pengangkut, dan mampu menampung volume sampah yang diperhitungkan.
2	Kedaulatan pangan dan energi	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	a. Memberikan perhatian lebih kepada petani di Kota Semarang dengan memberi kemudahan dan ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan pada masa pemupukan tanaman; b. Membantu dengan mendapatkan bantuan bibit unggul untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan; c. Mendorong gerakan <i>urban farming</i> secara masif di

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Pokok-Pokok Pikiran
			masyarakat dengan memberi bantuan dan dukungan untuk perkembangannya; d. Untuk menjaga ketahanan pangan, mohon untuk dibuat Perda agar lahan sawah tidak boleh didirikan bangunan.
3	Kesenjangan wilayah	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota	a. Perbaiki jalan yang rusak, baik dengan aspal, paving maupun cor beton; b. Perlu pembangunan drainase dan penataan saluran air; c. Pembangunan talud di sungai kecil maupun besar; d. Perlu pemeriksaan rutin pada setiap saluran air, penggantian gorong-gorong yang telah rusak, dan pengerukan endapan sampah atau tanah; e. Peningkatan infrastruktur dalam pengendalian banjir, melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS); f. Pembangunan infrastruktur di wilayah permukiman yang padat penduduk, seperti peningkatan jalan, saluran, dan perbaikan jembatan; g. Mengoptimalkan pengawasan dan perawatan rumah pompa di Kota Semarang; h. Pembangunan maupun rehabilitasi bangunan balai RW maupun balai RT, sarana prasarana olahraga dan gapura kampung; i. Perlu pembangunan saluran irigasi untuk pertanian; j. Peningkatan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH); k. Perlu menambah halte untuk Bus Feeder Trans Semarang di beberapa kompleks perumahan, maupun di gang-gang sempit kampung yang padat penduduk;

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Pokok-Pokok Pikiran
			l. Perlu memperbanyak jalur Bus Trans Semarang maupun Feeder yang melewati sekolah dan kawasan perumahan serta padat penduduk; m. Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen dan infrastruktur agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi; n. Peningkatan pengawasan di sekolah untuk mencegah kasus kejahatan seperti perundungan, penganiayaan, dan tawuran; o. Penambahan titik dan kualitas fasilitas internet/wifi gratis di setiap RT; p. Perlu menambah CCTV di setiap RT dan sekolah-sekolah negeri maupun swasta guna mengurangi kriminalitas dan meningkatkan keamanan di masyarakat.
4	• Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia • Kemiskinan	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Peningkatan kesejahteraan guru melalui pengangkatan PPPK dan diprioritaskan bagi yang telah melaksanakan Wiyata Bakti; b. Peningkatan kesejahteraan guru di madrasah dan sekolah swasta; c. Penambahan atau penguatan kurikulum muatan lokal utamanya kurikulum bahasa Jawa untuk penguatan nilai-nilai kebudayaan kepada siswa; d. Pelatihan keterampilan untuk pensiunan, lansia, dan prakerja; e. Memperbanyak beasiswa untuk masuk perguruan tinggi; f. Pemerataan pemberian beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi dan siswa/siswi miskin pada jenjang SD dan SMP baik di sekolah negeri maupun swasta;

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Pokok-Pokok Pikiran
			g. Memperbanyak program bantuan pendidikan, program-program yang dapat menambah semangat belajar anak usia sekolah; h. Penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); i. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah PAUD yang ada di lingkungan masyarakat; j. Pemberian perhatian khusus terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, agar memiliki kesempatan yang sama dan setara dengan anak lainnya; k. Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan kepada kelompok usia produktif; l. Penyediaan program pendampingan usaha bagi lulusan SMA/ SMK atau yang sedang kuliah; m. Lebih memperbanyak bantuan untuk warga lansia khususnya untuk lansia tidak mampu; n. Memperpanjang jangka waktu program cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat; o. Mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program gratis pembuatan dokumen kependudukan, gratis layanan <i>homecare</i> bagi warga lanjut usia yang mobilitasnya terbatas hingga gratis pemakaman dan santunan kematian; p. Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan dan pengurusan <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>; q. Mempermudah proses pengurusan perpindahan BPJS ke program UHC untuk warga

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Pokok-Pokok Pikiran
			yang kesulitan ekonomi dan membebaskan tunggakan tagihan BPJS bagi warga yang kurang mampu; r. Pemberian program kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat; s. Meningkatkan kualitas layanan dan tenaga medis serta fasilitas rawat inap di Puskesmas; t. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak, ibu hamil dan lansia, terutama terkait fasilitas tenaga medis; u. Pelaksanaan penjangkauan, penghalauan dan pendataan bagi warga miskin yang berhak mendapat bansos dari pemerintah; v. Menyediakan berbagai program pembukaan lapangan kerja dan bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat; w. Pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran; x. Memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga; y. Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat dengan seluas-luasnya terutama tanpa syarat batasan usia dalam rangka penguatan perekonomian; z. Pemberian pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan lainnya yang menunjang keterampilan masyarakat usia produktif.
5	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan	a. Penertiban retribusi Pedagang Kaki Lima untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah; b. Penambahan wadah pengembangan ekonomi bagi warga di setiap wilayah; c. Pengawasan harga kebutuhan pokok;

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Pokok-Pokok Pikiran
			d. Pemberdayaan UMKM dengan <i>event</i> yang dapat menggerakkan roda perekonomian di tingkat kecamatan maupun kelurahan; e. Memberikan stimulus dan ruang berusaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro; f. Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif; g. Memberikan pembinaan dan manajemen Koperasi yang lebih profesional agar mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya; h. Memberikan kemudahan dalam perizinan sebagai daya tarik para investor perdagangan dan pembangunan infrastruktur MICE; i. Perlu bimbingan perizinan UMKM dan kemudahan akses mendapat Kredit Usaha Rakyat.
6	Tata kelola pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota	a. Perlu terus menggalakkan edukasi tentang mitigasi bencana serta penanganan dalam deteksi dini antisipasi kebencanaan yang terjadi di Kota Semarang; b. Hendaknya pemerintah mensosialisaikan ke perusahaan yang belum melaksanakan peraturan upah minimum kota (UMR) sesuai program pemerintah pusat; c. Penertiban parkir liar di jalan protokol Kota Semarang khususnya area wisata agar tidak memungut biaya yang tinggi dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah;

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Pokok-Pokok Pikiran
			d. Pemerintah Kota Semarang menyebarluaskan informasi terkini melalui media cetak dan elektronik agar supaya masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui informasi tentang berita apapun dari Pemerintah Kota Semarang; e. Perlu perhatian lebih kepada sekolah dasar yang kekurangan murid. Perlu dipikirkan sistem zonasi yang telah diterapkan, apakah perlu dievaluasi atau tidak; f. Penanganan masalah gangser atau kreak secara optimal demi menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat; g. Pemberantasan judi online yang marak terjadi dan mengambil langkah-langkah efektif untuk menanggulangi masalah ini; h. Perlu untuk memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tepat sasaran dan semakin banyak didapatkan oleh penduduk yang berhak; i. Pemerintah Kota Semarang diminta untuk mengencarkan sosialisasi terkait kemudahan mengurus dokumen kependudukan terutama di daerah pinggiran. Agar warga masyarakat yang tinggal di perkotaan pada umumnya dan yang tinggal di pinggiran khususnya dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang; j. Pelayanan publik di setiap kelurahan, kecamatan, dan pemkot Semarang perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat yang memerlukan pelayanan publik tersebut bisa terlaksana dengan baik dan harapannya bisa terpuaskan;

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Pokok-Pokok Pikiran
			k. Agar Pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan pelayanan publik/ masyarakat, di sisi lain juga mempermudah akses yang dibutuhkan masyarakat sebagai perwujudan pelayanan cepat dari Pemerintah. 1. Menggencarkan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi layanan digital publik yang memudahkan warga seperti lapor semar solusi AWP, Chat SAVIRA, Si D'nOK, SILINTAS, Pantau Semar, SI IMUT. E-SAKIP.

4.4.4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2025-2029 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, perkiraan capaian di tahun 2025 serta isu-isu strategis di tahun 2026.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
- Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
- Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a) Penerapan Praktek Pertanian Organik, antara lain meliputi Pengembangan Padi (pembenihan VUB dan biosalin);
 - b) Penguatan Produktivitas Tanaman Herbal, antara lain meliputi Fasilitasi Peningkatan Produksi, Mutu dan Produktivitas Tanaman Herbal, Peningkatan Nilai Ekonomi Produk Komoditas Herbal, dan Rencana Kawasan Sentra Herbal Skala Kota;
 - c) Pengembangan Urban Farming, antara lain meliputi peningkatan produksi kebun dinas dan pengembangan komoditas unggul lokal di kebun dinas, Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani, Perikanan Perkotaan (Budidamber), pelayanan kesehatan hewan, pencegahan PHMS dan pemberantasan zoonosis, pelayanan kesmavet (pengawasan peredaran hewan dan produk asal hewan), Pengadaan sarpras Inseminasi Buatan (IB), dan Revitalisasi BPP gunungpati dan mijen untuk urban farming hub;
 - d) Penguatan Infrastruktur Pendukung Pangan, antara lain meliputi Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Pembangunan/rehab/ pemeliharaan jalan pertanian (JUT dan Jalan Produksi), Pembangunan Kawasan Ekonomi Berbasis Komoditas Tanaman Pangan, Pembangunan jaringan irigasi usaha tani, Penanganan jaringan irigasi sekunder, dan Pembangunan/ rehab kandang sapi;
 - e) Pengendalian Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, antara lain meliputi Pembinaan dan fasilitasi distribusi mitra kios pangan, Peningkatan Kapasitas Petani, Pelatihan Kewirausahaan, Pembinaan Generasi Muda di Bidang Pertanian, Inkubasi Bisnis pertanian (agro entrepreneur), Fasilitasi pengembangan SDM inseminator, Fasilitasi Nelayan (asuransi nelayan), Pantauan harga dan stok sembako di pasar tradisional, Promosi dan pemasaran produk hasil pertanian, MUFPP, Subsidi PoU, dan Festival Pisang Legi (Festival Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi);
 - f) Peningkatan Konsumsi Pangan yang Bertanggung Jawab, antara lain meliputi Anak Hebat - Detektif Pangan, Gebyar Putri Sakti, Kampanye Gerakan Makan Sayur dan Buah Nusantara (Gemas Bun), Kampanye untuk Gerakan Minum Susu dan Telur (Gerimis Lur), Pengawasan Keamanan Pangan (reagen), Pengawasan Keamanan Pangan (Pas Aman), dukungan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Fasilitasi sertifikasi halal produk pangan; dan
 - g) Penguatan Produksi Pangan Lokal (Pertanian, Perikanan, Peternakan) , antara lain meliputi Pengembangan tanaman pangan pengganti beras (Demplot jagung, ubi jalar, ubi kayu), Pengembangan cabai dan bawang merah, dan Penyediaan bibit tanaman dan saprodi lainnya untuk penguatan produksi tanaman pangan lokal.

2. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a) Peningkatan Sistem Manajemen Pengelolaan Persampahan, antara lain meliputi Pemeliharaan Kendaraan Lapangan/Truk Sampah, Peningkatan IPL dan saluran, Pembangunan Perkuatan talud TPA, Pengadaan dan Pemeliharaan Kontainer, Pemeliharaan, Perbaikan, serta Pembangunan TPS, dan Tempat Pilah Sampah pada 177 Kelurahan;
 - b) Peningkatan Drainase dan Irigasi Perkotaan, antara lain meliputi Peningkatan Drainase Kawasan Kramas (Mulawarman Barat), Peningkatan drainase kawasan Patung Parikesit (Lanjutan Saluran Tanjung), Peningkatan Dinding Penahan Tanah Sungai Banger, Peningkatan Saluran Jalan Gajah Lanjutan, Jalan dan Drainase Kawasan Badan Jalan Banteng Raya;
 - c) Peningkatan Sarpras Pengendalian Banjir, antara lain meliputi Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Pembelian *amphibious long arm*, Operasi dan Pemeliharaan embung, kolam retensi, pintu air, polder, Pembangunan Pompa Kawasan Taman Hasanudin, dan Penambahan *mobile pump*;
 - d) Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, antara lain meliputi Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
 - e) Peningkatan Layanan Sanitasi, antara lain meliputi Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan IPLT/di luar IPLT, Pembangunan Tangki Septic Tank Skala Individu, dan Penambahan Armada IPLT;
 - f) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau, antara lain meliputi Pemeliharaan Taman, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras TPU milik Pemerintah Kota Semarang, Pembangunan/Perbaikan Sarpras Makam Warga, dan Pembangunan Taman; dan
 - g) Konservasi Lingkungan Hidup, antara lain meliputi Pembangunan Sumur Resapan, Penguatan Kapasitas Katana (Kelurahan Tangguh Bencana), Pembuatan Sumur Resapan, Biopori, dan Konservasi Lahan Kritis.
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada:
 - a) Penanganan RTLH;
 - b) Peningkatan akses air minum layak;
 - c) Optimalisasi Jaringan SPAM;
 - d) Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, antara lain meliputi Jembatan Klenteng Tay Kak Sie, Jembatan Gedawang, Jembatan Pudak Payung, Jembatan Tembalang Selatan, Jembatan Pengasapan Ikan Bandarharjo, Jalan Gedawang - Jabungan - Mluweh - Kalikayen - Meteseh - Tembalang, Jalan Delik Sari Gunungpati, Jalan Dewi Santika, Peningkatan Jalan KRT Wongsonegoro Segmen Griya Bringin Asri-Jembatan Tol, Terusan Untung Suropati, Jalan Irigasi Utara (TPI Mangunharjo), Jalan Gunungpati - Brangjag - Kali Sidi - Keji - Mapagan, Jalan Terboyo, Jalan Akses Kampung Jawi, Jalan Dawung, OM Jalan (Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan berkala), termasuk peningkatan Jalan Inspeksi (Thamrin-Agus Salim), Penataan Kali Semarang Segmen Jembatan Pekojaan-Klenteng Tay Kak Sie, Jalan MT. Haryono, Jalur Kota

- Lama, Jalan Kolonel Sugiono, dan Jalan Aloon-Aloon Timur, dan Penataan Lingkar Luar Simpang Lima;
- e) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, antara lain meliputi Pembangunan Rumah Bersubsidi, Penanganan Sarpras Lingkungan, Pemeliharaan Jalan dan drainase lingkungan, Peningkatan jalan dan Saluran Kampung Nelayan Tambaklorok, dan Pemeliharaan dan Peningkatan Rusun;
 - f) Peningkatan Layanan Transportasi Massal, antara lain meliputi Bus Listrik pada BRT Koridor I;
 - g) Peningkatan Sarpras Keselamatan Jalan, antara lain meliputi Penambahan/Pemeliharaan titik PJU, Pemasangan palang pintu perlintasan KA, Pengadaan Perlengkapan Jalan (Guard Rail di Sigar Bencah), Rambu Jalan, Marka Jalan, APILL terkoordinasi ATCS), dan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang).
 - h) Peningkatan Bangunan Gedung dan Fasilitas Pendukung;
 - i) Pembangunan Tetenger Kota; dan
 - j) Pengembangan Kawasan Strategis Sejarah dan Budaya.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
- a) Pemerataan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Kesehatan, antara lain meliputi Pembangunan Pustu Sendangmulyo, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, menjadi bagian dari Semarang Zero Stunting untuk Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pemberian Bahan Protein hewani pada keluarga resiko stunting, PMT balita stunting di weekcare (40 Puskesmas), Kegiatan Keluarga Cemara (Weekcare per RW), Operasional Daycare stunting Rumah Pelita (16 Daycare), Operasional Rumah Gizi Pelangi Nusantara, PMT balita stunting di Daycare Rumah Pelita, Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, dan Semarang Bebas TB.
 - b) Pemerataan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan, antara lain meliputi Beasiswa siswa berprestasi, Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Pendidikan (Ruang Kelas), Rehabilitasi Perpustakaan SMPN 4, Ruang Kelas TKN, dan Pemeliharaan Sekolah-sekolah Dasar, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non-Formal dan kesetaraan, Pemberian bantuan operasional bagi Guru Sekolah Swasta yang belum bersertifikasi, Optimalisasi Interior Gedung Perpustakaan, Hari Aksara, Semarang Bercerita, Lomba Sains Anak Kota Semarang (SINARAN), Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, serta dukungan Penyelenggaraan MTQ Nasional dan Kecamatan.

- c) Perlindungan Perempuan, Anak, Lansia dan Disabilitas, antara lain meliputi Pembangunan Among Jiwo II, UMKM dan kuliner fest di 16 Kecamatan, Operasional Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Layanan UPTD PPA, Operasional Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), Pelayanan Rumah Inspirasi (16 Kecamatan), dan penyelenggaraan Kongres Perempuan (Nasional);
 - d) Pengurangan Beban Pengeluaran, antara lain meliputi Bantuan Permakanan Gratis/Permakanan PPKS, Perlindungan kelompok pekerja rentan, Penambahan kuota kepesertaan BPJS (UHC), Pelayanan KB, Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan, Penambahan Penerima Dana Operasional Marbot, Penambahan Penerima Dana Perawat Jenazah (Modin), Tenaga Pendidik Pos PAUD, Tenaga Pendidik HIMPAUDI, IGRA, Pengasuh Ponpes, Penjaga Gereja Protestan, Penjaga Gereja Katholik, Penjaga Pura, Penjaga Vihara, Bisyaroh Guru TPQ, Bisyaroh Guru Madin, Bisyaroh Guru Sekolah Minggu, Bisyaroh Guru Pinandhita Hindu, Perjalanan Religi Umat Islam, Perjalanan Religi Umat Kristen/Katolik, Perjalanan Religi Umat Budha, dan Perjalanan Religi Umat Hindu;
 - e) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha, antara lain meliputi Fasilitasi Rekrutmen Melalui SISWI (Sistem Informasi *Walk-In Interview*), Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi, dan *Job Fair*;
 - f) Peningkatan Daya Saing Pemuda, antara lain meliputi Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis untuk mencetak pengusaha milenial, Penguatan Riset dan Inovasi Daerah, Kompetisi Olahraga/Porwakos, Penyelenggaraan PORPARAPROV, Kegiatan Olahraga, Seni dan Kepemudaan di 16 Kecamatan, Event-event MMA, Modifikasi Otomotif, Tugu Muda Race, Semarang 10K, Porseni, serta Fasilitasi Optimalisasi Prestasi (*Support System*); dan
 - g) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, antara lain meliputi Optimalisasi pemanfaatan CCTV di seluruh RT, Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling), Sarpras Pemadam Kebakaran, Dukungan Logistik.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana, dan aktivitas penunjang perekonomian Kota yang berkeadilan, dengan fokus pada
- a) Menekan Kebutuhan Ekonomi Masyarakat, antara lain meliputi Fasilitasi pendampingan dan klinik konsultasi dan Pelatihan dan penguatan usaha;
 - b) Pemajuan Budaya untuk Peningkatan Pariwisata, antara lain meliputi Festival Wayang Nasional, Semarang Bersholawat, Kompetisi dan fasilitasi penumbuhan ekosistem budaya di kota semarang, Festival Film, Festival Seni Budaya, Semarang Bercerita, Semarang Jelajah Musik, Pesta Rakyat Kota Semarang (HJKS), Semarang Night Carnival, Dugderan, Peningkatan Museum Kota Lama, Festival Kota Lama, Festival Cheng Ho, Festival Payung, Pekan Budaya Semarang, dan Apresiasi Seni Budaya;
 - c) Peningkatan Kemampuan Pendapatan Daerah;
 - d) Penguatan Produk Berstandar Ekspor dan Jejaring Usaha Luar Negeri;
 - e) Menumbuhkan Peluang Ekonomi Masyarakat, antara lain meliputi Pelaksanaan event di Pasar Tradisional, Perawatan Rutin Berkelanjutan Bangunan Pasar, Pembentukan Koperasi Baru termasuk Penguatan

- Koperasi Kelurahan Merah Putih, Perawatan Rutin Berkelanjutan Bangunan PLUT KUMM, Penguatan Sentra IKM, dan Temu Industri;
- f) Peningkatan Pengelolaan/ Manajemen Pariwisata; dan
 - g) Peningkatan Iklim Investasi & Iklim Berusaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada:
- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat, antara lain meliputi Pendampingan TMMD, musrenbang berjenjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota, Musrenbang Tematik, dan Pembinaan Posyandu 6 SPM;
 - b) Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, antara lain meliputi Pemetaan Talenta (Mata Si-Intel), Pakta Integritas Pejabat, Penyelesaian Adm Layanan Jabatan Struktural, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
 - c) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - d) Digitalisasi Pemerintahan, antara lain meliputi Peningkatan Layanan Darurat Call Center 112, Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Optimalisasi Layanan Internet Publik, Dashboard Eksekutif Manajemen Sistem, Supper App Pemda, Pengembangan Ekosistem Keamanan data dan Informasi, dan Pengembangan Pengelolaan Data dan informasi berbasis geospasial, Layanan Internet Warga, dan e-TAX;
 - e) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - f) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, antara lain meliputi Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah, Penanganan aduan masyarakat, dan Audit kinerja perangkat daerah.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: 86,25
4. Tingkat Kemiskinan	: 3,86-3,74%

Pemerintah Kota Semarang menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam rentang 5,9-6,3 persen. Target ini dirancang untuk mendorong optimisme ekonomi, dimana angka tersebut dirancang untuk menjadi pijakan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi di masa tahun depan dengan target PDRB per Kapita (ADHB) sebesar Rp.205,28 Juta. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 5,4-5,1% atau jumlah penganggur sebesar 51.200-54.200 orang. Untuk Tingkat Kemiskinan, Kota Semarang ditargetkan turun ke angka 3,74-3,86 persen atau sekitar 63.911-65.961 penduduk miskin. Untuk Indeks Pembangunan Manusia, Kota Semarang menargetkan sebesar 86,25, dengan Angka Harapan Hidup sebesar 78,52 Tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 11,17 Tahun, Harapan Lama Sekolah Tahun 15,64, dan Pengeluaran per Kapita

disesuaikan sebesar 17.064 ribu/ tahun. Target yang telah dituangkan diatas diharapkan menjadi acuan dalam menjalankan target upaya pencapaian prioritas Daerah Tahun 2026.

Jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2026 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Dalam penyusunan prioritas RKPD Tahun 2026 digunakan juga pendekatan teknokratik untuk memberikan gambaran penentuan kegiatan prioritas berdasarkan kaidah teknokratik melalui kajian-kajian dan studi-studi. Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.7.2/12730/Bangda tentang Uji Coba Penerapan Sistem CIP dalam Penyusunan RPJMD/RKPD di 5 (lima) Kota Percontohan NUDP Tahap I, pada tahun 2026, salah satu alat bantu yang juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan prioritas adalah melalui metodologi *Capital Investment Planning* (CIP) yang merupakan *tool* yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan Kota Semarang sebagai salah satu *pilot* penerapannya. Tiap usulan kegiatan prioritas, terutama yang bersifat strategis dengan kebutuhan anggaran yang besar akan dianalisa dengan CIP melalui serangkaian kriteria dan sub kriteria yang ditetapkan untuk mengetahui usulan kegiatan mana yang memiliki dampak paling optimal untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Hasil CIP menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kegiatan prioritas apa yang perlu didorong pada penyusunan RKPD Tahun 2026 ini.

Perumusan prioritas RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah serta permasalahan pembangunan/isu strategis Kota Semarang. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang

Sebagaimana penjelasan di atas, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2026 secara nasional dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan pada sasaran masing-masing Prioritas Nasional. Keterkaitan sasaran indikator pembangunan daerah Kota Semarang dalam RKPD 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional RKP 2026 dapat dijelaskan dalam tabel 4.4.

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2026 yang berjumlah 5 prioritas selaras dengan 7 prioritas nasional dan 4 prioritas Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang dengan prioritas

nasional RKP tahun 2026 dapat dinilai 100% karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional.

Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Semarang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL 2026	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS RKPD TAHUN 2026	
Prioritas Nasional 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Prioritas Nasional 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.	P1	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.	P2	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Prioritas Nasional 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.	P3	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota.
Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Provinsi 3. Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.	P4	Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
Prioritas Nasional 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya	P5	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas

PRIORITAS NASIONAL 2026	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH 2026	PRIORITAS RKPD TAHUN 2026	
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.		penunjang perekonomian kota yang berkeadilan.
Prioritas Nasional 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Prioritas Provinsi 1. Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah.	P6	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota.

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

2. Konsistensi dengan permasalahan/isu strategis

Permasalahan pembangunan Kota Semarang telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kota Semarang memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pengembangan/isu strategis telah tertuang pada bab II, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2026

ISU STRATEGIS	PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		PRIORITAS DAERAH KOTA SEMARANG	
Kualitas sumber daya manusia	PN.4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD.3	Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.	PD.4	Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Konektivitas dan aksesibilitas wilayah	PN.3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PD.2	Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.	PD.3	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota
Daya saing ekonomi, peningkatan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan	PN.3 PN.5 PN.6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PD.2	Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.	PD.1 PD.5	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan
Kesenjangan wilayah; Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya	PN.2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD.2	Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.	PD.2	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

ISU STRATEGIS	PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		PRIORITAS DAERAH KOTA SEMARANG	
	PN.8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				
Tata kelola pemerintahan	PN.1	Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PD.1	Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah.	PD.6	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota
	PN.7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan				

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Tabel 4.6 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026				PRIORITAS RKPD TAHUN 2026		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026			
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE Sektor Perdagangan dan Jasa	7,4	P5	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan	Prioritas Nasional 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan
2	Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	PMTB terhadap PDRB	59,67%			
3	Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa	Tingkat Inflasi	2,5 ±1%	P1	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	Prioritas Nasional 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Prioritas Nasional 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026				PRIORITAS RKPD TAHUN 2026		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026			
						daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.
4	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan	Tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah	57,65%	P3	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota	Prioritas Nasional 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.
5	Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis	Tingkat pengembangan kawasan strategis	52,41%			
6	Meningkatnya derajat kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan	Indeks Kesehatan	0,915	P4	Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Prioritas Nasional 8.
7	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	Indeks Pendidikan	0,805			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026				PRIORITAS RKPD TAHUN 2026		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026			
8	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	96,25			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Prioritas Provinsi 3. Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.
9	Meningkatnya kualitas demokrasi politik	Indeks Demokrasi Indonesia	85,86	P6	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota	Prioritas Nasional 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
10	Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan	Angka Kriminalitas	1.188 Kasus			Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Prioritas Provinsi 3. Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.
11	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat	Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65,11%	P4	Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026				PRIORITAS RKPD TAHUN 2026		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026			
						Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.
12	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	205,28 juta rupiah	P6	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota	Prioritas Nasional 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.
13	Meningkatnya akses lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,40-5,10%	P5	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang	Prioritas Nasional 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026				PRIORITAS RKPD TAHUN 2026		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026			
		Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	70,13%		perekonomian kota yang berkeadilan	berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.
14	Menurunnya dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	858.546,65 TonCO2Eq	P2	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Prioritas Provinsi 2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,94			
15	Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan	Indeks risiko bencana daerah	92,90			
16	Menurunnya banjir dan rob	Persentase Kawasan Banjir dan Rob	2,97			
17	Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75,89	P6	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota	Prioritas Nasional 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026				PRIORITAS RKPD TAHUN 2026		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026			
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,49			Prioritas Nasional 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Prioritas Provinsi 1. Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah.
		Indeks Integritas Nasional	77,25			
18	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks pelayanan publik	4,52			
19	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	82,58%	P4	Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Prioritas Nasional 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Prioritas Provinsi 1. Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah.

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Tabel 4.7
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Program Unggulan pada
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI-MISI KDH
1.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah
		Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan dan peternak
		Penguatan petani milenial
		Penguatan lumbung pangan dan urban farming
		Pembentukan BUMS
		Peningkatan pembangunan budidaya perikanan
2.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin
		Normalisasi Sungai Plumbon
		Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo
		Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor
		Normalisasi Sungai Babon
		Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur)
		Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
		Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah
		Peningkatan Gerakan Semarang Wegah Nyampah
		Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST)
		Kolaborasi Antar Warga (Sekolah/Pramuka/Karang Taruna/Komunitas Peduli Lingkungan).
		Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang untuk mengolah sampah menjadi energi embali atau refused derived fuel (RDF).
		Pembangunan IPAL/SPALDT
		Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI-MISI KDH
		Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Kota Semarang Pembangunan 1000 Biopori Penegakan aturan Zero Delta Q pada kawasan Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah daerah aliran sungai
3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota	Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Semarang Middle Ring Road Pembangunan Jalan Srandol - Sekaran Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon Pengembangan Semarang Outer Ring Road Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik Pemenuhan rumah layak huni dan pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan Penyediaan Rumah Bersubsidi (brosur) Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan Pengembangan desa wisata berbasis ekologi seperti pelestarian hutan, sungai, danau, dan pantai.
4.	Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Kesehatan Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan baik untuk Tenaga Kerja Formal maupun Informal Penambahan zona aktivitas gratis untuk masyarakat (brosur)

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI-MISI KDH
		Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda (Brosur)
		Dukungan terhadap Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan (brosur)
		Umrah dan Perjalanan Religi Gratis bagi Masyarakat
		Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan)
		Pemerataan layanan kesehatan di seluruh kelurahan
		Peningkatan pelayanan kesehatan (brosur)
		Upaya penurunan stunting (brosur)
		Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin. Ibu Hamil. Ibu Menyusui dan Baduta guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna
		Beasiswa D3/D4/S1 bagi Masyarakat Miskin. Siswa Berprestasi dan Atlet
		Melindungi dan menjamin semua kelompok agama dan budaya untuk bebas menjalankan ibadah dan praktek budayanya sesuai dengan ideologi Pancasila.
		Menyediakan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (link and match).
		Memastikan tidak ada tenaga guru honorer yang memperoleh honor di bawah UMK dan memastikan adanya kesejahteraan yang lebih baik.
		Menambah bantuan peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan. baik dari segi intelektual maupun karakter.
		Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.
		Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan.

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI-MISI KDH
		kekerasan dan tindak kriminal. serta menciptakan sekolah ramah anak. Mengintegrasikan literasi kesehatan mental Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Pemerataan akses fasilitas kesehatan dan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas dan membantu tenaga medis untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih layak. Menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Mendorong implementasi tanaman obat dan produksi tanaman obat yang bekerjasama dengan perusahaan farmasi nasional. Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah. Peningkatan kesejahteraan seniman Kota Semarang melalui bantuan ekonomi Penciptaan ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi aktivitas budaya dengan pengelolaan yang berpihak pada seniman. Pengembangan program pelatihan kerja yang dapat menjangkau masyarakat luas. Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu (Brosur) Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. Optimalisasi anggaran pemberdayaan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender dan perlindungan anak (brosur)
5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan	Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya (Sport Center. Area Kuliner dan UMKM. serta Industri Kreatif dan lain-lain)

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI-MISI KDH
		Optimalisasi pintu masuk di Kota Semarang sebagai simpul utama yang mendukung perdagangan, jasa dan logistik. Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel. Menyelenggarakan event nasional dan internasional dengan melibatkan potensi lokal baik sumber daya manusia dan fasilitas yang ada untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara. Peningkatan angka investasi di Kota Semarang. Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal. Mendorong legalisasi aset produktif milik rakyat dari perampasan, pencaplokan dan akuisisi dari pihak lain Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas (brosur)
6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota	Pembangunan landscape dan landmark kota, terutama di batas kota Tambahan Operasional RT Tambahan Operasional RW (Brosur) Tambahan Bantuan LPMK (Brosur) Penambahan Penerima Dana Operasional Marbot Penambahan Penerima Dana Operasional Penjaga Rumah Ibadah Lainnya (Brosur)

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI-MISI KDH
		Penambahan Penerima Dana Operasional TPA
		Penambahan Penerima Dana Operasional Guru Keagamaan Lainnya (Brosur)
		Meringankan pajak bumi dan bangunan. serta pajak daerah lainnya
		Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
		Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang.
		Peningkatan upaya penghijauan wilayah
		Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
		Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia.
		Membangun sistem pemerintahan yang fleksibel, gesit, dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.
		Pengambilan keputusan berdasarkan big data
		Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah.
		Penguatan riset dan inovasi daerah
		Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

Tabel 4.8 Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
1. Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah.	6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani	100	%	SATPOL PP
				Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi	100	%	
				Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan perda dan perkada	41	%	
				Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5	%	
				Persentase tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SOP dan layanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	81	%	
				Tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil penegakan perda dan perkada	81	%	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	%	
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	%	
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaan aparaturnya dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama	100	%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
				Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	100	%	
				Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	100	%	
				Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	100	%	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi	40	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	88,01	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)	100	%	
				Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	100	%	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik	100	%	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100	%	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	100	%	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	%	
				Persentase produk hukum yang dihasilkan	100	%	
				Tingkat efektivitas kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah	85	%	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	87,18	%	
				Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	24,81	angka	
				Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	24,89	angka	
				Nilai tingkat kematangan UKPBJ	40	angka	
				Persentase capaian target dividen BUMD	98,5	%	
				Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR, serta kegiatan pengendalian perekonomian	100	%	
				Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	82	%	
				Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	100	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	95,3	%	SEKRETARIAT DPRD
				Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan perundang-undangan	95,3	%	
				Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	81	%	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	44,6	Nilai	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	46,69	Nilai	
				Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	46,69	Nilai	
				Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian & SDA	46,69	Nilai	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100	%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase Realisasi Belanja	93,43	%	
				Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan	100	%	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	69	%	
				Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	96	%	
				Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	1,12	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	82	%	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengembangan Karir ASN	95	%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
				Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	95	%	
				Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	95,5	%	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki hasil diklat dengan kriteria berkualitas	95	%	
				Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Fungsional	55	%	
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	100	%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	50	%	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh BPK dan APIP lainnya yang ditindaklanjuti	88,2	%	INSPEKTORAT
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	88,2	%	
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	88,2	%	
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	88,2	%	
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	88,2	%	
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	88,2	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	100	%	
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	100	%	
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	100	%	
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	100	%	
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	100	%	INSPEKTORAT
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN BANYUMANIK
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN CANDISARI
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN GAYAMSARI
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN GENUK
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN GUNUNG PATI
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN MIJEN

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN NGALIYAN
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN PEDURUNGAN
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN SEMARANG BARAT
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN SEMARANG UTARA
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN TEMBALANG
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%	KECAMATAN TUGU
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%	KECAMATAN BANYUMANIK
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%	KECAMATAN CANDISARI
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%	KECAMATAN GAYAMSARI

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%	KECAMATAN GENUK
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%	KECAMATAN GUNUNG PATI
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100	%	KECAMATAN MIJEN
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%	KECAMATAN NGALIYAN
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%	KECAMATAN PEDURUNGAN
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%	KECAMATAN SEMARANG BARAT
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	95	%	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100	%	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%	KECAMATAN SEMARANG UTARA
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%	KECAMATAN TEMBALANG
				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%	KECAMATAN TUGU
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik	100	%	KECAMATAN BANYUMANIK
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	100	%	KECAMATAN CANDISARI
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	100	%	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gayamsari	100	%	KECAMATAN GAYAMSARI

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Genuk	100	%	KECAMATAN GENUK
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati	100	%	KECAMATAN GUNUNG PATI
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mijen	100	%	KECAMATAN MIJEN
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngaliyan	100	%	KECAMATAN NGALIYAN
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan	100	%	KECAMATAN PEDURUNGAN
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Barat	100	%	KECAMATAN SEMARANG BARAT
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan	100	%	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah	100	%	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur	100	%	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Utara	100	%	KECAMATAN SEMARANG UTARA
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	100	%	KECAMATAN TEMBALANG
				Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu	100	%	KECAMATAN TUGU

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik	82	%	KECAMATAN BANYUMANIK
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	82	%	KECAMATAN CANDISARI
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	82	%	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gayamsari	82	%	KECAMATAN GAYAMSARI
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk	82	%	KECAMATAN GENUK
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati	82	%	KECAMATAN GUNUNG PATI
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Mijen	82	%	KECAMATAN MIJEN
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Ngaliyan	82	%	KECAMATAN NGALIYAN
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	82	%	KECAMATAN PEDURUNGAN
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Barat	82	%	KECAMATAN SEMARANG BARAT
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan	82	%	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	82	%	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Timur	82	%	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Utara	82	%	KECAMATAN SEMARANG UTARA
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	82	%	KECAMATAN TEMBALANG
				Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu	82	%	KECAMATAN TUGU
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Aktualisasi Pancasila	75,25	angka	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	60,25	angka	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	65,3	angka	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Harmoni Indonesia	6,1	angka	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional	77	angka	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.	2. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman	3,32	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kontribusi penurunan Emisi GRK Kumulatif (sektor persampahan)	38.810,3	ton CO2eq	
				Luasan areal yang terkonservasi	22,23	Ha	
				Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	100	%	
				Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara	100	%	
				Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah	100	%	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota	100	%	
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	72	%	
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kegiatan dan atau usaha yang dilakukan pengawasan	100	%	
				Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	88,69	%	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	75,25	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	34,52	%	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup	100	%	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99,11	%	
				Volume sampah masuk ke TPA per tahun	308858,56	ton	
	1. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi	3065	Kkal/ka pita/tah un	
				Angka Konsumsi Energi	1910	Kkal/ka pita/tah un	
				Persentase Cakupan Distribusi Pangan	100	%	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah tahan pangan	100	%	
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	93,6	%	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	3201	ton/tah un	DINAS PERIKANAN
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4120	ton/tah un	
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	0,5	hektar	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan Masyarakat	16	kg/kapit a/tahun	DINAS PERTANIAN
		3.27.02		Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan	26226,3	ton	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan	27536	ton	
				Jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur	8016,73	ton	
				Jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu	1587,98	ton	
				Jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging	32495,63	ton	
				Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	78	Liter	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Dasar Pertanian	22,7	%	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-5	%	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan	100	%	
				Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan	100	%	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	2	N/A	
	3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	98,12	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga terlayani Air Minum aman	48,66	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob	98,95	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.04	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan	100	%	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sungai yang dimanfaatkan	100	%	
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan	100	%	
				Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	61,17	%	DINAS PENATAAN RUANG
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase BGN dalam kondisi baik	100	%	
				Rasio kepatuhan PBG	86	%	
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	85,5	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,64	%	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	56	rasio	DINAS PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan	100	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara	67,88	%	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penerbitan KRK	92	%	DINAS PENATAAN RUANG
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase backlog perumahan	24,12	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.03		Persentase Kawasan yang Tertata	10	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	95,09	Luas Kawasa n	
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	68	%	
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	27,75	%	
		1.04.07	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	100	%	
		1.04.08	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio ketersediaan tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	0,015	%	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	%	
		1.05.05	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	%	
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi	96	%	DINAS PENATAAN RUANG
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah	50	%	
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase pemanfaatan aset tanah BMD	60	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	5,65	rasio	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94	%	
		2.15.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	1	%	
		2.15.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	72,99	%	
	5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90	%	DINAS TENAGA KERJA
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase produktivitas tenaga kerja	100	%	
				Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	80	%	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas	78	%	
				Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	73	%	
				Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	70	%	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	89,3	%	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	55	%	
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	44,1	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	41,35	%	
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	59,74	%	
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	67	%	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20	%	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2,5	%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan	70	%	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%	
				Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%	
				Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%	
				Persentase pengaduan penanaman modal dan perizinan yang ditindaklanjuti	95	%	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	100	%	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			INFORMASI PENANAMAN MODAL				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	63,74	%	
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	29,3	%	
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	84,24	%	
				Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan	43,12	%	
				Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	86,78	%	
				Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	4,5	%	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	8,5	%	
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	8,5	%	
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	35	%	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100	%	DINAS PERDAGANGAN
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan	100	%	
				Persentase pengelola sarana distribusi yang dibina	100	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	10	%	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien harga antar waktu	10±1	koefisien	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	156155204 2	US\$	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	92,12	%	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi di dalam negeri	100	%	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan IKM	0,65	%	DINAS PERINDUSTRIAN
				Persentase pertambahan jumlah sentra IKM	87	%	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas	6,73	%	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar di SIINas	2,32	%	
3. Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.	4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	86,97	%	DINAS PENDIDIKAN
				Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	%	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	%	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%	
				Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%	
				Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%	
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar	72,13	%	
				Rasio guru terhadap murid	0,0541666 67	rasio	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin	100	%	
				Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	100	%	
				Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin	100	%	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Incident Rate (IR) HIV	0,21	per 1000 pendud uk	DINAS KESEHATAN
				Angka kematian bayi	7,87	per 1000 KH	
				Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	85,5	%	
				Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap penduduk Kota Semarang	7	%	
				Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	40	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen	82	%	
				Indeks kesehatan lingkungan	72	angka	
				Persentase fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terakreditasi minimal paripurna	95	%	
				Persentase ibu hamil KEK	14	%	
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	83	%	
				Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat	100	%	
				Persentase lanjut usia yang mandiri	77	%	
				Persentase tingkat penggunaan sarana prasarana sesuai standar	100	%	
				Prevalensi wasting balita	4,7	%	
				Proporsi fasilitas layanan kesehatan terintegrasi SIKN	67,6	%	
				Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	86	%	
				Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	100	%	
				Treatment Success Rate (TSR) TBC	90,5	%	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	26	%	
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase IRTP yang memenuhi ketentuan	78	%	
				Proporsi apotek, toko obat, usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar	83	%	
				Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	86	%	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup	82	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase efektivitas penguatan pemberdayaan Sosial	100	%	DINAS SOSIAL
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100	%	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial	100	%	
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100	%	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin yang mendapat jaminan sosial	100	%	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	100	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100	%	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	73	%	
				Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	99,4	%	
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	98,45	%	
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Pemenuhan Hak Anak	100	angka	
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Nilai Perlindungan Khusus Anak	100	angka	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP elektronik	99,4	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun	98,45	%	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak	73	%	
		2.12.04	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100	%	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%	
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100	%	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100	%	
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	100	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	100	%	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19 tahun)	7,2	angka	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Demand Satisfied	77,6	%	
				Persentase Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	14,3	%	
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks lansia berdaya	58,66	angka	
				Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	91,7	%	

PRIORITAS JAWA TENGAH TAHUN 2026	PRIORITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2026	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2026	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda	100	%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
				Persentase pemuda yang terlibat dalam Kegiatan kepemudaan	1,29	%	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah	36,9	%	
				Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional	94,67	%	
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	7,1	%	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang	0,07	rasio	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
				Tingkat pemanfaatan perpustakaan	84,83	Nilai	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100	%	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip	80	%	
				Tingkat ketersediaan arsip	84	%	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	64,5	%	
				Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	70	%	
		2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	84	%	

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

4.4.5. Tagline Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026

Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026 dicapai dengan tagline Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh. Tagline ini merupakan kerangka pembangunan yang memuat Agenda Strategis Makro, Program Strategis Tematik, serta Proyek Strategis Taktis sebagai instrumen operasional pencapaiannya. Agenda Strategis Makro yang merupakan terjemahan dari masing-masing tagline yang akan dicapai tahun 2026, Program Strategis Tematik yang merupakan program yang terkait langsung dengan upaya menapai kondisi ideal pencapaian tagline, dan Proyek Strategis Taktis yang merupakan program dan kebijakan taktis yang mendukung pencapaian Agenda Strategis Makro dan Program Strategis Tematik. Ketiga lapisan strategi tersebut dirancang secara terpadu untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dalam Tagline tersebut Semarang Inklusif menjadi payung besar pembangunan Kota Semarang yang memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dapat diakses, dirasakan manfaatnya, serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tabel 4.9. menunjukkan Tagline dan Uraian Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026.

Tabel 4.9 Tagline dan Uraian Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026

Tagline	Agenda Strategis Makro	Program Strategis Tematik	Proyek Strategis Taktis
SEMARANG BERSIH	Kota Semarang yang Bersih dari Polusi Air Udara Tanah, Bersih dari Sampah, Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, dan Masyarakat turut serta dalam Menjaga Semarang Bersih	Fasilitasi Pemenuhan Sarana Prasarana di Lingkungan Hidup untuk Mengendalikan Limbah dan Polusi	Optimalisasi Fungsi Laboratorium untuk Pengukuran Polusi Udara, Air dan Tanah, dan Tindakan Penertiban
			FS DED Sambungan Rumah SPALD-T
			Perluasan Cakupan Penyediaan Air Bersih
			Pembangunan IPAL TPA Jatibarang Tahap I
			Pembangunan Perkuatan Talud TPA
			Pembangunan TPS3R
		Pendelegasian Kewenangan Terkait Pengaturan dan Pengawasan Sampah Domestik ke Kecamatan	Semarang Wegah Nyampah
			Pengadaan Kontainer Sampah Tertutup
			Pengadaan <i>Compactor</i>
			Pemberdayaan PKK untuk Lingkungan Hidup
		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih	Pengawasan IPAL pada Fasilitas Pelayanan Publik
			Penegakan Perda dan Perwal
			Pengawasan Program dan Proyek Terkait Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup
			Pemanfaatan Teknologi AI

Tagline	Agenda Strategis Makro	Program Strategis Tematik	Proyek Strategis Taktis
		Pemanfaatan Teknologi untuk Manajemen Lingkungan Hidup	Inovasi Pengelolaan Sampah Residu menjadi Produk dengan Nilai Ekonomis Tinggi
SEMARANG SEHAT	Perwujudan Masyarakat dan Kondisi Sosial Kota Semarang yang Sehat	Perwujudan Semarang sebagai Kota Sehat	Percepatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pemenuhan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan	Pemenuhan Cakupan UHC dan Kenaikan Angka Jaminan Ketenagakerjaan
		Pemerataan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pembangunan Pustu
			Pengadaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Peningkatan dan Optimalisasi Ruang Aktivitas Masyarakat untuk Menjaga Kesehatan	Rehabilitasi, Pembangunan Sarana dan Fasilitas Aktivitas Olahraga (GOR Tri Lomba Juang, Lapangan Mini Soccer Sendangguwo, Sport Center)
			Pembangunan Taman
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Penyebaran Informasi dan Kegiatan Olahraga pada Publik
		Peningkatan Gizi Masyarakat	Dukungan Program MBG (Fasilitasi SLHS pada SPPG)
			Percepatan dan Pencegahan Penanggulangan Stunting
		Perwujudan Masyarakat yang Kondusif, Toleran, dan Ramah HAM	
SEMARANG CERDAS	Perwujudan Kota Semarang yang Cerdas, Inovatif, dan Kreatif	Peningkatan Indeks Pendidikan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Rusak Berat dan Sedang
			Penyelenggaraan <i>Supporting System</i>
		Perluasaan Akses Pendidikan	Dukungan Program Sekolah Rakyat
			Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah
			Peningkatan Cakupan Sekolah Swasta Gratis

Tagline	Agenda Strategis Makro	Program Strategis Tematik	Proyek Strategis Taktis
		Peningkatan Literasi dan Numerasi Masyarakat	Peningkatan Literasi
		Pemajuan, Pelestarian, dan Optimalisasi Potensi Budaya	Mendorong dan Memfasilitasi Pengembangan Inovasi
			Membangun Tradisi Budaya Kota Semarang
			Revitalisasi Semarang Lama
		Peningkatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Masyarakat	Forum CSR
SEMARANG MAKMUR	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang yang Berdaya Saing dan Berkeadilan	Penciptaan Ekosistem Investasi yang Berdaya Saing	Peningkatan Iklim Usaha dan Berusaha
		Pengurangan Beban Pengeluaran dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Program Koperasi Merah Putih dan Usaha Mikro
		Pemenuhan Sistem Pangan yang Berkelanjutan	Pengembangan Keamanan Pangan Berkelanjutan
			Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Pangan
		Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah pada Sektor Produktif	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perekonomian
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
			Penguatan Identitas Gastronomi untuk Peningkatan Daya Saing
		Pengembangan Infrastruktur Pendukung untuk meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung	Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi
		Perwujudan Tata Kota yang Tertib, Teratur, dan Lestari	Peningkatan Kualitas Konektivitas Wilayah
		Pengentasan Kantong Kemiskinan	Fasilitasi Aktivitas Ekonomi Masyarakat (Event Pariwisata, Seni dan Budaya)

Tagline	Agenda Strategis Makro	Program Strategis Tematik	Proyek Strategis Taktis
SEMARANG TANGGUH	Perwujudan Kota Semarang yang Memiliki Kapasitas untuk Menahan, Menyerap, Beradaptasi, serta Pulih dari berbagai Guncangan dan Tekanan	Peningkatan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam, Sosial, dan Ekonomi	Mitigasi Bencana Alam, Sosial, dan Ekonomi
		Penciptaan Kondusivitas dan Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Banjir dan Rob
			Pengendalian Inflasi
		Peningkatan Semangat Gotong Royong Seluruh Pemangku Kepentingan	Peningkatan Ideologi Pancasila
			Peningkatan Kualitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
			Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
		Meningkatkan Pertahanan Masyarakat terhadap Ancaman Radikalisme dan Terorisme	
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Konservasi Lingkungan melalui <i>Nature Based Solution</i> pada Lahan Kritis

4.5. Program Delegasi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Program delegasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan mekanisme kerja sama dan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Tujuannya adalah untuk memastikan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan kebutuhan spesifik di tingkat lokal, serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, program delegasi diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang meliputi penguatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis. Program delegasi tersebut dapat diintervensi Kota Semarang melalui Program Prioritas dan Program Unggulan Wali Kota, maupun program-program yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang diselaraskan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Keterkaitan Program Delegasi Ke Kabupaten/Kota

PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA		PROGRAM/KEGIATAN/AKTIFITAS OPD YANG MENDUKUNG DI TAHUN 2026	OPD
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dari pemerintah kab/kota	a. Operasional dan pembangunan Rumah Inspirasi b. Pelatihan untuk zillenial (berdaya) c. Fasilitasi Optimalisasi Prestasi (Support System) d. Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan lansia (Berdaya) e. Kegiatan Olahraga, Seni dan Kepemudaan (Berdaya)	Kecamatan Distaru Dispota
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional -> Pembangunan RTLH 30% menjadi kewenangan Kabupaten/kota, dan 20% desa	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana d. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni e. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha f. Pembangunan Rumah Bersubsidi g. Pemeliharaan dan Peningkatan Rusun h. Rehabilitasi GOR TLJ i. Pembangunan Lapangan Minisoccer Sendangguwo j. Pembangunan Sport Center Kelurahan Tlogomulyo	Disperkim Distaru
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan b. Bintek Pengendalian Risiko Korupsi (IEPK) c. Sosialisasi / Bimtek terkait Penyusunan Laporan Kinerja d. FGD Kelurahan Anti Korupsif e. FGD Unit Pengelola Gratifikasi f. Sosialisasi Perempuan Anti Korupsi g. Sosialisasi Masyarakat Anti Korupsi h. Sosialisasi Sekolah Jujur, Sekolah Saya i. Sosialisasi Survey Penilaian Integritas j. Peningkatan kapasitas SDM perencana dalam pengelolaan risiko k. Monitoring dan Evaluasi penyusunan RR RTP OPD	Bappeda Inspektorat
4	Pelayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu dan Pelayanan kesehatan di setiap desa	Ambulan Hebat, Ambulan Transport, Ambulan Motor, Rehabilitasi Puskesmas dan Pustu, Penyediaan Alat Kesehatan, Peningkatan layanan RSUD Mijen	Dinas Kesehatan
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	a. Pemberian bantuan demplot budidaya nila salin b. Pemberian bantuan benih ikan tawas c. Pemberian bantuan benih ikan nila d. Pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan e. Pelatihan cara pengolahan ikan yang baik (CPIB) Ikan Asap f. Pelatihan klaster bandeng	Dinas Perikanan

PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA		PROGRAM/KEGIATAN/AKTIFITAS OPD YANG MENDUKUNG DI TAHUN 2026	OPD
6	Sekolah unggulan perkecamatan	a. Dukungan pembangunan Sekolah Rakyat (penyusunan AMDAL dan ANDALALIN) b. Dukungan operasional Sekolah Rakyat (FGD/sosialisasi) c. Dukungan fasilitasi Kelas Khusus Olahraga (KKO)	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dispora Distaru
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	a. Pembangunan rumah Inspirasi b. Fasilitasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak c. fasilitasi kegiatan pemberdayaan PPA di 177 Kelurahan d. Operasional Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) e. Pembinaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) f. Pemberian alat bantu disabilitas g. Bina Keluarga Lansia	Kecamatan, Disdik (RDRM), Dinsos, DP3A
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	a. Pemeliharaan talud di desa wisata Kandri (DPU) b. Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi (10 Kandri Baru) c. Fasilitasi kegiatan Apresiasi Desa Wisata tingkat Kota Semarang d. Penguatan Pelaku usaha/ umkm sebagai pendukung kelola desa wisata	Dispersan Disbudpar DPU
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	a. Fasilitasi peyaluran kredit WIBAWA b. Fasilitasi penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih di 177 Kelurahan c. Optimalisasi Badan Usaha Petani Milenial (BUPM)/ KOMDA	Dinkop Dispersan
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	a. Pembentukan KATANA (Kelurahan Tangguh Bencana) dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) b. Pembentukan Relawan Kebakaran untuk penguatan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran berbasis masyarakat	BPBD Damkar
11	Cek Kesehatan Gratis	a. Pelayanan Cek Kesehatan Gratis melalui Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu (Lawangsewu) yaitu cek kesehatan gratis bagi masyarakat b. Pelayanan KB Gratis	Dinkes Disdalduk KB
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu.	a. Rehabilitasi Puskesmas dan Pustu, b. Optimalisasi pemanfaatan UHC c. Penguatan layanan Ambulans Hebat dan Ambulans Kegawatdaruratan	Dinkes
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.	Implementasi Sistem Merit melalui penerapan manajemen talenta pada Aspek Perencanaan Kebutuhan, Aspek Pengadaan, Aspek Pengembangan Karier, Aspek Promosi dan Mutasi, Aspek Manajemen Kinerja, Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Aspek Perlindungan, dan Aspek Sistem Informasi di lingkungan pemerintah Kota Semarang	BKPP
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	a. Pendampingan korban kekerasan bagi perempuan dan anak berupa layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum b. Pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum	DP3A Bag Hukum

PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA		PROGRAM/KEGIATAN/AKTIFITAS OPD YANG MENDUKUNG DI TAHUN 2026	OPD
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru. QW: (Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang (Tekstil dan Pengolahan Ikan). PUS: Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai Global City; Pengembangan Cultural Heritage Tourism (KotaLama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api ds); Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, tanaman perkebunan, susu, kedelai dan perikanan tangkap)	a. Pengembangan Kawasan Semarang Lama, terutama di kawasan Pecinan dan Kampung Melayu b. Penataan Lingkar Luar Simpanglima c. Revitalisasi Kampung mangut Bandarharjo Semarang Utara (Pelatihan Pengolahan Ikan yang Higieni) d. Fasilitasi sertifikasi halal produk pangan e. Festival Pisang Legi (Festival Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi) f. Jambore Petani Cilik dan Remaja Tani, Kelompok Petani Cilik dan Kelompok Remaja Tani di sekolah g. Optimalisasi Badan Usaha Petani Milenial (BUPM)/ KOMDA h. Inkubasi Bisnis pertanian (agro enterpreneur) i. Pembangunan Kawasan Ekonomi Berbasis Komoditas Tanaman Pangan Tahap III j. Revitalisasi BPP gunungpati dan mijen untuk urban farming hub k. peningkatan produksi kebun dinas dan pengembangan komoditas unggul lokal di kebun dinas l. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan jalan produksi m. Penyelenggaraan event wisata dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui: • Kompetisi Start up/Festival Industri Kreatif • Festival Industri Kreatif skala Nasional • Pameran & Bazaar oleh Pelaku Usaha, Ekonomi Kreatif • Festival Film Semarang • Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional • Festival Seni dan Budaya • Festival Payung • Festival Lunpia • Festival Wayang • Semarang Night Carnival Tingkat Internasional • Semarang Bercerita • Pelatihan Menulis Cerita Pendek • Festival Cheng Ho • Festival Kota Lama • Pelatihan dan sertifikasi Profesi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif • Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif • Festival Tembang dan Dolanan Bocah • Festival Dalang Anak dan Remaja • Festival Industri Kreatif skala Nasional	Distaru Dispertan Disbudpar Disperin DPU

PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA		PROGRAM/KEGIATAN/AKTIFITAS OPD YANG MENDUKUNG DI TAHUN 2026	OPD
		Pameran & Bazaar oleh Pelaku Usaha, Ekonomi Kreatif	
16	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	a. Penyelenggaraan operasional panti Among Jiwo, b. Pembangunan Among Jiwo II - Fasilitas Pelayanan Adminduk c. Bantuan Permakanan Gratis/Permakanan PPKS d. Optimalisasi Posyandu bidang Sosial (Posyandu 6 SPM)	DP3A Dinas Sosial, Disdukcapil,
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	a. Penyusunan Kajian terkait Ekosistem Ekonomi Syariah di Kota Semarang - Kajian Pariwisata Halal (MTQ) b. Pameran Halal Food (MTQ) c. Bazar dan Pameran dalam rangkaian pelaksanaan MTQ tingkat nasional d. Fasilitas Haul Waliyullah Kota Semarang e. Semarang Bersholawat (syair dan syiar) f. Expo Kaligrafi Islami (MTQ) g. Fasilitas Kirab Budaya Dalam Rangka Haul Kiageng Galang Sewu h. Fasilitas Kirab Budaya dan Festival Rebana dalam Rangka Haul Mbah Kiai Sirojudin Sendangmulyo i. Karnaval seni Budaya Lintas Agama j. Lomba Rebana Tingkat Nasional (MTQ) k. Haul KH. Sholeh Darat l. Haul Mbah Syafi'i Priyoro Negoro m. Haul Ki Ageng Pandanaran n. Haul Pangeran Terboyo	Disbudpar Dinkop Disperin
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	a. Fasilitas Sertifikasi Halal, TKDN, HKI, P-IRT b. Fasilitas inkubasi bagi pelaku usaha UMKM c. Fasilitas pendampingan dan klinik konsultasi bagi koperasi dan UMKM	Disperin Dinkop
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Optimalisasi RPH Penggaron	Disperin PT. BPS (BUMD)
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem 20 Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.	a. Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi (10 Kandri Baru) b. Fasilitas kegiatan Apresiasi Desa Wisata tingkat Kota Semarang c. Penguatan Pelaku usaha/ umkm sebagai pendukung kelola desa wisata d. Pemberian operasional kepada RT dan RW	Disbudpar Dinkop
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi (10 Kandri Baru)	Disbudpar
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani Perempuan	- Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan (pelatihan kerja)	DP3A

PROGRAM DELEGASI KE KABUPATEN/KOTA		PROGRAM/KEGIATAN/AKTIFITAS OPD YANG MENDUKUNG DI TAHUN 2026	OPD
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	- Pelatihan Konten Kreator Tingkat Kota (Diskominfo)	Diskominfo
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	a. Fasilitasi peyaluran kredit WIBAWA b. Fasilitasi penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih di 177 Kelurahan c. Fasilitasi inkubasi bagi pelaku usaha UMKM d. Fasilitasi pendampingan dan klinik konsultasi bagi koperasi dan UMKM	Dinkop
25	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi (10 Kandri Baru)	Disbudpar
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	a. Pengawasan dan Pengendalian Kawasan dengan fungsi kawasan Hijau b. Pembangunan dan pemeliharaan Taman Kota	DLH DISPERKIM
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	a. kegiatan Fun Game Kebangsaan b. Mba Was dan Mas Id Goes To School c. Penguatan Moderasi Beragama	Kesbang
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Pemberian hibah kepada FPK dan FKUB	Kesbang
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Operasional Posyandu 6 SPM	
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	a. Fasilitasi Pelayanan Adminduk b. Lansia Berdaya (SiDaya) yang diaplikasikan pada Sekolah Lansia, c. Bina Keluarga Lansia (BKL)	DP3A Disdukcapil
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK)	Disnaker
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Fasilitasi penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih di 177 Kelurahan	Dinkop
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	a. Pemberian Bonus atlet berprestasi tingkat kota, prov, nasional b. Insentif atlet yang dibina c. Fasilitasi Kelas Khusus Olahraga d. Pemberian Insentif PSE (Program Semarang Emas : KONI / atlet senior dan pelatih)	Dispora
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Penyelenggaraan Sekolah Inklusi	Disdik
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.	Pemasangan EWS (Early Warning System) Banjir dan Longsor,	BPBD

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

4.6. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Provinsi Jawa Tengah Dengan Kota Semarang Untuk Tahun 2026

Pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan nasional diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara efektif. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) dilaksanakan dalam rangka menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional. Hal ini berupa dukungan RKPD terhadap indikator kinerja urusan, penyepakatan target indikator makro pembangunan, serta strategi dan aksi pusat dan daerah dalam pencapaiannya.

Berikut merupakan penyepakatan bersama target indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Urusan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Semarang untuk tahun 2026.

Tabel 4.11 Indikator Kinerja Urusan Hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indikator Makro Pembangunan				
1	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	%	5,90-6,30	5,90-6,30
2	Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT	%	5,40-5,10	5,40-5,10
3	Tingkat Kemiskinan	%	3,86-3,74	3,86-3,74
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	86,25	86,25
5	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	92,9	92,9
6	Prevalence of Undernourishment (PoU)	Angka	3,92	3,92

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

4.7. Sasaran Dan Prioritas Daerah Dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung terwujudnya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai arah pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui integrasi SDGs ke dalam RKPD. Pemerintah Kota Semarang juga mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam percepatan pencapaian SDGs. Upaya ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Tabel 4.12 menunjukkan sasaran, prioritas, dan program yang mendukung terwujudnya SDGs di Kota Semarang pada Tahun 2026.

Tabel 4.12 Sasaran, Prioritas, dan Program dalam Perwujudan Tujuan SDGs di Kota Semarang Pada Tahun 2026

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Menghapus kemiskinan dalam segala bentuk	- Menurunnya kemiskinan secara inklusif - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian - Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	- Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia - Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan - Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) d. Program Pengembangan Perumahan e. Program Pembinaan Keluarga Berencana f. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera g. Program Pemberdayaan Sosial h. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial i. Program Penanggulangan Bencana j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum k. Program Pencatatan Sipil l. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja m. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan n. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat o. Program penanganan kerawanan pangan p. Program pengawasan keamanan pangan q. Program Pengelolaan Perikanan tangkap r. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya s. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan t. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian u. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri v. Program Penyelenggaraan Jalan
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	- Menurunnya kemiskinan secara inklusif - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif,	- Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia - Peningkatan penyediaan sarana,	a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		berkualitas, dan berkepribadian - Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan - Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya g. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	- Menurunnya kemiskinan secara inklusif - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian - Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	- Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia - Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan - Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	a. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial g. Program Rehabilitasi Sosial h. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) i. Program Peningkata Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial j. Program Pengendalian Penduduk
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian	- Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Program Informasi dan Komunikasi Publik
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian - Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif	- Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Pengendalian Penduduk d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) e. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia f. Program Peningkatan Peran Partai Politik
6	Menjamin ketersediaan serta	- Meningkatnya infrastruktur yang	- Peningkatan kualitas	a. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
	pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat - Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan - Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota	Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum d. Program Pengembangan Perumahan e. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) h. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Semarang, karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	- Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing - Menurunnya kemiskinan secara inklusif	- Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan - Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Penempatan Tenaga Kerja c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat d. Program Perekonomian dan Pembangunan e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata h. Program Pemasaran Pariwisata i. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif j. Program Pengembangan Kebudayaan k. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal l. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan m. Program Hubungan Industrial n. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				o. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) p. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat - Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota - Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya d. Program Aplikasi Informatika e. Prgram Pengembangan Iklim Penanaman Modal f. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah g. Program Penataan Bangunan Gedung h. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian	- Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial d. Program Hubungan Industrial
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat - Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota - Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah d. Program Pengembangan Perumahan e. Program Kawasan Permukiman f. Program Pengembangan Permukiman g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	- Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	a. Program Pengelolaan Persampahan b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup d. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	- Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program Penanggulangan Bencana g. Program Penyuluhan Pertanian h. Program Perencanaan Lingkungan Hidup i. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup j. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati k. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 l. Pengelolaan Sampah m. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Semarang, karena kawasan laut menjadi kewenangan Provinsi		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Semarang, karena bukan kewenangan kabupaten/kota		
16	Mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	- Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota	a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah e. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat f. Program Perekonomian dan Pembangunan g. Program Pencatatan Sipil h. Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				i. Program Pendaftaran Penduduk j. Program Informasi dan Komunikasi Publik k. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global	- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	- Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota	a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat d. Program Perekonomian dan Pembangunan e. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

4.8. Sasaran Dan Prioritas Daerah Dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)

Perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Di sisi lain, kelompok tersebut juga merupakan masyarakat yang produktif dan potensial untuk mendukung kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis dan ramah gender demi kemajuan kota. Upaya yang dilakukan dalam pengarusutamaan gender yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat berbasis gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

Strategi pengarusutamaan gender di Kota Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Sesuai Perda ini, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja yang dilakukan melalui Analisis Gender. Tabel 4.13 merupakan Sasaran dan Prioritas Daerah Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang Pada Tahun 2026.

Tabel 4.13 Sasaran dan Prioritas Daerah Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang Pada Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Indikator	Program	OPD Pengampu
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian	Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3A
				Program Perlindungan Perempuan	DP3A
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3A
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP3A
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3A

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Indikator	Program	OPD Pengampu
				Program Perlindungan Khusus Anak	DP3A
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	DP3A
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	DISDALDUK KB
				Program Pengendalian Penduduk	DISDALDUK KB
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKER
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPP
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
				Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES RSWN
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DISPERKIM
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DISPERKIM
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DISPERKIM
				Program Pengembangan Permukiman	DISPERKIM
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DISPERKIM

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

4.9. Sasaran Dan Prioritas Daerah Dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penaggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Sasaran dan Prioritas Daerah Yang Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kota Semarang Pada Tahun 2026

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Strategi	Program
1	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, tangguh, dan nyaman.	a. Program penanggulangan bencana
2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat		Mempercepat pemenuhan kebutuhan aksesibilitas dan infrastruktur.	b. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
				c. Program penanganan bencana
				d. Program perencanaan lingkungan hidup
				e. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
				h. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				j. Program Pengelolaan Persampahan

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

4.10. Fasilitas Perubahan Iklim

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terbagi menjadi dua, yaitu upaya mitigasi dan adaptasi. Kota Semarang telah melakukan beberapa kajian terkait mitigasi dan adaptasi, terdiri dari Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim pada tahun 2023, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2019, dan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan kajian tersebut, Kota Semarang telah memiliki rencana aksi daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan target penurunan 9.749.288,5 kt.CO₂ atau setara dengan 2%.

Antisipasi dampak perubahan iklim melalui strategi mitigasi berupa penerapan teknologi budidaya rendah karbon (tingkat emisi gas rumah kaca rendah) dan strategi adaptasi antara lain melalui penyesuaian irigasi sesuai dengan perubahan sistem hidrologi dan potensi sumberdaya air, pola tanam, jenis tanaman dan varietas, dan sistem pengolahan tanah.

4.11. Sasaran Dan Prioritas Daerah Dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, prioritas pembangunan Kota Semarang pada tahun 2025 juga dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Pemenuhan SPM juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pelayanan dasar dan memprioritaskan penyediaan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kualitas dan kuantitas layanan).

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.15:

Tabel 4.15 Sasaran, Prioritas Daerah dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kota Semarang Tahun 2026

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Pemenuhan pendidikan yang berkeadilan guna mengurangi pengangguran dan menurunkan kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional			
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional			
		Pendidikan Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sehat dan adaptif secara inklusif dan merata	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Pemenuhan penyediaan infrastruktur yang terawat, merata, dan fungsional untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum d. Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh pengelolaan air limbah untuk limbah domestik			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Pemenuhan penyediaan infrastruktur yang terawat, merata, dan fungsional untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	a. Program Pengembangan Permukiman b. Program Kawasan Permukiman c. Program Pengembangan Perumahan
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni			
5	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Pemenuhan penyediaan infrastruktur yang terawat, merata, dan fungsional untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	a. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum b. Program Penanggulangan Bencana
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Pemenuhan pendidikan yang berkeadilan guna mengurangi pengangguran dan menurunkan kemiskinan	a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			d. Program Penanganan Bencana
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2025

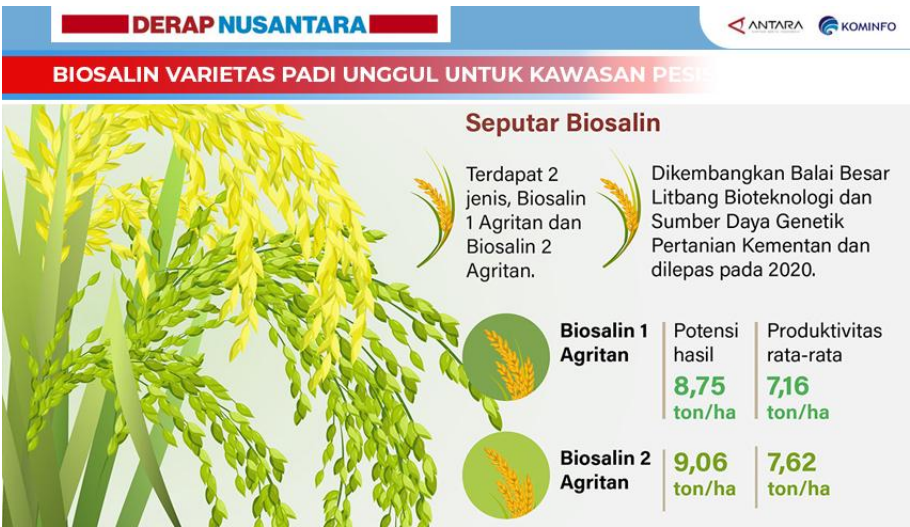
4.12. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan yang dituangkan dalam inovasi kebijakan pembangunan daerah. Sejalan dengan tema pembangunan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, maka beberapa inovasi yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Penanaman Padi Biosalin

Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menanam padi Biosalin seluas 20 hektare (ha), di pesisir utara Semarang. Program ini terlaksana atas Dukungan Kelompok Tani Sumber Rejeki, Mangunharjo, Tugu dan Dukungan Bibit dan Pupuk dari Yayasan Tasnim Bogor. Penanaman padi biosalin di area seluas 20 hektar ini bertujuan untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan pemerintah. Lahan telah disiapkan oleh Pemkot Semarang sebagai bagian dari upaya memanfaatkan lahan pesisir yang kurang produktif akibat salinitas dan rob.

Program ini dimulai dengan pengambilan sampel dan analisa tanah yang dilaksanakan pada 20 Maret 2024 sampai akhirnya berhasil dipanen pada 26 Oktober 2024. Padi Biosalin merupakan jenis padi yang dikembangkan secara khusus untuk tumbuh di tanah yang mengandung kadar garam yang tinggi. Dengan kemampuannya tersebut, padi Biosalin berpotensi membantu meningkatkan ketahanan pangan di daerah-daerah pesisir.





Gambar 4.2 Padi Biosalin siap panen

2. Petasol

Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berinovasi dalam pengolahan sampah plastik menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disebut Petasol. Petasol merupakan BBM asal plastik PE yang digunakan sebagai terobosan alternatif sampah polimer liquid untuk mesin diesel Alat Mesin Pertanian (Alsintan), di antaranya mesin perontok gabah (power thresher).

Petasol memanfaatkan limbah plastik yang mengotori sungai dan irigasi menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Teknologi Pirolisis Muktikondensor ini dikembangkan untuk memberikan solusi energi murah bagi petani, meningkatkan efisiensi, sekaligus mengurangi limbah plastik.

Dengan teknologi Fast Pyrolysis (Faspol) yang digunakan dalam proses tersebut, efektif memenuhi standar bahan bakar setara minyak solar dan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin-mesin pertanian

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA KERJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kota Semarang disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka mencapai indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Semarang menyelaraskan program sesuai dengan arah kebijakan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

5.1.1. Dukungan Program RKPD Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional RKP 2026

Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh terhadap 8 prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP 2026 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut mendukung tema RKP 2026 yaitu "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif". Berikut ini rekapitulasi dukungan program Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026, adapun rekapitulasi dukungan program Kota Semarang terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Dukungan Program Kota Semarang Tahun 2026 Terhadap Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026

Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	Jml. Program	Anggaran
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		2	6.876.645.100
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	6.876.645.100
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		16	78.867.678.345
	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	18.046.049.641
	DINAS PERIKANAN	5	15.567.308.100
	DINAS PERTANIAN	6	45.254.320.604
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		33	1.553.833.196.831
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7	79.388.078.983
	DINAS PEKERJAAN UMUM	4	440.633.372.553
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	20.065.310.228

Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	Jml. Program	Anggaran
	DINAS PENATAAN RUANG	8	178.791.290.403
	DINAS PERHUBUNGAN	2	471.811.080.623
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	363.144.064.041
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas		38	1.990.911.700.057
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	6	23.555.606.759
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	61.386.738.840
	DINAS KESEHATAN	5	944.450.005.456
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	22.556.869.179
	DINAS PENDIDIKAN	5	875.408.728.015
	DINAS SOSIAL	6	37.739.652.446
	DINAS TENAGA KERJA	5	25.814.099.362
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		11	84.852.996.937
	DINAS PERDAGANGAN	7	59.037.732.911
	DINAS PERINDUSTRIAN	4	25.815.264.026
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		7	29.513.748.434
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7	29.513.748.434
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		123	1.886.113.424.514
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	26.734.063.529
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	24.344.419.918
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	97.683.929.597
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	127.225.729.881
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	24.119.996.482
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2	10.607.425.987
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	22.288.430.577
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	76.883.487.926
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	3.122.004.065
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	19.378.453.423
	INSPEKTORAT	3	31.646.662.305
	KECAMATAN BANYUMANIK	5	69.774.219.859
	KECAMATAN CANDISARI	5	41.786.894.606
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	5	39.980.009.176
	KECAMATAN GAYAMSARI	5	42.005.503.715
	KECAMATAN GENUK	5	68.474.421.015

Prioritas Nasional	Perangkat Daerah	Jml. Program	Anggaran
	KECAMATAN GUNUNG PATI	5	64.220.933.299
	KECAMATAN MIJEN	5	59.770.524.730
	KECAMATAN NGALIYAN	5	73.847.989.237
	KECAMATAN PEDURUNGAN	5	88.850.711.245
	KECAMATAN SEMARANG BARAT	5	82.371.142.596
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	5	48.012.763.624
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	5	57.279.870.433
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	5	52.185.818.580
	KECAMATAN SEMARANG UTARA	5	59.750.704.198
	KECAMATAN TEMBALANG	5	87.038.283.194
	KECAMATAN TUGU	5	28.804.954.629
	SATPOL PP	2	42.687.660.639
	SEKRETARIAT DAERAH	3	292.539.776.574
	SEKRETARIAT DPRD	2	122.696.639.475
	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	14	229.203.809.281
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	14.316.975.727
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	173.312.104.502
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	41.574.729.052
TOTAL		244	5.860.173.199.499

Penajaman keterkaitan antara outcome, program, dan subkegiatan daerah dengan Prioritas Nasional (Asta Cita) dalam RKP Tahun 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam mendukung Asta Cita untuk Kabupaten/Kota Tahun 2026, serta hasil Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 sebagai upaya menjamin sinergisitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Sebagai gambaran umum keterpaduan dukungan Pemerintah Kota Semarang terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita) dalam RKP Tahun 2026, disusun rekapitulasi keterkaitan antara prioritas nasional dengan outcome dan program daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah. Rekapitulasi ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan arah dukungan pembangunan daerah sebelum dilakukan penajaman lebih lanjut pada tingkat subkegiatan. Rekapitulasi keterkaitan tersebut disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Keterkaitan Outcome dan Program RKPD Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita)

Asta Cita	Anggaran
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	5.056.279.761
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.778.844.290
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	16.650.444.749

Asta Cita	Anggaran
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	164.099.735.168
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	49.604.122.915
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	171.835.084.598
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	9.649.047.470
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	46.762.499.704
TOTAL	466.436.058.654

Untuk memastikan bahwa dukungan terhadap Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 tidak hanya bersifat pemetaan umum, tetapi juga tercermin secara substantif dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Semarang melakukan penajaman keterkaitan antara outcome, program, dan subkegiatan daerah dengan Asta Cita sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah. Adapun pemetaan outcome, program, dan subkegiatan daerah dalam mendukung Prioritas Nasional (Asta Cita) disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3

Penajaman Outcome, Program, dan Subkegiatan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dalam Mendukung Prioritas Nasional (Asta Cita)

No.	Tag. Asta Cita	Kode Bid. Urusan	Bid. Urusan	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	150.000.000
						1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	18.302.695.000
						1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	64.400.000
						1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	400.000.000
						1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	30.000.000
2	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.901.286.000
						1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	886.350.000
						1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	122.805.672.403
						1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	113.355.244
				1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3.007.200.000
3	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.250.000.000
4	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	161.986.009.348

No.	Tag. Asta Cita	Kode Bid. Urusan	Bid. Urusan	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
5	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	142.058.645
						1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	316.227.150
6	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	51.328.559
						1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.137.746.691
	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas			1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	185.333.041
						1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.484.737.565
7	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.660.000.000
	2.07.05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	30.000.000	
					2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.221.760.000	
	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas							

No.	Tag. Asta Cita	Kode Bid. Urusan	Bid. Urusan	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
8	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	261.800.940
				2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	181.900.000
						2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	13.079.000
9	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	280.947.703
						2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	554.513.814
10	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	46.105.338.379
11	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	7.109.960
12	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	283.486.164

No.	Tag. Asta Cita	Kode Bid. Urusan	Bid. Urusan	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		KELUARGA BERENCANA (KB)		Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
						2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1.000.000.000	
				2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	291.034.090	
13	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	39.024.977.639	
						2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	8.424.000	
14	1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	628.107.880	
						2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4.303.503.881	
	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan			2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	6.811.134.000	
						2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	1.461.882.640	
15	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	873.064.800	
				2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	768.341.510	
						2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.444.903.785	

No.	Tag. Asta Cita	Kode Bid. Urusan	Bid. Urusan	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
16	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	278.075.300
17	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	873.060.020
						2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	854.017.741
				2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	340.000.000
						2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	400.000.000
18	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	142.512.250
						2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	371.773.250
19	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	6.187.046.000
20	4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN	2.23.02		2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	1.000.000

No.	Tag. Asta Cita	Kode Bid. Urusan	Bid. Urusan	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
	Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas		BIDANG PERPUSTAKAAN		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	10.458.000
	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur			2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18.714.800
						2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	90.632.540
21	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	89.528.190
22	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	519.900.000
23	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.377.088.654

No.	Tag. Asta Cita	Kode Bid. Urusan	Bid. Urusan	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi							
24	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.200.482.773
				3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	223.000.000
25	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	291.679.000
						3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	300.000.000
26	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	55.000.000
						3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.465.692.400
				3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	24.500.000
						3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1.905.774.576
27	1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	124.668.000

No.	Tag. Asta Cita	Kode Bid. Urusan	Bid. Urusan	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
					DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan			8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	861.745.330

5.1.2. Dukungan Program RKPD Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh terhadap 3 prioritas Provinsi yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut mendukung arah kebijakan RKPD 2026 dengan tema "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Berikut ini rekapitulasi dukungan program Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, adapun rekapitulasi dukungan program Kota Semarang terhadap Prioritas Provinsi dalam RKPD Tahun 2026 disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Dukungan Program Kota Semarang Tahun 2026 Terhadap Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Prioritas Provinsi	Perangkat Daerah	Jml. Program	Anggaran
1. Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dinamis	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	26.734.063.529
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	31.221.065.018
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	97.683.929.597
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	127.225.729.881
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	24.119.996.482
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2	10.607.425.987
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3	73.959.154.406
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	41.574.729.052
	INSPEKTORAT	3	31.646.662.305
	KECAMATAN BANYUMANIK	5	69.774.219.859
	KECAMATAN CANDISARI	5	41.786.894.606
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	5	39.980.009.176
	KECAMATAN GAYAMSARI	5	42.005.503.715
	KECAMATAN GENUK	5	68.474.421.015
	KECAMATAN GUNUNG PATI	5	64.220.933.299
	KECAMATAN MIJEN	5	59.770.524.730
	KECAMATAN NGALIYAN	5	73.847.989.237
	KECAMATAN PEDURUNGAN	5	88.850.711.245
	KECAMATAN SEMARANG BARAT	5	82.371.142.596
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	5	48.012.763.624
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	5	57.279.870.433
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	5	52.185.818.580
	KECAMATAN SEMARANG UTARA	5	59.750.704.198
	KECAMATAN TEMBALANG	5	87.038.283.194
	KECAMATAN TUGU	5	28.804.954.629
	SATPOL PP	2	42.687.660.639
	SEKRETARIAT DAERAH	3	292.539.776.574
	SEKRETARIAT DPRD	2	122.696.639.475
	2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	76	1.905.847.628.595

Prioritas Provinsi	Perangkat Daerah	Jml. Program	Anggaran
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	14.316.975.727
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	6	23.555.606.759
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7	79.388.078.983
	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	18.046.049.641
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2	2.924.333.520
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	173.312.104.502
	DINAS PEKERJAAN UMUM	4	440.633.372.553
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	20.065.310.228
	DINAS PENATAAN RUANG	8	178.791.290.403
	DINAS PERDAGANGAN	7	59.037.732.911
	DINAS PERHUBUNGAN	2	471.811.080.623
	DINAS PERIKANAN	5	15.567.308.100
	DINAS PERTANIAN	6	45.254.320.604
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	363.144.064.041
3. Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter		54	2.067.473.993.823
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	61.386.738.840
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	22.288.430.577
	DINAS KESEHATAN	5	944.450.005.456
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7	29.513.748.434
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	25.678.873.244
	DINAS PENDIDIKAN	5	875.408.728.015
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	19.378.453.423
	DINAS PERINDUSTRIAN	4	25.815.264.026
	DINAS SOSIAL	6	37.739.652.446
	DINAS TENAGA KERJA	5	25.814.099.362
TOTAL		244	5.860.173.199.499

5.1.3. Dukungan Program RKPD Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Prioritas Pembangunan Kota Semarang 2026

Dukungan program beserta anggaran mendukung arah kebijakan RKPD Kota Semarang 2026 dengan tema "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup". Berikut ini rekapitulasi dukungan program Kota Semarang Tahun 2026 Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026. Rekapitulasi dukungan program dimaksud disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Rekapitulasi Dukungan Program Kota Semarang Tahun 2026 Terhadap
Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026

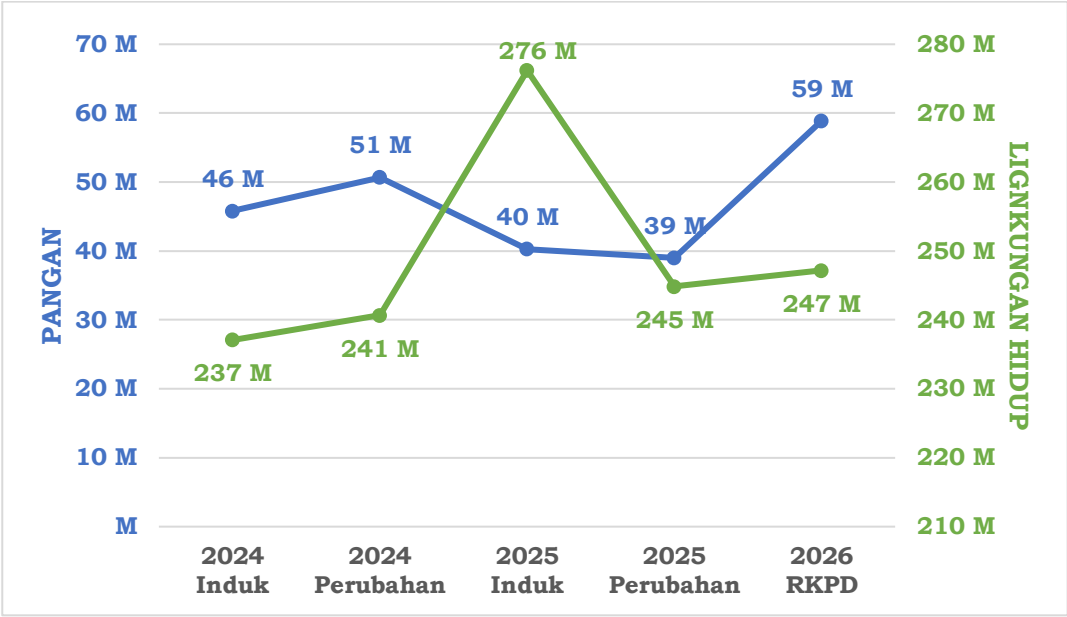
Prioritas Daerah	Jml. Program	Anggaran
1. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	15	68.104.383.192
2. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	10	173.312.104.502
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota	22	1.468.696.783.347
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	40	1.942.381.062.157
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan	33	217.863.339.319
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota	124	1.989.815.526.981
TOTAL	244	5.860.173.199.499

Berdasarkan Tabel 5.5, total belanja daerah pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 sebesar Rp5.860.173.199.499, dimana didalamnya termasuk program penunjang urusan pemerintah daerah sebagai pendukung operasional seperti program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan operasional tugas perangkat daerah yang terdiri dari Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Operasional Kantor, dan Pelayanan BLUD. Pengalokasian anggaran selanjutnya difokuskan pada upaya-upaya strategis yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026. Pengarahan belanja tersebut merupakan penjabaran awal pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029, dengan menitikberatkan pada penguatan fondasi pembangunan sesuai tema tahun 2026 yaitu “Penguatan Sistem Pangan Kota yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”. Untuk melihat bobot pergeseran prioritas daerah tahun 2026, dilakukan perbandingan dengan anggaran dengan tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan perbandingan anggaran prioritas daerah dari tahun 2024 – 2026 yang tercantum pada Tabel 5.5 5.6

Tabel 5.6
Perbandingan Anggaran Prioritas Daerah dari Tahun 2024-2026

Prioritas Daerah	2024 Induk	2024 Perubahan	2025 Induk	2025 Perubahan	2026 RKPD	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)-(5) (5)
PANGAN	45.792.307.005	50.673.398.239	40.302.088.097	39.005.187.690,75	58.873.507.791,82	51%
LINGKUNGAN HIDUP	237.077.372.384	240.672.370.998	276.198.288.817	244.843.935.057,44	247.160.989.981,17	1%
INFRASTRUKTUR DASAR	1.104.258.269.219	1.212.443.367.667	1.178.238.901.923	1.603.602.576.576,44	1.479.906.564.152,08	-8%
PELAYANAN DASAR	769.470.816.790	1.077.850.102.623	755.467.118.765,8	1.051.928.201.234,11	670.588.555.296,21	-36%
SARPRAS PEREKONOMIAN	260.512.205.548	200.622.484.380	275.896.626.932	237.122.888.911,05	170.493.114.116,82	-28%
TATA KELOLA	247.382.407.458	243.145.755.051	178.593.499.799	141.926.743.701,89	143.878.769.230,53	1%

Pada tahun 2025, baik pada APBD Induk atau Perubahan, prioritas anggaran masih didominasi oleh dua sektor utama, yakni Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Dasar. Infrastruktur Dasar mengalami kenaikan anggaran sebesar 36%, dari Rp 1,178T pada Anggaran 2025 Induk menjadi Rp 1,603T pada Perubahan APBD TA 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan utilitas publik lainnya. Demikian pula, Pelayanan Dasar naik sebesar 39%, dari Rp755,4M menjadi Rp1,051T, yang mencerminkan penguatan fokus pada layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai prioritas kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tema pembangunan tahun 2025 “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial Yang Merata”.



Gambar 5.1. Grafik Anggaran Pada Prioritas Daerah Pangan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Berdasarkan data perkembangan anggaran prioritas Kota Semarang tahun 2024 hingga 2026 pada Gambar 5.1, terlihat adanya pergeseran fokus kebijakan seiring dengan penetapan tema pembangunan tahun 2026, yaitu “Penguatan Sistem Pangan Kota yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”. Pergeseran arah kebijakan ini tercermin dari komposisi anggaran yang menunjukkan peningkatan alokasi untuk sektor Lingkungan Hidup dan Pangan, sementara beberapa sektor lain seperti Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Dasar mengalami penyesuaian. Anggaran untuk Lingkungan Hidup meningkat sebesar 1% dari Anggaran 2025 Perubahan, menjadi sebesar Rp247,1M. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat kualitas lingkungan melalui pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi sumber daya air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Sementara itu, sektor Pangan juga menunjukkan peningkatan 51%, mencapai Rp58,8M, menegaskan arah kebijakan untuk membangun sistem pangan kota yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan lokal, serta memperkuat rantai pasok dari produsen hingga konsumen. Sebaliknya, Infrastruktur Dasar mengalami penurunan sebesar 8% pada 2026 Induk dibandingkan 2025 Perubahan. Hal ini

mengindikasikan adanya penyesuaian setelah lonjakan investasi infrastruktur pada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, struktur anggaran tahun 2026 menunjukkan pergeseran strategis dari pembangunan fisik menuju pembangunan berkelanjutan, yang menyeimbangkan aspek lingkungan dan ketahanan pangan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Perangkat daerah yang berkaitan secara langsung dengan pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro. Sedangkan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tahun 2026 sebagai tahapan awal pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025–2045 menjadi momentum penting dalam memperkuat landasan transformasi pembangunan daerah, sejalan dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dukungan anggaran diarahkan secara lebih terfokus pada prioritas-prioritas pembangunan yang bersifat fundamental, terukur, dan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan perkotaan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Rincian alokasi belanja tersebut disajikan berdasarkan fokus dan upaya pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Prioritas Belanja Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	Anggaran
1. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan		33.397.068.835,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM	9.500.000.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.735.000.000,00
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	50.000.000,00
	DINAS PERIKANAN	916.598.400,00
	DINAS PERTANIAN	16.918.401.600,00
	DINAS PERDAGANGAN	600.000.000,00
	DINAS PERINDUSTRIAN	578.068.835,00
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	99.000.000,00
2. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		304.962.403.238,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM	143.380.000.000,00
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	34.805.950.767,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	850.000.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	125.332.452.471,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	400.000.000,00
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	194.000.000,00

Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	Anggaran
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota		449.083.914.088,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM	192.154.868.904,00
	DINAS PENATAAN RUANG	71.850.000.000,00
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	115.779.045.184,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	68.600.000.000,00
	DINAS PERDAGANGAN	200.000.000,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.000.000,00
4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia		259.923.594.867,00
	DINAS PENDIDIKAN	57.084.009.370,00
	DINAS KESEHATAN	27.871.631.380,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM	50.000.000,00
	DINAS PENATAAN RUANG	6.550.000.000,00
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00
	SATPOL PP	7.558.885.467,00
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2.951.000.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.050.000.000,00
	DINAS SOSIAL	7.310.059.688,00
	DINAS TENAGA KERJA	6.015.000.000,00
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.255.628.200,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	946.548.590,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.668.000.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	100.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	9.350.000.000,00
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.825.000.000,00
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	50.000.000,00
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	6.614.610.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	86.220.900.000,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	449.000.000,00
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	4.117.322.172,00
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	1.155.000.000,00
	KECAMATAN SEMARANG UTARA	1.105.000.000,00
	KECAMATAN SEMARANG BARAT	1.483.000.000,00
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	1.155.000.000,00
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1.413.000.000,00
	KECAMATAN GUNUNG PATI	1.483.000.000,00
	KECAMATAN TUGU	1.005.000.000,00

Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	Anggaran
	KECAMATAN MIJEN	1.363.000.000,00
	KECAMATAN GENUK	1.313.000.000,00
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	1.055.000.000,00
	KECAMATAN TEMBALANG	1.263.000.000,00
	KECAMATAN CANDISARI	1.005.000.000,00
	KECAMATAN BANYUMANIK	1.205.000.000,00
	KECAMATAN NGALIYAN	1.155.000.000,00
	KECAMATAN GAYAMSARI	1.113.000.000,00
	KECAMATAN PEDURUNGAN	1.255.000.000,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.060.000.000,00
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan		107.074.785.860,00
	DINAS SOSIAL	200.000.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	20.000.000,00
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	5.048.000.000,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.250.000.000,00
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	48.094.225.060,00
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	500.000.000,00
	DINAS PERDAGANGAN	11.900.000.000,00
	DINAS PERINDUSTRIAN	7.197.572.400,00
	SEKRETARIAT DAERAH	6.199.988.400,00
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.075.000.000,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	22.590.000.000,00
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota		356.698.362.110,00
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.319.700.000,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	20.487.640.520,00
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	100.000.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	2.900.000.000,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	500.000.000,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.000.000.000,00
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.763.271.590,00
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	25.000.000,00
	INSPEKTORAT	3.370.000.000,00
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	14.790.100.000,00
	KECAMATAN SEMARANG UTARA	20.830.550.000,00
	KECAMATAN SEMARANG BARAT	28.322.000.000,00
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	16.901.700.000,00
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	14.641.250.000,00
	KECAMATAN GUNUNG PATI	16.227.200.000,00

Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	Anggaran
	KECAMATAN TUGU	5.712.450.000,00
	KECAMATAN MIJEN	15.621.900.000,00
	KECAMATAN GENUK	22.406.750.000,00
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	10.416.200.000,00
	KECAMATAN TEMBALANG	35.357.000.000,00
	KECAMATAN CANDISARI	13.679.650.000,00
	KECAMATAN BANYUMANIK	25.443.450.000,00
	KECAMATAN NGALIYAN	27.191.500.000,00
	KECAMATAN GAYAMSARI	13.330.450.000,00
	KECAMATAN PEDURUNGAN	35.760.600.000,00
	KECAMATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.600.000.000,00
	TOTAL	1.511.140.128.998,00

5.1.4. Dukungan Program RKPD Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Satu Data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai landasan bagi instansi pemerintah untuk mengumpulkan, menghasilkan, dan berbagi data secara lebih akurat dan bertanggungjawab. Dengan standar yang telah ditetapkan, data yang dihasilkan akan memiliki format yang seragam, metadata yang jelas, serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan peraturan tersebut, penyelenggaraan Satu Data di Kota Semarang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang serta Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/569 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kota Semarang yang membagi secara jelas tugas dari masing-masing penyelenggara. Dimana Sekretariat SDI (Koordinator Forum SDI) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik, Pembina Data Spasial adalah Dinas Penataan Ruang, Walidata adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Walidata Pendukung adalah seluruh Sekretaris Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Semarang.

Dalam rangka mengintegrasikan kebijakan pusat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Kota Semarang telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Nomor 050/587 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang Tahun 2023-2024.

Dalam penyelenggaraannya, mulai dari Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, sampai Penyebarluasan Data, telah tercipta sinergi antara Bappeda, Diskominfo, dan BPS. Setiap tahunnya, dilaksanakan desk konfirmasi data sektoral di seluruh Perangkat Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dan penetapan Daftar Data melalui Surat Keputusan Wali Kota.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang memiliki kemanfaatan besar untuk berbagai kepentingan dan pihak, salah satunya dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang efektif harus didasarkan pada data yang mutakhir, valid, dan terintegrasi. Pemanfaatan Satu Data Indonesia dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Semarang salah satunya terlihat dari pemanfaatan portal <https://data.semarangkota.go.id/> yang merupakan portal Pemerintah Kota Semarang yang menyediakan data-data sektoral. Dengan ketersediaan data yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dukungan program Pemerintah Kota Semarang terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada RKPD Tahun 2026 disajikan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Dukungan Program Kota Semarang Tahun 2026 Terhadap Satu Data Indonesia

No.	Program	Anggaran	Pelaksana
1.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	954.417.276	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.415.603.880	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	839.803.332	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.550.000.000	51 PERANGKAT DAERAH

5.1.5. Dukungan Program RKPD Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai dengan program kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Saat ini, RIBK tahun 2025–2029 sedang disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kesehatan yang tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Sebagai upaya penyelarasan antara program kesehatan nasional dalam RIBK 2025–2029 dengan program kesehatan di tingkat daerah, telah ditetapkan indikator kinerja kesehatan yang harus dimasukkan dalam

dokumen RPJMD 2025–2029 serta Renstra Perangkat Daerah (PD) 2025–2029. Dokumen ini bertujuan menciptakan keselarasan vertikal dan horizontal antar pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan RI No. PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja RIBK 2025-2029 dalam RPJMD dan Renstra-PD 2025-2029 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Pemerintah Daerah perlu mempedomani program kesehatan nasional yang tertuang dalam RIBK. Indikator kinerja daerah dapat disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RIBK. Secara umum, RIBK 2025–2029 menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan perencanaan serta penganggaran bidang kesehatan berbasis kinerja, dengan fokus pada peningkatan mutu layanan kesehatan, pemerataan akses yang adil dan terjangkau, serta penguatan SDM dan sarana prasarana kesehatan.

5.1.6. Dukungan Program RKPD Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Selain sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah, implementasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh pelayanan yang layak dan merata sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 6 jenis SPM yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dalam rangka mendukung pencapaian SPM. Dukungan program RKPD Kota Semarang Tahun 2026 untuk SPM sejumlah Rp.118.898.860.656,15. Rekapitulasi dukungan program Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Dukungan Program Kota Semarang Tahun 2026 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Perangkat Daerah	Total Pagu SPM	SPM	Nama Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jml. Anggaran
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.609.501.153,50	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	98.103.460,00
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			47.975.000,00	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	315.131.015,00
							Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	106.071.499,00
							Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	350.000.000,00
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	392.220.179,50
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	1.889.499.142,00	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	182.225.000,00
				Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	664.145.000,00
				Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	37.700.000,00

No.	Perangkat Daerah	Total Pagu SPM	SPM	Nama Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jml. Anggaran
				Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	92.200.000,00
				Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.850.000,00
				Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	133.475.000,00
				Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	74.414.999,00
				Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	495.039.143,00
				Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	143.250.000,00

No.	Perangkat Daerah	Total Pagu SPM	SPM	Nama Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jml. Anggaran
						Daerah Kabupaten/Kota		
				Pelayanan Kesehatan untuk Usia Produktif		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	31.300.000,00
				Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.800.000,00
				Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.100.000,00
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	445.805.587,50	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	188.026.345,60
							Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	143.814.243,00
							Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.290.237,00
							Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.877.817,70
							Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.076.505,60
						Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	16.266.495,00
							Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa,	70.540.237,00

No.	Perangkat Daerah	Total Pagu SPM	SPM	Nama Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jml. Anggaran
							Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
							Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	913.706,60
4	DINAS PENDIDIKAN	106.335.370.800,00	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12.000.000,00
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.250.000.000,00
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.040.000.000,00
							Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	400.000.000,00
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	70.000.000,00
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.740.800.000,00
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	265.029.120,00
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	545.776.000,00
							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.070.000.000,00
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	250.000.000,00
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42.000.000,00
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	200.000.000,00
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	155.000.000,00
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	-
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.000.000,00
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-
							Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	18.000.000,00

No.	Perangkat Daerah	Total Pagu SPM	SPM	Nama Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jml. Anggaran
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-
							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	45.000.000,00
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40.000.000,00
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.292.000.000,00
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.326.500.000,00
							Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	428.925.000,00
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	18.016.250.000,00
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	16.675.000.000,00
							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.259.000.000,00
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	461.745.000,00
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	-
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.150.000.000,00
							Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	400.000.000,00
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	18.302.695.000,00
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.733.150.000,00
							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.258.450.000,00
				Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	258.700.000,00
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	800.000.000,00
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	150.000.000,00

No.	Perangkat Daerah	Total Pagu SPM	SPM	Nama Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jml. Anggaran
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	64.400.000,00
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	175.000.000,00
				Kekhususan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.240.000.000,00
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	242.000.000,00
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	190.000.000,00
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	275.000.000,00
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	235.916.000,00
				Literasi dan Numerasi	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.609.700.000,00
							Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	738.836.560,00
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.021.250.000,00
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.000.000.000,00
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.327.062.900,00

No.	Perangkat Daerah	Total Pagu SPM	SPM	Nama Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jml. Anggaran
							Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	460.700.000,00
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.250.000.000,00
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	340.000.000,00
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.079.485.220,00
							Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	250.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.553.837.000,00	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	500.000.000,00
							Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.279.717.000,00
							Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.135.000.000,00
							Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-
							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.130.000.000,00
			SPM Bidang Perumahan Rakyat dan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000,00
							Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	770.000.000,00
							Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	89.120.000,00
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-
			SPM Bidang Perumahan Rakyat dan	Fasilitasi penyediaan rumah yang	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00

No.	Perangkat Daerah	Total Pagu SPM	SPM	Nama Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jml. Anggaran
			Kawasan Pemukiman	layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	450.000.000,00
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00
							Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00
6	DINAS SOSIAL	2.303.668.054,15	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	55.375.045,98
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	69.390.191,54
							Penyediaan Makanan	300.000.000,00
							Penyediaan Sandang	103.020.138,14
							Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	89.557.748,49
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3.546.236,82
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.595.806,57

No.	Perangkat Daerah	Total Pagu SPM	SPM	Nama Layanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jml. Anggaran
				Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	14.527.750,15
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	4.432.796,02
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	25.794.125,34
							Pemberian Layanan Kedaruratan	112.058.107,05
							Pemberian Layanan Rujukan	10.496.860,97
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.595.806,57
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	22.743.198,78
							Penyediaan Alat Bantu	958.479,51
							Penyediaan Permakanan	1.374.331.514,87
							Penyediaan Sandang	114.244.247,35
7	SATPOL PP	761.178.919,00	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	142.058.645,00
							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	513.554.704,00
							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	57.979.400,00
							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	1.300.000,00
							Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	8.143.430,00
							Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	38.142.740,00

5.1.7. Dukungan Program RKPD Kota Semarang Tahun 2026 terhadap Posyandu 6 SPM

Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang tengah mengimplementasikan Posyandu 6 SPM sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Kebijakan ini menghadirkan perluasan fungsi Posyandu, dari yang semula berfokus pada kesehatan, menjadi enam bidang layanan yang lebih komprehensif, yaitu kesehatan, sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, serta ketertiban dan keamanan. Transformasi ini menjadikan Posyandu sebagai pusat layanan publik terdepan di tingkat kelurahan, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagi Kota Semarang, implementasi Posyandu 6 SPM sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan dasar, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah—mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disperkim, Dinas Pendidikan, hingga Satpol PP-Posyandu 6 SPM diharapkan menjadi simpul pelayanan yang efektif dan mudah dijangkau.

Revitalisasi Posyandu juga didukung melalui pelatihan kader, digitalisasi data layanan, serta penguatan sarana prasarana. Dengan perluasan fungsi ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan secara terpadu, mulai dari pemantauan gizi, bantuan sosial, edukasi PAUD, hingga informasi keselamatan lingkungan. Implementasi Posyandu 6 SPM menjadikan Kota Semarang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan warganya. Dukungan program Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung implementasi Posyandu 6 SPM pada RKPD Tahun 2026 disajikan pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Rekapitulasi Dukungan Program Kota Semarang Tahun 2026 Terhadap Posyandu 6 SPM

No.	Urusan	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Kinerja)	Indikator	Target	Anggaran
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1.040.000.000
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	N/A Keluarga	N/A
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.293 Orang	92.200.000
					1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66.409 Orang	182.225.000
					1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.116.696 Orang	31.300.000
					1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204.686 Orang	495.039.143
					1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	4.249 Orang	6.850.000

No.	Urusan	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Kinerja)	Indikator	Target	Anggaran
						dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
					1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	27.274 Orang	74.414.999
					1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	6.457.071.292,32
			1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0051 - Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	N/A Unit	N/A
					1.03.02.2.01.0110 - Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	N/A Titik	N/A
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	N/A Titik	
			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0023 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A Lembaga	N/A
			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01.0039 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	N/A Rumah	

No.	Urusan	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Kinerja)	Indikator	Target	Anggaran
			SISTEM AIR LIMBAH	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Domestik (SPALD) Setempat				
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang di bangun	N/A KM	N/A
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.000 Unit Rumah	25.376.945.000
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	124.852.033
					1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Patroli. Pengamanan, dan Pengawasan	N/A Laporan	N/A
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fa3kir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100.000 Orang	452.573.169,33

No.	Urusan	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Kinerja)	Indikator	Target	Anggaran
					1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A Keluarga	N/A

5.1.8. Integrasi *Monitoring Control Surveillance for Prevention* (MCPS) dalam RKOP Kota Semarang Tahun 2026

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pencegahan korupsi melalui implementasi *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai landasan dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola perencanaan yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta indikator pencegahan korupsi yang ditetapkan oleh KPK RI.

MCSP KPK RI di antaranya mencakup pencegahan upaya korupsi pada berbagai tahapan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada komponen perencanaan, MCSP mencakup tiga sasaran, yaitu perencanaan pembangunan daerah, pokok pikiran DPRD, serta penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, yang masing-masing dinilai berdasarkan aspek transparansi, aspek regulasi dan kebijakan, serta aspek akuntabilitas, sehingga melalui sinergi antarperangkat daerah dan pemenuhan indikator MCSP diharapkan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 mampu menghasilkan program dan kegiatan yang tepat sasaran, berorientasi pada hasil, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

5.1.9. Rencana Program Prioritas Daerah

Program dan kegiatan di tahun 2026 disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029. Program prioritas pembangunan daerah di tahun 2026 merupakan penjabaran pelaksanaan bidang urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung, 5 (lima) unsur penunjang, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1.9.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.1.9.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dan Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; (2) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; (3) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; (4) Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan; dan (5) Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Peningkatan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan, Peningkatan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dan Peningkatan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal; (2) Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal; dan (3) Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemerataan distribusi guru yang proporsional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja (1) Rasio guru terhadap murid dan (2) Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada Meningkatnya kepatuhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku, Peningkatan kepatuhan satuan pendidikan Sekolah Dasar terhadap ketentuan perizinan yang berlaku, dan kepatuhan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama terhadap ketentuan perizinan yang berlaku.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin dan (2) Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin; (3) Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin.

5.1.9.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Peningkatan efektivitas pemanfaatan sarana prasarana RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dalam mendukung layanan kesehatan perorangan, Peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat, Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang sesuai standar di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, Peningkatan ketersediaan obat PKD, obat Program, dan Vaksin serta perbekalan di fasilitas pelayanan kesehatan, Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita, Peningkatan kualitas manajemen informasi kesehatan, Peningkatan kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen, Peningkatan penanganan kesehatan bagi lanjut usia, Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan Peningkatan perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase tingkat penggunaan sarana prasarana sesuai standar; (2) Indeks kesehatan lingkungan; (3) Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat; (4) Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro; (5) Proporsi faskes dengan perbekalan sesuai standar; (6) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup; (7) Persentase ibu hamil KEK; (8) Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia; (9) Prevalensi wasting balita; (10) Proporsi fasilitas layanan kesehatan terintegrasi SIKN; (11) Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen; (12) Tingkat kepuasan pasien terhadap RSUD Mijen; (13) Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap penduduk Kota Semarang; (14) Persentase lanjut usia yang mandiri; (15) Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis; (16) Angka Incident Rate (IR) HIV; (17) Treatment Success Rate (TSR); (18) Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional; (19) Persentase fasyankes terakreditasi minimal paripurna;

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Proporsi apotek, toko obat, dan usaha mikro

obat tradisional (UMOT) sesuai standar dan (2) Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup.

5.1.9.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada Peningkatan kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota, Ketersediaan dokumen perencanaan teknis sumber daya air, dan Peningkatan pemanfaatan ruang sungai.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir; (2) Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob; (3) Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan; dan (4) Persentase sungai yang termanfaatkan.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas akses air minum aman.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase rumah tangga terlayani air minum aman.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas akses sanitasi aman.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada Peningkatan kondisi sistem drainase, dan Ketersediaan dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik dan (2) Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan penataan dan perijinan bangunan gedung, dan Peningkatan kualitas penyelenggaraan BGN.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Rasio kepatuhan PBG dan (2) Persentase BGN dalam kondisi baik.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase reklame yang berizin.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kondisi jalan, Ketersediaan dokumen perencanaan teknis kebinamargaan, dan Peningkatan ruang milik jalan yang dipelihara.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase jalan dalam kondisi baik; (2) Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan; dan (3) Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengembangan jasa konstruksi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penerbitan KRK.

5.1.9.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada Peningkatan upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase backlog perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada Peningkatan rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, dan Peningkatan kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Rumah Layak Huni dan (2) Persentase Kawasan yang Tertata.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian, Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum, Peningkatan sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan, dan Peningkatan kualitas penyediaan pemakaman umum.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik; (2) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU; (3) Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola; dan (4) Rasio ketersediaan tempat pemakaman umum per 1000 penduduk.

5.1.9.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dan Peningkatan perlindungan masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani; (2) Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; (3) Persentase tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SOP dan layanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; (4) Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan perda dan perkada; dan (5) Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan kedaruratan dan logistik bencana, Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana; (2) Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana; dan (3) Persentase Penanganan Pasca Bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas pencegahan kebakaran, Peningkatan kesiapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dan Peningkatan kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran; (2) Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; (3) Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaan aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama; dan (4) Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

5.1.9.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas PSKS dalam mengatasi permasalahan sosial, termasuk didalamnya fasilitasi hari besar nasional, fasilitasi bantuan untuk warakawuri dan janda perintis kemerdekaan (JPK), dan fasilitasi edukasi kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan ke sekolah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase efektivitas penguatan pemberdayaan Sosial.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase PPKS warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada Penurunan kerentanan anak terlantar melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan Penurunan kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase anak terlantar yang mendapat

perlindungan sosial dan (2) Persentase warga miskin yang mendapat jaminan sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pasca bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial.

5.1.9.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.1.9.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada Peningkatan keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif, dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan (2) Persentase produktivitas tenaga kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada Peningkatan penempatan tenaga kerja lokal, Peningkatan wirausaha baru, dan Peningkatan lowongan pekerjaan yang berkualitas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan; (2) Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru; dan (3) Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada Peningkatan lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.

5.1.9.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada Peningkatan kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG).
- b. Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada Penurunan kekerasan terhadap perempuan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada Peningkatan ketahanan keluarga.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA) dan (2) Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada Peningkatan akses pemenuhan hak-hak anak.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai Pemenuhan Hak Anak.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada upaya Penurunan kekerasan terhadap anak.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai Perlindungan Khusus Anak.

5.1.9.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada Peningkatan optimalisasi sumber daya ekonomi lokal dalam menunjang kemandirian pangan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Peningkatan ketersediaan pangan yang berkelanjutan, Peningkatan akses pangan bagi masyarakat, dan Peningkatan konsumsi pangan yang berkualitas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Angka Ketersediaan Energi; (2) Persentase Cakupan Distribusi Pangan; dan (3) Angka Konsumsi Energi.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada Peningkatan daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase daerah tahan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada Peningkatan peredaran pangan yang aman, layak konsumsi dan bebas dari cemaran.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan.

5.1.9.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelesaian sengketa tanah garapan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada Peningkatan perencanaan penggunaan tanah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pemanfaatan aset tanah BMD.

5.1.9.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada Peningkatan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak kebijakan rencana dan program (KRP).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada Penurunan pencemaran udara, Peningkatan cakupan pelayanan laboratorium lingkungan, Penurunan kerusakan lahan, Peningkatan cakupan informasi lingkungan hidup, dan Perwujudan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berbasis pada data dan informasi yang valid.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara; (2) Kontribusi penurunan Emisi GRK Kumulatif (sektor persampahan); (3) Persentase pelayanan laboratorium lingkungan; (4) Luasan areal yang terkonservasi; (5) Persentase cakupan informasi lingkungan hidup; dan (6) Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada Peningkatan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase limbah B3 yang terkelola.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada Peningkatan kinerja pengawasan lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan, dan Peningkatan kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase kegiatan dan atau usaha yang dilakukan pengawasan dan (2) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya.

- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada Peningkatan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup.

- i. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada Peningkatan tata kelola persampahan masyarakat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Volume sampah masuk ke TPA per tahun dan (2) Persentase pengelolaan sampah.

5.1.9.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan pada Peningkatan aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase perekaman KTP elektronik dan (2) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak.
- b. Program Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan pada Peningkatan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun dan (2) Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, dan Peningkatan pemanfaatan data kependudukan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan (2) Persentase perangkat daerah yang telah

memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah.

5.1.9.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas proses administrasi kelurahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada Peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan.

5.1.9.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada Pengendalian angka kelahiran penduduk.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu *Age Specific Fertility Rate/ASFR* (15-19 tahun).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada Penurunan kehamilan tidak direncanakan, dan Peningkatan penggunaan kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD) dan (2) *Demand Satisfied*.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Indeks Lansia Berdaya; (2) Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja.

5.1.9.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program ini diarahkan pada Peningkatan jangkauan layanan angkutan umum, Peningkatan pengendalian dan pengawasan parkir *on the street*, Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, dan Peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik fungsi kendaraan bermotor.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk; (2) Persentase pengelolaan *Parkir On the Street*; (3) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota; dan (4) Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang;

5.1.9.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Program ini diarahkan pada Peningkatan peran komunitas teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi, dan Peningkatan penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi dan (2) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik.
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program ini diarahkan pada Peningkatan cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan Peningkatan cakupan layanan pengelolaan *e-government*.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan (2) Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE).

5.1.9.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program ini diarahkan pada Peningkatan ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian.
- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan kinerja pengelolaan koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koperasi sehat.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada Peningkatan koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koperasi yang berkualitas.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan pelaku usaha mikro yang berdaya saing.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (*Feasible*).

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada Peningkatan daya saing usaha mikro.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya.

5.1.9.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan eksposur potensi daerah kepada calon investor.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Peningkatan kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Perekonomian, Peningkatan kemudahan pelayanan penanaman

modal yang cepat, tepat dan transparan pada perizinan dasar dan Bidang Pembangunan, dan Peningkatan kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal, perizinan dan non perizinan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan; (2) Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan; (3) Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan; (4) Persentase pengaduan penanaman modal dan perizinan yang ditindaklanjuti.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Peningkatan sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

5.1.9.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan, dan Peningkatan pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pemuda yang terlibat dalam Kegiatan kepemudaan dan (2) Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kejuaraan olahraga, dan Peningkatan ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional dan (2) Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan.

5.1.9.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik.

5.1.9.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada Peningkatan perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

5.1.9.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan.

c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada Peningkatan warisan budaya yang dilestarikan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan; (2) Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan; (3) Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan; dan (4) Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan.

5.1.9.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini diarahkan pada Peningkatan layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan Peningkatan layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat pemanfaatan perpustakaan dan (2) Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang.
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini diarahkan pada Peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan.

5.1.9.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip
Program ini diarahkan pada Peningkatan ketersediaan arsip dan peningkatan kesesuaian pengelolaan arsip.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat ketersediaan arsip dan (2) Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini diarahkan pada Peningkatan cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip dan Peningkatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/pemekaran yang telah diautentifikasi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip dan (2) Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi.
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip
Program ini diarahkan pada Peningkatan akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

5.1.9.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.1.9.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini diarahkan pada Peningkatan produksi perikanan tangkap.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada Peningkatan produksi perikanan budidaya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Luasan Kawasan Konservasi.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada Peningkatan preferensi masyarakat akan konsumsi pangan bergizi berbasis ikan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Konsumsi Ikan Masyarakat.

5.1.9.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada Peningkatan jangkauan pemasaran pariwisata.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi.

5.1.9.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada Peningkatan produksi tanaman pangan, Peningkatan produksi hortikultura dan perkebunan, Peningkatan produksi peternakan, dan Peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dilakukan melalui urban farming, hidroponik,

aquaponic, pengembangan hortikultura dan distribusi hasil tani di daerah sekitar dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Jumlah produksi tanaman pangan; (2) Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan; (3) Jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging; (4) Jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur; (5) Jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu; dan (6) Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diarahkan pada Peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini diarahkan pada Peningkatan ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diarahkan pada Peningkatan perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada tanaman pangan, dan Peningkatan perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada hortikultura dan perkebunan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan dan (2) Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan.
- e. Program Penyuluhan Pertanian
Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian.

5.1.9.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Program ini diarahkan pada Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi.

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan, Peningkatan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan, dan Peningkatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan; (2) Persentase pengelola sarana distribusi yang dibina; dan (3) Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan.
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Program ini diarahkan pada Peningkatan iklim perdagangan yang stabil dan adil.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Koefisien harga antar waktu.
- d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini diarahkan pada Peningkatan akses produk lokal ke pasar internasional.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai ekspor non migas.
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada Peningkatan hak dan keamanan konsumen.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini diarahkan pada Peningkatan konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi di dalam negeri.

5.1.9.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada Peningkatan sentra IKM sebagai pusat produksi dalam mendukung perekonomian lokal, dan Peningkatan pelaku IKM yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pertambahan jumlah sentra IKM dan (2) Persentase pertambahan IKM.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada Peningkatan sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas.

- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini diarahkan pada Peningkatan efisiensi integrasi sistem pengelolaan industri nasional untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan sektor industri lokal.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase IKM yang terdaftar di SIINas.

5.1.9.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.9.4.1. Sekretariat Daerah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini diarahkan pada Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, Peningkatan kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan peran pemerintah daerah pada kerangka otonomi, Peningkatan kualitas produk hukum yang dihasilkan, dan Peningkatan layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik; (2) Persentase produk hukum yang dihasilkan; (3) Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi; dan (4) Tingkat efektivitas kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah.
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Program ini diarahkan pada Peningkatan ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah, Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa, dan Peningkatan partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR, peningkatan kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada good governance, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah; (2) Nilai pemanfaatan sistem pengadaan; (3) Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ; dan (4) Nilai tingkat kematangan UKPBJ; (5) Persentase capaian target dividen BUMD; (6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD; (7) Persentase Peningkatan Partisipasi pembiayaan CSR dari perusahaan yang tergabung dalam forum CSR; dan (8) Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang.

5.1.9.4.2. Sekretariat DPRD

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD dan Peningkatan kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD, dan peningkatan kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan dan (2) Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan perundang-undangan, dan (3) Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti.

5.1.9.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.1.9.5.1. Perencanaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Perwujudan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Perwujudan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia; (2) Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian & SDA; (3) Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan.

5.1.9.5.2. Keuangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas dan ketepatan penyusunan APBD, Peningkatan kualitas penyerapan anggaran, dan Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD; (2) Persentase Realisasi Belanja; dan (3) Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan;

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan akuntabel.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan pertumbuhan wajib pajak daerah, Peningkatan pemenuhan pelayanan pajak daerah, Peningkatan partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah, dan Peningkatan capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah, (2) Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah, (3) Persentase kepatuhan wajib pajak daerah, dan (4) Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah.

5.1.9.5.3. Kepegawaian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan jabatan, Peningkatan kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif, Peningkatan kinerja ASN yang berkualitas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi; (2) Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya; dan (3) Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik.

5.1.9.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Fungsional dan (2) Persentase ASN yang memiliki hasil diklat dengan kriteria berkualitas.

5.1.9.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan riset daerah, Peningkatan penyelenggaraan inovasi daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah dan (2) Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah.

5.1.9.6. Unsur Pengawas

5.1.9.6.1. Inspektorat Daerah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja I, wilayah kerja II, wilayah kerja III, wilayah kerja IV, wilayah kerja V, dan Peningkatan pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I; (2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III; (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV; (5) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V; dan (6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP lainnya, dan BPK yang ditindaklanjuti.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja I, wilayah kerja II, wilayah kerja III, wilayah kerja IV, wilayah kerja V, dan Peningkatan kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I; (2) Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II; (3) Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III; (4) Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur

Pembantu IV; (5) Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT.

5.1.9.7. Unsur Kewilayahan

5.1.9.7.1. Kecamatan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan pada Peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan yang tepat waktu.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada Peningkatan keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan aktif di Kecamatan.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada Peningkatan pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada Peningkatan cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan.

5.1.9.8. Unsur Pemerintahan Umum

5.1.9.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada Peningkatan penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Aktualisasi Pancasila.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada Peningkatan kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul,

berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Kinerja Ormas.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada Peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Harmoni Indonesia.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada Peningkatan kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator 1) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dan 2) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah. Serta, penambahan Indikator pada Sekretariat Daerah 1) Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan, dan publikasi; 2) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah; 3) Persentase kinerja Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah; 4) Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas; 5) Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas; 6) Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas; dan 7) Indeks Kematangan Organisasi. Selanjutnya, RSUD KRMT Wongsonegoro 1) Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis; 2) Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro; 3) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang berkualitas; dan 4) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD KRMT Wongsonegoro.

5.2. Pendanaan

Program dan kegiatan prioritas pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2026 dialokasikan untuk mencapai target pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026. Rekapitulasi pagu indikatif Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026

No.	Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN	875.273.728.015,00
2	DINAS KESEHATAN	944.090.005.456,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	440.633.372.553,00
4	DINAS PENATAAN RUANG	178.791.290.403,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	363.144.064.041,00
6	SATPOL PP	42.687.660.639,00
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	41.574.729.052,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.316.975.727,00
9	DINAS SOSIAL	37.739.652.446,00
10	DINAS TENAGA KERJA	25.814.099.362,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	25.678.873.244,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	18.046.049.641,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	173.312.104.502,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.288.430.577,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.378.453.423,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	471.811.080.623,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	76.883.487.926,00
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	29.513.748.434,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20.065.310.228,00
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	61.386.738.840,00
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	79.388.078.983,00
22	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	23.555.606.759,00
23	DINAS PERIKANAN	15.567.308.100,00
24	DINAS PERTANIAN	45.254.320.604,00
25	DINAS PERDAGANGAN	59.037.732.911,00
26	DINAS PERINDUSTRIAN	25.815.264.026,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	292.239.776.574,00
	BAGIAN HUKUM	4.136.522.816,00
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	3.990.455.217,00
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	574.355.678,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	98.241.429.919,00
	BAGIAN ORGANISASI	3.220.234.154,00
	BAGIAN TATA USAHA	34.663.617.590,00
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.339.178.984,00
	BAGIAN RUMAH TANGGA	61.545.196.539,00
	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	6.261.264.554,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	7.275.023.267,00
	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	20.740.371.177,00
	BAGIAN KEUANGAN	50.552.126.679,00

No.	Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
28	SEKRETARIAT DPRD	122.696.639.475,00
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.119.996.482,00
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	127.225.729.881,00
31	BADAN PENDAPATAN DAERAH	97.683.929.597,00
32	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	26.734.063.529,00
33	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	10.607.425.987,00
34	INSPEKTORAT	31.646.662.305,00
35	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	48.012.763.624,00
36	KECAMATAN SEMARANG UTARA	59.750.704.198,00
37	KECAMATAN SEMARANG BARAT	82.371.142.596,00
38	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	52.185.818.580,00
39	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	57.279.870.433,00
40	KECAMATAN GUNUNG PATI	64.220.933.299,00
41	KECAMATAN TUGU	28.804.954.629,00
42	KECAMATAN MIJEN	59.770.524.730,00
43	KECAMATAN GENUK	68.474.421.015,00
44	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	39.980.009.176,00
45	KECAMATAN TEMBALANG	87.038.283.194,00
46	KECAMATAN CANDISARI	41.786.894.606,00
47	KECAMATAN BANYUMANIK	69.774.219.859,00
48	KECAMATAN NGALIYAN	73.847.989.237,00
49	KECAMATAN GAYAMSARI	42.005.503.715,00
50	KECAMATAN PEDURUNGAN	88.850.711.245,00
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	31.221.065.018,00

Rekapitulasi rencana program dan pendanaan (pagu indikatif) pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 selanjutnya disajikan berdasarkan bidang urusan pemerintahan, yang dirinci menurut Perangkat Daerah dan unit Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran struktur penganggaran pembangunan daerah secara berjenjang, mulai dari urusan pemerintahan hingga unit pelaksana teknis, sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Rincian rencana program dan pendanaan (pagu indikatif) RKPD Kota Semarang Tahun 2026 berdasarkan bidang urusan pemerintahan, Perangkat Daerah, dan unit Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12

Rincian Rencana Program dan Pendanaan (Pagu Indikatif) RKPD Kota Semarang Tahun 2026 menurut Bidang Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, dan Unit Perangkat Daerah

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			875.408.728.015
	DINAS PENDIDIKAN		875.408.728.015
		DINAS PENDIDIKAN	875.408.728.015
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			944.450.005.456
	DINAS KESEHATAN		944.450.005.456
		DINAS KESEHATAN	506.996.299.040
		PUSKESMAS PONCOL	2.047.478.897
		PUSKESMAS MIROTO	1.663.804.332
		PUSKESMAS BANDARHARJO	2.857.784.612

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		PUSKESMAS BULULOR	2.205.084.205
		PUSKESMAS HALMAHERA	2.799.293.982
		PUSKESMAS BUGANGAN	1.680.126.102
		PUSKESMAS KARANGDORO	3.210.411.030
		PUSKESMAS PANDANARAN	2.675.523.273
		PUSKESMAS LAMPER TENGAH	1.712.276.328
		PUSKESMAS KARANG AYU	1.446.525.039
		PUSKESMAS LEBDOSARI	1.884.837.100
		PUSKESMAS MANYARAN	2.041.147.836
		PUSKESMAS KROBOKAN	1.660.455.960
		PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	1.426.285.497
		PUSKESMAS GAYAMSARI	3.361.141.889
		PUSKESMAS CANDILAMA	1.871.629.384
		PUSKESMAS KAGOK	1.756.966.750
		PUSKESMAS PENGANDAN	2.209.492.370
		PUSKESMAS GENUK	2.187.527.528
		PUSKESMAS BANGETAYU	4.646.557.155
		PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	3.236.350.000
		PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	3.787.143.277
		PUSKESMAS KEDUNGmundu	4.766.311.722
		PUSKESMAS ROWOSARI	2.891.583.340
		PUSKESMAS NGESREP	2.233.773.644
		PUSKESMAS SRONDOL	2.297.999.378
		PUSKESMAS PADANGSARI	2.299.463.726
		PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	1.814.835.111
		PUSKESMAS GUNUNGPATI	3.945.204.169
		PUSKESMAS MIJEN	3.081.555.873
		PUSKESMAS KARANGMALANG	2.004.068.827
		PUSKESMAS TAMBAKAJI	1.673.822.890
		PUSKESMAS PURWOYOSO	1.667.841.956
		PUSKESMAS NGALIYAN	4.097.466.560
		PUSKESMAS MANGKANG	1.822.831.323
		PUSKESMAS KARANG ANYAR	1.452.702.599
		PUSKESMAS SEKARAN	2.032.113.011
		UPTD Instalasi Farmasi	845.000.000
		UPTD Laboratorium Kesehatan	2.001.649.278
PUSKESMAS PLAMONGAN SARI	1.249.500.000		
PUSKESMAS BULUSAN	1.189.000.000		
RSUD KRMT WONGSONEGORO	331.220.306.763		
RSUD MIJEN	10.498.833.700		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			615.378.499.956
	DINAS PEKERJAAN UMUM		440.633.372.553
		DINAS PEKERJAAN UMUM	371.345.820.000
		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I	2.550.000.000
		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV	2.540.720.400
		UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum	35.514.335.239
		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II	3.000.000.000
		UPTD Peralatan dan Perbengkelan	22.701.218.796

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III	2.981.278.118
		DINAS PENATAAN RUANG	169.691.290.403
		DINAS PENATAAN RUANG	169.691.290.403
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.053.837.000
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.053.837.000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			358.090.227.041
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	358.090.227.041
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	358.090.227.041
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			98.579.365.418
		SATPOL PP	42.687.660.639
		SATPOL PP	42.687.660.639
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN	41.574.729.052
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN	41.574.729.052
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.316.975.727
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.316.975.727
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			37.739.652.446
		DINAS SOSIAL	37.739.652.446
		DINAS SOSIAL	37.739.652.446
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			25.814.099.362
		DINAS TENAGA KERJA	25.814.099.362
		DINAS TENAGA KERJA	25.814.099.362
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			22.556.869.179
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.556.869.179
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.556.869.179
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			18.046.049.641
		DINAS KETAHANAN PANGAN	18.046.049.641
		DINAS KETAHANAN PANGAN	18.046.049.641
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			9.100.000.000
		DINAS PENATAAN RUANG	9.100.000.000
		DINAS PENATAAN RUANG	9.100.000.000
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			173.312.104.502
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	173.312.104.502
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	173.312.104.502
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			22.288.430.577
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.288.430.577
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.288.430.577
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.122.004.065
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.122.004.065
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.122.004.065
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			19.378.453.423
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.378.453.423

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.378.453.423
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			471.811.080.623
	DINAS PERHUBUNGAN		471.811.080.623
		DINAS PERHUBUNGAN	471.811.080.623
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			73.959.154.406
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		73.959.154.406
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	73.959.154.406
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			29.513.748.434
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		29.513.748.434
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	29.513.748.434
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			20.065.310.228
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		20.065.310.228
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20.065.310.228
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			61.386.738.840
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		61.386.738.840
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	61.386.738.840
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			1.076.077.000
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		1.076.077.000
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.076.077.000
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			1.848.256.520
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		1.848.256.520
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.848.256.520
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			63.536.861.720
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		63.536.861.720
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	63.536.861.720
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			21.920.390.305
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		21.920.390.305
		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	21.920.390.305
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			1.635.216.454
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		1.635.216.454
		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	1.635.216.454
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			15.567.308.100
	DINAS PERIKANAN		15.567.308.100
		DINAS PERIKANAN	15.567.308.100
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			15.851.217.263
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		15.851.217.263
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15.851.217.263
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			45.254.320.604
	DINAS PERTANIAN		45.254.320.604
		DINAS PERTANIAN	45.254.320.604
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			59.037.732.911
	DINAS PERDAGANGAN		59.037.732.911

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		DINAS PERDAGANGAN	59.037.732.911
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			25.815.264.026
	DINAS PERINDUSTRIAN		25.815.264.026
		DINAS PERINDUSTRIAN	25.815.264.026
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			292.539.776.574
	SEKRETARIAT DAERAH		292.539.776.574
		BAGIAN HUKUM	4.136.522.816
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	3.990.455.217
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	574.355.678
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	98.241.429.919
		BAGIAN ORGANISASI	3.220.234.154
		BAGIAN TATA USAHA	34.663.617.590
		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	1.339.178.984
		BAGIAN RUMAH TANGGA	61.545.196.539
		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	6.261.264.554
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	7.275.023.267
		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	20.740.371.177
		BAGIAN KEUANGAN	50.552.126.679
4.02 SEKRETARIAT DPRD			122.696.639.475
	SEKRETARIAT DPRD		122.696.639.475
		SEKRETARIAT DPRD	122.696.639.475
5.01 PERENCANAAN			24.119.996.482
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		24.119.996.482
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.119.996.482
5.02 KEUANGAN			224.909.659.478
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		127.225.729.881
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	127.225.729.881
	BADAN PENDAPATAN DAERAH		97.683.929.597
		BADAN PENDAPATAN DAERAH	97.683.929.597
5.03 KEPEGAWAIAN			24.006.708.642
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		24.006.708.642
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	24.006.708.642
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.727.354.887
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		2.727.354.887
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.727.354.887
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			10.607.425.987
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		10.607.425.987
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	10.607.425.987
6.01 INSPEKTORAT DAERAH			31.646.662.305
	INSPEKTORAT		31.646.662.305
		INSPEKTORAT	31.646.662.305
7.01 KECAMATAN			964.154.744.136
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN		48.012.763.624
		KECAMATAN SEMARANG SELATAN	21.072.103.624
		KELURAHAN BULUSTALAN	1.810.050.000
		KELURAHAN BARUSARI	2.372.210.000

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		KELURAHAN RANDUSARI	2.766.770.000
		KELURAHAN MUGASSARI	3.029.810.000
		KELURAHAN PLEBURAN	2.652.450.000
		KELURAHAN WONODRI	4.189.570.000
		KELURAHAN PETERONGAN	2.749.570.000
		KELURAHAN LAMPER LOR	2.231.250.000
		KELURAHAN LAMPER KIDUL	2.257.890.000
		KELURAHAN LAMPER TENGAH	2.881.090.000
	KECAMATAN SEMARANG UTARA		59.750.704.198
		KECAMATAN SEMARANG UTARA	23.302.219.653
		KELURAHAN PLOMBOKAN	2.629.505.651
		KELURAHAN BULU LOR	4.126.997.500
		KELURAHAN PURWOSARI	2.503.726.267
		KELURAHAN KUNINGAN	4.491.564.903
		KELURAHAN PANGGUNG LOR	6.160.446.100
		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL	1.710.702.520
		KELURAHAN BANDARHARJO	5.145.745.441
		KELURAHAN TANJUNG MAS	6.456.043.348
		KELURAHAN DADAPSARI	3.223.752.815
	KECAMATAN SEMARANG BARAT		82.371.142.596
		KECAMATAN SEMARANG BARAT	30.850.988.906
		KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	3.411.921.200
		KELURAHAN MANYARAN	5.359.044.900
		KELURAHAN KRAPYAK	2.736.434.900
		KELURAHAN TAMBAKHARJO	1.607.679.300
		KELURAHAN KALIBANTENG KULON	2.647.864.900
		KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	2.137.309.900
		KELURAHAN GISIKDRONO	5.356.594.800
		KELURAHAN BONGSARI	3.369.044.900
		KELURAHAN BOJONGSALAMAN	3.179.955.000
		KELURAHAN SALAMAN MLOYO	1.990.264.900
		KELURAHAN CABEAN	1.547.543.090
		KELURAHAN KARANGAYU	2.473.504.900
		KELURAHAN KROBOKAN	4.745.301.200
		KELURAHAN TAWANGSARI	2.728.420.000
		KELURAHAN TAWANGMAS	2.828.104.900
		KELURAHAN KEMBANGARUM	5.401.164.900
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR		52.185.818.580
		KECAMATAN SEMARANG TIMUR	21.969.258.580
		KELURAHAN KEMIJEN	4.269.860.000
		KELURAHAN REJOMULYO	2.311.020.000
		KELURAHAN MLATIBARU	3.378.420.000
		KELURAHAN MLATIHARJO	2.284.680.000
		KELURAHAN KEBONAGUNG	1.619.940.000
		KELURAHAN BUGANGAN	3.364.980.000
		KELURAHAN SARIREJO	2.739.320.000
		KELURAHAN REJOSARI	6.492.840.000
		KELURAHAN KARANGTURI	1.556.400.000
		KELURAHAN KARANGTEMPEL	2.199.100.000
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH		57.279.870.433
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	29.146.700.433

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		KELURAHAN MIROTO	2.311.230.000
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	1.995.950.000
		KELURAHAN JAGALAN	2.299.270.000
		KELURAHAN KRANGGAN	1.776.750.000
		KELURAHAN GABAHAN	2.477.790.000
		KELURAHAN KEMBANGSARI	1.916.670.000
		KELURAHAN SEKAYU	1.293.470.000
		KELURAHAN PANDANSARI	1.433.390.000
		KELURAHAN BANGUNHARJO	1.535.470.000
		KELURAHAN KAUMAN	1.251.030.000
		KELURAHAN PURWODINATAN	2.031.350.000
		KELURAHAN KARANGKIDUL	1.675.030.000
		KELURAHAN PEKUNDEN	1.780.950.000
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	1.964.710.000
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	2.390.110.000
		KECAMATAN GUNUNG PATI	64.220.933.299
		KECAMATAN GUNUNG PATI	32.873.575.699
		KELURAHAN SUKOREJO	4.507.908.600
		KELURAHAN SADENG	2.940.668.600
		KELURAHAN KANDRI	1.583.848.600
		KELURAHAN SEKARAN	2.035.788.600
		KELURAHAN PONGANGAN	1.708.068.600
		KELURAHAN KALISEGORO	1.508.768.600
		KELURAHAN JATIREJO	1.055.768.600
		KELURAHAN NGIJO	1.519.868.600
		KELURAHAN PATEMON	2.203.788.600
		KELURAHAN NONGKOSAWIT	1.654.328.600
		KELURAHAN CEPOKO	1.170.948.600
		KELURAHAN GUNUNGPATI	2.595.048.600
		KELURAHAN MANGUNSARI	1.887.428.600
		KELURAHAN PAKINTELAN	1.645.828.600
		KELURAHAN PLALANGAN	1.374.588.600
		KELURAHAN SUMURREJO	1.954.708.600
		KECAMATAN TUGU	28.804.954.629
		KECAMATAN TUGU	17.866.094.629
		KELURAHAN JERAKAH	1.171.220.000
		KELURAHAN TUGUREJO	2.006.060.000
		KELURAHAN KARANGANYAR	1.464.780.000
		KELURAHAN RANDUGARUT	893.300.000
		KELURAHAN MANGKANG WETAN	2.283.580.000
		KELURAHAN MANGUNHARJO	1.754.900.000
		KELURAHAN MANGKANG KULON	1.365.020.000
		KECAMATAN MIJEN	59.770.524.730
		KECAMATAN MIJEN	30.413.089.630
		KELURAHAN CANGKIRAN	2.330.746.320
		KELURAHAN BUBAKAN	1.545.745.940
		KELURAHAN KARANGMALANG	943.047.310
		KELURAHAN POLAMAN	785.465.410
		KELURAHAN PURWOSARI	1.370.193.160
		KELURAHAN TAMBANGAN	1.077.798.430
		KELURAHAN WONOLOPO	3.065.235.480

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		KELURAHAN MIJEN	2.581.053.450
		KELURAHAN JATIBARANG	1.175.019.300
		KELURAHAN KEDUNGPALE	2.320.187.890
		KELURAHAN NGADIRGO	2.555.053.450
		KELURAHAN WONOPLUMBON	1.607.131.210
		KELURAHAN JATISARI	5.637.331.080
		KELURAHAN PESANTREN	2.363.426.670
	KECAMATAN GENUK		68.474.421.015
		KECAMATAN GENUK	27.985.969.535
		KELURAHAN SEMBUNGHARJO	3.796.403.540
		KELURAHAN KUDU	3.586.088.540
		KELURAHAN KARANGROTO	5.877.728.540
		KELURAHAN GENUKSARI	4.452.368.540
		KELURAHAN BANJARDOWO	3.268.383.540
		KELURAHAN GEBANGSARI	3.198.988.540
		KELURAHAN TRIMULYO	1.321.865.360
		KELURAHAN PENGGARON LOR	2.222.723.540
		KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	1.525.848.540
		KELURAHAN BANGETAYU KULON	5.502.123.540
		KELURAHAN BANGETAYU WETAN	4.312.998.540
		KELURAHAN TERBOYO KULON	645.075.360
		KELURAHAN TERBOYO WETAN	777.855.360
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR		39.980.009.176
		KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	20.679.819.176
		KELURAHAN BENDAN DUWUR	1.763.500.000
		KELURAHAN BENDAN NGISOR	1.796.900.000
		KELURAHAN GAJAHMUNGKUR	4.505.520.000
		KELURAHAN KARANGREJO	2.023.000.000
		KELURAHAN LEMPONGSARI	2.221.840.000
		KELURAHAN PETOMPON	2.192.360.000
		KELURAHAN SAMPANGAN	3.043.560.000
		KELURAHAN BENDUNGAN	1.753.510.000
	KECAMATAN TEMBALANG		87.038.283.194
		KECAMATAN TEMBALANG	25.437.683.194
		KELURAHAN METESEH	10.178.800.000
		KELURAHAN MANGUNHARJO	4.458.680.000
		KELURAHAN TANDANG	6.298.700.000
		KELURAHAN SENDANGGUWO	5.884.360.000
		KELURAHAN JANGLI	2.474.500.000
		KELURAHAN KEDUNGmundu	3.856.220.000
		KELURAHAN TEMBALANG	2.107.020.000
		KELURAHAN SENDANGMULYO	13.811.720.000
		KELURAHAN BULUSAN	2.514.780.000
		KELURAHAN KRAMAS	1.754.960.000
		KELURAHAN ROWOSARI	3.111.840.000
		KELURAHAN SAMBIROTO	5.149.020.000
	KECAMATAN CANDISARI		41.786.894.606
		KECAMATAN CANDISARI	17.421.479.579
		KELURAHAN JATINGALEH	3.158.970.433
		KELURAHAN WONOTINGAL	2.516.864.150
		KELURAHAN TEGALSARI	4.876.774.285

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		KELURAHAN KALIWIRU	1.442.811.582
		KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG	2.692.974.150
		KELURAHAN CANDI	3.630.561.717
		KELURAHAN JOMBLANG	6.046.458.710
	KECAMATAN BANYUMANIK		69.774.219.859
		KECAMATAN BANYUMANIK	24.910.268.397
		KELURAHAN BANYUMANIK	3.017.589.954
		KELURAHAN GEDAWANG	3.729.081.521
		KELURAHAN JABUNGAN	2.236.978.943
		KELURAHAN NGESREP	4.329.541.452
		KELURAHAN PADANGSARI	5.101.620.476
		KELURAHAN PEDALANGAN	3.605.463.821
		KELURAHAN PUDAKPAYUNG	7.496.910.232
		KELURAHAN SRONDOL KULON	3.641.121.521
		KELURAHAN SRONDOL WETAN	6.649.479.059
		KELURAHAN SUMURBOTO	2.490.123.798
		KELURAHAN TINJOMOYO	2.566.040.685
	KECAMATAN NGALIYAN		73.847.989.237
		KECAMATAN NGALIYAN	25.922.852.237
		KELURAHAN BRINGIN	7.662.870.000
		KELURAHAN KALIPANCUR	6.279.895.000
		KELURAHAN BAMBANKEREP	2.089.425.000
		KELURAHAN NGALIYAN	4.571.260.000
		KELURAHAN WATES	2.505.740.000
		KELURAHAN TAMBAKAJI	6.240.630.000
		KELURAHAN WONOSARI	6.614.865.000
		KELURAHAN PODOREJO	3.365.555.000
		KELURAHAN PURWOYOSO	4.945.852.000
		KELURAHAN GONDORIYO	3.649.045.000
	KECAMATAN GAYAMSARI		42.005.503.715
		KECAMATAN GAYAMSARI	18.294.563.715
		KELURAHAN TAMBAKREJO	2.952.820.000
		KELURAHAN KALIGawe	3.986.780.000
		KELURAHAN SAWAH BESAR	2.969.460.000
		KELURAHAN SIWALAN	2.108.180.000
		KELURAHAN SAMBIREJO	2.855.140.000
		KELURAHAN PANDEAN LAMPER	5.267.580.000
		KELURAHAN GAYAMSARI	3.570.980.000
	KECAMATAN PEDURUNGAN		88.850.711.245
		KECAMATAN PEDURUNGAN	26.589.151.245
		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL	10.718.600.000
		KELURAHAN TLOGOSARI KULON	12.135.920.000
		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN	2.482.600.000
		KELURAHAN TLOGOMULYO	4.980.610.000
		KELURAHAN KALICARI	3.241.510.000
		KELURAHAN PLAMONGANSARI	4.754.440.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH	5.501.420.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR	3.692.150.000
		KELURAHAN GEMAH	4.600.140.000
		KELURAHAN PALEBON	4.172.090.000
		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL	3.896.300.000

Bid. Urusan	Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
		KELURAHAN PENGGARON KIDUL	2.085.780.000
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			31.221.065.018
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		31.221.065.018
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	31.221.065.018
TOTAL			5.860.173.199.499

Rencana program dan pendanaan (pagu indikatif) RKPD Kota Semarang Tahun 2026 berdasarkan bidang urusan pemerintahan, program, indikator, dan pagu indikatif per program disajikan pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13
Rencana Program dan Pendanaan (Pagu Indikatif) RKPD Kota Semarang Tahun 2026 menurut Bidang Urusan Pemerintahan,
Program, Indikator, dan Pagu Indikatif per Program

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				875.408.728.015	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				759.892.227.315	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan	100	%		DINAS PENDIDIKAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	100	%		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				108.157.773.240	
Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	%		DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%		
Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	%		
Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	%		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	86,97	%		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				550.053.400	
Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%		DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%		
Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				6.348.536.560	
Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar	72,13	%		DINAS PENDIDIKAN
	Rasio guru terhadap murid	01:18	Rasio		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				460.137.500	
Meningkatnya kepatuhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin	100	%		DINAS PENDIDIKAN
Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan Sekolah Dasar terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	100	%		
Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin	100	%		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				944.450.005.456	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				773.414.640.530	
Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis	90	%		RSUD KRMT WONGSONEGORO
	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	90	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		DINAS KESEHATAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS PONCOL
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS MIROTO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS BANDARHARJO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS BULULOR
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS HALMAHERA
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS BUGANGAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS KARANGDORO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS PANDANARAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS LAMPER TENGAH
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS KARANG AYU
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS LEBDOSARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS MANYARAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS KROBOKAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS NGEMLAK SIMONGAN

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS GAYAMSARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS CANDILAMA
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS KAGOK
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS PENGANDAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		PUSKESMAS GENUK
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS BANGETAYU
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS KEDUNGmundu
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS ROWOSARI

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS NGESREP
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS SRONDOL
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS PADANGSARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS GUNUNGPATI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS MIJEN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS KARANGMALANG
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS TAMBAKAJI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS PURWOYOSO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS NGALIYAN

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS MANGKANG
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS KARANG ANYAR
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS SEKARAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		UPTD Laboratorium Kesehatan
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS PLAMONGAN SARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS BULUSAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		PUSKESMAS KALIGAWÉ
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang berkualitas	100	%		RSUD KRMT WONGSONEGORO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD KRMT Wongsonegoro	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Mijen yang berkualitas	100	%		RSUD MIJEN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD Mijen	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				167.061.595.904	
Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana prasarana RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dalam mendukung layanan kesehatan perorangan	Persentase tingkat penggunaan sarana prasarana sesuai standar	0	%		RSUD KRMT WONGSONEGORO
Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	Indeks kesehatan lingkungan	72	Angka		DINAS KESEHATAN
	Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat	100	%		
Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang sesuai standar di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	100	%		RSUD KRMT WONGSONEGORO
Meningkatnya ketersediaan obat PKD, obat Program, dan Vaksin serta perbekalan di fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi faskes dengan perbekalan sesuai standar	86	%		DINAS KESEHATAN
	Proporsi faskes dengan perbekalan sesuai standar	86	%		UPTD Instalasi Farmasi
Meningkatnya kinerja pelayanan Kesehatan ibu hamil dan balita	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7,80	Per 1.000 Kelahiran		DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu hamil KEK	14	%		
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	83	%		
	Prevalensi wasting balita	4,70	%		
Meningkatnya kualitas manajemen informasi kesehatan	Proporsi fasilitas layanan kesehatan yang terintegrasi SIKN	67,6	%		
Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen	84	Angka		
	Tingkat kepuasan pasien terhadap RSUD Mijen	79	%		
	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap penduduk Kota Semarang	3,38	%		RSUD MIJEN
Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap penduduk Kota Semarang	7	%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen	82	Angka		DINAS KESEHATAN
Meningkatnya penanganan kesehatan bagi lanjut usia	Persentase lanjut usia yang mandiri	77	%		
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	40	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Angka Incident Rate (IR) HIV	0,21	Per 1000 Penduduk		
	Treatment Success Rate (TSR)	90,5	%		
Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	85,5	%		
	Persentase fasyankes terakreditasi minimal paripurna	95	%		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				3.365.867.772	
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	26	%		DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				48.335.000	
Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	78	%		DINAS KESEHATAN
	Proporsi apotek, toko obat, dan usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar	83	%		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				559.566.250	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup	82	%		DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				615.378.499.956	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				117.218.282.454	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penyiapan Lahan	Persentase terlaksananya kegiatan penyiapan lahan	85,00	%		DINAS PEKERJAAN UMUM
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	100	%		
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penataan Ruang	87	%		DINAS PENATAAN RUANG
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penataan Ruang yang berkualitas	100	%		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				52.780.509.135	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob	98,95	%		DINAS PEKERJAAN UMUM
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	98,12	%		
Meningkatnya pemanfaatan ruang sungai	Persentase sungai yang termanfaatkan	100	%		
Tersedianya dokumen perencanaan teknis sumber daya air	Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan	100	%		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.009.120.000	
Meningkatnya kualitas akses air minum aman	Persentase rumah tangga terlayani air minum aman	48,66	%		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.044.717.000	
Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	3,32	%		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				96.959.492.865	
Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	61,17	%		DINAS PEKERJAAN UMUM
Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	61,77	%		UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	61,77	%		UPTD Peralatan dan Perbengkelan
Tersedianya dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase	Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan	100	%		DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				136.826.752.868	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN	Persentase BGN dalam kondisi baik	100	%		DINAS PENATAAN RUANG
Meningkatnya penyelenggaraan penataan dan perijinan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG	86	%		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				169.976.320	
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan	Persentase reklame yang berizin	85,5	%		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				202.000.010.354	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,64	%		DINAS PEKERJAAN UMUM
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
Meningkatnya ruang milik jalan yang dipelihara	Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara	67,88	%		DINAS PEKERJAAN UMUM
Tersedianya dokumen perencanaan teknis kebinamargaan	Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan	100	%		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				149.672.360	
Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	56	Rasio		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				4.219.966.600	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penerbitan KRK	92	%		DINAS PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				358.090.227.041	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.447.782.615	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	80	%		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas	100	%		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				6.206.508.037	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun	Persentase backlog perumahan	24,12	%		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				30.302.430.000	
Meningkatnya kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Kawasan yang Tertata	10	%		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Rumah Layak Huni	95,09	%		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				270.133.506.389	
Meningkatnya kualitas penyediaan pemakaman umum	Rasio ketersediaan tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	0,015	%		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	68	%		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	27,75	%		
Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	100	%		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				98.579.365.418	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				78.788.000.069	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan BPBD yang berkualitas	100	%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang berkualitas	100	%		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satpol PP	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Satpol PP	84	%		SATPOL PP
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Satpol PP yang berkualitas	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.647.088.367	
Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SOP dan layanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	81	%		SATPOL PP
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada	41	%		
Meningkatnya ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani	100	%		
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5	%		
Meningkatnya perlindungan masyarakat	Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi	100	%		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.511.008.328	
Meningkatnya pelayanan kedaruratan dan logistik bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	%		
Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	%		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				6.633.268.654	
Meningkatnya kesiapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	100	%		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	100	%		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaan aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama	100	%		
Meningkatnya kualitas pencegahan kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	100	%		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37.739.652.446	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.806.250.191	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Sosial	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial	100	%		DINAS SOSIAL

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas	100	%		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				6.578.223.108	
Meningkatnya kapasitas PSKS dalam mengatasi permasalahan sosial	Indeks Efektivitas Penguatan Pemberdayaan Sosial	100	%		DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				14.740.416	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase PPKS warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100	%		DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6.870.856.384	
Meningkatkan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%		DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				6.420.758.912	
Menurunnya kerentanan anak terlantar melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran	Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial	100	%		DINAS SOSIAL
Menurunnya kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran	Persentase warga miskin yang mendapat jaminan sosial	100	%		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.048.823.435	
Meningkatnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pasca bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100	%		DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				25.814.099.362	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.143.339.362	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja	67,5	%		DINAS TENAGA KERJA
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja yang berkualitas	100	%		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				50.000.000	
Meningkatnya keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90	%		DINAS TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				5.614.000.000	
Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	80	%		DINAS TENAGA KERJA
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase produktivitas tenaga kerja	100	%		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.090.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya lowongan pekerjaan yang berkualitas	Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas	78	%		DINAS TENAGA KERJA
Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal	Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	73	%		
Meningkatnya wirausaha baru	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	70	%		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				2.916.760.000	
Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	89,3	%		DINAS TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				22.556.869.179	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.619.329.406	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	100	%		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				3.676.903.492	
Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	68,63	%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				656.116.050	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	0,039	%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				795.783.500	
Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100	%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	4,52	%		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				150.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	50	%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1.253.404.731	
Meningkatnya akses pemenuhan hak-hak anak	Nilai Pemenuhan Hak Anak	66,34	Angka		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				405.332.000	
Menurunnya kekerasan terhadap anak	Nilai Perlindungan Khusus Anak	89,76	Angka		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				18.046.049.641	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.763.295.153	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	92,5	%		DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	100	%		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				23.776.126	
Meningkatnya optimalisasi sumber daya ekonomi lokal dalam menunjang kemandirian pangan	Persentase kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100	%		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				5.832.456.426	
Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat	Persentase Cakupan Distribusi Pangan	100	%		DINAS KETAHANAN PANGAN

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Angka ketersediaan energi	3.065	Kkal/Kapita/Hari		
Meningkatnya konsumsi pangan yang berkualitas	Angka konsumsi energi	1.910	Kkal/Kapita/Hari		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				281.021.937	
Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan	Persentase daerah tahan pangan	100	%		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				1.145.500.000	
Meningkatnya peredaran pangan yang aman, layak konsumsi dan bebas dari cemaran	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	93,6	%		DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9.100.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				130.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi	96	%		DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				5.200.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah	Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah	50	%		DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				3.770.000.000	
Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah	Persentase pemanfaatan aset tanah BMD	60	%		DINAS PENATAAN RUANG
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				173.312.104.502	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				46.627.038.380	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	90,25	%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas	100	%		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				787.590.665	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak kebijakan rencana dan program (KRP)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	Persentase		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				18.229.260.849	
Meningkatnya cakupan informasi lingkungan hidup	Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	100	%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya cakupan pelayanan laboratorium lingkungan	Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100	%		
Menurunnya kerusakan lahan	Luasan areal yang terkonservasi	22,23	%		
Menurunnya pencemaran udara	Kontribusi penurunan Emisi GRK Kumulatif (sektor Persampahan)	38.810,30	TON CO2 EQ		
	Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara	100	%		
Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berbasis pada data dan informasi yang valid	Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	100	%		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				864.220.119	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota	100	%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				258.050.000	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	72	Persentase		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				281.900.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	88,69	%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kinerja pengawasan lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	Persentase kegiatan dan atau usaha yang dilakukan pengawasan	100	%		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				2.891.707.525	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	75,25	Persentase		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				354.602.786	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34,52	Persentase		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				225.090.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup	100	%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				102.792.644.178	
Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Persentase pengelolaan sampah	99,11	%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Volume sampah masuk ke TPA per tahun	308.858,56	Ton		
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.288.430.577	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.618.651.507	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkualitas	100	%		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				80.289.810	
Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak	73	%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase perekaman KTP elektronik	99,4	%		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				96.327.360	
Meningkatnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98,45	%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	100	Persentase		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				383.392.480	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100	%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				109.769.420	
Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100	%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.122.004.065	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				339.288.155	
Meningkatnya kualitas proses administrasi kelurahan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	100	%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.782.715.910	
Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	100	%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				19.378.453.423	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.805.268.627	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas	100	%		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				992.138.950	
Terkendalnya angka kelahiran penduduk	Age specific fertility rate/ASFR (15-19 tahun)	7,2	Angka		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.083.615.299	
Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS)	Demand satisfied	77,6	%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Menurunnya kehamilan tidak direncanakan	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	14,3	%		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.497.430.547	
Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Indeks lansia berdaya	58,66	Angka		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	91,7	Angka		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				471.811.080.623	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				87.734.858.541	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan	100	%		DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas	100	%		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				384.076.222.082	
Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah pendudukRasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	5,65	Rasio		DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik fungsi kendaraan bermotor	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	1	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	72,99	%		
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan parkir on the street	Persentase pengelolaan parkir on the street	94	%		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				73.959.154.406	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.302.593.859	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas	100	%		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				7.350.604.761	
Meningkatnya penyebaran informasi publik melalui media komunikasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	88,01	%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Meningkatnya peran komunitas teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi	Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi	40	%		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				42.305.955.786	
Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	100	%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan e-government	Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)	100	%		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				29.513.748.434	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.635.791.755	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90	%		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas	100	%		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				522.543.070	
Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	55	%		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				304.866.930	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi sehat	44,1	%		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				423.651.260	
Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	41,35	%		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				2.012.252.430	
Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	59,74	%		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				5.454.088.600	
Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	67	%		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				5.160.554.389	
Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20	Aduan		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				20.065.310.228	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.620.238.059	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkualitas	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				838.075.300	
Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2,5	%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.299.710.926	
Meningkatnya eksposur potensi daerah kepada calon investor	Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan	75	%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				2.581.529.699	
Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Perekonomian	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%		
Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada perizinan dasar dan Bidang Pembangunan	Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%		
Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan penanaman modal dan perizinan yang ditindaklanjuti	95	%		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				458.075.300	
Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	100	%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				267.680.944	
Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100	%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
					TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				61.386.738.840	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.010.392.914	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	100	%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang berkualitas	100	%		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				3.215.000.000	
Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang terlibat dalam Kegiatan kepemudaan	1,29	%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri	Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda	100	%		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN				36.761.345.926	
Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah	36,9	%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Meningkatnya kejuaraan olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional	94,67	%		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				2.400.000.000	
Meningkatnya peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	7,1	%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.076.077.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				1.076.077.000	
Meningkatnya kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik	100	%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.848.256.520	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.848.256.520	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100	%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				63.536.861.720	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.187.278.021	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	94,98	%		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas	100	%		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				10.990.872.397	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	63,74	%		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				19.900.711.302	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	29,3	%		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				458.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	84,24	%		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan	43,12	%		
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	86,78	%		
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	4,5	%		
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				21.920.390.305	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.173.811.118	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas	100	%		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.542.522.477	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	84,83	Angka		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Meningkatnya layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang	0,07	Rasio		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				204.056.710	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100	%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.635.216.454	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				1.079.928.884	
Meningkatnya kesesuaian pengelolaan arsip	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip	80	%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Meningkatnya ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip	84	%		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				514.146.390	
Meningkatnya cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	64,5	%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Meningkatnya penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	70	%		
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				41.141.180	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	84	%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.567.308.100	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.769.479.900	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	100	%		DINAS PERIKANAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perikanan yang berkualitas	100	%		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.421.951.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.201,00	Ton		DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.754.552.200	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.120,00	Ton/Tahun		DINAS PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				498.537.000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan kawasan konservasi	0,5	Hektar		DINAS PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				2.122.788.000	
Meningkatnya preferensi masyarakat akan konsumsi pangan bergizi berbasis ikan	Angka Konsumsi Ikan	45,06	Kg/Kapita/Tahun		DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				15.851.217.263	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				8.603.928.273	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	8,5	%		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				3.783.736.250	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	8,5	%		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				3.463.552.740	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	35	%		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				45.254.320.604	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.365.275.537	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pertanian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian	100	%		DINAS PERTANIAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas	100	%		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				8.252.353.226	
Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	78	%		DINAS PERTANIAN
Meningkatnya produksi hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan	26.226,30	Ton		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya produksi peternakan	jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur	8.016,73	Ton		
	jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging	32.495,63	Ton		
	jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu	1.587,98	Liter		
	Jumlah produksi tanaman pangan	27.536,00	Ton		
Meningkatnya produksi tanaman pangan				9.303.503.766	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	22,7	%		DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				723.707.304	
Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5	%		DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				141.230.000	
Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada hortikultura dan perkebunan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan	100	%		DINAS PERTANIAN
Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada tanaman pangan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan	100	%		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.468.250.771	
Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian	2	%		DINAS PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				59.037.732.911	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				49.760.707.061	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan	90,25	%		DINAS PERDAGANGAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas	100	%		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				30.000.000	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100	%		DINAS PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				7.052.335.823	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	10	%		DINAS PERDAGANGAN
Meningkatnya pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan	100	%		
Meningkatnya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi yang dibina	100	%		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				233.961.027	
Meningkatnya iklim perdagangan yang stabil dan adil	Koefisien harga antar waktu	10	Koefisien		DINAS PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				667.679.000	
Meningkatnya akses produk lokal ke pasar internasional	Nilai ekspor non migas	1.561.552.042,00	US\$		DINAS PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				670.450.000	
Meningkatnya hak dan keamanan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	92,12	%		DINAS PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				622.600.000	
Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi di dalam negeri	100	%		DINAS PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				25.815.264.026	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.837.584.041	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perindustrian	90	%		DINAS PERINDUSTRIAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perindustrian yang berkualitas	100	%		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				8.941.136.985	
Meningkatnya pelaku IKM yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal	Persentase Pertambahan IKM	0,65	%		DINAS PERINDUSTRIAN
Meningkatnya sentra IKM sebagai pusat produksi dalam mendukung perekonomian lokal	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	87	%		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				1.930.274.576	
Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas	6,73	%		DINAS PERINDUSTRIAN

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				2.106.268.424	
Meningkatnya efisiensi integrasi sistem pengelolaan industri nasional untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan sektor industri lokal	Persentase IKM yang terdaftar di SIINas	2,32	%		DINAS PERINDUSTRIAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				292.539.776.574	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				171.466.636.534	
Meningkatnya kinerja keprotokolan, peliputan dan publikasi secara efektif	Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan, dan publikasi	89	Nilai		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	100	%		BAGIAN TATA USAHA
Meningkatnya kualitas layanan rumah tangga Sekretariat Daerah	Persentase kinerja Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah	100	%		BAGIAN RUMAH TANGGA
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas	100	%		BAGIAN KEUANGAN
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Sekretariat Daerah	Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas	100	%		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas	100	%		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi	42,27	Indeks		BAGIAN ORGANISASI
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				111.951.702.506	
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	100	%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Meningkatnya kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan peran pemerintah daerah pada kerangka otonomi	Tingkat efektivitas kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah	85	%		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	Persentase		BAGIAN HUKUM
Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				9.121.437.534	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya efektivitas pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	100	%		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	24,89	Angka		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	24,81	Angka		
	Nilai tingkat kematangan UKPBJ	40	Angka		
Meningkatnya ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	82	%		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada good governance	Persentase capaian target dividen BUMD	98,50	%		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	87,18	Angka		
Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR, serta kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR, serta kegiatan pengendalian perekonomian	100	%		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				122.696.639.475	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				70.916.132.291	
Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	95	%		SEKRETARIAT DPRD
Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	95	%		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				51.780.507.184	
Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	95,3	%		SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	81	%		
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan perundang-undangan	95,3	%		
5.01 - PERENCANAAN				24.119.996.482	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.202.758.287	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	96,83	%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	100	%		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.626.100.000	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	44,6	Angka		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				8.291.138.195	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	46,69	Angka		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	46,69	Angka		
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian & SDA	46,69	Angka		
5.02 - KEUANGAN				224.909.659.478	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				187.684.250.183	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	90,25	%		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	100	%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,50	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				17.610.132.810	
Meningkatnya kualitas dan ketepatan penyusunan APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100	%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan	100	%		
Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran	Persentase Realisasi Belanja	93,43	%		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.750.452.851	
Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan akuntabel	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				16.864.823.634	
Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	82	%		BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	69	%		
Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	96	%		
Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	1,12	%		
5.03 - KEPEGAWAIAN				24.006.708.642	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.768.082.390	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas	100	%		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100	%		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.238.626.252	
Meningkatnya kinerja ASN yang berkualitas	Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	95	%		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Meningkatnya kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	95	Persentase		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan jabatan	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	95,5	Persentase		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.727.354.887	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.727.354.887	
Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Fungsional	55	%		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Persentase ASN yang memiliki hasil diklat dengan kriteria berkualitas	95	%		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.607.425.987	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.611.857.626	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	100	%		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				4.995.568.361	
Meningkatnya penyelenggaraan inovasi daerah	Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	100	%		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	50	%		
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				31.646.662.305	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.344.236.548	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat	100	%		INSPEKTORAT
	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat yang berkualitas	100	%		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.905.673.737	
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP lainnya, dan BPK yang ditindaklanjuti	88,2	%		INSPEKTORAT
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	88,2	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	88,2	%		
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	88,2	%		
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	88,2	%		
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	88,2	%		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.396.752.020	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	100	%		INSPEKTORAT
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	100	%		
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	100	%		
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	100	%		
Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	100	%		
7.01 - KECAMATAN				964.154.744.136	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				358.007.955.140	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas	100	%		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	96,67	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	100	%		KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang berkualitas	100	%		KECAMATAN SEMARANG BARAT
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	96,67	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang berkualitas	100	%		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas	100	%		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunung Pati	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gunung Pati yang berkualitas	100	%		KECAMATAN GUNUNG PATI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunung Pati	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	100	%		KECAMATAN TUGU
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tugu yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	96,33	%		KECAMATAN MIJEN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Mijen yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Genuk yang berkualitas	100	%		KECAMATAN GENUK
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang berkualitas	100	%		KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	97	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang	100	%		KECAMATAN TEMBALANG
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	96,67	%		KECAMATAN CANDISARI
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	100	%		KECAMATAN BANYUMANIK
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Banyumanik yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	96,67	%		KECAMATAN NGALIYAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gayamsari yang berkualitas	100	%		KECAMATAN GAYAMSARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	92	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Pedurungan yang berkualitas	100	%		KECAMATAN PEDURUNGAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	100	%		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				35.334.163.379	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BULUSTALAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BARUSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN RANDUSARI

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN MUGASSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PLEBURAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN WONODRI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PETERONGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN LAMPER LOR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN LAMPER KIDUL
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN LAMPER TENGAH
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN SEMARANG UTARA
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PLOMBOKAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BULU LOR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PURWOSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KUNINGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PANGGUNG LOR

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BANDARHARJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TANJUNG MAS
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN DADAPSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN SEMARANG BARAT
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN MANYARAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KRAPYAK
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TAMBAKHARJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KALIBANTENG KULON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GISIKDRONO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BONGSARI

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BOJONGSALAMAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SALAMAN MLOYO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN CABEAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KARANGAYU
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KROBOKAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TAWANGSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TAWANGMAS
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KEMBANGARUM
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN KEMIJEN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN REJOMULYO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN MLATIBARU
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN MLATIHARJO

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN KEBONAGUNG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN BUGANGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN SARIREJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN REJOSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN KARANGTURI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KARANGTEMPEL
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN MIROTO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BRUMBUNGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN JAGALAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KRANGGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GABAHAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KEMBANGSARI

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SEKAYU
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PANDANSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BANGUNHARJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KAUMAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PURWODINATAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KARANGKIDUL
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PEKUNDEN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PENDRIKAN LOR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN GUNUNG PATI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SUKOREJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SADENG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KANDRI

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SEKARAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PONGANGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KALISEGORO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN JATIREJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN NGIJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PATEMON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN NONGKOSAWIT
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN CEPOKO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GUNUNGPATI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN MANGUNSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PAKINTELAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PLALANGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SUMURREJO

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN TUGU
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN JERAKAH
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TUGUREJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KARANGANYAR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN RANDUGARUT
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN MANGKANG WETAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN MANGUNHARJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN MANGKANG KULON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN MIJEN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN CANGKIRAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN BUBAKAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN KARANGMALANG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN POLAMAN

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN PURWOSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN TAMBANGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN WONOLOPO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN MIJEN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN JATIBARANG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN KEDUNGPALE
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN NGADIRGO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN WONOPLUMBON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN JATISARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		KELURAHAN PESANTREN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN GENUK
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SEMBUNGHARJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KUDU

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KARANGROTO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GENUKSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BANJARDOWO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GEBANGSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TRIMULYO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PENGGARON LOR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BANGETAYU KULON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BANGETAYU WETAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TERBOYO KULON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TERBOYO WETAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BENDAN DUWUR

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BENDAN NGISOR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KARANGREJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN LEMPONGSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PETOMPON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SAMPANGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BENDUNGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN TEMBALANG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN METESEH
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN MANGUNHARJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN TANDANG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN SENDANGGUWO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN JANGLI

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN KEDUNGmundu
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN TEMBALANG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN SENDANGMulyo
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN BULUSAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN KRAMAS
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN ROWOSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		KELURAHAN SAMBIROTO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN CANDISARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN JATINGALEH
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN WONOTINGAL
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TEGALSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KALIWIRU
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN CANDI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN JOMBLANG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN BANYUMANIK
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BANYUMANIK
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GEDAWANG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN JABUNGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN NGESREP
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PADANGSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PEDALANGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PUDAKPAYUNG
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SRONDOL KULON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SRONDOL WETAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SUMURBOTO

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TINJOMOYO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN NGALIYAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BRINGIN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KALIPANCUR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN BAMBANKEREP
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN NGALIYAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN WATES
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TAMBAKAJI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN WONOSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PODOREJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PURWOYOSO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GONDORIYO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN GAYAMSARI

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TAMBAKREJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KALIGAWA
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SAWAH BESAR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SIWALAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN SAMBIREJO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PANDEAN LAMPER
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GAYAMSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KECAMATAN PEDURUNGAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TLOGOSARI KULON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN TLOGOMULYO
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN KALICARI

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PLAMONGANSARI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN GEMAH
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PALEBON
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				567.024.998.837	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	95	%		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN BULUSTALAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN BARUSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN RANDUSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN MUGASSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN PLEBURAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN WONODRI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN PETERONGAN

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN LAMPER LOR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN LAMPER KIDUL
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KELURAHAN LAMPER TENGAH
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KECAMATAN SEMARANG UTARA
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KELURAHAN PLOMBOKAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KELURAHAN BULU LOR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KELURAHAN PURWOSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KELURAHAN KUNINGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KELURAHAN PANGGUNG LOR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KELURAHAN BANDARHARJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KELURAHAN TANJUNG MAS
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		KELURAHAN DADAPSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KECAMATAN SEMARANG BARAT
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN MANYARAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN KRAPYAK
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN TAMBAKHARJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN KALIBANTENG KULON

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN GISIKDRONO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN BONGSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN BOJONGSALAMAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN SALAMAN MLOYO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN CABEAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN KARANGAYU
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN KROBOKAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN TAWANGSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN TAWANGMAS
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		KELURAHAN KEMBANGARUM
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100	%		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN KEMIJEN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN REJOMULYO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN MLATIBARU
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN MLATIHARJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN KEBONAGUNG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN BUGANGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN SARIREJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN REJOSARI

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN KARANGTURI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		KELURAHAN KARANGTEMPEL
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN MIROTO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN BRUMBUNGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN JAGALAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN KRANGGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN GABAHAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN KEMBANGSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN SEKAYU
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN PANDANSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN BANGUNHARJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN KAUMAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN PURWODINATAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN KARANGKIDUL
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN PEKUNDEN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KELURAHAN PENDRIKAN LOR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KECAMATAN GUNUNG PATI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN SUKOREJO

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN SADENG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN KANDRI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN SEKARAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN PONGANGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN KALISEGORO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN JATIREJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN NGIJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN PATEMON
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN NONGKOSAWIT
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN CEPOKO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN GUNUNGPATI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN MANGUNSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN PAKINTELAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN PLALANGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		KELURAHAN SUMURREJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		KECAMATAN TUGU
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		KELURAHAN JERAKAH
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		KELURAHAN TUGUREJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		KELURAHAN KARANGANYAR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		KELURAHAN RANDUGARUT

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		KELURAHAN MANGKANG WETAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		KELURAHAN MANGUNHARJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		KELURAHAN MANGKANG KULON
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100	%		KECAMATAN MIJEN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN CANGKIRAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN BUBAKAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN KARANGMALANG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN POLAMAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN PURWOSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN TAMBANGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN WONOLOPO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN MIJEN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN JATIBARANG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN KEDUNGPANE
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN NGADIRGO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN WONOPLUMBON
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN JATISARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		KELURAHAN PESANTREN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KECAMATAN GENUK
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN SEMBUNGHARJO

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN KUDU
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN KARANGROTO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN GENUKSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN BANJARDOWO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN GEBANGSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN TRIMULYO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN PENGGARON LOR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN BANGETAYU KULON
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN BANGETAYU WETAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN TERBOYO KULON
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		KELURAHAN TERBOYO WETAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KELURAHAN BENDAN DUWUR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KELURAHAN BENDAN NGISOR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KELURAHAN KARANGREJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KELURAHAN LEMPONGSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KELURAHAN PETOMPON
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KELURAHAN SAMPANGAN

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KELURAHAN BENDUNGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KECAMATAN TEMBALANG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN METESEH
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN MANGUNHARJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN TANDANG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN SENDANGGUWO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN JANGLI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN KEDUNGmundu
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN TEMBALANG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN SENDANGMulyo
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN BULUSAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN KRAMAS
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN ROWOSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		KELURAHAN SAMBIROTO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		KECAMATAN CANDISARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		KELURAHAN JATINGALEH
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		KELURAHAN WONOTINGAL
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		KELURAHAN TEGALSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		KELURAHAN KALIWIRU

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		KELURAHAN CANDI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		KELURAHAN JOMBLANG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KECAMATAN BANYUMANIK
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN BANYUMANIK
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN GEDAWANG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN JABUNGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN NGESREP
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN PADANGSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN PEDALANGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN PUDAKPAYUNG
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN SRONDOL KULON
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN SRONDOL WETAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN SUMURBOTO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		KELURAHAN TINJOMOYO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KECAMATAN NGALIYAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN BRINGIN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN KALIPANCUR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN BAMBANKEREP

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN NGALIYAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN WATES
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN TAMBAKAJI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN WONOSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN PODOREJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN PURWOYOSO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		KELURAHAN GONDORIYO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		KECAMATAN GAYAMSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		KELURAHAN TAMBAKREJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		KELURAHAN KALIGAWA
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		KELURAHAN SAWAH BESAR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		KELURAHAN SIWALAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		KELURAHAN SAMBIREJO
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		KELURAHAN PANDEAN LAMPER
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		KELURAHAN GAYAMSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KECAMATAN PEDURUNGAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN TLOGOSARI KULON
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN TLOGOMULYO

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN KALICARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN PLAMONGANSARI
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN GEMAH
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN PALEBON
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.187.705.400	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Selatan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan	100	%		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Utara	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Utara	100	%		KECAMATAN SEMARANG UTARA
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Barat	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Barat	100	%		KECAMATAN SEMARANG BARAT
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Timur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur	100	%		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah	100	%		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gunung Pati	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati	100	%		KECAMATAN GUNUNG PATI
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tugu	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu	100	%		KECAMATAN TUGU

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Mijen	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mijen	100	%		KECAMATAN MIJEN
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Genuk	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Genuk	100	%		KECAMATAN GENUK
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gajahmungkur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	100	%		KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tembalang	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	100	%		KECAMATAN TEMBALANG
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Candisari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	100	%		KECAMATAN CANDISARI
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Banyumanik	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik	100	%		KECAMATAN BANYUMANIK
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Ngaliyan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngaliyan	100	%		KECAMATAN NGALIYAN
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gayamsari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gayamsari	100	%		KECAMATAN GAYAMSARI
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Pedurungan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan	100	%		KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1.599.921.380	
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Selatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan	82	%		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Utara	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Utara	82	%		KECAMATAN SEMARANG UTARA
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Barat	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Barat	82	%		KECAMATAN SEMARANG BARAT

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Timur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Timur	82	%		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Tengah	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	82	%		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gunung Pati	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati	82	%		KECAMATAN GUNUNG PATI
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tugu	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu	82	%		KECAMATAN TUGU
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Mijen	82	%		KECAMATAN MIJEN
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Genuk	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk	82	%		KECAMATAN GENUK
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gajahmungkur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	82	%		KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tembalang	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	82	%		KECAMATAN TEMBALANG
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Candisari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	82	%		KECAMATAN CANDISARI
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan Banyumanik	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik	82	%		KECAMATAN BANYUMANIK
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Ngaliyan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Ngaliyan	82	%		KECAMATAN NGALIYAN
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gayamsari	82	%		KECAMATAN GAYAMSARI
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Pedurungan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	82	%		KECAMATAN PEDURUNGAN
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				31.221.065.018	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.727.673.518	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkualitas	100	%		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				3.454.146.100	
Meningkatnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila	75,25	Angka		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				10.291.662.280	
Meningkatnya kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	60,25	Angka		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				2.427.000.000	
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah	Indeks Kinerja Ormas	65,3	Angka		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				3.422.499.000	
Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah	Indeks Harmoni Indonesia	6,1	Angka		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.898.084.120	
Meningkatnya kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri	Indeks Kewaspadaan Nasional	77	Angka		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sebagai tindak lanjut dari penyajian rencana program dan pendanaan berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program, selanjutnya disajikan rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pendanaan (pagu indikatif) pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih operasional mengenai rencana pelaksanaan pembangunan daerah hingga tingkat subkegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Rincian tersebut disajikan pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14
Rincian Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan (Pagu Indikatif) RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				875.408.728.015	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				759.892.227.315	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan	100	%		1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	100	%		
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				993.865.769	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.361.829	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen		
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.190.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.129.400	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.190.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				6.129.400	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.366.240	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.498.900	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan		
1.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				700.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4	Dokumen		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				643.796.662.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				639.805.785.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.667	Orang/bulan		
1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.759.252.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				123.625.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
1.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				8.000.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				642.100.000	
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				642.100.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				400.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pendidikan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pendidikan	90,50	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen		
1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				300.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.925.000.000	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan	100	%		
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				155.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				225.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				275.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				275.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				125.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				970.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
1.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				200.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen		
1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				700.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.750.000.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	100	%		
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				450.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit		
1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.300.000.000	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.074.564.546	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.562.478.558	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan		
1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				475.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				86.037.085.988	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.310.035.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan sesuai ketentuan	100	%		
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit		
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				910.035.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127	Unit		
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				650.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				108.157.773.240	
Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	%		1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				11.819.121.120	PENDIDIKAN
Meningkatnya Persentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD	ersentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD	80	%		
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				2.740.800.000	
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.259	Peserta Didik		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				310.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.100	Orang		
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				425.000.000	
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750	Peserta didik		
Meningkatnya Persentase PAUD yang menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	Persentase PAUD yang Menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	85	%		
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen		
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				235.916.000	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4	Dokumen		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.375.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250	Orang		
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				105.000.000	
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.457	Satuan Pendidika n		
Meningkatnya Persentase PAUD yang Terakreditasi A	Persentase PAUD yang Terakreditasi A	10,42	%		
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				1.040.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	Unit		
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				455.800.000	
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5	Paket		
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD				411.800.000	
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	4	Paket		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				242.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	260	Satuan Pendidika n		
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				200.000.000	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	Ruang		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.250.000.000	
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang		
1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				400.000.000	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	Unit		
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				70.000.000	
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	Paket		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				1.070.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				190.000.000	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2	Paket		
1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				200.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	Ruang		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				545.776.000	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang		
Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.055.000.000	
Meningkatnya Persentase Angka Kelulusan Peserta Didik PNF	Angka Kelulusan Peserta Didik PNF	100	%		
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				30.000.000	
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300	Peserta Didik		
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				48.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	74	Orang		
1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				47.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200	Peserta Didik		
Meningkatnya Persentase Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81,3	%		
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				42.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen		
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				45.000.000	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2	Dokumen		
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				250.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	Orang		
Meningkatnya Persentase Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80,4	%		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				18.000.000	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3.600	Peserta Didik		
Meningkatkan Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	51,43	%		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				155.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40	Satuan Pendidikan		
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				50.000.000	
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	Paket		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				50.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit		
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				200.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1	unit		
Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	%		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				48.541.436.900	
Tercapainya Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar	100	%		
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.021.250.000	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6.000	Peserta Didik		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				325.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	513	Orang		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				18.016.250.000	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17,190	Peserta Didik		
Meningkatnya Persentase Literasi di Sekolah Dasar	Literasi Sekolah Dasar	87,5	%		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				40.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				150.000.000	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4	Dokumen		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				258.700.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	550	Orang		
Meningkatnya Persentase Numerasi di Sekolah Dasar	Numerasi Sekolah Dasar	84,1	%		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				460.700.000	
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	513	Satuan Pendidikan		
Meningkatnya Persentase Sekolah Dasar Terakreditasi A	Persentase Sekolah Dasar yang Terakreditasi A	67,06	%		
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				231.500.000	
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Ruang		
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.326.500.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15	Unit		
1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				102.000.000	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Ruang		
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				368.000.000	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2	Paket		
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				459.549.000	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	Paket		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				800.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	513	Satuan Pendidika n		
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				428.925.000	
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4.500	Paket		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru bertambah				1.292.000.000	
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	Ruang		
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.259.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	Unit		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				16.675.000.000	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30	Ruang		
Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	%		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				46.742.215.220	
Tercapainya Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100	%		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				18.302.695.000	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11,138	Peserta Didik		
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.250.000.000	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2.500	Peserta Didik		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				277.290.000	
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	199	Orang		
Meningkatnya Persentase Literasi di Sekolah Menengah Pertama	Literasi Sekolah Menengah Pertama	91,8	%		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				461.745.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen		
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				175.000.000	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6	Dokumen		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				64.400.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	225	Orang		
Meningkatnya Persentase Numerasi di Sekolah Menengah Pertama	Numerasi Sekolah Menengah Pertama	89,1	%		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				250.000.000	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	199	Satuan Pendidika n		
Meningkatnya Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	69,95	%		
1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				400.000.000	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Unit		
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				3.150.000.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	Unit		
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				14.733.150.000	
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60	Ruang		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.258.450.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Unit		
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				1.050.000.000	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5	Paket		
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				2.900.000.000	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7	Paket		
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				50.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	230	Satuan Pendidika n		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	86,97	%		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				48.541.436.900	
Meningkatnya Persentase Guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,6	%		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				3.327.062.900	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.750	Orang		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1.000.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.600	Orang		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				46.742.215.220	
Meningkatnya Persentase Guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru sekolah menengah pertama yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,15	%		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2.079.485.220	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4,792	Orang		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				340.000.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	925	Orang		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				11.819.121.120	
Meningkatnya Persentase Guru PAUD yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	66,15	%		
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				265.029.120	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2,292	Orang		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				275.000.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250	Orang		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.055.000.000	
Meningkatnya persentase guru pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru pendidikan nonformal/kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100	%		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				120.000.000	
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	55	Orang		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				550.053.400	
Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%		1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				287.000.000	
Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	85	%		
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				115.000.000	
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4	Dokumen		
1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				50.000.000	
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4.500	Buku		
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				122.000.000	
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6	Dokumen		
Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%		
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				263.053.400	
Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan di Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	85	%		
1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				100.000.000	
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100	Orang		
Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100	%		
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				263.053.400	
Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	90	%		
1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				81.526.700	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4	Dokumen		
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				81.526.700	
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4	Dokumen		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				6.348.536.560	
Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar	72,13	%		1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Rasio guru terhadap murid	01:18	Rasio		
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6.348.536.560	
Meningkatnya Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	%		
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				738.836.560	
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18	Dokumen		
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.609.700.000	
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7	Laporan		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				460.137.500	
Meningkatnya kepatuhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin	100	%		1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				360.137.500	
Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%		
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				150.000.000	
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15	Dokumen		
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				125.000.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15	Dokumen		
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				85.137.500	
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen		
Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan Sekolah Dasar terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	100	%		
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100.000.000	
Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%		
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen		
Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin	100	%		
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100.000.000	
Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%		
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000	
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4	Dokumen		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				944.450.005.456	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				773.414.640.530	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis	90	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0043 - RSUD KRMT
	Persentase ketercapai Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	90	%		WONGSONEGOR O
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				329.687.441.763	
Meningkatnya pelayanan medis dan penunjang medis yang berkualitas	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	90	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				329.687.441.763	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Meningkatnya pelayanan keperawatan, kebidanan dan penunjang non medis yang berkualitas	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis	90	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				59.346.620	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				954.300	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.674.800	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.299.900	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.194.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.576.700	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.401.300	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				324.918.221.300	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				324.280.228.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.750	Orang/bulan		
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				620.620.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.514.300	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.791.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				6.067.900	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.200.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan kepegawaian Dinas Kesehatan yang memenuhi prosedur dan sesuai standar	1	%		
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				17.200.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.082.989.052	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				79.147.280	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				172.687.940	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11	Paket		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				244.410.091	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				65.267.233	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				133.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.863.612.283	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200	Laporan		
1.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				519.364.225	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				395.828.595	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				395.828.595	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.038.553.108	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11	Laporan		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.815.643.496	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.221.909.612	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.316.494.139	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan sesuai ketentuan	100	%		
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				211.760.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.459.909.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				598.264.178	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.992.983.161	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.577.800	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - PUSKESMAS PONCOL
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.047.478.897	
Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.047.478.897	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0003 - PUSKESMAS MIROTO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.663.804.332	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.663.804.332	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0004 - PUSKESMAS BANDARHARJO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.857.784.612	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.857.784.612	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0005 - PUSKESMAS BULULOR
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.205.084.205	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.205.084.205	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0006 - PUSKESMAS HALMAHERA
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.799.293.982	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.799.293.982	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0007 - PUSKESMAS BUGANGAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.680.126.102	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.680.126.102	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0008 - PUSKESMAS KARANGDORO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.210.411.030	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.210.411.030	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0009 - PUSKESMAS PANDANARAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.675.523.273	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.675.523.273	1.02.0.00.0.00.0 1.0010 - PUSKESMAS LAMPER TENGAH
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.712.276.328	1.02.0.00.0.00.0 1.0011 - PUSKESMAS KARANG AYU
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.712.276.328	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0012 - PUSKESMAS LEBDOSARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.446.525.039	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.446.525.039	1.02.0.00.0.00.0 1.0013 - PUSKESMAS MANYARAN
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.884.837.100	1.02.0.00.0.00.0 1.0014 - PUSKESMAS KROBOKAN
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.884.837.100	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.041.147.836	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.041.147.836	1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.660.455.960	1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.660.455.960	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.426.285.497	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.426.285.497	1.02.0.00.0.00.0 1.0015 - PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0016 - PUSKESMAS GAYAMSARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.361.141.889	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.361.141.889	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0017 - PUSKESMAS CANDILAMA
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.871.629.384	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.871.629.384	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0018 - PUSKESMAS KAGOK
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.756.966.750	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.756.966.750	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0019 - PUSKESMAS PENGANDAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.209.492.370	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.209.492.370	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0020 - PUSKESMAS GENUK
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.187.527.528	
Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.187.527.528	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0021 - PUSKESMAS BANGETAYU
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				4.646.557.155	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				4.646.557.155	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0022 - PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.236.350.000	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.236.350.000	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0023 - PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.787.143.277	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.787.143.277	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0024 - PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				4.766.311.722	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				4.766.311.722	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0025 - PUSKESMAS ROWOSARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.891.583.340	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.891.583.340	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0026 - PUSKESMAS NGESREP
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.233.773.644	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.233.773.644	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0027 - PUSKESMAS SRONDOL
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.297.999.378	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.297.999.378	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0028 - PUSKESMAS PADANGSARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.299.463.726	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.299.463.726	1.02.0.00.0.00.0 1.0029 - PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.814.835.111	1.02.0.00.0.00.0 1.0030 - PUSKESMAS GUNUNGPATI
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.814.835.111	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0031 - PUSKESMAS MIJEN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.945.204.169	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.945.204.169	1.02.0.00.0.00.0 1.0032 - PUSKESMAS KARANGMALANG
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.081.555.873	1.02.0.00.0.00.0 1.0033 - PUSKESMAS TAMBAKAJI
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.081.555.873	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0034 - PUSKESMAS PURWOYOSO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.004.068.827	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.004.068.827	1.02.0.00.0.00.0 1.0034 - PUSKESMAS PURWOYOSO
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.673.822.890	1.02.0.00.0.00.0 1.0034 - PUSKESMAS PURWOYOSO
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.673.822.890	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0034 - PUSKESMAS PURWOYOSO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.667.841.956	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.667.841.956	1.02.0.00.0.00.0 1.0034 - PUSKESMAS PURWOYOSO
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0035 - PUSKESMAS NGALIYAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				4.097.466.560	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				4.097.466.560	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0036 - PUSKESMAS MANGKANG
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.822.831.323	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.822.831.323	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0037 - PUSKESMAS KARANG ANYAR
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.452.702.599	
Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.452.702.599	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0038 - PUSKESMAS SEKARAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.032.113.011	
Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.032.113.011	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0040 - UPTD Laboratorium Kesehatan
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.001.649.278	
Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.001.649.278	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0041 - PUSKESMAS PLAMONGAN SARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.249.500.000	
Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.249.500.000	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0042 - PUSKESMAS BULUSAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.189.000.000	
Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	Persentase unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.189.000.000	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0044 - PUSKESMAS KALIGAWA
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0043 - RSUD KRMT WONGSONEGORO
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD KRMT Wongsonegoro	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				329.687.441.763	
Terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase temuan keuangan yang berhasil ditindaklanjuti	100	%		
	Rasio Kas RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	80	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				329.687.441.763	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pelayanan dan pemasaran RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase kinerja pemasaran dan informasi	100	%		
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Nilai layanan kepegawaian RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	100	%		
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	100	%		
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	100	%		
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor RSUD K.R.M.T Wongsonegoro sesuai ketentuan	100	%		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Mijen yang berkualitas	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0045 - RSUD MIJEN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD Mijen	100	%		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				5.000.000.000	
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD Mijen	100	%		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				5.000.000.000	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				167.061.595.904	
Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana prasarana RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dalam mendukung layanan kesehatan perorangan	Persentase tingkat penggunaan sarana prasarana sesuai standar	0	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0043 - RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.532.865.000	
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro	Persentase kesesuaian sarana prasarana yang digunakan dengan standar pelayanan kesehatan	0	%		
Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	Indeks kesehatan lingkungan	72	Angka		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat	100	%		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				137.069.416.857	
Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kualitas air minum memenuhi syarat	86	%		
	Jumlah KLB kercaunan pangan	6	jumlah		
	Persentase kualitas udara di tempat fasilitas umum dan permukiman	65	%		
	Persentase kelurahan dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	100	%		
	Persentase kelurahan dengan KK berperilaku cuci tangan pakai sabun	80	%		
	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan air minum dan pangan	80	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan sampah	82	%		
	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan limbah cair	50	%		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				379.597.524	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				210.602.300	
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9	Dokumen		
Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang sesuai standar di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	100	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0043 - RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.532.865.000	
Terwujudnya Fasilitas pelayanan keschatan yang berkualitas	Persentase pemenuhan alat kesehatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro untuk upaya kesehatan perorangan sesuai rencana pengadaannya	100	%		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.532.865.000	
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15	Unit		
Meningkatnya ketersediaan obat PKD, obat Program, dan Vaksin serta perbekalan di fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi faskes dengan perbekalan sesuai standar	86	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Proporsi faskes dengan perbekalan sesuai standar	86	%		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				845.000.000	
Meningkatnya kegiatan operasioanal Instalasi Farmasi sesuai standar	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				845.000.000	
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Dokumen		
Meningkatnya kinerja pelayanan Kesehatan ibu hamil dan balita	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7,80	Per 1.000 Kelahiran		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu hamil KEK	14	%		
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	83	%		
	Prevalensi wasting balita	4,70	%		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				137.069.416.857	
Tercapainya cakupan layanan kesehatan ibu dan anak	Persentase ANC 6 kali	100	%		
	Jumlah kematian bayi	127	jumlah		
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				92.200.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.293	Orang		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				37.700.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.536	Orang		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				664.145.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.364	Orang		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				182.225.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66.409	Orang		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				113.355.244	
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	Dokumen		
Tercapainya cakupan intervensi gizi pada balita dan ibu hamil dengan KEK	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan tata laksana	100	%		
	Persentase Ibu hamil KEK atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100	%		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				143.250.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224.693	Orang		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6.457.071.292	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen		
Meningkatnya kualitas manajemen informasi kesehatan	Proporsi fasilitas layanan kesehatan yang terintegrasi SIKN	67,6	%		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				1.183.119.485	
Meningkatnya integrasi data kesehatan daerah melalui sistem informasi yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	60	%		
	Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN	63,08	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1.183.119.485	
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				385.905.444	
Terlaksananya pengawasan terhadap Rumah Sakit Kelas C dan D	Persentase RS Kelas C dan D yang telah diawasi	100	%		
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				13.200.000	
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100	Unit		
Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen	84	Angka		
	Tingkat kepuasan pasien terhadap RSUD Mijen	79	%		
	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap penduduk Kota Semarang	3,38	%		
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				20.546.455.418	
Tersedianya sarana, prasarana, obat, dan bahan penunjang pelayanan rumah sakit	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan bahan penunjang di RSUD Mijen	100	%		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				6.960.369.418	
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6	Unit		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				137.069.416.857	
Tercapainya mutu pelayanan rumah sakit sesuai indikator standar pelayanan minimal	Persentase capaian SPM di Rumah Sakit Mijen	100	%		
Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap penduduk Kota Semarang	7	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0045 - RSUD MIJEN
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen	82	Angka		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.498.833.700	
Tercapainya mutu pelayanan rumah sakit sesuai indikator standar pelayanan minimal	Persentase capaian SPM di Rumah Sakit Mijen	100	%		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5.498.833.700	
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Dokumen		
Meningkatnya penanganan kesehatan bagi lanjut usia	Persentase lanjut usia yang mandiri	77	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				137.069.416.857	
Terselenggaranya pemantauan status kesehatan dan faktor risiko PTM pada lansia	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	25	%		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				495.039.143	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204.686	Orang		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				156.775.000	
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	Dokumen		
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	40	%		
	Angka Incident Rate (IR) HIV	0,21	Per 1000 Penduduk		
	Treatment Success Rate (TSR)	90,5	%		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaxten/Kota				137.069.416.857	
Terselenggaranya upaya deteksi dini dan akses pengobatan penyakit menular sesuai target	Jumlah ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	117	orang		
	Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	100	%		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				74.414.999	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	27.274	Orang		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				133.475.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29.783	Orang		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				47.000.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.897	Orang		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				12.350.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.906	Orang		
Terselenggaranya pemetaan wilayah prioritas intervensi untuk pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	Angka Incident Rate (IR) DBD	>=16	Angka		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	AP Malaria	<1	Angka		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				886.350.000	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	Dokumen		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				9.050.000	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45	Orang		
Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase hipertensi dalam pengendalian	25	%		
	Persentase diabetes melitus dalam pengendalian	18	%		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	85	%		
	Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun	7	%		
	Prevalensi obesitas	25	%		
	Persentase depresi yang mendapatkan layanan kesehatan	1,5	%		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				31.300.000	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.116.696	Orang		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				13.100.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289.923	Orang		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				15.800.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.965	Orang		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				6.850.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4.249	Orang		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				28.041.500	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				141.747.120	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				33.450.000	
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Dokumen		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				6.300.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12	Orang		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				600.000	
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	Laporan		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				51.900.000	
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12	Dokumen		
Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	85,5	%		
	Persentase fasyankes terakreditasi minimal paripurna	95	%		
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				20.546.455.418	
Terpenuhinya penyediaan fasilitas pelayan kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat SPA sesuai standar	100	%		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				6.584.800.000	
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2	Unit		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				100.000.000	
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	Unit		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				6.960.369.418	
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	28	Unit		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				137.069.416.857	
Tercapainya respons time pelayanan gawat darurat sesuai standar	Persentase respon time pelayanan gawat darurat sesuai standar	100	%		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				3.636.498.132	
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit		
Terjaminnya mutu pelayanan UKM dan UKP	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	95	%		
Tercapainya cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase kenaikan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	0,5	%		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				122.805.672.403	
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				203.557.200	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	266	Unit		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				385.905.444	
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	100	%		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				24.862.500	
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2	Dokumen		
Meningkatnya fasyankes yang mencapai target indikator nasional mutu pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas yang mencapai target indikator nasional mutu	100	%		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				347.842.944	
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	37	Unit		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				3.365.867.772	
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	26	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				3.120.017.772	
Tercapainya pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kompetensi dan kebutuhan layanan UKP dan UKM	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	21	%		
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100	%		
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5.300.000	
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				3.007.200.000	
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	39	Orang		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				107.517.772	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				245.850.000	
Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Jumlah workshop/seminar/bimtek peningkatan mutu yang dilaksanakan	6	jumlah		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				245.850.000	
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30	Orang		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				48.335.000	
Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	78	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Proporsi apotek, toko obat, dan usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar	83	%		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				44.921.920	
Meningkatnya jumlah IRT Pangan yang memperoleh SPP-IRT dan memenuhi komitmen keamanan pangan sesuai standar yang berlaku	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	100	%		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				44.921.920	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2.196	Dokumen		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				3.413.080	
Meningkatnya kualitas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan post market pada produk makanan minuman IRTP	Persentase temuan hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	%		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				3.413.080	
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12	Unit		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				559.566.250	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup	82	%		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				98.425.000	
Terjalinnnya kemitraan lintas sektor dalam mendukung program kesehatan masyarakat	Persentase kemitraan/kerja sama lintas sektor dan atau mitra non-pemerintah yang terjalin dan aktif	82	%		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				98.425.000	
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				152.666.250	
Terlaksananya kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di tingkat daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye GERMAS	12	Jumlah		
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				152.666.250	
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12	Dokumen		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				308.475.000	
Meningkatnya jumlah Posyandu yang aktif memberikan layanan kesehatan sesuai siklus hidup	Cakupan posyandu aktif siklus hidup yang aktif	100	%		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				308.475.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	Dokumen		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				615.378.499.956	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				117.218.282.454	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penyiapan Lahan	Persentase terlaksananya kegiatan penyiapan lahan	85,00	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.086.111.010	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	Persentase ketersediaan lahan untuk peningkatan infrastruktur	100	%		
1.03.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				5.700.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,01	Ha		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	100	%		
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang berkualitas	100	%		
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				82.745.620	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen		
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				50.159.035.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				49.253.915.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400	Orang/bulan		
1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				894.120.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.000.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.500.000	
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.500.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				109.997.600	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	100	%		
1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.997.600	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen		
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.653.505.486	
Terpenuhiya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pekerjaan Umum	100	%		
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				303.666.633	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				254.550.113	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket		
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				250.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.931.320	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1	Dokumen		
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				179.912.720	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				398.914.778	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen		
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.086.529.922	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				849.446.852	
Terpenuhiya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				359.577.139	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Unit		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				489.869.713	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.946.018.631	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan Masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.306.954.652	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				16.619.063.980	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.086.111.010	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	Persentase ketersediaan lahan untuk peningkatan infrastruktur	100	%		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.876.467.720	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75	Unit		
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				75.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200	Unit		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				434.643.290	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	350	Unit		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penataan Ruang	87	%		1.03.2.10.0.00.0 2.0000 - DINAS PENATAAN RUANG
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penataan Ruang yang berkualitas	100	%		
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				214.044.220	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.135.500	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.903.100	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.903.100	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.903.100	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.903.100	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.579.200	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				99.717.120	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24.332.886.419	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.844.546.419	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183	Orang/bulan		
1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				473.340.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.522.600	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penataan Ruang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Penataan Ruang	67,62	%		
1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45.522.600	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				955.398.784	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Penataan Ruang	96	%		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket		
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				31.400.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	Laporan		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				218.067.760	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan		
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				548.931.024	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				175.954.030	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	100	%		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				175.954.030	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.329.283.253	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penataan Ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Penataan Ruang yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				46.844.009	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.282.439.244	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.266.832.949	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Penataan Ruang sesuai ketentuan	100	%		
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				637.416.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				186.387.004	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	524	Unit		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				403.429.945	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				52.780.509.135	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob	98,95	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	98,12	%		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				43.311.723.010	
Berkurangnya luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	luas kawasan rawan banjir terlindungi	100	%		
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				2.505.725.000	
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	10	Unit		
1.03.02.2.01.0028 - Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir				5.000.000.000	
Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1	Unit		
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				8.100.000.000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	2	KM		
1.03.02.2.01.0082 - Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi				1.400.000.000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	Unit		
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.000.000.000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	Unit		
Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Timur	100	%		
Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Barat		%		
Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah I		%		
Terpeliharanya stasiun pompa banjir agar dapat beroperasi dengan baik.	Persentase stasiun pompa yang beroperasi dengan kondisi baik di wilayah Tengah II		%		
1.03.02.2.01.0085 - Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				23.131.720.940	
Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	36	Unit		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				9.468.786.125	
Jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi untuk mendukung layanan multikomoditas.	Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi	100	%		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				2.250.000.000	
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0	KM		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				7.024.600.425	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	11	KM		
Tersusunnya Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Persentase Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	100	%		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				194.185.700	
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	2	Dokumen		
Meningkatnya pemanfaatan ruang sungai	Persentase sungai yang termanfaatkan	100	%		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				43.311.723.010	
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				1.500.000.000	
Terlaksanannya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1	KM		
Tersedianya dokumen perencanaan teknis sumber daya air	Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan	100	%		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				43.311.723.010	
Tersusunnya dokumen perancangan teknis sumber daya air.	Persentase dokumen perancangan teknis sumber daya air yang disusun	100	%		
Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur Sumber Daya Air yang tersusun		%		
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				674.277.070	
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	10	Dokumen		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.009.120.000	
Meningkatnya kualitas akses air minum aman	Persentase rumah tangga terlayani air minum aman	48,66	%		1.04.1.03.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1.009.120.000	
Meningkatnya Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan	Persentase Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan	60,47	%		
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				870.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1	Unit		
1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				89.120.000	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	Orang		
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50.000.000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	8	Unit		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.044.717.000	
Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	3,32	%		1.04.1.03.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.044.717.000	
Meningkatnya Pelayanan Penyedotan Tinja	Volume lumpur tinja yang diolah di IPLT	75	m3		
Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman		RT		
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				1.279.717.000	
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1	Unit		
1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				915.000.000	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	193	Unit		
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				500.000.000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit		
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1.350.000.000	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	Dokumen		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				96.959.492.865	
Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	61,17	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				49.607.848.045	
Tersedianya infrastruktur pengaman yang melindungi kawasan permukiman dari risiko abrasi, erosi, dan akresi.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/ Kota	72,37	%		
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				23.558.000.000	
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3	Sistem Drainase Perkotaan		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				24.849.473.045	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan		
Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	61,77	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0003 - UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				24.650.426.024	
Tersedianya material drainase	Persentase material drainase yang tersedia	100	%		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				24.650.426.024	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan		
Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	61,77	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0005 - UPTD Peralatan dan Perbengkelan
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				22.701.218.796	
Tersedianya sarana pendukung pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase sarana pendukung, peralatan dan perbengkelan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	100	%		
1.03.06.2.01.0026 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				22.701.218.796	
Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	60	Unit		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase	Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan	100	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				49.607.848.045	
Tersusunnya dokumen teknis sistem drainase perkotaan sebagai acuan pembangunan dan pengelolaan drainase.	Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	100	%		
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				1.200.375.000	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	14	Dokumen		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				136.826.752.868	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN	Persentase BGN dalam kondisi baik	100	%		1.03.2.10.0.00.0 2.0000 - DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				136.826.752.868	
Meningkatnya keandalan BGN	Persentase BGN yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100	%		
1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				41.991.075.000	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	4	Banguna n Gedung		
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				7.170.450.776	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5	Banguna n Gedung		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				22.950.000.000	
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen		
Terpenuhinya kebutuhan ded BGN	Persentase DED yang terpenuhi	100	%		
1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				61.860.566.730	
Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	5	Bantuan Teknis		
Meningkatnya penyelenggaraan penataan dan perijinan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG	86	%		
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				136.826.752.868	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap legalitas bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung terhadap ijin yang dikeluarkan (SP pada bangunan ber PBG)	86	%		
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1.499.393.732	
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2	Dokumen		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				965.771.580	
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2.100	Dokumen		
Meningkatnya penetapan BCB	Persentase BCB yang ditetapkan	100	%		
1.03.08.2.01.0015 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				319.517.770	
Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	2	Banguna n Gedung Cagar Budaya		
1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				69.977.280	
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	500	Orang		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				169.976.320	
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan	Persentase reklame yang berizin	85,5	%		1.03.2.10.0.00.0 2.0000 - DINAS PENATAAN RUANG

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				169.976.320	
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian reklame	Persentase kepatuhan reklame yang berijin	99,5	%		
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				169.976.320	
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	300	Orang		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				202.000.010.354	
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,64	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				180.064.102.621	
Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan direhabilitasi	100	%		
Terlaksananya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Terlaksananya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	100	%		
Tersedianya Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan	Persentase Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang dimanfaatkan	100	%		
Terlaksananya pengujian dan pemantauan panjang jalan	Persentase panjang jalan yang diuji dan dipantau	100	%		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				11.747.997.510	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	389	KM		
1.03.10.2.01.0052 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				856.612.995	
Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	21	KM		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				38.133.287.750	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5	KM		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				83.299.999.999	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	20	KM		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				4.400.000.000	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	0	Meter		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				400.000.000	
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20	Jembatan		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				22.500.000.000	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	15	Meter		
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0001 - UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				2.550.000.000	
Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah I	Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah I	100	%		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				2.550.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	74	KM		
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0002 - UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				2.540.720.400	
Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah IV	Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah IV	100	%		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				2.540.720.400	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	112	KM		
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0003 - UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				10.863.909.215	
Tersedianya material Bina marga	Persentase material Bina Marga yang tersedia	100	%		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				10.863.909.215	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	16	KM		
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0004 - UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				3.000.000.000	
Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah II	Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah II	100	%		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				3.000.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	48	KM		
Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	50,94	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0006 - UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				2.981.278.118	
Terlaksananya pemeliharaan jalan kewenangan kota di wilayah III	Persentase panjang jalan yang dipelihara di Wilayah III	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				2.981.278.118	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	78	KM		
Meningkatnya ruang milik jalan yang dipelihara	Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara	67,88	%		1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				180.064.102.621	
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan ruang milik jalan	Persentase ruang milik jalan yang dipelihara	56,69	%		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				15.459.929.677	
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	15.300	KM		
Tersedianya dokumen perencanaan teknis kebinamargaan	Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan	100	%		
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				180.064.102.621	
Tersusunnya dokumen teknis survei dan pengukuran	Persentase dokumen teknis survei dan pengukuran yang tersusun	100	%		
Tersusunnya dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan	Persentase dokumen perancangan teknis jalan dan jembatan yang disusun	100	%		
Tersusunnya dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase dokumen teknis pengembangan teknologi infrastruktur jalan dan jembatan yang tersusun	100	%		
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				449.410.295	
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1	Dokumen		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.716.928.163	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	15	Dokumen		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				99.936.230	
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	839	KM		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				149.672.360	
Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	56	Rasio		1.03.2.10.0.00.0 2.0000 - DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				149.672.360	
Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelatihan tenaga terampil konstruksi	Persentase penyelenggaraan kegiatan pelatihan jasa konstruksi	100	%		
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				55.772.000	
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100	Orang		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				93.900.360	
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100	Orang		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				4.219.966.600	
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penerbitan KRK	92	%		1.03.2.10.0.00.0 2.0000 - DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				3.406.751.598	
Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan	100	%		
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				2.708.053.766	
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen		
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				698.697.832	
Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1	Publikasi		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				346.660.370	
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan tata ruang di Kota Semarang yang sesuai	100	%		
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				122.626.170	
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	2	Peta		
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				224.034.200	
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	Kegiatan		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				466.554.633	
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang yng terkoordinir dan sinkron (KRK terhadap PBG)	100	%		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				307.928.463	
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				158.626.170	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1	Laporan		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				358.090.227.041	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.447.782.615	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	80	%		1.04.1.03.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas	100	%		
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				97.138.814	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang disusun tepat waktu	100	%		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.147.620	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.442.441	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.442.441	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.442.441	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.442.441	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.147.620	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan		
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.073.810	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		
1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.288.544.500	
Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan dan pelaporan keuangan	Persentase tertib Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	100	%		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26.653.632.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269	Orang/bulan		
1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				623.250.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Dokumen		
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.992.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200	Dokumen		
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.411.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.066.900	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan		
1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.192.500	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				449.243.893	
Meningkatnya kompetensi pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	100	%		
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				90.442.800	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400	Paket		
1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40.973.430	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
1.04.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				8.673.675	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen		
1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				239.547.660	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				69.606.328	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				714.211.342	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan adminisitrasi perkantoran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	100	%		
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				63.648.566	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket		
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				133.250.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				251.589.769	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan		
1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				32.880.208	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen		
1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				102.842.799	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.314.908.022	
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman	100	%		
1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				68.443.133	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	Unit		
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				588.838.350	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				657.626.539	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	Unit		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.770.377.939	
Meningkatnya pelaksanaan jasa penunjang	Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Disperkim yang Terlaksana	100	%		
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.020.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				852.614.040	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.897.743.899	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.813.358.105	
Terpeliharanya aset dinas	Persentase aset Disperkim dalam kondisi baik	100	%		
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.894.292.345	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270	Unit		
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.964.239.242	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110	Unit		
1.04.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				36.323.640	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614	Unit		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				508.548.941	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300	Unit		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.409.953.937	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				6.206.508.037	
Meningkatnya upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun	Persentase backlog perumahan	24,12	%		1.04.1.03.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				150.000.000	
Tersedianya rumah bagi warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	Jumlah Rumah yang disediakan bagi warga terdampak bencana dan relokasi pemerintah	3	Unit Rumah		
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				50.000.000	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen		
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000	
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	Dokumen		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				450.000.000	
Terfasilitasinya kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana atau relokasi program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana atau relokasi program Kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				450.000.000	
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15	Unit Rumah		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				5.606.508.037	
Meningkatnya pengelolaan rumah susun	Persentase rumah susun yang terkelola	100	%		
1.04.02.2.05.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				2.091.808.671	
Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	Laporan		
1.04.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota				3.514.699.366	
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun	48	Hunian Vertikal		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				30.302.430.000	
Meningkatnya kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Kawasan yang Tertata	10	%		1.04.1.03.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3.745.485.000	
Meningkatnya jumlah kebijakan bidang PKP yang ditindaklanjuti	Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang ditindaklanjuti (Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang sudah disusun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	1	Sepuluh		
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				3.745.485.000	
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1	Dokumen		
Meningkatnya rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Rumah Layak Huni	95,09	%		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				26.556.945.000	
Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	6,93	%		
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				25.556.945.000	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.000	Unit Rumah		
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				1.000.000.000	
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	25	Ha		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				270.133.506.389	
Meningkatnya kualitas penyediaan pemakaman umum	Rasio ketersediaan tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	0,015	%		1.04.1.03.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				270.133.506.389	
Terpenuhinya kebutuhan Pemakaman Umum	Jumlah Ketersediaan Lubang Makam	10.192	lubang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				141.229.327	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Dokumen		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				1.810.264.000	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	14	Lokasi		
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	68	%		
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				270.133.506.389	
Meningkatnya pembangunan sarana prasarana lingkungan	Meningkatnya Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan yang terbangun	850	titik		
1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				86.363.608.794	
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.000	Lokasi		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				161.986.009.348	
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	700	Lokasi		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	27,75	%		
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				270.133.506.389	
Meningkatnya Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	111	%		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				1.750.948.400	
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10	Laporan		
Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	100	%		
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				270.133.506.389	
Meningkatnya kualitas pemeliharaan taman kota	Luasan Taman Kota terpelihara	353,03	m2		
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				18.081.446.520	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Laporan		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				98.579.365.418	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				78.788.000.069	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan BPBD yang berkualitas	100	%		1.05.0.00.0.00.0 3.0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkualitas	100	%		
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.747.946	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	%		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.252.800	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				550.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				600.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				550.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				600.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				379.926	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				569.600	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorral Daerah				45.245.620	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.023.748.674	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.825.343.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/bulan		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				197.340.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				337.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				391.274	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				337.200	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.140.576	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.339.506	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen		
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				17.801.070	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				402.316.282	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%		
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.165.103	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.779.216	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				48.197.660	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.423.738	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31.228.787	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				12.918.129	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				155.767.979	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				104.835.671	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.327.298	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional	100	%		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.327.298	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.198.454.564	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.927.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				237.500.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				957.027.564	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.071.232.059	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan	100	%		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				270.571.380	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				725.763.510	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.017.680	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.879.489	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang berkualitas	100	%		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100	%		
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.344.100	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.029.200	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.798.800	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.387.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.723.800	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.387.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.322.400	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.958.600	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan		
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.055.300	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data		
1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				4.681.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10	Dokumen		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28.173.675.300	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				27.865.920.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341	Orang/bulan		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				298.168.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.895.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen		
1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.195.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.108.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.895.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	Dokumen		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.794.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				699.500	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.187.000	
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah	100	OPD		
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				999.500	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				999.500	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.094.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.094.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan		
1.05.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				12.719.000	
Terwujudnya tertib administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD sesuai peraturan perundangan dalam rangka pencapaian target pendapatan	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.05.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				699.500	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen		
1.05.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				8.431.500	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan		
1.05.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				1.794.000	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12	Dokumen		
1.05.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.794.000	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				356.755.654	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100	%		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				333.134.732	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.317.646	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.151.638	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen		
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.151.638	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.404.863.621	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100	%		
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.616.247	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				273.003.224	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				81.410.804	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.472.905	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		
1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				7.368.429	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				26.085.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84.659.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				894.248.012	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				226.153.154	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	100	%		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				53.638.896	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.034.118	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.679.340	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.800.800	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.438.890.290	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				520.240.600	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.918.649.690	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.290.872.279	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan	100	%		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				308.321.370	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.017.980	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.180.018	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				800.337.750	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				112.115.162	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95	Unit		
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.944.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satpol PP	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Satpol PP	84	%		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATPOL PP

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Satpol PP yang berkualitas	100	%		
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				241.153.148	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.014.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.676.400	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.217.600	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.035.200	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.126.400	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				85.777.528	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.060.400	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28.488.818.400	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				28.220.152.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	226	Orang/bulan		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				255.440.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.608.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				8.008.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan		
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.608.800	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				439.935.453	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai layanan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	78	Angka		
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				14.500.000	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Unit		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				19.360.987	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	Paket		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.926.400	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				375.448.066	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang		
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14.700.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				472.986.854	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100	%		
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.877.140	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61.302.415	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22.960.300	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13	Paket		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				91.050.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				136.602.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				146.194.999	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				146.353.641	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	100	%		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41.558.404	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.950.734	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				99.844.503	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				850.193.154	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				267.235.200	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				582.957.954	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.401.131.622	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan	100	%		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				953.445.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				113.884.002	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				199.717.200	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				94.485.420	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	Unit		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.647.088.367	
Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SOP dan layanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	81	%		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATPOL PP
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.586.054.881	
Meningkatnya kualitas SOP dan evaluasi kegiatan penyediaan layanan dalam rangka penegakan Perda yang terukur, akuntabel, dan Berkualitas	Persentase kegiatan layanan penegakan Perda yang dilaksanakan	80	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				38.142.740	
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen		
Meningkatnya profesionalisme personel Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan dasar dan pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetensi	10	%		
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				1.300.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6	Orang		
Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga terdampak dari proses penegakan Perda dan Perkada	Persentase keluhan dari warga terdampak penegakan Perda dan Perkada yang ditangani hingga tuntas	76	%		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				8.143.430	
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12	Laporan		
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada	41	%		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.586.054.881	
Meningkatnya deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum melalui pemantauan, analisis, dan pelaporan informasi secara cepat dan akurat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketertiban umum dibanding tahun sebelumnya	5	%		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				57.979.400	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	60	Orang		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				142.058.645	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	laporan		
Meningkatnya penanganan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban umum secara cepat, akurat dan responsif	Rata-rata waktu respon terhadap pengaduan masyarakat	3	jam		
1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum				71.301.700	
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				957.452.528	
Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan yang edukatif dan partisipatif kepada masyarakat dalam rangka mendukung penegakan Perda dan Perkada	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah yang telah diberikan penyuluhan	10	%		
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				94.104.200	
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	laporan		
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya menaati Perda dan Perkada	Persentase masyarakat yang memahami substansi Perda dan Perkada	80	%		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				179.622.262	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	Laporan		
Meningkatnya ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani	100	%		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.586.054.881	
Meningkatnya kualitas operasional penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mewujudkan ketentraman di masyarakat	Persentase gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani hingga tuntas	90	%		
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				337.525.166	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Laporan		
Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban umum	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban	80	%		
1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota				129.995.133	
Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				957.452.528	
Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota secara terkoordinasi, terukur, dan akuntabel.	Persentase aktivitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pelaksanaan Perda dan Perkada yang aman dan lancar	90	%		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				210.000.000	
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	Laporan		
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5	%		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.586.054.881	
Meningkatnya koordinasi dan sinergi yang efektif antar lembaga/instansi dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum di wilayah yang ditangani melalui operasi gabungan antar instansi	5	%		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				210.756.870	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	Dokumen		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				957.452.528	
Meningkatnya penyelesaian pelanggaran Perda yang memberikan efek jera	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti hingga tuntas sesuai ketentuan hukum	90	%		
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				17.818.460	
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	Laporan		
Meningkatnya kualitas operasi penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Rasio jumlah pelanggaran yang ditindak dibanding jumlah pelanggaran yang ditemukan	76	%		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				139.680.456	
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12	laporan		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				316.227.150	
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12	Laporan		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota				103.580.958	
Meningkatnya kompetensi PPNS dalam menegakkan Perda dan Perkada	Persentase PPNS yang meningkat kompetensinya	25	%		
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				66.447.000	
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1	Laporan		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				3.500.000	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12	Laporan		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				33.633.958	
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2	Laporan		
Meningkatnya perlindungan masyarakat	Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi	100	%		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				9.586.054.881	
Meningkatkan partisipasi Linmas dalam kegiatan preventif dan responsif terhadap potensi gangguan masyarakat	Persentase keterlibatan Linmas dalam penanganan trantibum	20	%		
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				7.950.445.060	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2	Dokumen		
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini terkait keberadaan, kapasitas, dan aktivitas Satgas Daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan pemberdayaan	Persentase data satlinmas yang terverifikasi dan mutakhir	90	%		
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				124.852.033	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen		
Meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas anggota Linmas	Persentase anggota Linmas yang memenuhi standar kesiapsiagaan fisik dan mental	86	%		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat				513.554.704	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	480	Orang		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.511.008.328	
Meningkatnya pelayanan kedaruratan dan logistik bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	%		1.05.0.00.0.00.0 3.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				692.220.180	
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Berhasil dievakuasi	100	%		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				392.220.180	
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.000	Orang		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000	
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.000	Orang		
Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	%		
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				146.078.460	
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi kebencanaan melalui sosial media	100	%		
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				47.975.000	
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500	Orang		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				98.103.460	
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2	Dokumen		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.244.189.014	
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	%		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				350.000.000	
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2	Unit		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				472.986.500	
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	10	Kawasan		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				106.071.499	
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2	laporan		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				315.131.015	
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3	Kawasan		
Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	%		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				428.520.675	
Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana	100	%		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				354.236.074	
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12	Kegiatan		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				74.284.600	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	Dokumen		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				6.633.268.654	
Meningkatnya kesiapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	100	%		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.936.512.309	
Terselenggaranya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				188.026.346	
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Laporan		
Terselenggaranya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.290.237	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Dokumen		
Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	100	%		
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				30.463.328	
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	100	Desa/Kelurahan		
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran				11.736.870	
Terselenggaranya Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	Persentase Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	100	%		
Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Persentase Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	100	%		
1.05.04.2.03.0004 - Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran				11.736.870	
Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	100	Laporan		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				1.087.044.556	
Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	100	%		
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				70.540.237	
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1.389	Laporan		
Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100	%		
1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				7.540.237	
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	Laporan		
Meningkatnya kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	100	%		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.936.512.309	
Terselenggaranya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100	%		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1.076.506	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1	Dokumen		
Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				3.472.247.140	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	25	Unit		
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				9.716.692	
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5	Dokumen		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				1.087.044.556	
Terselenggaranya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	100	%		
1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				913.707	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1	Dokumen		
Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	100	%		
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				16.266.495	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	13	Unit		
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	100	%		
1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				991.783.880	
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	100	Unit		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaan aparaturnya dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama	100	%		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.936.512.309	
Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100	%		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				143.814.243	
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10	Orang		
Terselenggaranya Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	%		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				1.208.769.956	
Terselenggaranya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	100	%		
1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran				26.594.298	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	100	Orang		
Terselenggaranya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase penyelenggaraan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	100	%		
Terselenggaranya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100	%		
1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				971.881.048	
Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	100	Orang		
Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	100	%		
1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				130.391.360	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	1350	Unit		
1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				79.903.250	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	100	Desa/Kelurahan		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				1.087.044.556	
Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	100	%		
Meningkatnya kualitas pencegahan kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	100	%		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.936.512.309	
Terselenggaranya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%		
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				22.877.818	
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	300	Dokumen		
Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Persentase penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	%		
Terselenggaranya Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase penyelenggaraan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0	%		
Terselenggaranya Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Persentase penyelenggaraan Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	100	%		
1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				66.000.000	
Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1	Dokumen		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				389.204.964	
Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100	%		
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				9.713.360	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	150	Dokumen		
Terlaksananya Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Persentase Pelaksanaan Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	100	%		
1.05.04.2.02.0004 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan				26.100.000	
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2	Orang		
Terlaksananya Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100	%		
1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				353.391.604	
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.300	Laporan		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37.739.652.446	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.806.250.191	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Sosial	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial	100	%		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas	100	%		
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				73.218.913	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23.752.376	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				612.700	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				672.440	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				561.492	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				672.440	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				550.907	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.150.938	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan		
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.293.187.050	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.922.777.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang/bulan		
1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				368.228.940	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dokumen		
1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				389.900	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				469.642	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dokumen		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				880.538	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Dokumen		
1.06.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				441.030	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				450.298.281	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Sosial	Persentase layanan kepegawaian Dinas Sosial	100	%		
1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.800.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				445.498.281	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				471.069.429	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial	100	%		
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.688.100	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.505.600	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.659.839	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	Paket		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.037.702	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.800.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				32.389.767	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	80	Laporan		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				126.088.420	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan		
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen		
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				250.900.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				236.273.673	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	100	Persentase		
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				113.688.970	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				106.253.643	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.331.060	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.017.058.413	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Sosial yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.395.293	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.881.663.120	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.265.144.432	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial sesuai ketentuan	100	%		
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.603.603	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				635.180.155	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38	Unit		
1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				32.292.250	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				108.068.424	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				6.578.223.108	
Meningkatnya kapasitas PSKS dalam mengatasi permasalahan sosial	Indeks Efektivitas Penguatan Pemberdayaan Sosial	100	%		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				11.010.837	
Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				11.010.837	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5	Dokumen		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				6.567.212.272	
Meningkatnya kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.	Persentase kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.	100	%		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				51.328.559	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Lembaga		
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan				7.483.818	
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	2	Orang		
1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				1.138.533.750	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	4.500	Orang		
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				96.472.483	
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	10	orang		
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
Meningkatnya kemampuan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kewenangan Kab/kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kab/kota	0	%		
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8.845.091	
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Keluarga		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				13.135.682	
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota				109.566.227	
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	50	Lembaga		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				5.137.746.691	
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	8	Orang		
1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial				4.099.971	
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	13	Laporan		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				14.740.416	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase PPKS warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100	%		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				14.740.416	
Meningkatnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan Ke Daerah Asal	100	Persentase		
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				14.740.416	
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Orang		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6.870.856.384	
Meningkatkan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1.708.853.330	
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	100	Persentase		
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				1.374.331.515	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	182	Orang		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				114.244.247	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	182	Orang		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				958.480	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Orang		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				22.743.199	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				14.527.750	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	157	Orang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				4.432.796	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				1.595.807	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	161	Orang		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				25.794.125	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	229	Orang		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				112.058.107	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	81	Orang		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.595.807	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	86	Orang		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				10.496.861	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	21	Orang		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				3.546.237	
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang		
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				22.528.400	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				5.162.003.054	
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan	Persentase Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan	100	%		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				16.210.384	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang		
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				70.300.043	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Orang		
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				40.296.246	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	Dokumen		
1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				36.719.575	
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	160	Orang		
1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				75.557.042	
Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	120	Orang		
1.06.04.2.02.0017 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				21.652.427	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	12	Aduan		
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
Meningkatnya Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	100	%		
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan				3.843.813.644	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanaan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000	Orang		
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				111.009.601	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Orang		
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu				145.157.749	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	44	Orang		
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				609.482.079	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang		
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				41.693.904	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang		
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
Meningkatnya Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100	%		
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				70.540.888	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000	Orang		
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				13.651.971	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang		
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				30.691.549	
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang		
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				11.741.984	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang		
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				11.741.984	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang		
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				11.741.984	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				6.420.758.912	
Menurunnya kerentanan anak terlarntar melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran	Persentase anak terlarntar yang mendapat perlindungan sosial	100	%		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlarntar				64.147.607	
Meningkatnya Pemeliharaan Anak - Anak Terlarntar	Persentase Anak - Anak Terlarntar yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100	%		
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlarntar				15.149.817	
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlarntar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlarntar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang		
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlarntar				16.868.707	
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlarntar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlarntar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang		
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlarntar				17.838.909	
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlarntar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlarntar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang		
1.06.05.2.01.0004 - Fasilitas Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi				14.290.174	
Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	12	Orang		
Menurunnya kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran	Persentase warga miskin yang mendapat jaminan sosial	100	%		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				6.356.611.305	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari kemiskinan (%)	2.1	%		
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				452.573.169	
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100.000	Orang		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.069.053.337	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4	Usulan		
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
Meningkatnya Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Persentase Warga Miskin dan Pekerja Rentan Miskin yang menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	100	%		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				4.484.737.565	
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000	Orang		
1.06.05.2.02.0009 - Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				24.575.856	
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	18	Orang		
Meningkatnya Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha bagi Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang mendapatakan Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha	100	%		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				185.333.041	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang		
1.06.05.2.02.0010 - Fasilitas bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota				140.338.337	
Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	15	Orang		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.048.823.435	
Meningkatnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pasca bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100	%		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				617.343.124	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	%		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				300.000.000	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.350	Orang		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				103.020.138	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	700	Orang		
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				69.390.192	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Orang		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				55.375.046	
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	285	Orang		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				89.557.748	
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				431.480.311	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota	100	%		
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				211.470.608	
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Kampung		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				33.499.157	
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				9.544.660	
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	29	Orang		
1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam				41.489.045	
Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	75	Orang		
1.06.06.2.02.0005 - Fasilitas Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana				5.302.577	
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	5	Kampung		
1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				53.510.516	
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	60	Orang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah				36.457.569	
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	180	Orang		
1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana				40.206.178	
Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	150	Orang		
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				25.814.099.362	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.143.339.362	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja	67,5	%		2.07.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS TENAGA KERJA
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja yang berkualitas	100	%		
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				56.773.400	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	100	%		
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.282.200	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				725.300	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				725.300	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				725.300	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				725.300	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.590.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.288.021.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	100	%		
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.058.681.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/bulan		
2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				227.840.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan		
2.07.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				500.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				82.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja	Nilai Layanan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja	80	Nilai		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.07.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.594.294	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				79.405.706	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72	Orang		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				283.610.246	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Persentase Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja	100	%		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket		
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	24	Dokumen		
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan		
2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen		
2.07.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				32.610.246	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				76.662.594	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	100	%		
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				76.662.594	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.895.252.122	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				324.248.422	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.571.003.700	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				461.020.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja sesuai ketentuan	100	%		
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.960.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				327.060.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	Unit		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				50.000.000	
Meningkatnya keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90	%		2.07.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				50.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	1	Dokumen		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				50.000.000	
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30	Orang		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				5.614.000.000	
Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	80	%		2.07.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				5.459.000.000	
Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	80	%		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				4.660.000.000	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	725	Orang		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				227.000.000	
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	28	Unit		
2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				572.000.000	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	104	Orang		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				50.000.000	
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	29	%		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				50.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	28	Lembaga		
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				25.000.000	
Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Vokasi	100	%		
2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				25.000.000	
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	32	Perizinan		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase produktivitas tenaga kerja	100	%		
2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				30.000.000	
Meningkatnya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	55	Perusahaan		
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				30.000.000	
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	56	Perusahaan		
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	
Meningkatnya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Produktivitas Tenaga Kerja	#####	Rupiah/orang		
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				50.000.000	
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7	Dokumen		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.090.000.000	
Meningkatnya lowongan pekerjaan yang berkualitas	Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas	78	%		2.07.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				490.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	3.700	Orang		
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				190.000.000	
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.006	Orang		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				300.000.000	
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	802	Orang		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal	Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	73	%		
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				505.000.000	
Meningkatnya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	3.370	Orang		
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				205.000.000	
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3.370	Orang		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				30.000.000	
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	48	Orang		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				30.000.000	
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	14	Orang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	6	Lembaga		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				95.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)	20	Orang		
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				50.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16	Orang		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				45.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	12	Orang		
Meningkatnya wirausaha baru	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	70	%		
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				505.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Wirausaha Baru yang Berkualitas	4	Pelatihan		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				240.000.000	
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80	Orang		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				2.916.760.000	
Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	89,3	%		2.07.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				285.000.000	
Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	900	Perusaha an		
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				30.000.000	
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	18	Perusaha an		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				255.000.000	
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	Laporan		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				2.631.760.000	
Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	70,87	%		
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	36	Perkara		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	18	Perkara		
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				30.000.000	
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	7	Asosiasi dan Serikat Pekerja		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000	
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				2.221.760.000	
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.000	Orang		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				22.556.869.179	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.619.329.406	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	%		2.08.2.13.0.00.0 1.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	100	%		
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				76.918.320	
Tersedianya acuan pelaksanaan phrogram, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.770.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.739.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.004.100	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.510.600	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen		
2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.295.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.843.400	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan		
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.510.600	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan		
2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.669.866.400	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.361.908.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/bulan		
2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				301.844.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.411.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan		
2.08.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				973.900	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen		
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.054.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
2.08.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.674.800	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				613.603.600	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100	%		
2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				187.990.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				181.256.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen		
2.08.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				190.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250	Orang		
2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				54.357.600	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				561.588.169	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100	%		
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.487.630	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.092.400	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket		
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.427.029	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.994.090	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.327.750	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket		
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				34.965.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280.978.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan		
2.08.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				132.316.270	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				103.268.850	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100	%		
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				11.524.250	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.324.400	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit		
2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.420.200	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.519.065.694	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				252.795.730	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.266.269.964	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.075.018.373	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai ketentuan	100	%		
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				394.081.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.810.807	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				579.965.650	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		
2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.204.916	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				3.676.903.492	
Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	68,63	%		2.08.2.13.0.00.0 1.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				1.558.072.522	
Meningkatnya kegiatan kelembagaan PUG	Jumlah kegiatan pelembagaan PUG	5	Kegiatan		
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				13.920.940	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen		
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				1.528.386.890	
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2	Kebijakan		
2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				15.764.692	
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota	2	Laporan		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.336.600.940	
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	8	Kegiatan		
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1.074.800.000	
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	100	orang		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				261.800.940	
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100	Orang		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				782.230.030	
Bertambahnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	29	Lembaga		
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				782.230.030	
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	24	Lembaga		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				656.116.050	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	0,039	%		2.08.2.13.0.00.0 1.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				319.875.000	
Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	6	Kegiatan		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				319.875.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	16	Lembaga		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				230.500.000	
Bertambahnya layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	260	Layanan		
2.08.03.2.02.0003 - Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				12.500.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	10	Orang		
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				14.000.000	
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota	10	Orang		
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				47.000.000	
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	240	orang		
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				27.000.000	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	20	Orang		
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota				38.000.000	
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	100	orang		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				60.000.000	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	100	orang		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				32.000.000	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	200	orang		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				105.741.050	
Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	4	Kegiatan		
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				56.000.000	
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	20	Orang		
Meningkatnya kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	4	Kegiatan		
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				49.741.050	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	120	orang		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				795.783.500	
Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100	%		2.08.2.13.0.00.0 1.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	4,52	%		
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				655.783.500	
Meningkatnya kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	2	Kegiatan		
2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				655.783.500	
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	2	Dokumen		
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				140.000.000	
Bertambahnya layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	100	Layanan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				38.000.000	
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	25	Orang		
2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota				42.000.000	
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	100	Orang		
2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				25.000.000	
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	100	Orang		
2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				35.000.000	
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	150	Orang		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				150.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	50	%		2.08.2.13.0.00.0 1.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000	
Meningkatnya kegiatan untuk penyajian data gender dan anak	Jumlah kegiatan penyajian data gender dan anak	4	Kegiatan		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				120.000.000	
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	Dokumen		
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				30.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	15	Lembaga		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1.253.404.731	
Meningkatnya akses pemenuhan hak-hak anak	Nilai Pemenuhan Hak Anak	66,34	Angka		2.08.2.13.0.00.0 1.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				837.404.731	
Meningkatnya kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	7	Kegiatan		
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				782.700.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	250	Lembaga		
2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				54.704.731	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Laporan		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				416.000.000	
Meningkatnya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	6	Kegiatan		
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				70.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	60	Orang		
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				45.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5	Lembaga		
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				70.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Laporan		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				231.000.000	
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2	Lembaga		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				405.332.000	
Menurunnya kekerasan terhadap anak	Nilai Perlindungan Khusus Anak	89,76	Angka		2.08.2.13.0.00.0 1.0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				181.900.000	
Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	6	Kegiatan		
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				181.900.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	6	Kegiatan		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				173.032.000	
Bertambahnya layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	120	Layanan		
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				11.453.000	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20	Orang		
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				15.000.000	
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	20	Orang		
2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				38.000.000	
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	20	Orang		
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				16.500.000	
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5	Orang		
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				66.500.000	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5	Orang		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				13.079.000	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20	Orang		
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				12.500.000	
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	Orang		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.400.000	
Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	Kegiatan		
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				30.400.000	
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	3	Dokumen		
Meningkatnya kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	Kegiatan		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				20.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	2	Dokumen		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				18.046.049.641	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.763.295.153	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	92,5	%		2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	100	%		
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.756.420	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.047.300	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.105.100	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.105.100	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.09.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.105.100	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.09.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.105.100	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.043.100	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.733.426.200	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.478.236.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/bulan		
2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				251.820.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				536.700	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.296.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
2.09.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				536.700	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				162.926.300	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	90	%		
2.09.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.137.700	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
2.09.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				156.788.600	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				362.573.386	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan	100	%		
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.507.140	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.995.490	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.977.432	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				29.679.265	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				43.822.560	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				177.577.500	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
2.09.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				57.014.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				829.670.964	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				187.290.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				642.380.964	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				619.941.882	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan	100	%		
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				445.182.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.159.882	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				97.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				23.776.126	
Meningkatnya optimalisasi sumber daya ekonomi lokal dalam menunjang kemandirian pangan	Persentase kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100	%		2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				23.776.126	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100	%		
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				23.776.126	
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1	Unit		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				5.832.456.426	
Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat	Persentase Cakupan Distribusi Pangan	100	%		2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1.259.976.690	
Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan	100	%		
2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				1.259.976.690	
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	100	Ton		
Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Angka ketersediaan energi	3.065	Kkal/Kap ita/Hari		
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				1.430.979.736	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kota Semarang dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan	100	%		
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				143.319.519	
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	Laporan		
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				59.216.440	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2	Laporan		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				280.947.703	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	Keluarga		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				554.513.814	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	laporan		
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				47.044.624	
Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	Laporan		
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				212.735.850	
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1	Unit		
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				87.591.152	
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1	Laporan		
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				45.610.634	
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	Dokumen		
Meningkatnya konsumsi pangan yang berkualitas	Angka konsumsi energi	1.910	Kkal/Kapita/Hari		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				3.141.500.000	
Meningkatnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Protein	60,44	gr/kapita/hari		
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1.573.000.000	
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3	Dokumen		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				996.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2	Laporan		
2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				395.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2	Laporan		
2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				177.500.000	
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Dokumen		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				281.021.937	
Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan	Persentase daerah tahan pangan	100	%		2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				49.826.711	
Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	2	Dokumen		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				49.826.711	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Dokumen		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				231.195.225	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Kelurahan Tahan Pangan	1	%		
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				231.195.225	
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	Dokumen		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				1.145.500.000	
Meningkatnya peredaran pangan yang aman, layak konsumsi dan bebas dari cemaran	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	93,6	%		2.09.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				1.145.500.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kota Semarang	Persentase Sertifikasi Keamanan PanganSegar Asal Tumbuhan	93	%		
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				431.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen		
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				165.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100	Dokumen		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				294.500.000	
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3	Dokumen		
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				255.000.000	
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5	Dokumen		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9.100.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				130.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi	96	%		1.03.2.10.0.00.0 2.0000 - DINAS PENATAAN RUANG
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				130.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase permasalahan tanah di kota semarang yang terfasilitasi (termasuk GTRA)	100	%		
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				30.000.000	
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	24	Berita Acara		
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				100.000.000	
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30	Dokumen		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				5.200.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah	Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah	50	%		1.03.2.10.0.00.0 2.0000 - DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				5.200.000.000	
Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemda mulai dari penyelesaian ganti kerugian sampai dengan penerbitan sertifikat	1	%		
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				5.200.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen		
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				3.770.000.000	
Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah	Persentase pemanfaatan aset tanah BMD	60	%		1.03.2.10.0.00.0 2.0000 - DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota				3.770.000.000	
Terlaksananya kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelengkapan administrasi tanah pemda yang terinventarisasi	100	%		
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				3.770.000.000	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1	Laporan		
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				173.312.104.502	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				46.627.038.380	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	90,25	%		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas	100	%		
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				81.041.370	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.802.732	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				691.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				877.400	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				691.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				877.400	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.879.200	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.222.638	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.897.843.200	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.397.317.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160	Orang/bulan		
2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				499.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				691.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				417.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
2.11.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				417.600	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				222.807.454	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup	Nilai layanan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	189	nilai		
2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.500.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	189	Dokumen		
2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				216.307.454	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.219.569.441	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup	90,25	%		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				185.692.244	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				59.389.869	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				77.450.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				420.878.500	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				476.158.829	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Dokumen		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				421.011.844	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	100	%		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				421.011.844	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	Unit		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.880.360.236	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				960.803.280	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.919.556.956	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.904.404.834	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan	100	%		
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				131.868.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				645.036.629	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit		
2.11.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.493.496	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16	Unit		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				242.691.581	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.874.315.129	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				787.590.665	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak kebijakan rencana dan program (KRP)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	Persentase		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				236.364.125	
Meningkatnya kualitas Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100	%		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				100.000.000	
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2	Dokumen		
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				136.364.125	
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	Dokumen		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				551.226.540	
Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	100	%		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				296.226.540	
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	Dokumen		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				255.000.000	
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2	Dokumen		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				18.229.260.849	
Meningkatnya cakupan informasi lingkungan hidup	Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	100	%		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				672.790.374	
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun kabupaten/kota terhadap target yang telah ditetapkan	100	%		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				190.752.000	
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3	Laporan		
Meningkatnya ketersediaan informasi masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan informasi publik bidang lingkungan hidup	2	%		
2.11.03.2.02.0004 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan				482.038.374	
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	2	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya cakupan pelayanan laboratorium lingkungan	Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100	%		
Menurunnya kerusakan lahan	Luasan areal yang terkonservasi	22,23	%		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.182.916.302	
Meningkatnya luasan tutupan lahan	Cakupan luasan penghijauan	80	Ha		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	Ha	1.182.916.302	
Menurunnya pencemaran udara	Kontribusi penurunan Emisi GRK Kumulatif (sektor Persampahan)	#####	TON CO2 EQ		
	Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara	100	%		
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				16.373.554.173	
Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap udara	Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100	%		
Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	100	%		
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				12.663.500.599	
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5	Dokumen		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				2.349.858.836	
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	Dokumen		
Meningkatnya upaya penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase terlaksananya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	100	%		
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1.266.444.047	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15	Dokumen		
Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berbasis pada data dan informasi yang valid	Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	100	%		
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				16.373.554.173	
Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	90	%		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				93.750.692	
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	Dokumen		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				864.220.119	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota	100	%		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				864.220.119	
Meningkatnya kualitas sarana prasarana keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	100	%		
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				389.320.119	
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2	Dokumen		
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				187.500.000	
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2	Unit		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				287.400.000	
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Unit		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				258.050.000	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	72	Persentas e		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				54.650.000	
Meningkatnya fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	Persentase persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	60	%		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				14.850.000	
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	48	Dokumen		
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				39.800.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	49	Usaha		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				203.400.000	
Meningkatnya fasilitasi pengumpulan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang terkumpul	52	%		
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				103.400.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	6	Dokumen		
2.11.05.2.02.0005 - Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				100.000.000	
tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	1	Unit		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				281.900.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	88,69	%		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				281.900.000	
Meningkatnya fasilitasi izin lingkungan dan /atau izin PPLH	Persentase ijin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	100	%		
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				180.000.000	
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	33	Dokumen		
Meningkatnya kinerja pengawasan lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	Persentase kegiatan dan atau usaha yang dilakukan pengawasan	100	%		
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				281.900.000	
Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan ,izin PPLH dan PUU LH	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2	%		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				101.900.000	
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	520	Badan Usaha		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				2.891.707.525	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	75,25	Persentase		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.891.707.525	
Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	889	Lembaga		
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				440.978.508	
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				2.450.729.017	
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	889	Lembaga		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				354.602.786	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34,52	Persentase		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				354.602.786	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya penghargaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase terlaksananya penghargaan lingkungan yang di selenggarakan	100	%		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				354.602.786	
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	80	Entitas		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				225.090.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup	100	%		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				225.090.000	
Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang selesai di tangani	58	%		
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				192.000.000	
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	58	Perkara		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				33.090.000	
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	7	Pengaduan		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				102.792.644.178	
Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Persentase pengelolaan sampah	99,11	%		2.11.1.03.0.00.0 1.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Volume sampah masuk ke TPA per tahun	308.858,56	Ton		
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				102.792.644.178	
Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	31,57	%		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				130.000.000	
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2	Dokumen		
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				5.188.436.213	
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	153.333	Ton		
Terwujudnya pengembangan potensi dan kemitraan pengelolaan sampah yang aktif dan terintegrasi	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	68,43	%		
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				2.331.522.372	
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	33	Kelompok		
Meningkatnya kapasitas dan tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	68,43	%		
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				8.382.929.142	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3	Dokumen		
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				28.524.074.013	
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	170	Unit		
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				2.178.036.704	
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	263	Unit		
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengolahan sampah di TPA/TPST/SPA	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	68,43	%		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				8.583.407.365	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22	Unit		
Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	68,43	%		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				46.105.338.379	
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	500	Ton		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	68,43	%		
2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				1.368.899.990	
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	2	Dokumen		
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.288.430.577	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.618.651.507	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	%		2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkualitas	100	%		
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.310.620	
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	%		
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.295.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.295.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.295.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.295.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.295.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.295.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.295.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		
2.12.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.883.549.868	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	%		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.674.428.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	Orang/bulan		
2.12.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				205.841.060	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.105.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.105.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
2.12.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.070.808	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				87.000.000	
Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100	%		
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				87.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.811.485.764	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	%		
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.136.400	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.283.440	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				96.220.400	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.700.493.570	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				92.250.886	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket		
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				13.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				370.056.488	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				61.560.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen		
2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				432.984.580	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				98.889.678	
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				51.167.670	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	Unit		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.722.008	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.561.486.832	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.132.084.952	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.429.401.880	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.121.928.745	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100	%		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				286.613.100	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit		
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				16.143.840	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200	Unit		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				370.563.965	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	Unit		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				360.050.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit		
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya				88.557.840	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				80.289.810	
Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak	73	%		2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase perekaman KTP elektronik	99,4	%		
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				24.251.070	
Meningkatnya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	428.000	dokumen		
	Jumlah penerbitan KIA	32,125	dokumen		
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				4.371.810	
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	245	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				4.371.810	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	107.500	Dokumen		
2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				3.121.010	
Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2	Orang		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				7.443.220	
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan		
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				4.943.220	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323.200	Dokumen		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				12.976.440	
Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penataan pendaftaran penduduk	100	%		
2.12.02.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk				4.943.220	
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	12	Dokumen		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				8.033.220	
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6	Dokumen		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				34.194.780	
Meningkatnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	%		
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				13.693.220	
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12	Dokumen		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				7.443.220	
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12	Laporan		
Meningkatnya penyelenggaraan pindah datang penduduk	Persentase penyelenggaraan Pindah Datang Penduduk	100	%		
2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk				4.643.220	
Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	2	Dokumen		
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				4.224.300	
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1	Laporan		
2.12.02.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk				4.190.820	
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Dokumen		
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				8.867.520	
Meningkatnya penyelenggaraan pindah datang penduduk	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	100	%		
2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				4.643.220	
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12	Laporan		
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				4.224.300	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2	Laporan		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				96.327.360	
Meningkatnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98,45	%		2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	100	Persentase		
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				54.908.640	
Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	45,425	dokumen		
	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	20.900	dokumen		
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				32.239.960	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.425	Dokumen		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				9.909.960	
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12	Layanan		
2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil				4.458.760	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	12	Dokumen		
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				8.299.960	
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6	Paket		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				32.357.960	
Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%		
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				13.359.960	
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12	Laporan		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				7.109.960	
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	12	Laporan		
2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				4.643.220	
Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	2	Dokumen		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				4.554.000	
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1	Laporan		
2.12.03.2.02.0009 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				2.690.820	
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	1	Dokumen		
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				9.060.760	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil	100	%		
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				5.010.760	
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	12	Laporan		
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				4.050.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2	Laporan		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				383.392.480	
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100	%		2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				225.022.800	
Meningkatnya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				8.171.920	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12	Dokumen		
Meningkatnya kerjasama terkait urusan administrasi kependudukan	Persentase penyelenggaraan kerjasama administrasi kependudukan	26	%		
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4.403.720	
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	Laporan		
2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				13.269.320	
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10	Dokumen		
Meningkatnya inovasi pelayanan	Persentase penyelenggaraan inovasi administrasi kependudukan	100	%		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				101.993.270	
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	Laporan		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				97.184.570	
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6	Laporan		
Meningkatnya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%		
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				129.667.440	
Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan	Persentase pengumpulan Data Kependudukan	100	%		
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				10.658.360	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				3.878.220	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3	Dokumen		
Meningkatnya dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2	Laporan		
2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				115.130.860	
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2	Laporan		
2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6.908.360	
Meningkatnya Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100	%		
2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6.908.360	
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12	Dokumen		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				21.793.880	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%		
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				8.158.360	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	Laporan		
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				13.635.520	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2	Laporan		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				109.769.420	
Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100	%		2.12.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				109.769.420	
Meningkatnya penyediaan data kependudukan	Persentase penyediaan data kependudukan	100	%		
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				6.857.960	
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	Dokumen		
Meningkatnya Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	100	%		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				102.911.460	
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2	Dokumen		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.122.004.065	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				339.288.155	
Meningkatnya kualitas proses administrasi kelurahan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	100	%		2.08.2.13.0.00.0 1.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				339.288.155	
Meningkatnya kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	5	Kegiatan		
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				19.250.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1	Dokumen		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				20.064.900	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dokumen		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				25.755.405	
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	177	Orang		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				40.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	Dokumen		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				234.217.850	
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	Dokumen		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.782.715.910	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	100	%		2.08.2.13.0.00.0 1.0000 - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.782.715.910	
Meningkatnya kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	150	Orang		
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				219.700.000	
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	Dokumen		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				162.216.550	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				39.141.360	
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.265.750.000	
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	30	Dokumen		
Meningkatnya kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat	2	Kegiatan		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1.074.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6	Dokumen		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				21.908.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	Laporan		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				19.378.453.423	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.805.268.627	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	%		2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas	100	%		
2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				183.715.420	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.874.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
2.14.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.114.600	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.14.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.734.900	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.14.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.114.600	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.14.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.734.900	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.14.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				119.896.800	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
2.14.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.844.920.600	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.531.242.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan		
2.14.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				305.280.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.14.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.832.400	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen		
2.14.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.205.300	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.14.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.305.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
2.14.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.055.300	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				190.536.080	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	%		
2.14.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				22.735.300	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
2.14.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				167.800.780	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.049.991.631	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	%		
2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.999.950	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket		
2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.199.933	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket		
2.14.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.999.962	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket		
2.14.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				139.112.393	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket		
2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.670	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		
2.14.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				9.050.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				470.543.052	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
2.14.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				298.085.672	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen		
2.14.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				206.147.909	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.14.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				206.147.909	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit		
2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.612.149.382	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				436.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.176.149.382	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.717.807.605	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan	100	%		
2.14.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				719.595.440	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	Unit		
2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				137.252.929	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129	Unit		
2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				821.359.236	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				992.138.950	
Terkendalnya angka kelahiran penduduk	Age specific fertility rate/ASFR (15-19 tahun)	7,2	Angka		2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				270.950.000	
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan	1	dokumen		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				270.950.000	
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	8	Satuan Pendidikan		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				721.188.950	
Terlaksananya penyusunan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Jumlah dokumen profil kependudukan	1	Dokumen		
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				54.525.000	
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	107	Unit		
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				9.650.360	
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	Dokumen		
2.14.02.2.02.0028 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				35.400.000	
Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1	Dokumen		
Tersedianya sistem informasi pengendalian penduduk	Persentase penyediaan data pada sistem informasi pengendalian penduduk	100	%		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				504.450.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12	Dokumen		
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				17.175.000	
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	Laporan		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				99.988.590	
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Dokumen		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.083.615.299	
Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS)	Demand satisfied	77,6	%		2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1.495.700.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terdistribusikannya alat dan obat kontrasepsi	100	%		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				219.788.836	
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	16	Unit		
Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,76	%		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				690.625.000	
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.699	Orang		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				283.486.164	
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan		
2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria				50.450.000	
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30	Orang		
Menurunnya unmet need pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4,42	%		
2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				45.100.000	
Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2	Laporan		
2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				206.250.000	
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1	Kegiatan		
Menurunnya kehamilan tidak direncanakan	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	14,3	%		
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				768.941.028	
Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, KIE dalam 1 Tahun	16	Kegiatan		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				456.941.028	
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10	Laporan		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				312.000.000	
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	16	Dokumen		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				528.370.400	
Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB/PPKBD yang dibina	221	Orang		
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				414.450.400	
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7	Organisasi		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				113.920.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	Laporan		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1.290.603.871	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	87	%		
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				1.000.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	16	Unit		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				290.603.871	
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12	Dokumen		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.497.430.547	
Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Indeks lansia berdaya	58,66	Angka		2.14.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	91,7	Angka		
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.401.430.547	
Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Balita dan Lansia yang Dimiliki	2	Kelembagaan		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				27.000.000	
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10	Unit		
2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				40.035.311	
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40	Orang		
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				191.962.366	
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12	Laporan		
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				108.000.000	
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	500	Orang		
Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Remaja yang Dimiliki	2	Kelembagaan		
2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				245.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	40	Keluarga		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				498.398.780	
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Laporan		
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				291.034.090	
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	10	Kelompok		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				96.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	7	Organisas i		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				71.000.000	
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10	laporan		
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				25.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	12	Laporan		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				471.811.080.623	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				87.734.858.541	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan	100	%		2.15.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas	100	%		
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				139.638.620	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.782.200	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.225.300	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.225.300	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.225.300	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.225.300	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				79.709.600	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				29.823.015.800	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.184.835.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	Orang/bu lan		
2.15.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				619.528.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.817.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.617.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan		
2.15.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.217.600	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				187.122.690	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perhubungan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perhubungan	100	%		
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				99.897.780	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	Paket		
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				87.224.910	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	Orang		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				928.213.584	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	100	%		
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				81.161.557	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				121.090.788	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				76.682.507	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				107.773.007	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				124.588.925	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				46.297.800	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				366.290.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4.329.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.386.782.594	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	100	%		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				694.599.994	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				292.195.612	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	Unit		
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				399.986.988	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.594.385.088	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan	100	%		
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				34.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.754.451.048	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.805.934.040	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.175.700.166	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	100	%		
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.943.969.001	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	118	Unit		
2.15.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				137.728.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	13	Unit		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.589.350	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				319.679.845	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				124.301.618	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				549.832.352	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit		
2.15.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				40.500.000.000	
Meningkatnya Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100	%		
2.15.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				40.500.000.000	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				384.076.222.082	
Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah pendudukRasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	5,65	Rasio		2.15.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				72.414.250	
Terkelolanya Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Arus penumpang orang di Terminal Tipe C	100	%		
2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				56.840.250	
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	3	Dokumen		
2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C				7.150.000	
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	20	Orang		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				8.424.000	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3	Unit		
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				4.452.955.870	
Terselenggaranya Pemantauan angkutan	Persentase penyelenggaraan Pemantauan angkutan	100	%		
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				4.452.955.870	
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Laporan		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				270.815.968.601	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	%		
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				815.968.601	
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan		
Meningkatnya jumlah penumpang BRT	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				270.000.000.000	
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	281	Unit		
2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				266.252.390	
Terpenuhinya pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi	Persentase pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi	3	%		
2.15.02.2.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				266.252.390	
Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen		
2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				44.850.000	
Terpenuhinya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilaksanakan	100	%		
2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				44.850.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen		
Meningkatnya kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik fungsi kendaraan bermotor	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	1	%		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2.447.410.367	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan lalu lintas	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	33.51	%		
2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.008.550.800	
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	Dokumen		
Terlaksananya penertiban lalu lintas angkutan umum dan barang	Persentase pelaksanaan forum alalu lintas dan angkutan jalan	100	%		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				34.301.000	
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan		
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1.404.558.567	
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				15.662.000	
Terlakanaya penyelenggaraan pengawasan andalalin	Persentase penyelenggaraan pengawasan andalalin	100	%		
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				5.087.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2	Laporan		
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				10.575.000	
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12	Laporan		
Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	72,99	%		
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				199.312.873	
Pelaksanaan MRLl	Persentase Pelaksanaan MRLl (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)	100	%		
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				199.312.873	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2	Dokumen		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				99.493.407.598	
Tersedianya perlengkapan jalan	Persentase penyediaan perlengkapan jalan yang terlaksana	100	%		
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				27.752.095.073	
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	52	Unit		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				2.551.371.906	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	98	Unit		
Tersedianya Penerangan Jalan (PJU)	Persentase penyediaan Penerangan Jalan (PJU)	100	%		
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				39.024.977.639	
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300	Unit		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				30.164.962.980	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	25	Unit		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.069.889.565	
Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	Persentase penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	100	%		
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.112.910.456	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4	Unit		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				222.383.075	
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.300	Dokumen		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				734.596.033	
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35	Unit		
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan parkir on the street	Persentase pengelolaan parkir on the street	94	%		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				4.198.098.570	
Terpenuhinya pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Persentase pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100	%		
2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				120.271.990	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800	Dokumen		
Terlaksananya pendataan parkir	Persentase pemenuhan pendataan parkir	100	%		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4.077.826.580	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan		
Terlaksananya pemungutan retribusi parkir	Persentase pemenuhan pemungutan parkir	100	%		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4.077.826.580	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				73.959.154.406	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.302.593.859	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	%		2.16.2.20.2.21.0 1.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas	100	%		
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				207.380.440	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	100	persentas e		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				81.270.720	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.794.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.794.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.794.200	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.794.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.710.281	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan		
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.222.638	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.305.159.600	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	100	persentas e		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.864.117.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138	Orang/bu lan		
2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				423.660.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.562.432	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.489.504	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.330.664	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				286.565.020	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	persentas e		
2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				48.065.020	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				238.500.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150	Orang		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				776.803.875	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	persentas e		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				106.803.042	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				32.960.093	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				28.971.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	25	Laporan		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				344.043.920	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan		
2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				264.025.821	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				362.512.866	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	persentas e		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				362.512.866	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				918.436.848	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selesai ditindaklanjuti	100	persentas e		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				694.800.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				223.636.848	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.445.735.210	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan	100	persentas e		
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				472.147.380	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Unit		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				619.140.387	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.310.491.443	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				7.350.604.761	
Meningkatnya penyebaran informasi publik melalui media komunikasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	88,01	%		2.16.2.20.2.21.0 1.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				7.350.604.761	
Meningkatnya pelayanan informasi publik yang berkualitas	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	100	persentas e		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik Tersedianya Pelayanan Informasi Publik				628.107.880	
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5.600	Permohon an		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aspirasi masyarakat dan penyampaian informasi	Persentase pengaduan dan layanan darurat yang tertangani	100	persentas e		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				1.281.793.000	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5.500	Rekomen dasi		
Terwujudnya pengelolaan media komunikasi publik dalam mendukung penyebaran informasi	Persentase capaian konten media yang dipublikasikan	100	persentas e		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4.303.503.881	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5	Media		
Meningkatnya peran komunitas teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi	Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi	40	%		
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				7.350.604.761	
Meningkatnya kualitas strategi dan efektivitas komunikasi publik	Persentase rekomendasi menara telekomunikasi yang ditindaklanjuti	100	persentas e		
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				345.500.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100	Persentas e		
Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan strategis di bidang komunikasi dan teknologi informatika	Persentase peningkatan jumlah kolaborasi desiminasi informasi dengan komunitas TIK	100	persentas e		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				443.000.000	
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100	Persentas e		
Meningkatnya kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas di bidang TIK	100	persentas e		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				348.700.000	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90	Orang		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				42.305.955.786	
Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	100	%		2.16.2.20.2.21.0 1.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				42.305.955.786	
Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pemerintahan digital	Persentase layanan publik yang didukung dengan infrastruktur TIK yang memadai	100	persentas e		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				7.459.459.751	
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1	Laporan		
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan	Persentase pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100	persentas e		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				6.811.134.000	
Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517	Aplikasi		
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur internet dan intranet di lingkungan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	persentas e		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				23.713.016.505	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52	Perangkat Daerah		
Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan e-government	Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)	100	%		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				42.305.955.786	
Meningkatnya kualitas dan integrasi aplikasi layanan publik	Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi dalam satu portal layanan terpadu	100	persentas e		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				2.860.462.890	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan	517	Aplikasi		
Meningkatnya integrasi layanan manajemen data pemerintahan	Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan inte	100	%		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				1.461.882.640	
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penye	12	Dokumen		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				29.513.748.434	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.635.791.755	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90	%		2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas	100	%		
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63.619.620	
Tersedianya acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta Pelaporan Kinerja yang sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota semarang yang sesuai Peraturan Perundangan	100	%		
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.376.400	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				318.100	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				318.100	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.226.400	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan		
2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				46.995.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.041.041.800	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan Keuangan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.751.268.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	Orang/bulan		
2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				288.720.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				208.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				636.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				208.800	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				36.711.270	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	80	Nilai		
2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.480.470	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				31.230.800	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				871.120.669	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100	%		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				151.865.085	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				39.871.200	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				480.893.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				168.491.384	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				138.346.559	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100	%		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				138.346.559	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.352.024.680	
Terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				156.030.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.195.994.680	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.132.927.156	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai ketentuan	100	%		
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				370.356.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	Unit		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				73.620.956	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				649.350.200	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				522.543.070	
Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	55	%		2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				522.543.070	
Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase koperasi yang diawasi	23	%		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				522.543.070	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	318	Unit Usaha		
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan koperasi	Persentase koperasi yang diperiksa	32	%		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	318	Unit Usaha		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				304.866.930	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi sehat	44,1	%		2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				304.866.930	
Meningkatnya pengelolaan koperasi yang sehat sesuai regulasi yang berlaku	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	70	%		
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				304.866.930	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250	Unit Usaha		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				423.651.260	
Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	41,35	%		2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				423.651.260	
Meningkatnya kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	80	%		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				423.651.260	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	560	Orang		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				2.012.252.430	
Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	59,74	%		2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.012.252.430	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	1	%		
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				873.064.800	
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20	Kelompok Masyarakat		
Meningkatnya volume usaha koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	31	%		
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				141.148.600	
Fasilitas kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	120	Unit Usaha		
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				924.676.780	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500	Unit Usaha		
2.17.06.2.01.0007 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				73.362.250	
Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	50	Unit Usaha		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				5.454.088.600	
Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	67	%		2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				5.454.088.600	
Meningkatnya keberdayaan usaha mikro melalui Fasilitas Kemitraan Usaha	Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan	26	%		
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				161.000.000	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	225	Unit Usaha		
Meningkatnya Kualitas dan standarisasi Produk usaha mikro serta optimalnya fasilitas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas per	180	%		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				768.341.510	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	180	Unit Usaha		
2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro				650.000.000	
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500	Unit Usaha		
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				999.557.255	
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300	Unit Usaha		
Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, Kapasitas, Kompetensi, SDM Pelaku Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pel	55	%		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				2.444.903.785	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.570	Orang		
Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	25	%		
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				430.286.050	
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200	Unit Usaha		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				5.160.554.389	
Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20	Aduan		2.17.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				5.160.554.389	
Optimalnya inkubasi usaha mikro berbasis sektor unggulan atau klaster lokal	Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet	25	%		
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro				424.713.950	
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	Unit Usaha		
Meningkatnya omset Pelaku usaha Mikro yang dibina melalui perluasan akses pemasaran	Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	30	%		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				4.735.840.439	
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700	Unit Usaha		
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk pemasaran produk	Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	25	%		
Meningkatnya nilai jual usaha mikro melalui kemasan yang lebih berkualitas	Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	20	%		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				20.065.310.228	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.620.238.059	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	%		2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkualitas	100	%		
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.014.000	
Tersedianya Acuan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Beserta Pelaporan Kinerja yang Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%		
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.252.800	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				626.400	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				626.400	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				626.400	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				626.400	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				417.600	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan		
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.088.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.750.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.993.206.800	
Terwujudnya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.709.054.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	Orang/bulan		
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				282.900.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26	Dokumen		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				417.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				417.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan		
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				417.600	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				324.535.040	
Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Terpenuhinya Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%		
2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				38.871.000	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100	Unit		
2.18.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.100.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				198.692.440	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				82.871.600	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				487.642.014	
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras Kantor untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				92.634.732	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				111.375.060	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.615.800	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.644.150	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	Dokumen		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				221.380.985	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
2.18.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				21.491.287	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				701.323.708	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100	%		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				701.323.708	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100.00%	Unit		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.283.732.756	
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang untuk Mendukung Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				680.013.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.603.719.756	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				821.783.741	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				503.335.050	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unit		
2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.421.576	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				207.062.127	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.008.988	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				838.075.300	
Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2,5	%		
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				325.687.500	
Tersedianya Kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan		
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				146.808.200	
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				178.879.300	
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4	Dokumen		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				512.387.800	
Tersedianya Laporan Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2	Kegiatan		
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				147.125.000	
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				365.262.800	
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	Dokumen		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.299.710.926	
Meningkatnya eksposur potensi daerah kepada calon investor	Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan	75	%		
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.299.710.926	
Tersedianya Dokumen Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	Jumlah Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	2	Dokumen		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1.299.710.926	
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	Dokumen		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				2.581.529.699	
Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%		
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.581.529.699	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	6.000	Pengajuan Perizinan		
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				805.737.735	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Dokumen		
Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	6.000	Pengajuan Perizinan		
Tersedianya Data Perizinan yang Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan	6.000	Pengajuan Perizinan		
Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Perekonomian	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%		
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.581.529.699	
Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	2.600	Pengajuan Perizinan		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				733.183.540	
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.600	Pelaku Usaha		
Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	2.600	Pengajuan Perizinan		
Tersedianya Data Perizinan Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan	2.600	Pengajuan Perizinan		
Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada perizinan dasar dan Bidang Pembangunan	Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%		
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.581.529.699	
Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	1.100	Pengajuan Perizinan		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				613.799.600	
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.100	Pelaku Usaha		
Tersedianya Data engajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pemba	1.100	Pengajuan Perizinan		
Tersedianya Data Perizinan yang Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	1.100	Pengajuan Perizinan		
Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan penanaman modal dan perizinan yang ditindaklanjuti	95	%		
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.581.529.699	
Tersedianya Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	48	Laporan		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				428.808.824	
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	48	Kegiatan Usaha		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				458.075.300	
Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	100	%		2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				458.075.300	
Tersedianya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	4	Kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				180.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150	Pelaku Usaha		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				278.075.300	
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150	Kegiatan Usaha		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				267.680.944	
Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100	%		2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				267.680.944	
Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12	Laporan		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				267.680.944	
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen		
Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di monitoring dan dievaluasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				61.386.738.840	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.010.392.914	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	100	%		2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang berkualitas	100	%		
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				139.000.000	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100	%		
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				80.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan		
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan		
2.19.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				35.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.082.633.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.664.949.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	Orang/bulan		
2.19.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				393.684.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		
2.19.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen		
2.19.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.19.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				4.000.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen		
2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan		
2.19.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4.000.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				50.000.000	
Terwujudnya tertib administrasi pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.19.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				50.000.000	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen		
2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				98.472.160	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian OPD	100	%		
2.19.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				98.472.160	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				854.783.074	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100	%		
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bertambahnya sarana dan prasarana kantor	100	%		
2.19.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				45.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				344.492.060	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan		
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bertambahnya sarana dan prasarana kantor	100	%		
2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket		
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.213.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket		
2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.340.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket		
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				63.414.340	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket		
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.886.400	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket		
2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.780.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen		
2.19.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				160.657.274	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				203.229.520	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	%		
2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				300.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit		
2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				202.929.520	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.078.702.440	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				398.737.270	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
2.19.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.503.166	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.599.462.004	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.503.572.720	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan	100	%		
2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				456.700.720	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit		
2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				7.272.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit		
2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				3.215.000.000	
Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang terlibat dalam Kegiatan kepemudaan	1,29	%		2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.645.000.000	
Meningkatnya Wawasan dan Kapasitas Pemuda	Jumlah anggota aktif OKP	1500	Orang		
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				790.982.259	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4	Organisasi		
Meningkatnya Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa	Jumlah pemuda dalam kegiatan peningkatan SDM kepemudaan	200	Orang		
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				854.017.741	
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		Orang		
Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri	Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda	100	%		
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1.570.000.000	
Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula	Jumlah wirausaha muda yang berhasil	50	orang		
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota				873.060.020	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	300	Orang		
Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kepeloporan	100	orang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				187.703.580	
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	3	Kegiatan		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				509.236.400	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	1.000	Orang		
Meningkatnya kreativitas pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan festival kepemudaan	500	orang		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				36.761.345.926	
Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah	36,9	%		2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				2.329.788.620	
Tercapainya Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Jumlah atlet yang menerima penghargaan	1054	orang		
Tercapainya Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terintegrasi	8	tempat		
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1.989.788.620	
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10	Pelatda		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				340.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	700	Orang		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				25.000.000.000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan	66	Jumlah		
2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				25.000.000.000	
Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	Dokumen		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				2.456.944.196	
Terselenggaranya Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus	Jumlah Kejuaraan olahraga Rekreasi	2	kegiatan		
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1.500.000.000	
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2	Laporan		
2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				556.944.196	
Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7	Unit		
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				400.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	Lembaga		
Meningkatnya kejuaraan olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional	94,67	%		
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.620.000.000	
Kepuasan masyarakat terhadap layanan sarana dan prasarana olahraga	IKM pengguna sarana prasarana olahraga	91	angka		
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				2.370.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	8	Unit		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	3	tempat		
2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				250.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	3	Dokumen		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4.354.613.110	
Peningkatan ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah Penyelenggaraan single Event Kejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional	3	Kegiatan		
Terselenggaranya Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	Jumlah penyelenggaraan multi event	1	Kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan SDM keolahragaan	1	Kegiatan		
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1.080.000.000	
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	Kegiatan		
2.19.03.2.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota				1.900.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1	Kegiatan		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				1.374.613.110	
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1.000	Orang		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				2.400.000.000	
Meningkatnya peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	7,1	%		2.19.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				2.400.000.000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan kepramukaan	76	Kegiatan		
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				2.400.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4	Organisasi		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.076.077.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				1.076.077.000	
Meningkatnya kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik	100	%		2.16.2.20.2.21.0 1.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				1.076.077.000	
Meningkatnya Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data	Persentase Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data	100	persentase		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				142.512.250	
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	%		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				371.773.250	
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100	%		
Meningkatnya pemanfaatan dan diseminasi data statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang disebarluaskan	100	persentase		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				166.804.250	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34	Orang		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				100.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2	Laporan		
Meningkatnya Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data	Persentase Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data	100	Persentase		
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				171.005.250	
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100	%		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				123.982.000	
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	%		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.848.256.520	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.848.256.520	
Meningkatnya perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100	%		2.16.2.20.2.21.0 1.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.848.256.520	
Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi	Persentase penanganan kejadian risiko keamanan informasi	80	persentase		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1.848.256.520	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	Laporan		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				63.536.861.720	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.187.278.021	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	94,98	%		2.22.3.26.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas	100	%		
2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53.262.438	
Tersedianya Acuan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Beserta Pelaporan Kinerja Yang Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				636.200	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		
2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				345.500	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		
2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				345.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen		
2.22.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				417.600	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen		
2.22.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				417.600	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen		
2.22.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				877.400	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		
2.22.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.222.638	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.970.545.800	
Terwujudnya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yang Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.678.993.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	Orang/bulan		
2.22.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				290.300.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				417.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan		
2.22.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				417.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
2.22.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				417.600	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen		
2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				378.508.660	
Terwujudnya Layanan Kepegawaian Yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai layanan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	84,93	Nilai		
2.22.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				13.949.500	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		
2.22.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				160.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68	Orang		
2.22.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				204.559.160	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68	Orang		
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.228.305.363	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras Kantor Untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	%		
2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				142.913.100	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14	Paket		
2.22.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				195.743.605	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket		
2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.629.470	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket		
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				43.605.482	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14	Paket		
2.22.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				385.933.125	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	115	Laporan		
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.063.945.452	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62	Laporan		
2.22.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				357.535.129	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	Dokumen		
2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.066.902.397	
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	%		
2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.066.902.397	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit		
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.729.635.823	
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Untuk Mendukung Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				985.799.521	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.743.836.302	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				760.117.540	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan	100	%		
2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				374.695.540	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit		
2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				170.822.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
2.22.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				175.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125	Unit		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				10.990.872.397	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	63,74	%		2.22.3.26.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.187.046.000	
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Masyarakat Lokal Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	63,74	%		
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				6.187.046.000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	Objek		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.475.500.000	
Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Komunitas Seni Budaya	60	%		
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				2.475.500.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10	Objek		
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.328.326.397	
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Adat Yang Ada di Kota Semarang	Persentase Apresiasi Lembaga Adat yang dibina	64	%		
2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				2.328.326.397	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.678	Orang		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				19.900.711.302	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	29,3	%		2.22.3.26.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				19.900.711.302	
Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar /Kelompok Seni Budaya yang ada di Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya	27,47	%		
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				6.575.751.900	
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	625	Sertifikat		
Meningkatnya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya	Persentase Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya	27,47	%		
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				13.324.959.402	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	180	Lembaga		
Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal		%		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				458.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	84,24	%		2.22.3.26.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan	43,12	%		
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	86,78	%		
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	4,5	%		
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				458.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Semarang	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	84,24	%		
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				458.000.000	
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	588	Objek		
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				21.920.390.305	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.173.811.118	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	%		2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas	100	%		
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				129.960.827	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.064.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		
2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.805.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		
2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.805.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
2.23.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.327.500	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.23.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.327.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.132.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan		
2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.505.600	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		
2.23.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				92.994.227	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.341.510.400	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.110.174.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82	Orang/bulan		
2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				228.622.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.044.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				835.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan		
2.23.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				835.200	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.452.280	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	%		
2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				452.280	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77	Orang		
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				282.544.386	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	%		
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.669.800	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket		
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.460.060	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket		
2.23.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.363.910	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11	Paket		
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.558.170	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket		
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.024.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		
2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.400.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen		
2.23.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.710.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
2.23.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				72.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen		
2.23.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				87.358.446	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Dokumen		
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.453.870.931	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	%		
2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.863.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.424.007.931	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.435.742.498	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				372.664.928	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.063.077.570	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				509.729.795	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan sesuai ketentuan	100	%		
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				406.005.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Unit		
2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.126.095	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit		
2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.998.700	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.542.522.477	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	84,83	Angka		2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.186.534.277	
Meningkatnya Nilai akreditasi perpustakaan daerah kota Semarang	Nilai Akreditasi Perpustakaan Daerah Kota Semarang	92	Nilai		
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				54.834.550	
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	14	Perpustakaan		
2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				30.950.000	
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2	Layanan		
2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				10.458.000	
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1.000	Eksemplar		
2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi				541.287.999	
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	1	Dokumen		
Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	Persentase Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	100	%		
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				29.151.800	
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	45	Perpustakaan		
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				1.000.000	
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	35	Perpustakaan		
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				46.200.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Orang		
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				24.332.990	
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2	Dokumen		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				355.988.200	
Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkat kan minat membaca masyarakat	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkat kan minat membaca masyarakat	100	%		
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				94.591.160	
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2	Orang		
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				5.000.000	
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	15	Perpustakaan		
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				8.700.000	
Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15	Perpustakaan		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				12.102.790	
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3	Orang		
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				235.594.250	
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2	Lokus		
Meningkatnya layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang	0,07	Rasio		
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.186.534.277	
Meningkatnya layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	Persentase layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	100	%		
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				321.006.885	
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	3	Perpustakaan		
Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	100	%		
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				125.609.080	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200	Eksemplar		
2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				1.702.973	
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	175	Eksemplar		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				204.056.710	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100	%		2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				109.347.340	
Meningkatnya perawatan koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100	%		
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				18.714.800	
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2	Orang		
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				90.632.540	
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2	Eksemplar		
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				94.709.370	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya perawatan koleksi budaya etnis nusantara	Persentase Terawatnya koleksi budaya etnis nusantara	100	%		
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				64.342.830	
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2	Eksemplar		
2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				30.366.540	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2	Eksemplar		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.635.216.454	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				1.079.928.884	
Meningkatnya kesesuaian pengelolaan arsip	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip	80	%		2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				203.629.580	
Meningkatnya arsip dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase arsip Dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	%		
2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				23.491.280	
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100	Berkas		
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				9.830.950	
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100	Berkas		
Meningkatnya Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	Persentase Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	90	%		
2.24.02.2.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis				19.981.320	
Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1	Unit		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				178.655.509	
Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	%		
2.24.02.2.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip				44.145.419	
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1	Naskah		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				98.744.680	
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	200	Arsip		
2.24.02.2.02.0005 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				24.650.000	
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	1	Dokumen		
Meningkatnya ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip	84	%		
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				203.629.580	
Meningkatnya OPD yang telah dilaksanakan audit kearsipan	Persentase OPD yang telah dilaksanakan audit kearsipan	100	%		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				89.528.190	
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	47	Laporan		
2.24.02.2.01.0005 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				4.371.120	
Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	47	Lembaga		
2.24.02.2.01.0009 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				1.612.200	
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	47	Laporan		
Meningkatnya perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	Persentase perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	100	%		
2.24.02.2.01.0006 - Penyusunan Database Arsiparis				1.724.400	
Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	23	Dokumen		
2.24.02.2.01.0007 - Pemilihan Arsiparis Teladan				37.731.680	
Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	1	Orang		
2.24.02.2.01.0008 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip				1.105.420	
Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	1	Lembaga		
2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota				14.253.020	
Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	47	Instansi		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				178.655.509	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	Persentase Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	100	%		
2.24.02.2.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				11.115.410	
Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	55	Arsip		
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				697.643.795	
Meningkatnya jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	%		
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				196.263.475	
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100	Pengguna		
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				501.380.320	
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	47	Laporan		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				514.146.390	
Meningkatnya cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	64,5	%		2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				43.449.821	
Meningkatnya kesesuaian kegiatan Pemusnahan arsip	Tingkat kesesuaian kegiatan Pemusnahan arsip	100	Angka		
2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				9.080.600	
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100	Berkas		
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				34.369.221	
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100	Arsip		
2.24.03.2.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				49.082.250	
Meningkatnya kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana	100	%		
2.24.03.2.02.0001 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana				25.572.950	
Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	110	Arsip		
2.24.03.2.02.0002 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana				23.509.300	
Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	110	Arsip		
2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				54.952.089	
Meningkatnya arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	Persentase arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	82	%		
2.24.03.2.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang				17.174.670	
Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	110	Arsip		
2.24.03.2.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				25.344.400	
Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	30	Arsip		
2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				12.433.019	
Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	30	Arsip		
Meningkatnya penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	70	%		
2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				34.989.470	
Meningkatnya arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	Presentase arsip yang terselamat kan dari OPD yang digabung/dibubarkan	82	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1.975.770	
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	Daftar		
2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				9.564.900	
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	Arsip		
2.24.03.2.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				1.724.400	
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1	Arsip		
2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				21.724.400	
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	25	Arsip		
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				331.672.760	
Meningkatnya autentikasi dan alih media arsip statis	Persentase autentikasi dan alih media arsip statis	82	%		
2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1.780.500	
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	110	Arsip		
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				329.892.260	
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	110	Arsip		
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				41.141.180	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	84	%		2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota				41.141.180	
Meningkatnya usulan pengajuan pengguna an arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	Persentase usulan pengajuan pengguna an arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	84	%		
2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				28.641.180	
Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5	SOP		
2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				12.500.000	
Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	210	Arsip		
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.567.308.100	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.769.479.900	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	100	%		3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perikanan yang berkualitas	100	%		
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47.154.600	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				318.100	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen		
3.25.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				318.100	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
3.25.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				318.100	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
3.25.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				318.100	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
3.25.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				318.100	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				318.100	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		
3.25.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.246.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.031.256.300	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.762.202.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/bulan		
3.25.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				268.100.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				318.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
3.25.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				318.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan		
3.25.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				318.100	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.141.400	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perikanan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perikanan	81,6	Nilai		
3.25.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				318.100	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
3.25.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37.823.300	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				356.778.600	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perikanan	100	%		
3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.387.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.987.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.543.600	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		
3.25.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				40.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112.733.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
3.25.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				129.128.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.648.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	100	%		
3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.665.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.983.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.784.361.000	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perikanan yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				211.800.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.25.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.061.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan		
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.493.500.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				449.140.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perikanan sesuai ketentuan	100	%		
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				339.924.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit		
3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.260.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit		
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.421.951.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.201,00	Ton		3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				665.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terkelola	100	%		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				665.000.000	
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50	Unit		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				519.900.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	100	%		
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				519.900.000	
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	Orang		
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				237.051.000	
Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Persentase Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	100	%		
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				237.051.000	
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.754.552.200	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.120,00	Ton/Tahun		3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				1.502.745.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	10	%		
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1.502.745.000	
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10	Kelompok		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.251.807.200	
Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Prasarana Pembudidayaan Ikan yang Terkelola	100	%		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				459.065.200	
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.251.807.200	
Meningkatnya pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan	Persentase unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan	100	%		
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				792.742.000	
Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	1	Unit		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				498.537.000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan kawasan konservasi	0,5	Hektar		3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota				498.537.000	
Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	100	%		
3.25.05.2.01.0011 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan				498.537.000	
Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	1	Unit		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				2.122.788.000	
Meningkatnya preferensi masyarakat akan konsumsi pangan bergizi berbasis ikan	Angka Konsumsi Ikan	45,06	Kg/Kapita/Tahun		3.25.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				1.128.227.000	
Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100	%		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				1.128.227.000	
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5	Unit Usaha		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				994.561.000	
Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	100	%		
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				600.527.000	
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.887,95	Ton/Tahun		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				394.034.000	
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10	Pelaku Usaha		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				15.851.217.263	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				8.603.928.273	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	8,5	%		2.22.3.26.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota				1.259.114.400	
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100	%		
3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota				1.259.114.400	
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Unit		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				7.235.488.773	
Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Semarang	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100	%		
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				682.207.450	
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3	Lokasi		
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				6.377.088.654	
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6	Unit		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				176.192.669	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	4	Laporan		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota				109.325.100	
Meningkatnya Pariwisata Berkualitas	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	85	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				109.325.100	
Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14	Laporan		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				3.783.736.250	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	8,5	%		2.22.3.26.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3.783.736.250	
Meningkatnya Kerjasama Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri , Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Kerjasama Pariwisata yang terealisasi	100	%		
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				150.000.000	
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	Dokumen		
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100	%		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				2.011.736.250	
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	14	Kegiatan		
Meningkatnya Pemasaran Promosi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Efektivitas Media Promosi	8,5	%		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1.622.000.000	
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	28	Promosi		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				3.463.552.740	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	35	%		2.22.3.26.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				3.463.552.740	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Profesional	35	%		
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				3.463.552.740	
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	3.200	Orang		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif		Dokumen		
Meningkatnya Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif		%		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				45.254.320.604	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.365.275.537	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pertanian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian	100	%		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas	100	%		
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.902.639	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja & keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas	30	dokumen		
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.300.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen		
3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.520.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.520.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.520.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.520.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.300.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	Laporan		
3.27.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah				76.222.639	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	Dokumen		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.878.011.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pertanian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian	100	%		
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.631.401.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128	Orang/bulan		
3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				242.110.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan		
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan		
3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.500.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				191.672.600	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pertanian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pertanian	85	angka		
3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				463.600	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		
3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				191.209.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125	Orang		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				483.866.858	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian	100	%		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				175.142.900	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket		
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				13.800.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		
3.27.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.356.250	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.991.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				159.576.708	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				256.659.800	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	100	%		
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				123.805.600	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	172	Unit		
3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				132.854.200	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.769.116.360	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat tindak lanjut kepada Dinas Pertanian yang selesai ditindaklanjuti	12	%		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				518.349.064	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.250.767.296	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.701.046.280	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian sesuai ketentuan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				485.032.820	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	Unit		
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				198.474.845	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	Unit		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				973.582.615	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				8.252.353.226	
Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	78	%		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517	
Tersedianya alsintan untuk mendukung usaha tani dan peternakan	Jumlah alsintan yang disediakan	5	unit		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1.200.482.773	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10	Laporan		
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan	2	kelompok tani		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2.771.109.744	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8	Laporan		
Meningkatnya produksi hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan	26.226,30	Ton		
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517	
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Hortikultura dan Perkebunan	16	kelompok tani		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1.200.482.773	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	Laporan		
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan	2	kelompok tani		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2.771.109.744	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	23	Laporan		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				1.397.368.999	
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bibit yang dihasilkan kebun dinas	6100	bibit		
	Jumlah hasil produksi pertanian kebun dinas	19100	kg		
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1.397.368.999	
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6	Dokumen		
Meningkatnya produksi peternakan	jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur	8.016,73	Ton		
	jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging	32.495,63	Ton		
	jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu	1.587,98	Liter		
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517	
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan	2	kelompok tani		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2.771.109.744	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.588.238.710	
Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peternak yang Memberikan Pakan Ternak Tambahan	62	%		
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				2.588.238.710	
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	10	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				11.800.000	
Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan di tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	35	%		
3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				11.800.000	
Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	13	Laporan		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				283.353.000	
Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak yang Disebarkan Untuk Pengembangan Populasi Ternak	450	ekor		
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				283.353.000	
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	450	Ekor		
Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman pangan	27.536,00	Ton		
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517	
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi tanaman pangan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Tanaman Pangan	9	kelompok tani		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1.200.482.773	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10	Laporan		
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan	2	kelompok tani		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2.771.109.744	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan		
Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2	kelompok tani		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				9.303.503.766	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	22,7	%		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				223.000.000	
Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Pertanian	2	dokumen		
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				223.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2	Laporan		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				9.080.503.766	
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi yang dibangun atau direhabilitasi	16	unit		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				4.273.872.000	
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	8	Unit		
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dibangun atau direhabilitasi	2	unit		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				2.641.128.000	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8	Unit		
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan yang dibangun atau direhabilitasi	4	unit		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				2.165.503.766	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6	Unit		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				723.707.304	
Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5	%		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				377.750.000	
Terjaminnya Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Area atau Daerah yang Terdapat Kasus Penyakit Hewan Menular	14	kelurahan		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				377.750.000	
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12	Laporan		
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				41.790.700	
Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan hewan dan produk hewan yang keluar maupun masuk wilayah Kota Semarang	100	%		
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12	kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				26.609.751	
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12	laporan		
3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan				15.180.949	
Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	12	Laporan		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				304.166.604	
Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet	96	%		
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				160.538.000	
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	Laporan		
3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				16.377.942	
Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	35	Unit Usaha		
3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan				41.440.000	
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	2	Orang		
3.27.04.2.04.0009 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				85.210.662	
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	35	Produk		
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				600.000	
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	35	Unit Usaha		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				141.230.000	
Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada hortikultura dan perkebunan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan	100	%		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				141.230.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	11	kelompok tani		
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100.000.000	
Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25	Ha		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				41.230.000	
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5	Ha		
Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada tanaman pangan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan	100	%		
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				141.230.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas tanaman pangan	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Pangan	25	kelompok tani		
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100.000.000	
Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	70	Ha		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				41.230.000	
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	15	Ha		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.468.250.771	
Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian	2	%		3.27.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.468.250.771	
Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	Jumlah kelembagaan kelompok tani yang berkualitas	5	kelompok tani		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				1.059.712.272	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	Unit		
Meningkatnya kinerja balai penyuluh pertanian	Persentase kinerja Balai Penyuluh Pertanian	100	%		
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				199.999.999	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	Unit		
Meningkatnya penyusunan/pemutakhiran serta diseminasi metode dan informasi penyuluhan pertanian	Persentase penyusunan/ pemutakhiran materi penyuluhan	100	%		
	Jumlah kegiatan diseminasi informasi	5	kegiatan		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				33.835.000	
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2	Unit		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				174.703.500	
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasiikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	5	Dokumen		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				59.037.732.911	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				49.760.707.061	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan	90,25	%		3.30.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERDAGANGAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas	100	%		
3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.902.900	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.673.400	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
3.30.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.215.200	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
3.30.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.124.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
3.30.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.190.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
3.30.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.190.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.510.100	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				30.764.897.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				30.397.840.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219	Orang/bulan		
3.30.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				364.320.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
3.30.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.042.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				847.400	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan		
3.30.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				847.400	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				450.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perdagangan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perdagangan	70	Nilai		
3.30.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				450.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				833.070.740	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket		
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.070.740	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket		
3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket		
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				250.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket		
3.30.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				150.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				159.638.184	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Persentase pemenuhan penyediaan barang milik daerah Dinas Perdagangan	100	%		
3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				159.638.184	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit		
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.637.388.748	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perdagangan yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.021.968.751	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				11.615.419.998	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				906.809.489	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perdagangan sesuai ketentuan	100	%		
3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				547.684.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unit		
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				334.161.589	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	460	Unit		
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.963.900	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				30.000.000	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100	%		3.30.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				30.000.000	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi	Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan	2.000	Dokumen		
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				30.000.000	
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.000	Dokumen		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				7.052.335.823	
Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	10	%		3.30.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5.104.959.776	
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	50	Unit		
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				4.112.876.056	
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	Unit		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				992.083.720	
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	Unit		
Meningkatnya pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				1.947.376.047	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	6	korwil		
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				857.376.047	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen		
Meningkatnya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi yang dibina	100	%		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				1.947.376.047	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Diberdayakan	6	korwil		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1.090.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				233.961.027	
Meningkatnya iklim perdagangan yang stabil dan adil	Koefisien harga antar waktu	10	Koefisien		3.30.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				233.961.027	
Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok	Tingkat Inflasi Komoditas Makanan	5±2	angka		
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				233.961.027	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	Laporan		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				667.679.000	
Meningkatnya akses produk lokal ke pasar internasional	Nilai ekspor non migas	1.561.55 2.042,00	US\$		3.30.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				667.679.000	
Terselenggaranya promosi dagang melalui pameran dan misi dagang	Persentase Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	10	%		
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				291.679.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	Pelaku Usaha		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				300.000.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	Pelaku Usaha		
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				76.000.000	
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20	Produk		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				670.450.000	
Meningkatnya hak dan keamanan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	92,12	%		3.30.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				670.450.000	
Meningkatnya hak dan keamanan konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang Diawasi dan Diukur Mutu Produknya	92	%		
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				506.752.643	
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	51.225	Unit		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				163.697.357	
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	240	Orang		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				622.600.000	
Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi di dalam negeri	100	%		3.30.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				622.600.000	
Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	%		
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				550.000.000	
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120	UMKM		
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				72.600.000	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	150	UMKM		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				25.815.264.026	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.837.584.041	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perindustrian	90	%		3.31.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perindustrian yang berkualitas	100	%		
3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				82.493.520	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja perencanaan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
3.31.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.217.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
3.31.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.757.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		
3.31.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.864.700	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
3.31.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.970.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
3.31.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.434.400	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
3.31.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.004.100	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
3.31.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.757.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
3.31.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.105.398.190	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
3.31.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.841.970.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/bulan		
3.31.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				237.240.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
3.31.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				23.375.790	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen		
3.31.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.083.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
3.31.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.083.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
3.31.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				646.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				51.938.000	
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
3.31.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				50.646.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		
3.31.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				646.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		
3.31.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				646.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				118.477.221	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perindustrian	Persentase Nilai layanan kepegawaian Dinas Perindustrian	90	%		
3.31.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.031.600	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		
3.31.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				117.445.621	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70	Orang		
3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				954.206.014	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perindustrian	100	%		
3.31.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket		
3.31.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				215.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket		
3.31.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				60.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket		
3.31.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				78.925.412	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
3.31.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				269.142.200	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
3.31.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				281.138.402	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		
3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				258.202.905	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	100	%		
3.31.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				258.202.905	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit		
3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.563.209.016	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perindustrian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perindustrian yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
3.31.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				249.732.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
3.31.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				166.685.948	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan		
3.31.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.146.791.067	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				703.659.174	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perindustrian sesuai ketentuan	100	%		
3.31.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
3.31.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				274.239.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	Unit		
3.31.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.770.174	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit		
3.31.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				325.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit		
3.31.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				8.941.136.985	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya pelaku IKM yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal	Persentase Pertambahan IKM	0,65	%		3.31.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				8.941.136.985	
Meningkatnya Jumlah IKM	Pertambahan Jumlah IKM	25	angka		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2.821.544.585	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	32	Dokumen		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				335.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7	Dokumen		
Meningkatnya sentra IKM sebagai pusat produksi dalam mendukung perekonomian lokal	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	87	%		
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				8.941.136.985	
Meningkatnya Jumlah Sentra IKM	Pertambahan Jumlah Sentra IKM	1	angka		
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				55.000.000	
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3	Dokumen		
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				187.500.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6	Dokumen		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5.465.692.400	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13	Dokumen		
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				76.400.000	
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	5	Dokumen		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				1.930.274.576	
Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas	6,73	%		3.31.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				1.930.274.576	
Meningkatnya Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi	Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi	38	Izin		
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				24.500.000	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5	Dokumen		
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				1.905.774.576	
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	8	Dokumen		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				2.106.268.424	
Meningkatnya efisiensi integrasi sistem pengelolaan industri nasional untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan sektor industri lokal	Persentase IKM yang terdaftar di SIINas	2,32	%		3.31.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				2.106.268.424	
Meningkatnya Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	170	IKM		
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1.223.243.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	8	Dokumen		
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				227.500.000	
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2	Dokumen		
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				655.525.424	
Terantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	Dokumen		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				292.539.776.574	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				171.466.636.534	
Meningkatnya kinerja keprotokolan, peliputan dan publikasi secara efektif	Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan, dan publikasi	89	Nilai		4.01.0.00.0.00.0 1.0017 - BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				20.740.371.177	
Terlaksananya layanan keprotokolan pada kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase layanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	100	%		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				2.001.243.114	
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12	Laporan		
Terlaksananya publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	100	%		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				13.531.384.168	
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12	Laporan		
Terlaksannaya dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	100	%		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				5.207.743.895	
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan		
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	100	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0009 - BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				277.109.948	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Sekretariat Daerah	86	Nilai		
4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.993.456	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				274.116.492	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.925.582.650	
Meningkatnya fasilitas kunjungan tamu	Persentase fasilitas kunjungan tamu	100	%		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.282.788.140	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	%		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.598.287.050	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	Laporan		
4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				44.507.460	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Dokumen		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.152.867.592	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan surat menyurat	100	%		
Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	%		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				38.566.994	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.115.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
Terpenuhinya jasa pelayanan umum Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum	100	%		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.999.300.598	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.308.057.400	
Tercapainya penggunaan dana penunjang dan operasional KDH/WKDH	Persentase digunakannya dana penunjang dan operasional KDH/WKDH	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				46.398.000	
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.261.659.400	
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan		
Meningkatnya kualitas layanan rumah tangga Sekretariat Daerah	Persentase kinerja Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah	100	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0012 - BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.284.205	
Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				19.284.205	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				292.426.869	
Terpenuhinya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	100	%		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				292.426.869	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.481.271.960	
Tercapainya kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Sekretariat Daerah	100	%		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.214.465.289	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				576.102.747	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				228.049.550	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		
4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.462.654.374	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.945.891.316	
Tercapainya pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah	100	%		
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000.009	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit		
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.298.421.405	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.052.662.880	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80	Unit		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.594.807.021	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	170	Unit		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.293.587.812	
Tersedianya kebutuhan jasa pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	%		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.215.744.881	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan		
Tersedianya pemenuhan jasa pelayan umum kantor	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	100	%		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.077.842.931	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.403.892.036	
Meningkatnya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, Mebel dan Peralatan Mesin lainnya	Persentase pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, Mebel dan Peralatan Mesin lainnya	100	%		
Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan /Operasional Lapangan	Persentase pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan /Operasional Lapangan	100	%		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				182.679.360	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.786.355.978	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	149	Unit		
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				149.976.274	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	260	Unit		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.332.482.386	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250	Unit		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.952.398.038	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.746.829.842	
Terlaksananya tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.746.829.842	
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket		
4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				4.362.012.500	
Tercapainya fasilitasi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase fasilitasi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.982.012.500	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.380.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket		
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas	100	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0018 - BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.288.600	
Tersedianya dokumen administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Persentase rekomendasi atas laporan kinerja OPD yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	%		
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				725.300	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.085.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.624.300	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.853.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				49.812.668.200	
Terlaksananya administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Persentase administrasi keuangan Sekretariat Daerah	100	%		
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				48.793.604.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280	Orang/bulan		
Tersedianya dokumen pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	100	%		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.016.592.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				536.700	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.617.400	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				318.100	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				491.856.879	
Tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	100	%		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				491.856.879	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				239.313.000	
Terlaksananya administrasi keuangan KDH dan WKDH	Presentase Administrasi Keuangan KDH dan WKDH	100	%		
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				239.313.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan		
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Sekretariat Daerah	Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas	100	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0004 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				67.120.395	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang dihasilkan	100	%		
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.897.757	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.222.638	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas	100	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0014 - BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				677.970.000	
Tersedianya dokumen pelaporan kinerja OPD sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase rekomendasi atas laporan kinerja OPD yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	%		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				677.970.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan		
Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi	42,27	Indeks		4.01.0.00.0.00.0 1.0008 - BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				3.220.234.154	
Terpenuhinya Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen kematangan organisasi perangkat daerah	100	%		
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				644.038.792	
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Dokumen		
Terpenuhinya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tingkat pemenuhan laporan Survey Kepuasan Masyarakat	100	%		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1.827.772.688	
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan		
Terpenuhinya Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tingkat pemenuhan laporan Reformasi Birokrasi	100	%		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				748.422.674	
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				111.951.702.506	
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	100	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0002 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				3.990.455.217	
Tercapainya kinerja administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Persentase kinerja administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	83,5	%		
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				2.845.965.180	
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	Dokumen		
Terwujudnya peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan administrasi kewilayahan	Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan administrasi kewilayahan	100	%		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				574.903.787	
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	Dokumen		
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	100	%		
4.01.02.2.01.0004 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				569.586.250	
Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	16	Perangkat Daerah		
Meningkatnya kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan peran pemerintah daerah pada kerangka otonomi	Tingkat efektivitas kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah	85	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0014 - BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				185.580.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terpenuhinya tingkat fasilitasi dan sinkronisasi hubungan antar lembaga pemerintahan	Persentase tingkat fasilitasi dan sinkronisasi hubungan antar lembaga	70	%		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				185.580.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen		
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				5.397.714.554	
Tercapainya peningkatan hasil kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Daerah lain dan pihak ketiga dalam negeri	Persentase peningkatan hasil Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga dalam negeri	60	%		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1.417.840.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	22	Dokumen		
Tercapainya peningkatan kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga di Luar Negeri	Persentase peningkatan Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri	60	%		
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				3.979.874.554	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4	Dokumen		
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	Persentase		4.01.0.00.0.00.0 1.0001 - BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				4.136.522.816	
Terlaksananya penetapan dan pengundangan Produk Hukum Daerah	Persentase ditetapkan dan diundangkannya produk hukum daerah	100	%		
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				467.304.563	
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565	Dokumen		
Terlaksananya bantuan hukum yang diberikan kepada warga Kota Semarang dan Perangkat Daerah	Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada warga Kota Semarang dan Perangkat Daerah	100	%		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				1.004.704.811	
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55	Kasus		
Tercapainya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase pendokumentasian produk hukum daerah dan pengelolaan informasi hukum	100	%		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				2.664.513.442	
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	550	Dokumen		
Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0005 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				98.241.429.919	
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase capaian fasilitasi kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	100	%		
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				78.957.747.361	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13	Dokumen		
Tercapainya fasilitasi kegiatan kesejahteraan Sosial	Persentase capaian fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial	100	%		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				17.750.738.410	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11	Dokumen		
Tercapainya fasilitasi kegiatan kesejahteraan Masyarakat	Persentase capaian fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat	100	%		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				1.532.944.148	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7	Dokumen		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				9.121.437.534	
Meningkatnya efektivitas pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	100	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0015 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				6.983.278.625	
Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan perekonomian berbasis potensi lokal unggulan	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal	100	%		
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3.836.308.400	
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8	Dokumen		
4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)				501.342.420	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				291.744.642	
Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	Persentase perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	100	%		
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				291.744.642	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6	Dokumen		
Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	24,89	Angka		4.01.0.00.0.00.0 1.0011 - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	24,81	Angka		
	Nilai tingkat kematangan UKPBJ	40	Angka		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.339.178.984	
Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100	%		
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				715.507.543	
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen		
Meningkatnya Pengelolaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	100	%		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				214.047.924	
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	Dokumen		
Meningkatnya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100	%		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				409.623.517	
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40	Orang		
Meningkatnya ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	82	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0004 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				507.235.283	
Meningkatnya kualitas fasilitasi penyusunan program pembangunan	Persentase terlaksananya fasilitasi program Pembangunan	100	%		
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				178.936.509	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Dokumen		
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Persentase terlaksananya pengendalian dan evaluasi program Pembangunan	100	%		
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				199.063.979	
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Laporan		
Meningkatnya kualitas pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Persentase terlaksananya pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	100	%		
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				129.234.795	
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan		
Meningkatnya kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada good governance	Persentase capaian target dividen BUMD	98,50	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0015 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	87,18	Angka		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				6.983.278.625	
Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan pada BUMD	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan pada BUMD	100	%		
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1.317.686.071	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	7	Dokumen		
Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR, serta kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR, serta kegiatan pengendalian perekonomian	100	%		4.01.0.00.0.00.0 1.0015 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				6.983.278.625	
Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program CSR	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program CSR	100	%		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1.327.941.734	
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan		
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				122.696.639.475	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				70.916.132.291	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	95	%		4.02.0.00.0.00.0 1.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				101.376.620	
Tersedianya pelaporan kinerja Sekertariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
4.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				384.752.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	100	%		
4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.752.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				377.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.815.441.619	
Terpenuhinya penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Sarana prasarana yang Berjalan Baik	100	%		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				546.246.304	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				268.834.877	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				156.470.750	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1	Dokumen		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.178.723.800	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				999.192.023	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
4.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				665.973.865	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				142.996.145	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pengadaan BMD Sekretariat DPRD	100	%		
4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit		
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.546.145	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	Unit		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.826.253.600	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.998.500	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.698.728	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.575.556.372	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.466.611.058	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	92,5	%		
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				199.688.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				666.457.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	Unit		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.989.058	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248	Unit		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.477.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				159.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				50.356.668.649	
Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	95,5	%		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.107.302.649	
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	Paket		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				78.690.000	
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	Orang		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				300.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD	Prosentase ketertiban pelayanan administrasi DPRD	100	%		
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				300.000	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	Paket		
Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	95	%		
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				101.376.620	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.496.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.852.600	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.852.600	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.806.200	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.852.600	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.271.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
4.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.751.732.600	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%		
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.326.890.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang/bulan		
4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				417.120.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.385.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.817.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan		
4.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.520.400	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				50.356.668.649	
Terwujudnya tertib layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	95,5	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				49.170.676.000	
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	Orang/Bulan		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				51.780.507.184	
Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	95,3	%		4.02.0.00.0.00.0 1.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				8.524.075.300	
Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,6	%		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2.855.575.300	
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				980.500.000	
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12	Dokumen		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				14.257.420.029	
Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	92	%		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.328.349.207	
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen		
Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	81	%		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				7.549.693.325	
Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan	85,5	%		
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				22.482.600	
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	Dokumen		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				7.527.210.725	
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150	Dokumen		
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan perundang-undangan	95,3	%		
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				21.449.318.530	
Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang dibahas	80	%		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20.143.559.340	
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	Dokumen		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				1.305.759.190	
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8	Dokumen		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				8.524.075.300	
Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,6	%		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4.688.000.000	
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	Orang		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				14.257.420.029	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	92	%		
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				11.929.070.822	
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen		
5.01 - PERENCANAAN				24.119.996.482	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.202.758.287	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	96,83	%		5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	100	%		
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.451.000	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.255.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.640.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.640.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.510.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.510.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.675.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				46.221.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.087.736.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.748.981.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan		
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				336.804.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				836.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				695.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				420.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				144.808.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,5	angka		
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				420.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				144.388.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64	Orang		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.116.190.287	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.240.287	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	Laporan		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				614.400.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan		
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				408.550.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				43.030.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	%		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.030.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.957.000	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.592.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				183.365.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				555.586.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	100	%		
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				360.866.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.940.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.180.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.626.100.000	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	44,6	Angka		5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.700.000.000	
Tersedianya perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				255.000.000	
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				125.000.000	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				270.000.000	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				1.050.000.000	
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	Dokumen		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				335.000.000	
Terpenuhinya analisis data dan informasi untuk kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				335.000.000	
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dokumen		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				591.100.000	
Perencanaan pembangunan daerah yang terkendali dan terevaluasi dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				340.000.000	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				251.100.000	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				8.291.138.195	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	46,69	Angka		5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				3.221.138.195	
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.139.888.195	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen		
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Infrastruktur Dasar	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dasar	100	%		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				638.750.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	Laporan		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				418.750.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	Laporan		
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	100	%		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.023.750.000	
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen		
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	46,69	Angka		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				2.585.000.000	
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Pemerintahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	100%	%		
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				325.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				300.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	Laporan		
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	100	%		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.180.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen		
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100	%		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				780.000.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6	Laporan		
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian & SDA	46,69	Angka		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				2.485.000.000	
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Makro	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Makro	100%	%		
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.343.500.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen		
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Dunia Usaha	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Dunia Usaha	100	%		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				466.500.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	100	%		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				610.500.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				64.500.000	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	Laporan		
5.02 - KEUANGAN				224.909.659.478	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				187.684.250.183	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	90,25	%		5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas	100	%		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				76.375.320	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.155.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.571.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.571.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				8.695.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.696.600	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.441.100	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				55.851.183.200	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				54.918.792.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	Orang/bulan		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				930.264.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				636.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.282.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				208.800	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				285.276.304	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	80	%		
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				179.860.004	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				31.940.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				58.752.500	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14.723.800	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.483.896.838	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah	100	%		
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				63.577.150	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.348.580	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	Paket		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.310.979	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	Paket		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				169.998.937	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				37.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60	Laporan		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				842.403.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				41.400.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen		
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.142.358.192	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				104.556.845	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah	100	%		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				94.817.849	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.712.506	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit		
5.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				3.026.490	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	Unit		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.785.467.243	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				124.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				572.281.360	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan		
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.835.351	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168	Laporan		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.868.350.532	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.232.350.213	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan	100	%		
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.172.939.110	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109	Unit		
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				16.143.840	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				478.797.817	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520	Unit		
5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.513.446	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15	Unit		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	100	%		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,50	%		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				59.776.186	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.585.300	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen		
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				717.060	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.453.322	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.170.382	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.453.322	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.151.180	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan		
5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.257.205.198	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.767.685.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bulan		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				488.120.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				474.414	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				451.370	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan		
5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				474.414	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				126.174.300	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85	%		
5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				700.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				125.474.300	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.163.747.679	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	%		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				162.755.545	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.922.079	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				54.237.314	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36	Laporan		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				507.619.739	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				70.096.064	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen		
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				345.116.938	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				167.824.685	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	%		
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.899.996	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				141.924.689	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.341.973.564	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				89.753.277.192	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				588.696.372	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				748.442.608	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan	100	%		
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.633.310	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.853.298	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170	Unit		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				17.610.132.810	
Meningkatnya kualitas dan ketepatan penyusunan APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100	%		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.921.081.429	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100	%		
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				65.507.671	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				65.543.014	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				434.391.463	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				365.323.013	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	Dokumen		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Penganggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Anggaran dan Pelaksanaan Pembinaan Penganggaran Perangkat Daerah	100	%		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				893.138.100	
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	Dokumen		
5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1.914.273	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	Dokumen		
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56.995.441	
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200	Orang		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Penunjang Keuangan	Persentase Tersusunnya Dokumen Penunjang Keuangan	100	%		
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				23.406.437	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	Dokumen		
5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				5.492.018	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Dokumen		
Meningkatnya Kualitas Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Presentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	100	%		
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				9.370.000	
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52	Dokumen		
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan	100	%		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				395.961.263	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	%		
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				19.277.582	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624	Laporan		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				6.651.342	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12	Dokumen		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				39.960.312	
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				28.842.357	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	Laporan		
Meningkatnya Pemahaman Perangkat Daerah Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100	%		
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				23.980.713	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6	Dokumen		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				13.823.894	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250	Orang		
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				8.974.147	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39	Lembaga		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tepat Waktu	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				166.214.663	
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	Dokumen		
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				15.578.320	
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen		
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				57.595.663	
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen		
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				15.062.270	
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen		
Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran	Persentase Realisasi Belanja	93,43	%		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				293.090.118	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer	Persentase Pengelolaan Dana Transfer	100	%		
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				79.619.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.016	Dokumen		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				51.145.815	
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	91	Dokumen		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				16.900.000	
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	24	Dokumen		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12.400.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2	Laporan		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				5.000.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	16	Dokumen		
Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah	Presentase Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah	100	%		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				46.510.800	
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	20.000	Dokumen		
Meningkatnya Pemahaman Perangkat Daerah atas Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang Memahami dan Menerapkan Penatausahaan Keuangan Sesuai Regulasi	100	%		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				81.514.504	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	800	Orang		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				15.000.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Pencairan Dana Darurat dan Mendesak sesuai dengan Ketentuan	Presentase Pencairan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan Ketentuan	100	%		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				15.000.000.000	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.750.452.851	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan akuntabel	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.750.452.851	
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100	%		
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				106.593.205	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				23.456.246	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen		
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				138.414.469	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				323.930.804	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11	Laporan		
Meningkatnya Pemahaman Prangkat Daerah, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	100	%		
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				1.111.590.066	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10	Laporan		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				630.645.936	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10	Laporan		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				54.629.552	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	Laporan		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				251.978.423	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	Dokumen		
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				15.782.564	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Orang		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Kebijakan Barang Milik Daerah	100	%		
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				93.431.587	
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				16.864.823.634	
Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	82	%		5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				16.864.823.634	
Meningkatnya kualitas pengelolaan data base pajak daerah dan retribusi yang akuntabel	Persentase database pajak daerah yang akuntabel	71	%		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				651.880.000	
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6	Dokumen		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				634.486.960	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan		
Meningkatnya kualitas proses pengawasan dan pengendalian pendapatan pajak dan retribusi daerah	Persentase pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah	67,7	%		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				93.292.860	
Terlaksananannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	Dokumen		
Meningkatnya kualitas dan integrasi sistem informasi perpajakan daerah	Jumlah laporan berbasis sistem yang digunakan dalam pengambilan kebijakan	12	dokumen		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3.515.111.359	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				330.591.620	
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	Laporan		
Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	69	%		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				16.864.823.634	
Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah I dan penatausahaan piutangnya	Persentase wajib pajak daerah I yang tertagih dan penatusahaan piutangnya	10,5	%		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				2.892.489.610	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen		
Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah II dan penatausahaan piutangnya	Persentase wajib pajak daerah II yang tertagih dan penatusahaan piutangnya	23,03	%		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				465.779.250	
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya ketersediaan data pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Jumlah laporan penerimaan pajak daerah yang disusun	12	Laporan		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				118.190.650	
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen		
Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	96	%		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				16.864.823.634	
Meningkatnya penyelesaian dokumen pelayanan wajib pajak daerah	Persentase terselesaikanya dokumen pelayanan wajib pajak daerah	86	%		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.031.054.172	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	Layanan		
Meningkatnya kualitas penghitungan pajak daerah secara tepat	Persentase terpenuhinya penghitungan pajak daerah secara tepat	82	%		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				3.066.012.810	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen		
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak daerah	3	%		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				486.019.720	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan		
Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	1,12	%		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				16.864.823.634	
Meningkatnya akuntabilitas pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I	Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I yang akuntabel	1,96	%		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				204.102.568	
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	21.600	Obyek Pajak		
Meningkatnya akuntabilitas pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II	Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II yang akuntable	4,07	%		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				563.638.635	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4	Unit		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				597.969.060	
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan		
Meningkatnya efektivitas penyusunan data dan analisis potensi pajak daerah	Jumlah analisis potensi pajak daerah yang disusun	2	Dokumen		
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				214.204.360	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dokumen		
5.03 - KEPEGAWAIAN				24.006.708.642	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.768.082.390	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas	100	%		5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100	%		
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				135.860.720	
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai peraturan perundangan	82	Nilai		
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				76.385.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.285.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		
5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.285.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.603.600	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
5.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.285.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.770.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
5.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.352.016.800	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selesai ditindaklanjuti yang sesuai peraturan perundangan	5	kegiatan		
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.006.589.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	Orang/bulan		
5.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				341.368.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.674.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.192.500	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
5.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.192.500	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				161.838.881	
Meningkatnya kemampuan ASN BKPP Kota Semarang	Nilai Layanan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selesai ditindaklanjuti	1	Kegiatan		
5.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.014.800	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen		
5.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				160.824.081	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				966.780.256	
Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8	Kegiatan		
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				73.323.770	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket		
5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				166.391.065	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				95.443.811	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				83.989.260	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.119.801	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1	Dokumen		
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				75.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				274.268.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan		
5.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				196.744.550	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89.896.393	
Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1	Kegiatan		
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.896.393	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.347.850.320	
Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3	Kegiatan		
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				559.546.656	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan		
5.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				269.626.720	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.518.676.944	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				713.839.020	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4	Kegiatan		
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				376.527.740	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit		
5.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				30.228.230	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit		
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				263.127.050	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.238.626.252	
Meningkatnya kinerja ASN yang berkualitas	Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	95	%		5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.351.507.730	
Meningkatnya kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95	%		
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				184.828.350	
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen		
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				786.452.450	
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	365	Orang		
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				266.852.940	
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.000	Orang		
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				86.261.460	
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	Laporan		
5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				27.112.530	
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25	Dokumen		
Meningkatnya kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	95	Persentase		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				1.457.608.000	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	95	%		
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				350.000.000	
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350	Dokumen		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				170.500.000	
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.400	Dokumen		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				937.108.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300	Dokumen		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				1.884.284.772	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	95	%		
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				357.888.422	
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100	Orang		
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				1.223.300.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	Orang		
5.03.02.2.03.0013 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				197.947.390	
Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300	Orang		
5.03.02.2.03.0014 - Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				105.148.960	
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	430	Orang		
Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan jabatan	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	95,5	Persentase		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.545.225.750	
Meningkatnya kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95	%		
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				245.890.114	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dokumen		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				431.415.796	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi				433.657.578	
Pemberhentian					
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	666	Dokumen		
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				20.445.140	
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				413.817.123	
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9.000	Dokumen		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.727.354.887	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.727.354.887	
Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Fungsional	55	%		5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Persentase ASN yang memiliki hasil diklat dengan kriteria berkualitas	95	%		
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				993.351.929	
Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	95	%		
5.04.02.2.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				24.000.000	
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen		
5.04.02.2.01.0002 - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				194.000.000	
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	600	Dokumen		
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				726.354.660	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600	Orang		
5.04.02.2.01.0004 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				48.997.269	
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dokumen		
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.734.002.958	
Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	95	%		
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.734.002.958	
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	Laporan		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.607.425.987	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.611.857.626	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	100	%		5.05.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%		
5.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				101.734.415	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
5.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				27.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen		
5.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				636.200	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
5.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				636.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
5.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				636.200	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
5.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				636.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
5.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.943.995	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
5.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
5.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.504.789.600	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%		
5.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.218.597.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang/bulan		
5.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				284.284.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen		
5.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				636.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
5.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				636.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
5.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				636.200	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
5.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				48.250.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%		
5.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				48.250.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				400.929.043	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%		
5.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.230.600	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket		
5.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.249.360	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	Paket		
5.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.909.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket		
5.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		
5.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				38.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	Laporan		
5.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.818.100	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan		
5.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				44.721.983	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
5.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				379.163.568	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada BRIDA yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
5.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.027.965	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan		
5.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.044.619	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan		
5.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				252.090.984	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
5.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				176.991.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan	100	%		
5.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.956.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
5.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.035.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				4.995.568.361	
Meningkatnya penyelenggaraan inovasi daerah	Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	100	%		5.05.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				2.067.322.172	
Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	%		
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1.190.906.704	
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	Dokumen		
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				578.499.310	
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2	Laporan		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				159.753.558	
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	Laporan		
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				138.162.600	
Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan		
Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	50	%		
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				952.929.442	
Tersusunnya laporan kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pengkajian peraturan	Persentase Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	100	%		
5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				952.929.442	
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5	Laporan		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				804.101.776	
Tersusunnya kajian dalam bidang Sosial dan Kependudukan serta budaya Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100	%		
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				804.101.776	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4	Dokumen		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				1.171.214.971	
Tersusunnya kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100	%		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				759.214.971	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	11	Dokumen		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				412.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5	Dokumen		
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				31.646.662.305	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.344.236.548	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat	100	%		6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat yang berkualitas	100	%		
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63.780.800	
Tersedianya acuan pelaksanaan program. kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.670.400	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.088.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.088.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.132.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.132.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
Tersedianya pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.670.400	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.261.689.600	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.906.840.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bulan		
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				346.860.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.505.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.857.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				626.400	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.000.000	
Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.930.091.200	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Inspektorat	Nilai layanan kepegawaian Inspektorat	90,50	%		
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.100.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.172.373.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	Orang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				750.618.200	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	360	Orang		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.854.291.689	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Inspektorat	100	%		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				118.159.875	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				102.078.934	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				118.353.701	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.772.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				106.104.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				767.176.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				636.647.179	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				116.351.932	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	100	%		
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.476.400	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				47.969.200	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.673.102	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit		
6.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.233.230	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				449.408.904	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Inspektorat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.983.800	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				440.425.104	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				663.622.423	
Terpenuhinya Pemeliharaan aset pada Inspektorat Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	%		
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.625.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				434.531.515	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit		
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				9.817.200	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	Unit		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				92.605.624	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	Unit		
6.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.043.084	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	45	Unit		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.905.673.737	
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP lainnya, dan BPK yang ditindaklanjuti	88,2	%		6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.021.539.287	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	100	%		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				968.031.087	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	Kesepakatan		
Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan	100	%		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				348.707.749	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Dokumen		
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	88,2	%		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.021.539.287	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	100	%		
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				331.800.000	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	Laporan		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				679.200.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23	Laporan		
Terselenggaranya reviu laporan kinerja	Persentase Terselenggaranya reviu laporan kinerja	100	%		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				557.746.012	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				884.134.450	
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	100	%		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				824.104.450	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	Laporan		
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	88,2	%		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.021.539.287	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	100	%		
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				331.800.000	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	Laporan		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				679.200.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23	Laporan		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				884.134.450	
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	100	%		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				824.104.450	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	Laporan		
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	88,2	%		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.021.539.287	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	100	%		
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				331.800.000	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	Laporan		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				679.200.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23	Laporan		
Terselenggaranya reviu laporan kinerja	Persentase Terselenggaranya reviu laporan kinerja	100	%		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				136.054.440	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				884.134.450	
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	100	%		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				824.104.450	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	Laporan		
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	88,2	%		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.021.539.287	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	100	%		
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				331.800.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	Laporan		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				679.200.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23	Laporan		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				884.134.450	
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	100	%		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				824.104.450	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	Laporan		
Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	88,2	%		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.021.539.287	
Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah V	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	100	%		
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				331.800.000	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Laporan		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				679.200.000	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8	Laporan		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				884.134.450	
Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	100	%		
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				60.030.000	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				824.104.450	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	80	Laporan		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.396.752.020	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	100	%		6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				446.241.520	
Tersusunnya dokumen kebijakan teknis pengawasan	Persentase dokumen kebijakan teknis yang disusun	100	%		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				358.725.000	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	Rekomen dasi		
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	100	%		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.950.510.500	
Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	100	%		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.327.439.680	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	Kegiatan		
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	100	%		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.950.510.500	
Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi	Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi	100	%		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				542.967.720	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51	perangkat daerah		
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	100	%		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.950.510.500	
Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah	100	%		
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				842.421.600	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51	perangkat daerah		
Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				446.241.520	
Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan	Persentase dokumen perencanaan pengawasan yang disusun	100	%		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				87.516.520	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomen dasi		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.950.510.500	
Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penegakan integritas	Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penegakan integritas	100	%		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				237.681.500	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50	perangkat daerah		
7.01 - KECAMATAN				964.154.744.136	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				358.007.955.140	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	96,67	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				106.026.200	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Selatan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				49.957.700	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.244.500	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.244.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.244.500	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.244.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.590.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.500.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.849.596.800	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.426.888.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				416.288.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.301.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.817.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.301.800	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96.380.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Selatan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	89	Angka		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.500.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75.880.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				756.538.860	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan	100	%		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.322.360	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				44.132.300	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				144.463.200	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				185.066.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				262.555.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				364.140.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				364.140.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.738.750.000	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				210.750.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.528.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				826.555.764	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				319.171.440	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				123.600.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				383.784.324	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang berkualitas	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.109.220	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Utara beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.157.600	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				289.400	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				418.900	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				289.400	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				418.900	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				289.400	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.604.439.400	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.970.175.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				631.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				289.400	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.685.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				289.400	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				16.462.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	89	Angka		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.462.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				513.548.519	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara	100	%		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.705.638	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.379.280	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				65.101.500	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				319.057.785	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				21.304.316	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.150.405.412	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.150.405.412	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.406.397.402	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				167.156.104	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.239.241.298	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				542.199.343	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				205.014.180	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				175.713.481	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				161.471.682	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang berkualitas	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - KECAMATAN SEMARANG BARAT
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	96,67	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96.552.620	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Barat beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				41.807.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.017.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.017.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.017.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.017.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.432.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.789.187.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.982.329.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				802.180.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.357.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.964.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.357.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.376.800	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	86	%		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8.629.600	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				21.747.200	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				698.877.002	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Barat	100	%		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				159.920.073	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31.088.679	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				94.250.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88.684.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				324.934.250	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				447.514.904	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				447.514.904	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.459.001.120	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.774.500	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.208.226.620	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				845.283.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Barat sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				514.455.020	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				83.889.980	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				246.938.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang berkualitas	100	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				93.872.020	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				42.265.900	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.590.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.679.275.400	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.118.056.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				559.947.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				318.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				636.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				318.100	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				54.761.682	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	84	Angka		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.365.841	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				39.395.841	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	185	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				678.730.835	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur	100	%		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				187.706.616	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				47.887.479	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.990.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				247.146.740	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				626.616.502	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				626.616.502	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.814.707.530	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.480.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.616.227.530	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				664.698.030	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				202.941.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.757.030	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				319.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.273.820	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Tengah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.709.600	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.689.200	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.689.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.980.100	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.980.100	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.980.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.065.456.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.251.593.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				802.550.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.396.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.146.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.771.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Tengah	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	89	%		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				702.886.773	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah	100	%		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.752.428	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				31.805.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.775.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				555.554.345	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				623.687.200	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				623.687.200	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.922.869.740	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Tengah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Tengah yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.752.869.740	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				773.114.900	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				374.114.900	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				129.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				270.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunung Pati	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gunung Pati yang berkualitas	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - KECAMATAN GUNUNG PATI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunung Pati	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.046.820	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				779.200	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.012.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.012.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.012.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.012.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				974.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.582.150.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.701.216.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				879.960.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				194.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				584.400	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				194.800	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.570.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gunungpati	90	Nilai		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				26.300.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.270.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				725.765.250	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati	100	%		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				131.424.600	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.240.074	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				9.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				165.269.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				404.331.576	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				704.603.280	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				704.603.280	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.017.358.896	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				228.426.900	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.788.931.996	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.082.515.443	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				416.225.580	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				122.261.434	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				544.028.429	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN TUGU
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tugu yang berkualitas	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				122.527.820	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tugu beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				69.824.400	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.112.200	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.112.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				336.200	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				336.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				561.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.208.282.600	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.850.946.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				357.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				56.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				224.400	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				56.100	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				180.989.091	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tugu	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Tugu	89	Angka		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				13.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				167.989.091	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				488.050.494	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu	100	%		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.874.836	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				88.680.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				86.655.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.840.658	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				717.582.200	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				717.582.200	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.026.164.406	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				918.164.406	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				762.450.441	
Terpeliharanya barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240.579.620	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.066.568	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				411.804.253	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	96,33	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - KECAMATAN MIJEN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Mijen yang berkualitas	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.709.380	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				389.600	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				253.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				253.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				253.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				253.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.160	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.207.989.600	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.365.440.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				842.160.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				97.400	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				194.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				97.400	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				187.370.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Mijen	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Mijen	89	Angka		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				390.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				186.980.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				977.888.888	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen	100	%		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				77.459.767	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.986.181	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				24.990.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				164.999.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				692.453.940	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				668.314.970	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				668.314.970	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.191.330.845	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.848.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.974.482.845	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				527.221.167	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				255.136.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				161.401.943	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.683.225	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Genuk yang berkualitas	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - KECAMATAN GENUK
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				212.321.740	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				109.098.320	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.798.800	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				17.918.800	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.798.800	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				18.555.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.906.400	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.053.709.400	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.384.913.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				664.650.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.968.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				208.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.968.800	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				56.476.100	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Genuk	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Genuk	89	Angka		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				208.800	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				56.267.300	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				518.399.107	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				83.812.618	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.828.959	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				53.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				284.589.870	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				82.667.661	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				249.663.065	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				249.663.065	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.044.351.614	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				183.871.524	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.860.480.090	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.203.153.542	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				386.136.240	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				318.891.572	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				498.125.730	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang berkualitas	100	%		7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	97	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.800.000	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gajahmungkur beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.200.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.600.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				16.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.824.147.000	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.335.247.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				483.500.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.800.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.800.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.800.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gajahmungkur	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	90	Angka		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				170.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				446.600.000	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur	100	%		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.600.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				121.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				461.250.000	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	100	%		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				461.250.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.003.222.176	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.803.222.176	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				425.000.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur sesuai ketentuan	100	%		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				175.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				170.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN TEMBALANG
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.158.720	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tembalang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				51.429.800	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.295.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.295.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.469.500	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.469.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				954.300	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.402.160.200	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.643.758.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				757.120.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				427.400	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				427.400	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				427.400	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				188.621.627	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135	Orang		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				517.600	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				188.104.027	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				717.614.015	
Terpenuhiya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				86.409.023	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.051.068	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				80.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				164.374.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				373.779.924	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				608.000.213	
Terpenuhiya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				608.000.213	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.856.507.328	
Terpenuhiya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Tembalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				144.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.712.507.328	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				653.678.310	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				162.324.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				160.248.580	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				331.105.730	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	96,67	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - KECAMATAN CANDISARI
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.462.320	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				41.286.700	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.396.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.396.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.246.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.246.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.646.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.219.908.600	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.814.235.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				400.410.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.068.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.536.700	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				658.800	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				16.090.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370	Orang		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8.500.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7.590.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				553.723.623	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	76.179.740	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.122.473	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				94.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.395.330	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				275.526.080	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				460.374.760	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				460.374.760	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.884.942.898	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.724.942.898	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				547.630.738	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				235.834.620	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				121.796.118	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				190.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN BANYUMANIK
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Banyumanik yang berkualitas	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				206.332.208	
Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				153.896.188	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.552.800	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.044.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.670.400	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.670.400	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.252.800	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.536.978.600	
Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.713.337.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				816.960.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.296.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.505.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.879.200	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.540.000	
Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370	Orang		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.270.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.270.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				530.070.782	
Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	Laporan		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				135.300.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.363.313	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				171.101.080	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				193.306.389	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				446.981.305	
Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				446.981.305	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.111.051.326	
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Banyumanik yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				260.548.680	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.850.502.646	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				803.880.426	
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik sesuai ketentuan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	Unit		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				318.038.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				107.092.426	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				378.750.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	96,67	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - KECAMATAN NGALIYAN
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.635.120	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngaliyan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.208.800	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				208.800	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				208.800	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				208.800	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				208.800	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				345.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.642.497.400	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.055.391.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				586.480.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				208.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				208.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				208.800	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57.508.800	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	121	Orang		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				208.800	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				57.300.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	121	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				488.393.457	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				58.500.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				211.115.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				208.778.457	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				954.434.260	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				954.434.260	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.981.446.907	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				248.504.911	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.732.941.996	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				586.876.827	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				381.587.297	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				139.559.530	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.730.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gayamsari yang berkualitas	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - KECAMATAN GAYAMSARI
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	92	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				93.872.020	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gayamsari beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				42.265.900	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.192.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.590.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.429.864.400	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.031.062.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				397.530.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				318.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				636.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				318.100	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.388.800	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9.600.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.788.800	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				446.712.205	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Dokumen		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	Paket		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				53.575.429	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.762.860	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				123.724.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				252.649.916	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				384.925.248	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				384.925.248	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.483.456.932	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				208.914.492	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.274.542.440	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				307.879.586	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	Unit		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.001.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.878.586	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Pedurungan yang berkualitas	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN PEDURUNGAN
	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	100	%		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				76.476.820	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pedurungan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.038.700	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.882.700	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.882.700	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.926.700	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				6.926.700	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.573.700	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.957.692.800	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.221.817.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103	Orang/bulan		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				728.380.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.446.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.978.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.071.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.098.374.141	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	Paket		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				495.128.528	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	Paket		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.165.201	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				127.570.738	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.020.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				418.489.674	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				108.026.462	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				108.026.462	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.111.174.796	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				270.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.841.174.796	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.278.343.026	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82	Unit		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	Unit		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				198.196.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82	Unit		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				130.206.349	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	Unit		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				949.940.677	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				35.334.163.379	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				555.700.000	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	%		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				548.700.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				146.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Selatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				146.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				408.800.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				408.800.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0001 - KELURAHAN BULUSTALAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bulustalan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Buluistalan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0002 - KELURAHAN BARUSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Barusari	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Barusari	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0003 - KELURAHAN RANDUSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Randusari	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Randusari	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0004 - KELURAHAN MUGASSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mugassari	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mugassari	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0005 - KELURAHAN PLEBURAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pleburan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pleburan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0006 - KELURAHAN WONODRI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonodri	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonodri	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0007 - KELURAHAN PETERONGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Peterongan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Peterongan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0008 - KELURAHAN LAMPER LOR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Lor	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Lor	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0009 - KELURAHAN LAMPER KIDUL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Kidul	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Kidul	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0010 - KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Tengah	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Tengah	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				211.804.786	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	%		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1.500.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				210.304.786	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				301.979.565	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Utara	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				301.979.565	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				213.101.778	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				213.101.778	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0001 - KELURAHAN PLOMBOKAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				86.960.151	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Plombokan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Plombokan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				86.960.151	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.945.500	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Plombokan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Plombokan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.945.500	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0002 - KELURAHAN BULU LOR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				136.206.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bulu Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bulu Lor	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				136.206.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.791.500	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bulu Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulu Lor	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.791.500	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0003 - KELURAHAN PURWOSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				92.700.767	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwosari	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				92.700.767	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.945.500	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Purwosari	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.945.500	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0004 - KELURAHAN KUNINGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				110.303.403	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kuningan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kuningan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.303.403	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.901.500	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kuningan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kuningan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.901.500	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0005 - KELURAHAN PANGGUNG LOR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				116.808.100	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Panggung Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Panggung Lor	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				116.808.100	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.918.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Panggung Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Panggung Lor	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.918.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0006 - KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.437.020	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Panggung Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Panggung Kidul	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.437.020	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.945.500	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Panggung Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Panggung Kidul	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.945.500	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0007 - KELURAHAN BANDARHARJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				111.593.941	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bandarharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bandarharjo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				111.593.941	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.791.500	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bandarharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bandarharjo	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.791.500	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0008 - KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				140.079.348	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tanjung Mas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tanjung Mas	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				140.079.348	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.764.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tanjung Mas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tanjung Mas	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.764.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0009 - KELURAHAN DADAPSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				92.038.815	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Dadapsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Dadapsari	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				92.038.815	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.314.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Dadapsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Dadapsari	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13.314.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				818.926.480	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	%		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				30.878.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				788.048.480	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				124.198.840	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				124.198.840	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				111.288.290	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Semarang Barat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kecamatan Semarang Barat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				111.288.290	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0001 - KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Ngemplak Simongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Simongan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				52.091.200	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngemplak Simongan)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Simongan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				52.091.200	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0002 - KELURAHAN MANYARAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Manyaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Manyaran	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				59.774.900	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Manyaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Manyaran	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				59.774.900	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0003 - KELURAHAN KRAPYAK
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Krapyak	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Krapyak	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				51.404.900	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Krapyak	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Krapyak	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				51.404.900	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0004 - KELURAHAN TAMBAKHARJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tambakharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambakharjo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				44.889.300	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Tambakharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Tambakharjo	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				44.889.300	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	126.000.000	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0005 - KELURAHAN KALIBANTENG KULON
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tambakharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalibanteng Kulon	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				42.754.900	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kalibanteng Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Kalibanteng Kulon	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				42.754.900	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0006 - KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kalibanteng Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalibanteng Kidul	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				41.079.900	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kalibanteng Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Kalibanteng Kidul	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				41.079.900	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0007 - KELURAHAN GISIKDRONO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gisikdrono	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Gisikdrono	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				66.124.800	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Gisikdrono	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Gisikdrono	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				66.124.800	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0008 - KELURAHAN BONGSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bongsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Bongsari	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				48.854.900	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bongsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Bongsari	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				48.854.900	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0009 - KELURAHAN BOJONGSALAMAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bojongsalaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Bojongsalaman	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				56.525.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bojongsalaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Bojongsalaman	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				56.525.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0010 - KELURAHAN SALAMAN MLOYO

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Salaman Mloyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Salaman Mloyo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				42.754.900	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Salaman Mloyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Salaman Mloyo	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				42.754.900	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0011 - KELURAHAN CABEAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Cabean	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Cabean	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				30.673.090	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Cabean	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Cabean	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.673.090	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0012 - KELURAHAN KARANGAYU
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangayu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Karangayu	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				43.754.900	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Karangayu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Karangayu	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				43.754.900	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0013 - KELURAHAN KROBOKAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Krobokan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Krobokan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				68.591.200	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Krobokan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Krobokan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				68.591.200	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0014 - KELURAHAN TAWANGSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tawangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Tawangsari	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				54.550.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Tawangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Tawangsari	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				54.550.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0015 - KELURAHAN TAWANGMAS
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tawangmas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Tawangmas	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				53.954.900	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Tawangmas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Tawangmas	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				53.954.900	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0016 - KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kembangarum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngemplak Kembangarum	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				62.654.900	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kembangarum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Kembangarum	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				62.654.900	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87.624.370	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di Kecamatan Semarang Timur	100	%		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3.924.300	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				83.700.070	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				586.705.161	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Timur	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				586.705.161	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				371.949.800	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Semarang Timur	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				371.949.800	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0001 - KELURAHAN KEMIJEN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88.050.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kemijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kemijen	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.050.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.950.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kemijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Kemijen	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.950.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0002 - KELURAHAN REJOMULYO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				82.800.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Rejomulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Rejomulyo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				82.800.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.200.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Rejomulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Rejomulyo	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.200.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0003 - KELURAHAN MLATIBARU
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				78.800.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mlatibaru	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mlatibaru	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				78.800.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.200.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mlatibaru	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Mlatibaru	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.200.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0004 - KELURAHAN MLATIHARJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				80.175.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mlatiharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mlatiharjo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.175.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.825.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mlatiharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Mlatiharjo	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.825.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0005 - KELURAHAN KEBONAGUNG
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				82.100.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kebonagung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kebunagung	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				82.100.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.900.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kebonagung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Kebonagung	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11.900.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0006 - KELURAHAN BUGANGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				80.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bugangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bugangan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bugangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Bugangan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0007 - KELURAHAN SARIREJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				80.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sarirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sarirejo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sarirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Sarirejo	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0008 - KELURAHAN REJOSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				96.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Rejosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Rejosari	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				96.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Rejosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Rejosari	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0009 - KELURAHAN KARANGTURI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangturi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangturi	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.500.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangturi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Karangturi	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.500.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0010 - KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				83.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangtempel	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangtempel	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				83.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangtempel	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di kelurahan Bugangan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				153.412.000	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				143.412.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				192.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				192.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				151.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				151.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0001 - KELURAHAN MIROTO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0002 - KELURAHAN BRUMBUNGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0003 - KELURAHAN JAGALAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0004 - KELURAHAN KRANGGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0005 - KELURAHAN GABAHAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0006 - KELURAHAN KEMBANGSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0007 - KELURAHAN SEKAYU
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0008 - KELURAHAN PANDANSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0009 - KELURAHAN BANGUNHARJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				142.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				142.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0010 - KELURAHAN KAUMAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				142.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				142.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0011 - KELURAHAN PURWODINATAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				142.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				142.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0012 - KELURAHAN KARANGKIDUL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0013 - KELURAHAN PEKUNDEN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0014 - KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0015 - KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.950.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				248.930.000	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	%		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6.775.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				242.155.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				252.414.517	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gunung Pati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Gunungpati	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				252.414.517	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				402.886.060	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				402.886.060	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0001 - KELURAHAN SUKOREJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sukorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sukorejo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				29.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sukorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sukorejo	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				29.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0002 - KELURAHAN SADENG
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sadeng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sadeng	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sadeng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sadeng	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0003 - KELURAHAN KANDRI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				77.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kandri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kandri	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				77.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21.648.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kandri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kandri	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				21.648.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0004 - KELURAHAN SEKARAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				79.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sekaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sekaran	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				79.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				23.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sekaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sekaran	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				23.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0005 - KELURAHAN PONGANGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				78.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pongangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pongangan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				78.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pongangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pongangan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				22.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0006 - KELURAHAN KALISEGORO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				77.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kalisegoro	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalisegoro	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				77.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21.648.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kalisegoro	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kalisegoro	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				21.648.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0007 - KELURAHAN JATIREJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				76.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatirejo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				76.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.648.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatirejo	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.648.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0008 - KELURAHAN NGIJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				75.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Ngijo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngijo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Ngijo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngijo	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				22.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0009 - KELURAHAN PATEMON
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				78.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Patemon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Patemon	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				78.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				23.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Patemon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Patemon	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				23.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0010 - KELURAHAN NONGKOSAWIT
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				77.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Nongkosawit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Nongkosawit	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				77.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21.648.600	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Nongkosawit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Nongkosawit	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				21.648.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0011 - KELURAHAN CEPOKO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				76.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Cepoko	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cepoko	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				76.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Cepoko	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cepoko	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				22.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0012 - KELURAHAN GUNUNGPATI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gunungpati	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				24.648.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gunungpati	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				24.648.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0013 - KELURAHAN MANGUNSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				78.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mangunsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangunsari	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				78.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangunsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangunsari	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				22.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0014 - KELURAHAN PAKINTELAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				77.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pakintelan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pakintelan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				77.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pakintelan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pakintelan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				22.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0015 - KELURAHAN PLALANGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				77.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Plalangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Plalangan	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				77.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Plalangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Plalangan	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				21.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0016 - KELURAHAN SUMURREJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				80.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sumurrejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sumurrejo	100	%		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				23.148.600	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sumurrejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sumurrejo	100	%		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				23.148.600	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				152.757.600	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1.050.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				151.707.600	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				310.843.976	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				310.843.976	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				394.956.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat pada Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				394.956.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0001 - KELURAHAN JERAKAH
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.700.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.700.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0002 - KELURAHAN TUGUREJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.700.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.700.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0003 - KELURAHAN KARANGANYAR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.700.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.700.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0004 - KELURAHAN RANDUGARUT
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.700.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.700.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0005 - KELURAHAN MANGKANG WETAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.700.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.700.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0006 - KELURAHAN MANGUNHARJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.700.000	
Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Secara Menyeluruh di Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.700.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0007 - KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.700.000	
Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Secara Menyeluruh di Kelurahan mangkang kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.700.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				416.975.000	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				412.975.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				234.475.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				234.475.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				484.425.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				484.425.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0001 - KELURAHAN CANGKIRAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				85.186.320	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				85.186.320	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0002 - KELURAHAN BUBAKAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.545.940	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.545.940	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0003 - KELURAHAN KARANGMALAN G
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				76.847.310	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				76.847.310	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0004 - KELURAHAN POLAMAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				75.985.410	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.985.410	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0005 - KELURAHAN PURWOSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.353.160	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.353.160	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0006 - KELURAHAN TAMBANGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				78.638.430	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				78.638.430	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0007 - KELURAHAN WONOLOPO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				87.795.480	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				87.795.480	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0008 - KELURAHAN MIJEN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				86.493.450	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				86.493.450	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0009 - KELURAHAN JATIBARANG
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				79.779.300	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				79.779.300	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0010 - KELURAHAN KEDUNGPAANE
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				84.067.890	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				84.067.890	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0011 - KELURAHAN NGADIRGO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				86.493.450	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				86.493.450	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0012 - KELURAHAN WONOPLUMBON
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.891.210	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.891.210	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0013 - KELURAHAN JATISARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				93.691.080	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				93.691.080	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0014 - KELURAHAN PESANTREN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				85.586.670	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				85.586.670	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				284.025.140	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.424.300	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				273.600.840	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				380.835.026	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				380.835.026	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				266.888.070	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				266.888.070	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0001 - KELURAHAN SEMBUNGHARJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				96.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				96.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				31.023.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				31.023.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0002 - KELURAHAN KUDU
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				94.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kudu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				94.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				29.358.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kudu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				29.358.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0003 - KELURAHAN KARANGROTO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangroto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				102.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				44.928.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangroto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				44.928.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0004 - KELURAHAN GENUKSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				97.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Genuksari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				97.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				35.388.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Genuksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.388.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0005 - KELURAHAN BANJARDOWO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				94.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Banjardowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				94.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				27.783.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Banjardowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				27.783.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0006 - KELURAHAN GEBANGSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				94.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gebangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				94.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				27.828.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gebangsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				27.828.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0007 - KELURAHAN TRIMULYO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Trimulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.155.360	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Trimulyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13.155.360	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0008 - KELURAHAN PENGGARON LOR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				90.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				90.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				19.773.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				19.773.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0009 - KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.138.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.138.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0010 - KELURAHAN BANGETAYU KULON
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				99.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				99.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				42.183.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				42.183.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0011 - KELURAHAN BANGETAYU WETAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				97.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				97.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				33.678.540	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				33.678.540	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0012 - KELURAHAN TERBOYO KULON
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				85.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				85.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.205.360	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.205.360	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0013 - KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				85.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				85.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.015.360	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.015.360	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				143.000.000	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7.500.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				135.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				371.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				371.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				430.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				430.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0001 - KELURAHAN BENDAN DUWUR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				74.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				74.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				35.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0002 - KELURAHAN BENDAN NGISOR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				73.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				73.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				35.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0003 - KELURAHAN GAJAHMUNGKU R
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				80.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				45.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				45.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0004 - KELURAHAN KARANGREJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				73.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				73.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				35.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0005 - KELURAHAN LEMPONGSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				73.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				73.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				35.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lempongsari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0006 - KELURAHAN PETOMPON
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				73.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				73.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				35.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0007 - KELURAHAN SAMPANGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				75.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sampanga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				75.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				40.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0008 - KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				73.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				73.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				35.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				35.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				211.450.100	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				208.450.100	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				183.612.708	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				183.612.708	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				388.996.530	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				388.996.530	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0001 - KELURAHAN METESEH
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				118.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Meteseh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				118.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				45.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Meteseh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				45.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0002 - KELURAHAN MANGUNHARJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				110.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				30.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				30.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0003 - KELURAHAN TANDANG

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				116.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tandang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				116.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				45.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tandang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				45.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0004 - KELURAHAN SENDANGGUWO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				116.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sendangguwo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				116.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				45.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sendangguwo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				45.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0005 - KELURAHAN JANGLI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				108.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jangli	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				108.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jangli	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0006 - KELURAHAN KEDUNGmundu
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				110.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kedungmundu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kedungmundu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0007 - KELURAHAN TEMBALANG
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				108.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tembalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				108.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tembalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0008 - KELURAHAN SENDANGMULY O
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				120.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sendangmulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				120.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				50.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sendangmulyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				50.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0009 - KELURAHAN BULUSAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				108.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bulusan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				108.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bulusan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0010 - KELURAHAN KRAMAS
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				108.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kramas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				108.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kramas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0011 - KELURAHAN ROWOSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				114.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Rowosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				114.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Rowosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				40.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0012 - KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				114.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sambiroto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				114.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40.000.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sambiroto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				40.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.425.000	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				900.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.525.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				250.042.320	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				250.042.320	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				198.926.750	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				198.926.750	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0001 - KELURAHAN JATINGALEH
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				92.600.433	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				92.600.433	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				19.900.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				19.900.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0002 - KELURAHAN WONOTINGAL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				91.104.150	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonotingal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				91.104.150	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.180.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonotingal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.180.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0003 - KELURAHAN TEGALSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				97.089.285	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				97.089.285	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				28.215.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				28.215.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0004 - KELURAHAN KALIWIRU
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88.111.582	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.111.582	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.470.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.470.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0005 - KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				91.104.150	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				91.104.150	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.180.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.180.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0006 - KELURAHAN CANDI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				94.096.717	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Candi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				94.096.717	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.405.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Candi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				22.405.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0007 - KELURAHAN JOMBLANG
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				99.333.710	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jomblang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				99.333.710	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				33.925.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jomblang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				33.925.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				172.809.834	
Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				168.809.834	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				224.840.496	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				224.840.496	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				353.533.420	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				353.533.420	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0001 - KELURAHAN BANYUMANIK
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				84.639.954	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				84.639.954	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.400.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Banyumanik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.400.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0002 - KELURAHAN GEDAWANG
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				86.291.521	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gedawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				86.291.521	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.400.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gedawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.400.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0003 - KELURAHAN JABUNGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.308.943	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jabungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.308.943	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.080.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jabungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.080.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0004 - KELURAHAN NGESREP
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88.751.452	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngesrep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.751.452	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.840.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngesrep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.840.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0005 - KELURAHAN PADANGSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				91.190.476	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Padangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				91.190.476	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				24.480.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Padangsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				24.480.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0006 - KELURAHAN PEDALANGAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				87.113.821	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pedalangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				87.113.821	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.840.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pedalangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.840.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0007 - KELURAHAN PUDAKPAYUNG
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				96.800.232	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pudukpayung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				96.800.232	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				23.040.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pudukpayung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				23.040.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0008 - KELURAHAN SRONDOL KULON

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				86.291.521	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Spondol Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				86.291.521	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.280.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Spondol Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.280.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0009 - KELURAHAN SRONDOL WETAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95.209.059	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Spondol Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.209.059	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.920.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Spondol Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25.920.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0010 - KELURAHAN SUMURBOTO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				87.933.798	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sumurboto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				87.933.798	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.200.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sumurboto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.200.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0011 - KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				83.810.685	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				83.810.685	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.520.000	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11.520.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				372.793.597	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6.553.350	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				366.240.247	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				325.204.586	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				325.204.586	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				564.295.983	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat pada Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				564.295.983	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0001 - KELURAHAN BRINGIN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				138.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bringin	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				138.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				70.600.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bringin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				70.600.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0002 - KELURAHAN KALIPANCUR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				138.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Kalipancur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				138.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				65.650.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kalipancur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				65.650.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0003 - KELURAHAN BAMBANKEREP
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				118.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bambankerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				118.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				61.250.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bambankerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				61.250.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0004 - KELURAHAN NGALIYAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				138.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				138.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				65.100.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				65.100.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0005 - KELURAHAN WATES
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				118.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				118.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				62.900.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Wates	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				62.900.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0006 - KELURAHAN TAMBAKAJI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				138.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Tambakaji	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				138.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				67.300.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Tambakaji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				67.300.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0007 - KELURAHAN WONOSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				138.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Wonosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				138.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				67.300.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Wonosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				67.300.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0008 - KELURAHAN PODOREJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				118.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Podorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				118.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				65.100.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Podorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				65.100.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0009 - KELURAHAN PURWOYOSO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				138.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				138.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				66.200.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				66.200.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0010 - KELURAHAN GONDORIYO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				138.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				138.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				65.100.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				65.100.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100.800.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				97.800.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen		
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertical Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				125.300.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				125.300.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				191.881.040	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				191.881.040	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0001 - KELURAHAN TAMBAKREJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				86.500.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tambarekjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				86.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				18.250.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				18.250.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0002 - KELURAHAN KALIGAWA
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				89.265.940	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				89.265.940	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.484.060	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.484.060	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0003 - KELURAHAN SAWAH BESAR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				80.300.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.300.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.450.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.450.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0004 - KELURAHAN SIWALAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				80.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.750.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.750.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0005 - KELURAHAN SAMBIREJO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				82.050.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				82.050.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.700.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.700.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0006 - KELURAHAN PANDEAN LAMPER
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				88.250.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.250.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.500.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.500.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0007 - KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				89.690.910	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				89.690.910	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.059.090	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11.059.090	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				355.078.840	
Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				46.878.840	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				308.200.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				62.830.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				62.830.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				381.810.810	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				381.810.810	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0001 - KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				150.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				150.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.100.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				22.100.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0002 - KELURAHAN TLOGOSARI KULON
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				150.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				150.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				23.800.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				23.800.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0003 - KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				110.400.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.400.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.400.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.400.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0004 - KELURAHAN TLOGOMULYO
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				130.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				130.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.350.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.350.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0005 - KELURAHAN KALICARI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				120.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				120.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.650.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.650.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0006 - KELURAHAN PLAMONGANSA RI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				130.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				130.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.600.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13.600.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0007 - KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				130.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				130.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.600.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13.600.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0008 - KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				120.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				120.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.350.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.350.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0009 - KELURAHAN GEMAH
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				130.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				130.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.200.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.200.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0010 - KELURAHAN PALEBON
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				125.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				125.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.350.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.350.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0011 - KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				125.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				125.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.200.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.200.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0012 - KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				110.000.000	
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.100.000	
Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.100.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				567.024.998.837	
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	95	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				496.780.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	11	laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				132.780.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan	6	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				364.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				496.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakad dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				9.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0001 - KELURAHAN BULUSTALAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bulustalan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulustalan	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.578.750.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bulustalan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bulustalan	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.578.750.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Lor	6	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.128.310.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Barusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Barusari	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.128.310.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Randusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Randusari	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.522.870.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Randusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Randusari	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.522.870.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Mugassari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mugassari	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.785.910.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mugassari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mugassari	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.785.910.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Pleburan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pleburan	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.412.750.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pleburan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pleburan	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.412.750.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0006 - KELURAHAN WONODRI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wonodri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonodri	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.928.870.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonodri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonodri	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.928.870.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0007 - KELURAHAN PETERONGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				144.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Peterongan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peterongan	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				144.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.501.470.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Peterongan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Peterongan	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.501.470.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0008 - KELURAHAN LAMPER LOR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Lor	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.995.750.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Lor	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.995.750.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0009 - KELURAHAN LAMPER KIDUL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Kidul	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.018.190.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Kidul	6	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.018.190.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0010 - KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				144.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Tengah	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				144.600.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.632.990.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Tengah	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.632.990.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				548.940.099	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	10	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				47.500.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				501.440.099	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				513.050.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				10.750.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				375.300.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0001 - KELURAHAN PLOMBOKAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				139.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Plombokan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Plombokan	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				139.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.389.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Plombokan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Plombokan	5	Kegiatan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.389.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0002 - KELURAHAN BULU LOR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				160.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulu Lor	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				160.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.817.200.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bulu Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bulu Lor	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.817.200.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0003 - KELURAHAN PURWOSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				139.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwosari	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				139.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.258.280.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwosari	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.258.280.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0004 - KELURAHAN KUNINGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				156.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kuningan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kuningan	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				156.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.211.760.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kuningan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kuningan	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.211.760.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0005 - KELURAHAN PANGGUNG LOR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				173.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panggung Lor	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				173.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.857.320.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Panggung Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Panggung Lor	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.857.320.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0006 - KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panggung Kidul	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.468.120.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Panggung Kidul	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.468.120.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0007 - KELURAHAN BANDARHARJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				173.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bandarharjo	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				173.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.847.960.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bandarharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bandarharjo	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.847.960.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0008 - KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				181.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tanjung Mas	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				181.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.121.400.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tanjung Mas	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				6.121.400.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0009 - KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				156.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Dadapsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dadapsari	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				156.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.961.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Dadapsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Dadapsari	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.961.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				751.787.450	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Semarang Barat	Jumlah laporan hasil musrenbang	15	laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				78.640.960	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				673.146.490	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				541.295.400	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Semarang Barat	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Semarang Barat	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				130.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				26.500.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				384.795.400	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0001 - KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				144.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngemplak Simongan	12	kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				144.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.115.230.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngemplak Simongan	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.115.230.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0002 - KELURAHAN MANYARAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Manyaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Manyaran	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.046.270.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Manyaran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Manyaran	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.046.270.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0003 - KELURAHAN KRAPYAK
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Krapyak	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Krapyak	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.436.230.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Krapyak	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Krapyak	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.436.230.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0004 - KELURAHAN TAMBAKHARJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				123.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tambakharjo	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.339.190.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambakharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambakharjo	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.339.190.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0005 - KELURAHAN KALIBANTENG KULON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalibanteng Kulon	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.368.910.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalibanteng Kulon	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.368.910.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0006 - KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalibanteng Kidul	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.864.230.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalibanteng Kidul	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.864.230.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0007 - KELURAHAN GISIKDRONO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gisikdrono	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.024.870.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gisikrdrono	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gisikrdrono	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.024.870.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0008 - KELURAHAN BONGSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bongsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bongsari	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.071.390.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bongsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bongsari	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.071.390.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0009 - KELURAHAN BOJONGSALAM AN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bojongsalaman	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.874.630.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bojongsalaman	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.874.630.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0010 - KELURAHAN SALAMAN MLOYO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Salaman Mloyo	12	kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.711.310.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Salaman Mloyo	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.711.310.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0011 - KELURAHAN CABEAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				123.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Cabean	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cabean	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.293.270.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cabean	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cabean	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.293.270.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0012 - KELURAHAN KARANGAYU
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Karangayu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangayu	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.193.550.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangayu	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangayu	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.193.550.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0013 - KELURAHAN KROBOKAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Krobokan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Krobokan	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.411.110.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Krobokan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Krobokan	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.411.110.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0014 - KELURAHAN TAWANGSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				115.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tawangsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tawangsari	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				115.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.458.670.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tawangsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tawangsari	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.458.670.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0015 - KELURAHAN TAWANGMAS
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tawangmas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tawangmas	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.546.350.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tawangmas	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tawangmas	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.546.350.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0016 - KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				169.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kembangarum	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kembangarum	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				169.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.068.710.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kembangarum	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kembangarum	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.068.710.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				599.542.680	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	15	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				65.400.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan	6	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				534.142.680	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				504.474.300	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				17.474.300	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0001 - KELURAHAN KEMIJEN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.009.660.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.009.660.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0002 - KELURAHAN REJOMULYO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.075.620.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.075.620.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0003 - KELURAHAN MLATIBARU
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.130.620.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.130.620.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0004 - KELURAHAN MLATIHARJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.053.480.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.053.480.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0005 - KELURAHAN KEBONAGUNG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.393.940.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kebonagung	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.393.940.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0006 - KELURAHAN BUGANGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.129.580.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bugangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.129.580.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0007 - KELURAHAN SARIREJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.493.520.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sarirejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.493.520.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0008 - KELURAHAN REJOSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				169.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				169.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.207.040.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Rejosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				6.207.040.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0009 - KELURAHAN KARANGTURI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.328.400.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangturi	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.328.400.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0010 - KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				115.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				115.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.986.900.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangtempel	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Dokumen		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.986.900.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				764.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	150	kegiatan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				58.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				706.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				494.500.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	12	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				7.500.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0001 - KELURAHAN MIROTO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.060.480.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.060.480.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0002 - KELURAHAN BRUMBUNGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				119.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.753.600.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.753.600.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0003 - KELURAHAN JAGALAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.040.120.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.040.120.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0004 - KELURAHAN KRANGGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				119.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.534.400.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.534.400.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0005 - KELURAHAN GABAHAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.214.440.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.214.440.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0006 - KELURAHAN KEMBANGSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.665.920.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.665.920.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0007 - KELURAHAN SEKAYU
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				119.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.051.120.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.051.120.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0008 - KELURAHAN PANDANSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.182.640.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.182.640.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0009 - KELURAHAN BANGUNHARJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				123.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.248.920.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.248.920.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0010 - KELURAHAN KAUMAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				123.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				964.480.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				964.480.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0011 - KELURAHAN PURWODINATAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.732.200.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.732.200.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0012 - KELURAHAN KARANGKIDUL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.424.280.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.424.280.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0013 - KELURAHAN PEKUNDEN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				123.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.534.400.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.534.400.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0014 - KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.709.760.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.709.760.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0015 - KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.126.760.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.126.760.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				766.767.862	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan gunungpati	1	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				58.722.172	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				708.045.690	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				614.703.500	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gunungpati	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				21.200.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				466.503.500	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0001 - KELURAHAN SUKOREJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Sukorejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sukorejo	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.225.160.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sukorejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sukorejo	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.225.160.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0002 - KELURAHAN SADENG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Sadeng	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sadeng	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.678.720.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sadeng	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sadeng	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.678.720.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0003 - KELURAHAN KANDRI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kandri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kandri	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.357.400.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kandri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kandri	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.357.400.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0004 - KELURAHAN SEKARAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Sekaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sekaran	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.776.440.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sekaran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sekaran	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.776.440.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0005 - KELURAHAN PONGANGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Pongangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pongangan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.467.520.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pongangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pongangan	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.467.520.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0006 - KELURAHAN KALISEGORO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalisegoro	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.269.720.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalisegoro	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalisegoro	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.269.720.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0007 - KELURAHAN JATIREJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jatirejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatirejo	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				831.320.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatirejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatirejo	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				831.320.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0008 - KELURAHAN NGLJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngijo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngijo	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.269.720.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngijo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngijo	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.269.720.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0009 - KELURAHAN PATEMON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Patemon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Patemon	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.953.840.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Patemon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Patemon	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.953.840.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0010 - KELURAHAN NONGKOSAWIT
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Nongkosawit	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.423.680.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Nongkosawit	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Nongkosawit	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.423.680.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0011 - KELURAHAN CEPOKO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Cepoko	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Cepoko	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				940.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cepoko	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cepoko	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				940.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0012 - KELURAHAN GUNUNGPATI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				161.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gunungpati	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gunungpati	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				161.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.328.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gunungpati	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gunungpati	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.328.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0013 - KELURAHAN MANGUNSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Mangunsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mangunsari	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.646.880.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mangunsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangunsari	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.646.880.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0014 - KELURAHAN PAKINTELAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Pakintelan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pakintelan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.406.280.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pakintelan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pakintelan	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.406.280.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0015 - KELURAHAN PLALANGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Plalangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Plalangan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.140.240.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Plalangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Plalangan	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.140.240.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0016 - KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sumurrejo	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.711.160.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sumurrejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sumurrejo	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.711.160.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				720.300.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	7	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				175.300.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				545.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				580.600.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Tugu	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				175.300.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				45.300.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0001 - KELURAHAN JERAKAH
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				72.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jerakah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan jerakah	20	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				72.600.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.007.920.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Jerakah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jerakah	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.007.920.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0002 - KELURAHAN TUGUREJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				93.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tugurejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tugurejo	20	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				93.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.821.760.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Tugurejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tugurejo	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.821.760.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0003 - KELURAHAN KARANGANYAR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				81.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Karanganyar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karanganyar	20	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				81.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.293.080.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Karanganyar	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karanganyar	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.293.080.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0004 - KELURAHAN RANDUGARUT
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				81.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Randugarut	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Randugarut	20	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				81.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				721.600.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Randugarut	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Randugarut	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				721.600.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0005 - KELURAHAN MANGKANG WETAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				106.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangkang Wetan	20	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				106.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.086.680.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangkang Wetan	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.086.680.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0006 - KELURAHAN MANGUNHARJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				106.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangunharjo	20	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				106.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.558.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Mangunharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangunharjo	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.558.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0007 - KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				89.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangkan Kulon	20	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				89.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.184.920.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangkang Kulon	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.184.920.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				427.482.480	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah laporan hasil musrenbang	1	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Mijen	15	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				387.482.480	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				740.907.300	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Mijen	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				270.507.300	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait di Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat di Kecamatan Mijen	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				465.400.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0001 - KELURAHAN CANGKIRAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				144.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Cangkiran	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				144.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.083.960.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cangkiran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cangkiran	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.083.960.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0002 - KELURAHAN BUBAKAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bubakan	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.315.200.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bubakan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bubakan	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.315.200.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0003 - KELURAHAN KARANGMALAN G
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Karangmalang	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				700.400.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangmalang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangmalang	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				700.400.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0004 - KELURAHAN POLAMAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				123.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Polaman	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Polaman	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				568.880.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Polaman	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Polaman	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				568.880.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0005 - KELURAHAN PURWOSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Purwosari	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.139.840.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwosari	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.139.840.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0006 - KELURAHAN TAMBANGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tambangan	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				854.360.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambangan	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				854.360.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0007 - KELURAHAN WONOLOPO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				174.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wonolopo	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				174.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.786.440.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonolopo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonolopo	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.786.440.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0008 - KELURAHAN MIJEN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mijen	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.324.560.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mijen	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.324.560.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0009 - KELURAHAN JATIBARANG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatibarang	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				942.040.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatibarang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatibarang	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				942.040.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0010 - KELURAHAN KEDUNGPAANE
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kedungpane	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.082.920.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kedungpane	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kedungpane	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.082.920.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0011 - KELURAHAN NGADIRGO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				169.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngadirgo	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				169.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.281.760.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngadirgo	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.281.760.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0012 - KELURAHAN WONOPLUMBON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wonoplumbon	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.380.440.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonoplumbon	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.380.440.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0013 - KELURAHAN JATISARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				174.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatisari	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				174.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.352.640.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatisari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatisari	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.352.640.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	100,00	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0014 - KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatisari	8	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.128.840.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pesantren	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pesantren	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.128.840.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - KECAMATAN GENUK

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				972.454.120	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	1	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				90.277.120	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	19	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				882.177.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				505.112.200	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Genuk	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Genuk	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				117.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				28.112.200	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Persentase Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0001 - KELURAHAN SEMBUNGHARJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sembungharjo	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.512.180.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Sembungharjo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sembungharjo	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.512.180.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0002 - KELURAHAN KUDU
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kudu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kudu	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.313.930.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Kudu	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kudu	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.313.930.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0003 - KELURAHAN KARANGROTO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				174.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Karangroto	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangroto	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				174.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.556.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Karangroto	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangroto	6	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.556.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0004 - KELURAHAN GENUKSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				169.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Genuksari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Genuksari	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				169.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.150.180.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Genuksari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Genuksari	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.150.180.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0005 - KELURAHAN BANJARDOWO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				161.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Banjardowo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Banjardowo	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				161.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.985.200.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Banjardowo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Banjardowo	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.985.200.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0006 - KELURAHAN GEBANGSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gebangsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gebangsari	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.919.960.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Gebangsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Gebangsari	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.919.960.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0007 - KELURAHAN TRIMULYO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Trimulyo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Trimulyo	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.092.910.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Trimulyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Trimulyo	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.092.910.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0008 - KELURAHAN PENGGARON LOR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Penggaron Lor	9	Kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.972.550.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Penggaron Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Penggaron Lor	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.972.550.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0009 - KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muktiharjo Lor	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.290.710.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Muktiharjo Lor	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.290.710.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0010 - KELURAHAN BANGETAYU KULON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				178.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bangetayu Kulon	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				178.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.182.740.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Bangetayu Kulon	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.182.740.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0011 - KELURAHAN BANGETAYU WETAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bangetayu Wetan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.016.720.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Bangetayu Wetan	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.016.720.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0012 - KELURAHAN TERBOYO KULON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				119.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terboyo Kulon	10	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				432.470.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Terboyo Kulon	6	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				432.470.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0013 - KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				119.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terboyo Wetan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				564.440.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di kelurahan Terboyo Wetan	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				564.440.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - KECAMATAN GAJAHMUNGKU R
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				588.500.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				61.500.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				527.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				489.500.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gajahmungkur	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				2.500.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0001 - KELURAHAN BENDAN DUWUR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bendan Duwur	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.514.100.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bendan Duwur	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.514.100.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0002 - KELURAHAN BENDAN NGISOR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bendan Ngisor	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.556.900.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bendan Ngisor	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.556.900.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0003 - KELURAHAN GAJAHMUNGKU R
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				144.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gajahmungkur	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				144.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.235.920.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gajahmungkur	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.235.920.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0004 - KELURAHAN KARANGREJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangrejo	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.778.800.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangrejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangrejo	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.778.800.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0005 - KELURAHAN LEMPONGSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lempongsari	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.977.640.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lempongsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lempongsari	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.977.640.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0006 - KELURAHAN PETOMPON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Petompon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Petompon	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.952.360.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Petompon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Petompon	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.952.360.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0007 - KELURAHAN SAMPANGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Sampangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sampangan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.788.160.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sampangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sampangan	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.788.160.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0008 - KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bendungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bendungan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.513.510.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bendungan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bendungan	1	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.513.510.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				468.833.442	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah laporan hasil musrenbang	13	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				102.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				366.833.442	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				498.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				11.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0001 - KELURAHAN METESEH
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				241.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meteseh	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				241.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				9.774.600.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Meteseh	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				9.774.600.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0002 - KELURAHAN MANGUNHARJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mangunharjo	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.165.680.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangunharjo	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.165.680.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0003 - KELURAHAN TANDANG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				169.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tandang	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				169.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.967.900.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tandang	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.967.900.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0004 - KELURAHAN SENDANGGUWO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jangli	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.570.360.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sendangguwo	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.570.360.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0005 - KELURAHAN JANGLI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jangli	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.209.500.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jangli	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.209.500.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0006 - KELURAHAN KEDUNGUNDU
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kedungmundu	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.572.420.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kedungmundu	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.572.420.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0007 - KELURAHAN TEMBALANG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tembalang	13	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.837.820.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tembalang	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.837.820.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0008 - KELURAHAN SENDANGMULYO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				266.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sendangmulyo	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				266.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				13.375.320.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sendangmulyo	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				13.375.320.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0009 - KELURAHAN BULUSAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulusan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.232.980.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bulusan	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.232.980.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0010 - KELURAHAN KRAMAS
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kramas	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.485.760.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kramas	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.485.760.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0011 - KELURAHAN ROWOSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rowosari	6	Kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.804.840.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Rowosari	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.804.840.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0012 - KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				169.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sambiroto	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				169.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.825.220.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sambiroto	5	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.825.220.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				542.852.570	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Candisari	Jumlah laporan hasil musrenbang	15	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				35.994.260	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				506.858.310	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				494.200.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				130.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait di Kecamatan Candisari	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.200.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat di Kecamatan Candisari	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0001 - KELURAHAN JATINGALEH
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jatingaleh	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.946.470.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatingaleh	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Jatingaleh	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.946.470.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0002 - KELURAHAN WONOTINGAL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wonotingal	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonotingal	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.311.580.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonotingal	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Wonotingal	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.311.580.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0003 - KELURAHAN TEGALSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tegalsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalsari	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.651.470.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tegalsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Tegalsari	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.651.470.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0004 - KELURAHAN KALIWIRU
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kaliwiru	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.246.230.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kaliwiru	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kaliwiru	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.246.230.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0005 - KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karanganyar Gunung	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.487.690.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Karanganyar Gunung	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.487.690.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0006 - KELURAHAN CANDI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Candi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Candi	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.414.060.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Candi	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Candisari	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.414.060.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0007 - KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jomblang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jomblang	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.813.200.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jomblang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kelurahan Jomblang	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.813.200.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				645.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	15	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				52.500.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	142	kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				593.300.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				501.750.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				137.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.750.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0001 - KELURAHAN BANYUMANIK
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Banyumanik	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.765.550.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Banyumanik	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.765.550.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0002 - KELURAHAN GEDAWANG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				161.400.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gedawang	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				161.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.466.990.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gedawang	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.466.990.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0003 - KELURAHAN JABUNGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jabungan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.996.790.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jabungan	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.996.790.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0004 - KELURAHAN NGESREP
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngesrep	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.059.350.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngesrep	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.059.350.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0005 - KELURAHAN PADANGSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				178.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padangsari	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				178.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.807.750.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Padangsari	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.807.750.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0006 - KELURAHAN PEDALANGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				144.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pedalangan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				144.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.357.910.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pedalangan	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.357.910.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0007 - KELURAHAN PUDAKPAYUNG
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				224.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pudukpayung	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				224.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				7.152.670.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pudukpayung	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				7.152.670.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0008 - KELURAHAN SRONDOL KULON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Spondol Kulon	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.380.350.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Spondol Kulon	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.380.350.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0009 - KELURAHAN SRONDOL WETAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				207.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Spondol Wetan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				207.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.320.750.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Spondol Wetan	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				6.320.750.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0010 - KELURAHAN SUMURBOTO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sumurboto	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.258.790.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sumurboto	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.258.790.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0011 - KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				144.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tinjomoyo	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				144.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.326.110.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tinjomoyo	6	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.326.110.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				983.309.700	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	2	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				68.500.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				914.809.700	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				521.906.700	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Ngaliyan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Ngaliyan	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				34.906.700	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0001 - KELURAHAN BRINGIN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				161.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bringin	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bringin	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				161.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				7.292.470.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bringin	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bringin	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				7.292.470.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0002 - KELURAHAN KALIPANCUR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				128.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kalipancur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalipancur	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				128.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.948.045.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalipancur	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalipancur	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.948.045.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0003 - KELURAHAN BAMBANKEREP
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				94.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bambankerep	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bambankerep	350	Kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				94.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.815.575.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bambankerep	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bambankerep	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.815.575.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0004 - KELURAHAN NGALIYAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				111.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngaliyan	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.256.760.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngaliyan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngaliyan	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.256.760.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0005 - KELURAHAN WATES
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				90.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wates	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wates	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				90.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.234.440.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wates	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wates	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.234.440.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0006 - KELURAHAN TAMBAKAJI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				195.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tambakaji	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tambakaji	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				195.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.839.930.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambakaji	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambakaji	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.839.930.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0007 - KELURAHAN WONOSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				174.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wonosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wonosari	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				174.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.235.165.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonosari	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				6.235.165.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0008 - KELURAHAN PODOREJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				111.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Podorejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Podorejo	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.071.055.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Podorejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Podorejo	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.071.055.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0009 - KELURAHAN PURWOYOSO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Purwoyoso	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.609.252.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwoyoso	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwoyoso	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.609.252.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0010 - KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				111.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gondoriyo	350	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.334.545.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gondoriyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gondoriyo	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.334.545.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				936.763.080	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan hasil musrenbang di Kecamatan Gayamsari	80	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				69.250.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				867.513.080	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				520.320.404	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gayamsari	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				130.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi Lembaga Kemasyarakatan dan Instansi terkait di Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				18.903.750	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				371.416.654	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0001 - KELURAHAN TAMBAKREJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tambakrejo	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.699.270.000	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyaraka di Kelurahan Tambakrejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambakrejo	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.699.270.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0002 - KELURAHAN KALIGAWA
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kaligawe	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kaligawe	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.730.030.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah Kelurahan Kaligawe	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kaligawe	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.730.030.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0003 - KELURAHAN SAWAH BESAR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sawah Besar	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.721.710.000	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyaraka di Kelurahan Sawah Besar	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sawah Besar	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.721.710.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0004 - KELURAHAN SIWALAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Siwalan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Siwalan	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.885.630.000	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyaraka di Kelurahan Siwalan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Siwalan	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.885.630.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0005 - KELURAHAN SAMBIREJO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Sambirejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sambirejo	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.611.590.000	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyaraka di Kelurahan Sambirejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sambirejo	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.611.590.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0006 - KELURAHAN PANDEAN LAMPER
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				161.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandean Lamper	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				161.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.002.430.000	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyaraka di Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pandean Lamper	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.002.430.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0007 - KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gayamsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gayamsari	6	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.313.030.000	
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyaraka di Kelurahan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gayamsari	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.313.030.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				849.872.930	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	13	Laporan		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				45.868.730	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	120	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				804.004.200	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				174.395.620	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				130.000.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100	%		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				19.878.399	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100	%		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				24.517.221	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0001 - KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				220.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				220.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10.326.300.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				10.326.300.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0002 - KELURAHAN TLOGOSARI KULON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				228.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				228.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				11.733.520.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				11.733.520.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0003 - KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.228.400.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.228.400.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0004 - KELURAHAN TLOGOMULYO
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				169.800.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				169.800.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.671.460.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.671.460.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0005 - KELURAHAN KALICARI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.956.660.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.956.660.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0006 - KELURAHAN PLAMONGANSA RI
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				178.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				178.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.432.640.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.432.640.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0007 - KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				178.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				178.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.179.620.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya		Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.179.620.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0008 - KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.397.200.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.397.200.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0009 - KELURAHAN GEMAH
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				161.400.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				161.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.298.540.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.298.540.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0010 - KELURAHAN PALEBON
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.880.540.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.880.540.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0011 - KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165.600.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.595.500.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.595.500.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0012 - KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	Kegiatan		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.834.480.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	Laporan		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.834.480.000	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyar akatan		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.187.705.400	
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Selatan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan	100	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				160.498.600	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				160.498.600	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Utara	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Utara	100	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				125.782.129	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				125.782.129	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Barat	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Barat	100	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				46.000.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				46.000.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Timur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur	100	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.649.250	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100.649.250	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah	100	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				133.250.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	2	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				133.250.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gunung Pati	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati	100	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				245.464.071	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	4	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				245.464.071	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tugu	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu	100	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN TUGU
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				56.790.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				56.790.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Mijen	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mijen	100	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - KECAMATAN MIJEN
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				216.000.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				216.000.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Genuk	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Genuk	100	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - KECAMATAN GENUK
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				137.697.450	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				137.697.450	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gajahmungkur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	100	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				196.750.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				196.750.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tembalang	Persentase penanganan pelanggaran Ketentrman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	100	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				62.500.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				62.500.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Candisari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentrman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - KECAMATAN CANDISARI
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				71.750.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				71.750.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Banyumanik	Persentase penanganan pelanggaran Ketentrman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik	100	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				104.400.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				104.400.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Ngaliyan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentrman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngaliyan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - KECAMATAN NGALIYAN
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				298.348.900	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				298.348.900	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gayamsari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentrman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gayamsari	100	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				141.300.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib di Kecamatan Gayamsari	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib di Kecamatan Gayamsari	12	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				141.300.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Pedurungan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentrman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan	100	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				90.525.000	
Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	2	kegiatan		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				90.525.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1.599.921.380	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Selatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan	82	%		7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.337.400	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70.337.400	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Utara	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Utara	82	%		7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.000.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan	9	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	450	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Barat	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Barat	82	%		7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				90.700.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				90.700.000	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Timur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Timur	82	%		7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				105.651.020	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				105.651.020	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Tengah	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	82	%		7.01.0.00.0.00.0 5.0000 - KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				82.750.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				82.750.000	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gunung Pati	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati	82	%		7.01.0.00.0.00.0 6.0000 - KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				127.400.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	4	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				127.400.000	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tugu	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu	82	%		7.01.0.00.0.00.0 7.0000 - KECAMATAN TUGU
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				143.800.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2	kegiatan		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				143.800.000	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Mijen	82	%		7.01.0.00.0.00.0 8.0000 - KECAMATAN MIJEN
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				86.000.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				86.000.000	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Genuk	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk	82	%		7.01.0.00.0.00.0 9.0000 - KECAMATAN GENUK
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.882.960	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	3	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100.882.960	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gajahmungkur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	82	%		7.01.0.00.0.00.1 0.0000 - KECAMATAN GAJAHMUNGKU R
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				90.550.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				90.550.000	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tembalang	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	82	%		7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				92.550.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan	3	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				92.550.000	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Candisari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	82	%		7.01.0.00.0.00.1 2.0000 - KECAMATAN CANDISARI
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				74.150.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				74.150.000	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan Banyumanik	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik	82	%		7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				221.300.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				221.300.000	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Ngaliyan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Ngaliyan	82	%		7.01.0.00.0.00.1 4.0000 - KECAMATAN NGALIYAN
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				93.200.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				93.200.000	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gayamsari	82	%		7.01.0.00.0.00.1 5.0000 - KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				96.100.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah di Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan Gayamsari	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				96.100.000	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40	Orang		
Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Pedurungan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	82	%		7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				24.550.000	
Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2	kegiatan		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				24.550.000	
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang		
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				31.221.065.018	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.727.673.518	
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	%		8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkualitas	100	%		
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				56.982.320	
Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				849.200	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.285.500	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.953.600	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.739.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		
8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.054.600	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				427.400	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				427.400	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		
8.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.191.798.800	
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	100	%		
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.902.507.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	Orang/bulan		
8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				285.832.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				636.200	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.505.600	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		
8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				318.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				64.323.670	
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai layanan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	Nilai		
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				22.378.120	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39	Dokumen		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				41.945.550	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55	Orang		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				590.555.517	
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	%		
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.100.120	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.145.610	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				57.321.750	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.046.810	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.008.830	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	Dokumen		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				100.550.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Laporan		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				278.120.967	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan		
8.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				130.261.430	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.921.920	
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	%		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				21.487.520	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.434.400	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				324.614.000	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selesai ditindaklanjuti	100	%		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.928.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				298.686.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				443.477.291	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan	100	%		
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				312.199.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit		
8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.890.320	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.787.971	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				3.454.146.100	
Meningkatnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila	75,25	Angka		8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				3.454.146.100	
Meningkatnya Rumah Tangga yang mengamalkan nilai persatuan Indonesia	Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai persatuan Indonesia	78	%		
8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				309.883.320	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	29	Dokumen		
8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				621.447.100	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3	Dokumen		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				280.584.320	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.800	Orang		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				164.802.200	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	280	Orang		
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				61.693.100	
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7	Laporan		
Meningkatnya rumah tangga yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab	Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab	73	%		
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				323.812.040	
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	300	Keluarga		
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				84.043.230	
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	23	Dokumen		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				1.514.067.020	
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	27	Orang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				39.765.030	
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	Dokumen		
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				24.607.900	
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	11	Dokumen		
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				29.440.840	
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27	Orang		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				10.291.662.280	
Meningkatnya kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	60,25	Angka		8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				10.291.662.280	
Meningkatnya pengawasan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan dan usulan masyarakat terkait pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	10.500	Laporan dan usulan		
8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.561.653.280	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	35	Dokumen		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				115.180.000	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75	Orang		
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan publik	Angka partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik	58	Nilai		
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				8.248.648.000	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10	Dokumen		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				124.668.000	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40	Orang		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				241.513.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115	Laporan		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				2.427.000.000	

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah	Indeks Kinerja Ormas	65,3	Angka		8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				2.427.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Organsasi Kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	Persentase Ormas Aktif	55,6	%		
8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				488.044.000	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	21	Dokumen		
8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				296.060.670	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5	Dokumen		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				861.745.330	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400	Orang		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				510.600.000	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15	Orang		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				270.550.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40	Laporan		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				3.422.499.000	
Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah	Indeks Harmoni Indonesia	6,1	Angka		8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				3.422.499.000	
Meningkatnya partisipasi ormas keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase aktif Ormas Keagamaan	54	%		
8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.852.124.500	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	10	Dokumen		
8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				450.000.000	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	Dokumen		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				159.488.800	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300	Orang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				847.370.600	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.500	Orang		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				113.515.100	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2	Laporan		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.898.084.120	
Meningkatnya kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri	Indeks Kewaspadaan Nasional	77	Angka		8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				2.898.084.120	
Meningkatnya kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	95,65	%		
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				123.539.400	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	11	Dokumen		
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				411.763.800	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.485	Orang		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				168.388.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	401	Laporan		
Meningkatnya kemampuan deteksi dini, cegah dini, dan antisipasi dini serta kewaspadaan terhadap potensi konflik di masyarakat	Prosentase mitigasi konflik SARA	76	%		
8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				572.995.720	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	16	Dokumen		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				453.266.200	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	385	Orang		

Bidang Urusan / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Unit Perangkat Daerah
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1.168.131.000	
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	14	Dokumen		

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Keberhasilan dalam mencapai visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2030 ditentukan oleh sejauh mana capaian kinerja pemerintahan daerah dapat diukur secara objektif, sistematis, dan terarah. Ukuran-ukuran tersebut diwujudkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang keduanya menjadi dasar utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan oleh setiap Perangkat Daerah. Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026, maka telah ditetapkan berbagai target pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang relevan, dengan mempertimbangkan baseline data, potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan aktual di lapangan.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026, Pemerintah Kota Semarang menetapkan target-target pada IKU Daerah untuk tahun 2026 sebagai dasar pengukuran capaian kinerja, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Adapun IKU dan targetnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	86,25
2	Indeks Pendidikan	Angka	0,805
3	Indeks Kesehatan	Angka	0,915
4	Tingkat kemiskinan	%	3,86-3,74
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-6,30
6	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka	0,56
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,94
8	Persentase Kawasan Banjir dan Rob	%	2,97
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90,66

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Pemerintah Daerah. Indikator tersebut merupakan Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Daerah. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN			
Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan unggul secara merata		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11,17
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,64
	Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (%)	85,21
	Meningkatnya kualitas kinerja Pelayanan Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan (Angka)	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan (Angka)	80,35
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN			
Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	78,52
	Meningkatnya layanan kesehatan yang , terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit	Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus)	13
		Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	8,85
		Persentase penurunan kasus stunting EPPBGM (%)	60
		Angka populasi bebas penyakit menular (Angka)	72
		Angka populasi bebas penyakit tidak menular (Angka)	52
		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar (%)	60
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	100
		Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (Rasio)	6,29
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	82
	Meningkatkan pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran dan pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan aktivitas fisik (%)	20,34
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	81,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	95,6
	Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen	Net Death Rate (NDR) RSUD Mijen (Per 1000)	33
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan BLUD RSUD KRMT Wongsonegoro	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro (Angka)	79,87
		Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro (Angka)	88,6
	Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	Net Death Rate (NDR) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro (Per 1000)	27,5
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM			
Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga		Persentase genangan, banjir, dan rob (%)	5,67
		Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun (%)	100
	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase	Persentase genangan air (%)	2,83
		Persentase kawasan banjir (%)	1,80
		Persentase kawasan rob (%)	1,04

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
	Meningkatnya konektivitas infrastruktur antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	94,20
		Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	92,01
		Persentase jalan dan jembatan yang terbangun (%)	100
	Meningkatnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	77,70
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	84,03
1.03.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PENATAAN RUANG			
Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan		Persentase penatagunaruang yang berdayaguna dan berkelanjutan (%)	65,40
	Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW	Persentase bangunan yang berijin (%)	79
		Persentase Implementasi Rencana Tata Ruang (%)	38,89
		Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW (%)	74,5
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penataan Ruang (Nilai)	80,1
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penataan Ruang (Angka)	97
1.04.1.03.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana utilitas yang memadai		Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)	80
	Meningkatnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni (%)	63,58
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Disperkim	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Angka)	80,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Angka)	89,2
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATPOL PP			
Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Keindahan Wilayah		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	76
	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Daerah	Tingkat efektivitas penegakan peraturan daerah (%)	76
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Satpol PP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja (Angka)	80,1
		Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Angka)	84
1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN			
Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan		Persentase kesiapsiagaan pemadam kebakaran (%)	61,96
	Meningkatnya cakupan layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan	Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate) dan Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) (%)	94,73
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan (%)	100
		Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (%)	5,1
		Persentase Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran satuan persen (%)	48

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
	Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran (Nilai)	78,67
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran (Angka)	92,2
1.05.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,71
	Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Bencana Daerah	Persentase Penanganan Bencana (%)	100
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Angka)	73,7
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Angka)	95
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL			
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Cakupan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)	5,04
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)	100
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial (Angka)	80,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial (Angka)	92,5
2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA			
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas, Produktif dan Sejahtera		Persentase Pengangguran yang tertangani (%)	11
	Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan (%)	2,5
		Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru (%)	2
		Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas (%)	1
		Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja (%)	38,5
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (%)	3
	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial yang Kondusif dan Berkeadilan	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan (%)	70,87
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	79,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	98,57
2.08.2.13.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Menurunkan Ketimpangan Gender dalam Pembangunan dan		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,13
		Nilai keselarasan kinerja lembaga kemasyarakatan tingkat kota yang mendukung pembangunan (Poin)	4,20
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	78,71

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
dalam Pembangunan	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	71,38
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Angka)	77,85
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Angka)	90,46
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas	Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota (Angka)	100
2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN			
Terwujudnya ketangguhan dan ketahanan pangan untuk kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	92,9
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berkualitas	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,2
	Meningkatnya keamanan pangan	Tingkat Keamanan Pangan (%)	88,5
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan (Angka)	79,41
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Ketahanan Pangan (Angka)	92,80
2.11.1.03.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	64,94
	Meningkatnya Kebersihan Kota	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	17,96
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	57,81
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	82,64
		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	44,44
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup (Angka)	77,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup (Angka)	90,25
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Meningkatnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal		Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (%)	93,00
		Tingkat kinerja pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan (%)	100
	Meningkatnya kualitas layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Angka)	86,00
	Meningkatnya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Angka)	80,50
	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan	Tingkat efektivitas pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (%)	100
	Meningkatnya jangkauan pemanfaatan profil kependudukan	Persentase peningkatan pemanfaatan profil kependudukan (%)	100
2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Meningkatnya keluarga yang		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Angka)	68,70

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	2
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks kebahagiaan (Angka)	76,00
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Angka)	80,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Angka)	89,25
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN			
Meningkatnya Mobilitas Berkelanjutan di Kota Semarang		Rasio Konektivitas (%)	0,9
	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum	Persentase ruas jalan yang macet (%)	36,15
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum (Angka)	62
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan (Angka)	75,76
Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan (Angka)		91,88	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
Meningkatnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggung jawab		Indeks Pemerintah Digital (Angka)	4,04
	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	95,5
	Meningkatnya layanan statistik berbasis teknologi informasi yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (Angka)	3,10
	Meningkatnya keamanan data dan informasi	Indeks Keamanan Informasi (Angka)	608
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Angka)	80,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Angka)	77
2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			
Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,52
	Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,86
	Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas (%)	2,11
	Meningkatnya kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Angka)	80,37
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Angka)	98,51
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Meningkatnya Penanaman Modal		Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah (%)	0.75%
	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN) (Rupiah)	9.974.250.000.000
	Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Angka)	90
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai)	78,2
2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
Meningkatnya Kualitas Pemuda dalam Pembangunan		Nilai Kualitas Pemberdayaan Pemuda (%)	86
	Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Persentase prestasi olahraga daerah (%)	72,78
		Persentase Organisasi Kepemudaan Aktif dan Pemuda Diberdayakan (%)	50,51
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Angka)	72
2.22.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	14,91
	Meningkatnya Peran Budaya Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kebudayaan (%)	1,17
		Nilai Kemajuan Kebudayaan (Angka)	72,64
	Meningkatnya Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	13,74
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Angka)	80,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Angka)	90,15
2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			
Meningkatnya kualitas literasi masyarakat & Tata Kelola Arsip Daerah		Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	73,1
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	94,44
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	71
	Meningkatnya kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	75,1
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	92
	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	84
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN			
Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan		Nilai produksi perikanan dan kelautan (Rupiah)	100.000.000
	Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan dan kelautan	Nilai produksi perikanan tangkap (Rupiah)	20.000.000
		Nilai produksi perikanan budidaya (Rupiah)	80.000.000
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan (Angka)	78,81
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan (Angka)	81,60
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN			
Meningkatnya daya saing sektor pertanian		Nilai produksi pertanian (Rupiah)	171.728.951.000
	Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian	Rata-rata produktivitas tanaman pangan (Ton/Ha)	7,88
		Rata-rata produktivitas tanaman hortikultura (Kuintal/Ha)	17,39
		Rata-rata produktivitas hasil peternakan (Kg/Ekor)	87,37
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian (Angka)	80,2
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	83
3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026	
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan wilayah		LPE Sektor Perdagangan (%)	4-6	
	Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Nilai PDRB Perdagangan (Milyar Rupiah)	38.193,27	
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perdagangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan (Angka)	77	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perdagangan (Angka)	97,25	
3.31.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN				
Meningkatnya kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung penambahan nilai ekonomi sektor perdagangan dan jasa		LPE Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	7,40	
	Meningkatnya daya saing IKM	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung perdagangan dan jasa (%)	2,12	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perindustrian (Angka)	80,50	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian (Angka)	85,50	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH				
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berdaya guna		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	75,89	
		Nilai Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Nilai)	91	
		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,52	
	Meningkatnya tata kelola hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	98,03	
	Meningkatnya pengelolaan kinerja pemerintah daerah	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD) (Nilai)	3,71	
	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berstatus kinerja baik (%)	100	
	Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan	Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)	100	
	Meningkatnya efektifitas pengelolaan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	Persentase meningkatnya kinerja BUMD dari aspek layanan dan keuangan (%)	100	
		Tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan (%)	91	
		Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR (Urusan)	9	
	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Angka)	89,7	
	Meningkatnya kepuasan terhadap kinerja pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	90,7	
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan nilai kepuasan pimpinan daerah (%)	2	
		Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah (%)	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah (Angka)	89,20	
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah (Angka)	81,00	
	Meningkatnya proses Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, dan Relevan pada Sekretariat Daerah	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan kota dan Sekretariat Daerah (%)	86	
	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD			
			Persentase Raperda menjadi Perda (%)	88,90

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD	Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD	Persentase Raperda yang disetujui DPRD (%)	82
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD (Angka)	80,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD (Angka)	95,60
5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja (Angka)	23,75
	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang Sinergis, Berkualitas, dan Selaras	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kota Semarang (Angka)	91,29
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)	82,80
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)	91,75
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Kredibel		Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Angka)	98
	Meningkatnya Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK (Opini)	Wajar Tanpa Pengecualian
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Angka)	81,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Angka)	90,5
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (%)	56,24
	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	100
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan Daerah (Angka)	79,91
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah (Angka)	96,44
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Meningkatnya Penyelenggaraan Negara yang Profesional dan Bertanggungjawab		Indeks Sistem Merit (Angka)	0,82
	Meningkatnya profesionalitas Kepegawaian ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Angka)	85,62
	Meningkatnya Kualitas kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (Angka)	81,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (Angka)	93
5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
Meningkatnya Inovasi dalam Pelaksanaan Program Pemerintahan		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	70,61
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah (Angka)	70,61
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Daerah (Angka)	4,1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Kapabilitas Inovasi (Angka)	4,1
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT			
Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Angka)	3,19
	Meningkatnya peran pengawasan, pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3
		Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Angka)	3,06
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Angka)	2,95
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat (Angka)	88,52
		Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat (Angka)	86,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SEMARANG SELATAN			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Selatan (Angka)	96,7
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Selatan (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Selatan (Angka)	74,97
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Selatan (Angka)	94,50
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Selatan (%)	90
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan (Angka)	80
7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN SEMARANG UTARA			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara		Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Utara (Angka)	92
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Utara (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Utara (Angka)	74,90
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Utara (Angka)	96,82
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Utara (%)	100
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Utara (Angka)	91
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SEMARANG BARAT			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Barat (Angka)	94,50
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Barat (Angka)	92,75
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Barat (Angka)	75,77
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Barat (Angka)	80,00
		Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Barat (%)	96,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat (Angka)	80,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN SEMARANG TIMUR			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Timur (Angka)	95
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Timur (Angka)	76,4
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Timur (Angka)	95,5
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Timur	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Timur (Angka)	90
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur (Angka)	80
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SEMARANG TENGAH			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Tengah (Angka)	91
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kecamatan Semarang Tengah (Angka)	81
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Tengah (Angka)	76,6
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Tengah (Angka)	93
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Tengah (%)	96
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah (Angka)	81
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN GUNUNG PATI			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati		Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Gunungpati (Angka)	96,79
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungpati (Angka)	78,36
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpati (Angka)	94,65
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan Gunungpati	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gunungpati (Angka)	90
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati (Angka)	80
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TUGU			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tugu (Angka)	96,00
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu (Angka)	80,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
Masyarakat di Kecamatan Tugu	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tugu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tugu (Angka)	76,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tugu (Angka)	95,10
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tugu	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tugu (Angka)	90,00
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu (Angka)	80,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN MIJEN			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Mijen		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Mijen (Angka)	96
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Mijen (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Mijen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mijen (Angka)	76,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mijen (Angka)	93,80
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Mijen	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Mijen (%)	96
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen (Angka)	80
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN GENUK			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk		Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Genuk (Angka)	96,55
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Genuk (Angka)	80,00
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Genuk	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Genuk (Angka)	77,70
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Genuk (Angka)	94,25
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Genuk	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Genuk (%)	96,00
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Genuk (Angka)	80,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gajahmungkur (Angka)	95,50
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Gajahmungkur (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gajahmungkur (Angka)	76,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur (Angka)	95,25
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gajahmungkur (%)	94
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur (Angka)	80
7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN TEMBALANG			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tembalang (Angka)	96,00
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang (Angka)	80,00
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tembalang (Angka)	76,20
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tembalang (Angka)	96,63
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tembalang	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tembalang (%)	90,00
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang (Angka)	80,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN CANDISARI			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Candisari		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Candisari (Angka)	95,18
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Candisari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Candisari (Angka)	76,57
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Candisari (Angka)	95,82
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Candisari	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Candisari (%)	90
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari (Angka)	80
7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN BANYUMANIK			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik		Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Banyumanik (Angka)	55,00
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik (Angka)	70,00
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Banyumanik (Angka)	76,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyumanik (Angka)	97,30
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Banyumanik	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Banyumanik (%)	100
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik (Angka)	85,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN NGALIYAN			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Ngaliyan (Angka)	96,00
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan (Angka)	80,00
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ngaliyan (Angka)	76,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngaliyan (Angka)	93,33
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Ngaliyan (%)	90,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET 2026
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan (Angka)	80,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN GAYAMSARI			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari		Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Gayamsari (Angka)	95
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gayamsari (Angka)	76,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gayamsari (Angka)	96
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gayamsari	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gayamsari (%)	100
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari (Angka)	80
7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN PEDURUNGAN			
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Pedurungan (Angka)	96
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kecamatan (%)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pedurungan (Angka)	76,3
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pedurungan (Angka)	93,8
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Pedurungan (%)	96
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan (Angka)	80
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan (Angka)	80
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Meningkatkannya peran masyarakat dalam demokrasi		Indeks Demokrasi (Angka)	85,36
	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) (Kasus)	0
	Meningkatnya peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Indeks Kebebasan (Angka)	82,25
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Angka)	80,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Angka)	88,50

6.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	86,97	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
	Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan non formal/kesetaraan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	
	Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	
	Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
	Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	Rasio guru terhadap murid	rasio	1:18	
		Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar	%	72,13	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
	Meningkatnya kepatuhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin	%	100	
	Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan sekolah dasar terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	%	100	
	Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan sekolah menengah pertama terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin	%	100	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	%	100	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan	%	100	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	%	83	DINAS KESEHATAN
		Angka kematian bayi	per 1000 KH	7,87	
		Persentase ibu hamil KEK	%	14	
		Prevalensi wasting balita	%	4,7	
		Indeks kesehatan lingkungan	Angka	72	

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	
	Meningkatnya penanganan kesehatan bagi lanjut usia	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	77	
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Angka <i>Incident Rate</i> (IR) HIV	per 1000 penduduk	0,21	
		<i>Treatment Success Rate</i> (TSR) TBC	%	90,5	
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	40	
	Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Persentase fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terakreditasi minimal paripurna	%	95	
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	85,5	
	Meningkatnya ketersediaan obat PKD, obat program, dan vaksin serta perbekalan di fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	86	
	Meningkatnya kualitas manajemen informasi kesehatan	Proporsi fasilitas layanan kesehatan terintegrasi SIKN	%	67,6	
	Meningkatnya kualitas pemenuhan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif di RSUD Mijen	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD Mijen terhadap penduduk Kota Semarang	%	7	
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mijen	%	82	
	Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang sesuai standar di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	%	100	
	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana prasarana RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dalam mendukung layanan kesehatan perorangan	Persentase tingkat penggunaan sarana prasarana sesuai standar	%	100	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	%	26	
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
	Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Proporsi apotek, toko obat, usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar	%	83	
		Persentase I RTP yang memenuhi ketentuan	%	78	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup	%	82	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	%	100	
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang berkualitas	%	100	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Mijen yang berkualitas	%	100	
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Mijen yang berkualitas	%	100	
	Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang	Persentase ketercapaian kinerja pelayanan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	%	100	

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase ketercapai Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	%	100	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
	Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	98,12	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob	%	98,95	
	Tersedianya dokumen perencanaan teknis sumber daya air	Persentase dokumen teknis sumber daya air yang tersusun dan dilaksanakan	%	100	
	Meningkatnya pemanfaatan ruang sungai	Persentase sungai yang termanfaatkan	%	100	
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
	Meningkatnya kualitas akses air minum aman	Persentase rumah tangga terlayani air minum aman	%	48,66	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
	Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	%	3,32	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
	Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	%	61,17	DINAS PEKERJAAN UMUM
	Tersedianya dokumen perencanaan teknis perencanaan sistem drainase	Persentase dokumen teknis sistem drainase perkotaan yang tersusun dan dilaksanakan	%	100	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
	Meningkatnya penyelenggaraan penataan dan perijinan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG	%	86	DINAS PENATAAN RUANG
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN	Persentase BGN dalam kondisi baik	%	100	
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan	Persentase reklame yang berizin	%	85,5	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
	Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,64	DINAS PEKERJAAN UMUM
	Tersedianya dokumen perencanaan teknis kebinamargaan	Persentase dokumen teknis kebinamargaan yang tersusun dan dilaksanakan	%	100	
	Meningkatnya ruang milik jalan yang dipelihara	Persentase ruang milik jalan kondisi baik yang dipelihara	%	67,88	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
	Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/tekniisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	rasio	56	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penerbitan KRK	%	92	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang berkualitas	%	100	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	%	100	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penyiapan lahan	Persentase terlaksananya kegiatan penyiapan lahan	%	85	

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penataan Ruang yang berkualitas	%	100	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penataan Ruang	%	87	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
	Meningkatnya upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun	Persentase <i>backlog</i> perumahan	%	24,12	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
	Meningkatnya rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Rumah Layak Huni	%	95,09	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Meningkatnya kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Kawasan yang Tertata	%	10	
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	%	68	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	27,75	
	Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	%	100	
	Meningkatnya kualitas penyediaan pemakaman umum	Rasio ketersediaan tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	%	0,015	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas	%	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	80	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	Meningkatnya ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani	%	100	SATPOL PP
	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	5	
	Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SOP dan layanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	81	
		Tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil penegakan perda dan perkara	%	81	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan perda dan perkara	%	41	
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi	%	100	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya pelayanan kedaruratan dan logistik bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
	Meningkatnya kualitas pencegahan kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	%	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya kesiapan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	%	100	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaan aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama	%	100	
	Meningkatnya kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	100	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satpol PP	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Satpol PP yang berkualitas	%	100	SATPOL PP
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Satpol PP	%	84	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkualitas	%	100	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang berkualitas	%	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	%	100	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
	Meningkatnya kapasitas PSKS dalam mengatasi permasalahan sosial	Persentase efektivitas penguatan pemberdayaan Sosial	%	100	DINAS SOSIAL
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase PPKS warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	DINAS SOSIAL
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	Meningkatkan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	DINAS SOSIAL
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
	Menurunnya kerentanan anak terlantar melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran	Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial	%	100	DINAS SOSIAL
	Menurunnya kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran	Persentase warga miskin yang mendapat jaminan sosial	%	100	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
	Meningkatnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pasca bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	%	100	DINAS SOSIAL
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Sosial	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas	%	100	DINAS SOSIAL
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial	%	100	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
	Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	80	DINAS TENAGA KERJA
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase produktivitas tenaga kerja	%	100	
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal	Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	%	73	DINAS TENAGA KERJA
	Meningkatnya wirausaha baru	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	70	
	Meningkatnya lowongan pekerjaan yang berkualitas	Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas	%	78	
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
	Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	89,3	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja yang berkualitas	%	100	DINAS TENAGA KERJA
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja	%	67,5	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
	Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	68,63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	0,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
	Meningkatnya ketahanan keluarga	Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	%	4,52	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100	
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	%	50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
	Meningkatnya akses pemenuhan hak-hak anak	Nilai Pemenuhan Hak Anak	angka	66,34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Nilai Perlindungan Khusus Anak	angka	89,76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
	Meningkatnya optimalisasi sumber daya ekonomi lokal dalam menunjang kemandirian pangan	Persentase kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	%	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Angka ketersediaan energi	Kkal/kapita/hari	3.065	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat	Persentase Cakupan Distribusi Pangan	%	100	
	Meningkatnya konsumsi pangan yang berkualitas	Angka konsumsi energi	kkal/kapita/hari	1.910	
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
	Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan	Persentase daerah tahan pangan	%	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
	Meningkatnya peredaran pangan yang aman, layak konsumsi dan bebas dari cemaran	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	%	93,6	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	%	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	%	92,5	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi	%	96	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah	Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah	%	50	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
	Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah	Persentase pemanfaatan aset tanah BMD	%	60	DINAS PENATAAN RUANG
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak kebijakan rencana dan program (KRP)	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Menurunnya pencemaran udara	Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara	%	100	

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
		Kontribusi penurunan Emisi GRK Kumulatif (sektor persampahan)	ton CO2eq	38.810,30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Menurunnya kerusakan lahan	Luasan areal yang terkonservasi	Ha	22,23	
	Meningkatnya cakupan informasi lingkungan hidup	Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	%	100	
	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berbasis pada data dan informasi yang valid	Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah	%	100	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
	Meningkatnya kinerja pengawasan lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	Persentase kegiatan dan atau usaha yang dilakukan pengawasan	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	%	88,69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	75,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	34,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
	Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Volume sampah masuk ke TPA per tahun	ton	308.858,56	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase pengelolaan sampah	%	99,11	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	%	90,25	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
	Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna	Persentase perekaman KTP elektronik	%	99,4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak	%	73	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
	Meningkatnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	98,45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase kepemilikan akta kematian	%	100	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	%	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	PENCATATAN SIPIL
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
	Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	%	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkualitas	%	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
	Meningkatnya kualitas proses administrasi kelurahan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Terkendalnya angka kelahiran penduduk	Age specific fertility rate/ASFR (15-19 tahun)	angka	7,2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
	Menurunnya kehamilan tidak direncanakan	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	%	14,3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS)	Demand satisfied	%	77,6	
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
	Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Indeks lansia berdaya	angka	58,66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	Angka	91,7	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas	%	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	100	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	Rasio	5,65	DINAS PERHUBUNG AN
	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan parkir on the street	Persentase pengelolaan <i>Parkir On the Street</i>	%	94	
	Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	72,99	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik fungsi kendaraan bermotor	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	%	1	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas	%	100	DINAS PERHUBUNG AN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan	%	100	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
	Meningkatnya peran komunitas teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi	Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi	%	40	DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Meningkatnya penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	%	88,01	
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	100	DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan e-government	Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)	%	100	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas	%	100	DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	%	100	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
	Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	%	55	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi sehat	%	44,1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
	Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	41,35	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
	Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	%	59,74	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (<i>Feasible</i>)	%	67	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas	%	100	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	%	90	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
	Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	%	2,5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
	Meningkatnya eksposur potensi daerah kepada calon investor	Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan	%	70	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada Bidang Perekonomian	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	
	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan pada perizinan dasar dan Bidang Pembangunan	Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	
	Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Persentase pengaduan penanaman modal dan perizinan yang ditindaklanjuti	%	95	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
	Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	%	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
	Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkualitas	%	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA					
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang terlibat dalam Kegiatan kepemudaan	%	1,29	DINAS KEPEMUDAA

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri	Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda	%	100	N DAN OLAH RAGA
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
	Meningkatnya kejuaraan olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional	%	94,67	DINAS KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah	%	36,9	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
	Meningkatnya peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	%	7,1	DINAS KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang berkualitas	%	100	DINAS KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	%	100	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
	Meningkatnya kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik	%	100	DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
	Meningkatnya perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100	DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	63,74	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	29,3	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	%	84,24	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA
		Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan	%	43,12	
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	86,78	
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	4,5	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas	%	100	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	94,98	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Angka	84,83	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	Meningkatnya layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang	Rasio	0,07	
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	%	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas	%	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan	%	100	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
	Meningkatnya ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip	%	84	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	Meningkatnya kesesuaian pengelolaan arsip	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip	%	80	
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	64,5	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	Meningkatnya penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	%	70	
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	84	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	3.201,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton/ta hun	4.120,00	DINAS PERIKANAN
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan kawasan konservasi	hektar	0,5	DINAS PERIKANAN
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
	Meningkatnya preferensi masyarakat akan konsumsi pangan bergizi berbasis ikan	Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/ka pita/t ahun	16	DINAS PERIKANAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perikanan yang berkualitas	%	100	DINAS PERIKANAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	%	100	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	8,5	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	8,5	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	35	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman pangan	ton	27.536,00	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya produksi hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan	ton	26.226,30	
	Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging	ton	32.495,63	
		Jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur	ton	8.016,73	
		Jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu	Liter	1.587,98	
	Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	%	78	
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	%	22,7	DINAS PERTANIAN
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
	Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5	DINAS PERTANIAN
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
	Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada tanaman pangan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan	%	100	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada hortikultura dan perkebunan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan	%	100	
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian	%	2	DINAS PERTANIAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pertanian	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas	%	100	DINAS PERTANIAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian	%	100	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	DINAS PERDAGANG AN
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	%	10	DINAS PERDAGANG AN
	Meningkatnya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi yang dibina	%	100	
	Meningkatnya pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang diberdayakan	%	100	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
	Meningkatnya iklim perdagangan yang stabil dan adil	Koefisien harga antar waktu	koefisi en	10±1	DINAS PERDAGANG AN
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya akses produk lokal ke pasar internasional	Nilai ekspor non migas	US\$	1.561.552.042,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
	Meningkatnya hak dan keamanan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	92,12	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
	Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi di dalam negeri	%	100	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas	%	100	DINAS PERDAGANGAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan	%	90	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
	Meningkatnya sentra IKM sebagai pusat produksi dalam mendukung perekonomian lokal	Persentase pertambahan jumlah sentra IKM	%	87	DINAS PERINDUSTRIAN
	Meningkatnya pelaku IKM yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal	Persentase pertambahan IKM	%	0,65	
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
	Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas	%	6,73	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
	Meningkatnya efisiensi integrasi sistem pengelolaan industri nasional untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan sektor industri lokal	Persentase IKM yang terdaftar di SIINas	%	2,32	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perindustrian yang berkualitas	%	100	DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perindustrian	%	90	
4 UNSUR PENDUKUNG					
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	%	100	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100	BAGIAN HUKUM
	Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Meningkatnya kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan peran pemerintah daerah pada kerangka otonomi	Tingkat efektivitas kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah	%	85	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
	Meningkatnya ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	%	82	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	angka	24,89	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
		Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	angka	24,81	
		Nilai tingkat kematangan UKPBJ	angka	40	
		Persentase capaian target dividen BUMD	%	98,5	

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada good governance	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	Angka	87,18	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR	Persentase Peningkatan Partisipasi pembiayaan CSR dari perusahaan yang tergabung dalam forum CSR	%	15	
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	%	100	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Sekretariat Daerah	Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas	%	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Indeks kematangan organisasi	Angka	42,27	BAGIAN ORGANISASI
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	%	100	BAGIAN TATA USAHA
	Meningkatnya kualitas layanan rumah tangga Sekretariat Daerah	Persentase kinerja Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah	%	100	BAGIAN RUMAH TANGGA
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas	%	100	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
	Meningkatnya kinerja keprotokolan, peliputan dan publikasi secara efektif	Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan, dan publikasi	Status	89	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas	%	100	BAGIAN KEUANGAN
4.02 SEKRETARIAT DPRD					
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	%	95,3	SEKRETARIAT DPRD
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan perundang-undangan	%	95,3	
	Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	%	81	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	%	95	SEKRETARIAT DPRD
	Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD	%	95	
5 UNSUR PENUNJANG					
5.01 PERENCANAAN					
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	nilai	44,6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	nilai	46,69	BADAN PERENCANAAN

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				PEMBANGUN AN DAERAH
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian & SDA	nilai	46,69	
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	nilai	46,69	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	%	100	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	96,83	
5.02 KEUANGAN					
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
	Meningkatnya kualitas dan ketepatan penyusunan APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	%	100	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran	Persentase Realisasi Belanja	%	93,43	
	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan	%	100	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan akuntabel	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
	Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	%	1,12	BADAN PENDAPATA N DAERAH
	Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	%	96	
	Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	%	69	
	Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	%	82	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	%	100	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	92,5	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas	%	100	BADAN PENDAPATA N DAERAH
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	%	90,25	
5.03 KEPEGAWAIAN					
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
	Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan jabatan	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	95,5	BADAN KEPEGAWAI AN,

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif	Persentase Pengembangan Karir ASN	%	95	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Meningkatnya kinerja ASN yang berkualitas	Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	%	95	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas	%	100	BADAN KEPEGAWAI AN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	%	100	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
	Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Fungsional	%	55	BADAN KEPEGAWAI AN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase ASN yang memiliki hasil diklat dengan kriteria berkualitas	%	95	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
	Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	50	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Meningkatnya penyelenggaraan inovasi daerah	Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	100	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	%	100	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	
6 UNSUR PENGAWAS					
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	%	88,2	INSPEKTORA T
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	%	88,2	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	%	88,2	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	%	88,2	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	%	88,2	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh BPK dan APIP lainnya yang ditindaklanjuti	%	88,2	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	%	100	INSPEKTORA T

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I				
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	%	100	
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	%	100	
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	%	100	
	Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	100	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat yang berkualitas	%	100	INSPEKTORA T
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat	%	100	
7 UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01 KECAMATAN					
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Timur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gunung Pati yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN GUNUNG PATI
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN TUGU
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mijen yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN MIJEN

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN GENUK
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN TEMBALANG
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Candisari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Candisari yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN CANDISARI
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN BANYUMANIK
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN NGALIYAN
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gayamsari yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN GAYAMSARI
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Pedurungan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	%	100	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	%	95	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	%	100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	%	100	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	%	100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	%	100	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gunung Pati	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	%	91	KECAMATAN GUNUNG PATI
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	%	91	KECAMATAN TUGU
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	%	100	KECAMATAN MIJEN

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	%	100	KECAMATAN GENUK
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	%	100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	%	100	KECAMATAN TEMBALANG
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	%	100	KECAMATAN CANDISARI
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	%	100	KECAMATAN BANYUMANIK
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	%	100	KECAMATAN NGALIYAN
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	%	100	KECAMATAN GAYAMSARI
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	%	100	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Selatan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan	%	100	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Utara	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Utara	%	100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Barat	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Barat	%	100	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Timur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur	%	100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah	%	100	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gunung Pati	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati	%	100	KECAMATAN GUNUNG PATI
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tugu	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu	%	100	KECAMATAN TUGU
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Mijen	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mijen	%	100	KECAMATAN MIJEN
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Genuk	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Genuk	%	100	KECAMATAN GENUK
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gajahmungkur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	%	100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	%	100	KECAMATAN TEMBALANG

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	aman dan tertib di Kecamatan Tembalang				
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Candisari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	%	100	KECAMATAN CANDISARI
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Banyumanik	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik	%	100	KECAMATAN BANYUMANIK
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Ngaliyan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngaliyan	%	100	KECAMATAN NGALIYAN
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Gayamsari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gayamsari	%	100	KECAMATAN GAYAMSARI
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Pedurungan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan	%	100	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Selatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan	%	82	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Utara	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Utara	%	82	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Barat	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Barat	%	82	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Timur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Timur	%	82	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Tengah	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	%	82	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gunung Pati	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati	%	82	KECAMATAN GUNUNG PATI
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tugu	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu	%	82	KECAMATAN TUGU
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Mijen	%	82	KECAMATAN MIJEN
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Genuk	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk	%	82	KECAMATAN GENUK
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gajahmungkur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	%	82	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tembalang	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	%	82	KECAMATAN TEMBALANG
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Candisari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	%	82	KECAMATAN CANDISARI

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Banyumanik	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik	%	82	KECAMATAN BANYUMANIK
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Ngaliyan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Ngaliyan	%	82	KECAMATAN NGALIYAN
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gayamsari	%	82	KECAMATAN GAYAMSARI
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Pedurungan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	%	82	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas	%	100	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas	%	96,67	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang berkualitas	%	100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang berkualitas	%	100	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	%	96,67	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang berkualitas	%	100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas	%	100	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunung Pati	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gunung Pati yang berkualitas	%	100	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunung Pati	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tugu yang berkualitas	%	100	KECAMATAN TUGU
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Mijen yang berkualitas	%	100	KECAMATAN MIJEN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	%	96,33	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Genuk yang berkualitas	%	100	KECAMATAN GENUK
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk	%	100	

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang berkualitas	%	100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	%	96,67	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas	%	100	KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas	%	100	KECAMATAN CANDISARI
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	%	96,67	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Banyumanik yang berkualitas	%	100	KECAMATAN BANYUMANIK
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	%	100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas	%	100	KECAMATAN NGALIYAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	%	96,67	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gayamsari yang berkualitas	%	100	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	%	92	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Pedurungan yang berkualitas	%	100	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	%	100	
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
	Meningkatnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	75,25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
	Meningkatnya kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Angka	60,25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah	Indeks Kinerja Ormas	Angka	65,3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
	Meningkatnya kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	77	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

U/ BU /P	OUTCOME	INDIKATOR	SATU AN	TARGET 2026	PD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkualitas	%	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	

6.4. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026

Program Prioritas yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 memperhatikan penggunaan indikator kinerja. Berikut ini yang merupakan indikator Kinerja Program Prioritas Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah Kota Semarang Tahun 2026

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing			Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-6,30		
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah		LPE Sektor Perdagangan dan Jasa	%	7,4		
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	%	10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya (Sport Center, Area Kuliner dan UMKM, serta Industri Kreatif dan lain-lain)
								Optimalisasi pintu masuk di Kota Semarang sebagai simpul utama yang mendukung perdagangan, jasa dan logistik.
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	63,74	Program Pengembangan Kebudayaan	Penciptaan ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi aktivitas budaya dengan pengelolaan yang berpihak pada seniman.
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	8,5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Menyelenggarakan event nasional dan internasional dengan melibatkan potensi lokal baik sumber daya manusia dan fasilitas yang ada untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara.
								Pengembangan desa wisata berbasis ekologi seperti pelestarian hutan, sungai, danau, dan pantai.
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	29,3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan kesejahteraan seniman Kota Semarang melalui bantuan ekonomi dan penyelenggaraan kegiatan apresiasi seni
			Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINas	%	6,73	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal.

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			efisien, transparan, dan terintegrasi					
			Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	angka	24,89	Program Perekonomian dan Pembangunan	Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal.
		Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto		PMTB terhadap PDRB	%	59,67		
			Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	2,5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan realisasi investasi di Kota Semarang dengan penyederhanaan regulasi investasi
								Pemberian insentif investasi
								Peningkatan angka investasi di Kota Semarang
								Digitalisasi proses perijinan dan regulasi ramah investasi
								Pelaksanaan fasilitasi promosi investasi ke pasar nasional dan internasional
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	%	10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Optimalisasi pintu masuk di Kota Semarang sebagai simpul utama yang mendukung perdagangan, jasa dan logistik
			Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	angka	24,89	Program Perekonomian dan Pembangunan	Penguatan berbagai industri dan pengadaan barang atau jasa di pemerintah daerah yang mengedepankan potensi lokal
			Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,64	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
			Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	%	96	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meringankan pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah lainnya
			Meningkatnya partisipasi perusahaan	Persentase peningkatan partisipasi pembiayaan CSR dari perusahaan	%	15	Program Perekonomian dan Pembangunan	Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			yang terlibat dalam Forum CSR	yang tergabung dalam Forum CSR				pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang
		Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa		Tingkat Inflasi	%	2,5 ±1		
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton/tahun	4120	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	3201	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian	%	22,7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan
			Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman pangan	ton	27.536	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
								Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
								Pembentukan BUMS
								Penguatan lumbung pangan dan urban farming
			Meningkatnya produksi hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan	ton	26.226,3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
								Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
								Pembentukan BUMS
								Peningkatan keterjangkauan akses pangan yang beragam dan berkualitas
			Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging	ton	32495,6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
								Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur	ton	8016,73	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
			Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu	Liter	1587,98	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
			Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing	Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	2	Program Penyuluhan Pertanian	Penguatan petani milenial
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	hektar	0,5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
			Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan
			Meningkatnya akses pangan bagi masyarakat	Persentase cakupan distribusi pangan	%	100	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah
			Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan	Persentase daerah tahan pangan	%	100	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan, dan peternak
	Meningkatnya infrastruktur yang			Angka pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis	%	0,56		

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
	berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan		Tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah	%	57,65		
			Meningkatnya kondisi jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,64	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
								Rintisan pembangunan Jalan Srandol – Sekaran
								Pembangunan Semarang Middle Ring Road
								Pengembangan Semarang Outer Ring Road
								Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
			Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	Rasio	5,65	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon
								Penyediaan layanan Bus Gratis bagi Siswa dan mahasiswa ber-KTP Kota Semarang
		Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis		Tingkat pengembangan kawasan strategis	%	52,41		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN	Persentase BGN dalam kondisi baik	%	100	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan landscape dan landmark kota, terutama di batas kota
								Pengembangan kawasan strategis sejarah dan budaya
								Pengembangan kawasan strategis ekonomi
		Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	%	50	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan riset sejarah dan budaya Kota Semarang
		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah		Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan	nilai	46,69	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Penyusunan masterplan kawasan strategis

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur & Kewilayahan			Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian			Indeks Pembangunan Manusia	Angka	86,25		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan		Indeks Kesehatan	Angka	0,915		
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Angka kematian bayi	per 1000 KH	7,87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Persentase ibu hamil KEK	%	14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Prevalensi wasting balita	%	4,7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya penurunan stunting Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna
			Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Persentase fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terakreditasi minimal paripurna	%	95	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Pemerataan layanan kesehatan di seluruh kelurahan Peningkatan pelayanan kesehatan

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
							Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	%	26	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemerataan akses fasilitas kesehatan dan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas
			Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Prevalensi wasting balita	%	4,7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Gerakan konsumsi makanan sehat dan bergizi Gerakan konsumsi makanan sehat dan bergizi
			Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	85,5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Kesehatan
			Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase IRTP yang memenuhi ketentuan	%	78	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Mendorong implementasi tanaman obat dan produksi tanaman obat yang bekerjasama dengan perusahaan farmasi nasional.
			Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah	%	36,9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penambahan zona aktivitas gratis untuk masyarakat
			Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	%	100	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penambahan zona aktivitas gratis untuk masyarakat
		Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata		Indeks Pendidikan	Angka	0,805		

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan, kekerasan dan tindak kriminal, serta menciptakan sekolah ramah anak. Penyelesaian ijazah tertahan Peningkatan mutu layanan pendidikan
			Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu Memastikan semua sekolah dasar dan menengah menerapkan disiplin ketat dan jauh dari perundungan, kekerasan dan tindak kriminal, serta menciptakan sekolah ramah anak. Peningkatan mutu layanan pendidikan Penyelesaian ijazah tertahan Beasiswa D3/D4/S1 bagi Masyarakat Miskin, Siswa Berprestasi dan Atlet
			Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu Peningkatan mutu layanan pendidikan Penyelesaian ijazah tertahan
			Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	%	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta bagi yang Kurang Mampu Peningkatan mutu layanan pendidikan

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
				berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	86,97	Program Pengelolaan Pendidikan	Menambah bantuan peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter.
			Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	Rasio guru terhadap murid	rasio	0,05417	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Memastikan tidak ada tenaga guru honorer yang memperoleh honor di bawah UMK dan memastikan adanya kesejahteraan yang lebih baik.
			Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	Program Pengembangan Kurikulum	Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Mengintegrasikan literasi kesehatan mental Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
			Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	Program Pengembangan Kurikulum	Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Mengintegrasikan literasi kesehatan mental Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
			Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di lembaga PAUD dan non formal /kesetaraan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100	Program Pengembangan Kurikulum	Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Mengintegrasikan literasi kesehatan mental Mengintegrasikan pendidikan lingkungan berkelanjutan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
			Meningkatnya kejuaraan olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan	%	94,67	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
				daerah, nasional, dan internasional			Saing Keolahragaan	
		Meningkatnya kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,25		
			Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	68,63	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
								Optimalisasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender dan perlindungan anak
								Optimalisasi pelayanan kelompok disabilitas
								Penyelenggaraan Kongres Perempuan
								Penyelenggaraan Konferensi Anak
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	%	96,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	%	96,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Kecamatan Semarang Timur					
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunungpati	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunung pati	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	%	96,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	%	96,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kecamatan Semarang Tembalang					
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	%	96,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	%	96,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	%	92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	%	95	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung pati	%	91	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	%	91	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			kemasyarakatan dalam pembangunan				Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Bimbingan Belajar dan Lembaga Pembelajaran Al-Quran Gratis yang Tersedia di Setiap Kelurahan
	Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif			Indeks pbumian pancasila dan wawasan kebangsaan (IP2WK)	Angka	85,74		
		Meningkatnya kualitas demokrasi politik		Indeks demokrasi	Angka	85,86		
			Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penambahan Penerima Dana Operasional Marbot
								Penambahan Penerima Dana Operasional Penjaga Rumah Ibadah Lainnya
								Penambahan Penerima Dana Operasional TPA
								Penambahan Penerima Dana Operasional Guru Madin dan Guru Keagamaan Lainnya
								Umrah dan Perjalanan Religi Gratis bagi Masyarakat
								Supporting penyelenggaraan MTQ tingkat nasional
			Meningkatnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	Indeks aktualisasi Pancasila	Angka	75,25	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Melindungi dan menjamin semua kelompok agama dan budaya untuk bebas menjalankan ibadah dan praktek budayanya sesuai dengan ideologi Pancasila.

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan	%	1,29	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan peran organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan
			Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri	Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda	%	100	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan peran organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah	Indeks Kinerja Ormas	Angka	65,3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan peran organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan
		Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila, serta wawasan kebangsaan		Angka kriminalitas	Kasus	1.180		
			Meningkatnya kejuaraan olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional	%	94,67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda
			Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah	%	36,9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyiapan Support System untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda
			Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Persentase cakupan layanan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	100	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Optimalisasi pemanfaatan CCTV
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	%	68	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penambahan titik lampu penerangan jalan umum
			Meningkatnya penegakan peraturan	Persentase penurunan pelanggaran peraturan	%	5	Program Peningkatan	Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Menurunnya tingkat kerentanan sosial masyarakat melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran	Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial	%	100	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan bantuan sosial yang berkeadilan
				Persentase warga miskin yang mendapat jaminan sosial	%	100		
			Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses pangan	Persentase daerah tahan pangan	%	100	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan dan peternak
								Peningkatan budaya konsumsi makanan pendamping beras
		Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB per kapita	Rp Juta	205,28		
			Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	%	67	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas UMKM dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20	Program Pengembangan UMKM	Dukungan sistem digitalisasi pemasaran UMKM dan peningkatan sinergi pemasaran melalui sinergi pemasaran melalui jejaring akademisi, pelaku dunia usaha, pemerintah, media, dan komunitas
			Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	%	55	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
			Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	%	59,74	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Penguatan peran koperasi terhadap perekonomian
								Penyediaan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional namun ingin melakukan usaha, termasuk

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
								mendorong pembentukan koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi usaha produktif, dan koperasi ritel.
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi sehat	%	44,1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Mendorong kepesertaan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	%	95	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung pati	%	91	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	%	91	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan operasional RT dan RW
		Meningkatnya akses lapangan kerja		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	5,40-5,10		
				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	70,13		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal	Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	%	73	Program Penempatan Tenaga Kerja	Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
			Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	80	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Menyediakan pusat pelatihan keterampilan gratis yang inklusif dan terintegrasi dari hulu ke hilir (link and match).

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
								Pengembangan program pelatihan kerja yang bersertifikat
			Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	89,3	Program Hubungan Industrial	Perluasan Program Kepesertaan Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan baik untuk Tenaga Kerja Formal maupun Informal
			Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	%	67	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan UMKM dan fasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM
			Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina dan meningkat omsetnya			Program Pengembangan UMKM	Peningkatan kepesertaan UMKM dan Industri Kreatif dalam kegiatan promosi
Pusat ekonomi yang lestari, berkelanjutan, dan inklusif	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat			Nilai pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota	Nilai	0,373		
		Menurunnya dampak perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,94		
				Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	ton CO2eq	858.546,65		
			Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Persentase pengelolaan sampah	%	99,11	Program Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang untuk mengolah sampah menjadi energi listrik atau refused derived fuel (RDF).
								Penguatan manajemen pengangkutan sampah
								Penambahan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah
								Peningkatan kawasan mandiri pengelolaan sampah
					%	100	Program Pengelolaan	Pengembangan Taman/Kebun/Taman Hutan Raya

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota			Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Peningkatan upaya penghijauan wilayah
			Menurunnya kerusakan lahan	Luasan areal yang terkonservasi	Ha	22,23	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan Gerakan Semarang Menanam
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	34,52	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Gerakan Semarang Bersih
								Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
								Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah
								Peningkatan Gerakan Semarang Wegah Nyampah
								Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST)
								Kolaborasi Antar Warga (Sekolah/Pramuka/Karang Taruna/Komunitas Peduli Lingkungan)
			Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	Rasio	5,65	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon
		Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan		Indeks risiko bencana	Angka	90,5 - 88,66		
			Meningkatnya kualitas pencegahan kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	%	100	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	100	Program Penanggulangan Bencana	Pengembangan sistem peringatan dini bencana di Kota Semarang
								Pemetaan risiko bencana
								Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
								Penguatan kelembagaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat
		Menurunnya kawasan banjir dan rob		Persentase kawasan banjir dan rob	%	100		
			Meningkatnya kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	98,12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin
								Normalisasi Sungai Plumbon
								Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang dan Sungai Asin
								Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu
								Normalisasi Sungai Babon
								Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen
								Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo
								Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor
								Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur)
								Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
			Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	%	61,17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan pemeliharaan saluran drainase
								Normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin
								Normalisasi Sungai Plumbon
								Normalisasi Sungai Baru, Sungai Semarang dan Sungai Asin

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
								Normalisasi Sungai Ronggolawe dan Sungai Karangayu
								Normalisasi Sungai Babon
								Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Bugen
								Normalisasi Sungai Silandak dan Tugurejo
								Normalisasi Sub-Sistem Sungai Tenggang - Sodor
								Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur)
								Pengurangan risiko bencana kebakaran, banjir, rob, dan longsor
			Meningkatnya kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	98,12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rekondisi Kartini Drain, termasuk Stasiun Pompa
				Persentase peningkatan perlindungan kawasan abrasi dan banjir rob	%	98,95	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rekondisi Kartini Drain, termasuk Stasiun Pompa
Pusat ekonomi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, humanis, dan inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90,66		
		Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	75,89		
			Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
								Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Meningkatnya penyelenggaraan riset daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	%	50	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penguatan riset dan inovasi daerah
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	nilai	44,6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)				
			Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	%	96	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meringankan pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah lainnya
			Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	%	1,12	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	%	96	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	%	69	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	%	82	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah lainnya
			Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran	Persentase realisasi belanja	%	93,43	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Digitalisasi manajemen keuangan daerah
			Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR	Persentase peningkatan partisipasi pembiayaan CSR dari perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR	%	15	Program Perekonomian dan Pembangunan	Menerapkan skema pembiayaan alternatif untuk membantu pelaksanaan program Pemerintah Kota Semarang.

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			Meningkatnya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan tertib pertanahan	Persentase penyelesaian permasalahan tanah di Kota Semarang yang terfasilitasi melalui mediasi	%	96	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Mendorong legalisasi aset produktif milik rakyat dari perampasan, pencaplokan dan akuisisi dari pihak lain
				Indeks Integritas Nasional				
			Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja I	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	%	100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah.
			Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah.
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Indeks pelayanan publik	Angka	4,52		
			Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Indeks kematangan organisasi	Angka	42,27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan)
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Membangun sistem pemerintahan yang fleksibel, gesit, dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.
			Meningkatnya kinerja ASN yang berkualitas	Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	%	95	Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia.
			Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif	Persentase ASN yang memiliki hasil diklat dengan kriteria berkualitas	%	95	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mewujudkan ASN kelas dunia.
			Meningkatnya kualitas cakupan statistik	Persentase penyelenggaraan	%	100		Pengambilan data di tingkat organisasi pemerintahan terkecil

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
			sektoral yang terintegrasi	statistik sektoral yang memenuhi kaidah statistik			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Integrasi sistem data Pengambilan keputusan berdasarkan sistem data yang terbangun
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82,58		
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	%	95	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Pengembangan Musrenbang Tematik Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Pengembangan Musrenbang Tematik Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Barat	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Pengembangan Musrenbang Tematik Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Pengembangan Musrenbang Tematik Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Pengembangan Musrenbang Tematik Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung pati	%	91	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Pengembangan Musrenbang Tematik Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	%	91	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Pengembangan Musrenbang Tematik

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Mijen	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
								Pengembangan Musrenbang Tematik
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
								Pengembangan Musrenbang Tematik
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
								Pengembangan Musrenbang Tematik
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi

POKOK VISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME PROGRAM (4)	INDIKATOR (5)	SATUAN (6)	TARGET 2026 (7)	PROGRAM (NOMENKLATUR) (8)	PROGRAM PRIORITAS (9)
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
								Pengembangan Musrenbang Tematik
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
								Pengembangan Musrenbang Tematik
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
								Pengembangan Musrenbang Tematik
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
								Pengembangan Musrenbang Tematik

POKOK VISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gayamsari	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
								Pengembangan Musrenbang Tematik
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
								Pengembangan Musrenbang Tematik
								Peningkatan partisipasi Masyarakat di Tingkat organisasi pemerintahan terkecil
								Membentuk wadah kelembagaan berbasis kolaborasi
								Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK
			Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	%	100	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan peran RT, RW, PKK, dan LPMK

6.5. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, diperlukan ukuran keberhasilan yang terukur, sistematis, dan berbasis pada data. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan daerah dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah Indikator Kinerja Daerah (IKD). Melalui IKD, dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek kuantitas belanja atau *output*, tetapi juga dari sejauh mana hasil kegiatan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Rincian Indikator Kinerja Daerah beserta Indikator Kinerja Kunci dan target pencapaiannya di Tahun 2026 dapat dilihat di Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	92,9
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	3,92
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,94
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,96
5	Indeks Risiko Bencana	Angka	90,5 - 88,66
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,35
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-6,30
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,7
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp	205,28
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,40-5,10
5	Rasio Gini	Angka	0,402
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	86,25
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,52
8	Prevalensi Stunting	%	8,88
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,17
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,64
11	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp/thn	17.064
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	71,5
13	Indeks Perlindungan Anak	Angka	71,38
14	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	70,4
15	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,13
16	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	67,56
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka Ketergantungan	%	40,99
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	29,52
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,52
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,13
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	70,61
6	Angka pemenuhan kinerja sistem infrastruktur strategis	%	0,56
7	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,84
8	Tingkat Inflasi	%	2,5 ±1
9	Kontribusi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	%	3,45
10	Total Kredit/PDRB	%	43,47
11	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	60,87
12	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% Bawah)	%	17,54
13	Nilai Ekspor	US\$	1.604.652.574,79
14	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis	%	55,06
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,03
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital	Angka	4,04
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,52
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,25

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Indeks Demokrasi	Angka	85,86
6	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	76
7	Angka Kriminalitas	Angka	1.180
INDIKATOR KINERJA KUNCI			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)		
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	80,13
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	71,48
6	Angka Partisipasi Kasar		
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	98,62
	b. SD/MI	%	100
	c. SLTP/MTs	%	100
7	Angka Partisipasi Murni :		
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	92,01
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	86,76
8	Angka Putus Sekolah:		
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01
9	Angka Kelulusan:		
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
10	Angka Melanjutkan (AM):		
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100
11	Fasilitas Pendidikan:		
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	97,33
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,41
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata-rata		
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:18:28
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:15
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:15:32
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
	a. Jenjang PAUD	%	65,3
	b. Jenjang SD/MI	%	97,3
	c. Jenjang SMP/MTs	%	96,75
12	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97
13	Rerata Skor Literasi Membaca SD/Sederajat	%	80,2
14	Rerata Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	83,07
15	Rerata Skor Numerasi SD/Sederajat	%	68,4
16	Rerata Skor Numerasi SMP/Sederajat	%	77,6
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,17
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,64
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21,69
20	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	98,21
21	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan mengarusutamakan kebudayaan	%	25,2
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,41
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	100
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	68,96
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/ 1000 KH	7,87
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	8,97
18	Net Death Rate (NDR) RSUD Mijen	Permil	33
19	Net Death Rate (NDR) RSUD KRMT Wongsonegoro	Permil	27,5
20	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	85
21	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13
22	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	8,88
23	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90,5
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	86,5
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 4 jiwa)	%	100
3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	100
4	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	95,21
5	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	86
6	Persentase luas sawah beririgasi	%	76,65
7	Persentase areal kawasan kumuh	%	90
8	Kesesuaian tata ruang	%	100
9	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	54,84
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100
3	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	10
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1769
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	27,75
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/ 1000 penduduk	40
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16,91
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	58,25
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	72
3	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,09
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100
5	Persentase warga Negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100
	a. Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100
	b. Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	70,87
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	80,5
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	56,83
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,24
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	69,2
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	35,9
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78,71
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	71,38
7	Rasio KDRT	Rasio	0,045
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	107,75
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,2
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	93,6
4	Tingkat Keamanan Pangan	%	88,5
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	100
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,94
	a. Indeks Kualitas Air	Angka	57,81
	b. Indeks Kualitas Udara	Angka	82,64
	c. Indeks Kualitas Lahan	Angka	44,44
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:		
	a. Persentase pengurangan timbulan sampah	%	31,57
	b. Persentase penanganan timbulan sampah	%	68,43
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	88,69
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	%	36,55
5	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	30,75
6	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	TonCO2Eq	858.546,65
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL		
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	74
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,5
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100
5	Perekaman KTP elektronik	%	99,4
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Persentase LPM aktif	%	100
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Angka	2
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,42
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	77,76
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
1	Proporsi penduduk pengguna angkutan umum	%	1,106
2	Persentase ruas jalan rawan macet	%	36,15
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	77,2
4	Tingkat Fatalitas Kecelakaan	%	11,18
5	Rasio Konektivitas	%	0,9
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	96,28
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	87,2
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
1	Persentase koperasi aktif	%	78,05
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	17,64
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	64,23
4	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Angka	8.500
5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,86
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	610
2	Persentase peningkatan investasi	%	0,75%
3	Nilai investasi	Juta Rp	9.974.250
4	Persentase jumlah izin terbit sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	98,77
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	715
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,97
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,044
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	100
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	133,21
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	524
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	700
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	14
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	46,8
6	Tingkat kearifan budaya lokal	%	90,87
7	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	75,59
8	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Kumulatif)	Orang	6.645.650
9	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	70,95
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	71
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	84,83
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	73,1
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	80
2	Indeks Lembaga Kearsipan Daerah	Angka	76
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	7.321
2	Konsumsi ikan Masyarakat	Kg/Kapita/thn	16
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/ tahun	17.887,95
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	8,5
2	Tingkat hunian akomodasi	%	57,67
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	41,58
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,4
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/tahun	7,04
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5
3	Produktivitas Sentra unggulan pertanian	Kawasan	8
4	Jumlah kawasan/kelurahan yang melaksanakan <i>integrated urban farming</i> di wilayahnya	Kelurahan	64
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	92,12
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	90
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92,53
5	Disparitas Harga	%	±10,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	3,72
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	22,35
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	37,5
4	UNSUR PENDUKUNG		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90,66
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,7
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	75,89
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,71
5	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	6,04
6	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,83
7	Return on Asset (RoA) BUMD	%	5,18
4.02	SEKRETARIAT DPRD		
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100
5	UNSUR PENUNJANG		
5.01	PERENCANAAN		
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100
5.02	KEUANGAN		
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	56,24
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	3,17
3	Opini BPK	Opini	WTP
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,26
5.03	KEPEGAWAIAN		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	85,62

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	355,92
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,88
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	76,46
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	97,79
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	100
3	Kapabilitas Inovasi	Angka	4,1
6	UNSUR PENGAWAS		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		
1	Managemen Risiko Indeks	Nilai	3,06
2	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	3,19
3	Kapabilitas APIP	Level	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN		
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	98,49
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Indeks Demokrasi	Angka	85,86
2	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Angka	84,7

6.6. INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terhadap pencapaian jangka panjang daerah dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, diperlukan ukuran keberhasilan yang terukur, sistematis, dan berbasis pada data. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan daerah dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah Indikator Utama Pembangunan (IUP). Melalui IUP, dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek kuantitas belanja atau *output*, tetapi juga dari sejauh mana hasil kegiatan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Rincian Indikator Utama Pembangunan Tahun 2026 dapat dilihat di Tabel 6.4.

Tabel 6.5
Target Indikator Utama Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,52	Dinas Kesehatan
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	8,88	Dinas Kesehatan
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,5	Dinas Kesehatan
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,5	Dinas Kesehatan
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100	Dinas Kesehatan
7	Rerata Skor Literasi Membaca SD/Sederajat	%	80,2	Dinas Pendidikan
8	Rerata Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	83,07	Dinas Pendidikan
9	Rerata Skor Numerasi SD/Sederajat	%	68,4	Dinas Pendidikan
10	Rerata Skor Numerasi SMP/Sederajat	%	77,6	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,17	Dinas Pendidikan
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,64	Dinas Pendidikan
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21,69	Dinas Pendidikan
14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	98,21	Dinas Pendidikan
15	Tingkat Kemiskinan	%	3,86-3,74	BAPPEDA
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	56,83	Dinas Tenaga Kerja
17	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% Bawah)	%	17,54	BAPPEDA
18	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan mengarusutamakan kebudayaan	%	25,2	Dinas Pendidikan
19	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	75,59	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Kumulatif)	Orang	6.645.650	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	70,95	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Angka	84,83	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	29,52	Dinas Perindustrian
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	41,58	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,86	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
28	Return on Asset (ROA) BUMD	%	5,18	Bag. Perekonomian
29	Kapabilitas Inovasi	Angka	4,1	Brida
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,40 - 5,10	Dinas Tenaga Kerja
31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,24	Dinas Tenaga Kerja
32	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa dalam PDRB	%	29,06	Bappeda
33	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	87,2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
34	Disparitas Harga	%	±10,00	Dinas Perdagangan
35	PMTB (% PDRB)	%	59,67	DPM PTSP
36	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
37	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota	%	93,62	Dinas Pekerjaan Umum
38	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	73	Dinas Perhubungan
39	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Rp Juta	205,28	Bappeda
40	Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	%	57,65	Dinas Pekerjaan Umum
41	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,26	Badan Pendapatan Daerah
42	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	60,87	Bag. Perekonomian
43	Total Kredit/PDRB	%	43,47	Bag. Perekonomian
44	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16,91	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	64,94	Dinas Lingkungan Hidup
46	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,96	Dinas Lingkungan Hidup
47	Persentase Kawasan Banjir dan Rob	%	2,97	Dinas Pekerjaan Umum
48	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis	%	55,06	Bappeda
49	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,13	DP3A
50	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	68,70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
51	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	3,92	Dinas Ketahanan Pangan
52	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	92,9	Dinas Ketahanan Pangan
53	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	58,25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	54,84	Dinas Pekerjaan Umum

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55	Indeks Risiko Bencana	Angka	90,5 - 88,66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
56	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	858546,65	Dinas Lingkungan Hidup
57	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90,66	Bag. Organisasi
58	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,03	Bag. Hukum
59	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital	Angka	4,04	Dinas Komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2026 sebagai langkah awal pemenuhan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Tahun 2026 ini merupakan bagian tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, sekaligus merupakan tahun penguatan landasan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RKPD Kota Semarang tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 beserta program strategis nasional yang ditetapkan, serta program kebijakan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Selain memperhatikan visi dan misi pembangunan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, isu strategis, dan prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional, penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kesesuaian dengan dokumen perencanaan, urgensi penanganan isu, dan kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

RKPD tahun 2026 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsive, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan prioritas pembangunan mengikuti prinsip *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. RKPD 2026 disusun melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 juga dilakukan dengan melihat keselarasannya dengan prioritas pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan pada tingkat nasional.

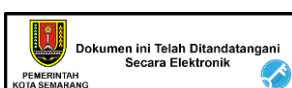
Dengan mengambil tema “Penguatan Ketahanan Pangan Kota Yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dokumen RKPD Kota Semarang tahun 2026 yang telah disusun ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026. Sinergitas seluruh komponen masyarakat untuk saling bergerak bersama diharapkan agar dapat bersama-sama meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut diharapkan akan mendukung kinerja pembangunan Kota Semarang dapat semakin meningkat dan cita-cita pembangunan Kota Semarang dapat tercapai dengan baik.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001